

BUILDING RESILIENCE, DRIVING INNOVATION

Membangun Ketangguhan, Mendorong Inovasi



2020

Annual Report
Laporan Tahunan



2020

BUILDING RESILIENCE, DRIVING INNOVATION

Membangun Ketangguhan, Mendorong Inovasi

Dampak pandemi COVID-19 telah membuat Perseroan berada di titik nadirnya. Meski demikian, Perseroan mampu bangkit dan beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan baru sekaligus membangun ketangguhan bisnis melalui beragam inovasi. Sepanjang 2020, Perseroan tetap tangguh dalam *Governance, Risk, and Compliance*, Tangguh memberikan layanan operasi terbaik di tengah pandemi COVID-19, tetap melanjutkan pekerjaan konstruksi Fase 2A MRT Jakarta, dan menjaga kinerja keuangan dengan mempertahankan kondisi finansial. Selain itu, di tahun ini, Perseroan melahirkan serangkaian inovasi dengan membentuk anak usaha dan perusahaan patungan dengan tujuan membangun integrasi sistem transportasi Jakarta yang efektif. Tidak hanya sekedar inisiatif biasa, Perseroan berkembang menjadi perusahaan induk yang bersifat

Due to the impacts of the COVID-19 pandemic, the Corporation reached its nadir. However, from rock bottom, there is no way to go but up, and the Corporation managed to adapt to the new situation and challenges and establish business resiliency through innovations. Throughout 2020, the Corporation remained strong in terms of Governance, Risk, and Compliance, strong in providing the best-in-class operational services amidst the pandemic, strong in carrying out the construction works of Phase 2A of MRT Jakarta, and strong in maintaining the financial condition. Also, the year marks various innovations from the Corporation, including the establishment of a subsidiary and joint ventures as efforts to realise effective integration of the transportation system in Jakarta. The Corporation has grown beyond a regular corporation, as

strategik (*strategic holding*) bagi tiga anak usahanya. Perseroan berkembang memainkan peran sebagai integrator dari transportasi berbasis rel, integrator sistem pembayaran, dan pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), dalam rangka menjadi pendorong proses regenerasi dan perubahan wajah kota.

"*Setting the tone*" dilakukan Perseroan dengan membentuk tiga anak usaha tersebut, yaitu Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), Integrasi Transit Jakarta (ITJ), dan Jaklingko Indonesia. Meskipun di tengah krisis pandemi COVID-19, Perseroan tetap menjalankan tugas khusus dalam mewujudkan visi pemerintah menjadikan integrasi transportasi publik sebagai orientasi pembangunan kota pada masa depan. MITJ akan berperan sebagai pengelola transportasi perkeretaapian terintegrasi dan kawasan berorientasi transit di seluruh Jabodetabek. ITJ akan memainkan fungsi dan mandat Perseroan dengan mewujudkan kawasan berorientasi transit yang berkualitas dan merubah lanskap area di sekitar stasiun MRT Jakarta. Dan, Jaklingko akan mewujudkan sistem pembayaran transportasi publik terintegrasi. Pembentukan anak usaha ini akan memainkan peran penting dalam perubahan pengembangan kota dan manusia di dalamnya. Seluruh capaian tidak luput dihasilkan dari terciptanya kolaborasi Perseroan dengan berbagai Pihak. Perseroan terus berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang merupakan bentuk nyata Perseroan mengemban peran sebagai lokomotif kolaborasi dan pendorong perubahan.

Pencapaian-pencapaian Perseroan tersebut dapat terwujud melalui konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Perseroan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menebar nilai-nilai bisnis yang berintegritas. Perseroan tetap memberikan performa operasional terbaik dengan memastikan penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja setiap pekerja dan pengguna jasa melalui keandalan sistem operasi, serta penerapan protokol kesehatan melalui inovasi Protokol BANGKIT. Perseroan terus berinovasi dan mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta menjalin kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha rintisan melalui program *Accelerator* dan *Incubator*.

Pada masa depan, Perseroan akan terus berinovasi demi mewujudkan ketangguhan bisnis dan berperan dalam pemulihan ekonomi nasional dengan prinsip keberlanjutan. Sebagai katalis perubahan wajah ibu kota, Perseroan akan mencapai keunggulan berkesinambungan dengan mengembangkan sistem dan jaringan transit perkotaan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.

the Corporation develops to be a strategic holding for the subsidiaries. The Corporation plays a crucial role in integrating railway transportation, integrating payment system, and developing Transit-Oriented Development (TOD), which enables the Corporation to drive rejuvenation and changes of the city image.

"Setting the tone" is carried out by the Corporation through the establishment of three subsidiaries, namely Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), Integrasi Transit Jakarta (ITJ), and Jaklingko Indonesia. Despite the crisis arising from the pandemic, the Corporation remained to carry out the special duty in realising the vision of the government to focus on the integration of public transportation in the urban development for the future. MITJ will manage integrated railway transportation as well as Transit-Oriented Development areas across Jabodetabek. ITJ will carry out the functions and mandates from the Corporation by realising state-of-the-art Transit-Oriented Development areas and rejuvenating the landscape area around the stations of MRT Jakarta. And, Jaklingko will realise an integrated public transportation payment system. The establishment of the subsidiaries plays a crucial role in the shift of urban development and its citizens. All achievements are due in part to the collaboration between the Corporation and various Parties. The Corporation maintain its commitment to welcome collaboration to realise the role of the Corporation as the locomotive of collaboration and change agent.

Such achievements were realised thanks to the consistent implementation of Good Corporate Governance. The Corporation managed to obtain certification of ISO 37001 Anti-Bribery Management System and spreading business values with integrity. The Corporation still delivers the best operational performance by ensuring the implementation of occupational safety and health for each employee and passenger through operational system reliability and implementation of health protocols through BANGKIT Protocol. The Corporation drives innovations as well as the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and builds collaboration with start-up players through Accelerator and Incubator programs.

In the future, the Corporation will remain to innovate to realise business resiliency and take a crucial role in the national economic recovery in line with sustainability principles. As a catalyst in transforming the image of the capital city, the Corporation will reach sustainable excellence through the development of safe, comfortable, and reliable urban transit systems and networks.

PENCAPAIAN

Achievement



Performa Ketepatan Waktu
On Time Performance

99,97%

Waktu Kedatangan
Arriving Time

99,98%

Waktu Berhenti
Dwelling Time

99,98%

Waktu Tempuh
Traveling Time



9.926.513

Jumlah Pengguna Jasa
Passengers Total



86,64

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa
Customer Satisfaction Index



Angka Kecelakaan Nihil
Zero Accident



2,34%

Progres Konstruksi Fase 2A
Construction Progress Phase 2A



Penghargaan
Award

Inovasi Pembelian
Tiket Berbasis Aplikasi
Melalui QR Code
(QR Code Ticketing)
Innovation App-based
QR Code Ticketing



Pendapatan Non-Farebox
Non-Farebox Revenue

84,32%

2020

90,13

Penilaian GCG oleh BPKP
GCG Assessment by Finance Development Supervisory Agency (BPKP)

ISO 37001

Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Sertifikat | Certificate

3,73

Tingkat Kematangan Risiko
Risk Maturity Level

(dari skala 5 | from scale 5)

7,69

Level Maturitas Manajemen Pengetahuan
Knowledge Management Maturity Level

dari skala 10 | from scale 10



15

Tenant UMKM
MSME Tenant

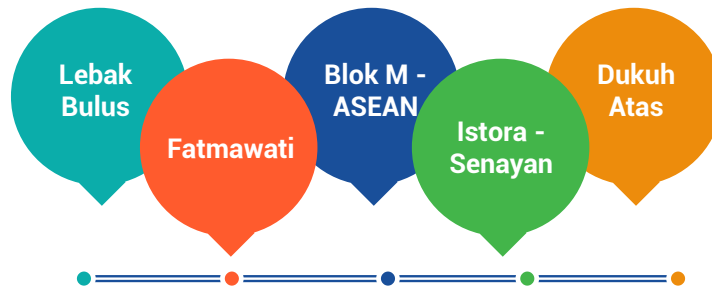
Kolaborasi dengan Perusahaan Startup
Collaboration between MRT Jakarta and Startup Companies

9 startup
MRTJ Accel

4 startup
MRTJ Star Track Incubator

5 Kawasan
Areas

Panduan Rancang Kota
Urban Design Guidelines



Menjadi Master Integrator
Transportasi Jakarta

MRT Jakarta as the Master of
Transportation Integrator





Transformasi Bisnis “Beyond Normal” Transforming Business Beyond Normal

2020 adalah tahun penuh perjuangan bagi warga dunia, tidak terkecuali PT MRT Jakarta (Persero). Indonesia mengalami pukulan hebat akibat resesi ekonomi yang berkorelasi dengan krisis kesehatan, dimana Jakarta merupakan episentrum penyebaran COVID-19. Ekonomi negara yang berkontraksi mengakibatkan kapasitas fiskal dan pemerintah juga menurun sampai dengan 50%. Bidang transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah, bahkan sejumlah perusahaan transportasi gulung tikar. Tidak sedikit yang harus mengurangi jumlah karyawan hingga merubah model bisnis untuk tetap bisa bertahan. Hingga saat ini, Perseroan masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19, membangun ketangguhan dengan melakukan berbagai inovasi.

Di tengah situasi krisis, banyak tantangan yang dihadapi Perseroan. Pengguna jasa turun secara drastis sejak Maret 2020, dan target tahun 2020 untuk mencapai 100.000 pengguna jasa per hari tidak pernah tercapai. Rata-rata pengguna jasa sepanjang tahun 2020 menurun drastis menjadi 27.000 pengguna jasa per hari. Di sisi lain, pembangunan konstruksi MRT Fase 2 juga mengalami perlambatan, target penyelesaian konstruksi Fase 2A (Bundaran HI - Kota) dibagi menjadi 2 segmen, yaitu Segmen-1 (Bundaran HI - Harmoni) pada 2025 dan Segmen-2 (Harmoni - Kota) pada 2027.

Di tengah tantangan yang dihadapi, Perseroan telah membuktikan dirinya sebagai perusahaan yang sukses menjalankan sejumlah transformasi. Konsep transformasi yang diusung oleh Perseroan adalah: “Transforming Business Beyond Normal”, atau melakukan transformasi bisnis diluar kenormalan. Tujuannya adalah agar Perseroan dapat *survive*, bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan (*revive and grow sustainably*) dalam tatanan kenormalan baru.

Transformasi bisnis *beyond normal* meliputi tiga hal. Pertama *Beyond Ridership* dengan melakukan pelayanan *customer* yang tidak hanya fokus pada jumlah pengguna jasa, namun lebih luas pada aspek *lifestyle* atau gaya hidup yang mengedepankan kepuasan pelanggan dalam konteks yang seluas-luasnya, termasuk keamanan dari penyebaran COVID-19. Dengan ini, pendapatan korporasi dapat digandakan dari aspek non-tiket (*non farebox*). Lalu, *Beyond Physical Mobility* dengan melakukan pelayanan tidak hanya fokus kepada orang-orang yang menggunakan

2020 was a challenging year for everyone on the planet, including PT MRT Jakarta (Persero). Indonesia took a serious hit from the economic recession associated with a health crisis, with Jakarta as the epicentre of COVID-19 transmission. The contracted national economy led to the decrease of fiscal and government capacity up to 50%. The Transportation sector is one of the most impacted sectors that caused various corporations to declare bankruptcy. Several corporations even had to reduce the number of employees and change the business model to remain on the field. As of now, the Corporation still fights against the COVID-19 pandemic, building resilience by making various innovations.

The Corporation faced various challenges amidst the crisis. The drastic drop in passengers since March 2020 caused the 2020 target of 100,000 daily passengers to be unattainable. The average daily passengers in 2020 sharply dropped to 27,000 daily passengers. On the other side, the Phase 2 construction of MRT underwent postponement, the target for completion of Phase 2A construction (Bundaran HI - Kota) is divided into 2 segments, namely Segment-1 (Bundaran HI - Harmoni) in 2025 and Segment-2 (Harmoni - Kota) in 2027.

In the midst of the challenges, the Corporation has proven itself to successfully carry out transformations. The concept of transformation adopted by the Corporation is “Transforming Business Beyond Normal”. The objective is for the Corporation to survive, revive, and grow sustainability in the new normal.

Transforming business beyond normal covers three aspects. The first aspect is “Beyond Ridership”, by providing services to the customers while not only focusing on the number of passengers, but also focuses on the wider aspects such as lifestyle and prioritises customer satisfaction to the widest extent, including safety from COVID-19 transmission. Therefore, the Corporate revenue from non-farebox revenues can be doubled. Then, “Beyond Physical Mobility” that seeks to deliver services not only to the passengers of Ratangga, but also to the public that are not using MRT Jakarta

Ratangga namun juga kepada masyarakat pengguna yang tidak sedang menggunakan MRT Jakarta. Kombinasi antara layanan MRT Jakarta yang dilakukan secara fisik dan layanan secara digital menjadi kunci, dan ini kita lakukan dengan menjadikan MRT sebagai *platform* baik dalam pengertian fisik maupun digital. Terakhir, *Beyond Transport Network* dengan melakukan pengembangan jaringan, MRT Jakarta tidak hanya fokus pada memperpanjang jalur layanan Ratangga, namun dilaksanakan bersama dengan membangun/meregenerasi kota pada sepanjang koridor MRT Jakarta. Dengan demikian, MRT Jakarta menjadi *backbone* transformasi kota yang sedang berubah dari *Car-Oriented Development* menjadi *Transit-Oriented Development*.

Dengan menerapkan transformasi bisnis tersebut, meskipun di tengah krisis sejumlah prestasi tetap dapat diraih baik dari aspek tata kelola, aspek operasi, konstruksi, serta bisnis. Layanan operasi Ratangga tetap terjaga kualitasnya untuk tetap berstandar internasional. Ketepatan waktu dapat tetap terjaga, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan operasi tetap terjaga baik. Indeks kepuasan pelanggan pun melewati target diatas 86. Di bidang konstruksi, Perseroan tetap memacu paket-paket yang sudah berkontrak (CP201), dan mendorong percepatan pengadaan untuk paket-paket lainnya. Di bidang pengembangan bisnis, Perseroan masih mencapai target pendapatan non-tiket yang mencapai Rp382.672 juta.

Perseroan menyikapi situasi krisis karena pandemi COVID-19 dengan melakukan respon tanggap darurat, kemudian dilakukan penjagaan keberlangsungan fungsi bisnis, baru kemudian memasuki tahap pemulihan bisnis. Fokus respon tanggap darurat adalah proteksi pekerja; proteksi operasi dan perawatan; serta proteksi terhadap bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip *business continuity management* (BCM). Manajemen keberlanjutan bisnis dijalankan dengan baik, dan dievaluasi secara rutin lewat mekanisme *Crisis Management Meeting*. Ini memungkinkan Perseroan mengelola krisis ini dengan efektif.

Secara keseluruhan, di tahun 2020, Perseroan berhasil menjalankan mandat utamanya "Bangun, Operasikan dan Kembangkan (BOK)" dengan melakukan upaya ekspansi peran strategis dalam konteks pengembangan integrasi sistem transportasi Jakarta. Semua dilakukan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, dan strategi keberlanjutan bisnis demi mengatasi badai krisis yang menghantam secara luar biasa.

services. The combination between physical and digital services is the key factor that is implemented by creating MRT as a platform in terms of physical and digital sense. The last aspect is "Beyond Transport Network", that network development does not only focus on extending Ratangga service lines, but also developing/rejuvenating the city along the MRT Jakarta corridor. Thus, MRT Jakarta becomes a backbone of urban transformation that is shifting from Car-Oriented Development to Transit-Oriented Development.

By implementing business transportation, even amidst the crisis various achievements still can be reached in terms of governance, operations, constructions, and business. Ratangga operational service quality is maintained to conform with the international standards. Punctuality and operational safety, comfort, and health are well maintained. The Customer satisfaction index passed the target of over 86 points. In terms of construction, the Corporation still drives the contracted packages (CP201) and encourages to expedite procurement of other packages. In terms of business development, the Corporation achieved the target of non-farebox revenue reaching IDR382,672million.

The Corporation acts in response to the critical situation due to the COVID-19 pandemic by carrying out an emergency response followed up with the preservation of business process continuation, continued by a business recovery phase. The focus of emergency response covers workers protection, operational and maintenance protection, and business protection through the implementation of business continuity management (BCM). Business continuity management is carried out well and is frequently evaluated through Crisis Management Meeting mechanism. This enables the Corporation in managing the crisis effectively.

Overall in 2020, the Corporation managed to execute its core mandate of "Construct, Operate, and Develop (BOK)" by expanding the strategic role in the context of the development of transportation system integration in Jakarta. It is carried out by prioritising Good Corporate Governance and business continuity strategies to cope with the crisis that hits the Corporation.



Memberikan Pelayanan Terbaik di Masa Pandemi COVID-19

Maintaining the Best Service Amidst COVID-19 Pandemic

Di tengah pandemi COVID-19, MRT Jakarta tetap hadir melayani mobilitas warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Pelayanan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama penerapan PSBB, MRT Jakarta beroperasi dari pukul 05.00 - 22.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengguna jasa, yakni 62-67 orang dalam satu kereta. Total jumlah pengguna jasa yang diangkut selama tahun 2020 mencapai 9.926.513 pengguna jasa.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan mampu mempertahankan rata-rata ketepatan waktu kedatangan pada 99,97%, ketepatan waktu berhenti di stasiun pada 99,98% dan ketepatan waktu tempuh kereta per lintas pada 99,98%.

Selain itu, Perseroan juga berfokus terhadap keselamatan dan kesehatan baik pengguna jasa ataupun karyawan yang bekerja di lingkungan MRT Jakarta dari paparan virus COVID-19. Upaya yang dilakukan Perseroan untuk mengendalikan bahaya penularan COVID-19 dengan menerapkan Protokol BANGKIT (Bersih, Aman, Nyaman, Go Green, Kolaborasi, Inovasi, dan Tata Kelola yang Baik) di seluruh area MRT Jakarta. Protokol tersebut diciptakan guna menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan seluruh pengguna jasa dan karyawan MRT Jakarta.

Amidst the COVID-19 pandemic, MRT Jakarta remains to serve the mobility of the people of DKI Jakarta and the surrounding areas. The service is carried out by implementing strict health protocols in compliance with the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) by the Government of DKI Jakarta Province. During the implementation of PSBB, MRT Jakarta operates from 05.00 to 22.00 Western Indonesian Time, while limiting the number of passengers to be 62-67 passengers on a train. The total number of passengers served in 2020 reached 9,926,513 passengers.

In 2020, the Corporation was able to maintain the average arriving time punctuality at 99.97%, dwelling time punctuality at 99.98%, and travelling time punctuality at 99.98%.

Also, the Corporation focuses on the safety and health of passengers and employees working in the environment of MRT Jakarta against the COVID-19 virus. The Corporation carried out various efforts to mitigate the risk of COVID-19 transmission by implementing BANGKIT (Clean, Safe, Comfortable, Go Green, Collaboration, Innovation, and Good Governance) Protocol in all MRT Jakarta areas. The protocol was established to maintain the safety, health, and security of all passengers and employees of MRT Jakarta.



Penerapan Protokol BANGKIT
Implementation of BANGKIT Protocol

Berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan Perseroan dalam melaksanakan Protokol BANGKIT, di antaranya:

1. Pembatasan jumlah pengguna jasa di dalam kereta;
2. Pengecekan suhu menggunakan *thermal scanner* saat memasuki stasiun;
3. Kewajiban menggunakan masker di lingkungan MRT Jakarta (stasiun dan kereta);
4. Penyediaan *hand sanitizer* di seluruh stasiun MRT Jakarta;
5. Penonaktifan sementara penggunaan loket di stasiun MRT Jakarta;
6. Pengguna jasa wajib duduk/berdiri pada tempat yang sudah diberikan tanda;
7. Pelarangan sementara berkomunikasi di dalam kereta.

Selain itu, Perseroan juga konsisten selalu menjaga kualitas kebersihan kereta dari paparan virus COVID-19 dengan membersihkan kereta dengan penyemprotan disinfektan sebanyak 3 (tiga) kali sehari. Dengan diterapkannya berbagai langkah yang tertuang dalam Protokol BANGKIT, pengguna jasa tetap aman dan nyaman dalam mendapatkan kualitas layanan yang optimal tanpa mengabaikan protokol kesehatan.



Various policies were issued by the Corporation to implement BANGKIT Protocol, including:

1. *Limiting the number of passengers inside the train;*
2. *Checking the temperature using thermal scanner upon entering the stations;*
3. *An obligation to wear masks within the premises of MRT Jakarta (stations and trains);*
4. *Providing hand sanitisers in all MRT Jakarta stations;*
5. *Deactivating ticket counters at MRT Jakarta stations temporarily;*
6. *Obligating passengers to sit/stand at designated marked areas;*
7. *Forbidding communication inside the train temporarily.*

Also, the Corporation consistently maintains the quality of train hygiene against exposure to the COVID-19 virus by cleaning the train with disinfectant 3 (three) times a day. With such efforts carried out based on the BANGKIT Protocol, passengers remain to be safe and comfortable in experiencing optimal services without disregarding health protocols.



Memulai Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A

Starting MRT Jakarta Phase 2A Development

Pada tahun 2019, tepatnya pada 24 Maret 2019, MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) resmi beroperasi. Perseroan kemudian memulai pengerjaan proyek pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) dengan nilai investasi Rp22,5 triliun dengan pembangunan dinding gardu induk bawah tanah di Kawasan Taman Medan Merdeka.

Pada tahun 2020, Perseroan melanjutkan proses pengadaan dan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Ancol Barat). Pada tanggal 15 Juni 2020, kegiatan konstruksi dilanjutkan dengan paket pekerjaan sipil pertama, yaitu konstruksi jalur bawah tanah sepanjang 2,7 km dari Bundaran HI - Harmoni, serta konstruksi Stasiun Thamrin dan Monas. MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota) ditargetkan untuk beroperasi pada dua tahap, yaitu penyelesaian tahap pertama dari Bundaran HI - Harmoni pada Maret 2025, serta penyelesaian tahap kedua dari Harmoni - Kota pada tahun 2027. MRT Jakarta Fase 2A seluruhnya berada di bawah tanah dan didukung sistem persinyalan Kendali Kereta Berbasis Komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis/Automated Train

On March 24, 2019, Phase 1 of MRT Jakarta (Lebak Bulus – Bundaran HI) officially started to operate. The Corporation started the construction of Phase 2 MRT (Bundaran HI - Ancol Barat) with an investment value of IDR22.5 trillion, with the construction of a diaphragm wall for the MRT underground substation in the Taman Medan Merdeka Area.

In 2020, the Corporation will continue the procurement and construction process of MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI - Ancol Barat). On June 15, 2020, the construction was carried out with the first civil works package, i.e., an underground track of 2.7 km from Bundaran HI to Harmoni and construction of Thamrin and Monas Stations. Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) aims to start operating in two phases, with the completion of the first phase from Bundaran HI to Harmoni in March 2025 and completion of the second phase from Harmoni to Kota in 2027. Phase 2A MRT Jakarta is located underground and supported with Communication Based Train Control (CBTC) signalling system and level 2 of Automated Train Operation (ATO) system.



Operation (ATO) tingkat 2. Hingga akhir periode pelaporan, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota) telah dimulai, sedangkan MRT Jakarta Fase 2B (Kota - Ancol Barat) telah memasuki proses persetujuan trase dan penetapan lokasi.

Pada proyek pembangunan MRT Fase 2A, Perseroan memutuskan untuk menerapkan teknologi *Common Data Environment (CDE)* dan *Building Information Modelling (BIM)* di semua paket kontrak sebagai bagian dari pengembangan dan inovasi dalam implementasi manajemen proyek. Perseroan mendesain pemanfaatan CDE yang terintegrasi dengan BIM sebagai sumber informasi utama dan *platform* digital tunggal bagi semua *stakeholder* proyek termasuk Pemilik Proyek, Konsultan, dan semua Kontraktor maupun Sub-kontraktor untuk berkolaborasi dan berkoordinasi. Penggunaan CDE dan BIM secara berurutan telah dimulai sejak Agustus 2020.

Penerapan BIM di proyek pembangunan MRT Fase 2A tidak hanya diperuntukkan bagi visualisasi desain dan konstruksi dalam bentuk model 3 dimensi namun juga dikembangkan menjadi kombinasi antara model dan jadwal proyek (4D) untuk melihat simulasi pekerjaan konstruksi serta penggabungan dengan data pendukung aset (7D).

As of the end of the reporting period, Phase 2A MRT Jakarta construction (Bundaran HI – Kota) has started, while Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat) has started the track approval and location determination process.

For the Phase 2A MRT construction project, the Corporation decided to implement Common Data Environment (CDE) and Building Information Modelling (BIM) technology for all contract packages as a part of development and innovation in project management implementation. The Corporation designs integrated utilisation of CDE and BIM as a main source of information and a single digital platform for all stakeholders of the projects including Project Owner, Consultants, and Contractors as well as Sub-contractors for collaboration and coordination. The utilisation of CDE and BIM started since August 2020.

The utilization of BIM for Phase 2A MRT construction project does not belong only to design and construction visualisation as a 3-dimensional model but it is also developed to combine the model and project schedule (4D) to oversee the simulation of construction works and merged with asset-supporting data (7D).



Mempertahankan Kinerja Keuangan dengan Penguatan Ekonomi Digital

Maintaining Financial Performance Through Digital Economy Reinforcement

Selama masa pandemi di tahun 2020, Perseroan berhasil mempertahankan seluruh komitmen bisnisnya, termasuk mewujudkan kinerja keuangan yang optimal dengan menghasilkan EBITDA yang positif, melalui strategi peningkatan pendapatan non-tiket, melakukan efisiensi dengan strategi pengendalian biaya (*Cost Control*) dan melakukan inovasi digital.

Perseroan terus memaksimalkan pendapatan non-tiket dari beberapa sumber utama, yakni layanan periklanan area operasional stasiun dan kereta Ratangga, layanan periklanan media luar ruang media pilar, layanan telekomunikasi, hak penamaan stasiun, pembayaran tiket digital MRT Jakarta, dan juga ritel. Sepanjang tahun 2020, jumlah pendapatan non-tiket mencapai Rp382.672.123.116.

Dalam rangka meminimalisir dampak COVID-19 atas kinerja keuangan Perseroan yang lebih dalam, serta untuk menjaga arus kas, serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha, Perseroan menerapkan kebijakan pengendalian biaya. *Cost Control* dijalankan dengan mengedepankan prinsip urgensi dalam pengeluaran biaya yang ditinjau setiap bulan melalui mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Perseroan.

Inovasi pendapatan non-tiket juga diterapkan pada aset digital Perseroan sebagai bentuk komitmen MRT Jakarta untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital. Upaya yang telah dilakukan antara lain pengembangan aplikasi

During the pandemic in 2020, the Corporation managed to maintain all business commitments, including realising optimal financial performance by generating positive EBITDA by increasing non-farebox revenue, implementing Cost Control strategy for efficiency, and carrying out digital innovation.

The Corporation strives to maximise non-farebox revenue from various main sources, including advertising services at station operational areas and Ratangga train, outdoor advertising service through pillar media, telecommunication service, station naming rights, digital payment for MRT Jakarta tickets, and retail. In 2020, non-farebox revenue reached IDR382,672,123,116.

To minimise the further impact of COVID-19 on the financial performance of the Corporation and to maintain cash flow while considering business continuity, the Corporation implements a cost control policy. Cost Control is implemented by focusing on the principle of urgency in terms of spending that is evaluated monthly through a decision-making mechanism following the applicable internal provisions of the Corporation.

Non-farebox revenue innovation is also implemented in Corporate digital asset as a commitment of the Corporation to become the growth centre of the digital economy. The efforts taken include the development of the MRT Jakarta



Pilar Iklan MRT Jakarta
MRT Jakarta Advertisement Pillars

mobile MRT Jakarta. Aplikasi tersebut juga menjadi alternatif pembelian dan pembayaran tiket melalui sistem kode QR, yang menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa. Untuk mendukung inovasi tersebut, Perseroan telah bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi finansial, yakni Dana, LinkAja, OVO, dan GoPay.

Perseroan terus mendukung inovasi berbasis digital dengan melakukan kolaborasi dengan perusahaan rintisan melalui program MRTJ Accelerator, yang mana Perseroan bekerja sama dengan 9 perusahaan rintisan terpilih berlatar belakang *lifestyle*, seperti:

1. Bobobox menjadi penyedia modular *Pods* yang akan membantu pengguna jasa dengan mobilitas tinggi untuk beristirahat singkat di stasiun;
2. Pasar Polis melalui integrasi bersama MRT Jakarta menyediakan asuransi yang mudah diakses oleh pengguna jasa;
3. Maingame.com bersama dengan MRT Jakarta menghadirkan unsur *gamification* di dalam aplikasi mobile MRT Jakarta yang dapat diunggah oleh pengguna jasa;
4. Jakarta Bike Hub dengan konsep *Bike Sharing* yang menggunakan teknologi *high-end* yang menyediakan *First-Last Mile* untuk menunjang mobilitas pengguna dengan mengusung MaaS sebagai fokus utama;
5. Rekosistem yang menyediakan solusi pengelolaan sampah secara digital di dalam ekosistem MRT Jakarta dan mengolahnya menjadi energi yang terbarukan;
6. Jejak.in membantu pengguna untuk bertanggung jawab dalam menangani masalah iklim dengan mengimbangi karbon sebagai produk sampingan dari perjalanan harian pengguna menggunakan MRT Jakarta;

mobile application. The application is also an alternative for ticket purchase and payment through the QR code system as a commitment of the Corporation to improve the service for the passengers. To support the innovation, the Corporation has partnered with financial technology companies, i.e., Dana, LinkAja, Ovo, and Gopay.

The Corporation keeps driving digital-based innovation by collaborating with start-up corporations through the MRTJ Accelerator program, in which the Corporation is collaborating with 9 selected start-up corporations of the lifestyle sector, such as:

1. *Bobobox became a modular Pods provider that enables the passengers with high mobility to have a quick rest at the stations;*
2. *Pasar Polis through integration with MRT Jakarta provides accessible insurance for the passengers;*
3. *Maingame.com with MRT Jakarta deliver gamification features in MRT Jakarta mobile application that can be downloaded by passengers;*
4. *Jakarta Bike Hub with Bike-Sharing concepts employing high-end technology provides First-Last Mile to support the mobility of passengers with MaaS as the main focus;*
5. *Rekosistem that provides digitally-enabled waste management solution within the premises of MRT Jakarta and process the waste to be renewable energy;*
6. *Jejak.in helps the users to be responsible in response to climate issues by balancing the carbon footprint as the by-product of daily commuting of the users by using MRT Jakarta;*

7. Sonicboom dengan mengumpulkan dan memproses mobilitas pengunjung dan mobilitas pekerja Sonicboom menghasilkan sistem iklan di dalam ekosistem MRT Jakarta yang berdasar pada jumlah *engagement* yang teranalisis melalui sistem IoT-nya;
8. Nodelux dengan teknologi analisis wajah dari database terdaGar MRT Jakarta bersama Nodeflux menghadirkan *service* IoT yang mampu menunjang keamanan dan juga pengawasan di area publik; dan
9. MAPID sebagai *PlaVorm* komputasi awan SaaS yang mengembangkan alat Sistem Informasi Geografis untuk mengumpulkan, mengelola, memvisualisasikan, dan menganalisis data geospasial yang menyediakan *Business Location Intelligence* yang dapat diakses oleh *partner* dan/atau korporasi di ekosistem MRT Jakarta.

Dengan demikian, pengalaman berkendara dengan MRT Jakarta akan jauh lebih menyenangkan. Kegiatan ini menjadi upaya untuk membentuk ekosistem digital yang berkelanjutan melalui integrasi MRT Jakarta dengan perusahaan rintisan, yang dapat menguntungkan kemajuan internal dan eksternal kedua belah pihak, baik untuk peningkatan pendapatan, penjenamaan (*branding*), hingga pengalaman baru untuk pengguna jasa MRT Jakarta.

Perseroan juga menyelenggarakan program MRT Jakarta Star Track Incubation, setelah sekitar 1.000 pendaftar yang telah mengirimkan aplikasinya dan diseleksi oleh tim terkait, ide yang mereka buat dikembangkan dalam sebuah proses yang dikurasi dan menghasilkan sebuah rintisan yang nantinya akan mendorong kembali kebangkitan ekonomi dan melewati proses inkubasi bagi 4 (empat) perusahaan rintisan terpilih dengan kegiatan seperti lokakarya, kursus daring, dan pendampingan dengan tujuan menciptakan *minimum viable product* (MVP). Selain itu, peserta yang berhasil sampai *Graduation Day* akan mendapatkan sejumlah manfaat, seperti sesi dan pendampingan dari para ahli, berjejaring dengan mitra program, berkesempatan mendapatkan pendanaan, serta akses pasar.

Hal lain yang dilakukan Perseroan adalah melakukan utilisasi kanal informasi media sosial, dimana tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi dari Perseroan, tetapi lebih dari itu, kanal media sosial juga dijadikan wadah kolaborasi dengan mitra dan masyarakat untuk menghasilkan aktivitas digital yang kaya dengan konten yang edukatif, inovatif dan informatif, serta menjadi potensi baru untuk pendapatan non-tiket untuk mendukung ketahanan keuangan dari Perseroan.

7. *Sonicboom collects and processes the mobility of passengers and workers. It generates an advertising system within the premises of MRT Jakarta based on the analysed engagement within its IoT system;*
8. *Nodelux with facial recognition technology from terdaGar database of MRT Jakarta and Nodeflux to offer IoT service that may support the security and monitoring of public areas; and*
9. *MAPID as PlaVorm of SaaS cloud computation that develops Geographic Information System to collect, process, visualise, and analyse geospatial data to provide Business Location Intelligence accessible by partners and/or corporation within the premises of MRT Jakarta.*

Therefore, the experience with MRT Jakarta will be more exciting. The activities are some efforts to establish a sustainable digital ecosystem through the integration of MRT Jakarta with start-up corporations that may be beneficial for internal and external development of the parties in terms of revenue, branding, up to new experiences for MRT Jakarta service users.

The Corporation also carries out the MRT Jakarta Star Track Incubation program, after more than 1,000 participants submitted their application and selected by the relevant team, their ideas are developed in a curated process to produce a start-up that will drive economic recovery after undergoing the incubation process through various activities such as a workshop, online courses, and coaching for 4 (four) selected startups to create minimum viable products (MVP). Besides, participants who succeeded until the Graduation Day will receive several benefits, such as sessions with and supervisions from experts, networking events with program partners, and opportunities to receive funding and market access.

Another effort taken by the Corporation is the utilisation of social media information channel, not only as a channel to provide information and education from the Corporation, but also to become a collaboration channel with partners and the public to generate digital activities that are rich in educative and informative contents, to be a potential source of non-farebox revenue to support financial resiliency of the Corporation.



Menjadi Master Integrator Transportasi Jakarta

MRT Jakarta as the Master of Transportation Integrator



Tahun 2020 mencatat sejumlah pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, pembentukan 1 (satu) anak usaha dan 2 (dua) perusahaan patungan berhasil dibentuk sebagai upaya untuk membangun integrasi sistem transportasi Jakarta yang efektif. Perseroan mendapatkan penugasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai koordinator pengembangan sistem transportasi terintegrasi Jabodetabek. Ketiga pengembangan ini secara tidak langsung menempatkan Perseroan sebagai Perusahaan Induk yang memiliki peranan strategis dalam mengkoordinasikan pengembangan transportasi terintegrasi Jakarta. Pembagian pelaksanaan peranan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembang ekspansi jaringan transportasi berbasis rel

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), merupakan sebuah perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan kepemilikan saham masing-masing 51% oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan 49% oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pendirian MITJ dimaksudkan adalah untuk mengelola dan mengeksekusi inisiatif integrasi transportasi perkeretaapian umum yang berada di kawasan Jabodetabek. Pendirian MITJ dilatarbelakangi oleh hasil Rapat Terbatas Kabinet ("Ratas") mengenai Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang diselenggarakan pada 8 Januari 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pada rapat tersebut, Presiden menyatakan bahwa pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek sebaiknya perlu disederhanakan, serta perlu mengikuti penataan ruang yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta. Penyederhanaan tersebut juga dapat berbentuk pemberian wewenang pengelolaan moda transportasi kepada Provinsi DKI Jakarta.

Pemberian wewenang sebagaimana terdapat pada Rapat Terbatas tersebut dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan agar memberikan hak pengelolaan seluruh stasiun, rute, dan kereta yang

The Corporation recorded various business development in 2020, including the establishment of 1 (one) subsidiary and 2 (two) joint ventures as an effort to develop effective transportation integration in Jakarta. The Corporation was appointed by the Government of DKI Jakarta Province as the coordinator of integrated transportation system development in Jabodetabek. The development indirectly places the Corporation as a Holding with strategic roles in coordinating the integrated transportation development in Jakarta. The delegation of strategic roles is as follows:

1. As a developer to expand railway transportation network

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) is a joint venture established by the Corporation and PT Kereta Api Indonesia (Persero), with the share ownership of 51% belonging to the Corporation and 49% belonging to PT Kereta Api Indonesia (Persero). The establishment of MITJ aims to manage and execute the initiative to integrate public railway transportation in Greater Jakarta area. The establishment of MITJ is supported by the Limited Cabinet Meeting ("Ratas") concerning Transportation Management in Jabodetabek conducted on January 8, 2019 by President Joko Widodo. In the meeting, the President stated that transportation management in Jabodetabek must be streamlined to align with the spatial planning by the Government of DKI Jakarta Province. The streamlining can take the form of delegation of authority to manage modes of transportation to DKI Jakarta Province.

The delegation of authority as referred to in the Limited Cabinet Meeting is carried out by the Ministry of SOE and Ministry of Transportation by delegating the rights to manage all stations, routes, and railways within DKI

ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta, baik LRT, KA Commuter yang dikelola KCI, maupun KA Bandara. Hak pengelolaan pada rapat terbatas tersebut dapat dijalankan juga dengan pemberian saham mayoritas PT Kereta Commuter Indonesia oleh Kementerian BUMN kepada Pemprov DKI Jakarta, atau dengan membentuk *joint venture* antara PT KAI (Persero) dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengelolaan stasiun. Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas pada 8 Januari 2019, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian BUMN melakukan *kick-off meeting* kolaborasi PT KAI (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai pihak yang mewakili kepentingan Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti pendirian perusahaan *joint venture* dengan PT KAI (Persero). Selanjutnya, perusahaan patungan ini adalah integrasi transportasi berbasis rel dan pengembangan kawasan berorientasi transit (KBT) atau *Transit-Oriented Development* (TOD) di sekitar stasiun KRL Jabodetabek.

Dengan diputuskannya PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai pihak yang akan melakukan pendirian *joint venture* dengan PT KAI (Persero), maka pada tanggal 9 Desember 2019 kedua pihak menandatangani Kesepakatan Awal (*Head of Agreement*) sebagai permulaan dari proses pendirian PT MITJ dengan menentukan apa saja yang menjadi ruang lingkup pendirian perusahaan ini. Selain itu, untuk memperkuat dasar penugasan pendirian *joint venture* ini kepada PT MRT Jakarta (Perseroda), maka pada 11 Desember 2019, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Kerja Sama dengan PT KAI (Persero) dalam Pengintegrasian Perkeretaapian Umum yang menjelaskan mengenai ruang lingkup penugasan dan teknis mengenai penugasan tersebut. Setelah melakukan diskusi secara teknis mengenai tata kelola dan ruang lingkup apa saja yang dilakukan oleh MITJ di antara MRT Jakarta dan KAI, maka pada tanggal 10 Januari 2020 kedua pihak menandatangani Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) untuk mendirikan MITJ dan menjelaskan struktur permodalan, studi kelayakan yang akan dilakukan, serta tata kelola perusahaan yang akan didirikan. Pada tanggal 12 Februari 2020, terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0008856.AH.01.01. Tahun 2020 yang mengesahkan pendirian PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

Jakarta Province to the Government of DKI Jakarta Province that covers the LRT, Commuter Line managed by KCI, and Airport Train. The rights of management as referred to in the Limited Cabinet Meeting can be carried out by transferring the majority of shares of PT Kereta Commuter Indonesia from the Ministry of SOE to the Government of DKI Jakarta, or by establishing a joint venture between PT KAI (Persero) and the Government of DKI Jakarta for station management. To follow up the resolutions of the Limited Cabinet Meeting on January 8, 2019, the Government of DKI Jakarta Province and the Ministry of SOE carried out a kick-off meeting for the collaboration between PT KAI (Persero) and the Corporation. The Government of DKI Jakarta Province appointed the Corporation as the party that receives the delegation from the Government of DKI Jakarta Province in following up the establishment of joint venture with PT KAI (Persero). Then, the joint venture realizes integration of railway transportation and development of Transit-Oriented Development (TOD) around the stations of KRL Jabodetabek.

With the delegation of the Corporation as the party to establish a joint venture with PT KAI (Persero), on December 9, 2019 both parties signed a Head of Agreement as the initial process of establishment of PT MITJ by determining the scope of establishment of the corporation. Besides, to strengthen the foundation of the establishment of the joint venture by the Corporation, on December 11, 2019 the Government of DKI Jakarta Province enacted Governor's Regulation of DKI Jakarta Province number 136 Year 2019 concerning Assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) to Implement Collaboration with PT KAI (Persero) in the Integration of Public Railway that governs the scope of duties as well as the technical details concerning the assignment. After technical discussion concerning the governance and scope of MITJ between the Corporation and KAI, on January 10, 2020 both parties signed a Shareholders Agreement to establish MITJ and govern the capital structure, feasibility studies to be conducted, and corporate governance to be established. On February 12, 2020, the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008856.AH.0101 Year 2020 was enacted to ratify the establishment of PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

2. Sebagai Pengelola Kawasan TOD

Melukuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.67 tahun 2019, PT MRT Jakarta (Persero) sebagai BUMD yang menyelenggarakan transportasi umum dapat mengajukan diri sebagai Pengelola Kawasan yang berperan dalam perencanaan penataan Kawasan di sekitar stasiun MRT berdasarkan konsep TOD. Penetapan Persero sebagai Pengelola Kawasan telah disahkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.15 tahun 2020 untuk 5 kawasan TOD, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-Sisingamangaraja, Istora-Senayan, dan Dukuh Atas. Sebagai Pengelola Kawasan, PT MRT Jakarta (Persero) dapat menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan masyarakat dan stakeholder di sekitar kawasan untuk mengarahkan pengembangan kawasan berdasarkan Panduan Rancang Kota.

Dalam menjalankan posisinya sebagai Pengelola Kawasan TOD, PT MRT Jakarta (Persero) mendirikan anak usaha, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta ("ITJ"), dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 90% oleh PT MRT Jakarta (Persero) dan 10% oleh PT Transportasi Jakarta. Fungsi PT ITJ dalam mendukung Persero adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Kawasan TOD berdasarkan Panduan Rancang Kota yang telah ditetapkan untuk mendorong keselarasan pertumbuhan ekonomi, interaksi sosial, dan kelestarian lingkungan.

3. Sebagai integrator pembayaran dan tarif

Dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan kendaraan umum untuk tercapainya modal *share* kendaraan umum sebesar 60% dari total pergerakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program pengintegrasian antar moda angkutan umum, yaitu Jaklingko. Program ini diproyeksikan untuk menyambungkan secara *seamless* semua jenis moda transportasi di DKI Jakarta mulai dari angkot, TransJakarta, hingga transportasi berbasis rel seperti *Light Rail Transit* (LRT) dan *Mass Rapid Transit* (MRT), serta kereta *Commuter Line*.

Dengan adanya ketiga peranan strategis tersebut, Persero optimis mampu melakukan inovasi bisnis yang berkelanjutan dan mewujudkan integrasi sistem transportasi Jakarta yang efektif.

2. As a Developer of TOD Areas

According to the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province No. 67 year 2019, the Corporation as an ROE that carries out mass public transit service may propose itself as Developer of Area that acts in the spatial planning of the surrounding areas of MRT stations in line with TOD concept. The establishment of the Corporation as Developer of TOD Areas has been ratified as Governor's Regulation of DKI Jakarta Province No. 15 Year 2020 for 5 TOD Areas, namely Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-Sisingamangaraja, Istora Senayan, and Dukuh Atas. As a Developer of TOD Areas, the Corporation may collaborate and coordinate with the public and stakeholders around the areas to direct the development of the area based on the Urban Design Guidelines.

In carrying out its role as Developer of TOD Areas, PT MRT Jakarta (Persero) established a subsidiary PT Integrasi Transit Jakarta ("ITJ"), with the share ownership composition of 90% belonging to the Corporation and 10% belonging to PT Transportasi Jakarta. The function of PT ITJ in supporting the Corporation is to realise and develop TOD Areas based on Urban Design Guidelines as determined to drive alignment of economic growth, social interaction, and environmental conservation.

3. As an integrator of payment and fee

To drive the improvement of public transportation utilisation to achieve the share of public transportation of 60% from the total mobility as stated in the Presidential Regulation No. 55 Year 2018 concerning Transportation Masterplan of Jabodetabek, the Government of DKI Jakarta Province implements an integration program among modes of public transportation as Jaklingko. The program is projected to seamlessly connect all modes of transportation in DKI Jakarta, including public minibas (angkot), TransJakarta, and railway transportation such as Light Rail Transit (LRT) and Mass Rapid Transit (MRT) as well as Commuter Line.

With the strategic roles, the Corporation is optimistic to carry out sustainable business innovation and realise effective integration of the transportation system in Jakarta.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2020

Building Resilience, Driving Innovation

Membangun Ketangguhan, Mendorong Inovasi

Pada tahun lalu, Perseroan telah berhasil meraih capaian-capaian penting dengan beroperasinya MRT Jakarta dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat anggaran dan melampaui sejumlah target sekaligus menjadi wadah akselerasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Dari kerja kolaborasi tersebut, Perseroan berhasil membentuk nilai-nilai baru yang kuat dan berkesinambungan. Pada tahun 2020, kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan Perseroan untuk beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi. Meski di tengah kondisi krisis, Perseroan berhasil membangun ketangguhan bisnis dan menjalankan sejumlah transformasi. Perseroan mampu menghadirkan layanan terbaik, menjalankan pekerjaan konstruksi Fase 2A MRT Jakarta, mempertahankan kinerja keuangan, pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), pengembangan bisnis non-tiket (NFB), hingga pembentukan anak usaha dan perusahaan patungan.

Melalui transformasi bisnis yang tercipta, Perseroan mendorong terciptanya inovasi dengan cara baru diawali dengan ide atau gagasan, layanan operasional, model bisnis untuk menghasilkan produk baru, sehingga dapat mewujudkan Perseroan untuk bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Last year, the Corporation managed to reach critical achievements with the timely, high-quality, and cost-effective operations of MRT Jakarta by surpassing the targets and to become a collaboration acceleration platform for the stakeholders. Thanks to such collaboration, the Corporation established strong and sustainable new values. In 2020, the COVID-19 pandemic forced the Corporation to adapt with the ongoing challenges. Amidst the crisis, the Corporation managed to establish business resilience and implement various transformation. The Corporation managed to deliver the best service, to carry out construction works of Phase 2A of MRT Jakarta, to maintain financial performance, to manage Transit-Oriented Development (TOD) areas, to develop non-farebox (NFB) business, and to establish a subsidiary and joint ventures.

Through the business transformation, the Corporation drives innovation in new manners starting from ideas, operational services, and business models to generate new products to recover the Corporation for sustainable growth.



2019



Together We Create More Value

Bersama Mewujudkan Peningkatan Nilai

MRT Jakarta telah resmi beroperasi, membentuk karakter dan budaya baru kota dengan mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. MRT Jakarta juga berperan sebagai ruang ketiga atau ruang interaksi publik guna menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas.

MRT Jakarta has officially operated and shaped new urban community character and culture while helping to curtail traffic congestion, reduce air pollution, and improve people's quality of life and welfare. MRT Jakarta also plays the role of a third space or public interaction space to deliver high-quality developments.

2018



Siap Menuju Peradaban Baru *Ready for a New Era*

Pembangunan proyek MRT Jakarta yang telah ditunggu-tunggu warga Jakarta telah memasuki tahapan penghujung. *Testing & commissioning* serta *trial run* menjadi bagian penting dari seluruh tahapan persiapan ini. Layaknya orkestrasi, *trial run* menjadi Siap Menuju Peradaban Baru sebelum akhirnya panggung pertunjukan dibuka untuk umum pada Maret 2019.

The long-awaited development of MRT Jakarta by its citizen has entered the final phase. Testing and commissioning as well as trial run are important parts across the preparatory phase. Line an orchestration, the trial run is to prepare be Ready for a New Era before the stage is finally opened to the public in March 2019.

2017



Achieving The Milestones *Achieving The Milestones*

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh momentum bagi PT MRT Jakarta (Perseroda). Banyak pencapaian yang berhasil diukir dalam fase konstruksi yang dijalankan. Penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan TOD Koridor Utara-Selatan Fase 1 MRT Jakarta, telah dilakukannya uji coba kereta MRT di Jepang dan masih banyak pencapaian lainnya.

2017 was a year full of momentum for PT MRT Jakarta (Perseroda). There are various successfully carved accomplishments during the undergoing construction phase. Assignment of PT MRT Jakarta as the Master Developer to Manage the North – South Corridor of TOD Area of Phase 1 of MRT Jakarta, trial run of MRT train in Japan, and so on.

2016



Breaking Through the Frontier *Breaking Through the Frontier*

Pada tahun 2016, Perseroan berhasil mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemajuan melebihi rencana yang ditargetkan. Pembangunan prasarana menunjukkan kemajuan, persiapan operasi dan pemeliharaan pun telah diinisiasi. Pengembangan usaha mulai dipersiapkan. 2016 adalah tahun menerobos batas, di mana PT MRT Jakarta (Perseroda) menyiapkan pengoperasian dan pengelolaan yang berstandar internasional.

In 2016, the Corporation managed to overcome various challenges and advance beyond the targeted plan. Infrastructure development showed progress while operational preparation and maintenance has been initiated. Business development has started to be prepared as well. 2016 is the year to break through the frontier, in which PT MRT Jakarta (Perseroda) prepared operations and management with international standards.



01

KILAS KINERJA 2020

2020 PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain <i>In million Rupiah, unless stated otherwise</i> | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | YoY 2020-2019 (%) |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 82.025 | 191.552 | - | - | - | (57,18) |
| Pendapatan Subsidi <i>Subsidy Revenue</i> | 620.801 | 534.070 | - | - | - | 16,24 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 382.672 | 207.608 | - | - | - | 84,32 |
| Total Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 1.085.498 | 933.230 | | | | 16,32 |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenues</i> | (976.692) | (760.415) | - | - | - | (28,44) |
| Laba Kotor <i>Gross Profit</i> | 108.806 | 172.815 | - | - | - | (37,04) |
| Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expenses</i> | (189.754) | (221.750) | (207.263) | (236.266) | (79.457) | (14,43) |
| Rugi Usaha <i>Operating Loss</i> | (80.948) | (48.935) | (207.264) | (136.266) | (79.457) | (65,42) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i> | 35.731 | 120.854 | 77.281 | 21.135 | 43.043 | (70,43) |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Final Tax Expense and Income Tax Benefit</i> | (45.217) | 71.919 | (129.983) | (115.131) | (36.414) | (162,87) |
| Beban Pajak Final <i>Final Tax Expenses</i> | (17.492) | (7.973) | (8.737) | - | - | (119,39) |
| Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Income Tax Benefit</i> | (62.709) | 63.946 | (138.719) | (115.131) | (36.414) | (198,07) |
| Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan <i>Deferred Income Tax Benefit</i> | (6.385) | 79.434 | - | - | - | (108,04) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Income (Loss) for The Year</i> | (69.094) | 143.380 | (138.719) | (115.130) | (36.413) | (148,19) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | | | |
| • Pemilik entitas induk | (69.711) | 143.380 | - | - | - | (148,62) |
| • Pemilik kepentingan non pengendali | 617 | - | - | - | - | 100 |
| <i>Income (Loss) for the Year attributable to:</i> | | | | | | |
| • The owner of the parent entity | | | | | | |
| • Non-controlling Interests | | | | | | |
| Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income (Expense)</i> | (1.732) | 3.324 | 1.213 | (1.764) | 449 | (152,10) |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income (Loss) for the Year</i> | (70.826) | 146.704 | (137.506) | (116.894) | (35.964) | (148,28) |



| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain <i>In million Rupiah, unless stated otherwise</i> | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | YoY 2020-2019 (%) |
|--|----------|--------|----------|----------|---------|-------------------------|
| Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) <i>Earning (Loss) per Share (Full Rupiah)</i> | (4.229) | 11.226 | (22.498) | (20.121) | (9.198) | (137,67) |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | | | |
| • Pemilik entitas induk | (71.443) | - | - | - | - | 100 |
| • Pemilik kepentingan non pengendali | 617 | - | - | - | - | 100 |
| <i>Total Comprehensive Income (Loss) for the Year attributable to:</i> | | | | | | |
| • <i>The owner of the parent entity</i> | | | | | | |
| • <i>Non-controlling Interests</i> | | | | | | |

Pada tahun 2020, pendapatan tiket Perseroan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi akibat turunnya jumlah pengguna jasa MRT Jakarta di masa pandemi. Penurunan jumlah pengguna jasa terjadi sangat signifikan, di mana pada tahun 2019 rata-rata pengguna per hari, yaitu 89.645 orang, sedangkan, pada tahun 2020 rata-rata pengguna jasa per hari hanya sekitar 27.122 orang. Namun, dalam kondisi pandemi di tahun 2020, Perseroan berhasil mempertahankan pendapatannya dari sisi non-tiket dan subsidi yang membantu kelancaran *cash flow* Perseroan. Dalam sisi pendapatan non-tiket, Perseroan mengembangkan pendapatannya melalui beberapa kerja sama, di antaranya kerja sama layanan periklanan luar/pilar, kerja sama penerimaan uang digital (QR) dan kerja sama penyewaan tempat untuk ATM.

Dalam sisi pendapatan subsidi, Perseroan berhasil mempertahankan pendapatannya atas dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Perjanjian Subsidi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan kebijakan kompensasi atas Subsidi Sarana di masa pandemi pada tahun 2020. Dalam Perjanjian Subsidi tahun 2020 disebutkan pada masa pandemi, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan dicabutnya tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perhitungan subsidi sarana MRT Jakarta dihitung berdasarkan rata-rata realisasi pengguna jasa harian MRT Jakarta pada bulan Februari 2020 (bulan sebelum pandemi resmi dinyatakan), bukan berdasarkan realisasi pengguna jasa sebenarnya.

In 2020, the farebox revenue of the Corporation decreased compared to that of 2019. It was caused by the decreased number of MRT Jakarta passengers during the pandemic. The drop occurred significantly, with average daily passengers of 89,645 passengers in 2019 and 27,122 passengers in 2020. However, despite such condition in 2020, the Corporation managed to maintain its revenue from non-farebox revenue and subsidy revenue to help the cash flow of the Corporation. Through non-farebox revenue, the Corporation expanded the revenue through various collaborations, such as outdoor/pillar advertisement service, digital payment through QR Code, and space rental for ATM.

In terms of subsidy revenue, the Corporation managed to maintain the revenue from the subsidy from the Government of DKI Jakarta Province. The Government of DKI Jakarta through Subsidy Agreement between the Government of DKI Jakarta Province and the Corporation provides a compensation policy for Facility Subsidy during the pandemic in 2020. In the Subsidy Agreement of 2020, it is stated that during the pandemic, starting from March 14, 2020 until the status of emergency response against COVID-19 pandemic and implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) are revoked by the Government of DKI Jakarta, the calculation of facility subsidy for MRT Jakarta is carried out based on the average realisation of daily passengers of MRT Jakarta in February 2020 (a month before the pandemic), not based on the actual realisation of passengers.

Posisi Keuangan Financial Position

| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless stated otherwise | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | YoY 2020-2019 (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Aset Asset | | | | | | |
| Aset Lancar Current Assets | 1.490.592 | 1.185.263 | 616.805 | 785.531 | 475.867 | 25,76 |
| Aset Tetap Fixed Assets | 15.944.111 | 16.023.642 | 12.708.591 | 8.383.938 | 4.471.592 | (0,50) |
| Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture | 33.849 | - | - | - | - | 100 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets | 928.603 | 144.502 | 88.503 | 612.372 | 1.147.763 | 542,62 |
| Jumlah Aset Total Assets | 18.397.155 | 17.353.407 | 13.413.899 | 9.781.841 | 6.095.222 | 6,01 |
| Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity | | | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities | 838.291 | 699.277 | 382.883 | 466.942 | 262.755 | 15,69 |
| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 198.958 | 657.367 | 748.155 | 555.256 | 345.127 | (69,73) |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 1.037.249 | 1.356.644 | 1.131.038 | 1.022.198 | 607.882 | (25,70) |
| Ekuitas Neto Net Equity | 17.359.906 | 15.996.763 | 12.282.862 | 8.759.643 | 5.487.339 | 8,51 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 18.397.155 | 17.353.407 | 13.413.900 | 9.781.841 | 6.095.221 | 5,84 |

Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios

| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless stated otherwise | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | YoY 2020-2019 (%) |
|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Rasio Likuiditas Liquidity Ratio | | | | | | |
| Rasio Lancar (Kali) Current Ratio (Times) | 1,78 | 1,69 | 1,61 | 1,68 | 1,81 | 4,91 |
| Rasio Solvabilitas (Kali) Solvability Ratio (Times) | 17,74 | 12,79 | 11,86 | 9,57 | 10,03 | 38,66 |
| Rasio Kas (Kali) Cash Ratio (Times) | 1,46 | 1,40 | 1,58 | 1,67 | 1,79 | 99,78 |
| Rasio Cepat (Kali) Quick Ratio (Time) | 1,76 | 1,69 | 1,61 | 1,68 | 1,81 | 3,97 |
| Rasio Solvabilitas Solvency Ratio | | | | | | |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Kali) Debt to Equity Ratio (Times) | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | (29,55) |
| Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas (Kali) Short Term Debt to Equity (Times) | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 10,47 |
| Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (Kali) Long Term Debt to Equity (Times) | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | (72,11) |
| Rasio Utang terhadap Aset (Kali) Debt to Asset Ratio (Time) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | (27,88) |
| Rasio Profitabilitas Profitability Ratio | | | | | | |
| Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%) | 10 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (46,29) |
| Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%) | (7) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (141,51) |
| Tingkat Pengembalian Aset (%) Return on Asset (ROA) (%) | (0,38) | 0,85 | (1) | (1,20) | (0,59) | (146) |
| Tingkat Pengembalian Ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%) | (0,41) | 0,92 | (1,12) | (1,33) | (0,66) | (144) |

IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

Informasi Jumlah Saham dan Harga Saham

Information on Total Shares and Share Price

Jumlah saham Perseroan per 31 Desember 2020 sebanyak 16.339.169 lembar saham, dengan nilai nominal saham Rp1.000.000 per lembar saham. Dengan demikian, total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp16.339.169.000.000. Informasi komposisi kepemilikan saham lihat halaman 124 Laporan ini.

The number of the Corporation share as of December 31, 2020 is 16,339,169 shares with the nominal value of the share of IDR1,000,000 per share. Therefore, the total value of issued and paid-up capital is IDR16,339,169,000,000. The information on share ownership is presented on page 124 of this Report.

Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham Oleh Publik

Share Trading and Public Share Ownership

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatat setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

As of December 31, 2020, the Corporation did not conduct a share listing on the Indonesian Stock Exchange. Therefore, there is no information concerning share trade that includes market capitalisation based on the price at Stock Exchange where the shares are listed; share trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed; and information in the form of charts that at least consists of the closing price based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed and share trading volume in the Stock Exchange where the shares are listed for every quarter within the last 2 (two) financial years; including temporary suspension of share trading within the last 2 (two) years.

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Perseroan merupakan badan usaha tertutup dan tidak melakukan pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi aksi korporasi berkaitan penjualan saham, pemecahan saham, penggabungan saham, saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

The Corporation is a close corporation and does not list the shares on the Indonesian Stock Exchange. Therefore, there is no information concerning corporate actions concerning to share trade, share split, reverse share split, bonus share, and decreased nominal value of shares.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Temporary Suspension of Share Trading and/or Share Write of and/or Share Delisting Actions

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

As of December 31, 2020, the Corporation did not conduct a share listing on the Stock Exchange. Therefore there is no information concerning the Temporary Suspension of Share Trading and/or Share Delisting.

Dividen Saham *Share Dividend*

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta Keputusan Pemegang Saham.

As of December 31, 2020, the Corporation has not yet distributed any dividend to shareholders. This is following the provisions in the Articles of Association and the Shareholders' Resolution.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA

Highlight of Bond, Sukuk, or Conversion Bonds, and Other Securities

Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

The Corporation does not issue a bond, securitisation (sukuk), or converted bonds, and other securities. Therefore, there is no information concerning the number of outstanding bonds/securitisation (sukuk)/converted bonds, their interest/yield rates, maturity dates, and rating of bonds/securitisation (sukuk).

SUMBER PENDANAAN

Funding Sources

Sumber pendanaan proyek MRT Jakarta didapatkan dari ekuitas modal saham pemegang saham Perseroan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD). Berikut disampaikan sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan proyek MRT Jakarta.

The funding source for the MRT Jakarta project is obtained from the equity capital share of the Corporation's shareholders, i.e. the Government of DKI Jakarta Province, through Regional Capital Investment (PMD) scheme. The funding source for the construction and development of MRT Jakarta is presented as follows.

Skema Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Proyek MRT Jakarta

Scheme of the Funding Source for Construction and Development of MRT Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia

The Government of the Republic of Indonesia

49%

Hibah | Grants

51%

Pinjaman | Loans



PT MRT Jakarta
(Persero)



Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

The Government of
DKI Jakarta Province



Penyertaan Modal Daerah

Regional Capital
Investment

JEJAK LANGKAH

Milestones

2005

Studi oleh Tim *Special Assistance for Project Formation (SAPROF)* dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas proyek ini di Indonesia. *A study by Special Assistance for Project Formation (SAPROF) team from JBIC to facilitate the agreement among stakeholders for the project in Indonesia.*

2004

Departemen Perhubungan mengeluarkan Studi *Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas)*. *The Ministry of Transportation released the Study of the Implementation Programme for the Jakarta MRT System (Lebak Bulus – Dukuh Atas).*

2002

Studi JICA pada *Integrated Transportation Master Plan II* menekankan prioritas pada pembangunan subway. *JICA Study on Integrated Transportation Master Plan II emphasised the priority of subway construction.*

2000

Studi Kelayakan MRT (subway) oleh Tim Studi JICA, menekankan pentingnya pembangunan subway di Jakarta dan perlunya keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaan. *MRT (Subway) Feasibility Study conducted by JICA Study Team, emphasised the importance of subway construction in Jakarta and the requirement of the Government in terms of financing.*

2006

Loan Agreement Tahap 1 (IP-536) sebesar ¥1,869 miliar untuk pembiayaan, ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati dalam *Minutes of Discussion (MoD)* dan *Memorandum on Engineering Services (MoES)*. *Phase 1 Loan Agreement (IP-536) of JPY 1.869 billion for financing was signed based on the terms agreed in the Minutes of Discussion (MoD) and Memorandum on Engineering Services (MoES)*

2008

PT MRT Jakarta berdiri pada 17 Juni 2008, setelah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 mengenai Penyerahan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta. *PT MRT Jakarta was established on June 17, 2008 upon the approval of DKI Jakarta Council through the issuance of Regional Regulation No. 3 Year 2008 concerning the Establishment of Region-Owned Enterprises PT MRT Jakarta and Regional Regulation Number 4 Year 2008 concerning Regional Capital Investment in PT MRT Jakarta.*

2009

Loan Agreement Tahap 2 senilai ¥48,15 miliar untuk pinjaman tahap konstruksi sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk Proyek MRT. *Phase 2 Loan Agreement of JPY 48.15 billion for the loan for the construction phase as the second part of the total loans for MRT Project.*

2010

Minutes of Discussion (MoD) antara JICA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. MoD membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan–Utara Tahap 1 dari Lebak Bulus-Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI. *Minutes of Discussion (MoD) between JICA, the Government of DKI Jakarta Province, Bappenas, and Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation. It discussed the route extension of the South-North MRT corridor of Phase 1 from Lebak Bulus-Dukuh Atas to Lebak Bulus-Bundaran HI.*

2012

Pengumuman nama-nama nominasi konsorsium pemenang lelang 3 (tiga) Paket Bawah Tanah. Konsorsium pertama yang mengerjakan Paket (CP-104, dan CP-105) adalah Shimizu Obayashi sebagai *leader*-nya dengan anggota Wijaya Karya dan Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara untuk (CP-106) adalah Konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) bersama Utama Karya Joint Operation. *Announcement of the nomination of winning consortium in the tender for 3 (three) Underground Packages. The first consortium that works on Package (CP-104) and CP-105 is Shimizu Obayashi as the leader, whose membership comprises the Joint Venture of Wijaya Karya and Jaya Konstruksi. The winner for (CP-106) is Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) Consortium with Utama Karya Joint Operation.*

2011

Pelaksanaan kegiatan lelang fisik Proyek MRT dilaksanakan karena telah mempunyai payung hukum yang menyatakan pemberian kewenangan kepada PT MRT Jakarta untuk seluruh kegiatan MRT, termasuk proses tender. *Physical tender of MRT Project was executed as legal protection has been issued that grants authority to PT MRT Jakarta for the entirety of MRT activities, including the tender process.*

2016

- TBM Antareja dan Antareja II berhasil menembus Stasiun Senayan–Istora–Bendungan Hilir dari lokasi awal pengoperasian TBM di titik Patung Pemuda Senayan.
- TBM Mustikabumi I dan Mustikabumi II mulai bekerja dari titik Stasiun Bundaran HI dan berhasil membuat terowongan jalur bawah tanah menembus Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Setiabudi, tempat berakhirnya seluruh pekerjaan terowongan jalur bawah tanah.
- *Antareja and Antareja II TBMs successfully tunneled from Senayan–Istora–Bendungan Hilir Stations from TBM launching point in Patung Pemuda Senayan.*
- *Mustikabumi I and Mustikabumi II TBMs started to tunnel from Bundaran HI Station and successfully tunneled to Dukuh Atas Station towards Setiabudi Station, the meeting point of all tunnelling works.*

2015

Beroperasinya Tunnel Boring Machines (TBM) Antareja untuk konstruksi bawah tanah. Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo.
Operations of Antareja Tunnel Boring Machines (TBM) for underground construction. It was inaugurated by President Joko Widodo.

2014

Proyek MRT Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu proyek dari 20 proyek infrastruktur di dunia.
MRT Jakarta Project gained international recognition as one of the 20 best infrastructure projects in the world.

2013

Proyek MRT Jakarta memasuki tahap konstruksi (peletakan batu pertama).
The MRT Jakarta Project started the construction phase (ground-breaking).

2017

- Seluruh rangkaian jalur layang dan bawah tanah MRT Jakarta Koridor Bundaran HI–Lebak Bulus telah tersambung.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara–Selatan Fase 1 MRT Jakarta.
- *The entire elevated and underground line of MRT Jakarta for Bundaran HI – Lebak Bulus Corridor was connected.*
- *The Government of DKI Jakarta Province assigned PT MRT Jakarta as the Main Operator Responsible for Managing the North–South Corridor of the Transit-Oriented Development Area of MRT Jakarta Phase 1.*

2018

- Tersambungunya seluruh rel dari Stasiun Bundaran HI–Depo Lebak Bulus.
- Dimulainya pengujian pertama prasarana MRT oleh DJKA, dan serangkaian uji operasi di jalur utama.
- *All rail links from Bundaran HI Stations to Lebak Bulus Depot.*
- *Commencement of the first trial of MRT infrastructures by DJKA, and a series of operational tests in the mainline.*

2019

- Peresmian MRT Jakarta Fase 1 dan Pencanangan MRT Jakarta Fase 2.
- MRT Jakarta Fase 1 beroperasi penuh.
- *Inauguration of Phase 1 MRT Jakarta and Launching of Phase 2 MRT Jakarta.*
- *Full operations of MRT Jakarta Phase 1.*

2020

- Dimulainya pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2.
- Pembentukan satu anak usaha PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) dan dua perusahaan patungan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia).
- Menjalankan bisnis "beyond normal".
- Menjalankan operasi dengan Protokol BANGKIT.
- Menciptakan inovasi bisnis melalui MRTJ Accelerator dan Incubator.
- *Commencement of construction works for Phase 2 MRT Jakarta.*
- *Establishment of a subsidiary PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) and two joint ventures PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) and PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia).*
- *Implementation of Business Beyond Normal.*
- *Implementation of BANGKIT Protocols in operations.*
- *Implementation of business innovation through MRTJ Accelerator and Incubator.*

PERISTIWA PENTING DAN INISIATIF PERSEROAN 2020

Event Highlights and Corporation Initiatives in 2020

10

Januari | January
2020



PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membentuk perusahaan patungan (*joint venture*), PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William P. Sabandar dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro. Penandatanganan disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Kereta Api Indonesia (Persero) or KAI established a joint venture PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. The signing of shareholders' agreement and integrated station arrangement agreement was conducted in the Office of the Ministry of SOE, Jakarta, by the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta Province, Syafrin Liputo; President Director of PT MRT Jakarta (Perseroda), William P Sabandar; and President Director of PT KAI (Persero) Edi Sukmoro. The signing was witnessed by the Minister of SOE Erick Thohir, Minister of Transportation Budi Karya Sumadi, and Governor of DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

17

Februari | February
2020



Bertempat di Stasiun MRT Bundaran HI, dilakukan penandatanganan kontrak *Design and Build Underground Section* MRT Jakarta *Project Phase 2 Contract Package 201* (Bundaran HI-Harmoni) senilai Rp4,5 triliun antara PT MRT Jakarta (Perseroda) yang diwakili oleh Direktur Konstruksi Silvia Halim, dan Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) selaku pemenang tender yang diwakili oleh *Representative Yutaka Okumura*. Penandatanganan kontrak senilai Rp4,5 triliun dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, oleh Direktur Konstruksi Silvia Halim dan Shimizu-Adhi Karya Joint Venture yang diwakili Yutaka Okumura terkait Paket Kontrak; antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Shimizu-Adhi Karya JV (SAJV) terkait *Design and Build Underground Section* MRT Jakarta *Project Phase 2 Contract Package 201*. Penandatanganan disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JICA *Chief Representative* untuk Republik Indonesia Yamanaka Shinichi dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto.

PT MRT Jakarta (Perseroda) with PT Adhi Karya (Persero) Tbk and Shimizu Corporation Indonesia as the tender winning consortium, signed the contract for MRT construction project Phase 2A from Bundaran HI to Harmoni (CP 201). The signing of the contract valued at IDR 4.5 trillion was conducted at Bundaran HI MRT Station, Jakarta, by the Director of Construction Silvia Halim and Shimizu-Adhi Karya Joint Ventured represented by Yutaka Okumura concerning the Contract Package; between PT MRT Jakarta (Perseroda) and Shimizu Adhi Karya JV (SAJV) concerning Design and Build Underground Section of MRT Jakarta Project Phase 2 Contract Package 201. The signing was witnessed by the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan, the Ambassador of Japan for Indonesia Masafumi Ishii, President Director of PT MRT Jakarta William Sabandar, JICA Chief Representative for the Republic of Indonesia Yamanaka Shinichi, and President Director of PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto.

24

Maret | March
2020



Launching Prangko MRT Jakarta dalam rangka memperingati satu tahun MRT Beroperasi.

Launching of MRT Jakarta Stamps to commemorate one year of MRT operations.

20

April | April

2020



Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Jakarta. Sesuai Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Bapak Roy Rahendra sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi. Pemegang Saham juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis.

PT MRT Jakarta (Perseroda) held the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) in Jakarta. Following the decision of the GMS, Shareholders agree to the appointment of Mr Roy Rahendra as the Director of Finance and agree with the honourable dismissal of Mr. Ghamal Peris as the former Director of Business Development and Support.

15

Juni | June

2020



Proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dimulai, terutama pekerjaan paket kontrak CP201, yang meliputi pembangunan jalur terowongan dan stasiun MRT bawah tanah dari Bundaran HI hingga Harmoni. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh tenaga kerja. Pelaksanaan pengerjaan proyek menyerap anggaran sebesar Rp1,55 triliun dan tenaga kerja sebanyak 356 orang.

Phase II MRT Jakarta construction project was started, especially for CP201 contract package consisting of the construction of the underground tunnel and MRT station from Bundaran HI to Harmoni. The construction implemented health protocol applicable to all workforce. The execution of the project absorbed IDR 1.55 trillion of budget and 356 workers.

20

Mei | May

2020



Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Komando Daerah Militer terkait penerapan Protokol Kesehatan di stasiun dan kereta MRT Jakarta.

Visit from the President of the Republic of Indonesia, Head of Indonesian National Police, and Chief of Regional Military Commands concerning the implementation of Health Protocols within the stations and trains of MRT Jakarta.

17

Juni | June

2020



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta (Perseroda), PT KAI, Sarana Jaya, dan MITJ melakukan peresmian Penataan 4 Stasiun KAI, di antaranya Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Sudirman Baru dan Stasiun Juanda.

The Government of DKI Jakarta Province with MRT Jakarta (Perseroda), PT KAI, Sarana Jaya, and MITJ held the inauguration of the Arrangement of Four Train Stations, i.e. Tanah Abang Station, Pasar Senen Station, Sudirman Baru Station, and Juanda Station.

30

Juni | June
2020



Penandatanganan *Head of Agreement* (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi yang dilaksanakan di Balai Agung, Balai Kota melalui pembuatan perusahaan patungan dengan pembagian saham PT MRT Jakarta (20%), PT Transportasi Jakarta (20%), PT Jakarta Propertindo (20%), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (40%).

The signing of Head of Agreement (HoA) concerning the Implementation of Integrated Payment System Across Transportation Modes conducted in Balai Agung, Balai Kota through the establishment of a joint venture with shared ownership by PT MRT Jakarta (20%), PT Transportasi Jakarta (20%), PT Jakarta Propertindo (20%), and PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (40%).

2

Juli | July
2020



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru saja menerbitkan sejumlah Peraturan Gubernur (Pergub) terkait rancangan kota berkonsep *Transit-Oriented Development* (TOD). Dalam Pergub No. 15 Tahun 2020, Anies menunjuk Perseroan sebagai pengelola kawasan TOD. Adapun 3 kawasan TOD tersebut, di antaranya Blok M-ASEAN, Fatmawati dan Lebak Bulus. Kawasan tersebut akan dikembangkan oleh Perseroan melalui anak usaha baru yang akan dibentuk.

The Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan, had just issued several Governor Decrees concerning Transit-Oriented Development (TOD) urban design. Governor Decree No. 15 Year 2020 appoints the Corporation as the manager of TOD areas. There are three TOD areas, namely Blok M-ASEAN, Fatmawati, and Lebak Bulus. Those areas will be developed by the Corporation through a new subsidiary that will be established.

17

Agustus | August
2020



Peluncuran Uang Rp75.000 edisi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan gambar Ratangga dan tunnel MRT Jakarta.

Launching of IDR 75,000 banknote to commemorate the 75 Years of Independence of the Republic of Indonesia featuring Ratangga and MRT Jakarta tunnel.

4

September | September
2020



Pengerjaan Fisik pertama dari CP201 Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas dengan salah satu tahap pengerjaan yaitu pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bank Indonesia.

The first Physical Works of CP201 Thamrin Station and Monas Station, one of the works include dismantling Bank Indonesia Footbridge.

6

Oktober | October
2020

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penandatanganan penyertaan penyeteroran modal kepada PT Integrasi Transit Jakarta. Penandatanganan berlangsung di Depo MRT Jakarta Lebak Bulus oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar dan Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo.

PT Integrasi Transit Jakarta merupakan Anak Perusahaan yang dibentuk untuk mengelola kawasan berorientasi transit dan peluang peningkatan intensitas (KLB) sebagai salah satu bentuk insentif dalam pembangunan Kawasan TOD melalui perencanaan yang dilakukan oleh pengelola kawasan sepanjang koridor MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) signed paid-in capital contribution to PT Integrasi Transit Jakarta. The signing was conducted in Lebak Bulus Depot by President Director of PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar and President Director of PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo.

PT Integrasi Transit Jakarta is a subsidiary established to manage Transit-Oriented Development (TOD) areas and intensity improvement opportunity (KLB) as a form of incentive in the development of TOD Areas through the planning carried out by the management of the areas along the corridor of MRT Jakarta.

19

November | November
2020

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Japan International Consults for Transportation Co.,Ltd, Japan-Joint Venture (JIC-JV) oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi dan Presiden JIC-JV Masahiko Nakai. Perjanjian kerja sama tersebut, meliputi pemeliharaan terpadu (*integrated maintenance*) atau *overhaul* terhadap 16 rangkaian kereta MRT Jakarta, termasuk transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tim perawatan MRT Jakarta. Kerja sama akan berlangsung selama tiga tahun, dimulai pada Januari 2021 sampai dengan akhir tahun 2023.

A Cooperation Agreement was signed between PT MRT Jakarta (Perseroda) and Japan International Consults for Transportation Co., Ltd., Japan-Joint Venture (JIC-JV) by the Director of Operations and Maintenance Muhammad Effendi and President of JIC-JV Masahiko Nakai. The agreement covers integrated maintenance or overhaul of 16 trains of the MRT Jakarta, including knowledge and skill transfer to MRT Jakarta maintenance team. The cooperation will remain for three years, starting January 2021 until the end of 2023.

27

Oktober | October
2020

PT MRT Jakarta (Perseroda) meraih Sertifikat ISO37001:2016 untuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap Berstandar Internasional dalam bisnisnya. Sertifikasi juga menandakan bahwa setiap insan PT MRT Jakarta (Perseroda) harus berperan aktif dalam implementasi sistem manajemen anti penyuaapan. Peran tersebut dilakukan melalui kepatuhan terhadap pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*), melaporkan risiko penyuaapan dalam *bribery risk assessment*, melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) apabila menerima gratifikasi, hingga melaporkan apabila menemukan dugaan kasus penyuaapan.

PT MRT Jakarta (Perseroda) received an ISO37001:2016 Certificate for the implementation of Anti-Bribery Management System. The certification serves as a proof that the Corporation has implemented Anti-Bribery Management System according to the international standards in business activities. The certification reflects that the employee of the Corporation must have an active role in the implementation of the anti-bribery management system. Such role can be carried out through compliance with the code of conduct, reporting of bribery risk in bribery risk assessment, reporting to Gratification Control Unit (UPG) upon reception of gratification, and reporting a suspected bribery case.

30

Desember | December

2020

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek melakukan penandatanganan penyertaan penyeteroran modal kepada PT Jakarta Lingko Indonesia.

PT JakLingko Indonesia merupakan perusahaan patungan yang dibentuk untuk pengelolaan dan pengusahaan integrasi tarif dan pembayaran antarmoda Jabodetabek.

The Corporation and PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, and PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek signed the capital investment to PT Jakarta Lingko Indonesia.

PT JakLingko Indonesia is a joint venture established for the management and implementation of integrated fee and payment of modes of transportation in Jabodetabek.



Inisiatif Perseroan 2020

Corporation Initiatives in 2020

Pada periode pelaporan, Perseroan berinisiatif menyusun Kebijakan Keberlanjutan yang akan menjadi pedoman manajemen dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasi dan bisnis Perseroan, serta pengembangannya di masa mendatang. Kebijakan Keberlanjutan akan memastikan kegiatan operasi dan bisnis yang berkelanjutan, melalui pendekatan pada pencapaian kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

During the reporting period, the Corporation had the initiative to compile Sustainability Policy as guidelines for the management and all stakeholders in implementing sustainability principles in the Corporate operations and business activities and the development in the future. The Sustainability Policy guarantees sustainable operations and business activities through the achievement of economic, environmental, and social performance as well as good corporate governance (GCG) implementation.



Stasiun Fatmawati
Fatmawati Station

DAFTAR ISI

Table of Contents

| | | | |
|---|----|---|----|
| TEMA THEME | | JEJAK LANGKAH MILESTONES | 26 |
| PENGANTAR TEMA THEME INTRODUCTION | 1 | PERISTIWA PENTING DAN INISIATIF PERSEROAN 2020 EVENT HIGHLIGHTS AND CORPORATION INITIATIVES IN 2020 | 28 |
| PENCAPAIAN 2020 2020 ACHIEVEMENT | 2 | INISIATIF PERSEROAN 2020 CORPORATION INITIATIVES IN 2020 | 32 |
| KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY | 16 | DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS | 34 |



KILAS KINERJA 2020 2020 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

| | |
|--|----|
| IKHTISAR KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS | 20 |
| IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS | 23 |
| INFORMASI JUMLAH SAHAM DAN HARGA SAHAM INFORMATION OF TOTAL SHARE AND SHARE PRICE | 23 |
| PERDAGANGAN SAHAM AND KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK SHARE TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP | 23 |
| AKSI KORPORASI CORPORATION ACTIONS | 23 |
| AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN SAHAM DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING) TEMPORARY SUSPENSION OF SHARE TRADING AND/OR SHARE WRITE-OFF AND/OR SHARE DELISTING | 24 |
| DIVIDEN SAHAM SHARE DIVIDEND | 24 |
| IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA HIGHLIGHTS OF BONDS, SUKUK, OR CONVERSION BONDS, AND OTHER SECURITIES | 24 |
| SUMBER PENDANAAN FUNDING SOURCES | 25 |

18

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

42

| | |
|--|----|
| LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT | 46 |
| LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT | 58 |
| SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT MRT JAKARTA (PERSERODA) STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA) | 68 |
| SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT MRT JAKARTA (PERSERODA) STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA) | 69 |



TENTANG PT MRT JAKARTA (PERSEROA) ABOUT PT MRT JAKARTA (PERSEROA)

70

PROFIL PERSEROAN

CORPORATE PROFILE

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERSEROAN
GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY

SEKILAS MRT JAKARTA
MRT JAKARTA AT A GLANCE

NAMA PERSEROAN
CORPORATE NAME

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA PERSEROAN
CORPORATE ACTIVITIES AND BUSINESS LINES

WILAYAH OPERASI PERSEROAN
CORPORATE OPERATIONAL AREA

VISI, MISI DAN NILAI PERSEROAN
VISION, MISSIONS, AND CORE VALUES

PERSETUJUAN DAN PENINJAUAN ATAS VISI, MISI DAN
NILAI PERSEROAN
APPROVAL AND REVIEW OF VISION, MISSIONS, AND
CORPORATE VALUES

STRATEGI PERSEROAN
CORPORATE STRATEGY

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PERSEROAN

PROFILE OF THE EXECUTIVES

72

73

74

78

78

81

82

84

84

86

88

93

97

DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

TANPA PHK DI MASA PANDEMI COVID-19
ZERO LAYOFF DURING THE COVID-19 PANDEMIC

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERSEROAN, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, SERTA JOIN VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, AND JOINT VENTURES (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK

PT INTEGRASI TRANSIT JAKARTA

PT JAKARTA LINGKO INDONESIA

INFORMASI TENTANG KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

INFORMATION OF SHARE ISSUANCE AND SHARE LISTING CHRONOLOGY

INFORMASI TENTANG PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA

INFORMATION ON BONDS AND/OR OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

INFORMASI TENTANG DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

INFORMATION ON THE LIST OF ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

ASET DIGITAL PERSEROAN DAN INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

DIGITAL ASSET OF THE CORPORATE AND INFORMATION IN THE CORPORATE WEBSITE



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION

146

| | |
|---|------------|
| TINJUAN UMUM MENUJU PENGELOLAAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI | 148 |
| GENERAL REVIEW TOWARDS AN INTEGRATED TRANSPORTATION MANAGEMENT | |
| TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA | 150 |
| OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT | |
| KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA | 151 |
| INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PERFORMANCE | |
| KINERJA PENGOPERASIAN PRASARANA | 163 |
| INFRASTRUCTURE OPERATIONAL PERFORMANCE | |
| KINERJA PERAWATAN DAN PENGUSAHAAN PRASARANA | 165 |
| INFRASTRUCTURE MAINTENANCE AND COMMERCIALIZATION PERFORMANCE | |
| KINERJA PEMBANGUNAN SARANA | 167 |
| FACILITY DEVELOPMENT PERFORMANCE | |
| KINERJA PENGOPERASIAN SARANA | 168 |
| FACILITY OPERATIONAL PERFORMANCE | |
| KINERJA PERAWATAN DAN PENGUSAHAAN SARANA | 176 |
| FACILITY MAINTENANCE AND COMMERCIALIZATION PERFORMANCE | |
| KINERJA PENGUSAHAAN SARANA | 177 |
| FACILITY COMMERCIALIZATION PERFORMANCE | |
| KINERJA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROPERTI ATAU BISNIS DI STASIUN DAN KAWASAN | 178 |
| PROPERTY OR BUSINESS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PERFORMANCE IN STATIONS AND SURROUNDING AREAS | |
| KINERJA PENDAPATAN DARI KEGIATAN SEGMENT USAHA | 184 |
| REVENUE PERFORMANCE BY BUSINESS SEGMENT | |
| ASPEK PEMASARAN | 191 |
| MARKETING ASPECTS | |
| PANGSA PASAR | 192 |
| MARKET SHARE | |

| | |
|---|------------|
| TINJAUAN KEUANGAN | 192 |
| FINANCIAL REVIEW | |
| STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN | 194 |
| INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND ADHERENCE TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS | |
| KINERJA KEUANGAN | 195 |
| FINANCIAL PERFORMANCE | |
| KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG | 213 |
| ABILITY TO PAY DEBT AND ACCOUNT RECEIVABLE COLLECTIBILITY | |
| KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG | 213 |
| ABILITY TO PAY DEBT | |
| STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL | 217 |
| CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE | |
| KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERSEROAN | 217 |
| MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE OF THE CORPORATION | |
| STRUKTUR MODAL PERSEROAN | 218 |
| CAPITAL STRUCTURE OF THE CORPORATION | |
| PENDANAAN PROYEK MRT JAKARTA | 218 |
| MRT JAKARTA PROJECT FUNDING | |
| IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL | 219 |
| MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT | |
| INVESTASI BARANG MODAL | 220 |
| CAPITAL GOODS INVESTMENT | |
| PENCAPAIAN TARGET/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021 | 221 |
| TARGET ACHIEVEMENT/BUDGET ABSORPTION IN 2020 AND PROJECTION FOR 2021 | |
| KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN | 222 |
| DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION | |
| DASAR KEBIJAKAN TERKAIT DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA | 222 |
| BASIC POLICIES REGARDING DIVIDEND AND ITS DISTRIBUTION | |
| INFORMASI TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI KEPADA PEMEGANG SAHAM | 223 |
| INFORMATION CONCERNING CASH DIVIDEND DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS | |
| INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP) | 223 |
| INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP) | |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM | 223 | INFORMASI PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN | 230 |
| <i>INFORMATION CONCERNING THE REALIZATION OF THE USAGE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING</i> | | <i>INFORMATION CONCERNING AMENDMENTS OF LAWS AND REGULATIONS THAT AFFECT CORPORATE</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL | 224 | INFORMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN | 230 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING</i> | | <i>INFORMATION CONCERNING CHANGES OF ACCOUNTING POLICIES IMPLEMENTED BY THE CORPORATION</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI | 224 | ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI BAGI NEGARA | 231 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENT</i> | | <i>TAX ASPECTS AND CONTRIBUTION FOR THE COUNTRY</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI EKSPANSI | 224 | INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA | 232 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING EXPANSION</i> | | <i>INFORMATION OF BUSINESS CONTINUITY</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI DIVESTASI | 224 | STRATEGI MENJAGA KELANGSUNGAN USAHA | 234 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING DIVESTMENT</i> | | <i>STRATEGY TO MAINTAIN BUSINESS CONTINUITY</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI PENGGABUNGAN USAHA | 224 | PROSPEK USAHA TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS | 238 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING MERGER</i> | | <i>BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIC PLANS FOR 2021</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI AKUISISI | 225 | PROSPEK USAHA TAHUN 2021 | 238 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING ACQUISITION</i> | | <i>BUSINESS PROSPECTS IN 2021</i> | |
| INFORMASI MATERIAL MENGENAI RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL | 225 | RENCANA STRATEGI | 239 |
| <i>MATERIAL INFORMATION CONCERNING DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING</i> | | <i>STRATEGIC PLANS</i> | |
| INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI | 225 | INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN | 245 |
| <i>INFORMATION CONCERNING MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATIONS</i> | | <i>MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRED AFTER THE DATE OF ACCOUNTING REPORTS</i> | |
| KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI | 225 | | |
| <i>POLICIES ON RELATED PARTIES</i> | | | |
| NAMA PIHAK BERTRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN AFILIASI, SIFAT TRANSAKSI, SERTA ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI | 226 | | |
| <i>NAMES OF TRANSACTING PARTIES, NATURE OF AFFILIATION, NATURE OF TRANSACTIONS, AND REASONS FOR TRANSACTIONS</i> | | | |
| PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PERSEROAN TERKAIT REVIEW ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI | 227 | | |
| <i>EXPLANATION CONCERNING CORPORATE POLICIES REGARDING THE REVIEW OF TRANSACTION FAIRNESS</i> | | | |
| SALDO DAN REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI | 227 | | |
| <i>BALANCE AND REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS</i> | | | |
| INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI | 229 | | |
| <i>FINANCIAL INFORMATION BEARING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS</i> | | | |



TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

246

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 248

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

DASAR PENERAPAN DAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 248

FOUNDATION FOR IMPLEMENTATION AND PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 249

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2020 250

DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENT OF GCG IN 2020

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 253

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

STRUKTUR PERANGKAT TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 253

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 254

GOOD CORPORATE GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 255

DISSEMINATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 256

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 256

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DEWAN KOMISARIS 272

BOARD OF COMMISSIONERS

DIREKSI 289

BOARD OF DIRECTORS

TUGAS DAN KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, SERTA HAK DIREKSI 294

DUTIES AND OBLIGATIONS, RESPONSIBILITIES, AUTHORITIES, AND RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 302

SCOPE OF DELEGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 312

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI 315

DISCLOSURE OF AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, AND ULTIMATE/CONTROLLING SHAREHOLDERS

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 316

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 317

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PENILAIAN KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 318

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 321

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 322

REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 322

PROPOSAL PROCEDURES TO THE DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020 323

UNDERLYING POLICIES CONCERNING THE INDICATORS AND DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2020

TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020 326

TRANSPARENCY OF THE REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2020

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI 327

THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

RAPAT DEWAN KOMISARIS 327

THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| RAPAT GABUNGAN: RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENDUNDANG DIREKSI <i>JOINT MEETING: BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING INVITING THE BOARD OF DIRECTORS</i> | 331 | PIAGAM AUDIT INTERNAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB <i>INTERNAL AUDIT CHARTER: GUIDELINES AND RULES</i> | 418 |
| RAPAT DIREKSI <i>THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING</i> | 335 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDIT INTERNAL <i>COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT</i> | 419 |
| ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS <i>SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</i> | 347 | LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS INTERNAL AUDIT TAHUN 2020 <i>BRIEF REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF DUTIES OF INTERNAL AUDIT IN 2020</i> | 421 |
| SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS <i>SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</i> | 347 | AUDIT EKSTERNAL <i>EXTERNAL AUDIT</i> | 422 |
| KEBIJAKAN REMUNERASI <i>REMUNERATION POLICY</i> | 350 | KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA <i>COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS</i> | 422 |
| PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS <i>COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</i> | 350 | PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT <i>EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS</i> | 422 |
| LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020 <i>REPORTS ON THE DELIVERY OF DUTIES AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020</i> | 350 | MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK <i>MECHANISM TO APPOINT A PUBLIC ACCOUNTANT</i> | 424 |
| KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI <i>REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE</i> | 352 | DAFTAR AKUNTAN PUBLIK <i>LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS</i> | 425 |
| KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> | 352 | SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>INTERNAL CONTROL SYSTEM</i> | 428 |
| KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUSAHAAN <i>HUMAN CAPITAL AND BUSINESS COMMITTEE</i> | 364 | PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>GUIDELINES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM</i> | 428 |
| KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI <i>RISK & SECURITY MONITORING COMMITTEE</i> | 379 | PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUP PERSEROAN <i>IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITHIN THE CORPORATION</i> | 429 |
| ORGAN PENUNJANG DIREKSI <i>SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS</i> | 392 | PENGENDALIAN ATAS ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK KEUANGAN <i>CONTROL OVER OPERATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS</i> | 431 |
| KOMITE MANAJEMEN RISIKO <i>RISK MANAGEMENT COMMITTEE</i> | 393 | PENILAIAN, EVALUASI, DAN PERNYATAAN PENGENDALIAN INTERNAL <i>ASSESSMENT, EVALUATION, AND STATEMENT OF INTERNAL CONTROL</i> | 431 |
| SEKRETARIS PERUSAHAAN <i>CORPORATE SECRETARY</i> | 395 | PROSES DAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2020 <i>PROCESS AND RESULTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION IN 2020</i> | 433 |
| CORPORATE STRATEGY <i>CORPORATE STRATEGY</i> | 402 | MANAJEMEN RISIKO <i>RISK MANAGEMENT</i> | 435 |
| DIVISI RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE <i>RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE DIVISION</i> | 405 | LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN <i>BACKGROUND AND OBJECTIVES OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE RISK MANAGEMENT</i> | 437 |
| AUDIT INTERNAL <i>INTERNAL AUDIT</i> | 414 | PETA JALAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN <i>ROADMAP OF THE CORPORATE RISK MANAGEMENT</i> | 437 |
| PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL <i>THE PARTY THAT APPOINTS AND DISMISSES THE HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION</i> | 414 | KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN <i>CORPORATE RISK MANAGEMENT POLICY</i> | 439 |
| PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL <i>PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION</i> | 414 | IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN USAHA PERSEROAN <i>IMPLEMENTATION OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT OF THE CORPORATION</i> | 444 |
| STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT <i>ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT</i> | 416 | | |
| PERSYARATAN KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL <i>PROFESSIONAL SKILL AND ACCURACY REQUIREMENTS</i> | 416 | | |

| | | | |
|--|-----|--|------------|
| EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN <i>EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CORPORATE RISK MANAGEMENT SYSTEM</i> | 450 | PENGENDALIAN GRATIFIKASI <i>GRATIFICATION CONTROL</i> | 490 |
| JENIS-JENIS RISIKO PERSEROAN TAHUN 2020 DAN PENGELOLAANNYA <i>TYPES OF CORPORATE RISKS IN 2020 AND THE MANAGEMENT</i> | 452 | INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK <i>INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES</i> | 491 |
| PENILAIAN KINERJA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <i>PERFORMANCE ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION</i> | 460 | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) <i>REPORT OF STATE OFFICIALS WEALTH (LHKPN)</i> | 491 |
| KEPATUHAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES</i> | 461 | SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> | 493 |
| PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH BPKP <i>ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION BY BPKP</i> | 461 | TRANSPARANSI PRAKTIK TATA KELOLA YANG TIDAK BAIK <i>TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES</i> | 502 |
| PROSES DAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PERSEROAN TAHUN BUKU 2020 <i>PROCESS AND RESULTS OF GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT IN FISCAL YEAR 2020</i> | 462 | PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN <i>IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY</i> | 503 |
| PENILAIAN INDEX PERSEPSI TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX ASSESSMENT</i> | 467 | PERMASALAHAN HUKUM <i>LEGAL ISSUES</i> | 503 |
| PERKEMBANGAN NILAI CGPI <i>DEVELOPMENT OF CGPI SCORE</i> | 471 | PENGUNGKAPAN PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>DISCLOSURE OF CASES FACED BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS</i> | 505 |
| AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN <i>CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS</i> | 471 | PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT <i>DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES</i> | 505 |
| TATA KELOLA INFORMASI DAN AKSES DATA PERSEROAN UNTUK PIHAK EKSTERNAL <i>CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS GOVERNANCE FOR EXTERNAL PARTIES</i> | 472 | PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM <i>IMPORTANT MATTERS OUTSIDE LEGAL ASPECTS</i> | 505 |
| TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) <i>INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) GOVERNANCE</i> | 476 | KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY</i> | 506 |
| KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN TIK <i>ICT POLICIES AND INSTITUTION</i> | 477 | KINERJA PENGADAAN TAHUN 2020 <i>PROCUREMENT PERFORMANCE IN 2020</i> | 507 |
| PEMBIAYAAN TIK <i>ICT FINANCING</i> | 479 | | |
| PENERAPAN TIK DI LINGKUP PERSEROAN <i>ICT IMPLEMENTATION ACROSS THE COMPANY</i> | 480 | | |
| ETIKA PENYEBARAN INFORMASI NON-PUBLIK <i>ETHICS OF NON-PUBLIC INFORMATION DISSEMINATION</i> | 484 | | |
| DUKUNGAN PADA KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH <i>SUPPORTS FOR WORK-FROM-HOME POLICY</i> | 484 | | |
| PEMANTAUAN DAN EVALUASI TIK <i>ICT MONITORING AND EVALUATION</i> | 485 | | |
| BUDAYA ANTI KORUPSI <i>ANTI-CORRUPTION CULTURE</i> | 487 | | |
| PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU <i>CODE OF CONDUCT</i> | 488 | | |
| | | TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | 508 |
| | | KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN <i>SUSTAINABILITY POLICY AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE</i> | 510 |
| | | KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN <i>SUSTAINABILITY POLICY</i> | 511 |



| | | | |
|---|-----|---|-----|
| PEMANGKU KEPENTINGAN TERDAMPAK DAN/ATAU BERPENGARUH PADA KEGIATAN PERSEROAN <i>IMPACTED AND/OR INFLUENTIAL STAKEHOLDERS TO THE CORPORATE ACTIVITIES</i> | 513 | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KUALITAS PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA (LAYANAN BERMUTU) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING PROVISION OF QUALITY GOODS AND SERVICES TO CUSTOMERS AND PARTNERS (QUALITY SERVICE)</i> | 535 |
| TATA KELOLA KINERJA KEBERLANJUTAN <i>SUSTAINABILITY PERFORMANCE GOVERNANCE</i> | 515 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SELAMA PANDEMI <i>COMMUNITY SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT DURING THE PANDEMIC</i> | 537 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PEMENUHAN OPERASI YANG ADIL <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING FAIR OPERATIONS</i> | 516 | SURVEI KEPUASAN PELANGGAN <i>CUSTOMER SATISFACTION SURVEY</i> | 539 |
| PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS <i>FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF VULNERABLE GROUP AND PEOPLE WITH DISABILITIES</i> | 516 | MEKANISME PENGADUAN TERKAIT PRODUK/LAYANAN/ JASA PERSEROAN DAN PENANGANANNYA <i>COMPLAINT MECHANISM CONCERNING CORPORATE PRODUCTS/SERVICES AND THE HANDLING</i> | 540 |
| PEMENUHAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA <i>FULFILLMENT OF RIGHTS AND WELFARE OF THE EMPLOYEES</i> | 517 | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT</i> | 541 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING HUMAN RIGHTS FULFILLMENT</i> | 518 | PENERAPAN PEKERJA LOKAL DAN DUKUNGAN PADA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL <i>ABSORPTION OF LOCAL WORKERS AND SUPPORT FOR NATIONAL ECONOMIC RECOVERY</i> | 541 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING THE ENVIRONMENT</i> | 519 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT <i>COMMUNITY EMPOWERMENT</i> | 542 |
| PENANAMAN KEMBALI POHON DI AREA TERDAMPAK <i>REPLANTING TREES IN IMPACTED AREAS</i> | 519 | MEKANISME PENGADUAN PUBLIK <i>PUBLIC COMPLAINT MECHANISM</i> | 552 |
| KONSERVASI AIR BERSIH DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH <i>CLEAN WATER CONSERVATION AND LIQUID WASTE MANAGEMENT</i> | 520 | | |
| PENGELOLAAN ENERGI DAN PENGENDALIAN EMISI <i>ENERGY MANAGEMENT AND EMISSION CONTROL</i> | 522 | | |
| MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN <i>COMPLAINT MECHANISM CONCERNING ENVIRONMENTAL ISSUES</i> | 525 | | |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)</i> | 526 | | |
| KESETARAAN KESEMPATAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR DAN GENDER <i>EQUAL JOB OPPORTUNITIES, CAREER DEVELOPMENT, AND GENDER EQUALITY</i> | 526 | | |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA <i>OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH</i> | 529 | | |
| AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA <i>OCCUPATIONAL SAFETY AUDIT</i> | 534 | | |
| MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN; SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) <i>COMPLAINT MECHANISM CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) ISSUES</i> | 535 | | |

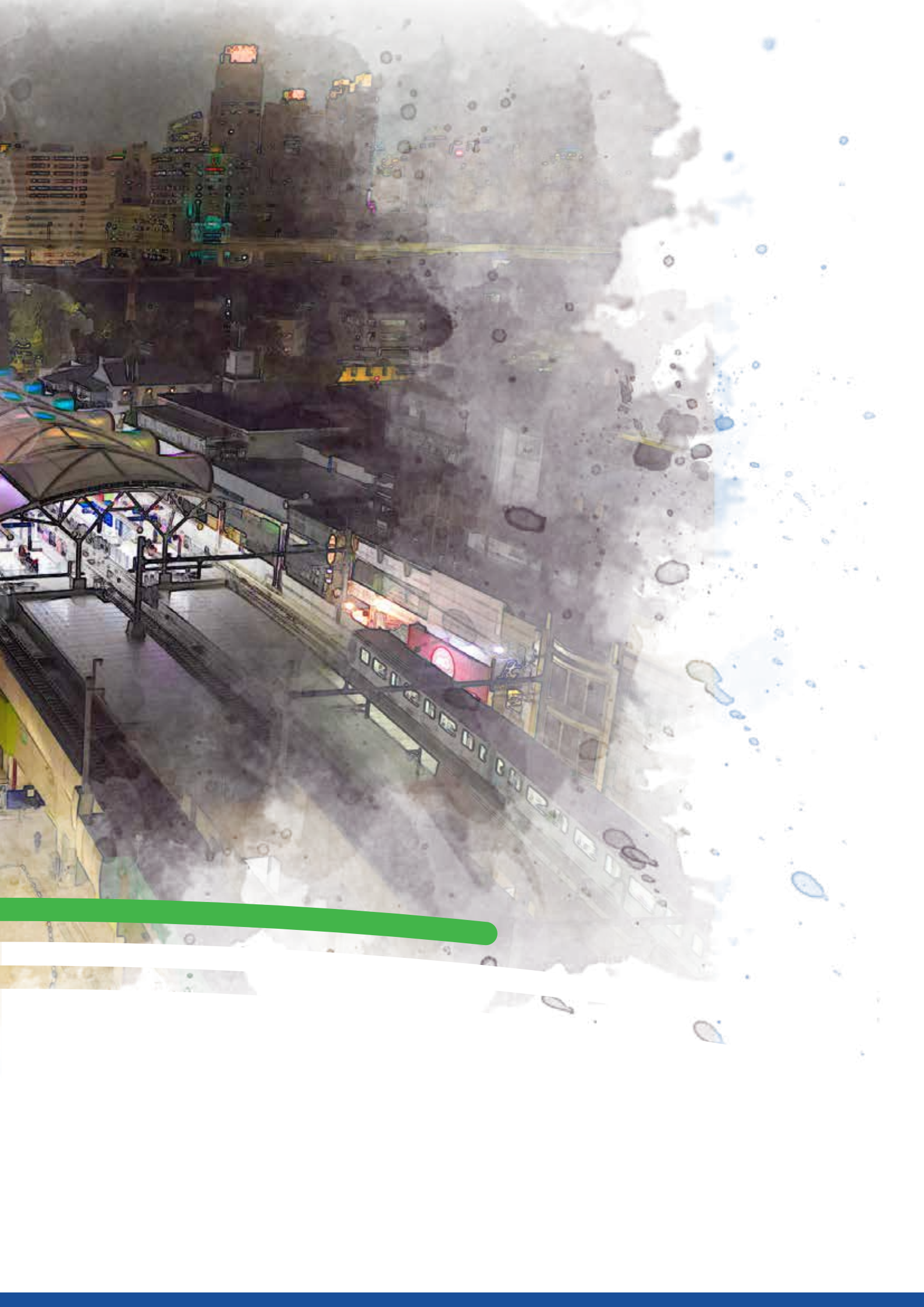
**LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 2020
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT 2020**

584



02 LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





- 1 **RUKIJO**
Komisaris
Commissioner
- 2 **ZULFIKRI**
Komisaris
Commissioner
- 3 **MUKHTASOR**
Komisaris
Commissioner
- 4 **MUHAMMAD SYAUGI**
Komisaris Utama
President Commissioner
- 5 **ADNAN PANDU PRAJA**
Komisaris
Commissioner





Ke MRT
To MRT

Pergerakan Teras
Platform Movement

3M

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report



Muhammad Syaugi
Komisaris Utama
President Commissioner



Ditengah pandemi COVID-19, peran pengawasan Dewan Komisaris mendukung kinerja operasi Direksi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan operasi kereta, melanjutkan pembangunan Fase 2 dengan memperhatikan protokol kesehatan di area konstruksi, mendorong inovasi bisnis non-tiket, serta membentuk anak usaha dan perusahaan patungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

During the COVID-19 Pandemic, the Board of Commissioners oversees and supports the Board of Director's performance by prioritising train operational safety and security, continuing Phase 2 development that strictly follows health protocols in the construction area, driving non-farebox business innovation, as well as establishing subsidiaries which can contribute added value to the Corporation.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.

Mengawali Laporan Dewan Komisaris, izinkan saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan syukur atas terbitnya Laporan Tahunan 2020 PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan kerja sama dan kerja keras semua komponen Perseroan. Melalui Laporan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pandangan Dewan Komisaris terhadap kinerja Perseroan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memahami, dinamika yang dihadapi pada tahun 2020 memang tidak mudah dan penuh tantangan. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, juga berpengaruh pada lini bisnis Perseroan. Dalam aspek pendapatan baik farebox (tiket) dan non-farebox, Perseroan mengalami penurunan. Ini terjadi karena jumlah pengguna jasa MRT Jakarta

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

As a preface of the Board of Commissioners' Report, on behalf of the Board of Commissioners please allow me to express our sincere congratulations for the publication of the 2020 Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda) through collaboration and hard work of every component of the Corporation. The Board of Commissioners leverages this Report to deliver our perspectives concerning the performance of the Board of Directors in managing the Corporation as an implementation of supervisory function.

The Board of Commissioners understands that the dynamics we faced in 2020 were not easy and particularly challenging. The COVID-19 pandemic that impacted the national economy also impacted the business activities of the Corporation. The Corporation recorded a decrease in both farebox and non-farebox revenue. It was caused by the decreased number of MRT Jakarta passengers

yang berkurang dan semua mitra bisnis *non-farebox* melakukan renegotiasi pembayaran kontrak. Kondisi-kondisi ini membuat pencapaian target Perseroan menjadi lebih menantang, namun dengan strategi Perseroan untuk membangun ketangguhan dan mendorong inovasi, situasi menantang ini dapat terlewati dengan baik.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dan Perseroan dalam menghadapi tantangan ini dengan berbagai inisiatif yang dicetuskan sehingga secara umum target kinerja Perseroan dapat tercapai. Sejalan dengan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melalui *Annual Report* ini menyampaikan apresiasi terhadap hal-hal baik yang telah dicapai Perseroan dan beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan yang dilakukan Direksi dapat berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pengawasan di antara Dewan Komisaris sebagai berikut:

| Muhammad Syaugi | Rukijo | Zulfikri | Adnan Pandu Praja | Mukhtasor |
|---|--|---|--|---|
| Pengawasan Menyeluruh <i>Comprehensive Supervision</i> | Bidang Keuangan dan Anggaran Ketua Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan <i>Finance and Budget Sector, Chairman of the Human Capital and Business Committee</i> | Bidang Operasi & Pemeliharaan Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Operational and Maintenance Sector, Chairman of Risk & Security Monitoring Committee</i> | Bidang Konstruksi Ketua Komite Audit <i>Construction Sector, Chairman of Audit Committee</i> | Bidang Bisnis & Pengembangan Usaha <i>Business & Business Development Sector</i> |

Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Kebijakan Strategis Perseroan yang Dilakukan Direksi

Secara umum, kinerja Direksi mengelola Perusahaan selama tahun 2020 baik dan mampu memenuhi mayoritas target-target yang ditetapkan Pemegang Saham. Direksi telah menetapkan fondasi yang kuat untuk membangun ketangguhan Perseroan melalui konsistensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga proses bisnis tetap berintegritas dan sesuai Peraturan Perundangan. Dalam aspek bisnis, Direksi juga mampu mengoptimalkan pendapatan non-tiket di tengah penurunan pendapatan tiket, melalui inovasi strategi pendapatan di antaranya optimalisasi *digital asset*, pemasangan media iklan luar ruang, serta negosiasi-negosiasi skema pembayaran dan *benefit* dengan mitra bisnis. Jajaran Direksi dengan pengawasan dan masukan-masukan dari Dewan Komisaris juga melakukan berbagai inisiatif penghematan biaya dengan tetap memperhatikan keandalan dan

and the renegotiation of the contract payment by all non-farebox business partners. These conditions caused the achievement of the Corporation target to be more challenging, but, through the Corporation strategy in building resiliency and encouraging innovation, the challenges can be handled well.

The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in overcoming the challenges through various initiatives, so that, in general, the Corporation performance target can be achieved. Following our supervisory functions, through this Report the Board of Commissioners expresses our sincere appreciations of the positive achievements for the Corporation as well as some areas of improvement in the years to come.

For effective implementation of the Board of Commissioner's supervisory functions over the implementation of Corporation strategic policies by the Board of Directors, the Board of Commissioners distributes the supervisory roles and responsibilities among its members as follows:

The Board of Commissioners' Supervision over Strategic Policies Carried Out by the Board of Directors

In general, the Board of Directors delivered a good performance in managing the Corporation throughout 2020 and can fully achieve most targets as determined by the Shareholders. The Board of Directors has put in place strong foundations to develop Corporation resiliency through the consistent implementation of good corporate governance and maintaining the integrity of business processes following the prevailing Laws and Regulations. In terms of business aspects, the Board of Directors was able to optimise non-farebox revenue amidst the decreased farebox revenue through digital asset optimisation, installation of outdoor advertising media, and negotiations of payment and benefit schemes with business partners. The Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners carried out various cost efficiency initiatives without disregarding the reliability and safety

keamanan operasi kereta. Inisiatif penghematan biaya ini dilaporkan secara rutin di dalam rapat bulanan Dewan Komisaris bersama Direksi dan dievaluasi terus menerus keefektifannya. Untuk program kerja dengan anggaran besar, Kami mengapresiasi langkah Direksi yang melaporkannya kepada Dewan Komisaris sebelum mengambil keputusan dalam menjalankan, sehingga memastikan setiap pengeluaran Perseroan tepat guna bagi kepentingan kualitas operasi dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan.

Dewan Komisaris memberi masukan untuk perbaikan-perbaikan terkait kinerja keuangan ke depan di mana Direksi dapat mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan keuangan dan pengawasan pelaksanaannya. Untuk itu, Dewan Komisaris telah mendorong Direksi mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui sistem *dashboard*, sehingga unit kerja dapat diawasi dengan mudah dalam melaksanakan program kerja dan menyerap pengelolaan anggaran sesuai perencanaannya. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk mengoptimalkan format laporan keuangan, sehingga informasi kritical terkait keuangan lebih mudah terbaca khususnya oleh Pemegang Saham. Ke depannya untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi, Dewan Komisaris mendorong Direksi menerapkan pakta integritas bagi unit kerja dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta ditetapkan prosedur dan siklus yang jelas dalam merevisi RKA.

Dari sisi operasional, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi menyesuaikan operasi MRT Jakarta dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di area operasi kereta, baik melalui penjadwalan kereta, pembatasan jumlah pengguna jasa, hingga pengelolaan kerumunan di stasiun dan dalam gerbong kereta. Langkah penyesuaian operasional, penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi rutin kepada pengguna jasa, karyawan maupun masyarakat, telah dilaksanakan secara maksimal guna mencegah timbulnya penyebaran pandemi di area operasional MRT Jakarta dan menjaga keselamatan dan keamanan, yang berakibat tetap percayanya pengguna jasa akan kualitas pelayanan Perseroan. Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi setiap bulannya untuk menjadikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan pengguna jasa serta karyawan menjadi perhatian utama Direksi dengan terus menegakkan kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

of train operations. Such cost efficiency initiatives are reported frequently at the monthly joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors for constant evaluation of effectiveness. As for work programs with big-budget, We appreciate the measures taken by the Board of Director to report to the Board of Commissioners before making decisions to carry on with the programs to ensure that all expenses of the Corporation are appropriate for operational excellence.

The Board of Commissioners would like to advise some areas of improvement for financial performance in the future, so that the Board of Directors can optimise the financial planning and its implementation supervision. Therefore, the Board of Commissioners has encouraged the Board of Directors to optimise the supervisory roles through a dashboard system to control the work units in carrying out the work program and fulfilling the budget absorption in line with the planning. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to optimise the format of the financial statements, so that critical financial information can be detected more easily especially by Shareholders. In the future, to improve the implementation of integrated and good corporate governance, the Board of Commissioners encourage the Board of Directors to implement an integrity pact for the work units in implementing their Work Plan and Budget (RKA) and the establishment of clear procedures and cycles in revising the RKA.

As for the operational aspects, the Board of Commissioners appreciates the measures taken by the Board of Directors in adjusting the operations of MRT Jakarta with the large-scale social restriction (PSBB) policy to prevent the transmission of COVID-19 within the operating areas, including train schedule adjustment, passenger limitation, and crowd control in the station and train cars. Operational adjustment measures, implementation of health protocols, and frequent dissemination to passengers, employees, and the wider public, have been implemented optimally to prevent the virus transmission within the operational areas of MRT Jakarta and to ensure safety and security that will cause the passengers to trust the service quality of the Corporation. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors every month to prioritise the security, safety, and health of the passengers and employees as the main concern of the Board of Directors by enforcing PSBB policies as implemented by the Government of DKI Jakarta.

Dewan Komisaris melihat hal yang dapat dioptimalkan di tahun mendatang untuk aspek operasi adalah pada aspek keamanan melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan TNI maupun Polri. Melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan aparat TNI dan Polri, maka risiko-risiko kejadian yang membahayakan pengguna jasa maupun karyawan di area operasi dapat diminimalisir. Selain kerja sama eksternal, ada beberapa faktor internal yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan aspek keamanan, diantaranya mendorong peningkatan *service level* dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), penggunaan fasilitas mesin X-Ray sebelum masuk area stasiun, hingga penambahan CCTV di area-area rawan. Inisiatif-inisiatif ini akan mengurungkan niat buruk dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jasa maupun karyawan Perseroan.

Dewan Komisaris mengapresiasi strategi Perseroan dalam membentuk satu anak perusahaan dan dua perusahaan patungan di tahun 2020, yang diharapkan dapat memberi nilai lebih pada Perseroan dalam hal finansial, pelayanan kepada masyarakat, dan perwujudan kota Jakarta yang lebih baik dalam pengelolaan transportasi publik. Ketiga Perusahaan yang dibentuk ini sudah melalui kajian bisnis dan keuangan yang matang, sudah disampaikan dan dikonsultasikan juga kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, sehingga dipastikan pembentukannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan peta jalan usaha Perseroan. Dewan Komisaris berpesan agar 1 (satu) anak usaha dan 2 (dua) perusahaan patungan ini secara rutin diawasi oleh manajemen untuk memastikan strategi mereka selalu selaras dengan Perseroan sebagai Perusahaan induk dan dapat dengan cepat dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan juga publik.

Dalam hal pengelolaan sosial, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah yang diambil Direksi untuk turut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan dan menegakkan protokol kesehatan pada area-area operasi MRT Jakarta. Terkait pengelolaan lingkungan, langkah Direksi untuk mendorong inovasi melalui studi kelayakan penggunaan energi terbarukan dengan menggunakan tenaga surya pada area stasiun *elevated*, patut diapresiasi dan didukung. Dewan Komisaris berharap, inisiatif energi terbarukan dapat direalisasikan oleh Perseroan.

The Board of Commissioners assesses that areas for optimisation for operational aspects include the safety aspects through improving the coordination and collaboration with Indonesian Armed Forces and National Police. Coordination and collaboration improvement with the Army and the Police would minimise the risks of dangerous events for the passengers and employees within the operational areas. Apart from external collaboration, there are various internal factors to be improved to increase safety aspects, such as encouraging the utilisation of service level from the Security Industry Association (BUJP), utilisation of X-Ray machines before entering the stations, and installation of additional security cameras at prone areas. Such initiatives will prevent negative intentions of irresponsible parties that may disrupt the safety and comfort of passengers and employees of the Corporation.

The Board of Commissioners appreciates the Corporation strategy in establishing one subsidiary and two joint ventures in 2020, which is expected to add value to the Corporation in terms of finance, service for the public, and realisation of Jakarta as a better city in public transportation management. The three established Corporations have undergone thorough business and financial studies, and the establishment has been notified to and consulted with the Board of Commissioners and the Shareholders, hence the establishment adheres to the prevailing laws and regulation and aligns with the business roadmap of the Corporation. The Board of Commissioners expects that 1 (one) subsidiary and 2 (two) joint ventures are frequently monitored by the management to ensure strategy alignment with the Corporation as the Holding Corporation and to quickly add value to the Corporation and the public.

In terms of social management, the Board of Commissioners appreciates the measures taken by the Board of Directors in assisting the Government of DKI Jakarta Province in implementing and enforcing health protocols at MRT Jakarta operational areas. In terms of environmental management, the efforts taken by the Board of Directors to encourage innovation by implementing feasibility study for the utilisation of renewable energy using solar energy at elevated stations must be appreciated and supported. The Board of Commissioners expects that the renewable energy initiative can be realised by the Corporation as soon as possible.

Dewan Komisaris menilai ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan sosial dan lingkungan, terutama untuk mendukung upaya bersama menghadapi perubahan iklim. Direksi dapat mengoptimalkan penggunaan listrik termasuk menyediakan cadangan untuk operasional MRT Jakarta, dan saat bersamaan meningkatkan efisiensi penggunaan listrik untuk kegiatan pendukung. Dewan Komisaris juga mengingatkan untuk pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) tetap memperhatikan ruang terbuka hijau guna mendukung daya serap karbon melalui keberadaan tanaman.

Dewan Komisaris melihat interaksi Perseroan dengan lingkungan sekitar stasiun, depo, maupun fasilitas lain sudah baik. Perhatian pada lingkungan sosial ini, terutama pada warga yang kurang mampu untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Direksi harus dapat memaksimalkan keberadaan MRT Jakarta sebagai daya dorong ekonomi warga, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini selaras dengan perhatian Gubernur DKI Jakarta agar di stasiun MRT Jakarta memberi ruang pada bisnis UMKM. Selain itu, Direksi dapat meningkatkan pelibatan warga sekitar stasiun dalam pengelolaan MRT Jakarta, baik melalui pemberian kesempatan sebagai karyawan maupun koordinasi rutin dengan warga untuk menerima masukan dan umpan balik terhadap pengelolaan operasi.

Dewan Komisaris mengingatkan agar Direksi dapat terus menjaga keselarasan kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, kehadiran MRT Jakarta tidak hanya menjadi solusi bagi kebutuhan transportasi massal yang representatif dan menghadirkan gaya hidup di Jakarta, tapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Pandangan Dewan Komisaris atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi

Dewan Komisaris menilai, prospek Perseroan pada tahun-tahun mendatang masih dipengaruhi pandemi COVID-19, meski perlahan akan membaik. Sebagai gambaran, ketika MRT Jakarta beroperasi pada tahun 2019, manajemen memiliki kekhawatiran akan minat masyarakat menggunakan jasa MRT Jakarta, namun dengan sosialisasi dan kerja keras dari Perseroan dalam mendorong penggunaan kereta dengan keunggulan pada keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya terbukti antusiasme masyarakat melebihi ekspektasi.

The Board of Commissioners assesses that there are some areas for optimisation for social and environmental management, especially in overcoming climate change. The Board of Directors has to optimise electricity usage including providing reserve energy for the operations of MRT Jakarta, and at the same time increase the efficiency of electricity usage for supporting activities. The Board of Commissioners also expects that the development of Transit-Oriented Development (TOD) areas considers green spaces to increase biological carbon sequestration capacity.

The Board of Commissioners observes good interactions between the Corporation and the environment and society around the stations, depot, and other facilities. Such concerns for the social and environmental issues, especially for the less fortunate community, must be maintained and improved. The Board of Directors must be able to maximise the presence of MRT Jakarta as a way to strengthen the economy of the community, especially the micro, small, and medium enterprises (MSMEs). It is aligned with the expectation of the Governor of DKI Jakarta concerning the presence of MSMEs around MRT Jakarta stations. Also, the Board of Directors must optimize the involvement of the community surrounding the stations in the management of MRT Jakarta, both through the provision of opportunities to be recruited as employees and frequent coordination with the community to receive inputs and feedbacks considering the operational management.

The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to maintain the alignment of environmental and social development performance with the Sustainable Development Goals. Therefore, the presence of MRT Jakarta does not only act as a solution for the needs of a representative mass transit that shapes the lifestyle in Jakarta, but also supports the improvement of the environment and the welfare of the society.

The Board of Commissioners' Opinions on the Business Prospects Developed by the Board of Directors

The Board of Commissioners evaluates that the prospects of the Corporation for the years to come will still be influenced by the COVID-19 pandemic, despite the gradual improvement. To illustrate, upon the operations of MRT Jakarta in 2019, the management had relatively low expectation concerning the interest of the public to use MRT Jakarta, but with dissemination and determination of the Corporation to encourage the usage of the train with excellent security, comfort, punctuality, and cost efficiency, public's enthusiasm exceeded the expectation.

Ini pula yang akan terulang pascapandemi COVID-19. Pada semester satu tahun 2021 saat vaksinasi mulai dilaksanakan Pemerintah, bisnis masih akan berjalan perlahan. Namun pada semester dua 2021, diharapkan bisnis mulai bangkit dan terjadi pertumbuhan pengguna jasa kereta yang selanjutnya kembali meningkatkan pendapatan Perseroan. Pada tahun 2021, diharapkan entitas anak perusahaan maupun perusahaan patungan di bawah MRT Jakarta juga sudah dapat melakukan proses bisnis secara mandiri, dan dapat berkontribusi pada pendapatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris menilai Direksi mampu mewujudkan tantangan pengguna jasa MRT Jakarta pada tahun 2021 akan tumbuh signifikan sebesar 138% menjadi 65.000 orang per hari, dibanding tahun 2020. Bila hal ini terealisasi, maka akan berpengaruh pada pendapatan tiket, dan mendorong kinerja positif pendapatan non-tiket. Pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi juga ditargetkan untuk keberlanjutan pelaksanaan proyek MRT-Jakarta Fase 2, pembangunan dan pengelolaan KBT, hingga studi proyek fase-fase berikutnya. Dewan Komisaris siap mengawasi dan mendukung Direksi serta manajemen untuk bekerja keras merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan ini, agar kinerja Perseroan sesuai dengan ekspektasi Pemegang Saham dan sejalan dengan Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang PT MRT Jakarta (Perseroda).

Pandangan atas Perkembangan Penerapan Tata Kelola

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian Direksi memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan mampu mempertahankan sertifikasi ISO Terintegrasi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Tentu saja ini akan mendorong Direksi dan manajemen untuk lebih konsisten lagi dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris berharap SMAP dapat diterapkan dengan konsisten di Perseroan dengan tidak menoleransi segala bentuk penyuapan, serta menerapkan prinsip 4 No's, yaitu *no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality*.

Perseroan juga dinilai telah memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan Dewan Komisaris mendorong agar komunikasi dan koordinasi dari *three lines model* Perseroan, yaitu antara unit kerja di lini depan, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi Internal Audit dapat berjalan lebih efektif lagi untuk tahun mendatang. Dewan Komisaris juga mendorong koordinasi intensif ketiga fungsi tersebut dengan Divisi Corporate

This scenario is likely to repeat post-COVID-19 pandemic. In the first half of 2021, upon the commencement of the vaccination program by the Government, businesses will slowly progress. However, in the second half of the year, businesses are expected to grow, and significant growth of passengers are expected as well, which may increase the revenue of the Corporation. In 2021, the subsidiary and joint ventures under the Corporation are expected to carry out the business processes independently and contribute to the operating revenues of the Corporation.

The Board of Commissioners assesses that it is fair for the Board of Directors to estimate significant growth of MRT Jakarta passengers in 2021 by 138% to be 65,000 daily passengers compared to 2020. If such estimation is realised, it would impact positively on the farebox revenue and drive positive performance of non-farebox revenue. Higher achievements targets are also set for the development of the Phase 2 MRT Jakarta project, TOD development and management, as well as study for the upcoming Phases. The Board of Commissioners is willing to monitor and support the Board of Directors and the management to work hard to realise such ambitious targets that have been set, so that the performance of the Corporation aligns with the Shareholders' expectation and the Business Roadmap: Long-Term Development Plan of PT MRT Jakarta (Perseroda).

Opinions on the Development of Governance Implementation

The Board of Commissioners appreciates the achievement of the Board of Directors in obtaining the Certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System and in maintaining the Integrated ISO certification (ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001). It is expected to encourage the Board of Directors and the management to improve the corporate governance implementation. The Board of Commissioners expects that an Anti-Bribery Management System is implemented consistently in the Corporation by not tolerating any kind of bribery and implements the principles of 4 No's, namely no bribery, no kickback, no gift, and no luxurious hospitality.

The Corporation is considered to have a strong commitment to GCG implementation, hence encouraging the Board of Commissioners to provide inputs for effective establishment of Corporate three-lines-model communication and coordination among frontline work units, Risk Management Division, and Internal Audit Division. The Board of Commissioners also encourages intensive coordination among the three functions with the

Secretary dan Komite-Komite Dewan Komisaris untuk semakin menguatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perseroan.

Dewan Komisaris juga mendorong pembaharuan dari dokumen-dokumen tata kelola perusahaan yang baik Perseroan, seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kode Etik dan Perilaku, Piagam Komite, hingga Panduan Benturan Kepentingan. Pembaharuan akan menjadikan dokumen-dokumen tersebut sejalan dengan *best practice* pengelolaan BUMN mapan, dapat menjawab semua temuan-temuan maupun masukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga menyiapkan Perseroan menjadi perusahaan terbuka di masa mendatang.

Pandangan Dewan Komisaris atas Pengelolaan Whistle Blowing System

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas keseriusan Direksi dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang diterima melalui kanal *Whistle Blowing System* (WBS), serta keputusan pengelolaan sistem penerimaan laporan WBS yang dikelola oleh pihak independen untuk menjamin keamanan pelaporan. Direksi secara rutin pada rapat bulanan maupun melalui korespondensi tertulis melaporkan total laporan WBS yang masuk, isu yang sedang dilakukan investigasi, hingga kemajuan proses investigasi lanjut Perseroan terhadap setiap laporan yang diterima, hingga tindak lanjut Perseroan terhadap setiap aduan yang diterima.

Dewan Komisaris melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan WBS ke depannya, salah satunya adalah penguatan kompetensi unit kerja yang melakukan investigasi kasus. Proses investigasi yang komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang kuat dan selanjutnya membantu Direksi dalam mengambil keputusan yang tepat serta tegas terhadap kasus. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terbuka melibatkan pihak ketiga jika diperlukan investigasi yang lebih rumit atau membutuhkan independensi. Terakhir, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengawasi unit kerja agar proses investigasi kasus berjalan lebih cepat dan sigap terhadap perkembangan peristiwa.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memperluas fungsi masing-masing Komite Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian

Corporate Secretary Division and the Committees under the Board of Commissioners to strengthen the GCG of the Corporation.

The Board of Commissioners also encourages the update of GCG documents of the Corporation, such as Code of Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct, Committee Charter, and Guidelines for Conflicts of Interest. Such update will align the documents with current development and best practices at well-established SOEs as an answer to all findings and inputs from the Finance Development Supervisory Agency (BPKP) to prepare the Corporation as a public-listed Corporation in the future.

Opinions on Whistle Blowing System Management

The Board of Commissioners also appreciates the serious efforts of the Board of Directors in receiving and following up reports received through Whistleblowing System (WBS) and the decision to manage the WBS by an independent party to ensure the confidentiality of the reports. During the monthly meeting or through written correspondence, the Board of Directors frequently reports the total reports received, issues being investigated, the progress of the investigation, and follow-up of the Corporation for each report received.

The Board of Commissioners notices several points to be improved in the management of WBS in the future, one of which is competency development of the work unit that carries out the investigation. The investigation is a comprehensive process that results in a strong recommendation to assist the Board of Directors in making the appropriate and rigid decision concerning the case. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to be transparent in involving third parties whenever required for the more intricate investigation or investigation that requires independency. Finally, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to supervise the work unit so that case investigations can be carried out quickly in an agile manner.

Performance Assessment of the Committees under the Board of Commissioners

To optimise the implementation of a supervisory function, the Board of Commissioners extends the functions of each Committee under the Board of Commissioners to support the Board of Commissioners in carrying out supervision

masukannya bagi Direksi dan Manajemen. Saat ini, Dewan Komisaris memiliki tiga Komite, yakni Komite Audit yang diperluas fungsinya dari hanya mengawasi aspek audit dan keuangan, ditambah dengan pengawasan pada aspek konstruksi, operasi, serta teknologi informasi. Komite kedua adalah Komite Remunerasi yang diperluas fungsinya menjadi Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan, dimana pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi hanya terkait aspek remunerasi tetapi pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh. Aspek Pengusahaan adalah aspek pengawasan Komite yang baru terkait pemberian masukan untuk strategi pendapatan Perseroan baik pendapatan tiket maupun non-tiket. Ketiga, Komite Pemantau Risiko, yang diperluas fungsinya menjadi Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti, dimana fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada *Top Risk* Perseroan tapi juga kepada penerapan Manajemen Mutu (*Quality Management*) dan fungsi pengelolaan keamanan Perseroan.

Secara umum, kinerja Komite Komisaris di tahun 2020 sangat meningkat. Jumlah rapat internal Komite Komisaris dengan unit kerja diwajibkan menjadi minimal dua kali sebulan, Komite Komisaris juga wajib hadir dalam rapat bulanan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat-rapat lain lintas Komite sesuai dengan isu yang berkembang. Dengan demikian, setiap Komite setidaknya melakukan rapat tiga kali dalam setiap bulan, dan pada rapat-rapat itu Komite memberikan masukan-masukan berharga pada Dewan Komisaris, Direksi, maupun manajemen sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota Komite.

Secara lebih spesifik, pada tahun 2020, Komite Audit telah memberikan masukan dan umpan balik pada manajemen terkait pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) baik dari segi anggaran maupun program kerja, manajemen konstruksi dan penggunaan *Building Information Management*, operasi dan pemeliharaan, otomatisasi kereta, kebijakan pengadaan, kebijakan standarisasi akuntansi, transformasi digital, hingga pembuatan peta jalan teknologi informasi. Kemudian, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan telah memberi masukan dan umpan balik terkait manajemen talenta dan karir, *Human Resource Information System*, perhitungan kenaikan upah serta insentif kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi, pengelolaan proyek BUMD Academy, strategi renegotiasi kontrak dengan mitra bisnis, monetisasi aset digital, dan

and providing inputs for the Board of Directors and the Management. Currently, there are three Committees under the Board of Commissioners. The first committee is Audit Committee whose function is extended from overseeing audit and finance aspects to include overseeing construction, operations, and information technology aspects. The second committee is the Remuneration committee whose function is extended to be Human Capital and Business Capital, and whose supervisory duties does not only cover remuneration aspects, but also cover the overall supervision of human capital. Business Aspect is a recent innovation for supervisory aspects of the Committee that copes with providing inputs for Corporate revenue strategy, including farebox and non-farebox revenue. The last committee is Risk Monitoring Committee, whose function is extended to become Risk and Security Monitoring Committee, where the supervisory function does not only focus on Corporate Top Risks, but also includes Quality Management and Corporate security management.

In general, the performance of the Committees under the Board of Commissioners in 2020 improved significantly. The number of internal meetings of the Committees with the work units is required to be twice a month, and the Committees must also be present in the monthly joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and other cross-Committee meeting based on the current issues. Therefore, each Committee participates in at least three meetings every month, and at each meeting, the Committee delivers valuable inputs to the Board of Commissioners, Board of Directors, and the management following the expertise of each member of the Committee.

More specifically, in 2020, the Audit Committee has provided inputs and feedbacks to the management concerning the implementation of Corporate Work Plan and Budget (RKAP) from the standpoint of budgeting and work plan, construction management and utilisation of Building Information Management, operations and maintenance, train automation, procurement policy, accounting standardisation policies, digital transformation, and development of information technology roadmap. Then, the Human Capital and Business Committee has provided inputs and feedbacks concerning talent and career management, Human Resource Information System, calculation of salary raise and performance incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors, management of BUMD Academy project, contract renegotiation strategies with business partners,

mendorong dilakukannya survei kepuasan pelanggan. Terakhir, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti telah memberi masukan dan umpan balik terkait penilaian dan mitigasi dari *Top Risk* Perseroan, pelaksanaan manajemen mutu Perseroan, termasuk di dalamnya ISO terintegrasi dan sertifikasi ISO37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta manajemen keamanan khususnya di area operasi kereta.

Selama tahun 2020, tidak ada pergantian keanggotaan Dewan Komisaris. Hal ini menandakan kinerja Dewan Komisaris dinilai baik oleh Pemegang Saham. Kebersamaan yang terjalin selama ini juga telah membangun sistem kerja yang baik di antara anggota Dewan Komisaris, dibantu Komite Komisaris, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi dan manajemen dapat dijalankan dengan optimal.

Dewan Komisaris menyadari dengan banyaknya pencapaian yang sudah diraih Perseoran di tahun 2020, tentu masih ada ruang-ruang untuk peningkatan kinerja Perseroan di tahun mendatang. Tantangan yang semakin berat ini membutuhkan komitmen kinerja dari Direksi tentu didukung oleh pengawasan dan perhatian penuh dari setiap anggota Dewan Komisaris. Perseroan tidak hanya harus memperhatikan tantangan lingkup dalam negeri, tetapi juga secara global mengingat semakin kuatnya isu-isu terkait pengelolaan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST/ESG).

Dewan Komisaris berharap Direksi bersama manajemen, terus menjalin hubungan dengan Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan. Hubungan yang terjalin baik, akan memaksimalkan dukungan pada kinerja Direksi dan manajemen. Akhir kata, izinkan Dewan Komisaris mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi kesehatan bersama.

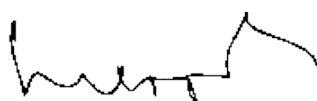
and digital asset monetisation, and encouraged the execution of customer satisfaction survey. Lastly, Risk and Security Monitoring Committee has provided inputs and feedbacks concerning the assessment and mitigation of Corporate Top Risks, implementation of Corporation quality management including integrated ISO and certification of ISO37001 Anti-Bribery Management System, and security management especially within train operating areas.

Throughout 2020, there were no changes to the membership of the Board of Commissioners. It reflects that the performance of the Board of Commissioners is considered excellent by the Shareholders. The collaboration fostered has built an excellent working system among members of the Board of Commissioners, assisted by the Committees, so that the supervisory function over the performance of the Board of Directors and the management can be executed optimally.

The Board of Commissioners realised that despite the plethora of achievements attained by the Corporation in 2020, there are still some areas of improvement for the Corporation performance in the years to come. The on going challenges require performance commitment of the Board of Directors, supported by the supervision and full attention from each member of the Board of Commissioners. The Corporation is not only concerned with domestic challenges, but also with global challenges considering the rising issues concerning environmental, social, and governance (ESG) management.

The Board of Commissioners expects that the Board of Directors and the management maintain the relationship with the Board of Commissioners and the stakeholders. A well-maintained relationship will maximise the support to the performance of the Board of Directors and the management. Lastly, please allow the Board of Commissioners to remind everyone to take good care of our health and obey health protocols by wearing mask, washing hands, and maintaining physical distancing.

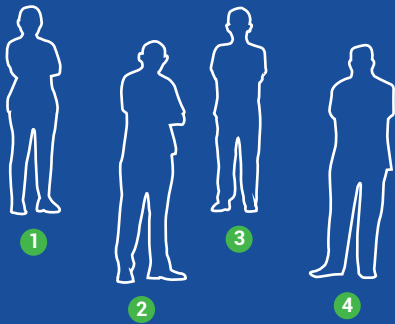
Jakarta, 31 Maret 2021
Jakarta, March 31, 2021



Muhammad Syaugi
Komisaris Utama | *President Commissioner*



Ratangga di Gedung Sarana
Ratangga Stationed at the Rolling Stock Building



- 1 SILVIA HALIM**
Direktur Konstruksi
Construction Director
Plt. Direktur Pengembangan Bisnis
Appointed Business Development Director
- 2 WILLIAM P. SABANDAR**
Direktur Utama
President Director
- 3 MUHAMMAD EFFENDI**
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director
- 4 ROY RAHENDRA**
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director



Dukuh Atas BNI 



LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report



WILLIAM P. SABANDAR
Direktur Utama
President Director



Di tengah pandemi COVID-19, Perseroan membangun ketangguhan menghadapi krisis dan mendorong inovasi bisnis beyond normal, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa, memulai pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota), mempertahankan kinerja keuangan serta mengembangkan MRT Jakarta sebagai master integrator transportasi.

Amidst the COVID-19 pandemic, the Corporation built resiliency in facing the crisis and encouraged business beyond normal innovation by delivering the best services for passengers, commencing MRT Jakarta Phase 2A construction (Bundaran HI – Kota), maintaining financial performance, and developing MRT Jakarta as a master integrator of transportation.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.

Mengawali Laporan Direksi, izinkan saya atas nama manajemen dan karyawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya, sehingga PT MRT Jakarta (Perseroda) dapat melewati krisis yang tidak mudah selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 membawa kita semua kepada situasi dan kebiasaan baru yang juga turut mempengaruhi kinerja Perseroan. Namun melalui kerja keras bersama, Perseroan dapat membangun ketangguhan dan mendorong berbagai inovasi bisnis sehingga dapat melewati tahun 2020 dengan pencapaian positif.

Analisis Atas Kinerja Perusahaan

Kami menyikapi situasi krisis karena pandemi COVID-19, dengan melakukan respon tanggap darurat. Fokus respon tanggap darurat adalah proteksi karyawan; proteksi operasi

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

To begin the Board of Director's report, allow me on behalf of the management and the employees to express our gratitude to all parties for the collaboration and cooperation, so that the Corporation can handle the challenging situation in 2020. The COVID-19 Pandemic forced us to adapt to the new situation with new normal that impacts the Corporation performance. However, through collective the collective hard-work, the Corporation can build resiliency and drive business innovation to pass the year 2020 with positive achievements.

Analysis of Performance of the Corporation

We handled the critical situation that arose due to the COVID-19 pandemic through quick response. The focus of quick response is worker protection, operational

dan perawatan; serta proteksi terhadap bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Kelangsungan Usaha untuk menjaga kelangsungan fungsi bisnis. Selanjutnya Perseroan menerapkan strategi pemulihan, dan secara berkelanjutan menerapkan rencana restorasi.

Strategi melindungi karyawan dilakukan dengan beberapa upaya penerapan Mekanisme *Work from Home* (WFH) bagi karyawan yang tidak bertugas memberikan pelayanan langsung kepada pengguna jasa dan mengelola konstruksi, penyediaan fasilitas kesehatan untuk deteksi paparan COVID-19, dan memantau kesehatan secara berkala, serta menjaga komunikasi dan hubungan di antara karyawan. Perseroan juga memastikan hak-hak para karyawan dapat diberikan. Melalui upaya tersebut, Perseroan mendorong karyawan tetap memberikan etos kerja terbaik, sekalipun sebagian karyawan harus bekerja dari rumah.

and maintenance protection, and implementation of business continuity management (BCM) principles. Then, the Corporation implements a recovery strategy and sustainably implements corrective plans.

Worker protection strategy is carried out through various efforts, including implementing Work from Home (WFH) Mechanism for employees who are not required to provide direct service to passengers or manage the construction, providing healthcare facilities to detect transmission of COVID-19 as well as monitoring health frequently, and maintaining communication and relationship among the employees. The Corporation also guarantees the rights of the employees. Through these measures, the Corporation encourages the employees to deliver their best work ethics despite working from home.

Proteksi perawatan dan operasi unggul, dijalankan dengan menerapkan "Protokol BANGKIT". Perseroan memberikan pelayanan terbaik bagi publik yang **BERSIH, AMAN,** dan **NYAMAN,** dengan menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan MRT Jakarta. Dalam masa transisi atau adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman dari COVID-19. Perseroan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dalam mobilitas sehari-hari sebagai upaya terciptanya pelestarian lingkungan atau **GO GREEN.**

Excellent maintenance and operational protection are carried out by implementing "BANGKIT Protocol". The Corporation delivers the best service to the public that is CLEAN, SAFE, and COMFORTABLE by implementing protocols to prevent the transmission of COVID-19 in the premises of MRT Jakarta. During the transition or new normal period towards a COVID-19 free and productive community, the Corporation calls for the public to use public transportation for their daily mobility as an effort to conserve the environment or GO GREEN.

Dalam menuju tatanan baru ini, Perseroan tidak dapat melakukannya sendiri, maka dengan adanya **KOLABORASI** bersama dengan seluruh pihak baik masyarakat maupun mitra, untuk menghadirkan **INOVASI,** yang juga dilakukan dengan **TATA KELOLA** yang baik mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.



Towards the new normal, the Corporation would not be able to handle everything by itself, hence it is carried out through COLLABORATION among all parties including the public and partners, to encourage INNOVATION by implementing good GOVERNANCE that prioritises integrity, transparency, and accountability.

Perseroan memastikan kesehatan personel yang bertugas, kebersihan fasilitas termasuk rutin menyemprotkan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, mewajibkan penggunaan masker kepada seluruh pengguna jasa, serta pembatasan jumlah pengguna jasa pada setiap kereta. Kami juga menerapkan ketentuan jaga jarak ketika antri masuk/keluar stasiun maupun MRT Jakarta.

The Corporation ensures the health of all personnel, facility hygiene by frequently disinfecting the facilities, temperature checking, requirement to wear mask for all passengers, and limitation of passengers in each train. The Corporation also implements physical distancing policy during queueing to enter/exit the station and trains.

Perseroan menyiapkan beberapa langkah untuk dapat melindungi bisnisnya, di antaranya melakukan kebijakan pengendalian biaya dengan menunda kegiatan yang masih bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya untuk menjaga arus kas. Selain itu, Perseroan mengeksplorasi peluang mendapatkan aliran pendapatan yang baru dan tetap melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2.

The Corporation prepares various efforts to protect the business, including implementing cost control policies by postponing activities that may be carried out in the following fiscal year to maintain cash flow. Also, the Corporation explores the opportunity for new revenue streams while continuing the construction of Phase 2 MRT Jakarta.

Langkah selanjutnya, Perseroan menyiapkan strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan dari non-tiket. Strategi ini dilakukan mengingat situasi pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah pengguna jasa.

Penurunan jumlah pengguna jasa tidak terlepas dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebiasaan baru pada situasi normal baru. Memasuki awal tahun 2020, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta tercatat sebanyak 2,64 juta orang atau rata-rata 85.105 orang per hari pada bulan Januari dan 2,56 juta orang atau rata-rata 88.444 orang per hari pada bulan Februari. Peningkatan jumlah dan sebaran penderita COVID-19 pada bulan Maret dan kebijakan pemberlakuan PSBB pada 10 April 2020, menjadikan jumlah pengguna jasa MRT Jakarta terus menurun. Secara rata-rata, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta pada tahun 2020 mencapai 27.122 orang per hari, turun 69,74% dibanding tahun 2019 sebanyak 89.645 orang per hari.

Kondisi ini tidak mengubah komitmen Perseroan untuk tetap memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna jasa, meski harus melakukan penyesuaian karena pandemi COVID-19. Secara umum layanan yang diberikan tetap memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Hasil survei Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2020 mencapai 86,64, lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 82,78.

Pada tahun 2020, Perseroan mengusung konsep transformasi, yaitu *Transforming Business Beyond Normal*, atau melakukan transformasi bisnis diluar kenormalan. Tujuannya adalah agar PT MRT Jakarta (Perseroda) bisa bertahan dalam situasi pandemi, bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan (*revive and grow sustainably*) dalam tatanan kenormalan baru.

Transformasi bisnis di luar kenormalan ini meliputi tiga hal, di antaranya:

1. *Beyond Ridership*, di mana Perseroan memberikan pelayanan kepada konsumen tidak hanya berfokus jumlah para pengguna jasa, namun lebih luas pada aspek gaya hidup dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dalam konteks yang seluas-luasnya, termasuk keamanan dari penyebaran COVID-19. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dapat ditingkatkan dari aspek non-tiket.

For the upcoming step, the Corporation prepares a strategy to maintain business continuity. Efforts are taken to optimise non-farebox revenue. This strategy is carried out considering the COVID-19 pandemic that caused a drastic drop in the number of passengers.

The decreased number of passengers was also caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) and the new normal situation. At the beginning of 2020, the number of MRT Jakarta passengers was recorded at 2,64 million passengers or 85,105 of average daily passengers in January and 2.56 million passengers or 88,444 of average daily passengers in February. The increasing cases and victims of COVID-19 in March and the policy to implement PSBB on April 10, 2020, caused a constant decrease in the number of MRT Jakarta passengers. On average, the number of MRT Jakarta passengers in 2020 was 27,122 daily passengers, which decreased by 69.74% compared to that of 2019 with 89,645 daily passengers.

This condition does not affect the commitment of the Corporation to keep delivering the best service for the passengers, despite the required adjustment due to the COVID-19 pandemic. In general, the services provided still brought satisfaction from the passengers. The results of the Customers Satisfaction Index survey in 2020 reached 86.64, higher than that of 2019 with a score of 82.78.

In 2020, the Corporation chose a transformation concept, i.e., Transforming Business Beyond Normal. The objectives are for the Corporation to remain strong amidst the pandemic, and to revive and grow sustainably in the new normal.

Transforming Business Beyond Normal covers three aspects as follows:

1. *Beyond Ridership*, where the Corporation provides services to customers beyond merely focusing on the number of passengers, but also covering lifestyle aspects by prioritising customer satisfaction to its widest extent, including safety from COVID-19 transmission. Therefore, the Corporation non-farebox revenue can be improved.

Beyond Rideship**Beyond Physical Mobility****Beyond Transport Network**

2. *Beyond Physical Mobility*, di mana Perseroan melakukan pelayanan tidak hanya fokus para pengguna jasa MRT Jakarta, namun juga kepada masyarakat pengguna yang tidak sedang menggunakan MRT Jakarta. Kombinasi antara layanan MRT Jakarta yang dilakukan secara fisik dan layanan secara digital menjadi kunci, dan ini dilakukan dengan menjadikan MRT sebagai *platform* baik dalam pengertian fisik maupun digital.
3. *Beyond Transport Network*, di mana Perseroan melakukan pengembangan jaringan MRT Jakarta tidak hanya berfokus pada memperpanjang jalur layanan MRT Jakarta, namun dilaksanakan bersama dengan membangun/meregenerasi kota pada sepanjang koridor MRT Jakarta. Dengan demikian MRT Jakarta menjadi *backbone* transformasi kota yang sedang berubah dari *Car-Oriented Development* menjadi *Transit-Oriented Development*.
2. *Beyond Physical Mobility*, where the Corporation delivers the services not only for the passengers of MRT Jakarta, but also to members of the public who do not use MRT Jakarta. A combination of physical and digital services of MRT Jakarta is the key factor, and it is implemented by creating MRT as a platform in a physical and digital sense.
3. *Beyond Transport Network*, where the Corporation develops MRT Jakarta networks by not only focusing on extending MRT Jakarta service lines, but also by developing/rejuvenating the city along the MRT Jakarta corridor. Therefore, MRT Jakarta becomes the backbone of urban transformation from Car-Oriented Development to be Transit-Oriented Development.

Selama tahun 2020 Perseroan tetap dapat menjaga kinerja keuangan. EBITDA Perseroan tercatat Rp447,69 miliar, lebih tinggi 4,61% dibanding periode sebelumnya Rp427,98 miliar. Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif tahun berjalan sebesar Rp70.826 miliar pada tahun 2020, meski menurun 148,28% dibanding periode sebelumnya.

Terjaganya kinerja keuangan selama tahun 2020, tidak terlepas dari strategi Perseroan memaksimalkan Pendapatan Usaha dari non-tiket. Total Pendapatan Usaha tahun 2020 Rp1.085.498 juta atau 104,43% dari target Rp1.039.477 juta. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan tiket Rp82.025 juta atau 107,48% dari target dan pendapatan non-tiket Rp382.672 juta atau 119,21% dari target.

Respon tanggap darurat Perseroan selama krisis akibat pandemi COVID-19, menjadikan kami dapat merealisasikan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota). Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan telah memulai

In 2020, the Corporation managed to maintain its financial performance. Corporation EBITDA was recorded at IDR447.69 billion, 4.61% higher compared to the previous period at IDR427.98 billion. The Corporation recorded Comprehensive Loss for the running year of IDR70,826 billion in 2020, which decreased by 148.28% compared to the previous period.

The maintained financial performance in 2020 was due in part to the Corporation strategy in optimising non-farebox Operating Revenue. The total Operating Revenue in 2020 was IDR1,085,498 million or 104.43% of the target of IDR1,039,477 million. The amount consists of farebox revenue of IDR82,025 million or 107.48% of the target and non-farebox revenue of IDR382,672 million or 119.21% of the target.

The emergency response of the Corporation during the crisis due to the COVID-19 pandemic encouraged us to commence the construction of Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota). As of the end of 2020, the Corporation

pembangunan Fase 2A yang terbagi dalam tujuh Paket Kontrak (CP/Contract Package). Realisasi pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 2,34%, lebih tinggi dari target 2,14%. Pencapaian ini menegaskan kemampuan Perseroan mengelola kendala yang dihadapi, yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pandemi COVID-19, dan jadwal konstruksi yang padat.

Disamping dimulainya pembangunan MRT Fase 2A, pada tahun 2020 Perseroan telah menyelesaikan *Feasibility Study* MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat), mendampingi Kementerian Perhubungan dalam pengadaan dan pelaksanaan studi *Basic Engineering Design* MRT Fase 3 Fase 1 (Ujung Menteng – Kalideres), serta menyelesaikan *Pre-Feasibility Study* MRT Fase 4 (Fatmawati – TMII) sebagai komitmen Perseroan untuk mengakselerasi pembangunan dan pengembangan jalur-jalur baru MRT dalam rangka meningkatkan pelayanan, meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan dengan mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang memiliki standar internasional.

Analisis Tentang Prospek Perusahaan

Memasuki tahun 2021, kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia termasuk DKI Jakarta akan pulih dari dampak pandemi COVID-19. Perseroan memperkirakan, pengguna jasa MRT Jakarta pada tahun 2021 akan tumbuh signifikan sebesar 138% menjadi 65.000 orang per hari, dibanding tahun 2020. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendapatan tiket, dan mendorong kinerja positif pendapatan non-tiket. Tingginya lalu lintas pengguna jasa MRT Jakarta, menjadi pasar bagi jasa periklanan yang merupakan salah satu sumber pendapatan non-tiket.

Perseroan juga melanjutkan penerapan Peraturan Gubernur No.67 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2020 tentang penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan MRT Jakarta. Rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu pengelolaan dan komersialisasi KBT untuk mendapatkan manfaat atas pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan pendapatan atas komersialisasi KBT.

Untuk mengoptimalkan KBT, Perseroan telah membentuk Anak Usaha yang khusus mengelola KBT, yakni PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ). Adapun ITJ bertugas melakukan pembangunan dan pengelolaan KBT di Stasiun Blok M-Asean, Fatmawati, dan Lebak Bulus.

has started Phase 2A construction divided into seven Contract Packages (CPs). Thework progress as of the end of 2020 reached 2.34%, higher than the target of 2.14%. The achievement highlights the ability of the Corporation in managing the challenges, such as limited human capital (HC), COVID-19 pandemic, and tight construction schedule.

Besides the commencement of Phase 2A MRT construction, in 2020 the Corporation has completed the Feasibility Study of Phase 2 MRT (Kota – Ancol Barat), assisted the Ministry of Transportation in procurement, completed a study of Basic Engineering Design of Phase 1 of Phase 3 MRT (Ujung Menteng – Kalideres), and completed Pre-Feasibility Study of Phase 4 MRT (Fatmawati – TMII) as the commitment of the Corporation in accelerating the construction and development of new MRT tracks to improve services, enhance mobility, and reduce traffic congestion by developing urban transportation system with international standards.

Analysis of Prospect of the Corporation

At the beginning of 2021, the socio-economic condition in Indonesia, including DKI Jakarta, will gradually recover from the impacts of the COVID-19 pandemic. The Corporation estimates that MRT Jakarta passengers in 2021 will significantly grow by 138% to 65,000 daily passengers compared to that of 2020. The condition will impact the farebox revenue and encourage the positive performance of non-farebox revenue. The high traffic of MRT Jakarta passengers becomes a market for the advertising services as a source of non-farebox revenue of the Corporation.

The Corporation also maintains to implement Governor's Regulation No. 67 year 2019 concerning the Implementation of Transit-Oriented Development and Governor's Regulation No. 15 Year 2020 concerning Assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) as Developer of Transit-Oriented Development in North-South Corridor of MRT Jakarta. The action plan to be implemented includes management and commercialisation of TOD areas to generate benefits from exceeding the Building Area Coefficient (KLB) and revenue from the commercialisation of TOD areas.

To optimise TOD Areas, the Corporation has formed a subsidiary that specializes in managing KBT, namely PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ). Meanwhile, ITJ is responsible to develop and manage TOD Areas in Blok M-Asean Station, Fatmawati Station, and Lebak Bulus Station.

Peran MITJ mengimplementasikan penugasan atas seluruh inisiatif integrasi terkait dengan perkeretaapian Jabodetabek termasuk mengimplementasikan penugasan atas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di 81 Stasiun. Kemudian, peran JakLingko Indonesia diproyeksikan untuk menyambungkan secara *seamless* semua jenis moda transportasi di DKI Jakarta mulai dari angkot, TransJakarta, hingga transportasi berbasis rel seperti *Light Rail Transit* (LRT) dan *Mass Rapid Transit* (MRT), serta kereta *Commuter Line*.

Integrasi antarmoda angkutan umum melalui Jaklingko meliputi integrasi fisik dan integrasi layanan, di mana salah satu aspek dalam integrasi layanan adalah integrasi tarif dan sistem pembayaran.

Analisis Penilaian Kinerja Perseroan

Untuk mendukung keberlanjutan di masa depan, kami juga meningkatkan pengelolaan Perseroan berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), mencakup perspektif *Financial* (Finansial), *Customer* (Pelanggan), *Internal Business Process* (Proses Internal Bisnis), dan *Learning & Growth* (Pembelajaran & Pengembangan).

Dalam perspektif *Financial*, target utama adalah mewujudkan Perseroan yang sehat secara keuangan dengan memaksimalkan pendapatan serta mengoptimalkan biaya operasional dan investasi. Perspektif *Customer* berfokus pada peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan, serta melaksanakan tugas-tugas layanan publik yang terkait peningkatan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Terkait perspektif *Internal Business Process*, fokus Perseroan adalah pada *operational excellence* (pemastian kualitas dalam kegiatan operasional), pengembangan jaringan MRT Jakarta, pengembangan *platform digital*, peningkatan penghasilan non-tiket, pengembangan KBT, serta pengembangan anak usaha sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Sementara, perspektif *Learning & Growth* sebagai fondasi dari kerangka strategis ini ditargetkan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya karyawan Perseroan, meningkatkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), *Safety*, dan optimalisasi manajemen pengetahuan.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Upaya Perseroan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2020, ditandai dengan pencapaian Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikat diperoleh pada 27 Oktober

The role of MITJ is to implement the assignment of all integration initiatives concerning railway transportation in Jabodetabek including implementing the assignment in managing and developing Transit-Oriented Development in 81 Stations. Then, the role of JakLingko Indonesia is projected to seamlessly connect all modes of transportation in DKI Jakarta, covering public minibus (angkot), TransJakarta, and railway transportation such as Light Rail Transit (LRT) and Mass Rapid Transit (MRT) as well as Commuter Line.

Integration of modes of public transportation through JakLingko includes physical integration as well as service integration, including fee and payment system integration as one of the aspects of integration.

Analysis of Corporation Performance Assessment

To support sustainability in the future, the Corporation improves Corporate governance based on a Balanced Scorecard (BSC) covering the Financial perspective, Customer perspective, Internal Business Process perspective, and Learning & Growth perspective.

The financial perspective aims to realise a Corporation that is financially healthy through revenue improvement and operational cost and investment optimisation. The Customer perspective focuses on service improvement as well as customer satisfaction, and implementation of public service duties concerning the improvement of mobility and public welfare.

As for the Internal Business Process perspective, the Corporation focuses on operational excellence, MRT Jakarta network development, digital platform development, non-farebox revenue improvement, Transit-Oriented Development, and subsidiary establishment in line with the development needs of the Corporation. Meanwhile, the Learning & Growth perspective is the foundation of a strategic framework that aims to enhance the capability and capacity of the human capital of the Corporation, improve Governance, Risk, and Compliance (GRC) as well as safety, and optimise knowledge management.

Improvement of Corporate Governance Implementation

The effort of the Corporation in improving the implementation of good corporate governance (GCG) in 2020 is marked by the achievement of Certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.

2020, dan menegaskan komitmen Perseroan untuk tidak menoleransi penyuapan, serta menerapkan prinsip 4 No's, yaitu *no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality*.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan diterapkan oleh Perseroan untuk mengendalikan risiko terkait penyuapan pada setiap kegiatan perusahaan dan mendorong pertumbuhan lingkungan perusahaan yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan transparan dalam mengembangkan perusahaan di kondisi disrupsi global yang saat ini sedang dihadapi. Dalam hal ini, integritas dan akuntabilitas perusahaan akan menjadi modal utama perusahaan dalam menghadapi tantangan era disrupsi yang membutuhkan inovasi dan transformasi dalam tempo yang singkat.

Sistem Manajemen Risiko Perseroan diterapkan sesuai Standar ISO 31000:2018, di mana perseroan melakukan berbagai aktivitas manajemen risiko, yakni:

1. Menetapkan selera dan toleransi risiko yang diselaraskan dengan KPI Korporasi;
2. Menghasilkan laporan *Top Risk* bulanan korporasi sebagai proses *monitoring* dan pelaporan risiko;
3. Memperkuat proses analisis risiko dengan menyediakan *software* khusus permodelan;
4. Mengembangkan budaya risiko dengan menempatkan *risk officer* di setiap unit kerja, mensosialisasikan berbagai topik risiko melalui publikasi *newsletter*, menyelenggarakan *risk and safety competition*, dan Webinar GRC Series dengan tema *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi; serta
5. Mengukur budaya risiko melalui survei internal dengan skor 7,59 meningkat 3% dibandingkan tahun 2019.

Di samping itu, sistem manajemen risiko Perseroan juga diperkuat dengan penerapan ISO Sistem Manajemen Terintegrasi (Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, dan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001:2018), di mana perseroan telah sukses mempertahankan sertifikasi ini di tahun 2020.

Perseroan juga telah menyelesaikan penyusunan Kebijakan Keberlanjutan berdasarkan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Kebijakan Keberlanjutan menjadi pedoman Perseroan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yg mencakup 7 subjek inti, guna mendukung

The certificate was obtained on October 27, 2020 and it highlights the commitment of the Corporation not to tolerate bribery and implement 4 No's of no bribery, no kickback, no gift, and no luxurious hospitality.

The Anti-Bribery Management System is implemented by the Corporation to control risks of bribery at each activity of the Corporation and to encourage the creation of a Corporate environment that have integrity, professional, accountable, and transparent amidst the ongoing global disruption. In this case, integrity and accountability of the Corporation are the main capital of the Corporation to face the challenges of the era of disruption that requires innovation and transformation in a short time.

Corporate Risk Management System is implemented following ISO 31000:2018, where the Corporation carries out various activities of risk management, including:

1. *Determining risk appetite and risk tolerance aligned with the Corporate KPI;*
2. *Preparing monthly report of Corporate Top Risk as a monitoring process and risk reporting;*
3. *Strengthening risk analysis process by providing modelling software;*
4. *Developing risk culture by assigning risk officers at each work unit, disseminating various topics of risks through newsletters, carrying out risk and safety competition and GRC Webinar Series with the topic of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Corporate Transformation during the Era of Disruption; and*
5. *Measuring risk culture through an internal survey with the score of 7.59 – increased by 3% compared to 2019.*

Also, the Corporate risk management system is strengthened by implementing ISO of Integrated Management System (ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System, and ISO 45001:2018 Occupational Safety and Health (OSH) System), where the Corporation maintained the certification in 2020.

The Corporation has completed the making of a Sustainability Policy based on ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. The Sustainability Policy is a guideline for the Corporation in fulfilling social and environmental responsibilities covering 7 core subjects to support

operasi Perseroan yang berkelanjutan. Kebijakan Keberlanjutan menjadikan penerapan keberlanjutan yang dijalankan Perseroan, telah sesuai dengan standar internasional.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan sebuah perusahaan. Hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik bisnis demi mewujudkan kelangsungan usaha. Salah satu penerapan tata kelola Perseroan dan pendukung kesuksesan Perseroan adalah pengelolaan hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan. Kondisi pandemi COVID-19 membuat komunikasi sulit untuk dilakukan. Beberapa hal yang menjadi rutinitas Perseroan untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi terhambat dan komunikasi secara langsung menjadi terbatas. Namun di tengah kondisi pandemi COVID-19, Perseroan tetap menjalin hubungan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara maksimal.

Pemangku kepentingan yang paling penting bagi Perseroan adalah publik. Publik mempunyai peranan penting dalam menunjang kesuksesan Perseroan, baik itu internal maupun eksternal. Tujuan Perseroan hanya akan tercapai apabila ada dukungan dari publik. Untuk menyampaikan pesan kepada publik, salah satu langkah Perseroan adalah menggunakan Media Sosial sebagai wadah penyampaian informasi dan komunikasi kepada Publik. Selain itu, media massa juga merupakan jembatan komunikasi antara Perseroan dengan publik. Dengan adanya hubungan baik dengan media, maka isu-isu negatif yang sedang berkembang tentu dapat diminimalisir. Perseroan juga menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan pemerintah dan mitra strategis sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ketangguhan baik untuk operasional maupun konstruksi Perseroan. Situasi pandemi COVID-19 mengharuskan Perseroan untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam hal komunikasi dengan pemangku kepentingan, seperti pelaksanaan rapat koordinasi maupun kegiatan seremonial secara virtual. Komunikasi secara formal juga dilakukan dengan menyesuaikan SOP yang berlaku pada tiap-tiap pemangku kepentingan, misalnya dengan meminimalisir surat menyurat secara fisik dan memaksimalkan pemanfaatan surat elektronik/*e-office*, serta didukung dengan komunikasi informal menggunakan aplikasi *messenger* maupun telepon.

sustainable operations of the Corporation. Sustainability Policy aligns the implementation of sustainability by the Corporation with the international standards.

Good Corporate Governance (GCG) is an important aspect of Corporate development. It is an integral part of business practices to manifest business continuity. Relationship management between the Corporation and the stakeholders is an example of corporate governance implementation that supports the Corporation's success. The COVID-19 pandemic aggravates communication process. Several routines of the Corporation to foster communication with stakeholders were interrupted, and direct communication were restricted. However, amidst the COVID-19 pandemic, the Corporation maintained the relation in communicating with stakeholders at a maximum level.

*The most important stakeholder for the Corporation is the public. The Public plays a crucial role in supporting the success of the Corporation, both internally and externally. The objectives of the Corporation will only be achieved with support from the public. To convey the messages to the public, an effort taken by the Corporation is utilising Social Media as a channel to distribute information and communication to the Public. Also, mass media is a bridge for communication between the Corporation and the public. Through a good relationship with the media, the negative issues arising in the public can be minimized. Besides, the Corporation also maintains communication with governmental stakeholders and strategic partners to realise operational and construction resiliency of the Corporation. The pandemic requires the Corporation to adjust several aspects of communication with stakeholders, such as arranging virtual coordination meeting and ceremonial activities. Formal communication is carried out by tailoring the applicable SOP for each stakeholder, such as minimising physical correspondences and leveraging electronic mail or *e-office*, supported by informal communication through messenger applications and phone calls.*

Di kondisi pandemi COVID-19, Perseroan berhasil dalam mengelola komunikasi pemangku kepentingan dengan baik. Seperti terbuka dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mengharuskan kehadiran fisik dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan SOP yang berlaku, serta mengedepankan efektivitas kerja. Sikap adaptif Perseroan berdampak positif pada respon Pemerintah dan mitra strategis yang tercermin melalui terciptanya berbagai kerja sama dan kebijakan yang menjaga ketangguhan bisnis Perseroan di masa COVID-19. Juga dengan tidak adanya isu atau pemberitaan negatif yang disampaikan dalam pemberitaan di media. Perseroan juga berhasil membangun kepercayaan publik melalui tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan juga berhasil menjalin hubungan baik dengan komunitas melalui program-program kolaborasi. Hal ini menjadikan timbal balik bagi Perseroan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait keberadaannya di tengah-tengah lingkungan.

Pengungkapan Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Pada periode pelaporan telah terjadi perubahan komposisi keanggotaan Direksi. Sesuai Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS tanggal 20 April 2020, Pemegang Saham mengangkat saudara Roy Rahendra sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, dan menghentikan dengan hormat saudara Tuhiyat dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, serta memberhentikan dengan hormat saudara Ghamal Peris dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

Manajemen mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah ditunjukkan saudara Tuhiyat dan saudara Ghamal Peris, selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan. Manajemen juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada saudara Roy Rahendra, dan selamat bekerja bersama dengan anggota Direksi lain, untuk mengembangkan Perseroan.

Untuk mengisi kekosongan Direktur Pengembangan Bisnis, Direksi sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 20 April 2020, telah menetapkan saudara Silvia Halim sebagai pelaksana tugas Direktur Pengembangan Bisnis. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Direksi No. 026 Tahun 2020.

During the pandemic, the Corporation managed to maintain good communication with the stakeholders. The Corporation is open to governmental activities that require physical attendance while implementing the health protocols and applicable SOPs and prioritises work effectiveness. The adaptability of the Corporation shows positive impacts on the stakeholder responses from the Government and strategic partners as reflected by the establishment of collaboration and policies to maintain business resiliency amidst the pandemic. It is also supported by zero negative issues or news presented by the media. The Corporation also maintained public trust through the increased customer satisfaction index compared to the previous year. Also, the Corporation maintained good relationships with the communities as well through collaborative programs. This becomes a reciprocity for the Corporation to contribute more to the community concerning its presence among the community.

Disclosure of Changes of the Composition of the Members of the Board of Directors

During the reporting period, there were some changes to the composition of the members of the Board of Directors. Based on the Resolutions of the Shareholders without GMS dated April 20, 2020, the Shareholders appointed Roy Rahendra as Finance and Corporate Management Director and honourably dismissed Tuhiyat from his position as Finance and Corporate Management Director, and honourably dismissed Ghamal Peris from his position as Business Development Director.

The management expresses our gratitude for the dedication presented by Tuhiyat and Ghamal Peris during their tenure in carrying out the duties and responsibilities as members of the Board of Directors of the Corporation. The management also welcomes Roy Rahendra and wishes him to collaborate well with the other members of the Board of Directors to develop the Corporation.

To fulfil the vacant position of Business Development Director, the Board of Directors following the Resolutions of the Shareholders without GMS dated April 2020 has appointed Silvia Halim as the acting official of Business Development Director. The appointment is implemented following Directors' Decree No. 026 Year 2020.

Apresiasi dan Pengakuan

Sebelum mengakhiri Laporan ini, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih atas perolehan apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Ada beberapa apresiasi dan pengakuan yang diterima Perseroan selama tahun 2020, di antaranya penghargaan platinum dalam Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Awards 2020, sebagai penyedia layanan transportasi yang berkeadilan untuk disabilitas. Perseroan juga meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies Award 2020 kategori Indonesia *Trusted Companies* dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), melalui program Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020 dan juga mendapatkan penghargaan Top GRC Award Bintang 4, serta penghargaan BUMD Marketeers Awards.

Apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak, diharapkan menambah motivasi semua pihak untuk bekerja lebih keras, sehingga manfaat keberadaan MRT Jakarta semakin dapat dirasakan masyarakat. Kami meyakini, masih banyak yang dapat dilakukan MRT Jakarta untuk menjadikan perubahan dalam banyak aspek kehidupan di Jakarta dan sekitarnya.

Kami memahami, tentu tidak mudah merealisasikan hal tersebut. Dinamika yang berlangsung menjadi tantangan sekaligus peluang, yang harus disikapi dengan kerja sama Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama, Perseroan meyakini berbagai tantangan akan dapat dihadapi dan dijadikan peluang untuk memastikan keberlanjutan di masa mendatang.

Appreciations and Recognitions

Before ending this Report, allow me to express our deepest gratitude for the reception of various appreciations and recognitions from numerous parties. There are several appreciations and recognitions received by the Corporation in 2020, such as the platinum award by the Jakarta Transportation Council (DTKJ) Awards 2020, as a transportation service provider that supports equal service for people with disabilities. The Corporation also received Indonesia Most Trusted Companies Award 2020 for the category of Indonesia Trusted Companies from the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) through the Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020. The Corporation also received an award of 4 Stars from TOP GRC and BUMD Marketeers Awards.

The appreciations and recognition of other parties are expected to drive the motivation of everyone to work harder, so that the benefits of the presence of MRT Jakarta can impact positively the community. We are sure that there are a lot of actions to be carried out by the Corporation to realise changes in the daily life aspects of Jakarta and surrounding cities.

We understand that it is not easy to realise such dreams. The current dynamics are challenges and opportunities that must be faced together between the Corporation and all stakeholders. With such collaboration, the Corporation is sure that various challenges will be able to be faced and to convert into opportunities to ensure sustainability in the future.

Jakarta, 31 Maret 2021

Jakarta, March 31, 2021



WILLIAM P. SABANDAR

Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

*Statement of the Members of the Board of Commissioners on Responsibility for the
2020 Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda)*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2021



MUHAMMAD SYAUGI
Komisaris Utama
President Commissioner

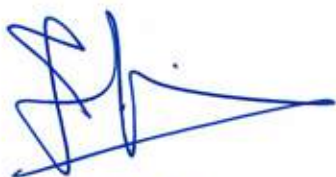
We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda) for 2020 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

This statement is hereby made in all truthfulness

Jakarta, March 31, 2021



RUKIJO
Komisaris
Commissioner



ZULFIKRI
Komisaris
Commissioner



MUKHTASOR
Komisaris
Commissioner



ADNAN PANDU PRAJA
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

*Statement of the Members of the Board of Directors on Responsibility for the 2020
Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda)*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2021

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT (Perseroda) Jakarta for 2020 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 31, 2021



WILLIAM P. SABANDAR
Direktur Utama
President Director



SILVIA HALIM
Direktur Konstruksi
Construction Director
Plt. Direktur Pengembangan Bisnis
Appointed Business Development Director



ROY RAHENDRA
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director



MUHAMMAD EFFENDI
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director



03

TENTANG PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

ABOUT PT MRT JAKARTA (PERSERODA)



Jak
Lingko

NSJ



Ratangga di Depo Lebak Bulus
Ratangga at Depo Lebak Bulus

PROFIL PERSEROAN

Corporate Profile



MRT Jakarta menjadi solusi bagi warga Jakarta dengan menyediakan transportasi tepat waktu, aman, nyaman, serta ramah lingkungan sekaligus sebagai sarana untuk meremajakan kota dan memacu pertumbuhan ekonomi.

MRT Jakarta is a solution for the people of Jakarta and offers public transportation that is punctual, comfortable, and environmentally friendly, while serves as a mean to regenerate the city and drive economic growth.

Informasi Umum dan Identitas Perseroan

General Information and Corporate Identity

| | |
|--|--|
| <p>Nama Perseroan Corporate Name</p> <p>PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)</p> | |
| <p>Jumlah Karyawan Total Employee</p> <p>689 Orang Employees</p> |  |
| <p>Kantor Pusat Head Office</p> <p>Wisma Nusantara Lt. 21-23 Jl. MH Thamrin 59 Jakarta 10350 - Indonesia P (62)21 - 3103629 (62)21 - 3906454 F (62)21 - 3155846</p> |  |
| <p>Status Badan Hukum Status of Legal Entity</p> <p>Perseroan Terbatas (PT) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Limited Liability Company (PT) Regionally Owned Enterprise (ROE)</p> |  |
| <p>Kantor Administrasi Depo Depo Administration Office</p> <p>Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 12440, Indonesia</p> |  |
| <p>Tanggal Pendirian Date of Establishment</p> <p>17 Juni June 2008</p> |  |
| <p>Bidang Usaha Line of Business</p> <p>Pengangkutan Darat Land Transportation</p> | |
| <p>Perumda Pasar Jaya Perumda Pasar Jaya 0,003%</p>  <p>Kepemilikan Ownership</p> | <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government 99,997%</p> |
| <p>Modal Dasar Authorised Capital</p> <p>Rp40.757.353.000.000</p> | |
| <p>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued Fully Paid Capital</p> <p>Rp16.339.169.000</p> | |
| <p> @mrtjkt</p> <p> @mrtjakarta</p> <p> MRT Jakarta</p> <p> MRTv</p> <p> @mrtjakarta</p> <p> 1500 332</p> <p> info@jakartamrt.co.id</p> <p> jakartamrt.co.id</p> | |



Sekilas MRT Jakarta

MRT Jakarta at a Glance

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda); disebut sebagai "PT MRT Jakarta (Perseroda)" atau "Perseroan"; berdiri pada 17 Juni 2008. Dasar pendirian adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroda), sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2013, dimana saat ini kedua Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda); hereinafter referred to as "PT MRT Jakarta (Perseroda)" or "the Corporation"; was established on June 17, 2008. Its establishment was based on DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 7 Year 2008 concerning the Establishment of the Regionally Owned Enterprise (ROE) Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroda), as most recently amended by DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 7 Year 2013, and currently the two Regional Regulations have been revoked and replaced by DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 9 Year 2018 concerning Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

The Corporation is a Limited Liability legal entity whose majority of the shares are owned by the Government of DKI Jakarta Province. The scope of the Corporate business activities includes the concession and development of MRT infrastructures and facilities, operations and maintenance of MRT infrastructure and facilities, as well as the development and management of properties/businesses at and around MRT stations and Depot.



Ratangga di stasiun layang
Ratangga at an elevated station

Rencana pembangunan MRT di Jakarta telah dirintis sejak tahun 1985. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Proyek MRT Jakarta merupakan proyek strategis nasional yang diikuti inisiasi koordinasi intensif Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaannya. Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1 sepanjang ± 16 km, dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, yang memiliki 13 stasiun dengan satu Depo. Untuk meminimalisir dampak lalu lintas dan dampak lingkungan dari pembangunan Fase 1, Perseroan menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta telah mendapatkan izin-izin terkait. MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI resmi beroperasi sejak 24 Maret 2019 dengan 16 rangkaian kereta. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa, Perseroan memastikan keunggulan dan keamanan operasi untuk perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pada tahun 2019, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI – Kota dimulai dengan paket kontrak pertama, yaitu pembangunan dinding diafragma untuk

The plan to develop an MRT system within Jakarta dates back to 1985. In 2005, the President of the Republic of Indonesia designated the MRT Jakarta Project as a national strategic project with intensive coordination initiated by the Central Government and the Government of DKI Jakarta Province concerning the project execution. MRT Jakarta Project was started by the construction of Phase 1 MRT North-South Corridor track, extending ± 16 km from Lebak Bulus to Bundaran HI, with 13 stations and one Depot. To minimise the impact of physical construction in Phase 1, the Corporation in collaboration with the Traffic Management Consultant conducted an Environmental Impact Analysis (AMDAL) and have obtained related permits. Phase 1 of MRT Jakarta with the route of Lebak Bulus – Bundaran HI officially started its operation on March 24, 2019 with 16 train series. To provide the best service for passengers, the Corporation ensures excellence and safety in operations, and facilities and infrastructure maintenance.

In 2019, the construction of the MRT Jakarta Phase 2A Bundaran HI - Kota began with the first contract package, namely the construction of a diaphragm wall for the MRT

bangunan Gardu Induk bawah tanah MRT di Kawasan Medan Merdeka (CP 200). Pembangunan Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas (CP 201) juga telah dimulai pada pertengahan tahun 2020. MRT Jakarta Fase 2A segmen 1 (Bundaran HI – Monas) ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2025, sementara segmen 2 (Bundaran HI – Kota) ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Disamping pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, pada tahun 2020, Perseroan telah menyelesaikan kajian *Feasibility Study* MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat), mendampingi Kementerian Perhubungan dalam pengadaan dan pelaksanaan studi *Basic Engineering Design* MRT Fase 3 Tahap 1 (Ujung Menteng – Kalideres), serta menyelesaikan *Pre-Feasibility Study* MRT Fase 4 (Fatmawati – TMII). Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan jaringan perkeretaapian yang tertuang dalam dokumen *Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Phase 2* yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019 serta Rencana Induk Transportasi Jakarta yang disusun oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2020.

Sejak beroperasi, MRT Jakarta telah melayani 34.340.837 pengguna jasa selama tahun 2019 – 2020 dengan rata-rata pengguna jasa 52.913 per hari. MRT Jakarta memiliki 13 stasiun yang terdiri dari 6 stasiun *underground* (bawah tanah) dan 7 stasiun *elevated* (layang), seluruh stasiun MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05:00 sampai dengan pukul 24:00 (sebelum pandemi) dan mulai pukul 05:00 sampai dengan pukul 22:00 (saat pandemi sesuai dengan arahan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta). MRT Jakarta melayani berbagai macam jenis tiket yang dapat memudahkan pengguna jasa untuk menaiki kereta MRT, mulai dari kartu uang elektronik (*emoney*), kartu *Single Trip Ticket* (STT), kartu *Multi Trip Ticket* (MTT), dan *QR Code Ticket* (*Scan Barcode*). Pembayaran berbasis non-tunai selalu dikembangkan oleh MRT Jakarta untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.

Perseroan terus mengembangkan bisnis dari sisi non-tiket untuk mendukung komitmen bisnis. Masih dengan layanan periklanan pada area Stasiun MRT Jakarta dan layanan telekomunikasi, selama tahun 2020 berlangsung pembangunan konstruksi layanan periklanan media luar ruang yang dibuat pada media pilar. Kerja sama Hak Penamaan Stasiun dan pembayaran menggunakan

underground substation building in the Medan Merdeka area (CP 200). The construction of Thamrin Station and Monas Station (CP 201) has also started in mid-2020. MRT Jakarta Phase 2A segment 1 (Bundaran HI - Monas) is targeted to start operating in March 2025, while segment 2 (Bundaran HI - Kota) is targeted to start operating in the year 2027.

Besides Phase 2A MRT Jakarta construction, in 2020, the Corporation has completed the Feasibility Study for Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat), assisted the Ministry of Transportation in procurement and implementation of the study of Basic Engineering Design of Phase 1 of Phase 3 MRT (Ujung Menteng – Kalideres), and completed Pre-Feasibility Study of Phase 4 MRT (Fatmawati – TMII). It is in line with the railway network development plan as stated in the Phase 2 *Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Document* as developed by the Coordinating Ministry of Economic Affairs in 2019 and the *Transportation Master Plan of Jakarta* as developed by the Department of Transportation of DKI Jakarta in 2020.

Since its operations, MRT Jakarta has served 34,340,837 passengers in 2019 – 2020 with an average daily passengers of 52,913 passengers. MRT Jakarta operates 13 stations, consisting of 6 underground stations and 7 elevated stations, all MRT Jakarta stations operate from 05:00 until 24:00 (before the pandemic) and from 05:00 until 22:00 (during the pandemic, following the directions from the Department of Transportation of DKI Jakarta). MRT Jakarta offers various types of tickets to ease the passengers in accessing the MRT, from electronic money cards (*e-money*), *Single Trip Ticket* (STT) card, *Multi-Trip Ticket* (MTT) card, and *QR Code Ticket* (*Barcode Scan*). Cashless payment options are constantly developed by MRT Jakarta to prevent the risk of COVID-19 transmissions.

The Corporation maintains to expand the non-farebox business to support the business commitment. Concerning advertising service in the premises of MRT Jakarta Stations and telecommunication service, in 2020 the Corporation constructed outdoor media advertising service at pillar media. The collaboration for Station Naming Rights and payment by electronic money are carried out as well. In

uang elektronik juga terus dijalankan. Bahkan di tahun 2020, inovasi pembayaran tiket menggunakan QR Code juga menjadi sumber pendapatan non-tiket baru dengan bekerja sama dengan perusahaan *financial technology*. Tidak hanya itu, selama pandemi pun Perseroan turut serta mendukung ritel UMKM yang berniaga di dalam stasiun-stasiun MRT Jakarta.

Selain itu, Perseroan juga mengembangkan bisnis *Transit-Oriented Development* (TOD) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit. Melalui peraturan tersebut, PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai operator transportasi umum MRT Jakarta dapat mengajukan diri sebagai Pengelola Kawasan yang berperan dalam perencanaan penataan kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta berdasarkan konsep TOD. Sampai akhir tahun 2020, terdapat 5 (lima) TOD dengan Panduan Rancang Kota (PRK) yang masing-masing telah disahkan melalui Peraturan Gubernur, yakni TOD Blok M-Sisingamangara, Fatmawati, Lebak Bulus, Istora-Senayan, dan Dukuh Atas. Pembentukan 2 (dua) perusahaan patungan, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan PT Jakarta Lingko Indonesia, serta 1 (satu) anak perusahaan, yakni PT Integrasi Transit Jakarta juga menjadi langkah pengembangan usaha yang dilakukan Perseroan sebagai upaya untuk membangun integrasi sistem transportasi Jakarta yang efektif. Ketiga pengembangan ini secara tidak langsung menempatkan Perseroan sebagai Perusahaan Induk yang memiliki peranan strategis dalam mengkoordinasikan pengembangan transportasi terintegrasi Jakarta.

Pembangunan Jalur MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1 menjadi awal pengembangan jaringan terpadu sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa depan. Pengembangan selanjutnya adalah pembangunan jalur MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 rute Bundaran HI – Ancol Barat sepanjang ±11,8 km yang dibagi menjadi dua tahap, yakni MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dan MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol Barat), serta perencanaan koridor Timur-Barat atau MRT Fase 3 (Cikarang – Balaraja) dan MRT Jakarta Fase 4 (Fatmawati – TMII).

2020, ticket payment using QR Code has become a new source of non-farebox revenue through collaboration with financial technology companies. Moreover, during the pandemic, the Corporation supports MSME retailers that carry out business activities at MRT Jakarta stations.

Also, the Corporation develops Transit-Oriented Development (TOD) business under the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province No. 67 Year 2020 concerning the Implementation of Transit-Oriented Development. According to the regulation, the Corporation as an operator of MRT Jakarta public transportation can propose itself to become Area Developer with a role in planning the development of the areas around MRT Jakarta stations based on TOD concepts. As of the end of 2020, there are 5 (five) TOD areas with Urban Design Guidelines (PRK) as ratified through the Governor's Regulation, i.e., Blok M – Sisingamangaraja TOD, Fatmawati TOD, Lebak Bulus TOD, Istora – Senayan TOD, and Dukuh Atas TOD. The establishment of 2 (two) joint ventures, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek and PT Jakarta Lingko Indonesia, and 1 (one) subsidiary, PT Integrasi Transit Jakarta is an effort of business development by the Corporation to develop effective integration of transportation system in Jakarta. The three developments indirectly place the Corporation as the Holding Corporation with strategic role in coordinating the integrated transportation development in Jakarta.

The construction of the Phase 1 of North-South Corridor of MRT Jakarta Track became the initial development of the integrated network of MRT system as a part of the mass transportation system of DKI Jakarta in the future. The upcoming development is Phase 2 of North-South Corridor of MRT Jakarta track with the route of Bundaran HI – Ancol Barat of ±11.8 km, divided into two phases, i.e., Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) and Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat), and the planning for East-West corridor or Phase 3 MRT Jakarta (Cikarang – Balaraja) and Phase 4 MRT Jakarta (Fatmawati – TMII).

Nama Perseroan

Corporate Name

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan pergantian nama, yaitu PT MRT Jakarta (Perseroda).

As of December 31, 2020, the Corporation did not make any changes to its name, i.e. PT MRT Jakarta (Perseroda).

Kegiatan dan Bidang Usaha Perseroan

Corporate Activities and Business Lines

Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir yang diubah melalui Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Akta Nomor 46 Tanggal 16 Desember 2020 dan telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0421641 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.

Under the Articles of Association as most recently amended by Notary Deed of Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Deed Number 46 dated December 16, 2020 and as approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHUAH.01.03.1421641 Year 2020 dated December 21, 2020 concerning the Reception of the Notice Regarding the Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana

MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI telah selesai dibangun dan resmi beroperasi sejak 24 Maret 2019. Prasarana yang dioperasikan meliputi 13 stasiun dan satu Depo. Setiap stasiun dilengkapi fasilitas pendukung untuk operasional maupun layanan kepada pengguna jasa. Fasilitas pendukung operasional, di antaranya sistem *signaling* dan telekomunikasi (*Passenger Announcement*, CCTV, *Passenger Information Display*) dan sistem PSD (*Platform Screen Door*). Sementara fasilitas pendukung layanan bagi pengguna jasa, antara lain ruang laktasi, musala, toilet dan toilet khusus disabilitas, mesin tiket otomatis, eskalator dan elevator prioritas. Terdapat juga tenan ritel di area tidak berbayar.

Saat ini, Perseroan sedang melakukan Pengadaan dan Konstruksi prasarana untuk MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) secara bertahap, sementara untuk MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol Barat) sedang dalam proses persetujuan trase dan penetapan lokasi.

1. Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure development, infrastructure operations, infrastructure maintenance, and commercialisation

Phase 1 MRT Jakarta from Lebak Bulus to Bundaran HI has been constructed and has been officially operating since March 24, 2019. The operating infrastructures consist of 13 stations and one Depot. Each station is equipped with facilities that support the operations and services for the customers. Operational support facilities include signalling and telecommunication system (Passenger Announcement, CCTV, Passenger Information Display) and PSD (Platform Screen Door) system. Service support facilities for customers include nursery rooms, prayer rooms, toilets and accessible toilets, ticket vending machines, escalators, and priority elevators. Retail tenants are also located in unpaid areas.

Currently, the Corporation is progressively conducting the Tender and Construction of infrastructure for Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota), as for Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat), ground plan recommendation and location determination are in process.

2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana

Pada periode pelaporan, Perseroan telah mengoperasikan MRT Jakarta Fase 1 rute Lebak Bulus – Bundaran HI disertai perawatan sarana yang ada. MRT Jakarta Fase 1 beroperasi setiap hari pukul 05:00 – 24:00 WIB. Selama tahun 2020, operasional MRT Jakarta Fase 1 menggunakan Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) pada Hari Kerja (*weekdays*) sebanyak 285 perjalanan per hari dan Gapeka Hari Libur (*weekend*) sebanyak 219 perjalanan per hari.

Pada masa pandemi COVID-19, Perseroan melakukan penyesuaian operasional sesuai pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Informasi tentang hal ini, lihat halaman 175 laporan ini pada bahasan Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Sebelum pemberlakuan PSBB, MRT Jakarta Fase 1 melayani 6.661.006 pengguna jasa (Periode 01 Januari – 09 April 2020), dengan rata-rata 66.610 pengguna jasa per hari. Selama pemberlakuan PSBB, total jumlah pengguna jasa yang dilayani mencapai 3.265.507 orang (periode 10 April – 31 Desember 2020), dengan rata-rata 12.276 pengguna jasa per hari. Secara keseluruhan selama tahun 2020, MRT Jakarta Fase 1 melayani 27.122 pengguna jasa per hari.

Saat ini, Perseroan sedang mempersiapkan Desain Kereta MRT Fase 2A (Bundaran HI - Kota), serta dalam proses persetujuan trase dan penetapan lokasi untuk MRT Fase 2B (Kota - Ancol Barat).

3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan karyawan sekitarnya

Standardisasi dan implementasi kemitraan komersial dan ritel, serta Panduan Rancang Kota (PRK) telah dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi bisnis di Kawasan Berorientasi Transit (KBT) di beberapa lokasi

2. Management of urban public railway facilities, which includes facility procurement, facility operations, and facility maintenance and commercialisation

During the reporting period, the Corporation operates Phase 1 MRT Jakarta from Lebak Bulus to Bundaran HI along with the maintenance of existing facilities. Phase 1 MRT Jakarta operates from 05:00 until 24:00 Western Indonesian Time. In 2020, the operations of Phase 1 MRT Jakarta follows the Train Travel Chart (Gapeka) of 285 trips per day during the weekdays and 219 trips per day during the weekends.

During the COVID-19 Pandemic, the Corporation adjusted operational activities in adherence to the execution of Large-Scale Social Restriction (PSBB) by the Government of DKI Jakarta Province. The operations during the COVID-19 pandemic are carried out by realising strict measures of health protocols. Further information on this matter is presented on page 175 of this report under Management Analysis and Discussion.

Before the implementation of PSBB, Phase 1 MRT Jakarta served 6,661,006 passengers (January 1 – April 9, 2020), averaging 66,610 passengers daily. After the implementation of PSBB, the total passengers served reached 3,265,506 customers (April 10 – December 31, 2020), averaging 12,276 passengers daily. In 2020, Phase 1 MRT Jakarta served 27,122 daily passengers.

Currently, the Corporation is preparing the Train Design for Phase 2A MRT (Bundaran HI – Kota) and carrying out ground plan recommendation and location determination for Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat).

3. Development and management of properties/businesses in the stations, Depot, and surrounding areas

The standardisation and implementation of commercial and retail partners, as well as Urban Design Guidelines (UDGL) has been developed to optimise the business opportunities within the Transit Oriented Development

Stasiun MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI). Saat ini, Perseroan sedang melakukan penyusunan Panduan Rancang Kota (PRK) untuk MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat).

Pada periode pelaporan, Perseroan memulai pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dan MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol Barat). Periode konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dimulai pada Maret 2019 dan direncanakan selesai pada 2027. Sampai dengan akhir tahun 2020, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A telah memasuki tahapan pengerjaan untuk paket kontrak CP 201 (segmen Bundaran HI – Harmoni), meliputi pembangunan Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas serta jalur bawah tanah sepanjang 2,7 km yang dilakukan oleh Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) sebagai kontraktor pemenang tender.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A didukung rencana pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan di sekitar stasiun MRT dengan tujuan untuk memberikan layanan mobilitas bagi seluruh warga Jakarta sekaligus sebagai sarana untuk meremajakan kota dengan memacu pertumbuhan ekonomi. MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) akan melintasi kawasan pusat bisnis, pusat pemerintahan, kawasan wisata, kawasan cagar budaya, serta kawasan hunian dan sentra niaga di wilayah utara Kota Jakarta. Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) diperkirakan akan menarik 551.200 pengguna jasa/hari di sepanjang Jalur MRT Utara-Selatan (Lebak Bulus – Kota), sehingga akan memberikan dampak positif yang tinggi bagi pengembangan kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta.

Hingga akhir periode pelaporan, telah diperoleh hasil studi kelayakan untuk MRT Jakarta Fase 2B dan telah memasuki proses persetujuan trase dan penetapan lokasi, setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2019. MRT Jakarta Fase 2B memiliki jalur sepanjang 5,8 kilometer yang terdiri dari tiga stasiun dengan estimasi pengerjaannya akan mulai dibangun pada tahun 2024 dan beroperasi pada tahun 2030. MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol Barat) memiliki potensi tangkapan pengguna jasa yang tinggi karena melintasi sentra niaga, wisata serta kawasan pesisir yang memiliki potensi pengembangan yang tinggi dengan konsep KBT baru di Kawasan Utara Jakarta.

(TOD) areas at various Stations of Phase 1 MRT Jakarta (Lebak Bulus – Bundaran HI). Currently, the Corporation is carrying out the development of Urban Design Guidelines (UDGL) for Phase 2 MRT Jakarta (Bundaran HI – Ancol Barat).

During the reporting period, the Corporation started the construction of Phase 2 MRT Jakarta (Bundaran HI – Ancol Barat) consists of 2 (two) stages, i.e. Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) and Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat). The construction period for Phase 2A MRT Jakarta started in March 2019 and it is planned to be completed in 2027. As of the end of 2020, contract package CP 201 (Bundaran HI – Harmoni segment) for Phase 2A MRT Jakarta construction has begun. The execution is carried out by the Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) as the tender winning contractor, covering the construction of Thamrin Station and Monas Station and underground tracks of 2.7 km.

The construction of the MRT Jakarta Phase 2A is supported by a Transit-Oriented Development (TOD) tailored to the characteristics of the surrounding areas of the MRT station that aims to provide mobility services for all Jakarta residents as well as a means of rejuvenating the city by driving economic growth. Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) will pass through business districts, civic centres, tourism areas, heritage areas, and residential and commercial centres in the northern part of Jakarta. The construction of Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) is expected to attract 551,200 daily passengers along the North-South Line (Lebak Bulus – Kota), resulting in significant positive impacts in terms of area developments around MRT Jakarta stations.

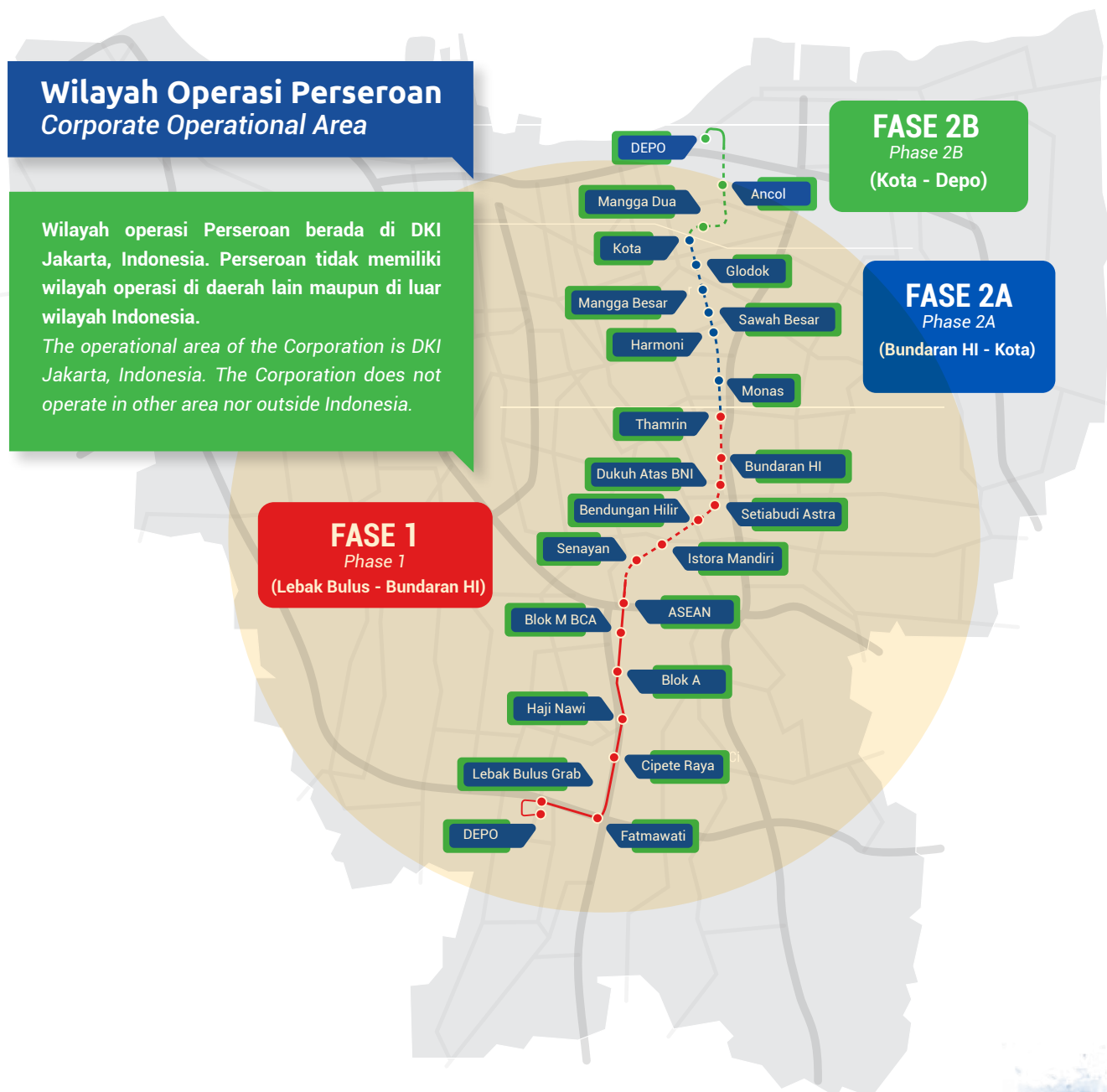
By the end of the reporting period, the final report of the Feasibility Study for Phase 2B MRT Jakarta has been obtained and is currently in the process of Trace Recommendation and Location Determination after having previously been granted Principal Approval by the Governor of DKI Jakarta in 2019. Phase 2B MRT Jakarta extends 5.8 kilometers and consists of three stations, construction is expected to begin in 2024 to be operated in 2030. Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat) has a high potential demand because it passes through commercial areas, tourism areas, and coastal areas with potential rapid development to become a new TOD area in Northern Jakarta.

Di samping proses konstruksi fisik, Perseroan telah menyusun dokumen usulan Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit untuk MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) serta proposal pengembangan kawasan MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol Barat) sebagai bagian dari rencana pengembangan dan pengelolaan properti dan bisnis di sekitar kawasan stasiun MRT.

Besides physical construction, the Corporation has formulated Transit-Oriented Development Urban Design Guidelines proposal document for Phase 2A MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota) and areal development proposal for Phase 2B MRT Jakarta (Kota – Ancol Barat) as a part of the development plan and management of property and business in the surrounding areas of MRT stations.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) direncanakan terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti TransJakarta dan Kereta Commuter Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daerah layanan MRT Jakarta serta mewujudkan integrasi transportasi di DKI Jakarta.

The construction of Phase 2 MRT Jakarta (Bundaran HI – Ancol Barat) is planned to integrate with other modes of transportation, e.g. TransJakarta and Commuter Line. It aims to increase the service area of MRT Jakarta and realise transportation integration in Jakarta.



Visi, Misi dan Nilai Perseroan

Corporate Vision, Mission, and Values

Visi Perseroan

Corporate Vision

Untuk menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading public transportation provider, committed to encouraging a sustainable economic growth through mobility improvement, reduction of traffic congestion, and the development of urban transit systems.

Misi Perseroan

Corporate Mission

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang dilakukan melalui:

- Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman;
- Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan
- Membangun reputasi sebagai pilihan dengan melibatkan, menginspirasi, dan memotivasi seluruh karyawan.

To strive for excellence sustainably in all our undertakings through:

- *Development and operation of a safe, trusted, and reliable public transportation network;*
- *Urban regeneration through prominent urban-transit developments; and*
- *Building reputation as a preferred corporation by involving, inspiring and motivating our manpower.*

Nilai-nilai Perseroan Corporate Values

Nilai-nilai Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 003 Tahun 2018 tentang Penetapan Core Values Perseroan dan Leadership Competences di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Core Values I CAN diterapkan sejalan dengan 5 (lima) prinsip dasar governansi korporat, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

The Corporate Values are established based on the Directors' Regulation No. 003 Year 2018 concerning the Establishment of Corporate Core Values and Leadership Competencies in PT MRT Jakarta (Perseroda). Core Values I CAN is implemented along with 5 (five) fundamental principles of corporate governance of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.



Prinsip Dasar Governansi Korporat (TARIF)
Fundamental Principles of Corporate Governance (TARIF)

Persetujuan dan Peninjauan Atas Visi, Misi dan Nilai Perseroan

Approval and Review of Corporate Vision, Missions, and Values

Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perseroan ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2014-2030, yang disahkan tanggal 24 November 2014 yang kemudian diperbaharui melalui RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2019. Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik melakukan kajian terhadap relevansi Visi dan Misi Perseroan terhadap perkembangan terkini Perseroan.

Corporate Vision, Missions, and Values were determined by the Board of Commissioners and the Board of Directors in the 2014-2030 Long Term Corporate Plan (RJPP) ratified on November 24, 2014 which was later updated through the Annual GMS on 28 March 2019. The Board of Commissioners and the Board of Directors periodically review the relevance of the Corporate Vision and Missions in light of the Corporation's most recent development.

Strategi Perseroan

Corporate Strategy

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki strategi yang difokuskan kepada penguasaan kompetensi inti sebagai operator kereta api perkotaan yang efisien dan berkelas dunia, terutama dalam hal:

- Pengembangan dan operasi jaringan transportasi MRT;
- Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit.

To achieve its vision and the missions, the Corporation has a set of strategy that is focused on its core competency as an efficient and world-class urban railway operator, especially in terms of:

- *Development and operations of MRT Jakarta's transportation network; and*
- *Management of Transit-Oriented Development areas.*

Selama periode pelaporan, Perseroan melakukan beberapa hal untuk memastikan layanan operasional berjalan optimal, seperti pelatihan dan sertifikasi terhadap awak sarana perkeretaapian, sarana maupun prasarana yang dimiliki. Perseroan juga melakukan penyempurnaan pada aspek prosedur serta koordinasi kerja operasi dan pemeliharaan untuk menjalankan operasi andal. Perseroan juga melakukan kerja sama maupun pertukaran pengetahuan dengan operator perkeretaapian domestik maupun internasional.

During the reporting period, the Corporation has conducted various efforts to ensure the delivery of optimal operations, such as training and certification for operational and maintenance staffs as well certification of the facilities and infrastructures. Also, the Corporation continues to improve the procedures and coordination within its operations and maintenance work units to deliver operational excellence. The Corporation collaborates and conducts knowledge sharing with domestic and international railway operators as well.

Pada periode pelaporan Perseroan menjajaki peluang dan potensi bisnis untuk memperoleh pendapatan di luar tarif maupun subsidi. Hal ini tidak terlepas dari adanya mekanisme kontrol atas tarif oleh Pemerintah dalam penyediaan layanan transportasi umum berbasis rel. Ada beberapa bentuk kerja sama yang telah dilakukan Perseroan untuk memperoleh pendapatan di luar tarif dan subsidi, di antaranya kerja sama bidang periklanan, retail, dan telekomunikasi di dalam stasiun, serta pengembangan kawasan di sekitar area stasiun.

During the reporting period, the Corporation explored business opportunities and another business potential to generate revenue besides farebox revenue and subsidies. This was due in part to the strict mechanism of tariff controls imposed by the Government regarding the provision of rail-based public transportation services. Various cooperation carried out by the Corporation to generate revenue besides farebox revenue and subsidies includes collaboration for advertising, retail, and telecommunications within the stations as well as development of areas surrounding the stations.

Pada tahun 2020, MRT Jakarta mengusung konsep transformasi, yaitu *Transforming Business Beyond Normal*, atau melakukan transformasi bisnis diluar kenormalan. Tujuannya adalah agar PT MRT Jakarta (Perseroda) bisa bertahan dalam situasi pandemi, bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan (*revive and grow sustainably*) dalam tatanan kenormalan baru.

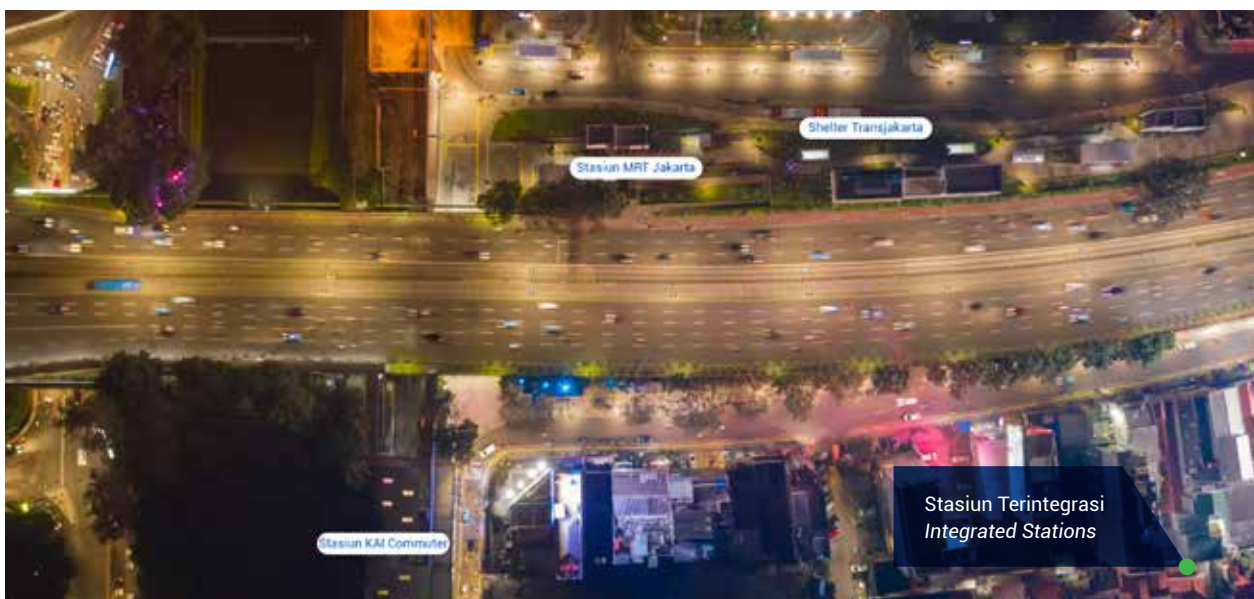
Transformasi bisnis di luar kenormalan ini meliputi tiga hal, di antaranya:

- *Beyond Ridership*, di mana Perseroan memberikan pelayanan kepada konsumen tidak hanya berfokus pada jumlah pengguna jasa, namun lebih luas pada aspek gaya hidup dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dalam konteks yang seluas-luasnya. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dapat ditingkatkan dari aspek non-tiket.
- *Beyond Physical Mobility*, di mana Perseroan melakukan pelayanan tidak hanya fokus kepada orang-orang yang menggunakan ratangga, namun juga kepada masyarakat pengguna yang tidak sedang menggunakan MRT Jakarta. Kombinasi antara layanan MRT yang dilakukan secara fisik dan layanan secara digital menjadi kunci, dan ini dilakukan dengan menjadikan MRT Jakarta sebagai *platform* baik dalam pengertian fisik maupun digital.
- *Beyond Transport Network*, di mana Perseroan melakukan pengembangan jaringan MRT Jakarta tidak hanya berfokus pada memperpanjang jalur layanan ratangga, namun dilaksanakan bersama dengan membangun/meregenerasi kota pada sepanjang koridor MRT Jakarta. Dengan demikian, MRT Jakarta menjadi *backbone* transformasi kota yang sedang berubah dari *Car-Oriented Development* menjadi *Transit-Oriented Development*.

In 2020, MRT Jakarta adopts the transformation concept of 'Transforming Business Beyond Normal'. The objectives are for the Corporation to remain strong amidst the pandemic, and to revive and grow sustainably in the new normal.

Transforming Business Beyond Normal covers three aspects as follows:

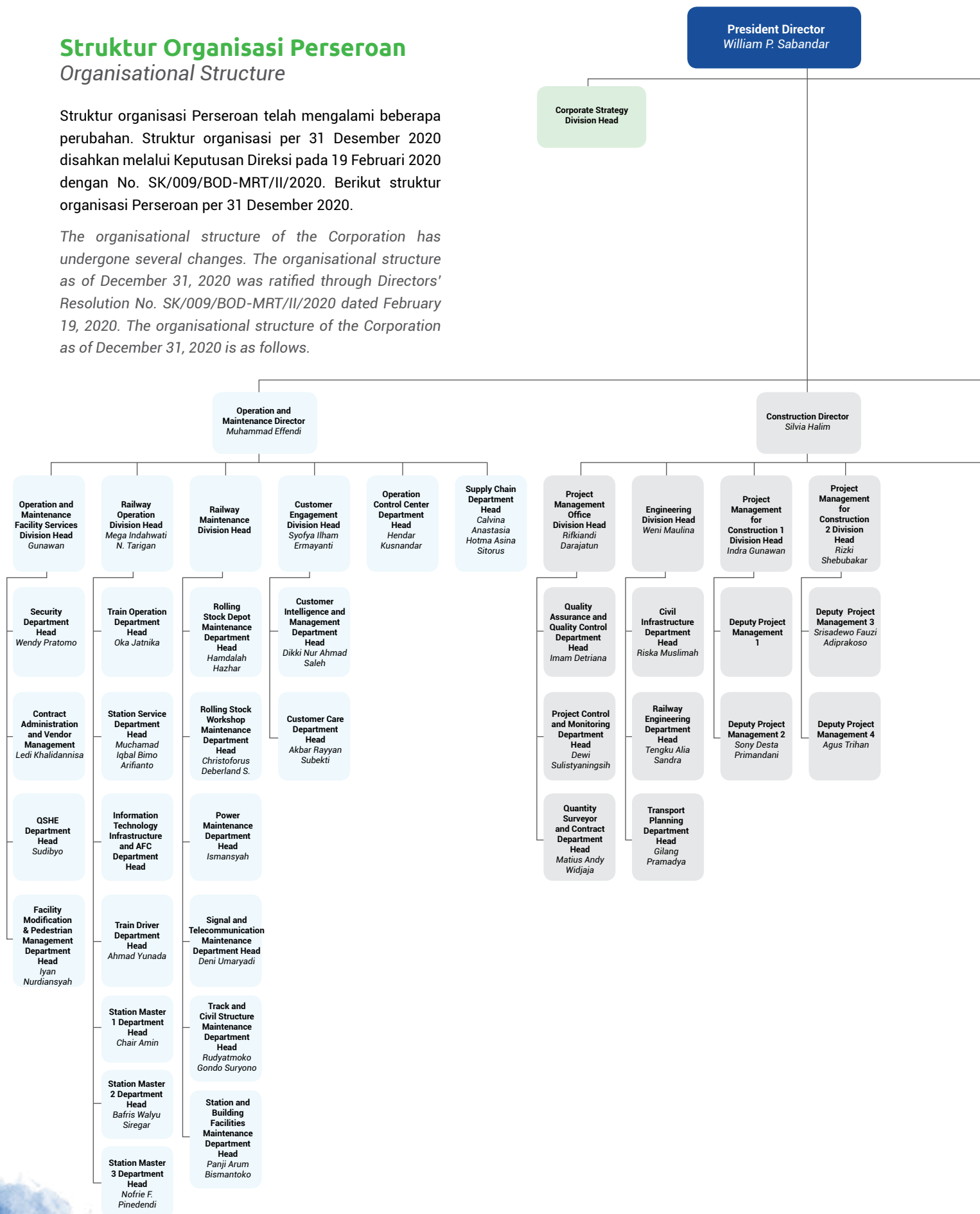
- *Beyond Ridership, where the Corporation provides its services to customers while not only focusing on the number of passengers, but also on the wider aspects such as lifestyle and prioritises customer satisfaction in the widest extent. Therefore, the Corporation non-farebox revenue can be improved.*
- *Beyond Physical Mobility, where the Corporation delivers the services not only for the passengers of MRT Jakarta, but also to members of the public who do not use MRT Jakarta. A combination of physical and digital services of MRT Jakarta is the key factor, and it is implemented by creating MRT Jakarta as a platform in a physical and digital sense.*
- *Beyond Transport Network, where the Corporation develops MRT Jakarta networks by not only focusing on extending MRT Jakarta service lines, but also by developing/rejuvenating the city along the MRT Jakarta corridor. Therefore, MRT Jakarta becomes a backbone of urban transformation from Car-Oriented Development to be Transit-Oriented Development.*

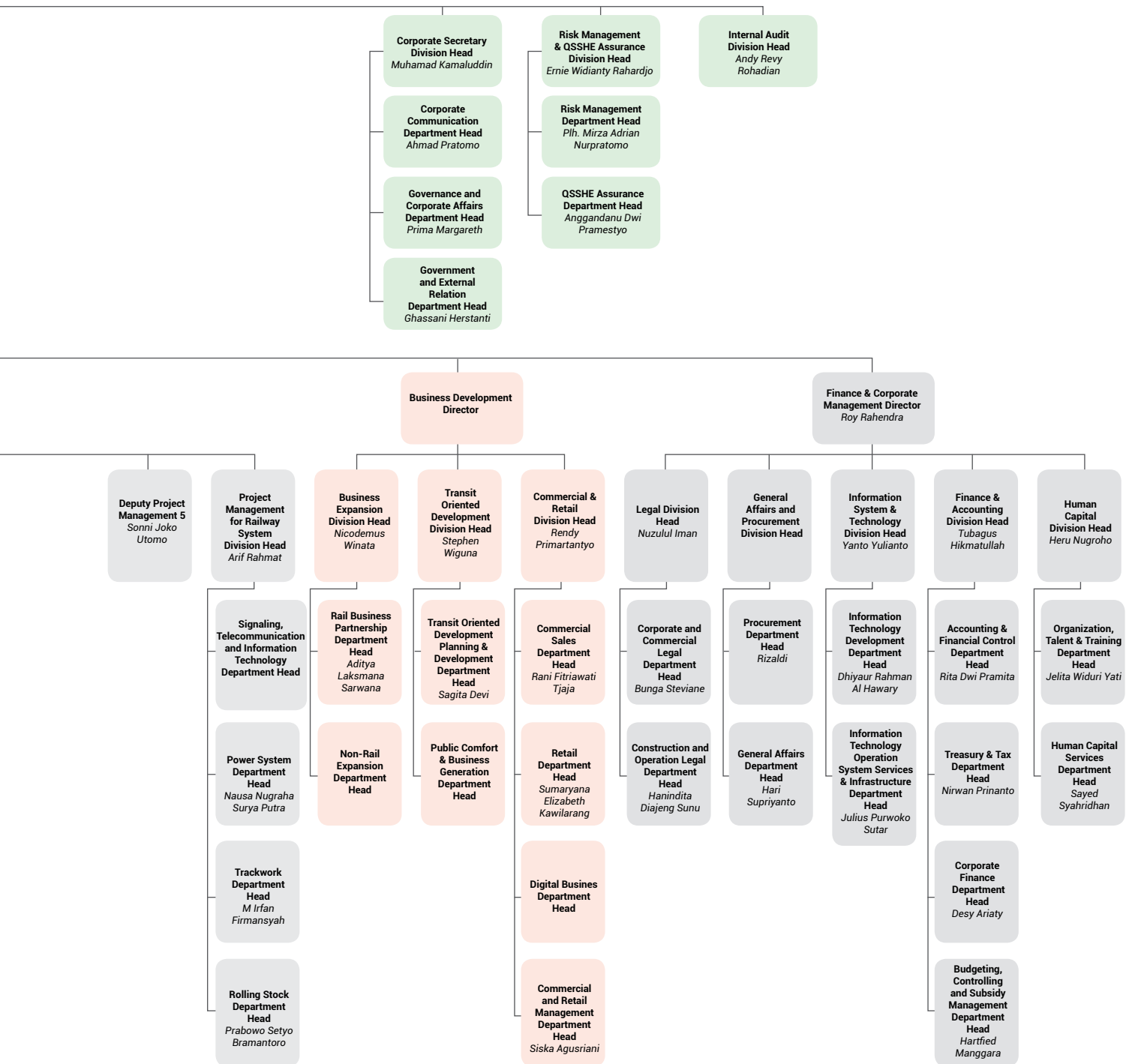


Struktur Organisasi Perseroan Organisational Structure

Struktur organisasi Perseroan telah mengalami beberapa perubahan. Struktur organisasi per 31 Desember 2020 disahkan melalui Keputusan Direksi pada 19 Februari 2020 dengan No. SK/009/BOD-MRT/II/2020. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2020.

The organisational structure of the Corporation has undergone several changes. The organisational structure as of December 31, 2020 was ratified through Directors' Resolution No. SK/009/BOD-MRT/II/2020 dated February 19, 2020. The organisational structure of the Corporation as of December 31, 2020 is as follows.





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners



MUHAMMAD SYAUGI

Komisaris Utama | President Commissioner

| | |
|---|--|
| Periode Jabatan Pertama: 31 Mei 2019 - 30 Mei 2023 | <i>Term of Office: May 31, 2019 – 2023 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 60 tahun | <i>60 years old</i> |
| Kelahiran Malang, 10 Desember 1960 | <i>Born in Malang, December 10, 1960</i> |
| Domisili Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | <i>Domicile Bekasi, Jawa Barat, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2019-2023. | <i>History of Appointment Serves on the Corporation's Board of Commissioners through a Shareholder Decree outside the AGMS dated May 31, 2019, 1st period of the 2019-2023 term.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Magister (S2) Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014); Sarjana (S1) Sosial Politik dari Universitas Merdeka Madiun (1998). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Master of Management from IMMI Jakarta College of Management (2014);</i> <i>Bachelor of Social Politics from Merdeka Madiun University (1998).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Kepala Badan SAR Nasional (2012-2019); Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (2014-2017); Atase Pertahanan RI untuk Rusia (2003-2007); Komandan Skuadron Udara 3/F-16 (1990-an-2002); Sesko TNI AL angkatan 36 (1999). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>National SAR Agency Head (2012-2019);</i> <i>Director-General of Defense Planning at the Republic of Indonesia Defense Ministry (2014-2017);</i> <i>Indonesian Defense Attache to Russia (2003-2007);</i> <i>Commander of the 3/F-16 Air Squadron (1990s-2002);</i> <i>Indonesian Navy Special Forces 36 (1999).</i> |
| Rangkap Jabatan: Tidak memiliki rangkap jabatan. | <i>Concurrent Position: Occupies no concurrent position.</i> |
| Hubungan Afiliasi Muhammad Syaugi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama. | <i>Affiliation Muhammad Syaugi has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholders.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 115 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 115 of this report.</i> |



RUKIJO

Komisaris | Commissioner

| | |
|--|--|
| Periode Jabatan Kedua: 19 Agustus 2020 - 18 Agustus 2024 | <i>Term of Office: August 19, 2020 – 2024 AGMS, Second Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 53 tahun | <i>53 years old</i> |
| Kelahiran Metro, 1 Februari 1967 | <i>Born in Metro, February 1, 1967</i> |
| Domisili Pamulang, Tangerang, Banten Indonesia | <i>Domicile Pamulang, Tangerang, Banten Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 10 Agustus 2015, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2015-2020. Kemudian menjabat untuk periode ke-2 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) pada tanggal 19 Agustus 2020. | <i>History of Appointment Serves on the Corporation's Board of Commissioners based on GMS Resolutions dated August 10, 2015 for the first period of the terms of office from 2015-2020. Then, serves for the second period based on the Circular Resolutions of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated August 19, 2020.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran (2019); Magister (S2) Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007); Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lampung (1990). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Doctor of Economics from Padjajaran University (2019);</i> <i>Master of Management from the University of Muhammadiyah Jakarta (2007);</i> <i>Bachelor of Economics majoring in Economics and Development Studies from Lampung University (1990).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan (2020-sekarang). Sekretaris DJPK Kemenkeu (2016-2019); Direktur Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu (2014-2016); Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu (2013-2014); Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK Kemenkeu (2009-2013); | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Finance Ministry at the Directorate-General of Fiscal Balance, to which he was appointed in 2016;</i> <i>Secretary of Finance Ministry DJPK (2016-2019);</i> <i>Finance Ministry DGT Balance Fund Director (2014-2016);</i> <i>Regional Tax and Regional Retribution Director at the Finance Ministry DJPK (2013-2014);</i> <i>Sub Directorate Head of Transfer II Implementation at the Finance Ministry DGT (2009-2013).</i> |
| Rangkap Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2016-sekarang). | <i>Concurrent Position Secretary of the Finance Ministry at the Directorate-General of Fiscal Balance (2016-present).</i> |
| Hubungan Afiliasi Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Rukijo sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Rukijo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. | <i>Affiliation Rukijo has an affiliation with Major / Controlling Shareholders through his position in the Finance Ministry as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. Rukijo's position as the Corporation's Commissioner has passed the relevant fit-and-proper test. Also, Rukijo has no affiliation with any other members of either the Board of Commissioners or Board of Directors.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 115 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 115 of this report.</i> |



ZULFIKRI

Komisaris | Commissioner

| | |
|--|---|
| Periode Jabatan Pertama: 4 Mei 2018 - 3 Mei 2022 | <i>Term of Office : May 4, 2018 – 2022 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 58 tahun | <i>58 years old</i> |
| Kelahiran Lintau, 9 Juli 1962 | <i>Born in Lintau, July 9, 1962</i> |
| Domisili Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | <i>Domicile Tangerang Selatan, Banten, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkular RUPS PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 4 Mei 2018, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2018-2022. | <i>History of Appointment Serves on the Corporation's Board of Commissioners through PT MRT Jakarta (Perseroda) GMS Circular Resolution dated May 4, 2018, 1st Period of the 2018-2022 term.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Magister (S2) Ekonomi Transportasi, Program Pasca Sarjana Universitas LYON II ENTREQ, Perancis (1997); • Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990); • Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) (1987). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Masters of Transportation Economics, LYON II University; ENTREQ Postgraduate Program, France (1997);</i> • <i>Master of Road Systems and Engineering, Postgraduate Program at the Bandung Institute of Technology, Bandung (1990);</i> • <i>Bachelor of Civil Engineering and Planning, Bandung Institute of Technology (ITB) (1987).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Perkeretaapian (2017-sekarang); • Direktur Prasarana Perkeretaapian (Mei 2017-November 2017); • Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Mei 2016-Mei 2017); • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Multimoda (Februari 2014-Mei 2016); • Kepala Bagian Perencanaan (Januari 2011-Februari 2014). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Director-General of Railways (2017-present);</i> • <i>Railway Infrastructure Director (May 2017-November 2017);</i> • <i>Railway Traffic and Transportation Director (May 2016-May 2017);</i> • <i>Multimodal Research and Development Center Head (February 2014-May 2016);</i> • <i>Planning Head (January 2011-February 2014).</i> |
| Rangkap Jabatan Direktur Jenderal Perkeretaapian Lembaga Kementerian Perhubungan (2017-sekarang) | <i>Concurrent Position Transportation Ministry Director-General of Railways (2017-present)</i> |
| Hubungan Afiliasi Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Zulfikri sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Zulfikri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. | <i>Affiliation Zulfikri has an affiliation with Major / Controlling Shareholders through his position in the Transportation Ministry as the Corporation's Ultimate Beneficial Owner. Zulfikri's position as the Corporation's Commissioner has passed a fit-and-proper test. Also, Zulfikri has no affiliation with any other Board of Commissioners or Board of Directors members.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 115 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 115 of this report.</i> |



MUKHTASOR

Komisaris | Commissioner

| | |
|---|---|
| Periode Jabatan Pertama: 29 Oktober 2018 - 28 Oktober 2022 | <i>Term of Office October 29, 2018 – 2022 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 51 tahun | <i>51 years old</i> |
| Kelahiran Blitar, 20 April 1969 | <i>Born in Blitar, April 20, 1969</i> |
| Domisili Surabaya, Jawa Timur, Indonesia | <i>Domicile Surabaya, East Java, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 29 Oktober 2018, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2018-2022. | <i>History of Appointment Serves on the Corporation's Board of Commissioners through PT MRT Jakarta (Perseroda) Shareholders' Circular Decision dated October 29, 2018, 1st Period of the 2018-2022 term.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Doktor (S3) Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Universitas Memorial Newfoundland, Canada (2001); Magister (S2) Teknik, Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Universitas Memorial Newfoundland (MUN) Canada (1998); Sarjana (S1) Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1993). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Doctor of Philosophy, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada (2001);</i> <i>Master of Engineering, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada (1998);</i> <i>Bachelor of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology from the Sepuluh November Institute of Technology (ITS) (1993).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-sekarang); Anggota Dewan Penasihat Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2017); Penasihat Senior Direktur Utama PT Pertamina (2015-2016); Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Professor at the Sepuluh November Institute of Technology (ITS), Surabaya (2009-present);</i> <i>Member of the Minister's Advisory Council at the Environment and Forestry Ministry (2015-2017);</i> <i>Senior Advisor to the President Director of PT Pertamina (2015-2016);</i> <i>Member of the Indonesian National Energy Board (2009-2014).</i> |
| Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan | <i>Concurrent Position Occupies no concurrent position.</i> |
| Hubungan Afiliasi Mukhtasor tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama. | <i>Affiliation Mukhtasor has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners or Board of Directors or with any major shareholders.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 115 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 115 of this report.</i> |



ADNAN PANDU PRAJA

Komisaris | Commissioner

| | |
|---|---|
| Periode Jabatan Pertama: 31 Mei 2019 - 30 Mei 2023 | <i>Term of Office : May 31, 2019 – 2023 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 60 tahun | <i>60 years old</i> |
| Kelahiran Jakarta, 14 Januari 1960 | <i>Born in Jakarta, January 14, 1960</i> |
| Domisili Depok, Jawa Barat (West Java), Indonesia | <i>Domicile Depok, Jawa Barat (West Java), Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2019-2023. | <i>History of Appointment Serves on the Corporation's Board of Commissioners through Shareholder Decree outside GMS dated May 31, 2019, which is the 1st period of the 2019-2023 term.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Magister (S2) Fakultas Hukum di Universitas of Technology, Sydney (2003); Sarjana (S1) Hukum di Universitas Indonesia (1986). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Master of the Faculty of Law at the University of Technology, Sydney (2003);</i> <i>Bachelor of Law from the University of Indonesia (1986).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Penulis artikel di sejumlah media massa nasional; Staf Khusus Menteri Perindustrian RI (2016-2017); Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (2011-2015); Praktisi hukum di sejumlah kantor hukum, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (1990-an dan 2000-an); Pendiri Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS), serta menjadi penyunting Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1980-an). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Article writer for several national mass media publications;</i> <i>Special Staff Member to the Republic of Indonesia Industry Minister (2016-2017);</i> <i>Deputy-Chairman of the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) (2011-2015);</i> <i>A legal practitioner for many law offices and the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) (1990s and 2000s);</i> <i>Founder of the Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) and was the editor of the Law and Development Journal for the Faculty of Law at the University of Indonesia (1980s).</i> |
| Rangkap Jabatan <ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Taspen Properti Indonesia Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | <i>Concurrent Position</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Commissioner for PT Taspen Properti Indonesia</i> <i>Open Selection Committee for Middle and First Leadership Position for the DKI Jakarta Provincial Government</i> |
| Hubungan Afiliasi Adnan Pandu Praja memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan Panitia Seleksi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Adnan Pandu Praja tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. | <i>Affiliation Adnan Pandu Praja has an affiliation with the Corporation's Major / Controlling Shareholders through a position on the Selection Committee for the DKI Jakarta Provincial Government and as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. Adnan Pandu Praja's position as the Corporation's Commissioner has passed a fit-and-proper test. Also, Adnan Pandu Praja has no affiliation with any other Board of Commissioners or Board of Directors members.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 115 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 115 of this report.</i> |

PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors



WILLIAM P. SABANDAR
Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan Pertama: 14 Oktober 2016 - 13 Oktober 2021

Periode Jabatan Kedua: 21 Maret 2018 - 20 Maret 2023

Warga Negara Indonesia

Usia 54 tahun

Kelahiran Makassar, 4 November 1966

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

- Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 21 Oktober 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk periode ke-1 meneruskan masa jabatan Direktur Utama sebelumnya periode 2013-2018.
- Melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama untuk periode ke-2 masa jabatan 2018-2023.

Pendidikan

- Doktor (S3) Geografi Transportasi dari Universitas Canterbury, Selandia Baru (2004);
- Magister (S2) Teknik Transportasi dari Universitas New South Wales, Australia (2000);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin (1990).

Pengalaman Kerja

- Penasihat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2016);
- Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015);
- Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014);
- Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012);
- Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010).

Rangkap Jabatan: Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 116 laporan ini.

Term of Office: October 14, 2016 - 2021 AGMS, First Period

Term of Office: March 21, 2018 - 2023 AGMS, Second Period

Indonesian citizen

54 years old

Born in Makassar, November 4, 1966

Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

History of Appointment

- Appointed President-Director on October 21, 2016 following 2016 GMS Resolution, Deed No. 51 dated October 21, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., First served as President Director from October 21, 2016 for the 1st period, continued his previous. President-Director term during the 2013-2018 period.
- According to 2018 GMS Resolution Deed No.133 dated March 21, 2018. Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., He was reappointed as President Director for the 2018-2023 period.

Education

- Doctor of Transportation Geography from the University of Canterbury, New Zealand (2004);
- Master in Transportation Engineering from the University of New South Wales, Australia (2000);
- Bachelor of Civil Engineering, Hasanuddin University (1990).

History of Employment

- Senior Advisor to the Energy and Mineral Resources Minister cum Head of the National Task Force for the Accelerated Development of Renewable Energy and Energy Conservation (2015-2016);
- Operations Head for the National REDD+ Task Force (2014-2015);
- Expert Assistant to the Head of Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control (UKP4) (2012-2014);
- Corporate Affairs Director for the ASEAN Secretariat (2011-2012);
- Special Representative of the Secretary-General of ASEAN cum Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009-2010).

Concurrent Position: Occupies no concurrent position

Affiliation

Has no affiliation with any Board of Commissioners or Board of Directors members or with any Major / Controlling Shareholders.

Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 116 of this report.



SILVIA HALIM

Direktur Konstruksi | *Construction Director*
Plt. Direktur Pengembangan Bisnis
Appointed Business Development Director

| | |
|--|--|
| Periode Jabatan Pertama: 24 Agustus 2016 - 23 Agustus 2021 Periode Jabatan Kedua: 21 Maret 2018 - 20 Maret 2023 | <i>Term of Office: October 14, 2016 - 2021 AGMS, First Period</i> <i>Term of Office: March 21, 2018 - 2023 AGMS, Second Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 38 tahun | <i>38 years old</i> |
| Kelahiran Jakarta, 18 Juni 1982 | <i>Born in Jakarta, June 18, 1982</i> |
| Domisili Denpasar, Bali, Indonesia | <i>Domicile</i> <i>Denpasar, Bali, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan | <i>History of Appointment</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> Mulai menjabat sebagai Direktur Konstruksi sejak 24 Agustus 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk periode ke-1 meneruskan masa jabatan Direktur sebelumnya periode 2013- 2018; Melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode ke-2 masa jabatan 2018-2023. Menjabat sebagai Plt. Direktur Pengembangan Bisnis melalui Keputusan Direksi No 026 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Silvia has been serving as a Construction Director since August 24, 2016 following the 2016 GMS Resolution, Deed No. 48 dated September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. She has served as a Director since August 24, 2016 during the 1st period and continued a previous Director's term for the 2013-2018 period.</i> <i>According to the 2018 GMS Resolution, Deed No.133 dated March 21, 2018. Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., was appointed again as a Director for the 2018-2023 period.</i> <i>Menjabat sebagai Plt. Direktur Pengembangan Bisnis melalui Keputusan Direksi No 026 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020.</i> |
| Pendidikan Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Nanyang Technological University, Singapura (2004). | <i>Education</i> <i>Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Nanyang Technological University, Singapore (2004).</i> |
| Pengalaman Kerja Project Manager, Road Projects Group di Land Transport Authority (LTA) Singapura, (2004-2016). | <i>History of Employment</i> <i>Project Manager, Road Projects Group in Singapore's Land Transport Authority (LTA), (2004 - 2016).</i> |
| Rangkap Jabatan: Tidak memiliki rangkap jabatan. | <i>Concurrent Position: Occupies no concurrent position.</i> |
| Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali. | <i>Affiliation</i> <i>Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors or any Major/Controlling Shareholders.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 116 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 116 of this report.</i> |



MUHAMMAD EFFENDI
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director

| | |
|---|--|
| Periode Jabatan Pertama: 29 Oktober 2018 - 28 Oktober 2023 | <i>Term of Office: October 29, 2018 – 2023 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 56 tahun | <i>56 years old</i> |
| Kelahiran Palembang, 1 Maret 1964 | <i>Born in Palembang, March 1, 1964</i> |
| Domisili Jagakarsa, DKI Jakarta, Indonesia | <i>Domicile Jagakarsa, DKI Jakarta, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan sejak 29 Oktober 2018 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS, yang dituangkan dalam Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-1, masa jabatan 2018-2023. | <i>History of Appointment Appointed as Operation and Maintenance Director on October 29, 2018, following the Shareholder Decree outside the AGMS, Deed No. 016 dated November 17, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., 1st period of office, 2018-2023.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Magister (S2) Management di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI)-Monash (2003); • Diploma di bidang Occupational Safety and Health (K3) di Australian Center for Work Safety Australia (1998); • Sarjana (S1) Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1989). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Master in Management, Indonesian Institute for Management Development (IPMI) - Monash (2003);</i> • <i>Diploma in Occupational Safety and Health (K3) from the Australian Center for Work Safety, Australia (1998);</i> • <i>Bachelor of Civil Engineering from the Faculty of Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung (1989).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk Konstruksi 2 PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017-2018); • Kepala Divisi Konstruksi dan Penasihat Rasgas Corporate Ltd di Qatar selama 12 tahun (2005-2017); • Direktur dan Manager di sejumlah Perseroan (1997-2005). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Project Management Division Head for Construction 2 of PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017-2018);</i> • <i>The Construction Division Head and Advisor for Rasgas Company Ltd in Qatar for 12 years (2005-2017);</i> • <i>Director and Manager for several companies (1997-2005).</i> |
| Rangkap Jabatan: Tidak memiliki rangkap jabatan | <i>Concurrent Position: Occupies no concurrent position.</i> |
| Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali | <i>Affiliation Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors members or any Major / Controlling Shareholders.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 116 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 116 of this report.</i> |



ROY RAHENDRA

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director

| | |
|---|---|
| Periode Pertama : 20 April 2020 - 19 April 2025 | <i>Term of Office: April 20, 2020– 2025 AGMS, First Period</i> |
| Warga Negara Indonesia | <i>Indonesian citizen</i> |
| Usia 50 tahun | <i>50 years old</i> |
| Kelahiran Semarang, 07 September 1970 | <i>Born in Semarang, September 07, 1970</i> |
| Domisili Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | <i>Domicile Tangerang Selatan, Banten, Indonesia</i> |
| Riwayat Penunjukan Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi sejak 20 April 2020 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS, yang dituangkan dalam Akta No. 02 Tanggal 05 Mei 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-1, masa jabatan 2020-2025. | <i>History of Appointment Appointed as Finance and Corporate Management Director on April 20, 2020, following the Shareholder Decree outside the AGMS, Deed No. 02 dated May 5, 2020, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., 1st period of office, 2020-2025.</i> |
| Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Magister (S2) Perdagangan dari Universitas New South Wales, Australia (2002); • Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Indonesia (1998). | <i>Education</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Master in Trade from the University of New South Wales, Australia (2002);</i> • <i>Indonesian State College of Accountancy (STAN) Jakarta, Indonesia (1998).</i> |
| Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Chief Technical Advisor NPM untuk Partnership for Market Readiness (PMR) di United Nations Development Programme (UNDP) (2017-2020); • Chief Technical Advisor NPM untuk The Reductions of Emissions form Deforestation and Forest Degradations (REDD+) di United Nations Development Programme (UNDP) (2012-2016); • Penjabat - Kepala Sekretariat Badan Pengelola REDD+ (2013-2015); • Asisten Direktur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2010-2011); • Project Management Advisor Asian Development Bank (ADB) (2009-2010). | <i>History of Employment</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Chief Technical Advisor NPM for the Partnership for Market Readiness (PMR) in the United Nations Development Programme (UNDP) (2017-2020);</i> • <i>Chief Technical Advisor NPM for the Reductions of Emissions from Deforestation and Forest Degradations (REDD+) in the United Nations Development Programme (UNDP) (2012-2016);</i> • <i>Head of REDD+ Managing Agency Secretariat (2013-2015);</i> • <i>Assistant Director for the Presidential Working Unit for Management Supervision and Development Control (UKP4) (2010-2011);</i> • <i>Project Management Advisor for Asian Development Bank (ADB) (2009-2010).</i> |
| Rangkap Jabatan: Tidak memiliki rangkap jabatan | <i>Concurrent Position: Occupies no concurrent position.</i> |
| Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali. | <i>Affiliation Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors members or any Major / Controlling Shareholders.</i> |
| Informasi terkait sertifikasi profesi dan program pengembangan kompetensi tahun 2020, dapat dilihat pada halaman 116 laporan ini. | <i>Information concerning the professional certification and competency development program in 2020 is presented on page 116 of this report.</i> |

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PERSEROAN

Profile of the Executive Officials

Heru Nugroho

Human Capital Division Head



Menjabat Sejak 2 Januari 2019
Served Since January 2nd, 2019

Warga Negara Citizen: Indonesia

Usia Age: 56 Tahun Years Old

Domisili Domicile: Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 September 2009
Joined MRT Jakarta September 1st, 2009

Riwayat Pendidikan Education:
S2 Bisnis Administrasi, Universitas Gadjah Mada, 2019
Master Degree in Business Administration, University of Gajah Mada, 2019

Mega Indahwati Natangsa Tarigan

Railway Operation Division Head



Menjabat Sejak 2 Februari 2017
Served Since February 2nd, 2017

Warga Negara Citizen: Indonesia

Usia Age: 37 Tahun Years Old

Domisili Domicile: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 Oktober 2009
Joined MRT Jakarta: October 1st, 2009

Riwayat Pendidikan Education:
S2 Administrasi Bisnis dan Teknik,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2009
*Master Degree of Business Administration and Engineering,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2009*

Ernie Widianty Rahardjo

Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division Head



Menjabat Sejak 1 Desember 2014
Served Since December 1st, 2014

Warga Negara Citizen: Indonesia

Usia Age: 47 Tahun Years Old

Domisili Domicile: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 Januari 2010
Joined MRT Jakarta: January 1st, 2010

Riwayat Pendidikan Education:
S2 Administrasi Bisnis, Universitas Teknologi Nanyang Singapura, 2009
*Master Degree of Business Administration,
Nanyang Technological University Singapore, 2009*

Arif Rahmat

Project Management for Railway System Division Head



Menjabat Sejak 15 Januari 2018
Served Since January 15th, 2018

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 51 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 8 Maret 2010
Joined MRT Jakarta March 8th, 2010

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 2018
Master's Degree in Civil Engineering, Trisakti University, 2018

Weni Maulina

Engineering Division Head



Menjabat Sejak 15 Januari 2018
Served Since January 15th, 2018

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 33 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 13 Agustus 2010
Joined MRT Jakarta August 13th, 2010

Riwayat Pendidikan *Education:*
S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 2009
Bachelor's Degree in Civil Engineering, Bandung Institute of Technology, 2009

Indra Gunawan

Project Management for Construction 1 Division Head



Menjabat Sejak 9 September 2019
Served Since September 9th, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 43 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 Oktober 2012
Joined MRT Jakarta October 1st, 2012

Riwayat Pendidikan *Education:*
S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional, 2002
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, National Institute of Technology, 2002

Tubagus Hikmatullah

Finance and Accounting Division Head



Menjabat Sejak 2 Januari 2019
Served Since January 2nd, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 48 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 September 2014
Joined MRT Jakarta September 1st, 2014

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Keuangan, Universitas Wollongong Australia, 1999
Master's Degree in Finance, University of Wollongong Australia, 1999

Rizki Shebubakar

Project Management for Construction 2 Division Head



Menjabat Sejak 9 September 2019
Served Since September 9th, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 32 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 17 November 2014
Joined MRT Jakarta November 17th, 2014

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 2017
Master's Degree in Management, University of Indonesia, 2017

Gunawan

Operation and Maintenance Facility Services Division Head



Menjabat Sejak 9 Juli 2019
Served Since July 9th, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 35 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 2 Februari 2015
Joined MRT Jakarta February 2nd, 2015

Riwayat Pendidikan *Education:*
S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, 2010
Bachelor's Degree in Civil Engineering, Diponegoro University, 2010

Yanto Yulianto

Information System and Technology Division Head



Menjabat Sejak 5 September 2020

Served Since September 5th, 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 43 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 17 Februari 2015

Joined MRT Jakarta February 17th, 2015

Riwayat Pendidikan *Education:*

S2 Teknik Sipil, Universitas Indonesia, 2011

Master's Degree in Civil Engineering, University of Indonesia, 2011

Nuzulul Iman

Legal Division Head



Menjabat Sejak 2 Maret 2020

Served Since March 2nd, 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 33 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta : 9 September 2016

Joined MRT Jakarta 1 September 9th, 2016

Riwayat Pendidikan *Education:*

S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2014

Master's Degree in Law, University of Indonesia, 2014

Andy Revy Rohadian

Internal Audit Division Head



Menjabat Sejak 6 Maret 2017

Served Since March 6th, 2017

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 54 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 6 Maret 2017

Joined MRT Jakarta March 6th, 2017

Riwayat Pendidikan *Education:*

D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1996

Diploma from the Indonesian State College of Accountancy, 1996

Muhamad Kamaluddin

Corporate Secretary Division Head



Menjabat Sejak 2 Januari 2019
Served Since January 2nd, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 46 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Depok, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 3 April 2017
Joined MRT Jakarta April 3rd, 2017

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Administrasi Bisnis, London Business School, 2008
Master's Degree in Business Administration, London Business School, 2008

Rifkiandi Darajatun

Project Management Office Division Head



Menjabat Sejak 2 Januari 2018
Served Since January 2nd, 2018

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 47 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 2 Januari 2018
Joined MRT Jakarta January 2nd, 2018

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung, 2020
Master's Degree of Business Administration, Bandung Institute of Technology, 2020

Rendy Primartantyo

Commercial and Retail Division Head



Menjabat Sejak 14 April 2019
Served Since April 14th, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 40 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 14 Januari 2019,
Joined MRT Jakarta January 14th, 2019

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya, 2012
Master's Degree in Management, Prasetya Mulya University, 2012

Stephen Wiguna

Transit-Oriented Development Division Head



Menjabat Sejak 31 Desember 2020
Served Since December 31st, 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 32 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 2 Juli 2019
Joined MRT Jakarta July 2nd, 2019

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Administrasi Bisnis, Universitas Wolverhampton, 2016
Master's Degree in Business Administration,
University of Wolverhampton, 2016

Nicodemus Winata

Business Expansion Division Head



Menjabat Sejak 19 Agustus 2019
Served Since: August 19th, 2019

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 37 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 19 Agustus 2019
Joined MRT Jakarta August 19th, 2019

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Manajemen Teknik, Universitas Northwestern Illinois, 2020
Master's Degree in Engineering Management,
Northwestern University Illinois, 2012

Syofya Ilham Ermayanti

Customer Engagement Division Head



Menjabat Sejak 10 Agustus 2020
Served Since August 10th, 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 45 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 10 Agustus 2020
Joined MRT Jakarta August 10th, 2020

Riwayat Pendidikan *Education:*
S2 Manajemen, Universitas Indonesia, 2008
Master's Degree in Management, University of Indonesia, 2008

Hari Supriyanto

Plt. General Affairs and Procurement Division Head



Menjabat Sejak 6 Oktober 2020

Served Since October 6th 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 48 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 September 2016

Joined MRT Jakarta September 1st, 2016

Riwayat Pendidikan *Education:*

S1 Akuntansi, STIE Swadaya Jakarta, 1997

Bachelor's Degree in Accounting, Swadaya College of Economics, 1997

Panji Arum Bismantoko

Plt. Railway Maintenance Division Head



Menjabat Sejak 17 Oktober - 31 Desember 2020

Served Since 17 October-31 December 2020

Warga Negara *Citizen:* Indonesia

Usia *Age:* 32 Tahun *Years Old*

Domisili *Domicile:* Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta 1 Februari 2016

Joined MRT Jakarta February 1st 2016

Riwayat Pendidikan *Education:*

S1 Teknik Mesin, Universitas Indonesia, 2011

Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, University of Indonesia, 2011

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Demographics and Competency Development

Tanpa PHK Di Masa Pandemi COVID-19

Zero Layoff during the COVID-19 Pandemic

Sejak kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia diumumkan, Perseroan mengambil beberapa langkah sigap yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran yang disahkan Direksi guna mengurangi mobilitas karyawan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kerja, sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *work form home* (WFH) terhitung sejak 15 Maret 2020 dengan batas maksimal 20% karyawan yang dapat tetap bekerja di kantor dengan atas dasar urgensi pekerjaan.
2. Perseroan melakukan langkah deteksi dini penularan dengan mengontrol kondisi kesehatan karyawan dan keluarga secara rutin setiap minggu melalui *e-form*. Dari *e-form* tersebut terkumpul informasi terkait pencegahan, seperti kondisi kesehatan karyawan 14 hari terakhir beserta keluarga, orang secepat, orang yang dikunjungi, konfirmasi kontak dengan pasien positif COVID-19 serta historis mobilitas karyawan. Jika mendapati dari hasil *e-form* tersebut karyawan masuk kategori suspek, maka segera ditindaklanjuti dengan protokol. Selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut dengan rumah sakit yang menjadi mitra Perseroan.
3. Penerapan pembatasan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pembatasan berpergian ke luar kota untuk seluruh karyawan saat cuti atau libur kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga karyawan untuk tertular atau menjadi pembawa virus dari daerah yang dikunjungi.
5. Untuk karyawan lapangan bertugas sebagaimana biasa namun menyesuaikan dengan pembatasan operasi dari Dinas Perhubungan dan kapasitas maksimum karyawan pada satu *shift*/ruangan.

Since the first positive case of COVID-19 in Indonesia was announced, the Corporation takes various quick efforts by issuing Circular Letter ratified by the Board of Direction in reducing the mobility of the employees to prevent COVID-19 prevention at the workplace as follows:

1. *Implementation of work from home (WFH) policy starting March 15, 2020 with the limitation of 20% of employees at maximal to work at the office due to job urgency.*
2. *The Corporation carries out early detection of transmission by controlling employees' health condition as well as their family every week through an e-form. The e-form collects information concerning the prevention, such as the health condition of the employees during the last 14 days as well as their family members, housemates, persons visited, confirmation of contact with patients of COVID-19, and history of mobility. If an employee is considered to be a suspect based on the e-form, it is followed up by implementing protocols. Then, further check-up is carried out by the hospital as a partner of the Corporation.*
3. *Limitation of domestic and overseas business travels.*
4. *Limitation of out-of-town travel for all employees during leave or holidays. It prevents the employees to be exposed to or exposing the virus from the visited area.*
5. *Site employees work as usual and implement operational adjusting following the Department of Transportation and maximum employee capacity in a shift/room.*

Selama periode pelaporan, Perseroan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, meski dihadapkan pada pandemi COVID-19. Perseroan menerapkan kebijakan proteksi karyawan, sehingga sampai dengan akhir periode pelaporan tidak mengurangi karyawan. Pekerjaan MRT Jakarta Fase 2A yang dimulai pada pertengahan tahun 2020, membuka lapangan kerja bagi 356 pekerja di Perseroan kontraktor pelaksana proyek. Perseroan juga tetap melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi, meski dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dan berdasarkan skala prioritas.

During the reporting period, the Corporation did not terminate the employment of any employee despite the ongoing COVID-19 pandemic. The Corporation implements an employee protection policy, resulting in zero layoffs as of the end of the reporting period. Phase 2A MRT Jakarta construction that commenced in mid-2020 provided job opportunity for 356 workers of the contractor that carries out the project. The Corporation implements various competency development as well, by putting forward efficiency and priority.

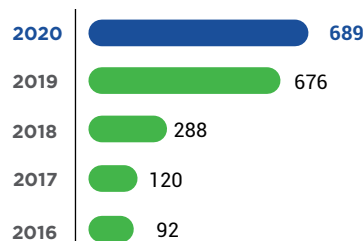
Demografi Karyawan

Employee Demographics

Jumlah karyawan Perseroan per 31 Desember 2020 mencapai 689 orang. Jumlah tersebut bertambah dibanding tahun 2019 sebanyak 676 orang, sesuai dengan rencana pemenuhan karyawan yang telah disusun Perseroan.

The number of employees of the Corporation as of December 31, 2020 reached 689 employees. The amount increased compared to that of 2019 at 676 employees, in line with the employee fulfilment plan as developed by the Corporation.

Pergerakan Jumlah Karyawan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020
Growth of Total employees in the Last 5 (Five) Years 2016-2020



Demografi Karyawan Berdasarkan Gender

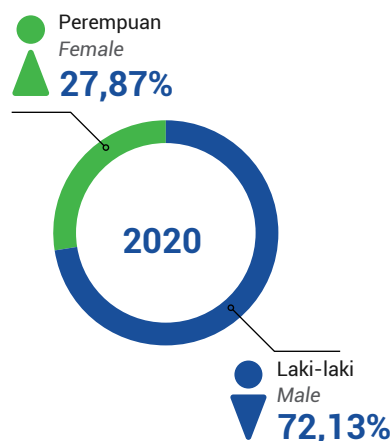
Berdasarkan gender, jumlah karyawan laki-laki pada periode pelaporan mencapai 497 orang atau 72,13% dari total karyawan. Jumlah karyawan perempuan pada periode pelaporan sebanyak 192 orang atau 27,87% dari total karyawan. Proporsi karyawan perempuan pada periode pelaporan bertambah 7 orang atau 3,78% dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan MRT Jakarta.

Employee Demographics by Gender

Based on gender, the number of male employees reached 497 employees or 72.13% of the total employees. As for the female employees, the amount reached 192 employees or 27.87% of the total employees. The proportion of female employees during the reporting period increased by 7 employees or 3.78% compared to that of 2019. It signifies gender mainstreaming effort within the Corporation.

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender
Employee Demographic by Gender

| Gender | 2020 | | 2019 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|
| | Jumlah Total | % | Jumlah Total | % | |
| Laki-laki Male | 497 | 72,13 | 491 | 72,63 | 1,22 |
| Perempuan Female | 192 | 27,87 | 185 | 27,37 | 3,78 |
| Jumlah Total | 689 | 100,00 | 676 | 100,00 | 1,92 |



Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status kepegawaian karyawan Perseroan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap adalah karyawan yang telah diangkat secara tetap melalui mekanisme yang berlaku secara internal di lingkup Perseroan. Karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap adalah subjek hukum perorangan yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga menggunakan karyawan *outsourcing* yang mengisi beberapa fungsi, yaitu *cleaning service*, *driver*, dan *messenger*. Jumlah karyawan tetap pada tahun 2020 bertambah 90 orang, seiring adanya karyawan yang sudah melewati masa percobaan dan kemudian diangkat sebagai karyawan tetap.

Employee Demographics by Employment Status

The employment status of the Corporation is categorised in 2 (two) categories, i.e. permanent and contract employee. A permanent employee is appointed permanently through an internal mechanism within the Corporation. A contract employee or non-permanent employee is a legal person who binds themselves to an employment relationship outlined in a Temporary Work Agreement with the Company following the prevailing laws and regulations. The Corporation also outsources employees to fill in certain functions such as cleaning service, drivers, and messengers. The total permanent employees in 2020 increased by 90 employees, due to the employees who had passed the probation period and appointed as permanent employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender
Employee Demographic by Employment Status and Gender

| Status Kepegawaian Employment Status | 2020 | | | 2019 | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | |
| Tetap Permanent | 442 | 175 | 617 | 379 | 148 | 527 | 17,08 |
| Kontrak Contract | 55 | 17 | 72 | 112 | 37 | 149 | (51,68) |
| Jumlah Total | 497 | 192 | 689 | 491 | 185 | 676 | 1,92 |

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Berdasarkan level organisasi, sebagian besar karyawan merupakan staf, yaitu sebanyak 268 orang atau 38,90% dan level spesialis sebanyak 229 orang atau 33,24%. Penambahan pekerja terbanyak pada periode pelaporan adalah untuk level spesialis, sebanyak 37 orang atau 19,27%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin luasnya bidang-bidang pekerjaan MRT Jakarta yang membutuhkan dukungan analisa yang dilakukan oleh spesialis.

Employee Demographics by Organisation Level

Based on the organisation level, most employees are staffs, consisting of 268 employees or 38.90% and specialists of 229 employees or 33.24%. The biggest increase of employees during the reporting period occurred for specialists that increased by 37 employees or 19.27%. This is because of the growth in the scope of work at MRT Jakarta which requires analytical support from specialists.

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi dan Gender

Employee Demographic by Organization Level and Gender

| Level Organisasi Organization Level | 2020 | | | 2019 | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|---|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | |
| Kepala Divisi Division Head | 15 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | (20,83) |
| Kepala Departemen Department Head | 47 | 17 | 64 | 50 | 11 | 61 | 4,92 |
| Kepala Bidang Section Head | 91 | 18 | 109 | 86 | 17 | 103 | 5,83 |
| Spesialis Specialist | 139 | 90 | 229 | 110 | 82 | 192 | 19,27 |
| Staf Staff | 205 | 63 | 268 | 226 | 70 | 296 | (9,46) |
| Jumlah Total | 497 | 192 | 689 | 491 | 185 | 676 | 1,92 |

Demografi Karyawan Berdasarkan Direktorat

Berdasarkan Direktorat, jumlah karyawan terbanyak hingga akhir periode pelaporan berada di Direktorat Operasi dan Pemeliharaan, karena kebutuhan akan sumber daya yang besar untuk menjalankan operasi perkeretaan dan pemeliharaan. Pertambahan terbanyak jumlah karyawan pada periode pelaporan ada pada Direktorat Utama sebanyak 5 orang atau 10,42%. Hal ini dipengaruhi kompleksitas pekerjaan yang bertambah dalam upaya menjaga kepatuhan korporasi terhadap regulasi yang ada.

Employee Demographics by Directorate

On the Directorate level, as of the end of the reporting period, most employees are assigned to the Operation and Maintenance Directorate because of the need for a great number of human resources to carry out operation and maintenance. The most significant increase of employees during the reporting period is found in the Main Directorate with 5 (five) new employees or 10.42%. It is caused by the increase in job complexity in ensuring the Corporation's compliance and adherence to existing regulations.

Demografi Karyawan Berdasarkan Direktorat

Employee Demographic by Directorate

| Direktorat Directorate | 2020 | | | | 2019 | | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------|--------------|------------------|-----------------|-------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | |
| Utama Main | 27 | 26 | 53 | 7,69 | 25 | 23 | 48 | 7,10 | 10,42 |
| Konstruksi Construction | 47 | 28 | 75 | 10,89 | 48 | 27 | 75 | 11,09 | 0,00 |

| Direktorat Directorate | 2020 | | | | 2019 | | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|--|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------|--------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | |
| Operasi dan Pemeliharaan <i>Operations and Maintenance</i> | 373 | 101 | 474 | 68,80 | 361 | 102 | 463 | 68,49 | 2,38 |
| Pengembangan Bisnis <i>Business Development</i> | 8 | 12 | 20 | 2,90 | 10 | 9 | 19 | 2,81 | 5,26 |
| Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporation Management</i> | 42 | 25 | 67 | 9,72 | 47 | 24 | 71 | 10,50 | (5,63) |
| Jumlah <i>Total</i> | 497 | 192 | 689 | 100,00 | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 1,92 |

Demografi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja/ Penempatan

Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah terbanyak karyawan bertugas di *worksites*, sebanyak 425 orang atau 61,68% dari total karyawan. Hal ini dipengaruhi oleh ruang lingkup pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang besar.

Employee Demographics by Work Location/Placement

As of the end of the reporting period, most employees are placed in *worksites* with 425 employees or 61.68% of the total employees. It is due to the expansion of operation and maintenance scope of work.

Demografi Karyawan Berdasarkan Lokasi Pekerjaan/Penempatan dan Gender *Employee Demographic by Work Location/Placement and Gender*

| Lokasi Location | 2020 | | | | 2019 | | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------|--------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | |
| Kantor Pusat <i>Head Office</i> | 154 | 110 | 264 | 38,32 | 174 | 109 | 283 | 41,86 | (6,71) |
| Worksite | 343 | 82 | 425 | 61,68 | 317 | 76 | 393 | 58,14 | 8,14 |
| Jumlah <i>Total</i> | 497 | 192 | 689 | 100,00 | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 1,92 |



Gedung Administrasi Depo
Depo Administration Building

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah terbanyak karyawan Perseroan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 334 orang atau 48,48%, dan Diploma 3 sebanyak 216 orang atau 31,35%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan minimal level pendidikan.

Employee Demographics by Education Level

Based on the education level, most employees of the Corporation hold bachelor's degree, consisting of 334 employees or 48.48%, and associate degree, consisting of 216 employees or 31.35%. Such a condition is caused by the minimum required level of education.

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan*Employee Demographic by Education Level*

| Tingkat Pendidikan Education Level | 2020 | | | | 2019 | | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|---|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------|--------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | |
| S2 Master's Degree | 57 | 29 | 86 | 12,48 | 61 | 24 | 85 | 12,57 | 1,18 |
| S1 Bachelor's Degree | 231 | 103 | 334 | 48,48 | 216 | 98 | 314 | 46,45 | 6,37 |
| D3 Associate Degree | 157 | 59 | 216 | 31,35 | 170 | 62 | 232 | 34,32 | (6,90) |
| SMA/SMK Senior High School/ Vocational High School | 52 | 1 | 53 | 7,69 | 44 | 1 | 45 | 6,66 | 17,78 |
| Jumlah Total | 497 | 192 | 689 | 100,00 | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 1,92 |

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Berdasarkan rentang usia, jumlah terbanyak karyawan Perseroan pada periode pelaporan, berada di kelompok usia 21-30 tahun sebanyak 447 orang, atau 64,88% dari total karyawan. Kondisi ini dipengaruhi rekrutmen MRT yang kebanyakan berasal dari kaum muda.

Employee Demographics by Age Range

According to the age range, during the reporting period, most employees of the Corporation belong to the group of 21-30 years old, consisting of 447 employees, or 64.88% of the total employees. This is because MRT recruited candidates mostly from the millennial generation.

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia*Employee Demographic by Age Range*

| Rentang Usia Age range | 2020 | | | | 2019 | | | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%) |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----------------|--------|--|
| | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | Pria Male | Wanita Female | Jumlah Total | % | |
| >= 51 Tahun ≥ 51 years old | 16 | 0 | 16 | 2,32 | 26 | 0 | 26 | 3,85 | (38,46) |
| 41-50 Tahun 41-50 years old | 40 | 6 | 46 | 6,68 | 34 | 4 | 38 | 5,62 | 21,05 |
| 31-40 Tahun 31-40 years old | 143 | 46 | 189 | 27,43 | 121 | 35 | 156 | 23,08 | 21,15 |
| 21-30 Tahun 21-30 years old | 306 | 141 | 447 | 64,88 | 310 | 146 | 456 | 67,46 | (1,97) |
| Jumlah Total | 497 | 192 | 689 | 100,00 | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 1,92 |

Pengembangan Kompetensi Karyawan *Employee Competency Development*

Perseroan berkomitmen turut menciptakan nilai tambah terhadap kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan kompetensi SDM Perseroan tidak hanya berorientasi pada optimalisasi SDM sebagai penunjang usaha, namun juga memberikan dampak positif terhadap perilaku SDM Perseroan, baik sebagai karyawan Perseroan maupun sebagai anggota masyarakat.

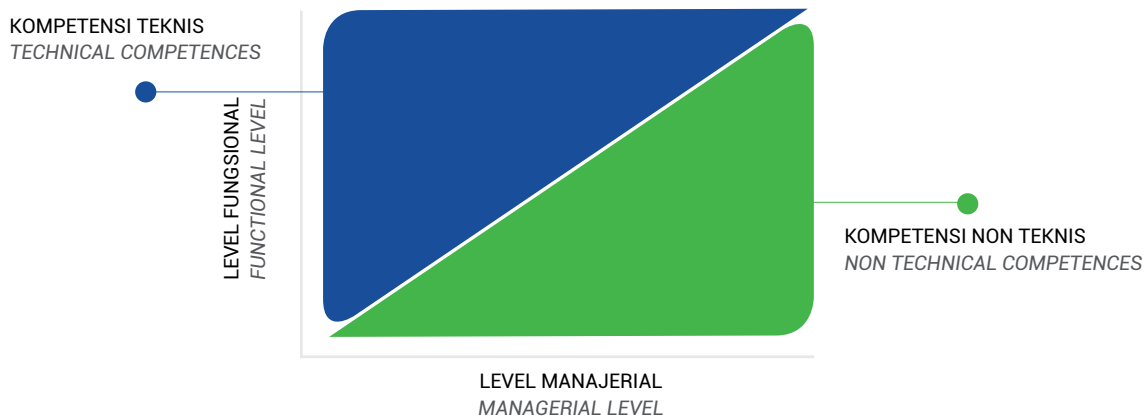
Pengembangan karyawan Perseroan didasarkan pada dua jenis kompetensi, yakni kompetensi teknis dan non-teknis. Kedua jenis kompetensi tersebut diterapkan untuk level fungsional maupun manajerial. Untuk level manajerial, semakin tinggi suatu jabatan, maka pengembangan kompetensi teknis akan lebih sedikit dari program pengembangan non-teknis. Sementara pada level fungsional, semakin tinggi level jabatannya, maka pengembangan kompetensi teknis akan semakin besar.

The Corporation is committed to taking part in creating added value for the competency, capacity, and capability of the Human Capital (HC). The development of the Corporation's HC competencies does not merely aim to optimise the HC as a business support function, but also to give positive impacts on the behaviour of the Corporation's HC, as employees of the Corporation and as members of the community.

Employee competency development in the Corporation is carried out for two types of competencies, namely technical competencies and non-technical competencies. Both competencies are applied at the functional and managerial level. At the managerial level, those in higher position would have fewer technical competency development program than those in a lower position. Meanwhile at the functional level, the higher the level of the position, the greater the development of technical competence.

PRINSIP DASAR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MRT JAKARTA

Basic Principle For The Development of MRT Jakarta HC Competency



Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 pada periode pelaporan, Perseroan melakukan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan maupun metode pengembangan kompetensi sejalan dengan kebijakan efisiensi. Realisasi biaya pengembangan kompetensi pada tahun 2020 mencapai Rp3.504.970.028 atau 76,56% dari pagu anggaran sebesar Rp4.578.028.979. Realisasi biaya pengembangan kompetensi pada tahun 2020 berkurang Rp7.828.058.177 atau 69,07% dibanding tahun 2019 sebesar Rp11.333.028.205. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan efisiensi Perseroan menghadapi pandemi COVID-19. PT MRT Jakarta (Perseroda) berupaya tetap melaksanakan pengembangan seluruh karyawan

Concerning the ongoing condition of the COVID-19 pandemic during the reporting period, the Corporation tailored the activities in terms of execution and method of competency development to be in line with efficiency policy. The realisation of the competency development budget in 2020 reached IDR3,504,970,028 or 76.56% of the ceiling budget of IDR4,578,028,979. The realisation of the competency development budget in 2020 decreased by IDR7,828,058,177 or 69.07% compared to that of 2019 at IDR11,333,028,205. It is partly due to the enactment of efficiency policy by the Corporation in response to the COVID-19 pandemic. The Corporation strives to implement a development program for all employees by

dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan optimalisasi penggunaan *Learning Management System Success factor MRT Jakarta*. Pengembangan kompetensi karyawan juga dilakukan melalui mekanisme *non-training*, seperti melalui pelaksanaan *knowledge sharing reguler* di unit-unit kerja, termasuk *knowledge sharing* di level korporat dengan nama *Café Talk*. *Café Talk* menjadi wadah dimana seluruh karyawan dapat memperoleh wawasan dari pihak internal maupun eksternal dengan suasana informal.

Pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara karyawan juga terjadi melalui wadah *Community of Practice (CoP)* yang mulai diinisiasi di Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. CoP yang telah dibentuk dan berkegiatan di tahun 2020 adalah *CoP Station Manager* dan *CoP Train Driver*, dengan topik bahasan antara lain manajemen kru dan kasus-kasus khusus lalu lintas kereta, penanganan stasiun di kala huru-hara, dan lain-lain.

Karyawan juga difasilitasi dengan sebuah sistem *Knowledge Management* bernama *Kinetic (Knowledge, Information, and Education Center)* yang menjadi *platform* bagi karyawan untuk mencari, berdiskusi, dan berkontribusi pengetahuan dalam bentuk dokumen *knowledge asset*, artikel, *lesson learned*, dan dokumen referensi lainnya. Di akhir tahun 2020, telah tersedia 734 aset pengetahuan yang berasal dari berbagai unit kerja, yang dapat diakses oleh seluruh karyawan MRT Jakarta untuk menambah pengetahuan dan mendukung kinerja.

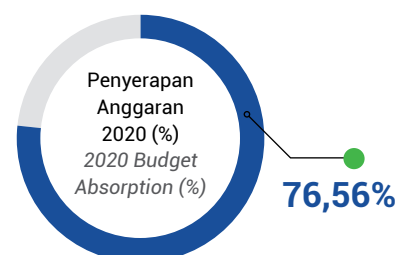
optimising internal resources and utilisation of Learning Management System Success factor MRT Jakarta. Employee competency development is also carried out through non-training mechanisms, such as through regular knowledge sharing in work units, including knowledge sharing at the corporate level known as Café Talk. Café Talk is a place for the employees to gain insights from internal and external parties in an informal setting.

Knowledge and experience sharing among the employees are also carried out through the Community of Practice (CoP) program initiated at the Directorate of Operations and Maintenance. CoP programs that have been established and implemented in 2020 include Station Manager CoP and Train Driver CoP, with topics for discussion ranging from crew management and special cases of railway traffic to station handling amidst riots, as well as other topics.

The employees are facilitated with a Knowledge Management System known as Kinetic (Knowledge, Information, and Education Center) as a platform for the employees to discover, discuss, and contribute knowledge in the form of knowledge asset documents, articles, lessons learned, and other referential documents. As of the end of 2020, 734 knowledge assets are available from numerous work units that are accessible for all employees of the Corporation to improve their knowledge and support the performance.

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Budget

| Realisasi 2020 (Rp) <i>2020 Realisation (IDR)</i> | Realisasi 2019 (Rp) <i>2019 Realisation (IDR)</i> | Anggaran 2020 (Rp) <i>2020 Budget (IDR)</i> | Peningkatan (Penurunan) 2020-2019 2020-2019 Increase (Decrease) (%) |
|--|--|--|---|
| 3.504.970.028 | 11.333.028.205 | 4.578.028.979 | 69,07 |



Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Secara keseluruhan, pada tahun 2020 ada 5.592 karyawan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, terdiri dari 4.027 kepesertaan karyawan pria atau 72,01%, dan 1.565 kepesertaan karyawan perempuan atau 27,99%.

The Company provides equal opportunity for all employees to participate in the competency development programme. Overall, in 2020, there were 5,592 employees participated in the competency development programme, consisting of 4,027 male employees or 72.01% and 1,565 female employees or 27.99%.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender
Competency Development by Position Level and Gender Equality

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tujuan <i>Objectives</i> | Jumlah Peserta Berdasarkan Gender <i>Number of Participants by Gender</i> | | | Jumlah Peserta Berdasarkan Level Jabatan <i>Number of Participants based on Position Level</i> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | Pria <i>Male</i> | Wanita <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> | |
| Soft Skill Training | <p>Untuk meningkatkan kompetensi yang mencakup kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia, nilai-nilai perusahaan, serta kemampuan untuk membangun interaksi dengan orang lain.</p> <p><i>To improve competencies covering the ability of work process management, interpersonal relationship, corporate values, and skill to interact with other people.</i></p> | 567 | 213 | 780 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi/ Senior Advisor: 37 Peserta; 2. Kepala Departemen / Advisor/ Principal Engineer: 81 Peserta; 3. Kepala Bidang (Section Head): 116 Peserta; 4. Engineer/ Spesialist: 250 Peserta; 5. Staf: 296 Peserta. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Division Head/Senior Advisor: 37 Participants;</i> 2. <i>Department Head/ Advisor/ Principal Engineer: 81 Participants;</i> 3. <i>Section Head: 116 Participants;</i> 4. <i>Engineer/ Specialist: 250 Participants;</i> 5. <i>Staff: 296 Participants.</i> |
| Hard/Technical Skill Training | <p>Untuk meningkatkan kompetensi yang mencakup kemampuan dan keterampilan teknis yang dimiliki karyawan sesuai dengan bidang ilmu dan bidang pekerjaan yang digelutinya, misalnya bidang keuangan, <i>marketing, engineering</i>, teknologi informasi, legal, akuntansi, dan sebagainya.</p> <p><i>To improve competencies covering technical competencies of the employees following their knowledge background and field of work, such as finance, marketing, engineering, information technology, legal, accounting, and others.</i></p> | 3.460 | 1.352 | 4.812 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi/ Senior Advisor: 169 Peserta; 2. Kepala Departemen/ Advisor/ Principal Engineer: 523 Peserta; 3. Kepala Bidang (Section Head): 942 Peserta; 4. Engineer/ Spesialist: 1.246 Peserta; 5. Staf: 1.932 Peserta. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Division Head/Senior Advisor: 169 Participants;</i> 2. <i>Department Head / Advisor / Principal Engineer: 523 Participants;</i> 3. <i>Section Head: 942 Participants;</i> 4. <i>Engineer / Specialist: 1,246 Participants;</i> 5. <i>Staff: 1,932 Participants.</i> |

Kajian Transformasi BUMD ROE Transformation Studies

Pada tahun periode pelaporan di tanggal 3 April 2020, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyepakati kerja sama dengan 12 BUMD DKI Jakarta yang tergabung dalam Tim Kerja Kajian Transformasi BUMD. Para pihak menyepakati ruang lingkup berdasarkan perjanjian kerja sama ini sebagai berikut:

- a. Pengadaan jasa konsultasi Kajian Transformasi BUMD;
- b. Pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa konsultasi Kajian Transformasi BUMD; dan
- c. Pengimplementasian hasil Kajian Transformasi BUMD.

Dalam perjanjian tersebut, seluruh pihak bersepakat menunjuk PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai koordinator para pihak dalam pelaksanaan ruang lingkup perjanjian tersebut. Dalam implementasi pekerjaan Kajian Transformasi BUMD, Perseroan menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh yang mulai dari proses Pengadaan Jasa Konsultasi Transformasi BUMD, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan Terpilih, hingga pelaporan hasil pekerjaan kepada seluruh BUMD yang terlibat dan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kajian Transformasi BUMD memiliki ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari:

- 1) Kajian Remunerasi Eksekutif BUMD;
- 2) Kajian Sistem Manajemen Kinerja; dan
- 3) Kajian Sistem Manajemen Talenta.

Pada tanggal 28 Mei 2020, ditandatangani kontrak dengan konsultan terpilih, yaitu PT Hay Group dan kajian berlangsung dari tanggal 1 Juni 2020 sampai 30 Desember 2020. Seluruh hasil kajian tersebut tidak hanya dilaporkan kepada seluruh BUMD yang terlibat dalam kajian ini namun juga dilaporkan kepada Gubernur dan BP BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian menjadi dasar penetapan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di lingkungan BUMD DKI Jakarta. Secara khusus terkait dengan hasil Kajian Sistem Manajemen Talenta, dampak yang dapat ditindaklanjuti di internal Perseroan yaitu menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi karyawan pada level Kepala Divisi yang semakin luas karena tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang berlaku di internal perseroan, melainkan juga pemenuhan kompetensi yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan BUMD DKI Jakarta. Dengan demikian, melalui hasil kajian tersebut PT MRT Jakarta (Perseroda) juga berkesempatan untuk melakukan pendataan kesiapan talenta di internal perseroan berbanding dengan tuntutan kebutuhan di lingkungan BUMD DKI Jakarta.

During the reporting period, on April 3, 2020, the Corporation signed an agreement with 12 ROEs in DKI Jakarta in ROE Transformation Study Work Team. The parties agree on the scope of the agreement as follows:

- a. Procurement of consultancy service for ROE Transformation Study (Kajian Transformasi BUMD);*
- b. Implementation of the agreement on procurement of consultancy service for ROE Transformation Study (Kajian Transformasi BUMD); and*
- c. Implementation of the results of ROE Transformation Study (Kajian Transformasi BUMD).*

In the agreement, the parties agree to appoint the Corporation as a coordinator of the parties in carrying out the scope of the agreement. To implement the ROE Transformation Study (Kajian Transformasi BUMD) the Corporation executes the responsibility exhaustively, from the Procurement process of ROE Transformation Consultancy Service, monitoring and evaluation of the work by Appointed Consultant, and reporting of the work results to all parties involved and the Government of DKI Jakarta. The ROE Transformation Study (Kajian Transformasi BUMD) consists of the scope as follows:

- 1) ROE Executive Remuneration Study;*
- 2) Performance Management system Study; and*
- 3) Talent Management System Study.*

On May 28, 2020, a contract was signed with the appointed consultant, PT Hay Group, and the study was to be executed starting June 1, 2020 until December 30, 2020. All results of the study are not only reported to the ROEs involved in the study, but it was also reported to the Governor and BP BUMD of the Government of DKI Jakarta province to be a basis of decision-making concerning the scope of work at ROEs of DKI Jakarta. Concerning the results of the Talent Management System study, the impacts to be followed up at the Corporation is the basis of employee competency development for Division Head that is getting wider as it does not only fulfil the internal competency requirement, but also the competency fulfilment for ROEs of DKI Jakarta. Therefore, through the study, the Corporation has the opportunity to compare talent readiness in the Corporation with the requirement for ROEs of DKI Jakarta.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERSEROAN, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

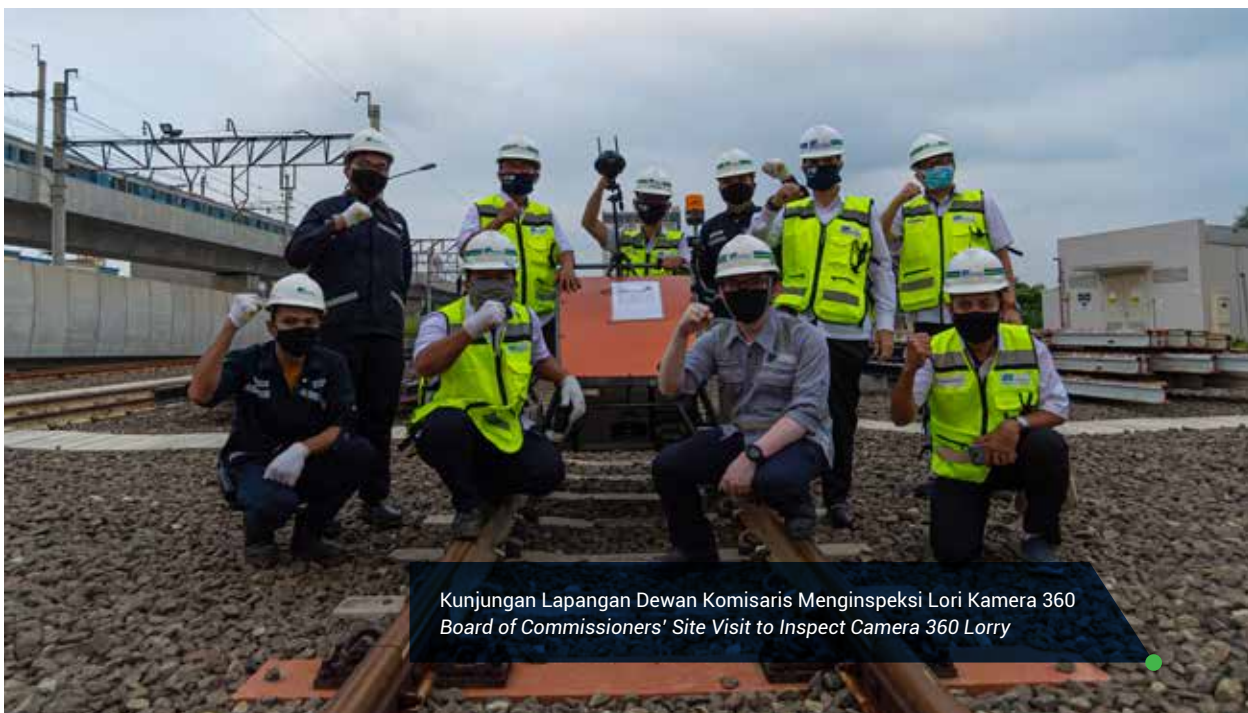
Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management

Selama periode pelaporan, Perseroan menyertakan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perseroan, Unit Kerja Internal Audit, Corporate Strategy, dan Risk Management & QSSHE Assurance dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, sehingga dapat mendukung dan memperkuat Perseroan mencapai perfoma optimal. Sejalan penerapan kebijakan efisiensi akibat pandemi COVID-19, Perseroan menerapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.

Kesertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan, diikuti tanggung jawab mereka yang menjadi peserta untuk melakukan kegiatan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Dengan demikian, pengetahuan yang didapat dapat disebarluaskan di internal Perseroan.

During the reporting period, the Corporation includes the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Strategy, and Risk Management & QSSHE Assurance in education and/or training program. It aims to develop the competency and capability to support and strengthen the Corporation in achieving optimal performance. In compliance with the implementation of efficiency policy due to the COVID-19 pandemic, the Company implements prioritisation of the execution of education and/or training program.

Participation in the education and/or training requires the participant to conduct knowledge sharing afterwards. Therefore, the lesson learned during the training can be disseminated internally.



Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris Menginspeksi Lori Kamera 360
Board of Commissioners' Site Visit to Inspect Camera 360 Lorry

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris
Education and Training of the Board of Commissioners

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|---|--|--|---|--|
| Muhammad Syaugi Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Rukijo Komisaris <i>Commissioner</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Zulfikri Komisaris <i>Commissioner</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Mukhtasor Komisaris <i>Commissioner</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Adnan Pandu Praja Komisaris <i>Commissioner</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Rendi Alhial Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary of the Board of Commissioners</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/Online, 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Education and/or Training of the Board of Directors

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan/ atau Pelatihan Type of Education and/or Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Topic of Education and Training | Tempat dan Tanggal Location and Date | Penyelenggara Organiser |
|---|---|---|---|---|
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar COVID-19: Opportunities for Resilient Recovery | Daring/Online, 07 Mei/May 2020 | UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Studium Generale: Antisipasi dan Adaptasi Dunia Usaha Transportasi dalam Kenormalan Baru Anticipation and Adaptation of Transportation Business Sector in New Normal | Daring/Online, 16 Juni/June 2020 | Binus University |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar UITP Assembly Online | Daring/Online, 24 Juni/July 2020 | UITP |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar Center for Policy & Public Management, SBM ITB "Mitigating the COVID-19 Infection Risk at MRT Jakarta: A System Approach" | Daring/Online, 01 Juli/July 2020 | SBM ITB |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar Memanjakan Pengguna Angkutan Publik Webinar: Satisfying Public Transportation Passengers | Daring/Online, 10 Juli/July 2020 | ITS Indonesia - PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar 75 Tahun Indonesia Merdeka: 4 Generasi Memaknai Kemerdekaan Webinar for 75 Years of Independence of Indonesia: The Meaning of Independence for 4 Generations | Daring/Online, 19 Agustus/August 2020 | Sekolah Kebijakan Publik : Insititut Harkat Negeri |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar Nasional : Transportasi Merajut Keberagaman (SDM Transportasi) National Webinar: Transportation to Support Diversity (Transportation HC) | Daring/Online, 27 Agustus/August 2020 | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar Peran Leadership di Tengah Krisis Webinar: Roles of Leadership Amidst Crisis | Daring/Online, 12 September 2020 | SBM ITB |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Webinar CMA Professional Forum: Investing in Public Transportation, Promoting Business Beyond Normal | Daring/Online, 12 September 2020 | ICMA Australia - Indonesia |
| William P. Sabandar Direktur Utama President Director | Technical Skill | Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Metode dan Tools Asesmen serta Pemantauan Proyek Strategis Focus Group Discussion (FGD) on Deep-Dive on Assessment Methods and Tools and Strategic Project Monitoring | Daring/Online, 15 September 2020 | Bank Indonesia |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/ atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|--|--|--|---|--|
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar <i>Business Ethics, Law and Sustainability</i> | Daring/ <i>Online</i> , 10 Oktober/ <i>October</i> 2020 | ITB |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT/TOD) <i>Webinar Management of Transit-Oriented Development</i> | Daring/ <i>Online</i> , 15 Oktober/ <i>October</i> 2020 | PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>International Webinar: Rebuilding Cities Post COVID-19</i> | Daring/ <i>Online</i> , 24 Oktober/ <i>October</i> 2020 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Memaknai Sumpah Pemuda: Peran Penting Energi Pemuda, Tingkatkan Produktivitas <i>Webinar on Youth Pledge Commemoration: Critical Role of Youth Energy, Improve Productivity</i> | Daring/ <i>Online</i> , 27 Oktober/ <i>October</i> 2020 | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar <i>Creative Regulation</i> dalam Rangka Mencari Terobosan <i>Land Consolidation: Studi Kasus Kawasan Cideng - Petojo</i> <i>Webinar on Creative Regulation in Finding Solutions for Land Consolidation: Case Study of Cideng – Petojo Area</i> | Daring/ <i>Online</i> , 06 November 2020 | PT Independent Research and Advisory Indonesia |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Peluncuran Buku Digital dan Diskusi "Menuju Ratangga, Kereta Kota Kita" <i>Webinar on Digital Book Launching and Discussion "To Ratangga, the Train of Our City"</i> | Daring/ <i>Online</i> , 10 November 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar <i>Business Opportunities During COVID-19</i> | Daring/ <i>Online</i> , 21 November 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar GRC Series 2020: Tantangan dan Peluang Penerapan <i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi <i>Webinar GRC Series 2020: Challenges and Opportunities in Implementing Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Corporate Transformation in the Era of Disruption</i> | Daring/ <i>Online</i> , 03 Desember/ <i>December</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Panel Diskusi: <i>The Future of Transportation Ecosystem in Indonesia (MRTJ Star Track Incubation Program)</i> <i>Discussion Panel: The Future of Transportation Ecosystem in Indonesia (MRTJ Star Track Incubation Program)</i> | Daring/ <i>Online</i> , 19 Desember/ <i>December</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/ atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|--|--|---|--|--|
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Dialog Interaktif Diaspora - Kisah Sukses Diaspora Yang Kembali : Contoh Konkrit <i>Brain Gain, Bukan Brain Drain</i> <i>Interactive Dialog of Diaspora – Success Story of Returning Diaspora: Concrete Examples of Brain Gain instead of Brain Drain</i> | Daring/ <i>Online</i> , 08 Agustus/ <i>August</i> 2020 | Diaspora Indonesia |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Webinar Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Jalan dan Perkeretaapian <i>Webinar Business Recovery Strategy for Road and Railway Transportation</i> | Daring/ <i>Online</i> , 21 September 2020 | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Webinar Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT/TOD) <i>Webinar: Management of Transit Oriented Development (TOD)</i> | Daring/ <i>Online</i> , 15 Oktober/ <i>October</i> 2020 | PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Kupas Tuntas Konstruksi Fase 2 MRT Jakarta - Episode 1: MRT Jakarta Bakal Sampai Ancol? <i>Deep-Dive on Phase 2 MRT Jakarta Construction – Episode 1: MRT Jakarta to Reach Ancol?</i> | Daring/ <i>Online</i> , 16 Oktober/ <i>October</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Liveable Cities Interactive Webinar Series #2 : Mobility for All | Daring/ <i>Online</i> , 23 Oktober/ <i>October</i> 2020 | Ministry of Tourism and Creative Economy |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Webinar Pelestarian Cagar Budaya (Selama Konstruksi MRT Jakarta Fase 2) <i>Webinar Conservation of Cultural Heritage (During Phase 2 MRT Jakarta Construction)</i> | Daring/ <i>Online</i> , 05 November 2020 | Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Webinar GRC Series 2020: Tantangan dan Peluang Penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi <i>Webinar GRC Series 2020: Challenges and Opportunities in Implementing Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Corporate Transformation in the Era of Disruption</i> | Daring/ <i>Online</i> , 03 – 04 Desember/ <i>December</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi/ <i>Construction</i> Director | <i>Technical Skill</i> | Panel Diskusi : The Future of Transportation Ecosystem in Indonesia (MRTJ Star Track Incubation Program) <i>Discussion Panel: The Future of Transportation Ecosystem in Indonesia (MRTJ Star Track Incubation Program)</i> | Daring/ <i>Online</i> , 19 Desember/ <i>December</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/ atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|---|---|--|--|---|
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar GO D3KN (Gaul Online bersama DK3N) : Bekerja Aman dan Produktif dengan K3 di Sektor Transportasi Publik <i>Webinar GO D3KN (Online Gathering with DK3N): Safe and Productive Work by OSH in Public Transportation Sector</i> | Daring/ <i>Online</i> , 16 Juli/ <i>July</i> 2020 | D3KN |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Kolaborasi Adaptasi Kebiasaan Baru dan Upaya Pengoperasian MRT Agar Tetap Aman dan Sehat <i>Collaboration of New Normal and Efforts for Safe and Healthy MRT Operations</i> | Daring/ <i>Online</i> , 06 Agustus/ <i>August</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Nasional - Adaptasi Kebiasaan Baru Bertransportasi Menuju Indonesia Maju (Perkeretapiannya Menuju Indonesia Maju) <i>National Webinar – New Normal in Transportation for Developed Indonesia (Railway for Developed Indonesia)</i> | Daring/ <i>Online</i> , 11 Agustus/ <i>August</i> 2020 | MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Inventarisasi Kebutuhan Transportasi Kaum Disabilitas <i>Webinar: Inventory Recording of Transportation Needs of People with Disabilities</i> | Daring/ <i>Online</i> , 26 Agustus/ <i>August</i> 2020 | DTKJ |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar TOD (<i>Transit- Oriented Development</i>) Berbasis <i>Railway</i> dan Strategi Penerapannya di Jakarta <i>Webinar: Railway-based TOD and Implementation Strategy in Jakarta</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 September 2020 | Institusi Transportasi dan Logistik Trisakti |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar Menjadi BUMD <i>World Class</i> Mengapa Tidak? <i>Webinar: To be a World Class ROE, Why Not?</i> | Daring/ <i>Online</i> , 19 September 2020 | Marketers |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar HSE <i>Practitioners</i> | Daring/ <i>Online</i> , 20 September 2020 | QSHES Indonesia Safety Club |

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan/ atau Pelatihan Type of Education and/or Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Topic of Education and Training | Tempat dan Tanggal Location and Date | Penyelenggara Organiser |
|---|---|---|---|------------------------------|
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Webinar HSE Practitioners | Daring/Online, 20 September 2020 | QSHES Indonesia Safety Club |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Seminar Virtual Indobuildtech 2020 : Pengembangan SDM Jasa Konstruksi: Manajemen dan Peningkatan Daya Saing Konstruksi <i>Virtual Seminar of Indobuildtech 2020: Development of Construction Human Capital: Management and Improvement of Construction Competitiveness</i> | Daring/Online, 05 Oktober/ October 2020 | Indobuildtech |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Dialog Bersama Marti "Bertransportasi Asik dan Aman Selama Masa Pandemi" <i>Dialogue with Marti "Fun and Safe Transportation During the Pandemic"</i> | Daring/Online, 15 Oktober/ October 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | UITP AP Digital Conference Closing Panel Discussion "Reinventing Urban Mobility for the World of Tomorrow" | Daring/Online, 23 Oktober/ October 2020 | UITP |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | <i>Technical Skill</i> | Focus Group Discussion : Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 di Moda Transportasi Umum <i>Focus Group Discussion: Cutting the Transmission of COVID-19 in Public Transportation</i> | Daring/Online, 07 Desember/ December 2020 | Bisnis Indonesia |
| Roy Rahendra Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi/ <i>Finance and Corporate Management Director</i> | <i>Technical Skill</i> | International Workshop Public Policy For The Future | Daring/Online, 10 November 2020 – 03 Desember/ December 2020 | Jakarta Public Policy Center |

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite-Komite*Education and/or Training of the Committees*

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan/atau Pelatihan Type of Education and/or Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Topic of Education and Training | Tempat dan Tanggal Location and Date | Penyelenggara Organiser |
|---|--|--|---|------------------------------------|
| Mohamad Hassan Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Hary Budiarto Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Krishna Mochtar Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Irwan Rei Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan <i>Member of Human Capital and Business Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Helda Chandra Anggota Komite Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan <i>Member of Human Capital and Business Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Singgih Budihartono Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti <i>Member of the Risk and Security Monitoring Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Sutrisno Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti <i>Member of the Risk and Security Monitoring Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Ivan Malik Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti <i>Member of the Risk and Security Monitoring Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |
| Said Muhammad Ihsan Sekretaris Komite <i>Secretary of Committee</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 <i>ISO 37001:2016 Oversight Mechanism Training</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 – 10 September 2020 | CRMS Indonesia |

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan
Education and/or Training of the Corporate Secretary

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|---|--|---|---|--|
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Soft Skill</i> | <i>Overview of Directorship Skill: Executive Education - Directorship Program "High-Performance Boards"</i> | Jakarta, DKI Jakarta, 19 - 20 Maret/ March 2020 | Pertamina Training and Consulting |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Soft Skill</i> | <i>Pelatihan MDP - Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader</i> <i>Training MDP- Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader</i> | Daring/Online, 27 November 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>The 4th Corporate Secretary Summit: Role and Challenges of Corporate Secretary in The Middle of Business Environment Change 2020</i> | Jakarta, DKI Jakarta, 11 - 12 Maret/ March 2020 | Inti Pesan |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) Batch 1</i> <i>Dissemination of Whistleblowing System: Batch 1</i> | Daring/Online, 04 Juni/June 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) Batch 2</i> <i>Dissemination of Whistleblowing System: Batch 2</i> | Daring/Online, 09 Juni/June 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Masker</i> <i>Dissemination of How to Wear Mask</i> | Daring/Online, 10 Agustus/August 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Sosialisasi Awareness Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)</i> <i>Dissemination of the Awareness concerning the Implementation and Certification of Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)</i> | Daring/Online, 23 September 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin (Kepala Divisi Sekretaris Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)</i> <i>Dissemination of Whistleblowing System</i> | Daring/Online, 23 September 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Muhamad Kamaluddin Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | <i>Pelatihan HR For Non-HR: Leaders Creates Leaders</i> <i>HR Training for Non-HR: Leaders Create Leader</i> | Daring/Online, 23 September 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |

Pendidikan dan/atau Pelatihan Divisi Internal Audit
Education and/or Training of Internal Audit Division

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Type of Education and/or Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Topic of Education and Training</i> | Tempat dan Tanggal <i>Location and Date</i> | Penyelenggara <i>Organiser</i> |
|---|---|---|--|-----------------------------------|
| Andy Revy Rohadian Kepala Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Batch 2 <i>Dissemination of Whistleblowing System: Batch 2</i> | Daring/ <i>Online</i> , 09 Juni/ <i>June</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Andy Revy Rohadian Kepala Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 <i>Training for Anti-Bribery Management System Internal Audit based on ISO 37001:2016</i> | Daring/ <i>Online</i> , 30 Juni/ <i>June</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Andy Revy Rohadian Kepala Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) <i>Dissemination of Whistleblowing System</i> | Daring/ <i>Online</i> , 24 Agustus/ <i>August</i> 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Andy Revy Rohadian Kepala Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division Head</i> | <i>Technical Skill</i> | Pelatihan HR For Non-HR: <i>Leaders Creates Leaders</i> <i>HR Training for Non-HR: Leaders Create Leader</i> | Daring/ <i>Online</i> , 02 November 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Andy Revy Rohadian Kepala Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division Head</i> | <i>Soft Skill</i> | Pelatihan MDP - <i>Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader</i> <i>Training MDP- Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader</i> | Daring/ <i>Online</i> , 12 November 2020 | PT MRT Jakarta (Perseroda) |

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

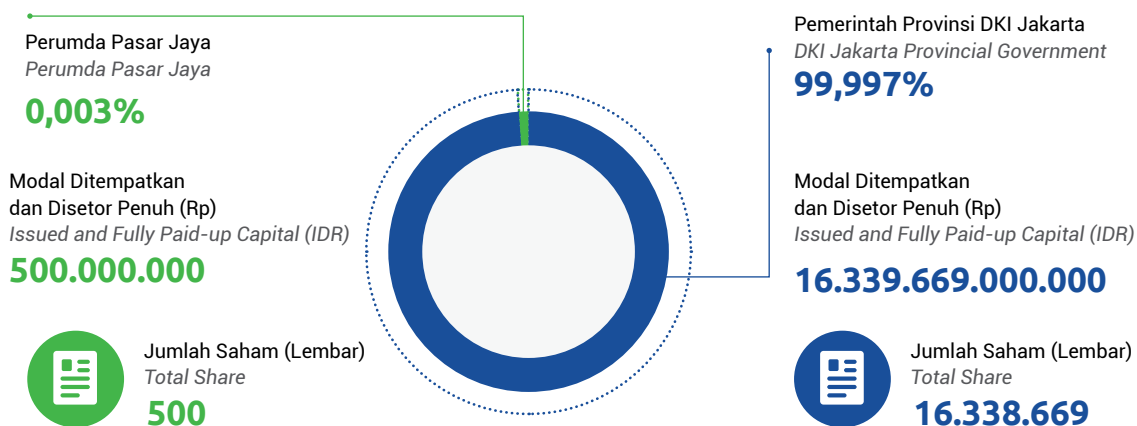
Komposisi Pemegang Saham

Modal dasar Perseroan per 31 Desember 2020 berjumlah Rp40.757.353.000.000 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 40.757.353 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor berjumlah Rp16.339.169.000.000 (enam belas triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham terbagi atas 16.339.169 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham.

Composition of Shareholders

The Authorised Capital of the Corporation as of December 31, 2020 is IDR 40,757,353,000,000 (forty trillion seven hundred fifty-seven billion three hundred fifty-three million Indonesian Rupiah), divided into 40,757,353 (forty million seven hundred fifty-seven thousand three hundred fifty-three) shares with the nominal amount of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share. Of the authorised capital, IDR 16,339,169,000,000 (sixteen trillion three hundred thirty-nine billion one hundred sixty-nine million Indonesian Rupiah) has been issued and fully paid by the Shareholders, divided into 16,339,169 (sixteen million three hundred thirty-nine thousand one hundred sixty-nine) shares with the nominal amount of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share.

Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan Per 31 Desember 2020
The Corporation's Share Ownership Composition as of December 31, 2020



Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,997%. Selain itu, terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap saham Perseroan, melalui Perumda Pasar Jaya yang merupakan pemegang saham minoritas Perseroan sebesar 0,003%. Dengan demikian, tidak ada informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Informasi mengenai komposisi pemegang saham Perseroan sebesar 5% atau lebih, dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Kelompok Pemegang Saham Publik Kurang Dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak pernah menerbitkan saham untuk publik. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai kelompok pemegang saham publik kurang dari 5%. Informasi mengenai komposisi pemegang saham kurang dari 5% telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham atas Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi rincian anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,997%, dan kepemilikan tidak langsung melalui Perumda Pasar Jaya sebesar 0,003%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk sekaligus entitas pemilik akhir Perseroan.

Composition of Top 20 Shareholders

The Corporation is a Regionally-Owned Enterprise (ROE). The ultimate/controlling shareholder is the Government of DKI Jakarta Province, with 99.997% direct ownership of the shares. Also, the Government of DKI Jakarta Province has indirect share ownership of the Corporation's share through Perumda Pasar Jaya as a minority shareholder of the Company's shares at 0.003% of ownership. Thus, there is no information regarding the composition of the top 20 shareholders.

Composition of Shareholders with 5% Ownership or More

Information concerning the composition of shareholders with 5% ownership or more is explained in the discussion regarding shareholders.

Composition of Public Shareholders with Less than 5% Ownership

As of December 31, 2020, the Corporation does not issue shares for the public. Thus, there is no information concerning public shareholders with less than 5% ownership. Information concerning the composition of public shareholders with less than 5% ownership is explained in the discussion regarding shareholders.

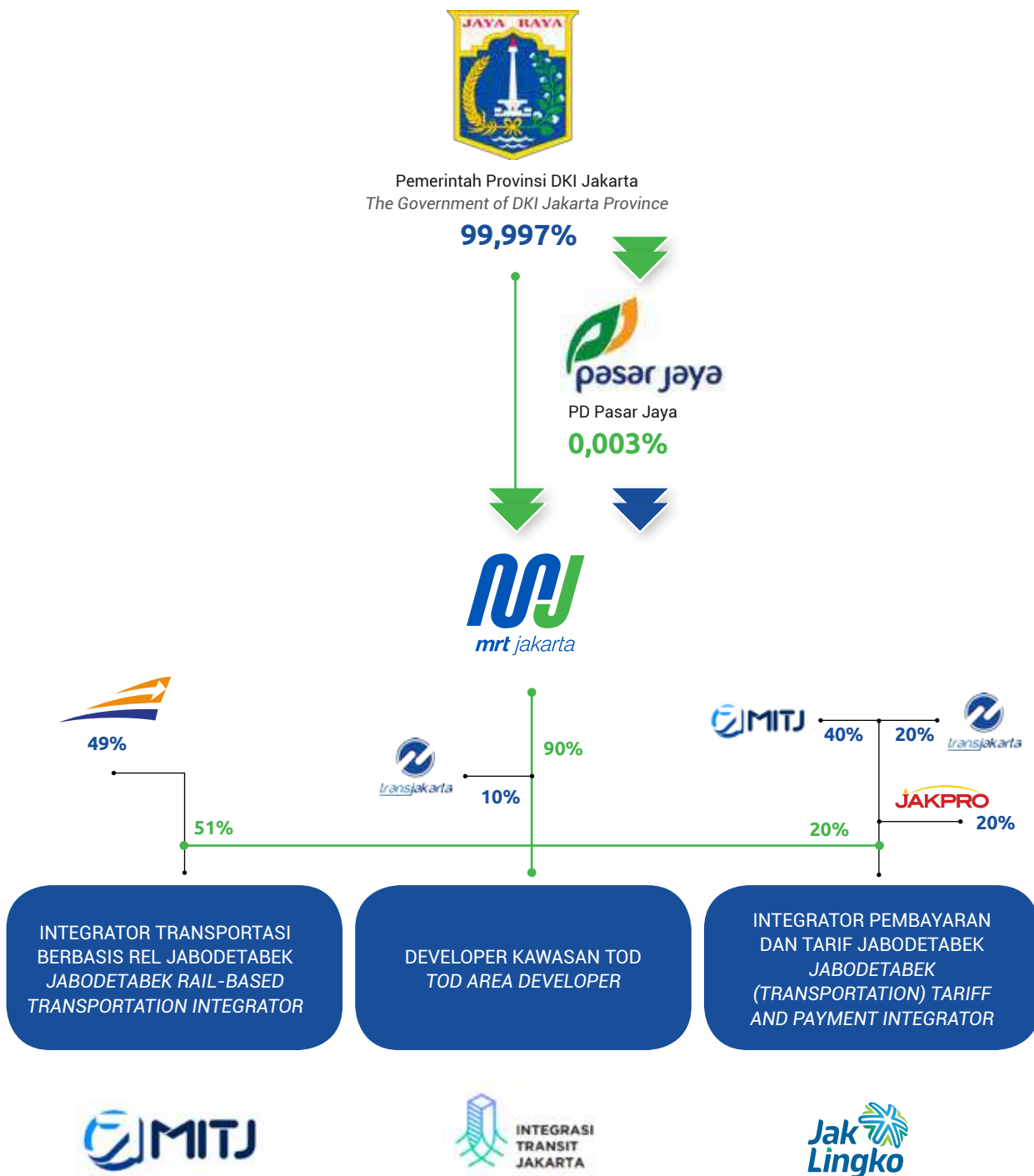
Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2020, the Board of Commissioners and the Board of Directors do not have any ownership of the Corporation's shares. Therefore, there is no information concerning the share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Information on Ultimate Shareholders and /or Controlling Shareholders to the Name of End-Owners

The ultimate/controlling shareholder is the Government of DKI Jakarta Province, with 99.997% direct ownership of the shares, and indirect share ownership by Perumda Pasar Jaya as a minority shareholder of the Company's shares at 0.003% of ownership. Thus, the Government of DKI Jakarta Province is the parent entity and the end-owner entity.

Struktur Grup PT MRT Jakarta (Perseroda)
Structure of PT MRT Jakarta (Perseroda) Group



INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, SERTA *JOINT VENTURE (JV)* DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)*

Information on Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures (JV) and Special Purpose Vehicle (SPV)

| Entitas Anak Subsidiaries | | | |
|--|--|--|---|
| Nama Name | PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) | PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) | PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko) |
| Bidang Usaha Business sector | Aktivitas Konsultasi Transportasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya <i>Transportation Consultancy Activities and other Management Consultancy Activities</i> | Aktivitas <i>Real Estate</i> Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Aktivitas <i>Real Estate</i> Atas Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak dan Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya. <i>Owned or Rented Real Estate Activities, Real Estate Activities for Fee or Contract, and other Management Consultancy Activities</i> | Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya, Aktivitas Konsultansi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Portal Web dan/atau <i>Platform</i> Digital dengan Tujuan Komersial, Penerbitan Piranti Lunak Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya. <i>Other Computer Programming Activities, Other Computer Consultancy and Computer Facility Management Activities, Data Processing, Web Portal, and/or Digital Platform Activities for Commercial Purposes, Software Release, Computer and Similar Hardware Repairation.</i> |
| Kepemilikan Saham Share Ownership | 51% | 90% | 20% Terdapat kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), yang mana PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) yang kepemilikan sahamnya sebesar 51% dimiliki oleh Perseroan memiliki saham di PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko) sebesar 40%. <i>There is indirect ownership of the Corporation's share through PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), in which PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) with 51% ownership of shares is owned by the Corporation that owns 40% share ownership of PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko).</i> |
| Tahun Pendirian Year of Establishment | 2020 | 2020 | 2020 |
| Status Operasi Operational Status | Beroperasi <i>Operating</i> | Beroperasi <i>Operating</i> | Beroperasi <i>Operating</i> |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Issued Fully Paid Capital | Rp80.000.000.000 | Rp5.000.000.000 | Rp5.000.000.000 |
| Modal Dasar Authorized Capital | Rp80.000.000.000 | Rp5.000.000.000 | Rp20.000.000.000 |
| Jumlah Aset Total Asset | Rp11.777.810.034 | Rp74.896.155.427 | - |
| Domisili Domicile | Jakarta Pusat <i>Central Jakarta</i> | Jakarta Pusat <i>Central Jakarta</i> | Jakarta Pusat <i>Central Jakarta</i> |

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("PT MITJ") didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008856.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 3 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0384905 tanggal 10 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

Modal dasar PT MITJ sejumlah Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan komposisi sebagai berikut:

- Perseroan memiliki 51% (lima puluh satu persen) saham atau sebanyak 40.800 (empat puluh ribu delapan ratus) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp40.800.000.000 (empat puluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) saham atau sebanyak 39.200 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp39.200.000.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("PT MITJ") was established based on Deed Number 11 dated February 11, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008856.AH.01.01 Year 2020 dated February 12, 2020 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek and the Articles of Association as amended for the last time by Deed Number 01 dated September 3, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, whose notice concerning the amendment of the Articles of Association has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0384905 dated September 10, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to the Articles of Association of PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

The authorised capital of PT MITJ is IDR 80,000,000,000 (eighty billion Indonesian Rupiah), divided into 80,000 (eighty thousand) shares with the nominal amount of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share. Of the authorised capital, capital that has been issued and fully paid is as follows:

- *The Corporation owns 51% (fifty-one percent) share or 40,800 (forty thousand eight hundred) shares, valued at IDR 40,800,000,000 (forty billion eight hundred million Indonesian Rupiah);*
- *PT Kereta Api Indonesia (Persero) owns 49% (forty-nine percent) share or 39,200 (thirty-nine thousand two hundred) shares, valued at IDR 39,200,000,000 (thirty-nine billion two hundred million Indonesian Rupiah).*



Visi Perusahaan
Vision of the Company

Menjadi Solusi Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek

To Become the Solution to Transportation Integration in Jabodetabek



Misi Perusahaan
Missions of the Company

1. Menjamin tersedianya layanan perkeretaapian terintegrasi yang mudah diakses, aman, andal, efisien dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas hidup
2. Berkolaborasi dengan ekosistem transportasi menuju terwujudnya integrasi antarmoda yang holistik
3. Beroperasi secara komersial dan memaksimalkan *value for money* dan penghasilan di luar pendapatan tiket
4. Mempercepat pembangunan sosial ekonomi yang inklusif di sekitar stasiun melalui pengembangan kawasan berorientasi transit

1. *Ensuring the delivery of integrated railway services that are easy to access, safe, reliable, efficient, and sustainable to improve the quality of life.*
2. *Collaborating with transportation ecosystem to realise holistic integration among modes of transportation.*
3. *Operating commercially and maximising the value-for-money and non-farebox revenue.*
4. *Accelerating inclusive socio-economic development around the station through Transit-Oriented Development.*



Bidang Usaha
Business Sectors

Aktivitas Konsultasi Transportasi; dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Transportation Consultancy Activities; and Other Management Consultancy Activities

Berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0307033 tanggal 24 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, telah mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi PT MITJ.

Based on Deed Number 31 dated July 20, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, whose notice concerning the amendment of Corporate Data has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0307033 dated July 24, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to Corporation Data of PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, PT MITJ has appointed and decided the Boards of Commissioners and Directors.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Didiek Hartantyo
Komisaris Utama
President Commissioner

Syafrin Liputo
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors

Tuhayat
Direktur Utama
President Directors

Oktavianus Berdikarianto
Direktur
Director

PT Integrasi Transit Jakarta

PT Integrasi Transit Jakarta ("PT ITJ") didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051263.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Integrasi Transit Jakarta.

Modal dasar PT ITJ sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan komposisi sebagai berikut:

- Perseroan memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham atau sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- PT Transportasi Jakarta memiliki 10% (sepuluh persen) saham atau sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

PT Integrasi Transit Jakarta ("PT ITJ") was established based on Deed Number 18 dated October 6, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0051263.AH.01.01 Year 2020 dated October 6, 2020 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Integrasi Transit Jakarta.

The authorised capital of PT ITJ is IDR 5,000,000,000 (five billion Indonesian Rupiah), divided into 5,000 (eighty thousand) shares with the nominal amount of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share. Of the authorised capital, capital that has been issued and fully paid is as follows:

- *The Corporation owns 90% (ninety percent) share or 4,500 (four thousand five hundred) shares, valued at IDR 4,500,000,000 (four billion five hundred million Indonesian Rupiah);*
- *PT Transportasi Jakarta owns 10% (ten percent) share or 500 (five hundred) shares, valued at IDR 500,000,000 (five hundred million Indonesian Rupiah).*



Visi Perusahaan
Vision of the Company

Mewujudkan dan mengembangkan kawasan transit berkualitas untuk mendorong keselarasan pertumbuhan ekonomi, interaksi sosial, dan kelestarian lingkungan
To realise and develop high-quality transit-oriented development to drive harmony between economic growth, social interaction, and environmental sustainability.



Misi Perusahaan
Missions of the Company

1. Mengembangkan fungsi campuran dengan memaksimalkan kepadatan kawasan agar terjadi peningkatan konektivitas yang sederhana, langsung, dan intuitif dari dalam stasiun sampai tujuannya di dalam kawasan;
2. Meregenerasi ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi lokal dan kesempatan kerja baru yang mendorong peningkatan kualitas hidup dan lingkungan bagi masyarakat;
3. Membangun kawasan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan menciptakan kawasan yang tangguh, tanggap bencana, dan adaptif terhadap perubahan;
4. Mengembangkan kawasan yang berkelanjutan dengan pengawasan dan tata kelola yang ketat agar mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan.

1. *Developing mixed-function by maximising areal density to increase simplified, direct, and intuitive connectivity from inside the station until the destination in the area;*
2. *Regenerating the economy of the area through local economic growth and new job opportunity that drives the improvement of living and environmental quality for the community;*
3. *Building the area according to sustainable development principles by creating rigid, disaster-resilient, and adaptive area against change;*
4. *Developing sustainable area with strict control and governance to reduce the impacts of development on the environment.*



Bidang Usaha Business Sectors

- Aktivitas *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
- Aktivitas *Real Estate* atas Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak ; dan
- Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.
- *Owned or Rented Real Estate Activities;*
- *Real Estate Activities for Fee or Contract; and*
- *Other Management Consultancy Activities.*

Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051263.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Integrasi Transit Jakarta, telah mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi PT ITJ.

Based on Deed Number 18 dated October 6, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0051263.AH.01.01 Year 2020 dated October 6, 2020 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Integrasi Transit Jakarta, PT ITJ has appointed and decided the Boards of Commissioners and Directors.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Muhamad Kamaluddin
Komisaris
Commissioner

Direksi Board of Directors

Agus Himawan
Direktur Utama
President Directors

Aidin Barlean
Direktur
Director

Moch. Hasan
Direktur
Director

PT Jakarta Lingko Indonesia

PT Jakarta Lingko Indonesia ("PT JakLingko Indonesia") didirikan berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070252.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jakarta Lingko Indonesia.

Modal dasar PT JakLingko Indonesia sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki 20% (dua puluh persen) saham atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
2. PT Transportasi Jakarta memiliki 20% (dua puluh persen) saham atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
3. PT Jakarta Propertindo memiliki 20% (dua puluh persen) saham atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
4. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek memiliki 40% (empat puluh persen) saham atau sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

PT Jakarta Lingko Indonesia ("PT JakLingko Indonesia") was established based on Deed Number 78 dated December 30, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0070252.AH.01.01 Year 2020 dated December 30, 2020 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Jakarta Lingko Indonesia.

The authorised capital of PT Jakarta Lingko Indonesia is IDR 20,000,000,000 (twenty billion Indonesian Rupiah), divided into 20,000 (twenty thousand) shares with the nominal amount of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share. Of the authorised capital, IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) has been issued and fully paid with composition as follows:

1. *The Corporation owns 20% (twenty percent) share or 1,000 (one thousand) shares, valued at IDR 1,000,000,000 (one billion Indonesian Rupiah);*
2. *PT Transportasi Jakarta owns 20% (twenty percent) share or 1,000 (one thousand) shares, valued at IDR 1,000,000,000 (one billion Indonesian Rupiah);*
3. *PT Jakarta Propertindo owns 20% (twenty percent) share or 1,000 (one thousand) shares, valued at IDR 1,000,000,000 (one billion Indonesian Rupiah);*
4. *PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek owns 40% (forty percent) share or 2,000 (one thousand) shares, valued at IDR 2,000,000,000 (two billion Indonesian Rupiah).*



Visi Perusahaan
Vision of the
Company

Menjadi Perusahaan teknologi pembayaran dan data kelas dunia dengan kinerja terbaik dan berkelanjutan
To become a world-class payment technology and data Company with excellent and sustainable performance



Misi Perusahaan *Missions of the Company*

Mencapai keunggulan yang berkesinambungan melalui:

1. Penyediaan sistem pembayaran dan jasa layanan rekonsiliasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan bersaing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Optimalisasi nilai perusahaan melalui bisnis utama yang inovatif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan penerapan teknologi terdepan;
3. Pemberian manfaat yang optimal bagi operator transportasi dan masyarakat pengguna layanan;
4. Pengembangan talenta digital berwawasan global yang menerapkan nilai-nilai positif masyarakat Indonesia.

Reaching sustainable excellent through:

1. *Provision of secure, efficient, digital, and competitive payment system and reconciliation service to fulfil the needs of the customers;*
2. *Optimisation of corporate values through innovative core business to realise better welfare of the community through implementation of cutting-edge technology;*
3. *Delivery of optimal benefits for transportation operators and service users;*
4. *Development of digital talents with global insights that implement the positive values of Indonesian people.*



Bidang Usaha *Business Sectors*

1. Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya;
2. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya;
3. Aktivitas Pengolahan Data;
4. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
5. Penerbitan Piranti Lunak;
6. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya.

1. *Other Computer Programming Activities;*
2. *Other Computer Consultancy and Computer Facility Management Activities;*
3. *Data Processing Activities;*
4. *Web Portal and/or Digital Platform Activities for Commercial Purposes;*
5. *Software Release;*
6. *Computer and Similar Hardware Repairation.*

Berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Nomor AHU-0070252.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jakarta Lingko Indonesia, telah mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jakarta Lingko Indonesia.

Based on Deed Number 78 dated December 30, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0070252.AH.01.01 Year 2020 dated December 30, 2020 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Jakarta Lingko Indonesia, PT Jakarta Lingko Indonesia has appointed and decided the Boards of Commissioners and Directors.

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*

Dadan Rudiansyah
Komisaris Utama
President Commissioner

Dwi Wahyu Daryoto
Komisaris
Commissioner

Direksi *Board of Directors*

Muhamad Kamaluddin
Direktur Utama
President Directors

Albertus Indarko Wiyogo
Direktur
Director

INFORMASI TENTANG KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

Information on Share Issuance and Share Listing Chronology

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 maupun tanggal disampaikannya informasi ini, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan saham pada Bursa Efek Indonesia maupun bursa saham manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

As of December 31, 2020, and the date of disclosure of this information, the Corporation does not issue nor list the shares in the Indonesian Stock Exchange or any stock exchange. Therefore, there is no information concerning the years of share listing, total share, share par value, share offering prices for each corporate action, total share listed after each corporate action, and name of stock exchanges where the Corporation shares are listed.

INFORMASI TENTANG PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA

Information on Bonds and/or Other Securities Issuance and Listing

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 maupun tanggal disampaikannya informasi ini, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, and the date of disclosure of this information, the Corporation does not issue other securities in any form. Therefore, there is no information concerning the names of other securities, years of issuance of other securities, interest/yield rates of other securities, and maturity date of other securities; offering prices of other securities; names of stock exchanges where the other securities are listed; and rating of other securities.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Supporting Institutions and Professions

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)

Alamat

Address:

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 - Indonesia

Telp
Phone (021) 5289 5000

Fax
(021) 5289 4600

Surel
Email Damestar.hutagalung@id.ey.com

Situs
Website www.ey.com

Bentuk Jasa:
Audit atas Laporan Keuangan

Type of Service:
Audit of Financial Statements

Jasa Lainnya:
Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal

Other Services:
Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal

Periode Penugasan: 1 November 2020 - 31 Maret 2021

Assignment Period: November 1, 2020-March 31, 2021

Biaya Jasa: Rp684.799.000

Service Fee: Rp684,799,000

Konsultan Hukum
Legal Consultant

HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS

Alamat

Address:

Wisma 46 Kota BNI Lantai 41
Jl. Jend. Sudirman Kav.1
Jakarta Pusat 10220

Telp (+62-21) 570 1837
Phone

Fax (+62-21) 570 1835
Facsimile

Surel Hendra.ong@dentons.com
Email

Situs dentons.hprplawyers.com
Website

Bentuk Jasa:

1. Memberikan pandangan-pandangan dan pendapat hukum, serta rekomendasi langkah hukum yang komprehensif perihal permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan berpotensi akan dihadapi oleh Perseroan;
2. Memberikan jasa hukum yang dibutuhkan Perseroan secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas pada nasihat hukum, mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan mewakili Perseroan dalam sebuah tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Mempersiapkan rancangan atau korespondensi telaahan (review), dokumen-dokumen, dan/atau perjanjian dalam kaitannya dengan atau antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang berkaitan dengan proyek tertentu ataupun transaksi dari masalah umum Perseroan;
4. Mewakili atau membantu Perseroan dalam rapat, baik yang berkaitan dengan proyek, transaksi atau dalam kaitannya dengan masalah korporasi seperti hubungan dengan para *stakeholder* utama; dan
5. Pendampingan oleh Konsultan/penasehat hukum dalam bentuk kegiatan perancangan peraturan yang dibutuhkan Perseroan, *legal drafting*, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan dan yang lainnya sebagaimana terkait.

Type of Service:

1. *Providing legal views and opinions, and recommending comprehensive legal actions for legal issues that are and potentially would be faced by the Corporation;*
2. *Providing comprehensive legal services as required by the Company, including but not limited to legal advice, preparation of legal documents, and representing the Corporation in a legal action in and outside the court;*
3. *Preparing review draft or correspondences, documents, and/or agreements concerning, or between the Corporation and other parties, regarding certain projects or transaction of general issues of the Corporation;*
4. *Representing or assisting the Company in meetings, regarding the projects, transactions, or in relation with corporate issues such as main stakeholder relationship; and*
5. *Assisting carried out by legal Consultant/advisor in the form of the drafting of regulations as required by the Corporation, legal drafting, industrial relations, dispute resolutions, and other related services.*

Jasa Lainnya:
Tidak ada

Other Services:
None

Periode Penugasan:

- Periode Penugasan pertama sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
- Periode Penugasan kedua sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Assignment Period:

- *The first assignment period started on September 18, 2019 until September 18, 2020;*
- *The second assignment period started on September 19, 2020 until September 19, 2021.*

Biaya Jasa:

Masing-masing Periode Penugasan maksimal Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang juga meliputi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya OPE.

Service Fee:

For each assignment period, the ceiling fee is IDR 2,500,000,000 (two billion five hundred million Indonesian Rupiah) including Value-Added Tax (VAT) and OPE fee.

Penilai
Assessor

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

INDONESIA NATIONAL GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR OF DKI JAKARTA PROVINCE

Alamat

Address :

Jl. Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Telp
Phone (021) 85907460

Fax
Facsimile (021) 8190663

Surel
Email dki1@bpkp.go.id

Situs
Website www.bpkp.go.id/dki1.bpkp

Bentuk Jasa:
Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Type of Service:
Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

Jasa Lainnya:
Tidak ada

Other Services:
None

Periode Penugasan:
4 Desember 2020 – 29 Januari 2021

Assignment Period:
December 4, 2020 – January 29, 2021

Biaya Jasa:
Rp53.560.000 (lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu
rupiah)

Service Fee:
IDR53,560,000 (fifty-three million five hundred sixty thousand
indonesian rupiah)

Notaris
Notary

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H

Alamat

Address

Jl. Panglima Polim v/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp

Phone

(021) 7244650 – 7392801 – 7209542 – 7209645

Fax

Facsimile

(021) 7265090

Surel

Email

cahyanie72@yahoo.co.id,
poerbaningsing@yahoo.com

Situs

Website

Bentuk Jasa:

- Melakukan pembuatan akta-akta yang diperlukan oleh Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Luar Biasa, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maupun di luar Rapat Umum Pemegang Saham, melegalisir dan/atau melakukan *waarmerking* dokumen-dokumen, serta mengakta-notariil-kan perjanjian-perjanjian yang menurut peraturan perundang-undangan perlu diakta notarial-kan;
- Melakukan pengurusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Perubahan Anggaran Dasar atau Data Perseroan, Berita Negara Republik Indonesia berserta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau Daftar Perseroan;
- Identifikasi atas data-data yang diperlukan sesuai dengan tugas yang diberikan dan data pendukung lainnya yang terkait;
- Melaksanakan rapat dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan suatu dokumen tertentu sebagaimana diminta oleh Pengguna;
- Menghadiri rapat-rapat apabila diperlukan dan menindaklanjuti hasil rapat/koordinasi dengan Pengguna;
- Dalam hal melakukan legalisir, *waarmerking* dan/atau pengakta-notariil-kan suatu dokumen dan/atau perjanjian, Penyedia wajib melakukan pengecekan keabsahan dokumen dan kewenangan pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum legalisir dokumen dan/atau perjanjian tersebut;
- Membuat skenario RUPS apabila diminta oleh Pengguna serta melakukan *legal review* terhadap agenda RUPS yang akan dilaksanakan.

Type of Service:

- Drawing up deeds as required by the User, including but not limited to Deed of Report for the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS), Deed of Statement of the Decision of General Meeting of Shareholders and outside General Meeting of Shareholders, legalising and/or watermarking documents, and drawing up notarial deeds of agreements following the prevailing laws and regulations;*
- Administering the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the Approval for the Amendment to Corporate Articles of Association, Reception of the Notice regarding the Amendment to the Articles of Association and Corporate Data, State Gazette of the Republic of Indonesia and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, and/or List of Corporations;*
- Identifying the required data under the assigned duties as well as other supporting data as requested by the User;*
- Carrying out meeting to collect data in preparing certain documents as requested by User;*
- Participating in meetings whenever required and following up the meeting/ coordinating with the User;*
- In terms of legalising, watermarking, and/or drawing up notarial deeds of a document and/or agreements, Provider must check the validity of the documents and authorities of the parties to conduct the legal action of legalising the document and/or agreement;*
- Creating GMS scenario upon request by User and conducting a legal review on the GMS agenda to be carried out.*

Jasa Lainnya:

Tidak ada

Other Services:

None

Periode Penugasan:

- Periode Penugasan pertama sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 18 April 2020;
- Periode Penugasan kedua sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan 18 April 2021.

Assignment Period:

- The first assignment period started on March 18, 2019 until April 18, 2020;*
- The second assignment period started on April 19, 2020 until April 19, 2021.*

Biaya Jasa:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
1. RUPS terkait Pengesahan RKAP dan RJPP sebesar Rp10.000.000;
 2. RUPS terkait Perubahan Anggaran Dasar Rp10.000.000;
 3. RUPS Tahunan Rp10.000.000.
- B. Lainnya (diluar paket di atas)
1. Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)
 - a. Penambahan susunan Direksi/Komisaris Rp2.500.000;
 - b. Penambahan sebgaiann anggaran dasar Rp2.500.000;
 - c. Penambahan keseluruhan anggaran dasar Rp2.500.000.
 2. Salinan akta tambahan sebesar Rp500.000.
 3. Pengurusan SK Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM RI + TDP sebesar Rp7.500.000.
 4. Pengurusan SK Pemberitahuan Kementerian Hukum dan HAM RI + TDP sebesar Rp5.000.000.
 5. Pengurusan SK Persetujuan dan SK Pemberitahuan Kementerian Hukum dan HAM RI + BNRI + TDP sebesar Rp10.000.000.
 6. *Waarmerking* dokumen dibawah tangan sebesar Rp500.000.
 7. Legalisasi dokumen di bawah tangan sebesar Rp1.000.000.
 8. Penawaran Umum Surat Utang sebesar Rp50.000.000.
 9. *Initial Public Offering* sebesar Rp85.000.000.
 10. *Right Issue* sebesar Rp25.000.000.

Service Fee:

- A. *General Meeting of Shareholders (GMS)*
1. *GMS concerning Legalisation of RKAP and RJPP IDR10,000,000;*
 2. *GMS concerning Amendment to Articles of Association IDR10,000,000;*
 3. *Annual GMS IDR10,000,000.*
- B. *Other (excluding the aforementioned package)*
1. *Statement of Meeting Decision (PKR)*
 - a. *Additional structure to the Board of Directors/ Commissioners IDR2,500,000;*
 - b. *Additional parts of Articles of Association IDR2,500,000;*
 - c. *Additional of Articles of Association as a whole IDR2,500,000.*
 2. *Copy of additional deeds IDR500,000.*
 3. *Administering the Decree of Approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia + Company Registration IDR7,500,000.*
 4. *Administering the Decree of Notice of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia + Company Registration IDR5,000,000.*
 5. *Administering the Decree of Approval and the Decree of Notice of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia + State Gazette of the Republic of Indonesia + Company Registration IDR10,000,000.*
 6. *Waarmerking of privately drawn up documents IDR500,000.*
 7. *Legalising privately drawn up document IDR1,000,000.*
 8. *Public Offer of Bonds IDR50,000,000.*
 9. *Initial Public Offering IDR85,000,000.*
 10. *Right Issue IDR25,000,000.*

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Penghargaan yang Diperoleh 2020

Awards Received in 2020



TOP BUMD 2020 Star #5
Top of the TOP BUMD 2020
Top CEO BUMD 2020

Tanggal diterima:

Date Received:

27-8-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

TOP BUMD Awards 2020



Inovasi "Pembelian Tiket Berbasis Aplikasi Melalui QR Code (QR Code Ticketing)"

Innovation "App-based QR Code Ticketing"

Tanggal diterima:

Date Received:

27-8-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

IDX Channel Anugerah
Inovasi Indonesia 2020



**Apresiasi Perusahaan Pendukung
Pembangunan UMKM**

Appreciation for Companies

Supporting MSME Development

Tanggal diterima:

Date Received:

19-9-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

ICSB Indonesia
Presidential
Award 2020



The Most Promising Company in Branding Campaign category GOLD
The Most Promising Company in Marketing 3.0 category BRONZE
The Most Promising Company in Tactical Marketing category BRONZE
The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs category SILVER
The Most Promising Company in Strategic Marketing category SILVER
Special Mention CMO of The Year BUMD in Strategic Marketing

Tanggal diterima:

Date Received:

19-9-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

BUMD Marketeers Awards



Top GRC Awards 2020 Bintang 4
Top Most Committed GRC Leader 2020
The High Performing Board of Commissioners on GRC 2020
The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020

Tanggal diterima:

Date Received:

15-10-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

Top Governance, Risk and Compliance (GRC) Awards 2020



Rising Star Companies

Tanggal diterima:

Date Received:

3-12-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

Obsession Media Group dalam ajang Obsession Awards 2020



Trusted Company based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Tanggal diterima:

Date Received:

17-12-2020

Diberikan oleh:

Awarded by:

IICG dan SWA

Sertifikasi yang Berlaku Tahun 2020

Certificates Valid in 2020



ISO Terintegrasi

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Masa Berlaku | *Validity Period*
07 April 2020 - 06 April 2023

ISO 37001 : 2016

Masa Berlaku | *Validity Period*
07 Desember *December* 2020 - 06 Desember *December* 2023

INFORMASI TENTANG DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

Information On The List Of Address Of Subsidiaries, Associates, Branch Offices, And Representative Offices

Entitas Anak Subsidiary



PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)
Wisma Nusantara Lt. 23
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia



(+62-21) 310-3629;
(+62-21) 390-6454



info@itj-mrtjakarta.co.id



<http://itj-mrtjakarta.co.id/>

Entitas Perusahaan Patungan Joint Venture



PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ)
Wisma Nusantara Lt. 3
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia



(+62-21) 314-4555



@ptmitj



info@mitj.co.id



@ptmitj



www.mitj.co.id



**PT Jakarta Lingko Indonesia
(JakLingko Indonesia)**
Wisma Nusantara Lt. 23
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia



(+62-21) 964-47 25
(+62-21) 792-6311



admin@jaklingkoindonesia.com

ASET DIGITAL PERSEROAN DAN INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN

Digital Asset of the Corporate and Information in the Corporate Website

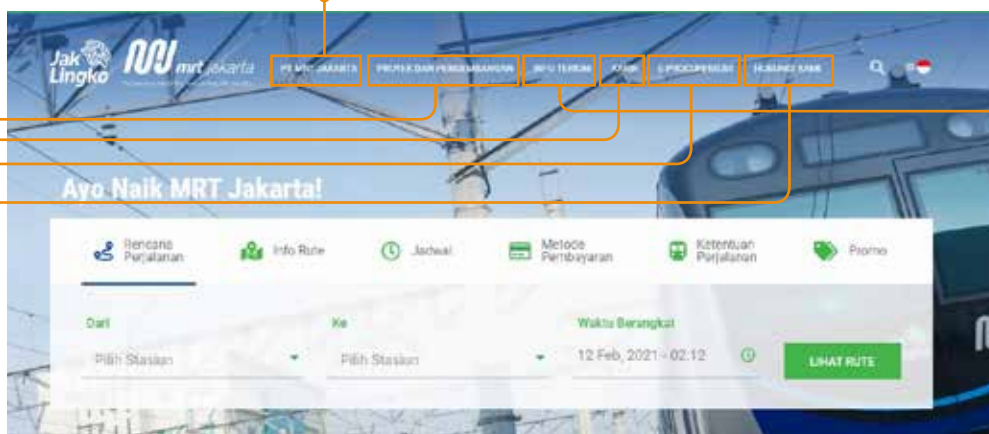
Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jakartamrt.co.id. Situs web berisi informasi terkini tentang MRT Jakarta, informasi pengadaan, informasi seputar korporasi, profil Perseroan, info karir, edukasi awal penggunaan MRT Jakarta saat nanti beroperasi, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

The Corporation owns an official website at www.jakartamrt.co.id. The content of this website includes up-to-date information in MRT Jakarta development, procurement information, Corporate information, Company profile, career information, initial education on the usage of MRT upon operations, and the latest news. The website is an open-access portal to provide comprehensive information about the Corporation to broader audience.

Peta Website Perseroan

Sitemap of the Corporation Website

| | |
|--|---|
| Sejarah <i>History</i> | Dewan Komisaris <i>Commissary</i> |
| Visi Misi <i>Vision and Missions</i> | Prestasi <i>Achievements</i> |
| Tata Kelola Perusahaan <i>Company Organisation</i> | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| Struktur Organisasi <i>Company Structure</i> | Kemitraan <i>Partnerships</i> |



Proyek dan Pengembangan | *Project and Development*
Fase 1 | *Phase 1*
Fase 2 | *Phase 2*
Kawasan Berorientasi Transit | *Transit-Oriented Development*

Karir | *Career*
Berkarir di PT MRT Jakarta | *Career in PT MRT Jakarta*
FAQ Karir | *Career FAQ*

E-Procurement
Anak Perusahaan | *Subsidiaries*

Hubungi Kami | *Contact Us*
Hubungi PT MRT Jakarta | *Contact PT MRT Jakarta*
Layanan Pengguna | *User Service*
Whistleblowing

Info Terkini | *Latest Info*
Pusat Data | *Data Center*
Annual Report
Panduan | *Guidelines*
Panduan Menggunakan MRT Jakarta | *How to use MRT Jakarta*
Dokumen | *Documents*
Ketentuan Perjalanan | *Terms of Trip*
PPID
Infografik | *Infographics*
Pengadaan | *Procurement*

Informasi Pengguna | *User Information*
Rencana Perjalanan | *Route Planner*
Metode Pembayaran | *Payment Method*
Peta Rute MRT | *MRT Route Map*
Daftar Stasiun MRT | *List of MRT Stations*
Peta Koneksi MRT | *MRT Connection Map*
Daftar Retail | *List of Retail*
Jadwal Keberangkatan MRT | *MRT Schedule*
Promo | *Promotion*

Perseroan menggunakan media sosial sebagai kanal komunikasi dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada publik termasuk wadah kolaborasi dengan mitra, dimana konten yang dihadirkan seputar layanan, pengembangan bisnis, pencapaian Perseroan dan aktivitas kolaborasi. Tiap-tiap kanal media sosial tersebut dimanfaatkan dengan konten yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dari kanal media sosial tersebut yang dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih dari itu, Perseroan melihat perkembangan digital sebagai target pasar potensial untuk diutilisasi menjadi salah satu sumber pendapatan non-tiket Perseroan. Perseroan melakukan berbagai upaya dalam monetisasi media sosial sebagai salah satu asset digital Perseroan, baik dalam bentuk konten bermuatan iklan dari mitra bisnis, maupun aktivitas kolaborasi digital bersama dengan mitra bisnis dengan tetap dihadirkan dalam konten yang menarik, relevan, dan informatif, sehingga mendorong keterikatan yang kuat antara Perseroan dengan masyarakat digital. Oleh karena itu, Perseroan terus mendorong kerja kolaborasi dengan berbagai mitra bisnisnya untuk menggunakan seluruh *platform* media sosial sebagai bentuk baru penetrasi pasar digital tersebut.

The Corporation employs social media as a communication channel to share information and educate the public, including collaborating with partners, whose contents present the service, business development, achievement, and collaborations of the Corporation. Each social media channel is leveraged based on the diverse contents in line with the characteristics of each social media channel while implementing good corporate governance.

Also, the Corporation views digital development as a potential market to be utilised as a source of non-farebox revenue. The Corporation takes various efforts to monetise social media channels as a digital asset of the Corporation, in the form of content with advertisement from business partners and digital collaboration with business partners presented in the form of interesting, relevant, and informative contents to drive strong bond between the Corporation and the digital community. Therefore, the Corporation strives to drive collaboration with the business partners in leveraging all social media platforms as an innovation for digital market penetration.



Depo Lebak Bulus
Lebak Bulus Depot



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION



TINJAUAN UMUM MENUJU PENGELOLAAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI

General Review Towards an Integrated Transportation Management

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan. Jakarta juga menjadi pusat bisnis, keuangan, industri perdagangan dan jasa. Bahkan saat ini Jakarta terhubung dengan kota-kota di sekitarnya dan menjadi metropolitan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Sebagai pusat dari kota metropolitan, dinamika Jakarta terus berkembang. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menyebut, dalam satu dekade terakhir jumlah penduduk Jakarta bertambah satu juta jiwa. Jumlah penduduk Jakarta tahun 2020 mencapai 10,6 juta jiwa, tersebar di lima wilayah kota madya dan satu kabupaten administratif. Jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar, menuntut ketersediaan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas warga.

Upaya Pemprov DKI Jakarta menyediakan prasarana dan sarana transportasi dihadapkan pada berbagai kendala. Penambahan ruas jalan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor. Publikasi Polda Metro Jaya tahun 2017, menyebut peningkatan laju pertumbuhan jalan di Jabodetabek hanya 1% per tahun. Angka ini tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai 11% per tahun, sehingga berimbas pada kemacetan. Publikasi Bank Dunia menyebut, total kerugian akibat kemacetan lalu lintas pada tahun 2019 mencapai Rp36 triliun per tahun. Jumlah tersebut lebih dari separuh nilai kerugian akibat kemacetan secara nasional, sebesar Rp56 triliun per tahun. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah menjadikan pembangunan transportasi yang terintegrasi sebagai salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yang berlanjut pada RPJMN 2020-2024. Melalui RPJMN, Pemerintah mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan ketersediaan dan layanan angkutan publik. Tidak hanya menambah kapasitas daya angkut, tapi juga kenyamanan dan keamanan, serta sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan warga.

Salah satu prioritas pengembangan angkutan publik adalah moda transportasi massal berbasis rel, yakni *mass rapid transit* (MRT), *light rapid transit* (LRT) serta *commuter line*. Moda transportasi massal lain yang dikembangkan adalah *bus*

Following Law Number 29 Year 2007 concerning the Government of Special Capital Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia, Jakarta has the function and role as the center of government. Jakarta has also become the centre of business, finance, trade, and service industry. Currently, Jakarta is connected to the surrounding cities and is called the Jakarta metropolitan area or Jabodetabek, consisting of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi.

As a huge metropolitan area, Jakarta is constantly growing. A publication from the Statistics Agency of DKI Jakarta Province Year 2020 mentions that within the last decade, the population of Jakarta grew by one million people. The population of Jakarta in 2020 was 10.6 million, distributed in five municipalities and one administrative regency. With a high number of populations distributed in a wide area, the availability of transportation infrastructure and facilities is crucial to support the mobility of the citizens.

The efforts of the Government of DKI Jakarta Province to provide transportation infrastructure and facilities face numerous obstacles. Building more roads and lanes could not overtake the growth of motor vehicles. According to a publication from The Regional Police for Greater Jakarta Metropolitan area in 2017, the road expansion in Jabodetabek only rose by 1% annually. It is lagged behind the motor vehicle growth that reaches 11% annually, resulting in traffic congestion. The World Bank stated that the total loss arising from traffic congestion in 2019 was IDR 36 trillion annually, more than half of the national total loss arising from traffic congestion of IDR 56 trillion annually. To overcome such issues, the Government prioritises integrated transportation development according to the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) of 2014-2019, to be continued in RPJMN 2020-2024. Through the Plan, the Government supports the Government of DKI Jakarta Province in growing the availability and services of public transportation. This does not only cover more passenger capacity, but it also covers comfort and safety as well as an integrated system to provide ease for the citizens.

A priority for the development of public transportation is rail-based mass transit system, such as mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), and commuter line. Other modes of transportation developed include bus rapid transit (BRT). This

rapid transit (BRT). Hal tersebut sejalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI.

Sejak tahun 2019, MRT sudah beroperasi di Jakarta dengan rute Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI. Dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2, yang terdiri atas Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dan Fase 2B (Kota – Ancol Barat). Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI-Ancol Barat) merupakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dasar hukum lain adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran HI–Kota.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 akan mendukung kapasitas layanan bagi mobilitas warga, karena sistem operasinya akan terintegrasi dengan moda transportasi publik lain yang bersifat masal. Operasional MRT Jakarta Fase 1 dan Fase 2 akan terintegrasi dengan BRT (TransJakarta), angkutan lingkungan (JakLingko), LRT serta *Commuterline*, bahkan juga moda transportasi berbasis aplikasi. Apabila Fase 2 sudah beroperasi, MRT Jakarta akan mampu melayani 500.000 pengguna jasa per hari. Pengembangan MRT menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta merealisasikan target peningkatan persentase penggunaan angkutan publik sebesar 75% pada tahun 2030.

Saat MRT Jakarta mulai beroperasi di Maret 2019, Kota DKI Jakarta berada pada peringkat 10 kota termacet di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53%. Setelah setahun MRT beroperasi, di tahun 2020, posisi Kota DKI Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet, tepatnya membaik 21 peringkat menjadi posisi 31, dengan tingkat kemacetan sebesar 36%.

Perbaikan peringkat tersebut tentu tidak dapat diklaim oleh karena beroperasinya MRT Jakarta saja. Melainkan karena kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transportasi terintegrasi, termasuk melalui MRT Jakarta yang mewujudkan integrasi tersebut, baik itu dengan pesepeda, pejalan kaki, dan lain-lain. Untuk upaya ini, Kota DKI Jakarta pun diapresiasi dengan perolehan penghargaan *Sustainable Transport Award* 2021 pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memperoleh penghargaan bidang transportasi tersebut.

is in line with the Governor's Decree of DKI Jakarta Province No. 84 Year 2004 concerning the Determination of Macro Transportation Scheme in DKI Jakarta Province.

Since 2019, Jakarta has MRT operated by PT MRT Jakarta (Perseroda) with the Phase 1 route stretching from Lebak Bulus to Bundaran HI. Supported by the Central Government, the Government of DKI Jakarta carries on the Phase 2 construction of MRT Jakarta, consisting of Phase 2A for Bundaran HI – Kota route and Phase 2B for Kota- Ancol Barat route. Phase 2 construction is a national strategic project according to Presidential Regulation Number 56 Year 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 3 Year 2016 concerning Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. Another legal basis is the Governor's Decree of DKI Jakarta Number 1713 Year 2019 concerning the Amendment to Governor's Decree of DKI Jakarta Number 1728 Year 2018 concerning Determination of Locations for the Construction of Mass Rapid Transit Route for Bundaran HI-Kota Corridor.

The Phase 2 Construction of MRT Jakarta will support the mobility of the citizens, and the operating system will be integrated with other mass transit system. The operations of Phase 1 and Phase 2 MRT Jakarta will be integrated with BRT (TransJakarta), Community Transportation (JakLingko), LRT, and Commuter Line, as well as an app-based transportation system. Upon the operations of Phase 2, MRT Jakarta will serve 500,000 daily passengers. The development of MRT is an effort from the Government of DKI Jakarta in increasing the utilisation of public transportation to be 75% by 2030.

Upon the initial operations of MRT Jakarta in March 2019, DKI Jakarta was ranked as the 10th most congested city in the world, with a congestion rate of 53%. After a year of MRT operations, DKI Jakarta was nominated as the 31st most congested city in the world, improved by 21 ranks with a congestion rate of 36%.

Such improvement in ranking cannot be claimed by solely the operations of MRT Jakarta. It is supported also by government policies to realise integrated transportation, including MRT Jakarta that supports the realisation of such integration with bicycle users, pedestrians, and others. As an appreciation for this effort, DKI Jakarta obtained Sustainable Transport Award 2021 on February 25, 2021, from the Jakarta Transportation Board (DTKJ) of the Government of DKI Jakarta to be the first city in Southeast Asia that obtained the award in the transportation sector.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operational Review by Business Segment

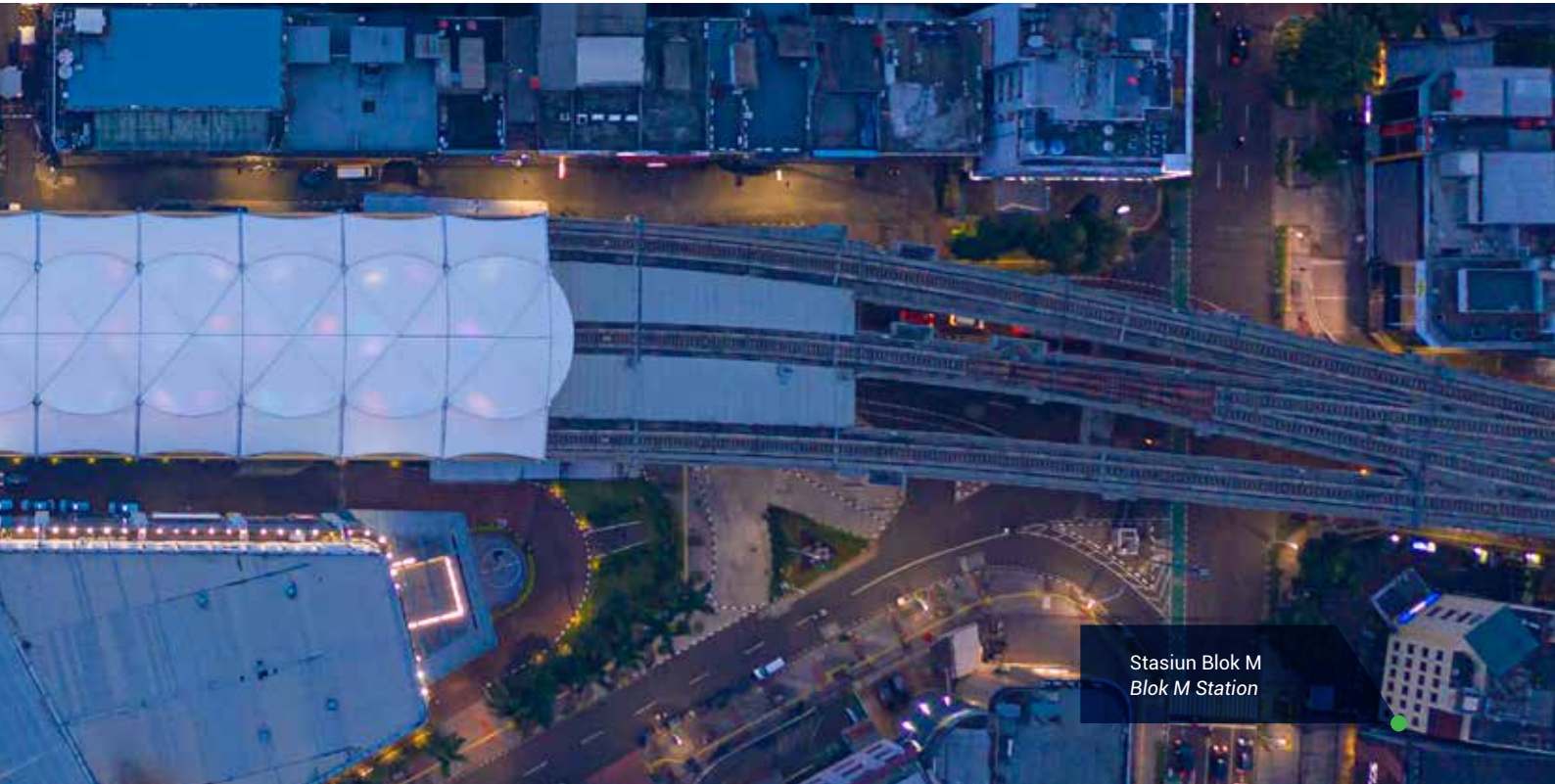


Informasi pada bagian ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yakni:

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana;
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan, yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana;
3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Information presented in this chapter covers the scope of business activities in line with the Articles of Association of the Corporation as follows:

1. *Infrastructure management for public railways in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operations, infrastructure maintenance, and infrastructure management;*
2. *Facility management for public railways in an urban area that includes facility development, facility operations, facility maintenance, and facility management;*
3. *Development and management of property and business within station areas and the surrounding areas, as well as Depots and the surrounding areas.*

Stasiun Blok M
Blok M Station

Kinerja Pembangunan Prasarana

Infrastructure Development Performance

MRT Jakarta Fase 1

Selama periode pelaporan, Perseroan telah menyelesaikan beberapa pekerjaan pembangunan prasarana MRT Jakarta Fase 1.

1. Pembangunan Jembatan penyeberangan Multiguna (JPM/skybridge) Simpang *Centrale Sticking Wederopbouw* (CSW), Jakarta Selatan. JPM akan mengintegrasikan Stasiun ASEAN dengan halte TransJakarta Koridor 1 Blok M – Kota dan Koridor 13 Ciledug – Mampang. JPM dilengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk akses difabel berupa lift. Pekerjaan fisik telah selesai pada bulan Juni 2020. Proses pemeriksaan fisik pekerjaan penataan kembali (*reinstatement*) jalur pejalan kaki di kawasan Stasiun ASEAN sisi barat telah dilakukan bersama dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 September 2020. PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyampaikan permohonan proses serah terima Jalur Pejalan Kaki di Stasiun ASEAN sisi barat kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 September 2020.

Phase 1 MRT Jakarta

During the reporting period, the Corporation has completed several infrastructure developments for Phase 1 MRT Jakarta.

1. Construction of the Skybridge at *Centrale Sticking Wederopbouw* (CSW) intersection, South Jakarta. The skybridge will integrate ASEAN Station with TransJakarta Bus Stop for Corridor 1 Blok M – Kota and Corridor 13 Ciledug – Mampang. The skybridge is equipped with various supporting facilities, including a lift as access for people with disabilities. The physical construction has been completed in June 2020. Physical inspection of the reinstatement of the pedestrian lane on the west side of ASEAN Station has been carried out with Bina Marga of DKI Jakarta Province on September 17, 2020. The Corporation has submitted the request for the handover of Pedestrian Lane on the west side of ASEAN Station to the Department of Regional Asset Management of DKI Jakarta Province on September 28, 2020.

2. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan tipe pengendali banjir dari *frameless* menjadi *manual stacking* di seluruh stasiun sebagai mitigasi pengendalian banjir. Selain itu juga, telah dilaksanakan pekerjaan berbagai modifikasi fasilitas di area pedestrian dan stasiun MRT Jakarta.

2. In 2020, the Corporation changed the flood control method from *frameless* to be *manual stacking* at all stations to mitigate flooding. Also, several works of facility modifications in the pedestrian areas and MRT Jakarta stations has been carried out as well.

Pekerjaan Modifikasi Fasilitas Di Area Pedestrian dan Stasiun MRT Jakarta Tahun 2020
Facility Modification Works in Pedestrian Areas and MRT Jakarta Stations in 2020

| Pekerjaan Activities | Lokasi dan Stasiun Station and Location |
|--|--|
| Pembuatan saluran air <i>Construction of drain</i> | Stasiun Istora, Senayan, Setiabudi <i>Istora, Senayan, Setiabudi Stations</i> |
| Modifikasi pagar cooling tower <i>Modification of cooling tower fence</i> | Stasiun Istora <i>Istora Station</i> |
| Perbaikan manhole <i>Improvement of manhole</i> | Seluruh stasiun MRT <i>All MRT stations</i> |
| Modifikasi pagar pedestrian <i>Modification of pedestrian guardrails</i> | Stasiun Blok A, Cipete Raya, Blok M <i>Blok A, Cipete Raya, Blok M Stations</i> |
| Pemasangan sling pengaman di sungai <i>Installment of safety sling at the river</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| Perbaikan minor area pedestrian (perbaikan bollard, tactile, ramp, dan lainnya) <i>Minor improvement of pedestrian areas (improvement of bollard, tactile, ramp, etc.)</i> | Pedestrian sepanjang stasiun MRT <i>Pedestrian areas along MRT stations</i> |
| Penyediaan listrik untuk tenant retail ATM <i>Electricity provision for ATM retail tenants</i> | Seluruh stasiun MRT <i>All MRT stations</i> |
| Pembuatan sumur resapan <i>Construction of infiltration well</i> | Stasiun Setiabudi <i>Setiabudi station</i> |
| Pembuatan cover tangga <i>Construction of stair covers</i> | Stasiun Cipete Raya dan Haji Nawi <i>Cipete Raya and Haji Nawi Stations</i> |
| Penyediaan bike rack dan totem bike rack <i>Provision of bike rack and totem bike rack</i> | Seluruh stasiun MRT <i>All MRT stations</i> |
| Pembuatan glass barrier <i>Construction of glass barrier</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| Penyediaan parkir disabilitas <i>Provision of disabled parking space</i> | Stasiun Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Station</i> |
| Peningkatan aksesibilitas #JalanJakarta <i>Improvement of #JalanJakarta accessibility</i> | Stasiun Haji Nawi <i>Haji Nawi Station</i> |
| Pembuatan railing difable <i>Construction of railing for people with disabilities</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| Modifikasi penempatan APAR <i>Modification of fire extinguisher placement</i> | Seluruh stasiun MRT <i>All MRT stations</i> |
| Penambahan lampu penerangan pada ruang storage <i>Additional lighting lamps at storage rooms</i> | Stasiun Blok M, Istora <i>Blok M, Istora Stations</i> |
| Pembuatan saluran drainase <i>Construction of drainage</i> | Stasiun Fatmawati, Blok A, Blok M <i>Fatmawati, Blok A, Blok M Stations</i> |
| Perbaikan tanah amblas <i>Restoration of sinkholes</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| Modifikasi grill saluran air <i>Modification of drain grill</i> | Blok A |

| Pekerjaan <i>Job</i> | Lokasi dan Stasiun <i>Station and Location</i> |
|--|--|
| Perbaikan ramp <i>Improvement of ramp</i> | Stasiun Bundaran HI <i>Bundaran HI Station</i> |
| Modifikasi pipa pembuangan air kotor <i>Modification of wastewater discharge pipes</i> | Stasiun Blok M, Blok A, Haji Nawi, ASEAN <i>Blok M, Blok A, Haji Nawi, ASEAN Stations</i> |
| Instalasi exhaust fan <i>Installation of exhaust fan</i> | Stasiun Cipete Raya <i>Cipete Raya Station</i> |
| Perbaikan pagar disabilitas <i>Improvement of fence for people with disabilities</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| Pembuatan anak tangga pada entrance <i>Construction of stairs at the entrance</i> | Stasiun Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Station</i> |
| Penanggulangan genangan air <i>Handling water puddle</i> | Stasiun Blok A, Stasiun Setiabudi <i>Blok A Station, Setiabudi Station</i> |
| Penyediaan AC Mushola <i>Installment of Air Conditioning at praying rooms</i> | Stasiun Lebak Bulus dan Blok M <i>Lebak Bulus and Blok M Station</i> |
| Pembuatan loket warehouse <i>Construction of warehouse counter</i> | Depo Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Depot</i> |
| Penyediaan listrik permanen <i>Provision of permanent electricity supply</i> | Stasiun Lebak Bulus dan ASEAN <i>Lebak Bulus and ASEAN Stations</i> |
| Penyediaan pompa submersible slurry <i>Provision of submersible slurry pump</i> | Stasiun Istora dan Setiabudi <i>Istora and Setiabudi Station</i> |
| Pengecatan epoxy platform stasiun <i>Painting of epoxy platforms at the stations</i> | Stasiun Bundaran HI dan Dukuh Atas <i>Bundaran HI and Dukuh Atas Stations</i> |
| Modifikasi ruang operator <i>Modification to operator room</i> | RSS Taman Sambas <i>RSS Sambas Park</i> |
| Penyediaan listrik untuk vending machine <i>Electricity provision for vending machines</i> | Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Dukuh Atas, Bundaran HI <i>Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Dukuh Atas, Bundaran HI Stations</i> |
| Pembuatan tower air dan modifikasi grill <i>Construction of water tower and modification of grill</i> | RSS Taman Sambas <i>RSS Sambas Park</i> |
| Penarikan kabel permanen ruang kerja ratangga <i>Permanent cable pulling of Ratangga work office</i> | Depo Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Depot</i> |
| Penghijauan taman <i>Reforestation of park</i> | Depo Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Depot</i> |
| Penyediaan ruang lost and found <i>Provision of lost and found room</i> | Stasiun Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Station</i> |

Pada periode pelaporan, Perseroan juga melakukan inspeksi kerusakan dan perbaikan segera fasilitas pendukung akibat peristiwa unjuk rasa pada 8 Oktober 2020. Perbaikan meliputi area pedestrian antara Stasiun Bundaran HI – Stasiun Setiabudi.

- Perbaikan dan penyediaan *bike rack*;
- Perbaikan dan penyediaan *bollard*;
- Perbaikan rambu di area pedestrian;
- Perbaikan andesit di area pedestrian;
- Perbaikan *manhole* di area pedestrian;
- Pengadaan dan penggantian tiang *assembly point* di *underground* Stasiun Bundaran HI – Stasiun Setiabudi.

During the reporting period, the Corporation carried out inspections for damage and immediate repair of supporting facilities due to the demonstration on October 8, 2020. The repair covers the pedestrian area between Bundaran HI Station to Setiabudi Station.

- *Repair and provision of bike rack;*
- *Repair and provision of bollard;*
- *Repair of signage in pedestrian areas;*
- *Repair of andesite in pedestrian areas;*
- *Repair of manhole in pedestrian areas;*
- *Procurement and replacement of assembly point poles at the underground of Bundaran HI Station – Setiabudi Station.*

MRT Jakarta Fase 2

Jasa Konstruksi

Pada Maret 2019, Presiden Republik Indonesia mencanangkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang terbagi dalam dua tahap, yakni Fase 2A rute Bundaran HI – Kota dan Fase 2B rute Kota – Ancol Barat. Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A terbagi dalam tujuh Paket Kontrak (CP/Contract Package). Realisasi pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 2,34%, dimana lebih tinggi dari target 2,14%. Perkembangan pekerjaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A selama periode pelaporan dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) akibat pandemi COVID-19 dan jadwal konstruksi yang padat.

Phase 2 MRT Jakarta

Construction Service

In March 2019, the President of the Republic of Indonesia inaugurated the Phase 2 construction of MRT Jakarta, divided into two stages of Phase 2A for Bundaran HI – Kota route and Phase 2B for Kota – Ancol Barat route. Phase 2A Construction of MRT Jakarta consists of seven Contract Packages (CPs). The realisation of the construction as of the end of 2020 reached 2.34%, exceeding the target of 2.14%. The development of Phase 2A construction of MRT Jakarta during the reporting period was impacted by the limitation of HC due to the COVID-19 pandemic, and tight construction schedule.

Paket Kontrak Jakarta MRT Fase 2A: Bundaran HI – Kota

Contract Packages of Phase 2A MRT Jakarta: Bundaran HI – Kota

| | |
|---------|---|
| CP 200 | Dinding diafragma dan RSS pada Taman Monas <i>Diaphragm wall and RSS at Monas Park</i> |
| CP 201 | Bundaran HI – Harmoni (2 Stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan dan C&C terowongan) <i>(2 underground stations, drilling of tunnels and tunnel C&C)</i> |
| CP 202 | Harmoni – Glodok (3 Stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan) <i>(3 underground stations, drilling of tunnel)</i> |
| CP 203 | Glodok – Kota (2 Stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan dan C&C terowongan) <i>(2 underground stations, drilling of tunnels and tunnel C&C)</i> |
| CP 204* | Depo Fase 2 (Transisi stasiun bawah tanah ke stasiun permukaan, stasiun dan depot) <i>Depot Phase 2 (Transition from the underground station to at-ground station, station and depot)</i> |
| CP 205 | Sistem perkeretaapian dan pekerjaan rel <i>Railway system and rail works</i> |
| CP 206 | Pengadaan kereta <i>Train procurement</i> |
| CP 207 | AFC Sistem <i>AFC System</i> |

Keterangan: *CP 204 dialihkan ke Fase 2B
Remarks: *CP 204 is shifted to Phase 2B

Akumulasi Perkembangan Konstruksi

Accumulation of Construction Development

| Kontraktor <i>Contractor</i> | Paket Kontrak <i>Contract Package</i> | Persentase Bobot Pekerjaan <i>Percentage of Construction Weight (%)</i> | Perkembangan Development | | | Realisasi Per Desember 2020 <i>Realisation as of December 2020 (%)</i> |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | Rencana Plan (%) | Aktual Actual (%) | Deviasi Deviation (%) | |
| SAJV | CP 201 | 23,82 | 9,00 | 9,81 | 0,81 | 9,81 |
| TBA | CP 202 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TBA | CP 203 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TBA | CP 205 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TBA | CP 206 | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TBA | CP 207 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Keseluruhan Fase 2A <i>Total Phase 2A</i> | | 100 | 2,14 | 2,34 | 0,19 | 2,34 |

Keterangan Remarks:
SAJV: Shimizu Corporation – Adhi Karya Joint Venture
TBA: Dalam proses pengadaan *In procurement process*

Bentuk pekerjaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang telah dilaksanakan hingga akhir periode pelaporan, antara lain:

- *Utility Test Pit* pada Stasiun Thamrin telah dilaksanakan pada 24 titik dan pada Stasiun Monas telah dilaksanakan pada 20 titik;
- Sebagai bagian dari peningkatan pada proses pelaksanaan relokasi utilitas pada pembangunan MRT Fase 2, telah dilakukan beberapa *advance utility relocation*, yaitu kabel PLN, FO Telkom, MNC dan Pgascom sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Hal ini menyebabkan proses pembangunan stasiun MRT berjalan lebih lancar;
- *Archaeological Test Pit* telah selesai dilaksanakan pada 7 (tujuh) titik;
- Pembongkaran jembatan penyeberangan Bank Indonesia telah selesai dilaksanakan pada 20 September 2020;
- Relokasi Halte Bus TransJakarta;
- Pembangunan kembali kantor Polisi Subsektor Medan Merdeka Barat. Proses relokasi Kantor Polisi Subsektor Medan Merdeka Barat sedang berlangsung dengan target selesai pada Maret 2021.

Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di Jalan MH Thamrin yang mengubah komposisi jalur kendaraan dari 5 lajur pribadi dan 1 lajur TransJakarta menjadi 4 lajur kendaraan pribadi dan 1 lajur kendaraan pribadi *mixed traffic*.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam pekerjaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A adalah keberadaan pohon di lokasi proyek. Perseroan berkomitmen melakukan relokasi pohon dan penggantian pohon terdampak. Penanaman pohon telah dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) di beberapa lokasi, di antaranya:

1. Thamrin: Telah dilakukan pemindahan 101 pohon dan pemotongan 285 pohon. Selain itu, penanaman kembali pohon di area Srengseng sejumlah 1.433 pohon yang berdiameter antara 10-15 cm telah selesai dan diserahkan ke Dinas Pertamanan dan Kehutanan pada tanggal 25 September 2020.
2. Monas: Telah dilakukan pemotongan/pemindahan sejumlah 359 pohon. Selain itu, telah dilakukan penanaman pohon pengganti sejumlah 182/195 pohon di area Monas. Jenis pohon yang ditanam di area Monas memiliki spesifikasi khusus, yaitu pohon dengan diameter minimum 40 cm sesuai keputusan Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

The Phase 2A Construction works of MRT Jakarta that have been carried out as of the end of the reporting period include:

- *Utility Test Pit at Thamrin Station has been carried out in 24 points and in Monas Station at 20 points;*
- *As a part of utility relocation process improvement in Phase 2 MRT construction, various advanced utility relocations have been carried out, namely for PLN cables, Telkom FO, MNC, and Pgascom before the physical construction process. It caused the MRT station construction process to be more seamless;*
- *Archeological Test Pit has been completed at 7 points;*
- *Demolition of Bank Indonesia footbridge has been completed on September 20, 2020;*
- *Relocation of TransJakarta Bus Stop;*
- *Reconstruction of Police Office at Medan Merdeka Barat Sub-sector. The relocation process of Medan Merdeka Barat Sub-sector Police Office is being carried out and the completion target is March 2021.*

Implementation of traffic engineering management at Jalan MH Thamrin that shifted the composition of 5 lanes for private vehicles and 1 lane for TransJakarta to be 4 lanes for private vehicles and 1 lane for mixed traffic private vehicles.

Other matters of interest regarding the Phase 2A construction of MRT Jakarta is the presence of trees in project areas. The Corporation is committed to relocate and replace the impacted trees. The replanting has been carried out by the Corporation in various locations, such as:

1. *Thamrin: Relocation of 101 trees and cutting of 285 trees. Also, replantation of 1,433 trees with diameters of 10-15 cm in the Srengseng Area has been carried out and handed over to the Department of Park and Forestry on September 25, 2020.*
2. *Monas: Cutting/relocation of 359 trees. Also, replacement tree replanting of 182/195 trees in the Monas area has been carried out. The type of trees planted in the Monas area has a special specification, i.e., trees with diameters of at least 40 cm following the Decree of the Head of the Department of Park of DKI Jakarta.*

Jasa Konsultasi (CMCS Fase 2)

Pada proyek MRT Jakarta Fase 2A, telah dilakukan proses pengadaan untuk Jasa Konsultasi pada Proyek MRT Jakarta Fase 2A dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- Manajemen dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- Memfasilitasi implementasi dari *Environmental Management Plan (EMP)*, *Environmental Monitoring Plan (EMoP)* and *Resettlement Action Plan (RAP)*;
- Transfer pengetahuan dan teknologi.

Proses pengadaan untuk Jasa Konsultasi (CMCS Fase 2) telah selesai dilakukan dengan menetapkan OCG-JPCN (Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd, Pacific Consultants Co., Ltd, Chodai Co., Ltd., Nippon Koei Co., Ltd. and Associations) sebagai pemenang tender untuk Jasa Konsultasi (CMCS Fase 2). Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada 29 April 2020, dan Konsultan telah mulai bekerja pada 9 Juni 2020. Masa kerja Jasa Konsultasi adalah selama 58 Bulan dan 24 Bulan untuk masa DLP (*Defect Liability Period*). Sampai dengan akhir tahun 2020, telah dilakukan mobilisasi personel oleh Konsultan sejumlah 73 personel yang terdiri dari 14 personel Pro A, 26 personel Pro B, 9 personil Pro C, dan 24 personel *supporting staff*.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota)

MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) terdiri dari 7 (tujuh) stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer. Pekerjaan konstruksi dibagi ke dalam beberapa paket kontrak, yaitu:

- CP 201 untuk pekerjaan konstruksi jalur bawah tanah sepanjang 2,7 km dari Bundaran HI – Harmoni, serta konstruksi Stasiun Thamrin dan Monas;
- CP 202 - 205A untuk pekerjaan konstruksi jalur bawah tanah sepanjang 1,8 km dari Harmoni – Mangga Besar, serta konstruksi Stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga besar dengan jalur sepanjang 1,8 km. Selain itu, pada paket pekerjaan ini akan dilakukan konstruksi sistem perkeretaapian dari Bundaran HI – Mangga Besar;
- CP 203 untuk pekerjaan konstruksi jalur bawah tanah sepanjang 1,3 km, serta konstruksi Stasiun Glodok dan Kota serta jalur sepanjang 1,3 km;
- CP 206 untuk pengadaan kereta (*rolling stock*);
- CP 207 untuk pekerjaan *Automatic Fare Collection (AFC)*;
- CP 208 untuk pekerjaan konstruksi sistem perkeretaapian dari Mangga Besar – Kota.

Consultancy Service (Phase 2 CMCS)

For Phase 2A construction of MRT Jakarta, the procurement process for Consultancy Service for Phase 2A of the MRT Jakarta project has been carried out for the scope of works as follows:

- *Construction management and supervision;*
- *Facilitation of the implementation of Environmental Management Plan (EMP), Environmental Monitoring Plan (EMoP), and Resettlement Action Plan (RAP);*
- *Knowledge and technology transfer.*

The procurement process for Consultancy Service (Phase 2 CMCS) has been carried out by appointing OCG-JPCN (Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd, Pacific Consultants Co., Ltd, Chodai Co., Ltd., Nippon Koei Co., Ltd. And Associations and process) as the tender winner for Consultancy Service (Phase 2 CMCS). The contract signing has been carried out on April 29, 2020, and the Consultants have commenced their work on June 9, 2020. The tenure for the Consultancy Service is running for 58 months and 24 months of DLP (Defect Liability Period). As of the end of 2020, personnel mobilisation by the Consultants has been carried out for 73 personnel, consisting of 14 Pro A personnel, 26 Pro B personnel, 9 Pro C personnel, and 24 supporting personnel.

Phase 2A Construction of MRT Jakarta (Bundaran HI – Kota)

Phase 2A MRT Jakarta Bundaran HI – Kota consists of 7 (seven) underground stations (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, and Kota) with the total length of 5.8 kilometers. The construction work consists of several contract packages as follows:

- *CP 201 for the construction of underground line of 2.7 km from Bundaran HI to Harmoni, and construction of Thamrin Station and Monas station;*
- *CP 202 - 205A for the construction of underground line of 1.8 km from Harmoni to Mangga Besar, and construction of Harmoni Station, Sawah Besar Station, and Mangga Besar Station with 1.8 km of track. In addition, this contract package also carries out the construction of railway system from Bundaran HI to Mangga Besar;*
- *CP 203 for the construction of underground line of 1.3 km, and construction of Glodok Station and Kota Station with 1.3 km of track;*
- *CP 206 for rolling stock procurement;*
- *CP 207 for Automatic Fare Collection (AFC) works;*
- *CP 208 for the construction of the railway system from Mangga Besar to Kota.*



Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan MRT Fase 2A (Bundaran HI - Kota) diantaranya adalah pembagian target penyelesaian konstruksi menjadi 2 segmen, yaitu Segmen-1 (Bundaran HI - Harmoni) pada 2025 dan Segmen-2 (Harmoni - Kota) pada 2027. Perpanjangan periode pengadaan dilakukan untuk paket CP 202 (Paket Sipil Harmoni – Mangga Besar), CP 203 (Paket Sipil Mangga Besar – Kota), serta CP 205 (Paket Railway System Bundaran HI – Kota) sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pengadaan Paket CP 202 dan paket CP 203 telah dilakukan sejak Agustus 2019 dan dinyatakan gagal pada 4 November 2019 akibat tidak adanya pemasukan penawaran. Pada Februari 2020, pengadaan ulang paket CP 202 dan paket CP 203 dilakukan, di mana Perseroan melakukan evaluasi pada dokumen penawaran untuk mengurangi risiko konstruksi antara lain penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran, penambahan durasi proyek, serta mengklarifikasi ketentuan teknis di dalam dokumen penawaran sesuai dengan hasil serangkaian *Market Hearing* bersama calon peserta lelang potensial. Sebagai akibat pandemi COVID-19, perpanjangan periode pengadaan kembali dilakukan pada bulan Mei 2020. Meskipun demikian, kegagalan pengadaan paket CP 202 tetap terjadi pada 6 Juli 2020.

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan pada proses pengadaan CP 205 yang dimulai pada Februari 2020. Pada bulan Juli dan Agustus 2020 telah dilakukan 2 kali perpanjangan periode penawaran akibat ketidakpastian kondisi akibat COVID-19. Di samping itu, dilakukan juga

The implementation of Phase 2A MRT procurement process (Bundaran HI - Kota) is carried out by distributing the target of construction completion into 2 segments, namely Segment-1 (Bundaran HI - Harmoni) to be completed in 2025 and Segment-2 (Harmoni - Kota) in 2027. The procurement period is extended for CP 202 (Civil Package for Harmoni - Mangga Besar), CP 203 (Civil Package for Mangga Besar - Kota), and CP 205 (Railway System Package for Bundaran HI - Kota) due to the impacts of the COVID-19 pandemic.

The procurement for CP 202 and CP 203 has been carried out since August 2019 that was declared to fail on November 4, 2019, due to the lack of offer. In February 2020, the procurement for CP 202 and CP 203 was carried out once more, and the Corporation evaluated the offer documents to reduce construction risks by extending the time to prepare offer documents, extending project duration, and clarifying technical terms of the offer documents in line with the Market Hearing processes with the potential tender participants. Due to the pandemic, the procurement period extension was carried out again in May 2020. However, procurement for CP 202 failed again on July 6, 2020.

The COVID-19 pandemic also impacted the procurement for CP 205 that was started in February 2020. In July and August 2020, the offer period extension has been carried out twice due to the unsure condition because of the pandemic. Also, an extension was carried out due to several

perpanjangan akibat beberapa isu teknis atas permohonan peserta lelang, sehingga batas waktu pemasukan penawaran ditetapkan pada 26 Oktober 2020. Meskipun telah dilakukan serangkaian perpanjangan waktu pemasukan penawaran, pada tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada penawaran yang masuk, sehingga pengadaan CP 205 dinyatakan gagal.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia meminta atensi dan dukungan Pemerintah Jepang agar mendorong Kontraktor yang berkompeten untuk berpartisipasi pada pengadaan MRT Fase 2 tersebut.

Sebagai solusinya, Pemerintah Jepang menyampaikan usulan perubahan skema pengadaan menjadi Penunjukan Langsung (*Direct Contracting*), yang mengkombinasikan paket pekerjaan sipil dan sistem perkeretaapian dari Bundaran HI - Mangga Besar dengan nama paket kontrak CP 202 - 205A kepada SAJV – MOC2 Consortium sebagai kandidat kontraktor. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyetujui usulan tersebut atas dasar pertimbangan target waktu penyelesaian Segmen-1 (Bundaran HI - Harmoni) pada 2025 dan Segmen-2 (Harmoni - Kota) pada 2027. Atas perubahan ini, persetujuan ini dicatat pada revisi *Minutes of Discussion (MOD)* antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan JICA yang telah ditandatangani pada 22 Desember 2020. Hingga akhir periode pelaporan, proses persiapan pengadaan untuk *Direct Contracting* CP 202 – 205A sedang dilakukan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya peminat pada pengadaan sarana kereta (CP 206), dimana telah dilaksanakan *market sounding* terhadap rencana pengadaan sarana kereta MRT (*rolling stock*) sebanyak 7 (tujuh) rangkaian untuk MRT Jakarta Fase 2 sejak Agustus 2020. Namun, tidak ada pihak kontraktor dari Jepang yang menyatakan ketertarikan karena jumlah pengadaan 7 (tujuh) *trainsets* yang dinilai terlalu kecil. Pelibatan kontraktor dari Jepang menjadi salah satu syarat sesuai dengan skema perjanjian *Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan)* yang diberikan Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA). Hingga akhir periode pelaporan, upaya yang dilakukan oleh Perseroan terhadap pengadaan sarana kereta MRT Jakarta, yaitu mendorong Pemerintah Jepang untuk mengupayakan industri manufaktur dan mengadakan *market sounding* lanjutan pada Oktober 2020 dengan bantuan pendekatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Hasil yang diperoleh berupa respon positif dari 3 (tiga) manufaktur Jepang terhadap rencana penggabungan pengadaan kereta MRT Fase 2A dan Fase 2B menjadi 14 rangkaian kereta.

technical issues at the request of auction participants, so that the deadline for submitting bids was set on October 26, 2020. Even though a series of time extensions for bid submissions had been carried out, on October 26, 2020, there were no bids submitted, so the CP 205 was declared failed.

As a follow up of the condition, the Government of Indonesia requested attention and support from the Government of Japan to encourage a competent Contractor to participate in the procurement of Phase 2 MRT.

As a solution, the Government of Japan proposed to change the procurement scheme to be Direct Contracting, which combines the civil works and railway system package from Bundaran HI – Mangga Besar, known as contract package CP 202 – 205A with SAJV – MOC2 Consortium as a contractor candidate. Regarding this matter, the Government of Indonesia approves the suggestion considering the timeline target to complete Segment 1 (Bundaran HI – Harmoni) and Segment 2 (Harmoni – Kota). This change was stated in the revision of the Minutes of Discussion (MOD) between the National Government of the Republic of Indonesia, the Government of DKI Jakarta Province, the Corporation, and JICA that was signed on December 22, 2020. As of the end of the reporting period, the procurement preparation process has been carried out for Direct Contracting CP 202 – 205A.

Another challenge is the lack of parties interested to participate in the train facility procurement (CP 206), and market sounding has been carried out since August 2020 concerning the plan of MRT train facility procurement of 7 (seven) rolling stocks for Phase 2 MRT Jakarta. However, there was no Japanese contractor that expressed their interest in the project as the procurement for 7 trainsets is considered to be too small. The involvement of Japanese contractors is a requirement following the agreement scheme Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) granted by Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA). As of the end of the reporting period, efforts carried out by the Corporation concerning MRT Jakarta train facility procurement includes encouraging the Government of Japan to drive the manufacturing industry and carry out further market sounding in October 2020 with approach support from the Government of Indonesia and the Government of Japan. It resulted in a positive response where 3 (Three) Japanese manufactures were obtained with the plan to merge the rolling stock procurement for Phase 2A and Phase 2B to be 14 trains.

Berbagai tantangan dalam rangkaian pelaksanaan proyek MRT Fase 2 tersebut tidak meredam semangat dan upaya maksimal Perseroan untuk menjaga target penyelesaian proyek MRT Jakarta secara tepat waktu. Hal ini, sejalan dengan inisiatif Perseroan untuk mengakselerasi pembangunan dan pengembangan jalur MRT dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang lebih baik agar masyarakat yang telah menantikan operasional MRT Fase 2 dapat segera menikmati kemudahan transportasi publik terintegrasi seperti yang telah tercapai sebelumnya pada MRT Fase 1.

Hingga Desember 2020, perkembangan status untuk masing-masing paket kontrak adalah sebagai berikut:

- Pada paket pekerjaan CP 201 progres fisik telah mencapai 9,80%, meliputi pelebaran jalan untuk pengalihan arus lalu lintas hingga pembangunan halte TransJakarta sementara, serta pekerjaan relokasi utilitas.
- Pada paket pekerjaan CP 202 - 205A, proses persiapan pengadaan untuk *Direct Contracting* sedang dilakukan.
- Pada paket pekerjaan CP 203, Evaluasi Teknis dan Finansial untuk dua peserta tender telah dilaksanakan dan JICA Concurrence diperoleh pada 29 Desember 2020.
- Pada paket pekerjaan CP 206, sedang dilakukan persiapan dokumen tender sehubungan dengan rencana penggabungan pengadaan kereta MRT Fase 2A dan Fase 2B menjadi 14 rangkaian kereta.
- Pada paket pekerjaan CP 207, hingga akhir masa pelaporan, sedang dilaksanakan penyesuaian dokumen pengadaan terhadap konsep dan *roadmap* dari Perusahaan EFC (PT JakLingko Indonesia) terkait sistem *ticketing*.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2B

MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat) merupakan rute ekstensi MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota) menuju lahan depo potensial di Ancol Barat. Kebutuhan akan proyek MRT Fase 2B ini berangkat dari tidak dapat dibangunnya depo MRT Fase 2 di lahan Kampung Bandan sesuai dengan studi *Preparatory Survey for Jakarta MRT North-South Line Extension Project* yang dilakukan pada tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya konflik kepemilikan lahan, serta rencana pembangunan lain pada lahan yang dimiliki oleh PT KAI tersebut. Sementara, depo MRT baru tetap perlu dibangun untuk menampung tambahan rangkaian kereta yang dibutuhkan untuk melayani peningkatan jumlah pengguna jasa di masa depan.

Various challenges in the implementation of the Phase 2 MRT project did not discourage and reduce the maximum effort of the Corporation in maintaining the target of timely completion of the MRT Jakarta project. It is in line with the initiative of the Corporation to accelerate the construction and development of MRT tracks to provide better public service so that the public who has been waiting for the operations of Phase 2 MRT can benefit from the ease of integrated public transportation as achieved in Phase 1 MRT.

As of December 2020, the status development for each contract package is as follows:

- *For the work package CP 201, the physical progress has reached 9.80% covering road widening for traffic engineering until the construction of temporary TransJakarta stop, and utility relocation works.*
- *For the work package CP 202 - 205A, the procurement preparation process for Direct Contracting is being carried out.*
- *For work package CP 203, Technical and Financial Evaluation for two tender participants has been carried out and JICA Concurrence was obtained on December 29, 2020.*
- *For work package CP 206, tender document preparation is carried concerning the plan to merge the rolling stock procurement for Phase 2A and Phase 2B of 14 trainsets.*
- *For work package CP 207, as of the end of the reporting period, offer document adjustment is carried out to the concept and roadmap from EFC Corporation (PT JakLingko Indonesia) concerning the ticketing system.*

Phase 2B Construction of MRT Jakarta

Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat) is an extended route of Phase 2A MRT (Bundaran HI – Kota) to a potential area for the depot at Ancol Barat. Phase 2B of the MRT project is required as Phase 2 MRT depot could not be constructed at Kampung Bandan area, following the results of the Preparatory Survey for Jakarta MRT North-South Line Extension Project in 2009. It is due to conflicts over land ownership and other construction plans at the site that belongs to PT KAI. Meanwhile, a new MRT depot must be constructed to contain the additional trains required to serve the increasing passengers in the future.

Pada tanggal 17 Mei 2019, Perseroan memperoleh Persetujuan Prinsip Lokasi Depo MRT Fase 2 dari Gubernur DKI Jakarta, di mana di dalamnya terindikasi trase MRT Fase 2B serta depo yang berlokasi di lahan Ancol Barat. Kemudian, berdasarkan penugasan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 26 Juli 2019, MRT Jakarta menyusun kajian *Feasibility Study (FS) MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat)* yang diselesaikan pada Mei 2020.

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan telah melaporkan hasil FS MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat) kepada instansi terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta JICA untuk selanjutnya dapat dimulai proses *Fact Finding Mission* dan *Appraisal* yang ditargetkan terlaksana pada kuartal 1 Tahun 2021. Sebagai tindak lanjut pelaporan tersebut, hingga akhir periode pelaporan, proses persetujuan trase dan penetapan lokasi untuk MRT Fase 2B (Kota - Ancol Barat) sedang berlangsung di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Trase MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat) direncanakan memiliki panjang sekitar ± 6.0 km dan terdiri dari 2 (dua) stasiun bawah tanah (Stasiun Mangga Dua dan Stasiun Ancol Marina), serta satu stasiun dan satu depo *elevated* (Stasiun dan Depo Ancol Barat). Saat ini, Perseroan sedang melakukan koordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN untuk merumuskan strategi pengadaan tanah untuk pembangunan jalur, stasiun dan Depo MRT Fase 2B.

Pendanaan MRT Jakarta Fase 2B direncanakan menggunakan JICA ODA Loan dengan pertimbangan besarnya biaya konstruksi serta penyeragaman teknologi pada trase MRT jalur Utara-Selatan. Menindaklanjuti hal ini, Pembangunan Proyek MRT Jakarta Utara-Selatan Fase 2 telah tercatat dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/*Bluebook* Tahun 2020-2024. Selanjutnya, sebagai prasyarat pengajuan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri/*Greenbook* Tahun 2021, Perseroan telah menyiapkan *Readiness Criteria* Pembangunan Proyek MRT Jakarta Utara-Selatan Fase 2 sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2011.

On May 17, 2019, the Corporation obtained Principle Approval of the Location for Phase 2 MRT Depot from the Governor of DKI Jakarta, in which it is indicated that the Phase 2B MRT track and depot is located at an area in Ancol Barat. Then, in compliance with the appointment from the Governor of DKI Jakarta dated July 26, 2019, the Corporation conducted a Feasibility Study (FS) for Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat) that was completed in May 2020.

As of the end of the reporting period, the Corporation has reported the results of FS for Phase 2B MRT to the relevant institution, such as the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Ministry of Transportation, Ministry of Finance, the Government of DKI Jakarta Province, and JICA to carry out Fact-Finding Mission and Appraisal that is aimed to be carried out within the first quarter of 2021. To follow up the report, the track approval and location determination process for Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat) is being conducted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Government of DKI Jakarta.

The track of Phase 2B MRT (Kota – Ancol Barat) is planned to span for ± 6.0 km, consisting of 2 (two) underground stations (Mangga Dua Station and Ancol Marina Station) and one elevated station and depot (Ancol Barat Station and Depot). Currently, the Corporation is coordinating with the Government of DKI Jakarta and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to formulate land acquisition strategies for the construction of tracks, stations, and Depot of MRT in Phase 2B.

*Phase 2B MRT Jakarta financing is planned to utilise JICA ODA Loan considering the amount of construction cost and technological alignment for the North-South MRT track. As a follow-up, the Phase 2 Construction Project for North-South MRT Jakarta has been recorded in the List of Medium-Term Foreign Loan Plan (DRPLN-JM)/*Bluebook* for 2020-2024. Then, as a requirement to propose the List of Foreign Loan Plans/*Greenbook* of 2021, the Corporation has prepared *Readiness Criteria* of Phase 2 Construction Project of North-South MRT Jakarta following the Regulation of the Minister of National Development Planning No. 4 Year 2011.*

Perencanaan Pembangunan MRT Fase 3

Phase 3 MRT Development Planning

Berbeda dengan perencanaan pembangunan MRT Fase 1 dan 2 yang melayani pergerakan pengguna jasa di dalam Provinsi DKI Jakarta, MRT Fase 3 merupakan koridor MRT yang membentang Timur ke Barat direncanakan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat dengan Balaraja, Banten melalui kawasan DKI Jakarta sepanjang 41 kilometer. Dikarenakan melalui 3 (tiga) Provinsi, maka perencanaan MRT Fase 3 dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam dokumen *Feasibility Study* pada tahun 2013, perencanaan MRT Fase 3 akan terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni tahap 1 merupakan Koridor dalam wilayah DKI Jakarta yang menghubungkan Kalideres hingga Ujung Menteng, selanjutnya tahap 2 merupakan Koridor lanjutan dari Kalideres hingga Balaraja, Banten dan Ujung Menteng hingga Cikarang, Jawa Barat.

Pada tahun 2019, Perseroan mendampingi Kementerian Perhubungan memulai proses pengadaan Konsultan dengan lingkup pekerjaan memperbaharui analisa *Feasibility Study* 2013, *Basic Engineering Design* (BED) dan mengawal proses tender konstruksi. Proses pengadaan konsultan tersebut berlangsung sejak 2019, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka terdapat penyesuaian pada durasi pengadaan, sehingga akhirnya ditetapkan pemenang pada akhir 2020 lalu.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Perhubungan membentuk tim kerja yang bertugas mendampingi penyusunan *Basic Engineering Design* MRT Fase 3 (Cikarang - Balaraja) Tahap 1 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 200 Tahun 2019. Tim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat yang mewakili seluruh instansi terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga PT MRT Jakarta (Perseroda).

Pelaksanaan jasa konsultasi *Basic Engineering Design* MRT Fase 3 (Cikarang – Balaraja) tahap 1 Koordinasi akan mulai berkoordinasi secara intensif pada awal 2021.

In contrast with Phase 1 and 2 MRT construction planning that serves the passengers in DKI Jakarta province, Phase 3 MRT is an MRT corridor that spans from the East to West, that is planned to connect Cikarang, West Java to Balaraja, Banten through DKI Jakarta of 41 kilometres. As it spans across three Provinces, the planning for Phase 3 MRT is coordinated by the Ministry of Transportation, Directorate General of Railway.

According to the Feasibility Study documents of 2013, Phase 3 MRT planning consists of two stages. The first stage covers the Corridor within DKI Jakarta that connects Kalideres to Ujung Menteng. Then, the second stage covers the extension Corridor from Kalideres to Balaraja, Banten, and from Ujung Menteng to Cikarang, West Java.

In 2019, the Corporation assisted the Ministry of Transportation in carrying out a Consultant procurement process whose scope of work covers updating the analysis of the 2013 Feasibility Study, Basic Engineering Design (BED), and assisting the construction tender process. The consultant procurement process has been carried out since 2019, but due to the pandemic, the procurement duration was extended, and the winner was appointed at the end of 2020.

Therefore, the Ministry of Transportation established a working team to assist the development of Basic Engineering Design for Stage 1 Phase 3 MRT (Cikarang – Balaraja) through the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KM 200 Year 2019. The team consists of Steering Team, Implementation Team, Work Team, and Secretariat that represent all relevant institution, i.e., the National Government, the Regional Government, and the Corporation.

The consultation service implementation for Basic Engineering Design Coordination of Stage 1 Phase 3 MRT (Cikarang – Balaraja) will start to coordinate intensely starting at the beginning of 2021.

Perencanaan Pembangunan MRT Fase 4

Phase 4 MRT Development Planning

Pengembangan MRT Fase 4 berangkat dari Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang menunjukkan visi Jaringan Jalan Rel Tahun 2030, dan diterjemahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jaringan *Mass Rapid Transit* sepanjang 277 km pada tahun 2030, di luar jalur *commuter line*, LRT, dan BRT. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan dan Pemprov DKI telah mengidentifikasi 10 koridor angkutan cepat massal terintegrasi dalam Rencana Pengembangan Jaringan Perkeretaapian (RPJP) DKI Jakarta pada tahun 2019 yang selaras dengan studi Jabodetabek *Urban Transportation Policy Integration* (JUTPI) Tahap 2 yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019.

Sejak tahun 2019, Perseroan telah memulai *Jakarta MRT East-West Corridor Study* dengan 3 opsi jalur, yaitu jalur Soekarno Hatta International Airport - Jakarta International Stadium (jalur Utara, MRT08) sepanjang 25 km, jalur Joglo - Pondok Gede (jalur Tengah, MRT03) sepanjang 33 km, dan jalur Taman Mini Indonesia Indah - Fatmawati (jalur Selatan, MRT06) sepanjang 12,31 km.

Dari pilihan koridor yang ada, koridor terpilih untuk dilaksanakan kajian dan prioritas pengembangan adalah koridor TMII - Fatmawati sepanjang 12,31 km yang direncanakan akan memiliki 7 (tujuh) stasiun bawah tanah, 3 stasiun layang, dan 1 depo, serta terintegrasi dengan koridor MRT Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI), LRT Jabodebek, KRL, dan TransJakarta. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan pendalaman kajian untuk menganalisis kelayakan pembangunan MRT Fase 4 baik secara hukum, teknis, lingkungan, sosial, kelembagaan, ekonomi, dan keuangan.

Phase 4 MRT Development is based on Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi Transportation Masterplan 2018–2029 which embodies the vision of the 2030 Railway Network that was stipulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 Year 2018.

To support the vision, the Government of DKI Jakarta Province targets the operations of the Mass Rapid Transit network of 277 km in 2030, excluding the commuter line, LRT, and BRT. As a part of such effort, the Corporation and the Government of DKI Jakarta Province have identified 10 corridors for integrated mass rapid transit in the Railway Network Development Plan (RPJP) of DKI Jakarta in 2019, which aligns with the study of Phase 2 of Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) developed by the Coordinating Ministry of Economic Affairs in 2019.

Since 2019, the Corporation has started Jakarta MRT East-West Corridor Study with 3 options of a track, i.e., Soekarno Hatta International Airport – Jakarta International Stadium or North track (MRT 08) which spans 25 km, Joglo – Pondok Gede or Central track (MRT 03) of 33 km, and Taman Mini Indonesia Indah – Fatmawati or South track (MRT 06) of 12.31 km.

Based on the available options, the selected corridor to carry out study and development priority is TMII – Fatmawati corridor of 12.31 km, which is planned to operate 7 underground stations, 3 elevated stations, and 1 depot, and to be integrated with Phase 1 MRT corridor (Lebak Bulus – Bundaran HI), Jabodebek LRT, KRL, and TransJakarta. As a follow-up, a deep-dive study will be carried out to analyze the feasibility of Phase 4 MRT construction in terms of legal, technical, environmental, social, institutional, economic, and financial aspects.

Kinerja Pengoperasian Prasarana

Infrastructure Operational Performance

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan MRT Jakarta Fase 1 yang diikuti pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana pada rute Lebak Bulus – Bundaran HI dengan 13 stasiun. Secara umum, Perseroan telah dapat mengoperasikan prasarana dengan baik. Seluruh prasarana dioperasikan setiap hari dan tidak ada kegiatan operasional kereta maupun stasiun yang dihentikan dalam jangka waktu lama. Namun Perseroan melakukan penyesuaian jam operasional pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa pandemi COVID-19.

As of the end of the reporting period, the Corporation has completed the Phase 1 construction of MRT Jakarta followed by infrastructure operations, maintenance, and management for Lebak Bulus – Bundaran HI route with 13 stations. In general, the Corporation has been able to operate the infrastructure well. All infrastructures are operating daily and there is no long-term halt of operational activities of trains and stations. However, the Corporation employs adjustment to the operating hours during the Large-Scale Social Restriction (PSBB) during the COVID-19 Pandemic.

Penyesuaian Waktu Operasional Kereta MRT Pada Periode Tertentu
Adjustment to the Operational Hours of MRT Trains during Certain Periods

| Bulan Month | Periode Period | Jam Operasi Operation Hours | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| April April | 1-9 April April 2020 | 06:00-20:00 | |
| | 10 - 19 April April 2020 | 06:00-18:00 | |
| | 20-30 April April 2020 | 06:00-18:00 | |
| Mei May | 1-31 Mei May 2020 | 06:00-18:00 | |
| | 1-4 Juni June 2020 | 06:00-18:00 | |
| Juni June | 5 Juni June 2020 | 05:00-21:00 | |
| | 6 - 30 Juni June 2020 | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-21:00 (Weekdays) | |
| Juli July | 1-31 Juli July 2020 | 05:00-21:00 (Weekdays) | |
| | | 05:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-22:00 (Weekdays) | |
| Agustus August | 1 - 31 Agustus August 2020 | 05:00-22:00 (Weekdays) | |
| | | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-20:00 | |
| | | 05:00-19:00 | |
| September September | 1 - 16 September September 2020 | 05:00-21:00 (Weekdays) | |
| | | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-20:00 | |
| Oktober October | 17-20 September September 2020 | 05:00-19:00 | |
| | | 1 - 11 Oktober October 2020 | 05:00-19:00 |
| | | 12 - 31 Oktober October 2020 | 05:00-21:00 (Weekdays) |
| November November | 1 - 30 November November 2020 | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-21:00 (Weekdays) | |
| | | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| Desember December | 1-17 Desember December 2020 | 05:00-21:00 (Weekdays) | |
| | | 06:00-20:00 (Weekend) | |
| | | 05:00-20:00 (Weekdays) | |
| | 18-31 Desember December 2020 | 06:00-20:00 (Weekend) | |

Operasional setiap stasiun dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk pos kesehatan. Selama tahun 2020, ada 914 jumlah kunjungan sakit ke pos kesehatan, baik oleh pengguna jasa, staf, vendor maupun tenant.

Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan fasilitas pengguna jasa di Stasiun selama pandemi COVID-19 dengan menambahkan *footswitch* pedal *button* di lift dan marka jarak aman berdiri antar pengguna jasa pada eskalator. Dengan menerapkan *footswitch* pedal *button* pada lift, pengguna jasa tidak perlu lagi menekan tombol lift menggunakan tangan, namun cukup menginjak *footswitch* pedal *button* yang tersedia baik di depan pintu masuk maupun di dalam lift. Sementara, marka jarak berdiri antar pengguna jasa yang aman sekitar 1 meter diletakkan di dalam eskalator.

Selama tahun 2020, Perseroan tidak pernah dihadapkan pada situasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pengguna jasa. Selama periode pelaporan, tercatat 173 kunjungan pengguna jasa ke klinik kesehatan, karena keluhan gangguan kesehatan. Seluruh kunjungan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan pertolongan pertama, sehingga pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan dan tidak ada yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang lain.

The operations at each station is supported by various supporting facilities, including health posts. In 2020, there were 914 sick visits to the health posts by passengers, staffs, vendors, and tenants.

Besides, the Corporation takes some efforts to improve the facility comfort and safety for the passengers in the Stations during the pandemic by adding a footswitch pedal button in elevators, and safe distance marking between passengers in escalators. By installing a footswitch pedal button in elevators, passengers are not required to push the elevator button by their hand, passengers have to step on the footswitch pedal button that is installed in front of and inside the elevators instead. Meanwhile, safe distance marking between standing passengers of approximately 1 meter is installed on the escalators.

In 2020, the Corporation did not face any situation that may threaten the safety and health of the passengers. During the reporting period, it was recorded that there were 173 visits to the health clinics due to health issues. All visits have been followed up by providing first aids, so that the passengers can carry on with their trip and none of them required further treatment at community health centres or other healthcare facilities.

Data Kunjungan Klinik & Pos Kesehatan 2020
Clinic & Health Post Visit Data in 2020

| Bulan Month | Pengguna Jasa Passenger | Vendor | Karyawan Employee | Total |
|------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|
| Januari January | 53 | 80 | 39 | 172 |
| Februari February | 50 | 65 | 46 | 161 |
| Maret March | 24 | 92 | 39 | 155 |
| April April | 7 | 33 | 9 | 49 |
| Mei May | 0 | 23 | 9 | 32 |
| Juni June | 6 | 43 | 16 | 65 |
| Juli July | 6 | 39 | 18 | 63 |
| Agustus August | 9 | 19 | 23 | 51 |
| September September | 7 | 14 | 17 | 38 |
| Oktober October | 6 | 48 | 12 | 66 |
| November November | 2 | 20 | 18 | 40 |
| Desember December | 3 | 9 | 10 | 22 |
| Total | 173 | 485 | 256 | 914 |

Kinerja Perawatan dan Pengusahaan Prasarana

Infrastructure Maintenance and Commercialisation Performance

Kinerja Perawatan Prasarana

Selama periode pelaporan, Perseroan juga melakukan pekerjaan perawatan dan pengusahaan prasarana. Secara keseluruhan, realisasi pelaksanaan pekerjaan perawatan telah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Infrastructure Maintenance Performance

During the reporting period, the Corporation has carried out infrastructure maintenance and commercialisation. In general, the realisation of infrastructure maintenance has fulfilled the determined target.

Target dan Realisasi Tablo Pemeliharaan

Target and Realisation of Maintenance Tableau

| Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Type of Maintenance Works | Volume Pekerjaan | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Target | Realisasi Realisation | Persentase Percentage (%) |
| Track and Civil Structure | 865 | 866 | 100 |
| Signal and Telecommunication | 1.295 | 1.295 | 100 |
| Power Maintenance | 10.125 | 10.134 | 100 |
| Depot & Workshop Equipment (DWE) | 1.287 | 1.287 | 100 |
| Pemeliharaan MEP MEP Maintenance | 2.655 | 2.655 | 100 |
| Station & Building Facilities Maintenance Department | 17.312 | 17.312 | 100 |



Pelaksanaan pekerjaan perawatan prasarana dilakukan oleh karyawan dengan dukungan kompetensi kecakapan dan sertifikasi. Perseroan merencanakan pelaksanaan diklat dan sertifikasi tenaga pemeriksaan dan perawatan. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2021 seluruh SDM telah memiliki sertifikasi.

The implementation of infrastructure maintenance works is carried out by skillfully competent and certified employees. The Corporation plans the implementation of education and training as well as certification programmes for the maintenance employees. Therefore, it is expected that in 2021 all employees have been certified.

Kecakapan dan Sertifikasi Skill and Certification

| Departemen Department | Jumlah SDM Pemeriksaan dan Perawatan Number of Maintenance Employees | Jumlah SDM Pemeriksaan dan Perawatan Tersertifikasi Number of Certified Maintenance Employees | Jumlah SDM Belum Tersertifikasi Number of Uncertified Employees |
|--|---|--|--|
| Rolling Stock Depot Maintenance | 29 | 24 | 5 |
| Rolling Stock Workshop Maintenance | 14 | 13 | 1 |
| Track and Civil Str. Maintenance | 17 | 13 | 4 |
| Power Maintenance | 21 | 18 | 3 |
| Signal & Telecommunication Maintenance | 19 | 14 | 5 |
| Total | 100 | 82 | 18 |

Pada periode pelaporan, Perseroan melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memastikan keamanan stasiun maupun fasilitas layanan dan pendukung aman dari potensi paparan virus COVID-19. Upaya yang dilakukan, yaitu penyemprotan disinfektan berkala.

During the reporting period, the Corporation took various mitigation efforts in facing the COVID-19 pandemic. It aims to ensure the safety of the stations and service facilities to be safe from the potential exposure to COVID-19. A measure taken is frequent disinfectant spraying.

Perseroan juga meningkatkan kinerja pengamanan aset dari aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah lokasi pada 8 Oktober 2020. Pengamanan dilakukan untuk menjaga aset Perseroan dari berbagai ancaman ataupun gangguan yang dapat berdampak pada keselamatan pengguna jasa dan operasional MRT. Beberapa langkah yang dilakukan Perseroan, di antaranya koordinasi dengan kepolisian (Polda Metro Jaya) dan TNI serta instansi pendukung lain, menyiapkan rencana penutupan akses beberapa stasiun bawah tanah, peningkatan patroli di *window time*, pengetatan pintu timur dan pembatasan tamu, serta penguatan tenaga keamanan tambahan di RSS dan transisi.

The Corporation also increased asset security performance against the demonstration that occurred on October 8, 2020, at various locations. The security is carried out to maintain the Corporation assets from various threats or disruptions that might impact the safety of passengers and MRT operations. The efforts taken by the Corporation include coordination with the national police (Greater Jakarta Metropolitan Regional police) and Indonesian National Armed Forces as well as other supporting institution to prepare access blockage plan for the various underground station, increase patrols during window time, tighten the east gate and limit guests, and leverage additional safety forces at RSS and transition.

Kinerja Perusahaan Prasarana

Pengusahaan prasarana menjadi salah satu strategi Perseroan meningkatkan pendapatan operasi. Sampai dengan akhir tahun 2020 Perseroan telah merealisasikan beberapa kegiatan pengusahaan prasarana. Informasi terkait hal ini lihat halaman 188 Laporan ini, pada bahasan Pendapatan Non-Tiket.

Infrastructure Commercialisation Performance

Infrastructure commercialisation is a strategy of the Corporation to increase operational revenue. As of the end of 2020, the Corporation has realised various infrastructure commercialisation activities. Information concerning this matter is presented on page 188 of this Report under the discussion of Non-Farebox Revenue.

Kinerja Pembangunan Sarana

Facility Development Performance



Permohonan atas persetujuan skema pengadaan sarana kereta MRT (*rolling stock*) telah diajukan Perseroan sejak Agustus 2019 kepada JICA. Pada Februari 2020, *market sounding* untuk rencana pengadaan 7 rangkaian kereta dilakukan namun tidak ada pihak kontraktor dari Jepang yang menyatakan ketertarikan.

Upaya yang telah dilakukan dimulai dari melakukan *market sounding* kedua pada periode 6 Juli hingga 13 Agustus terhadap 6 (enam) peserta penyedia kereta yang terdiri dari perusahaan manufaktur dan perusahaan *trading*. Pelibatan kontraktor dari Jepang menjadi salah satu syarat, sesuai skema perjanjian *Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan)* yang diberikan Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA).

Para penyedia kereta menyampaikan beberapa kendala dan pertimbangan, salah satunya adalah sebagai berikut:

- Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja rencana pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri.
- Permintaan kereta yang dinilai sedikit oleh penyedia kereta.
- Harga pengadaan agar lebih kompetitif dibandingkan Fase 1.
- Beberapa penyedia sedang mengikuti tender atau telah mempunyai komitmen untuk proyek lain.

The request for approval of the rolling stock procurement scheme has been proposed by the Corporation since August 2019 to JICA. In February 2020, the market sounding for a procurement plan of 7 trainsets was carried out, but there were no Japanese contractors that expressed their interest.

The Corporation carried out the second market sounding from July 6 until August 13 to 6 (six) participants of rolling stock providers, consisting of manufacturing corporations and trading corporations. The involvement of Japanese contractors is a requirement following the agreement scheme of Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) granted by Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA).

The rolling stock providers presented various obstacles and considerations, including:

- *The pandemic that impacted the work plan performance in Indonesia and abroad;*
- *Trainset request that is considered too small by providers.*
- *Procurement prices to be more competitive than Phase 1.*
- *Several providers are currently bidding or have committed to other projects.*

Melihat keadaan tersebut, Perseroan mengajukan permohonan permintaan asistensi dari JICA untuk melakukan pendekatan G2G (*Government to Government*) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang dimulai pada bulan September 2020. Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, pada bulan Oktober 2020 diadakan kembali *market sounding* lanjutan yang dihadiri oleh beberapa peserta vendor kereta yang memberikan respon positif terhadap rencana pengadaan penggabungan 14 rangkaian kereta untuk MRT Fase 2A dan Fase 2B. Sebanyak 7 (tujuh) kereta pertama akan direncanakan untuk didatangkan dan ditempatkan di Depo Lebak Bulus pada periode Fase 2A, sementara 7 (tujuh) kereta berikutnya akan didatangkan dan ditempatkan di Depo Ancol Barat setelah konstruksinya diselesaikan.

Berdasarkan hasil *market sounding* tersebut, pada bulan November diperoleh kesepakatan untuk merevisi rencana pengadaan rangkaian kereta pada MoD (*Minutes of Discussion*) menjadi 14 rangkaian untuk koridor Lebak Bulus – Ancol Barat, dimana rangkaian kereta akan didatangkan dalam dua tahap, yaitu Lebak Bulus – Kota dan Kota – Ancol Barat. Revisi MoD tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Transportasi, Bappenas, Pemerintah DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan JICA pada 22 Desember 2020. Hasil perencanaan ini menjadi dasar untuk melakukan proses tender CP206 pada tahun 2021.

Considering the situation, the Corporation proposed an assistance request proposal to JICA to carry out the G2G (Government-to-Government) approach between the Government of Indonesia and the Government of Japan started in September 2020. As a follow up of the request, in October 2020, further market sounding was carried out, participated by several participants of rolling stock vendors that provided positive responses to the procurement plan to merge 14 trainsets for Phase 2A and Phase 2B MRT. The 7 (seven) first trainsets are planned to be delivered and placed in Lebak Bulus Depot during Phase 2A period, while the remaining 7 (seven) trainsets will be delivered and placed in Ancol Barat Depot after the construction is completed.

Based on the results of market sounding, an agreement was reached in November to revise the rolling stock procurement plan in the MoD (Minutes of Discussion) to be 14 trainsets for Lebak Bulus – Ancol Barat corridor, and the delivery will be carried out in two phases, i.e., for Lebak Bulus – Kota and Kota – Ancol Barat. The MoD Revision was signed by the Minister of Finance, Minister of Transportation, National Development Planning Agency, the Government of DKI Jakarta, the Corporation, and JICA on December 22, 2020. The results of the planning become the basis of the tender process for CP206 in 2021.

Kinerja Pengoperasian Sarana

Facility Operational Performance



Pengguna Jasa di dalam Ratangga pada masa Covid-19
Passengers on board the Ratangga during the COVID-19 Pandemic

Secara umum kinerja pengoperasian sarana MRT Jakarta Fase 1 selama tahun 2020 berjalan dengan baik. Perseroan mengoperasikan kereta MRT setiap hari dan tidak ada penghentian operasi kereta MRT. Meskipun pada waktu tertentu, Perseroan melakukan penyesuaian operasi karena pemberlakuan PSBB maupun peristiwa unjuk rasa. Penyesuaian meliputi grafik perjalanan kereta (Gapeka), jumlah trip, jarak antar kereta (*headway*) dan jumlah kereta.

Selain itu, dalam memastikan kondisi sarana aman, nyaman, bersih serta mendukung kebijakan PSBB yang diatur oleh pemerintah, MRT Jakarta telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan pembatasan jumlah dan pengaturan posisi pengguna jasa di dalam kereta dengan melakukan pemasangan stiker, baik untuk lokasi duduk dan juga lokasi berdiri, dengan maksimum 68 pengguna jasa per kereta.
2. Melakukan pembersihan harian, mingguan dan bulanan secara rutin dengan menggunakan cairan disinfektan untuk seluruh bagian dalam kereta.
3. Menggunakan lampu Ultraviolet pada saat pencucian kereta bulanan.

In general, the facility operational performance of Phase 1 MRT Jakarta in 2020 was running well. The Corporation operates MRT trains everyday and there was no halt to the operations of MRT trains. However, during certain periods the Corporation had to adjust the operations to the implementation of PSBB and demonstration. The adjustment includes the Train Travel Chart (Gapeka), number of trips, headway, and number of trains.

Also, in ensuring the safe, comfortable and clean facility condition and in supporting PSBB policy as implemented by the Government, MRT Jakarta takes various efforts, including:

1. *Limiting the number of passengers and arranging the position of passengers inside the train by applying stickers, both for sitting and standing areas, with maximum passengers of 68 passengers per train.*
2. *Implementing daily, weekly, and monthly cleaning frequently by applying disinfectant liquid on all parts inside the train.*
3. *Utilising Ultraviolet lamp upon monthly train cleaning.*

Penyesuaian Waktu Operasional Kereta MRT Pada Periode Tertentu
Adjustment to the Operational Hours of MRT Trains during Certain Periods

| Bulan Month | Gapeka Train Travel Chart (Gapeka) | Jam Operasi Operation Hours | Jumlah Trip Number of Trips | Headway | Jumlah KA Number of Trains | Tanggal Implementasi Implementation Dates |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Januari January | Gapeka Weekend Weekend Travel Chart | 05.00- 00.00 | 219 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 1 - 31 Januari January 2020 |
| | Gapeka Weekday Weekday Travel Chart | | 285 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | |
| Februari February | Gapeka Weekend Weekend Travel Chart | 05.00- 00.00 | 219 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 1 - 31 Januari January 2020 |
| | Gapeka Weekday Weekday Travel Chart | | 285 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | |
| Maret March | Gapeka Weekend Weekend Travel Chart | 05.00- 00.00 | 219 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 1 - 31 Januari January 2020 |
| | Gapeka Weekday Weekday Travel Chart | | 285 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | |

| Bulan Month | Gapeka Train Travel Chart (Gapeka) | Jam Operasi Operation Hours | Jumlah Trip Number of Trips | Headway | Jumlah KA Number of Trains | Tanggal Implementasi Implementation Dates |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | Gapeka Khusus 01 Special Travel Chart 01 | 06:00 - 20:00 | 107 | 06:00 - 15:00 headway 20 menit 15:00 - 20:00 headway 10 minute | 7 | 16 Maret March 2020 |
| | Gapeka Khusus 02 Special Travel Chart 02 | 06:00 - 20:00 | 235 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 23-24 Maret March 2020 |
| | Gapeka Khusus 03 Special Travel Chart 03 | 06:00 - 20:00 | 169 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 25 Maret March 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 26 - 29 Maret March 2020 |
| | Gapeka khusus 05 Special Travel Chart 05 | 06:00 - 20:00 | 83 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | 30-31 Maret March 2020 |
| April April | Gapeka khusus 05 Special Travel Chart 05 | 06:00 - 20:00 | 83 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | 1 - 9 April April 2020 |
| | Gapeka khusus 06 Special Travel Chart 06 | 06:00 - 18:00 | 73 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | 10 - 19 April April 2020 |
| | Gapeka khusus 07 Special Travel Chart 07 | 06:00 - 18:00 | 49 | Flat 30 menit 30 minutes flat | 3 | 20 - 30 April April 2020 |
| Mei May | Gapeka khusus 07 Special Travel Chart 07 | 06:00 - 18:00 | 49 | Flat 30 menit 30 minutes flat | 3 | 1-31 Mei May 2020 |
| Juni June | Gapeka khusus 07 Special Travel Chart 07 | 06:00 - 18:00 | 49 | Flat 30 menit 30 minutes flat | 3 | 1 - 4 Juni June 2020 |
| | Gapeka khusus 08 Special Travel Chart 08 | 05:00 -21:00 | 189 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 5 Juni June 2020 |
| | Gapeka Khusus 09 (Weekend) Special Travel Chart 09 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 83 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | 6 - 30 Juni June 2020 |
| | Gapeka Khusus 10 (Weekend) Special Travel Chart 10 (Weekend) | 05:00 - 21:00 | 249 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | |
| Juli July | Gapeka Khusus 10 Special Travel Chart 10 | 05:00 - 21:00 | 249 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 1-31 Juli July 2020 |
| | Gapeka Khusus 09 (Weekend) Special Travel Chart 09 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 83 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | |
| Agustus August | Gapeka Khusus 11 (Weekday) Special Travel Chart 11 (Weekend) | 05:00- 22:00 | 261 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 3 -31 Agustus August 2020 |

| Bulan Month | Gapeka Train Travel Chart (Gapeka) | Jam Operasi Operation Hours | Jumlah Trip Number of Trips | Headway | Jumlah KA Number of Trains | Tanggal Implementasi Implementation Dates |
|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| September September | Gapeka Khusus 09 (Weekend) Special Travel Chart 09 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 83 | Flat 20 menit 20 minutes flat | 4 | 1 - 23 Agustus August 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 29-30 Agustus August 2020 |
| | Gapeka Khusus 11 (Weekday) Special Travel Chart 11 (Weekend) | 05:00- 22:00 | 261 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 1 - 16 September September 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 5 - 13 September September 2020 |
| | Gapeka Khusus 12 Special Travel Chart 12 | 05:00- 20:00 | 175 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 17-20 September September 2020 |
| | Gapeka Khusus 13 Special Travel Chart 13 | 05:00- 19:00 | 163 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 21 - 30 September September 2020 |
| Oktober October | Gapeka Khusus 13 Special Travel Chart 13 | 05:00- 19:00 | 163 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 1 - 11 Oktober October 2020 |
| | Gapeka Khusus 10 (Weekend) Special Travel Chart 10 (Weekend) | 05:00 - 21:00 | 249 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 12 - 31 Oktober October 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | |
| November November | Gapeka Khusus 10 (Weekend) Special Travel Chart 10 (Weekend) | 05:00 - 21:00 | 249 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 1 - 30 November November 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | |
| Desember December | Gapeka Khusus 10 Special Travel Chart 10 | 05:00 - 21:00 | 249 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 1-17 Desember December 2020 |
| | Gapeka Khusus 16 Special Travel Chart 16 | 05:00 - 20:00 | 243 | Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hour 10 minutes during off-peak | 14 | 18-30 Desember December 2020 |
| | Gapeka Khusus 04 (Weekend) Special Travel Chart 04 (Weekend) | 06:00 - 20:00 | 157 | Flat 10 menit 10 minutes flat | 7 | 1-31 Desember December 2020 |



Kinerja Ketepatan Waktu

Selama periode pelaporan, Perseroan mampu mempertahankan ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun dan ketepatan waktu tempuh kereta perlintas. Kinerja ketepatan waktu terendah terdapat pada bulan Juni yang disebabkan karena terjadinya *blackout*.

Kejadian *blackout* terjadi tanggal 2 Juni 2020 pada sistem kelistrikan di rangkaian kereta nomor 2 di Stasiun Lebak Bulus. Gangguan tersebut menyebabkan terjadinya *blackout* pada sistem sarana, sehingga diperlukan tindakan operasi penyelamatan untuk mengembalikan rangkaian kereta tersebut ke Depo. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penyebab terjadinya gangguan kelistrikan adalah adanya kesalahan desain oleh manufaktur. Saat ini telah dilakukan perbaikan/modifikasi desain oleh manufaktur untuk seluruh rangkaian kereta, untuk memastikan ke depannya gangguan ini tidak terulang kembali.

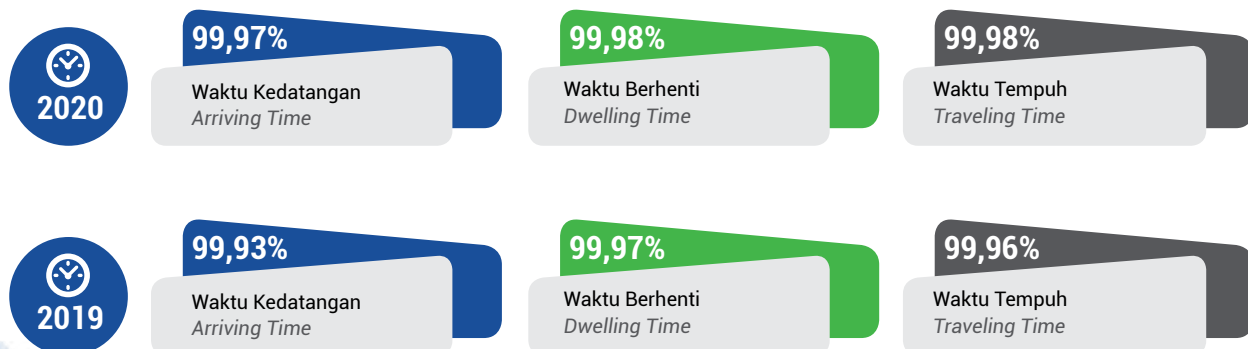
Punctuality Performance

During the reporting period, the Corporation was able to maintain the punctuality of arriving time between the stations, punctuality of dwelling time at the stations, and punctuality of travelling time. The lowest punctuality performance was found in June due to the occurrence of *blackout*.

The *blackout* occurred on June 2, 2020 at the electricity system of trainset number 2 at Lebak Bulus Station. This situation caused a *blackout* of the rolling stock system, thus requiring evacuation operations to return the trainset to the Depot. Based on the investigation, it was found that the root cause of the electricity problem was a mistake in design from the manufacturer. Repair/modification of design has been carried out by the manufacturer for all trainsets, to ensure that such condition will not occur again in the future.

Performa Ketepatan Waktu

On Time Performance



Kinerja Layanan Pengguna Jasa

Total jumlah pengguna jasa MRT Jakarta Fase 1 pada tahun 2020 mencapai 9.926.513 orang, dengan rata-rata per hari sebanyak 27.122 orang. Jumlah tersebut lebih rendah 69,74% dibanding tahun 2019, karena adanya pemberlakuan PSBB yang membatasi perjalanan warga Jakarta.

Kebijakan PSBB tersebut tentunya berdampak pada layanan transportasi publik khususnya MRT Jakarta. Sebagai penyedia layanan transportasi umum, MRT Jakarta tetap mendukung keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menekan laju persebaran COVID-19, di antaranya dengan menutup 7 (tujuh) stasiun MRT Jakarta, yaitu Stasiun Haji Nawi, Blok A, ASEAN, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir dan Setiabudi Astra. Penutupan 7 (tujuh) stasiun tersebut dilakukan pada periode yang berbeda, yaitu:

1. Stasiun Haji Nawi, Blok A & ASEAN pada 20 April 2020;
2. Stasiun Istora Mandiri & Setiabudi Astra pada 23 April 2020;
3. Stasiun Senayan & Bendungan Hilir pada 27 April 2020.

Penutupan 7 (tujuh) stasiun tersebut diberlakukan hingga tanggal 04 Juni 2020, sehingga pada tanggal 05 Juni 2020, semua stasiun MRT Jakarta sudah beroperasi kembali seutuhnya.

Selain penutupan 7 (tujuh) stasiun, upaya MRT Jakarta dalam mendukung Pemprov DKI Jakarta guna menekan persebaran COVID-19 dilakukan di seluruh fasilitas yang disediakan MRT. Upaya yang dilakukan guna memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jasa, yakni sebagai berikut:

1. Pembatasan jumlah pengguna jasa di dalam kereta sebanyak 65 orang dalam 1 kereta. Pengguna jasa tidak diperkenankan untuk duduk pada kursi yang diberi tanda "silang";
2. Pengecekan suhu kepada seluruh pengguna jasa yang memasuki stasiun menggunakan *thermal scanner*. Pengguna jasa yang memiliki suhu di atas 37,3 tidak diperkenankan memasuki area stasiun MRT;
3. Pengguna jasa wajib menggunakan masker di dalam area stasiun dan kereta. Masker yang diperbolehkan digunakan saat memasuki area stasiun yaitu masker bedah, masker kain dan masker N95/KN95. Masker scuba tidak diperbolehkan;

Passenger Service Performance

The total passengers of Phase 1 MRT Jakarta in 2020 reached 9,926,513 passengers, with a daily average of 27,122 passengers. It is lower by 69,74% of the passengers in 2019 due to the implementation of PSBB that limits the travel of the citizens of Jakarta.

PSBB Policy impacts the public transportation service, especially MRT Jakarta. As a public transportation service provider, MRT Jakarta supports the decision of the Government of DKI Jakarta in decreasing the transmission of COVID-19 by closing 7 stations of MRT Jakarta, namely Haji Nawi Station, Blok A Station, ASEAN Station, Senayan Station, Istora Mandiri Station, Bendungan Hilir Station, and Setiabudi Astra Station. The closure of the stations was carried out in different period as follows:

1. Haji Nawi Station, Blok A Station, and ASEAN Station on April 20, 2020;
2. Istora Mandiri Station and Setiabudi Astra Station on April 23, 2020;
3. Senayan Station and Bendungan Hilir Station on April 27, 2020.

The closure of the seven stations was carried out until June 4, 2020, therefore, on June 5, 2020, all MRT Jakarta stations have been operating properly.

Besides closing 7 stations, another effort by the Corporation in supporting the Government of DKI Jakarta Province to reduce the transmission of COVID-19 is carried out in all MRT facilities. The efforts aimed to maintain the safety and security of passengers inside MRT Jakarta trains. The efforts carried out by the Corporation include:

1. Limiting the number of passengers inside the train to be 65 passengers per train. Passengers are not allowed to sit on the seat marked with a "cross" sign;
2. Temperature checking for all passengers entering the stations using thermal scanners. Passengers with a temperature of more than 37.3 are not allowed to enter MRT stations;
3. Passengers are required to use mask inside the stations and trains. Masks permitted to be used include medical masks, fabric masks, and N95/KN95 masks. Scuba-fabric masks are not allowed;

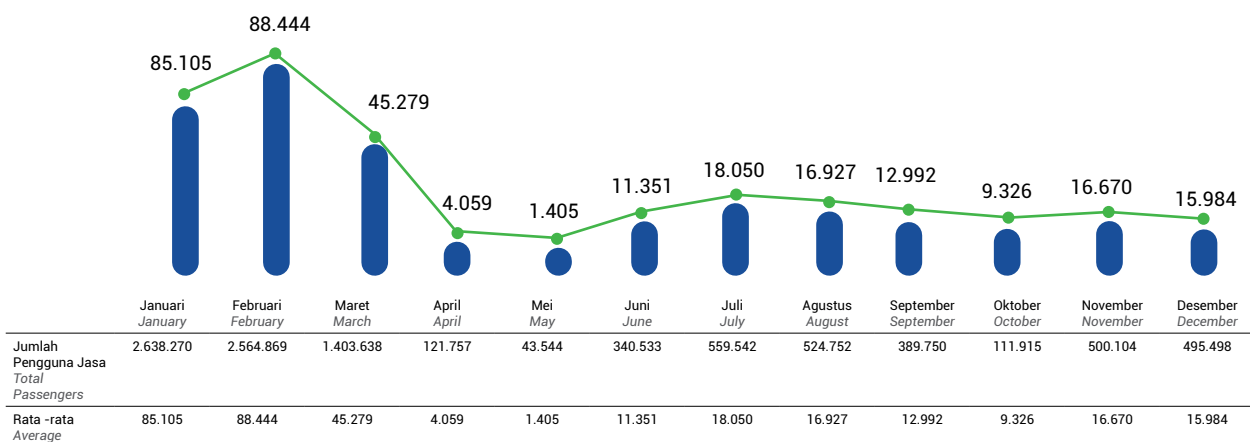
4. Penyediaan *hand sanitizer* pada area loket dan area peron stasiun MRT; dan
5. Pembersihan dan penyemprotan disinfektan di seluruh bagian dalam kereta sebanyak 3 (tiga) kali sehari.

4. *Provision of hand sanitisers at counters and platforms of MRT stations; and*
5. *Cleaning and disinfecting all inside parts of the train 3 (three) times a day.*

Jumlah pengguna jasa tertinggi ada pada bulan Januari sebanyak 2.638.270 orang, sementara jumlah pengguna jasa terendah pada bulan Mei sebanyak 43.544 orang.

The highest number of passengers was recorded in January with 2,638,270 passengers while the lowest number of passengers was recorded in May with 43,544 passengers.

Grafik Jumlah Pengguna Jasa MRT Jakarta Tahun 2020
Graph of the Number of Passengers of MRT Jakarta in 2020



Jumlah Pengguna Jasa
Number of Passengers

| | 2020 | 2019 | Pertumbuhan Growth (%) |
|--|-----------|------------|------------------------|
| Jumlah Pengguna Jasa <i>Number of Passengers</i> | 9.926.513 | 24.621.467 | (59) |
| Rata-rata Pengguna Jasa Per Hari <i>Daily Average of Passengers</i> | 27.122 | 89.645 | (69) |
| Rata-rata Pengguna Jasa Pada Hari Kerja <i>Weekday Average of Passengers</i> | 32.968 | 92.477 | (64) |
| Rata-rata Pengguna Jasa Pada Akhir Pekan dan Hari Libur <i>Weekend and Holiday Average of Passengers</i> | 14.680 | 72.959 | (80) |

Berdasarkan relasi favorit, jumlah pengguna jasa terbanyak pada tahun 2020 adalah relasi Stasiun Lebak Bulus Grab – Stasiun Bundaran HI, dengan rata - rata 952 orang per hari atau 3,15% dari proporsi rata - rata pengguna jasa 2020. Jumlah pengguna jasa paling sedikit adalah relasi Stasiun Haji Nawi – Stasiun Blok A, dengan rata-rata 15 orang per hari atau 0,05% dari proporsi rata – rata pengguna jasa 2020.

As for the most favourable connection, the connection between Lebak Bulus Grab Station – Bundaran HI Station carried the most passengers with a daily average of 952 passengers, or 3.15% of the average proportion of passengers in 2020. The connection with the least passengers is the connection between Haji Nawi Station – Blok A station, with a daily average of 15 passengers or 0.05% of the average proportion of passengers in 2020.

Relasi Favorit Rata-rata

Average Favorable Connection

| Relasi Relation | Rata - Rata Pengguna Jasa Average Passengers | Persentase Percentage (%) |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Lebak Bulus Grab – Bundaran HI | 952 | 3,15 |
| Bundaran HI – Lebak Bulus Grab | 896 | 2,97 |
| Istora Mandiri – Dukuh Atas BNI | 738 | 2,44 |
| Dukuh Atas BNI – Istora Mandiri | 652 | 2,16 |
| Lebak Bulus Grab – Bundungan Hilir | 616 | 2,04 |

Dukungan Pada Kaum Difabel

Perseroan berkomitmen memberikan layanan setara kepada semua pengguna jasa, termasuk kaum difabel. Perseroan telah melengkapi kereta MRT yang dioperasikan, dengan fasilitas yang mendukung kaum difabel melakukan perjalanan.

- Kereta MRT dilengkapi ruang kursi roda pada kereta 3 dan kereta 4.
- Lantai kereta MRT berada pada tinggi (*level*) yang sama dengan peron, sehingga memudahkan pergerakan kursi roda maupun alat bantu lain yang digunakan kaum difabel untuk masuk dan keluar kereta.

Pada setiap stasiun dan area sekitarnya juga disediakan fasilitas pendukung, seperti:

- Blok taktil atau *paving yellow line*, dipasang untuk membantu penyandang tunanetra menavigasi ruang publik, sehingga mengetahui waktu kapan mereka mendekati area berbahaya. Ubin yang dipasang memiliki benjolan yang bisa dirasakan dengan tongkat berjalan atau alas kaki yang dikenakan.
- *Lift*, yang membantu penyandang difabel untuk akses menuju atau meninggalkan peron.
- Toilet khusus untuk kaum difabel.

Selain itu, Perseroan juga menyediakan area parkir khusus disabilitas di Stasiun Lebak Bulus Grab di depan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nehemia, yang merupakan *pilot project* dan kemudian akan dijadikan standar dalam pembangunan MRT fase berikutnya.

Menjaga Kesehatan Bersama dari Pandemi COVID-19

Menghadapi pandemi COVID-19, Perseroan menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan bersama saat mengoperasikan kereta MRT. Perseroan menerapkan "Protokol BANGKIT" untuk mendorong tanggung jawab bersama pada pencegahan pandemi COVID-19. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesehatan bersama dari pandemi COVID-19 selama operasional kereta MRT.

Support for People with Disabilities

The Corporation is committed to providing equal services to all passengers, including people with disabilities. The Corporation has equipped the operating MRT trains with facilities to support people with disabilities in their trip.

- MRT is equipped with wheelchair spaces in train 3 and train 4.
- MRT train floor is at the same level as the platform, to ease the movement of wheelchairs or other aids used by people with disabilities to enter and exit the trains.

Supporting facilities are also installed at the stations and surrounding areas such as:

- Tactile blocks or yellow line paving installed to help the blinds to navigate public spaces, so they could be aware upon approaching dangerous areas. The paving blocks have tactile features that can be detected using their cane or footwear.
- Lift to help people with disabilities access or leave the platform.
- Special toilets for people with disabilities.

Besides, the Corporation provides parking space for people with disabilities at Lebak Bulus Grab Station in front of Javanese Christian Church (GKJ) Nehemia, which is a pilot project to be set as the standards in the future construction of MRT.

Maintaining Community Health from COVID-19 Pandemic

To face the COVID-19 pandemic, the Corporation implements various measures to maintain community health upon the operations of MRT. The Corporation implements "BANGKIT Protocol" to encourage community responsibility to prevent the COVID-19 pandemic. There are various efforts taken to maintain community health in operating MRT trains.

Kinerja Perawatan dan Pengusahaan Sarana

Facility Maintenance and Commercialisation Performance

Kinerja Perawatan Sarana

Perawatan kereta MRT dilakukan di Depo. Pekerjaan perawatan sarana meliputi perawatan harian dan perawatan bulanan. Perawatan dilakukan untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan selama perjalanan. Selama periode pelaporan, kinerja perawatan kereta berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Pekerjaan perawatan sarana dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompetensi kecakapan dan sertifikasi sesuai, lihat halaman 110 Laporan ini.

Facility Maintenance Performance

MRT train maintenance is carried out at the Depot. Facility maintenance works cover daily maintenance and monthly maintenance. It is carried out to ensure the operational safety of the trains to be running well and fulfilling the determined target. Facility maintenance works are carried out by competent and certified employees, as presented on page 110 of this Report.

Target dan Realisasi Tablo Pemeliharaan

Target and Realisation of Maintenance

| Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Types of Maintenance | Volume Pekerjaan Work Volume | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Target Target | Realisasi Realisation | Persentase Percentage (%) |
| <i>Rolling Stock Depot Maintenance</i> | | | |
| Perawatan Harian Daily Maintenance | 1.718 kali 1,718 times | 1.717 kali 1,717 times | 99,94 |
| Perawatan Bulanan Monthly Maintenance | 192 kali 192 times | 192 kali 192 times | 100 |
| Cuci Kereta Train Washing | 3.489 kali 3,489 times | 3.489 kali 3,489 times | 100 |

Kinerja Pengusahaan Sarana

Facility Commercialisation Performance

Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit, Perseroan mengenakan tarif perjalanan bagi pengguna jasa MRT Jakarta. Tarif perjalanan dibayarkan pengguna jasa dengan membayar tiket sesuai tujuan perjalanan. Tarif minimal MRT Jakarta yang berlaku adalah Rp3.000, sementara tarif maksimal Rp14.000.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan menyediakan beberapa metode pembayaran tiket bagi pengguna jasa.

1. Tiket *single trip*. Tiket berupa kartu yang dapat dipakai untuk sekali jalan. Pada periode pelaporan, Perseroan menghentikan sementara penjualan tiket *single trip*, sehubungan dengan pemberlakuan PSBB.
2. Tiket *multitrip*. Tiket berupa kartu berisi saldo yang dapat dipakai berkali-kali dan dapat diisi ulang saldonya. Pembelian kartu *multitrip* dapat dilakukan di mesin tiket otomatis.
3. Kartu JakLingko. Kartu Multiguna untuk pembayaran Transportasi Publik di Jakarta (Transjakarta, MikroTrans, dan MRT Jakarta).
4. Kartu Elektronik Bank. Kartu pembayaran yang dikeluarkan bank penyelenggara. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan bekerja sama dengan beberapa bank penyelenggara, yakni Bank BCA (Flazz), Bank DKI (JakCard), Bank BNI (TapCash), Bank Mandiri (e-Money), dan Bank BRI (BRIZZI).
5. Aplikasi MRT Jakarta. Dengan aplikasi, pengguna jasa dapat membayar dengan uang elektronik. Sampai dengan akhir tahun 2020 Perseroan telah bekerja sama dengan penyelenggara uang elektronik, yakni Dana, LinkAja, OVO, dan Gopay.

Sejalan dengan kebijakan pengoptimalan potensi pendapatan operasional, Perseroan bekerja sama komersial dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan kereta MRT sebagai media promosi maupun kegiatan lain. Selama periode pelaporan, terdapat beberapa bentuk kerja sama komersial yang telah dilaksanakan.

- Kerja sama perusahaan Layanan Periklanan pada Area Operasional Stasiun dan Kereta Ratangga, serta Media Luar Ruang Media Pilar.

Following the Governor's Regulation of DKI Jakarta Number 34 Year 2019 concerning Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Tariffs, the Corporation charge a certain fee for the trip of MRT Jakarta passengers. The tariff is paid by passengers by paying ticket according to their destination. The minimum MRT Jakarta tariff is IDR 3,000 while the maximum tariff is IDR 14,000.

As of the end of the reporting period, the Corporation offered various methods for the passengers to pay for the tickets.

1. *Single trip tickets. The ticket takes the form of a card for one trip. During the reporting period, the Corporation temporarily stopped the sales of single trip cards considering the implementation of PSBB.*
2. *Multi-trip tickets. The tickets take the form of a card with a balance that can be used multiple times and the balance can be recharged. Multi-trip cards can be purchased at the ticket vending machines.*
3. *JakLingko Cards. Multi-purpose cards for the payment of Public Transportation in Jakarta (TransJakarta, MikroTrans, and MRT Jakarta).*
4. *Bank Electronic Cards. It is payment cards issued by banks. As of the end of 2020, the Corporation is collaborating with various banks, namely Bank BCA (Flazz), Bank DKI (JakCard), Bank BNI (TapCash), Bank Mandiri (e-Money), and Bank BRI (BRIZZI).*
5. *MRT Jakarta Application. With the application, passengers can pay using electronic money. As of the end of 2020, the Corporation is cooperating with various e-money providers, namely Dana, LinkAja, OVO, and Gopay.*

In line with the policy to optimise potential operational revenues, the Corporation carries out commercial collaboration with various parties to utilise MRT trains as a promotion medium or for other activities. During the reporting period, there are several commercial collaborations carried out by the Corporation.

- *Commercialisation collaboration for Advertisement Service at the Operational Areas of Stations and Ratangga Train as well as Outdoor Media Advertising in Media Pillar Space.*

- Kerja sama perusahaan fasilitas Layanan Telekomunikasi.
- Kerja sama Hak Penamaan Stasiun.
- Kerja sama Pembayaran Tiket Digital MRT Jakarta.
- Penyewaan area dalam stasiun untuk kegiatan *retail*.
- *Commercialisation collaboration of Telecommunication Service facilities.*
- *Collaboration for Station Naming Rights.*
- *Collaboration for the Payment of MRT Jakarta Digital Tickets.*
- *Renting areas inside the stations for retail activities.*

Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Properti atau Bisnis di Stasiun dan Kawasan

Property or Business Development and Management Performance in Stations and the Surrounding Areas

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai operator transportasi umum MRT, mendapat kesempatan mengajukan diri sebagai Pengelola Kawasan yang berperan dalam perencanaan penataan kawasan di sekitar stasiun MRT berdasarkan konsep *Transit-Oriented Development* (TOD) melalui penyusunan Kajian Proposal dan Panduan Rancang Kota (PRK). Proses pengesahan Pengelola Kawasan dan PRK diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD) dan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Sampai tahun 2020, melalui Pergub DKI Jakarta No.15 tahun 2020, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah ditugaskan sebagai Pengelola Kawasan untuk mengelola 5 Kawasan Berorientasi Transit (KBT) dan telah memiliki Panduan Rancang Kota (PRK) yang telah disahkan dalam bentuk Pergub, sebagai berikut:

- PRK KBT Blok M-Sisingamangaraja (Pergub DKI Jakarta No.55/2020);
- PRK KBT Fatmawati (Pergub DKI Jakarta No.56/2020);
- PRK KBT Lebak Bulus (Pergub DKI Jakarta No.57/2020);
- PRK KBT Istora-Senayan (Pergub DKI Jakarta No.90/2020);
- PRK KBT Dukuh Atas (Pergub DKI Jakarta No.107/2020).

Under the Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 67 Year 2019 concerning Implementation of Transit-Oriented Development, the Corporation as the MRT public transportation operator had the opportunity to propose to be a Developer of the area that acts in the planning and development of areas surrounding MRT stations based on Transit-Oriented Development (TOD) through the preparation of a Proposal Study and the Urban Design Guidelines (PRK). The process to ratify the Area Developer and PRK is proposed to the Governor of DKI Jakarta through the Meeting of the Head of the Regional Spatial Planning Coordinating Board (Rapim BKPRD) and it was ratified as Governor's Regulation of DKI Jakarta.

As of 2020, through Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 15 Year 2020, the Corporation has been appointed as the Area Developer for 5 Transit-Oriented Development (TOD) Areas and has possessed Urban Design Guidelines (PRK) ratified as Governor's Regulation of DKI Jakarta as follows:

- *PRK of Blok M-Sisingamangaraja TOD (Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 55/2020);*
- *PRK of Fatmawati TOD (Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 56/2020);*
- *PRK of Lebak Bulus TOD (Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 57/2020);*
- *PRK of Istora-Senayan TOD (Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 90/2020);*
- *PRK of Dukuh Atas TOD (Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 107/2020).*

Master Plan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lebak Bulus

Master Plan and Strategy of Lebak Bulus Area Development



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Jembatan Pedestrian Layang (JPL) Elevated Pedestrian Crossing (JPL) | 4 | Plaza Transit Transit Plaza |
| 2 | Pengembangan zona hunian vertikal Vertical housing zone development | 5 | Depo/Workshop MRT MRT Depot/Workshop |
| 3 | Pengembangan mixed use development Mixed-use development | 6 | Stasiun MRT Lebak Bulus Lebak Bulus MRT Station |

Secara umum, PRK menjelaskan panduan perencanaan mengenai intensitas kawasan, konektivitas kawasan, konsep ruang terbuka hijau (RTH), serta konsep penyediaan hunian dan ruang usaha terjangkau di dalam kawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengarahkan peningkatan infrastruktur kawasan yang terintegrasi dengan baik dan mendukung kegiatan transit pada kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta.

Dalam proses implementasi penataan kawasan berorientasi transit, PT MRT Jakarta (Perseroda) dibantu oleh anak usaha Perseroan, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta, untuk menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar kawasan KBT MRT dalam mengarahkan pengembangan Kawasan, agar sesuai dengan PRK yang telah disahkan.

In general, PRK defines the planning guidelines concerning the intensity of the area, connectivity of the area, urban green space (RTH), and provision of affordable residential area and a business area within the area. It aims to drive infrastructure improvement of areas that is integrated well with and support the activity of transit around MRT Jakarta stations.

For the implementation process of TOD areas, the Corporation is assisted by a subsidiary of the Corporation, PT Integrasi Transit Jakarta, to collaborate and coordinate with the public and stakeholders around MRT TOD areas in driving the development of the area to be in line with the ratified PRK.



Penataan Stasiun

Gubernur DKI Jakarta telah menunjuk Perseroan sebagai *focal point* dalam pelaksanaan integrasi pengelolaan transportasi perkeretaapian Jabodetabek dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) antara Perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 10 Januari 2020 dan mencanangkan pendirian PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) sebagai bentuk kerja sama kedua entitas tersebut. Paralel dengan proses pembentukan dan kajian yang dilakukan untuk arah visi dan misi PT MITJ, Perseroan bekerja sama dengan PT KAI Indonesia (Persero) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan mewujudkan program *Quick Wins* Penataan Stasiun. Program tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penataan Stasiun antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilakukan juga pada 10 Januari 2020.

Penataan Stasiun tahap pertama dilakukan pada empat Stasiun PT Kereta Commuterline Indonesia, di antaranya Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Sudirman untuk mewujudkan integrasi transportasi yang aman dan nyaman, sehingga dapat menanggulangi masalah kemacetan khususnya di sekitar stasiun. Dinas Perhubungan, sebagai koordinator program Penataan Stasiun bertugas untuk mendorong implementasi rencana aksi penataan stasiun, meliputi perencanaan, pembangunan, penataan kawasan serta monitoring kegiatan. PT KAI (Persero) sebagai pemilik lahan kawasan stasiun memiliki tanggung jawab untuk melakukan peningkatan prasarana di dalam stasiun (*signage, wayfinding, dan lainnya*), melakukan peningkatan manajemen sirkulasi pengguna jasa dan kendaraan di

Station Arrangement

The Governor of DKI Jakarta has appointed the Corporation as the focal point in implementing the integration of railway transportation management in Jabodetabek by the signing of Shareholders Agreement between the Corporation and PT Kereta Api Indonesia (Persero) on January 10, 2020 and the declaration to establish PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) as a collaboration of the two entities. In line with the establishment and review process carried out for the direction of the vision and missions of PT MITJ, the Corporation in collaboration with PT KAI Indonesia (Persero) and the Government of DKI Jakarta Province, coordinated by the Department of Transportation, realize Station Arrangement as Quick Wins programme. The programme has been started since the signing of the Agreement of Station Arrangement between the Government of DKI Jakarta Province, the Corporation, and PT Kereta Api Indonesia carried out on January 10, 2020.

*The first phase of Station Arrangement is carried out at four Stations of PT Kereta Commuterline Indonesia, namely Tanah Abang Station, Pasar Senen Station, Juanda Station, and Sudirman Station to realise safe and comfortable transportation integration, to overcome the traffic congestion around the stations. The Department of Transportation, as the coordinator of the Station Arrangement Programme, is responsible to encourage the implementation of station arrangement action plans, covering planning, development, arrangement, and monitoring of the activities. PT KAI (Persero) as the owner of the station area is responsible to improve the infrastructure inside the stations (*signages, wayfinding, etc.*), improving passenger and vehicle circulation management around the*

kawasan stasiun, memberikan izin akses pemanfaatan lahan stasiun untuk akses sirkulasi pengguna jasa dan kendaraan, serta kegiatan penataan kawasan stasiun terintegrasi. Perseroan berperan sebagai *Project Monitoring Unit* (PMU) yang bertindak sebagai fasilitator, *time keeper & monitoring* seluruh proses kegiatan.

Guna memastikan target waktu pelaksanaan Penataan Stasiun tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan, Perseroan mendorong agar program Penataan Stasiun ini termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, sehingga memudahkan proses koordinasi dan memperjelas tanggung jawab masing-masing dinas terkait.

Selama menjalankan tugas sebagai PMU, Perseroan menghadapi beberapa tantangan, seperti proses *updating e-katalog* yang baru bisa digunakan pada Bulan Maret 2020, pandemi COVID-19, serta proses administrasi yang kompleks. Namun, melalui koordinasi yang intensif maka penyesuaian dari segi koordinasi maupun pekerjaan di lapangan dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat dicapai dengan baik.

Hadirnya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 mengakibatkan kegiatan koordinasi dan pekerjaan lapangan terhenti, hal ini sejalan dengan Seruan Gubernur No. 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 15 April 2020, pekerjaan Penataan Stasiun dilanjutkan kembali seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disamping target penyelesaian yang singkat, pembatasan jumlah pekerja serta implementasi protokol kesehatan menghadirkan tantangan tambahan dalam penyelesaian pekerjaan penetapan stasiun. Namun, melalui proses monitoring yang ketat serta koordinasi yang intensif maka penyesuaian dari segi koordinasi maupun pekerjaan di lapangan dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat dicapai dengan baik.

Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah *weekly meeting* setiap hari Rabu bersama semua instansi yang terkait. Dengan adanya koordinasi serta dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan program ini, maka di bulan Juni 2020 ke-empat stasiun telah selesai konstruksi dan siap beroperasi. Pada 17 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta bersama Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN meresmikan beroperasinya Penataan Stasiun ini.

stations, to provide access to utilise the areas of the station for passenger and vehicle circulation management, and to arrange integrated station area. The Corporation as the Project Monitoring Unit is responsible to be the facilitator, time-keeper, and monitoring the overall activities.

To ensure that the timeline of the Station Arrangement Programme implementation is achieved as planned, the Corporation encourages that the Station Arrangement Program is to be included in the Regional Strategic Projects of the Government of DKI Jakarta Province in 2020, to ease the coordination process and clarify the responsibilities of each institution.

During bearing the responsibility as PMU, the Corporation faced various challenges such as the updating process of e-catalogue that could only be carried out on March 2020, COVID-19 pandemic, and complex administrative process. However, through intensive coordination, the adjustment for the coordination and field works can be conducted quickly for excellent achievement of the activities.

The COVID-19 pandemic since March 2020 stopped coordination activities and on-site projects, in accordance with the Governor's Recommendation No. 6 Year 2020 concerning Temporary Halt to Office Activities to Prevent the Transmission of Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. On April 15, 2020, the Station Arrangement works were continued in line with the enactment of Governor's Regulation No. 33 Year 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restriction to Handle Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Special Capital Region of Jakarta Province. Beside quick completion target, the limited number of workers and implementation of health protocols became challenges to complete the station determination works. However, through strict monitoring process and intensive coordination, the arrangement in terms of coordination and site works can be carried out quickly, thus achieving the activity target well.

A form of coordination conducted is weekly meeting every Wednesday with all the relevant institution. With such coordination and supports from all parties in implementing this programme, on June 2020 all four stations have completed the construction and were ready to operate. On June 17, 2020, the Governor of DKI Jakarta with the Minister of Transportation and Minister of SOE inaugurated the operations of Station Arrangement.

Bersama dengan diresmikannya Penataan Stasiun, Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan bersama Direktur Utama PT KAI (Persero) dan Direktur Utama Perseroan menandatangani Addendum Perjanjian Kerja sama Penataan Stasiun. Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, maka Program Penataan Stasiun Tahap 2 dilakukan pada Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Jakarta Kota.

Berbeda dengan tahap 1, sumber pembiayaan Penataan Stasiun Tahap 2 adalah Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang, sehingga dalam prosesnya akan melibatkan beberapa pihak seperti Pengembang, Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor serta Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).

Beragamnya kondisi dan masalah memerlukan perbedaan solusi pada Penataan Stasiun Tahap 2 ini menyebabkan target penyelesaian penataan akan tercapai secara bertahap.

Sejak bulan Mei 2020, proses perencanaan dan konsep penataan untuk Penataan Stasiun Tahap 2 telah disusun oleh Perseroan bersama Dinas Perhubungan serta PT KAI (Persero). Proses koordinasi melalui *weekly meeting* terus dilakukan bersama SKPD dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Hingga Desember 2020, progres Penataan Stasiun Tahap 2 untuk Stasiun Tebet dan Stasiun Palmerah sudah memasuki masa konstruksi, dan untuk Stasiun Manggarai dan Stasiun Gondangdia dalam proses finalisasi atas dokumen perencanaan dan perhitungan biaya, sehingga Kontraktor Pelaksana dapat memulai pekerjaan pada awal tahun 2021. Sementara untuk Stasiun Jakarta Kota, proses penetapan pengembang masih dalam tahap evaluasi seiring dengan dilaksanakannya uji coba pembatasan emisi kendaraan di Kawasan Jakarta Kota.

Transport Hub Dukuh Atas

Sesuai dengan Mandat yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas *Mass Rapid*

With the inauguration of Station Arrangement, the Department of Transportation represented by the Head of the Department of Transportation and the President Director of PT KAI (Persero) and the President Director of the Corporation signed an Addendum to the Agreement of Station Arrangement. In accordance with the direction from the Governor of DKI Jakarta, Phase 2 of Station Arrangement Programme is to be carried out at Tebet Station, Palmerah Station, Manggarai Station, Gondangdia Station, and Jakarta Kota Station.

In contrast with the phase 1, the financing source for Phase 2 Station Arrangement is the Conversion from Obligation of Financing and Development of Simple Flats as stated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 78 Year 2020 concerning Amendment to Governor's Regulation No. 112 Year 2019 concerning Procedures to Fulfill Obligations of Financing and Development of Simple Flats through Conversion by Owners of Space Utilisation Permit, therefore its processes will involve various parties such as Developers, Planning Consultants, Construction Management Consultants and Contractors, and Public Appraiser Consultants.

Various conditions and issues require different solutions for Phase 2 Station Arrangement, therefore the completion target will be achieved in several stages.

Since May 2020, the planning and concept arrangement process for Phase 2 Station Arrangement has been prepared by the Corporation, the Department of Transportation, and PT KAI (Persero). Coordination process through weekly meeting is carried out constantly with SKPD and all relevant parties to ensure the seamlessness of the activities.

As of December 2020, Phase 2 Station Arrangement progress for Tebet Station and Palmerah Station has started its construction phase, while the planning documents and cost calculations for Manggarai Station and Gondangdia station has been finalised, so that the Contractor can start the works at the beginning of 2021. Meanwhile, for Jakarta Kota Station, contractor appointment process is still in the evaluation process along with the pilot project to limit vehicle emission around Jakarta Kota Area.

Dukuh Atas Transport Hub

In accordance with the Mandate from the Government of DKI Jakarta Province through Governor's Regulation No. 15 Year 2020 concerning Appointment of Limited

Transit Jakarta sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Mass Rapid Transit Jakarta, Perseroan telah memulai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) sekitar Stasiun MRT Jakarta dengan melakukan penyusunan Panduan Rancang Kota (PRK). Salah satu implementasi dari hal tersebut adalah Pembangunan *Transport Hub* dan Fasilitas Pendukung pada KBT Dukuh Atas.

KBT Dukuh Atas sendiri merupakan kawasan yang memiliki kegiatan transit yang cukup dominan karena kawasan tersebut merupakan titik pertemuan antar moda angkutan umum, seperti Stasiun MRT Dukuh Atas, Stasiun KRL Sudirman, TransJakarta, kereta bandara hingga perencanaan pembangunan Stasiun LRT Dukuh Atas. Dengan adanya pertemuan antara KRL, MRT, LRT dan BRT kawasan ini akan menerima pengguna jasa yang berasal dari *backbone* jaringan transportasi Jakarta maupun Jabodetabek. KBT Dukuh Atas juga akan menjadi *gateway* DKI Jakarta dengan adanya layanan kereta bandara yang menghubungkan Kawasan dengan Bandara Internasional Soekarno - Hatta.

Atas dasar hal tersebut, Perseroan telah menyusun *Detail Engineering Design (DED) Transport Hub* dan Fasilitas Pendukung pada KBT Dukuh Atas. DED tersebut dikembangkan dengan berdasarkan hasil sayembara yang diselenggarakan pada tahun 2018 bersama Perumda Pasar Jaya dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Selain bangunan *Transport Hub*, terdapat perencanaan besar yang sedang disiapkan untuk kawasan KBT Dukuh Atas, yaitu *re-routing* lalu lintas dari Jalan Blora menuju Jalan Kendal melalui Jalan Juana dan Jalan Pati dan pedestrianisasi sebagian Jalan Blora dan Jalan Kendal. Hal ini dibutuhkan untuk dapat merealisasikan mimpi kawasan KBT Dukuh Atas yang memiliki moda transportasi yang lebih terintegrasi. Dengan terealisasinya pembangunan tersebut, kegiatan transit antar moda yang terdapat pada Kawasan Dukuh Atas diharapkan akan menjadi lebih mudah, sehingga dapat mewujudkan mimpi DKI Jakarta untuk memaksimalkan penggunaan Transportasi Umum.

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan telah menyelesaikan desain detail yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan selanjutnya dari pengembangan *Transport Hub* dan Fasilitas Pendukung dan dalam proses pelelangan untuk memperoleh kontraktor pelaksana dengan target penyelesaian Konstruksi pada tahun 2023. Perizinan pembangunan Gedung *Transport Hub* saat ini sedang berlangsung dengan target perolehan Izin Mendirikan Bangunan pada kuartal pertama tahun 2021.

Liability Corporation Mass Rapid Transit Jakarta as the Manager of Transit-Oriented Development in North-South Corridor of Mass Rapid Transit Jakarta, the Corporation has commenced Transit-Oriented Development (TOD) around MRT Jakarta Stations by developing Urban Design Guidelines (PRK). An implementation in relation to this matter is the development of Transport Hub and Supporting Facilities at Dukuh Atas TOD.

Dukuh Atas TOD itself is an area that has quite dominant transit activities because this area is a meeting point between public transportation modes, such as Dukuh Atas MRT Station, Sudirman KRL Station, TransJakarta, Airport Train, and development plan for Dukuh Atas LRT Station. As a hub between KRL, MRT, LRT, and BRT, this area will serve passengers from the backbone of transportation of Jakarta and Jabodetabek. Dukuh Atas TOD is also a gateway to DKI Jakarta with the service of Airport Train that connects the Area with Soekarno-Hatta International Airport.

Therefore, the Corporation has developed Detailed Engineering Design (DED) for the Transport Hub and Supporting Facilities for Dukuh Atas TOD. The DED is developed based on the results of a contest carried out in 2018 with Perumda Pasar Jaya and the Government of DKI Jakarta in collaboration with Indonesian Institution of Architects (IAI).

Besides the Transport Hub building, there is a major plan prepared for Dukuh Atas TOD, i.e., traffic re-routing from Blora Street to Kendal Street through Juana Street and Pati Street and partial pedestrianisation of Blora Street and Kendal Street. It is required to realise the vision of Dukuh Atas TOD for more integrated modes of transportation. It is expected that the transit activities among modes of transportation in the Dukuh Atas area can be easier due to the realisation of this plan, to realise the vision of DKI Jakarta in maximizing the utilisation of public transportation.

As of the end of the reporting period, the Corporation has finalised the DED to be the basis of further implementation of the Transport Hub and Supporting Facilities and the tender process to obtain contractor is currently being carried out with the target of construction completion in 2023. Permit for the construction of the Transport Hub Building is being processed with the target to obtain Building Construction Permit at the first quarter of 2021.

Kinerja Pendapatan dari Kegiatan Segmen Usaha

Revenue Performance by Business Segment



Hingga akhir tahun 2020, Laporan Keuangan Perseroan belum menyajikan segmen usaha sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2015) tentang Segmen usaha. Informasi pada bagian ini menggunakan struktur pendapatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*). Struktur pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan tiket atau *Farebox*, serta pendapatan non-tiket.

Pendapatan tiket berasal dari *multitrip ticket (MTT)*, *single trip ticket (STT)* dan uang elektronik, termasuk pendapatan kartu, biaya perjalanan, serta denda. Termasuk dalam pendapatan tiket adalah subsidi prasarana dan sarana dari Pemprov DKI Jakarta.

Sampai dengan akhir tahun 2020, pendapatan terbesar diperoleh dari periklanan. Selain itu, dari non-periklanan, yakni kemitraan dalam pelayanan kepada pengguna jasa, seperti penyediaan *prepaid card*, persinyalan telekomunikasi, serta perolehan dari ritel.

Total perolehan pendapatan usaha perseroan pada tahun 2020 mencapai Rp1.085.498 juta. Jumlah tersebut naik Rp152.268 juta, atau 16,32% dibanding perolehan pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp933.230 juta. Kontribusi terbesar perolehan pendapatan berasal dari Pendapatan Subsidi, sebesar Rp620.801 juta atau 57,19% dari total pendapatan.

As of the end of 2020, the Financial Statements of the Corporation have yet to present business segments following the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Revision) concerning Business Segment. Information in this segment employs the revenue structure as stated in 2020 Audited Financial Statements which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm. The revenue structure of the Corporation consists of Farebox revenue and Non-Farebox revenue.

Farebox revenue is sourced from multi-trip tickets (MTT), single trip ticket (STT), and e-money, including card revenue, tariffs, and fines. Infrastructure and facility subsidy from the Governor of DKI Jakarta Province is included in the Farebox revenue as well.

As of the end of 2020, the biggest revenue is from advertisement. Another revenue source is a partnership in passenger service including prepaid card provision, telecommunication connection, and retail revenue.

Total business revenue of the Corporation in 2020 reached IDR1,085,498 million. It rose by IDR152,268 million or 16.32% compared to that of 2019, IDR 933,230 million. The biggest contribution to the revenue is Subsidy Revenue of IDR620,801 million or 57.19% of the total revenue.

Kontribusi Perolehan Pendapatan Usaha

Contribution of Business Revenue

| Perolehan Gains | 2020 | | 2019 | | Pertumbuhan Growth | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Jumlah Total (Rp Juta Million) | Kontribusi Contribution (%) | Jumlah Total (Rp Juta Million) | Kontribusi Contribution (%) | Jumlah Total (Rp Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 82.025 | 7,56 | 191.552 | 20,52 | (109.527) | (57,18) |
| Pendapatan Subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Subsidy Revenue from Provincial Government of DKI Jakarta</i> | 620.801 | 57,19 | 534.070 | 57,23 | 89.101 | 16,24 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 382.672 | 35,25 | 207.608 | 22,25 | 164.582 | 84,32 |
| Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i> | 1.085.498 | 100 | 933.230 | 100,00 | 152.268 | 16,32 |

Uraian Pendapatan Tiket

Tiket merupakan salah satu sumber pendapatan utama Perseroan. Perolehan pendapatan dari penjualan tiket pada periode pelaporan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan sesuai jumlah pengguna jasa setiap bulannya. Secara keseluruhan jumlah perolehan pendapatan tiket pada tahun 2020 turun 57,18% atau setara Rp109.527 juta, dibanding tahun 2019 sebesar Rp191.552 juta. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pengguna jasa sebagai dampak pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19.

Pendapatan tiket termasuk subsidi prasarana dan sarana dari Pemprov DKI Jakarta. Subsidi diberikan terkait penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana *mass rapid transit*. Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor No. 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana *Mass Rapid Transit*. Ketentuan, penugasan dan mekanisme subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 yang diperbaharui dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Details of Farebox Revenue

Farebox is one of the biggest revenue sources for the Corporation. Revenue generation from farebox during the reporting period fluctuated following the number of passengers every month. The overall farebox revenue in 2020 decreased by 57.18% to IDR 109,527 million from IDR191,552 million in 2019. It is due to the decreased number of passengers as an impact of the implementation of PSBB due to the COVID-19 pandemic.

Farebox revenue includes infrastructure and facility subsidy from the Government of DKI Jakarta Province. A subsidy is provided due to the assignment of the Corporation to manage the infrastructures and facilities of mass rapid transit. It is in line with the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province Number 53 Year 2017 concerning the Appointment of PT MRT Jakarta (Perseroda) for the Implementation of Infrastructures and Facilities for Mass Rapid Transit. The provisions, assignments, and mechanism of subsidy are further regulated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province Number 30 Year 2020 concerning Subsidy for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

Pemberian subsidi pada periode pelaporan diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) Nomor CON/013/MRT/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pemberian Subsidi MRT yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020. Sesuai Naskah Perjanjian Subsidi tersebut, pagu anggaran subsidi untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp748.107 juta. Serta berdasarkan Adendum Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) Nomor CON/038/MRT/XII/2020 pagu anggaran subsidi untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp642.159 juta.

Melalui hasil verifikasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, total subsidi yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta untuk diberikan kepada Perseroan adalah sebesar Rp620.801 juta, dengan pencapaian subsidi tahun anggaran 2020 sebesar 96,67% dari target Rp642.159 juta, sesuai proyeksi laba (rugi) yang disahkan pada bulan November 2020.

Perhitungan Subsidi Sarana secara garis besar didasari oleh pencapaian target *Origin Destination* (OD) stasiun pada tahun berjalan. Subsidi Prasarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar beban pembayaran operasional, perawatan dan biaya modal fasilitas operasi prasarana perkeretaapian yang dibayarkan secara *real cost* tanpa didasari ketercapaian target OD stasiun tahun berjalan.

Selama masa pandemi, jumlah pengguna jasa rata-rata harian MRT Jakarta mengalami penurunan yang signifikan. Tentu hal ini akan berdampak kepada pemberian subsidi, khususnya Subsidi Sarana, kepada PT MRT Jakarta (Perseroda). Dalam kondisi normal, pemberian subsidi sarana dari Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan realisasi pengguna jasa MRT Jakarta harian. Untuk menjaga keberlangsungan usaha badan penyelenggara, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan dicabutnya tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pemberlakuan pelaksanaan PSBB. Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan kompensasi, yaitu perhitungan subsidi sarana MRT Jakarta dihitung berdasarkan rata-rata realisasi pengguna jasa harian MRT Jakarta pada bulan Februari 2020 (bulan sebelum pandemi), bukan berdasarkan realisasi pengguna jasa sebenarnya.

The granting of subsidy during the reporting period is regulated in an Agreement between the Government of DKI Jakarta Province and PT MRT Jakarta (Perseroda) Number CON/013/MRT/VI/2020 dated June 16, 2020 concerning Granting of Subsidy for MRT from Regional Budget of Fiscal Year 2020. Following the Agreement, the maximum amount of subsidy for 2020 is IDR 748,107 million. Also, according to the Addendum of Agreement between the Government of DKI Jakarta Province and PT MRT Jakarta (Perseroda) Number CON/038/MRT/XII/2020, the maximum amount of subsidy for 2020 is IDR 642,159 million.

Based on the verification with the Department of Transportation of DKI Jakarta, the total subsidy approved by the Government of DKI Jakarta Province for the Corporation is IDR 620,801 million, with subsidy achievement in the fiscal year 2020 of 96.67% out of the target of IDR 642,159 million, in line with the projection of profit (loss) as ratified in November 2020.

In general, the calculation of Facility Subsidy is based on the achievement of the current station Origin-Destination (OD) target. Infrastructure Subsidy is the budget allocation of the Government of DKI Jakarta Province in bearing operational, maintenance, and facility capital costs for the operations of railway infrastructures that are paid in real cost without dependency on the station OD target.

During the pandemic, the number of average daily passengers of MRT Jakarta drops significantly. This impacts the subsidy provision, especially Facility subsidy to the Corporation. During the normal condition, the facility subsidy is granted from the Government of DKI Jakarta based on the realisation of daily passengers. To maintain the business continuity, starting March 14, 2020 until the end of emergency response to COVID-19 pandemic in DKI Jakarta Province and the end of PSBB, the Government of DKI Jakarta implements compensation policy, that the facility subsidy for MRT Jakarta is calculated based on the realisation of average daily passengers of MRT Jakarta in February 2020 (the month before the pandemic), instead of the actual passenger realisation.

Profitabilitas Pendapatan Tiket

Realisasi pendapatan tiket pada tahun 2020 mencapai 107% dari target Rp76.318 juta, yang didapat dari total 9.926.512 pengguna jasa. Perolehan tertinggi pendapatan tiket tercatat bulan Januari, sebesar Rp21.919 juta dengan jumlah pengguna jasa mencapai 2.638.270 orang. Perolehan terendah pendapatan tiket tercatat bulan Mei, sebesar Rp466 juta dengan jumlah pengguna jasa sebanyak 43.544 orang.

Profitability of Farebox Revenue

Realisation of farebox revenue in 2020 reached 107% of the target of IDR 76,318 million, obtained from 9,926,512 passengers. The highest farebox revenue was generated in January with IDR 21,919 million from 2,638,270 passengers. The lowest farebox revenue was generated in May with IDR 466 million from 43,544 passengers.

Kinerja Pendapatan Tiket
Farebox Revenue Performance

| Uraian Description | Realisasi 2020 2020 Realisation (Rp Juta Million IDR) | Realisasi 2019 2019 Realisation (Rp Juta Million IDR) | Target 2020 2020 Target (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2019 Compared to 2019 (%) | Pencapaian Target 2020 Target Achievement in 2020 (%) |
|---|--|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-2/2 | 1/3 |
| Pendapatan Tiket Farebox Revenue | 82.025 | 191.552 | 76.318 | (57,18) | 107,48 |
| Subsidi Prasarana dan Sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Infrastructure and Facilities Subsidy from Provincial Government of DKI Jakarta | 620.801 | 534.070 | 642.159 | 16,24 | 96,67 |
| Jumlah Total | 702.826 | 725.622 | 718.477 | (3,14) | 97,82 |

Jumlah Pengguna Jasa dan Pendapatan Tiket
Number of Passengers and Farebox Revenue

| Bulan Month | 2020 | | 2019 | |
|-----------------------|--|---|--|---|
| | Jumlah Pengguna Jasa Number of Passengers (Orang People) | Jumlah Pendapatan Total Revenue Generated (Rp Juta Million IDR) | Jumlah Pengguna Jasa Number of Passengers (Orang People) | Jumlah Pendapatan Total Revenue Generated (Rp Juta Million IDR) |
| Januari January | 2.638.270 | 21.919 | - | - |
| Februari February | 2.564.869 | 20.923 | - | - |
| Maret March | 1.403.638 | 11.216 | - | - |
| April April | 121.757 | 1.003 | 2.355.953 | 12.286 |
| Mei May | 43.544 | 466 | 2.258.122 | 15.332 |
| Juni June | 340.533 | 2.910 | 2.457.071 | 23.079 |
| Juli July | 599.542 | 4.646 | 2.897.804 | 25.459 |
| Agustus August | 524.752 | 4.454 | 2.568.119 | 21.567 |
| September September | 389.750 | 3.201 | 2.738.420 | 22.814 |
| Oktober October | 344.356 | 2.861 | 2.776.048 | 22.700 |
| November November | 500.104 | 4.215 | 2.693.327 | 22.274 |
| Desember December | 495.498 | 4.212 | 2.962.548 | 26.042 |
| Jumlah Total | 9.926.513 | 82.025 | 23.707.412 | 191.552 |

Uraian Pendapatan Non-Tiket

Pendapatan non-tiket diperoleh dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu Mitra Strategis (Layanan Periklanan Area Operasional Stasiun dan Kereta Ratangga, Layanan Periklanan Media Luar Ruang Media Pilar, dan Layanan Telekomunikasi), Mitra Langsung (Hak Penamaan Stasiun, Pembayaran Tiket Digital MRT Jakarta), dan juga ritel. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan para Mitra dengan menerapkan sistem bagi hasil yang mengoptimalkan angka pendapatan bagi Perseroan.

Mitra Strategis

Selama tahun 2020, Perseroan bekerja sama dengan 3 (tiga) Mitra Strategis untuk Layanan Periklanan Area Operasional dan Kereta Ratangga MRT Jakarta dengan PT Avabanindo Perkasa (Otego Media), Layanan Periklanan Media Luar Ruang Media Pilar MRT Jakarta dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, serta Layanan Telekomunikasi dengan PT Tower Bersama.

Mitra Langsung

Perseroan bekerja sama dengan beberapa Mitra Langsung untuk Hak Penamaan Stasiun dan Pembelian Tiket MRT Jakarta Digital. Hak Penamaan Stasiun dikelola sendiri oleh Perseroan, dimana pada tahun 2020 Perseroan berhasil mempertahankan kerja sama dengan lima mitra, di antaranya Grab, BCA, Mandiri, Astra & BNI. Kerja sama Pembayaran Tiket Digital MRT Jakarta menggunakan kartu elektronik Bank dengan 5 (lima) Bank, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI dan DKI. Sebagai langkah peningkatan *customer experience*, Perseroan bekerja sama dengan 4 (empat) perusahaan *fintech* DANA, LinkAja, OVO, dan GoPay untuk mengaplikasikan layanan Pembelian dan Pemesanan Tiket Digital MRT Jakarta berbasis *Mobile Application*. Terutama di era yang serba digital ini, layanan tersebut membantu pengguna MRT Jakarta untuk secara mudah memesan dan membeli tiket.

Details of Non-Farebox Revenue

Non-farebox revenue is generated from 3 (three) main sources, namely Strategic Partners (Advertising Service at Station Operational Areas and Ratangga Trains, Outdoor Media Advertising on Pillars, and Telecommunication Service), Direct Partners (Station Naming Rights, MRT Jakarta Digital Ticketing Payment), and retail. In the implementation, the Corporation is collaborating with the Partners by employing a profit-sharing scheme that optimises the revenue for the Corporation.

Strategic Partners

In 2020, the Corporation has collaborated with 3 (three) Strategic Partners, i.e., PT Avabanindo Perkasa (Otego Media) for Advertising Service at MRT Jakarta Station Operational Areas and Ratangga Trains, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo for Outdoor Media Advertising on Pillars, and PT Tower Bersama for Telecommunication Service.

Direct Partners

The Corporation has collaborated with several Direct Partners for Station Naming Rights and Purchase of MRT Jakarta Digital Tickets. Station Naming Rights are managed by the Corporation, and in 2020 the Corporation maintained the Collaboration with five partners, namely Grab, BCA, Mandiri, Astra, and BNI. Collaboration for Purchase of MRT Jakarta Digital Tickets is carried out through payment with Bank electronic cards with 5 (five) banks, namely BCA, Mandiri, BNI, BRI, and DKI. To improve customer experience, the Corporation collaborates with 4 (four) fintech corporations, Dana, LinkAja, OVO, and GoPay to implement Purchase and Booking of MRT Jakarta Digital Ticket through the Mobile Application. In the current era of digitisation, such a service helps MRT passengers to book and purchase tickets.

Mitra Langsung untuk Hak Penamaan Stasiun

Direct Partners for Station Naming Rights

| No | Nama Stasiun Station Name | Nama Mitra Partner Name |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Lebak Bulus Grab | PT Grab Teknologi Indonesia |
| 2 | Blok M BCA | PT Bank Central Asia Tbk |
| 3 | Istora Mandiri | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 4 | Setiabudi Astra | PT Astra International Tbk |
| 5 | Dukuh Atas BNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk |

Ritel

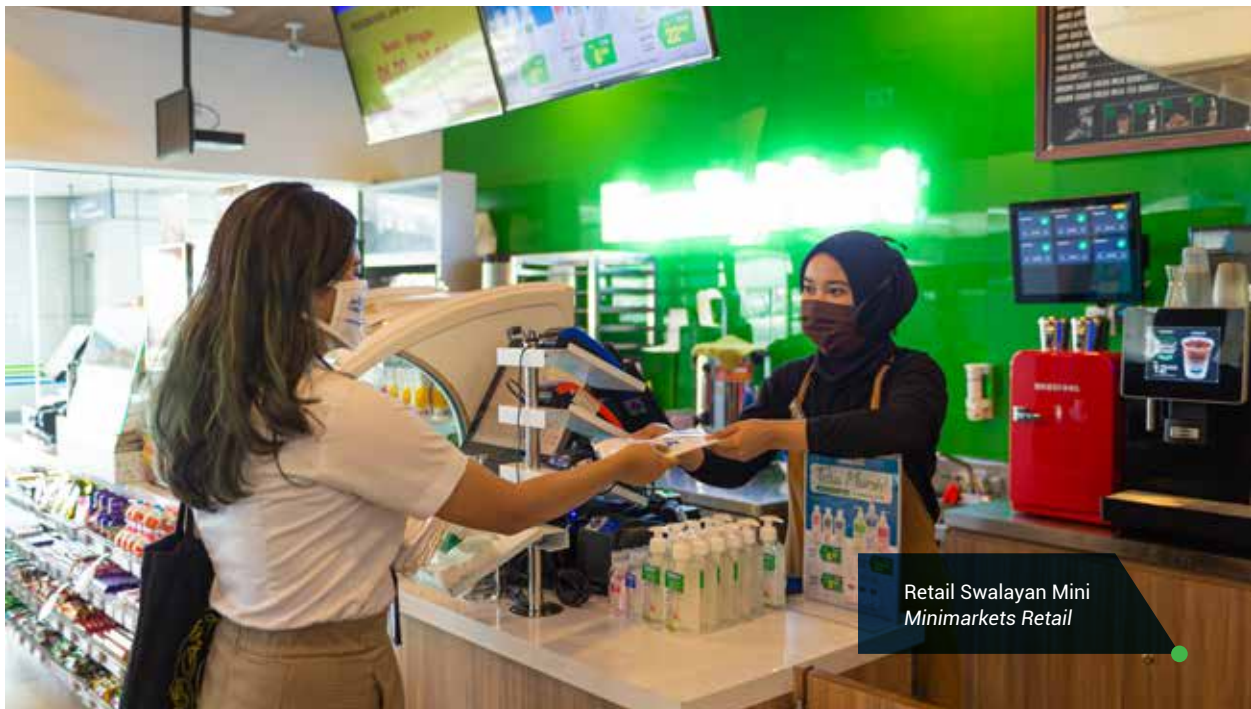
Pendapatan non-tiket dari ritel diperoleh dari kerja sama dengan tenan reguler maupun tenan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kerja sama dilakukan melalui seleksi pada periode tertentu, dan prosesnya diumumkan melalui media sosial.

Tenan reguler dipilih melalui proses seleksi pada periode yang telah disepakati. Skema bisnis yang digunakan adalah penetapan sewa tetap dan pembayaran biaya operasional (listrik dan air), serta penetapan bagi hasil (*revenue sharing*) yang dievaluasi setiap bulan. Sampai dengan akhir periode pelaporan tercatat 28 tenan reguler yang telah bekerja sama, terdiri dari tiga kategori, yaitu makanan dan minuman, swalayan mini, serta fesyen dan aksesoris.

Retail

Non-Farebox revenue from retail is obtained through cooperation with regular tenants and micro, small, and medium enterprise (MSME) tenants. The cooperation is carried out through selection during a certain period whose process is published via social media.

Regular tenants are chosen through a selection process during the agreed period. The business scheme employed is fixed annual rent and operational cost payment (e.g., electricity and water), and revenue sharing to be evaluated monthly. As of the end of the reporting period, 28 regular tenants are obtained, consisting of three categories of foods and beverages, minimarkets, and fashion and accessory.



Jumlah Tenan Reguler dan Jumlah Lokasi Stasiun Tahun 2020
Number of Regular Tenant and Number of Location at the Station in 2020

| Kategori <i>Category</i> | Jumlah Tenan <i>Total Tenants</i> | Jumlah Lokasi Stasiun <i>Total Station Location</i> |
|--|--------------------------------------|--|
| Makanan dan Minuman <i>Foods and Beverages</i> | 13 | 11 |
| Swalayan Mini <i>Minimarkets</i> | 11 | 11 |
| Fesyen & Aksesoris <i>Fashion and Accessory</i> | 4 | 2 |

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan menempatkan UMKM di 3 (tiga) stasiun MRT Jakarta yang strategis, dengan angka laju pengguna jasa yang tinggi. Stasiun tersebut adalah Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati dan Dukuh Atas BNI. Proses kurasi pemilihan tenan UMKM dilakukan Perseroan bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sampai dengan akhir periode pelaporan, terdapat 3 (tiga) kategori tenan UMKM, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya.

As of the end of 2020, the Corporation has employed MSME in 3 (three) strategic stations of MRT Jakarta and high passenger increase rate. The stations are Lebak Bulus Grab, Fatmawati, and Dukuh Atas BNI stations. The curation process of MSME tenant selection was carried out by the Corporation and Agency of Creative Economy (Bekraf). As of the end of the reporting period, there are 3 (three) types of MSME tenants, i.e., culinary, fashion, and crafts.

Jumlah Tenan UMKM dan Jumlah Lokasi Stasiun Tahun 2020
Number of MSME Tenant and Number of Location at the Station in 2020

| Kategori Category | Jumlah Tenan Total Tenants | Jumlah Lokasi Stasiun Total Station Location |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Kuliner <i>Culinary</i> | 7 | 2 |
| Fesyen <i>Fashion</i> | 4 | 2 |
| Kriya <i>Crafts</i> | 4 | 2 |

Pada periode pelaporan, Perseroan telah membangun fasilitas *co-working space* di Stasiun Bundaran HI dengan nama *LIVE@MRT Jakarta-Powered by VOffice*. Fasilitas *co-working space* adalah ruang kerja dan studio multifungsi yang dapat disewa, dengan target pasar para profesional maupun non-profesional dari kalangan milenial.

During the reporting period, the Corporation has constructed a *co-working space* facility in Bundaran HI Station known as *LIVE@MRT Jakarta-Powered by VOffice*. The *co-working space* facility is a professional space and multifunctional studio that can be rent, with the market segment of millennial professionals and non-professionals.

Profitabilitas Non-Tiket

Realisasi perolehan pendapatan non-tiket pada tahun 2020 mencapai Rp382.672 juta, atau 119,21% dari target Rp321.000 juta. Jumlah tersebut bertambah 84,32% atau setara Rp175.064 juta, dibanding pendapatan non-tiket tahun 2019 sebesar Rp207.608 juta. Pencapaian ini sebagian besar dipengaruhi oleh pendapatan non tiket dari Kerja sama penerimaan uang digital (QR), ATM dan Kerja sama layanan periklanan luar/pilar, di mana pendapatan tersebut belum ada di tahun 2019.

Non-Farebox Profitability

The realization of non-farebox revenue in 2020 reached IDR 382,672 million, or 119.21% out of the target of IDR 321,000. The amount increased by 84.32% or IDR175,064 million, compared to the non-farebox revenue in 2019 of IDR 207,608 million. The achievement is mostly influenced by non-farebox revenue from Collaboration for digital money management (QR), ATM, and other Collaboration by outdoor advertising on pillars, that had yet to be introduced in 2019.

Kinerja Pendapatan Non-Tiket
Non-Farebox Revenue Performance

| Uraian Description | Realisasi 2020 Realisation in 2020 (Rp Juta Million IDR) | Realisasi 2019 Realisation in 2019 (Rp Juta Million IDR) | Target 2020 Target in 2020 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2019 Increase (Decrease) Compared to 2019 (%) | Pencapaian Target 2020 Achievement in 2020 (%) |
|---|--|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-2/2 | 1/3 |
| Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue | 382.672 | 207.608 | 321.000 | 84,32 | 119,21 |

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Perseroan memiliki uraian aspek pemasaran, meliputi strategi untuk jangka waktu ke depan serta pangsa pasar atas jasa layanan transportasi publik. Strategi pemasaran yang dibuat juga memperhatikan karakteristik pengguna jasa yang cukup beragam, agar dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa dan juga pangsa pasar yang membutuhkan sarana pemasaran. Strategi pemasaran ditujukan untuk meningkatkan jumlah pengguna jasa, dan dilakukan melalui pendekatan keunggulan operasional dan layanan, di antaranya:

1. Menawarkan operasional dan layanan unggul yang tepat waktu, aman, nyaman, serta bebas macet;
2. Menawarkan sistem integrasi antar transportasi umum;
3. Menawarkan kemudahan metode pembayaran;
4. Program promosi pada waktu tertentu;
5. Menyediakan kemudahan sarana pengaduan terkait masalah produk/layanan/jasa perseroan, dan penanganannya, melalui beberapa kanal.

Selain itu, Perseroan memanfaatkan berbagai saluran promosi, di antaranya:

- Publikasi melalui media massa utama maupun media sosial;
- Kunjungan dan *gathering* dengan pengguna jasa secara berkala;
- Kanal media sosial yang dimiliki oleh Perseroan.

Pendekatan tersebut juga dikemas dalam berbagai bentuk kampanye kegiatan, agar dapat menghadirkan produk pemasaran yang dapat menarik pengguna jasa dan menciptakan pangsa pasar yang lebih luas.

The marketing aspects of the Corporation covers strategy in the future and market share of public transportation service. Marketing strategies are developed by taking into account the diverse characteristics of passengers to align with the requirements of the passengers and market share that requires marketing aspects. Marketing strategies aim to increase the number of passengers and carried out through operational and service excellence approach, such as:

1. *Offering excellent operations and services that are punctual, safe, comfortable, and seamless;*
2. *Offering integrated system among modes of public transportation;*
3. *Offering ease of payment;*
4. *Offering promotion programme during certain periods;*
5. *Providing ease of complaint submission concerning issues on the products/ services of the Corporation, and its handling, through numerous channels.*

Also, the Corporation leverages various promotion channels such as:

- *Publication through major mass media and social media;*
- *Frequent visit and gathering with passengers;*
- *Social media channels owned by the Corporation.*

The approach is delivered in various programme campaigns to present marketing products that can attract passengers and create a wider market share.



Integrasi Stasiun ASEAN dan Halte Bus CSW TransJakarta
Integration of ASEAN Station and TransJakarta CSW Bus Stop

Pangsa Pasar

Market Share

Dibanding dengan moda transportasi publik lain yang telah ada, keberadaan MRT Jakarta telah mampu memberikan alternatif transportasi publik yang representatif bagi warga Jakarta. Selama tahun 2020, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta mencapai 9.926.513 orang. Secara perlahan dan berkelanjutan, MRT Jakarta mampu mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi kepada penggunaan transportasi publik. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, pangsa pasar layanan transportasi publik yang dilayani MRT Jakarta diperkirakan akan terus bertambah.

Compared to other existing public transportation, MRT Jakarta has been able to provide a representative alternative public transportation for the citizens of Jakarta. In 2020, the number of MRT Jakarta passengers reached 9,926,513 passengers. Slowly and continuously, MRT Jakarta is able to encourage the transition of private vehicle users to the use of public transportation. After the COVID-19 pandemic ends, the market share of public transportation services served by MRT Jakarta is expected to continue to grow.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tahun 2020 turut berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan. Manajemen dengan arahan Direksi dan masukan Dewan Komisaris, melakukan beberapa upaya dengan pendekatan pengendalian biaya guna memastikan kinerja keuangan tetap terjaga.

Pengaruh pandemi COVID-19 dirasakan Perseroan setelah Pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembatasan jumlah pengguna jasa angkutan publik, termasuk MRT Jakarta. Akibatnya jumlah pengguna jasa menurun yang berdampak pada penerimaan pendapatan tiket (*farebox*). Semula pendapatan tiket rata-rata Rp20 miliar per bulan, namun menjadi Rp11 miliar pada bulan Maret 2020, dan terus turun seiring berkurangnya pengguna jasa.

Perseroan menyikapi kondisi ini dengan melakukan penyesuaian anggaran karena pada awalnya anggaran disusun dengan asumsi situasi normal. Penyesuaian anggaran diikuti kebijakan pengendalian biaya, dengan menerbitkan Peraturan Direksi No.12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kondisi Darurat Penanganan COVID-19 di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda), yang mengatur perubahan anggaran harus melalui persetujuan Direksi. Manajemen melakukan telaah mendalam atas usulan revisi unit kerja sebelum disampaikan dalam rapat Direksi.

The COVID-19 Pandemic that has been occurring since 2020 impacts Corporation financial performance. The management based on the directions from the Board of Directors and inputs from the Board of Commissioners took some efforts to employ a cost-control approach to ensure to maintain the financial performance.

The impact of the COVID-19 pandemic was significant to the Corporation after the Government implemented a Large-Scale Social Restriction (PSBB) in March 2020. As a follow-up on the policy, the Government of DKI Jakarta Province implemented the limitation of public transportation service users, including MRT Jakarta. Hence, the decreased passengers impacted the farebox revenue. Initially, the average farebox revenue was IDR 20 billion per month, decreased to be IDR 11 billion in March 2020 and constantly decreasing along with the decreased passengers.

The Corporation responded to the situation by adjusting the budget, as initially the budget was developed assuming normal conditions. The budget adjustment was followed by cost control measures, by issuing Directors' Regulation No. 12 Year 2020 concerning Procedures of Implementation of Activities/Budget and Policies of Goods/Services Procurement During Emergency Condition of COVID-19 Mitigation in PT MRT Jakarta (Perseroda) that governs that the amendment to the budget requires approvals from the Board of Directors. The management has carried out a deep-dive analysis of the revision proposal from the work unit before submitted in the Board of Directors' meeting.

Langkah kedua Perseroan adalah meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait subsidi. Dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan, Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan yang bersifat khusus, yaitu pada saat pandemi, untuk subsidi sarana melalui pembahasan bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, sementara untuk subsidi prasarana tidak ada perubahan. Penghitungan subsidi untuk tahun 2020 didasarkan pada rata-rata jumlah pengguna jasa pada bulan Februari 2020 sebelum pandemi COVID-19. Kebijakan ini didasarkan pertimbangan bahwa MRT Jakarta sepenuhnya menjalankan penugasan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan transportasi publik selama masa pandemi COVID-19.

Langkah ketiga adalah sehubungan dengan penurunan jumlah pengguna jasa yang berdampak menurunnya pendapatan non-tiket (*non-farebox* atau NFB), maka untuk menjaga *cash flow* Perseroan melakukan pengendalian biaya untuk anggaran-anggaran yang tidak tersubsidi serta tetap mempertahankan pendapatan NFB. Optimalisasi pendapatan NFB yang dilakukan menjadikan MRT Jakarta dapat mempertahankan pendapatan usaha pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

Seluruh upaya yang dilakukan telah mampu menjaga kinerja keuangan Perseroan selama tahun 2020. Meski dihadapkan pada pandemi, MRT Jakarta mampu mempertahankan kinerja operasional dalam melayani pengguna jasa. Perseroan juga memastikan kinerja keuangan tetap terjaga, sehingga pencapaian EBITDA tetap positif dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Selain itu, ada hal penting yang menjadi pembelajaran bersama dari pengelolaan anggaran pada masa pandemi COVID-19, yang bisa diterapkan pada tahun 2021. Perseroan berkomitmen mengelola anggaran pada periode mendatang dengan menggunakan sistem pagu. Dengan demikian, setiap unit kerja dituntut untuk menyusun anggaran dengan lebih baik lagi.

The second effort taken by the Corporation is requesting the support of the Government of DKI Jakarta Province concerning subsidy. To maintain operational continuity of the Corporation, the Government of DKI Jakarta issued a special policy, that during the pandemic, facility subsidy shall be discussed with the relevant Regional Government Agency (SKPD), while infrastructure subsidy is not amended. The calculation for subsidy in 2020 is based on the average number of passengers during February 2020, a month before the pandemic. This policy is based on the consideration that MRT Jakarta fully implements the assignment from the Government of DKI Jakarta in carrying out public transportation services during the pandemic.

The third effort taken is related to the decreasing passengers that impact the decreased non-farebox (NFB) revenue. Therefore, to maintain the cashflow, the Corporation carries out cost control measures for the budget that is not subsidised while maintaining NFB revenue. Optimisation of NFB revenue caused MRT Jakarta to maintain business revenue in 2020 relatively similar to that of the previous period.

All efforts that have been implemented have been able to maintain the Corporation financial performance in 2020. Despite the pandemic, MRT Jakarta was able to maintain operational performance in delivering the services to passengers. The Corporation also ensures to maintain financial performance, hence EBITDA achievement remains positive and there are zero layoffs to the employees.

Besides, there is another important lesson learned from the budget management during the pandemic to be implemented in 2021. The Corporation is committed to managing the budget in the upcoming periods by using the ceiling system. Therefore, the work units are required to improve their budget development process.

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Information Presentation Standards and Adherence to Financial Accounting Standards

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (EY Indonesia). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refer to the Financial Statements for the years ended on December 31, 2020 which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst and Young) Public Accountant Firm; and on December 31, 2019 which have been audited by Purwantono, Sungkoro, Surja (EY Indonesia) Public Accountant Firm. The presentation and disclosure of the Corporation financial statements are prepared following Financial Accounting Standards ("SAK") in Indonesia which covers Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Chartered Accountants.

Kinerja Keuangan

Financial Performance

Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan permodalan Perseroan. Pada tahun 2020, jumlah Liabilitas dan Ekuitas Perseroan sebesar Rp18,4 triliun, dengan komposisi terdiri dari Liabilitas sebesar 5,64% dan Ekuitas sebesar 94,36%.

Statement of Financial Position

The financial position provides a glimpse of the Corporation's capital strength. In 2020, the Total Liabilities and Equity of the Corporation was IDR 18.4 trillion, consisting of 5.64% Liabilities and 94.36% Equity.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019-2020 (Rp Juta)
Statement of Financial Position Year 2019-2020 (Million IDR)

| Posisi Keuangan Financial Position | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Aset Asset | | | | |
| Aset Lancar <i>Current Assets</i> | 1.490.592 | 1.185.263 | 305.329 | 25,76 |
| Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i> | 16.906.563 | 16.168.144 | 738.419 | 4,57 |
| Total Aset <i>Total Assets</i> | 18.397.155 | 17.353.407 | 1.043.748 | 6,01 |

| Posisi Keuangan Financial Position | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i> | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 838.291 | 699.277 | 109.728 | 15,69 |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 198.958 | 657.367 | (458.409) | (69,73) |
| Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.037.249 | 1.356.644 | (348.681) | (25,70) |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 17.359.906 | 15.966.763 | 1.362.027 | 8,51 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i> | 18.397.155 | 17.353.407 | 1.013.346 | 5,84 |

Aset

Total Aset Perseroan tahun 2020 mencapai Rp18.397.155 juta, meningkat 6,01% atau setara Rp1.043.748 juta dibanding Total Aset tahun 2019 sebesar Rp17.353.407 juta. Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar.

Assets

The Corporation's Total Assets in 2020 reached IDR18,397,155 million, increased by 6.01% or equal to IDR1,043,748 million compared to the Total Assets in 2019 of IDR17,353,407 million. Asset performance is driven by Current and Non-current Assets.

Total Aset Tahun 2016-2020 (Rp Juta)
Total Assets Year 2016-2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.095.221 | 9.781.842 | 13.413.899 | 17.353.407 | 18.397.155 |

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar tahun 2020 mencapai Rp1.490.592 juta, bertambah 25,76% atau setara Rp305.329 juta, dibanding Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp1.185.263 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan yang signifikan dari Kas dan Setara Kas dan Piutang Usaha.

Current Assets

The number of Current Assets in 2020 reached IDR1,490,592 million, increased by 25.76% or equal to IDR305,329 million compared to the Current Assets in 2019 of IDR1,185,263 million. The increase was primarily driven by the significant growth in Cash and Cash Equivalent as well as Account Receivable.

Aset Lancar Tahun 2016-2020 (Rp Juta)
Current Assets Year 2016-2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 475.867 | 785.531 | 616.805 | 1.185.263 | 1.490.592 |

| Aset Lancar Current Asset | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent</i> | 1.224.727 | 976.545 | 248.182 | 25,41 |
| Piutang Usaha <i>Account Receivable</i> | 146.127 | 78.193 | 67.934 | 88,88 |
| Piutang Subsidi <i>Subsidy Receivable</i> | 83.970 | 105.708 | (21.738) | (20,56) |
| Pendapatan Masih Akan Diterima <i>Accrued Revenues</i> | 9.732 | 9.585 | 147 | 1,54 |
| Persediaan <i>Inventory</i> | 13.364 | 3.621 | 9.743 | 269,04 |
| Aset Lancar Lainnya <i>Other Current Assets</i> | 12.672 | 11.611 | 1.061 | 9,14 |
| Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i> | 1.490.592 | 1.185.263 | 307.272 | 25,76 |

- Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 mencapai Rp1.224.727 juta. Jumlah tersebut bertambah 25,41% atau setara Rp248.182 juta, dibanding Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp976.545 juta. Hal ini dipengaruhi arus kas operasional Perseroan.

- Cash and Cash Equivalent**

Cash and Cash Equivalent as of December 31, 2020 reached IDR1,224,727 million. It increased by 25.41% or equal to IDR248,182 million, compared to Cash and Cash Equivalent as of December 31, 2019 of IDR 976,545 million. It is due to the operating cash flow of the Corporation.

- Piutang Usaha**

Piutang Usaha per 31 Desember 2020 mencapai Rp146.127 juta. Jumlah tersebut meningkat 86,88% atau Rp67.934 juta, dibanding Piutang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.193 juta. Peningkatan ini dipengaruhi oleh permintaan relaksasi pembayaran dari beberapa mitra Perseroan akibat efek pandemi.

- Account Receivables**

Account Receivables as of December 31, 2020 reached IDR146,127 million. It increased by 86.88% or equal to IDR67,934 million compared to the Account Receivable as of December 31, 2019 of IDR 78,193. It was driven by the payment relaxation request by several partners of the Corporation concerning to the impact of the pandemic.

- **Piutang Subsidi**

Piutang Subsidi per 31 Desember 2020 menjadi Rp83.970 juta, berkurang 20,56% atau setara Rp21.738 juta dibanding Piutang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp105.708 juta. Penyebabnya adalah adanya pembayaran piutang subsidi tahun 2019 di tahun 2020.

- **Pendapatan Masih Akan Diterima**

Nilai Pendapatan Masih Akan Diterima per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.732 juta, meningkat 1,54% atau setara Rp147 juta dibanding Pendapatan Masih Akan Diterima per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.585 juta. Hal ini dipengaruhi adanya pendapatan dari kontrak mitra baru di tahun 2020.

- **Persediaan**

Nilai Persediaan menjadi Rp13.364 juta per 31 Desember 2020, meningkat 269,04% atau setara Rp9.743 juta dibanding Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.621 juta. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan suku cadang sarana MRT Jakarta pasca beroperasi.

- **Aset Lancar Lainnya**

Nilai Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2020 menjadi Rp12.672 juta. Jumlah tersebut bertambah 9,14% atau setara Rp1.061 juta dibanding Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2019 yang bernilai Rp11.611 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar tahun 2020 mencapai Rp16.906.563 juta, bertambah 4,57% atau setara Rp738.419 juta, dibanding Aset Tidak Lancar tahun 2019 sebesar Rp16.168.144 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada uang muka kontraktor proyek MRT Fase 2.

- **Subsidy Receivables**

Subsidy Receivables as of December 31, 2020 was IDR83,970 million decreased by 20.56% or equal to IDR 21,738 million compared to the Subsidy Receivables as of December 31, 2019 of IDR 105,708 million. This was caused by the payment of subsidy receivables for 2019 in 2020.

- **Accrued Revenues**

The total Accrued Revenues as of December 31, 2020 was IDR9,732 million, increased by 1.54% or equal to IDR147 million compared to the Accrued Revenues as of December 31, 2019 of IDR 9,585 million. It was due to the revenues from the contracts of new partners in 2020.

- **Inventory**

The amount of inventory shifted to IDR 13,364 million as of December 31, 2020, increased by 269.04% or equal to IDR 9,743 million compared to the Inventory as of December 31, 2019 of IDR 3,621 million. This condition was arising due to the increasing spare parts of MRT Jakarta facilities after the operations.

- **Other Current Assets**

Other Current Assets as of December 31, 2020 was IDR 12,672 million. This amount increased by 9.14% or equal to IDR 1,061 million compared to Other Current Assets as of December 31, 2019 of IDR 11,611 million.

Non-Current Assets

Non-Current Assets in 2020 reached IDR16,906,563 million, increased by 4.57% or equal to IDR738,419 million, compared to Non-Current Assets in 2019 of IDR 16,168,144 million. The increase was caused by the increased contractors' advances for Phase 2 MRT project.

Aset Tidak Lancar Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

Non-Current Assets Year 2016-2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 5.619.354 | 8.996.310 | 12.797.094 | 16.168.144 | 16.906.563 |

| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Uang Muka Kontraktor <i>Contractor Advances</i> | 765.178 | 19.000 | 746.178 | 3.927,27 |
| Investasi Entitas anak dan ventura bersama <i>Subsidiary and Joint Venture Investment</i> | 33.849 | - | 33.849 | 100 |
| Aset Tetap - Neto <i>Fixed Assets – Net</i> | 15.944.111 | 16.023.642 | (79.531) | (0,50) |
| Aset Hak Guna - Neto <i>Aset Hak Guna - Neto</i> | 31.882 | - | 31.882 | 100 |
| Aset Tak Berwujud - Neto <i>Intangible Assets - Net</i> | 27.715 | 28.741 | (1.026) | (3,57) |
| Uang Jaminan <i>Security Deposits</i> | 20.489 | 13.431 | 7.058 | 52,54 |
| Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i> | 72.374 | 78.326 | (5.952) | (7,60) |
| Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan <i>Estimated Claim for Tax Refund</i> | 10.965 | 5.004 | 5.961 | 119,13 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i> | 16.906.563 | 16.168.144 | 738.419 | 4,57 |

- **Uang Muka Kontraktor**

Uang Muka Kontraktor per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 3.927,27%, atau setara Rp746.178 juta menjadi Rp765.178 juta, dibanding Nilai Muka Kontraktor per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.000 juta. Hal ini disebabkan adanya uang muka kontraktor CP201 untuk pembangunan fase 2 MRT Jakarta.

- **Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama**

Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 100%, atau setara Rp33.849 juta dibanding Investasi Entitas Anak dan Ventura per 31 Desember 2019 sebesar yang bernilai Nihil. Hal ini dipengaruhi karena Entitas Anak dan Ventura baru terbentuk di Tahun 2020.

- **Aset Tetap-Neto**

Aset Tetap – Neto per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.944.111 juta, menurun 0,50% atau setara Rp79.531 juta, dibanding Aset Tetap – Neto per 31 Desember 2019 yang mencapai Rp16.023.642 juta. Hal ini dipengaruhi oleh beban depresiasi.

- **Aset Hak Guna-Neto**

Aset Hak Guna - Neto per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 100%, atau setara Rp31.882 juta menjadi Rp31.882 juta, dibanding Aset Hak Guna-Neto Nihil. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan PSAK 73 yang baru efektif di tahun 2020.

- **Contractor Advances**

Contractor Advances as of December 31, 2020 increased by 3,927.27% or equal to IDR746,178 million to be IDR765,178 million, compared to Contractor Advances as of December 31, 2019 of IDR 19,000 million. It was due to the contractor advances of CP201 for phase 2 construction of MRT Jakarta.

- **Subsidiary and Joint Venture Investment**

The Subsidiary and Joint Venture Investment as of December 31, 2020 increased by 100% or equal to IDR 33,849 compared to nil Subsidiary and Joint Venture Investment as of December 31, 2019. This was caused by the establishment of a Subsidiary and Joint Venture in 2020.

- **Fixed Assets – Net**

Fixed Assets – Net as of December 31, 2020 was IDR 15,944,111 million, decreased by 0.50% or equal to IDR 79,531 million compared to the Fixed Asset – Net as of December 31, 2019 that reached IDR 16,023,642 million. This was caused by depreciation cost.

- **Right-of-use Assets – Net**

The Right-of-use Assets – Net as of December 31, 2020 increased by 100% or equal to IDR 31,882 million to be IDR 31,882 million, compared to nil Right-of-use Assets – Net as of December 31, 2019. It was influenced by the implementation of PSAK 73 that started to take into effect in 2020.

- Aset Tak Berwujud-Neto**
 Aset Tak Berwujud-Neto per 31 Desember 2020 menjadi Rp27.715 juta, berkurang 3,57% atau setara Rp1.026 juta, dibanding Aset Tak berwujud – Neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.741 juta. Hal ini dipengaruhi oleh amortisasi Aset Tak Berwujud.
- Uang Jaminan**
 Per 31 Desember 2020, Uang Jaminan meningkat 52,54%, atau setara Rp7.058 juta, dibanding periode sebelumnya dari Rp13.431 juta menjadi Rp20.489 juta. Kondisi ini dipengaruhi adanya peningkatan pada uang jaminan listrik PLN.
- Aset Pajak Tangguhan**
 Per 31 Desember 2020, Aset Pajak Tangguhan mencapai Rp72.374 juta. Jumlah tersebut menurun 7,60% atau setara Rp5.952 juta, dibanding Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.326 juta.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan tahun 2020 mencapai Rp1.037.249 juta, menurun 25,70% atau setara Rp348.681 juta, dibanding Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp1.356.644 juta. Kinerja Liabilitas Perseroan dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang.

- Intangible Assets – Net**
Intangible Assets – Net as of December 31, 2020 was IDR27,715 million, decreased by 3.57% or equal to IDR1,026 million compared to the Intangible Assets – Net as of December 31, 2019 of IDR28,741 million. It was influenced by the amortisation of tangible assets.
- Security Deposits**
As of December 31, 2020, the Security Deposits increased by 52.54% or equal to IDR7,058 million from the Security Deposits of the previous period of IDR13,431 million to be IDR 20,489 million. This condition was driven by the increase in PLN electricity security deposits.
- Deferred Tax Assets**
As of December 31, 2020, Deferred Tax Assets reached IDR72,374 million. It decreased by 7.60% or equal to IDR5,952 million compared to Deferred Tax Asset as of December 31, 2019 of IDR78,326 million.

Liabilities

The Corporation's Total Liabilities of 2020 reached IDR1,037,249 million, decreased by 25.70% or equal to IDR348,681 million, compared to the Liabilities of 2019 of IDR1,356,644 million. The Corporation's Liability performance is driven by Current Liabilities and Non-Current Liabilities.

Total Liabilitas Tahun 2016 – 2020 (Rp Juta)
Total Liabilities Year 2016 – 2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 607.882 | 1.022.198 | 1.131.037 | 1.356.644 | 1.037.249 |

| Liabilitas <i>Liabilities</i> | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 838.291 | 699.277 | (109.728) | 15,69 |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 198.958 | 657.367 | (458.409) | (69,73) |
| Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.037.249 | 1.356.644 | (317.452) | (25,70) |

Liabilitas Jangka Pendek

Dibanding Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp699.277 juta, Total Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 mengalami penurunan 19,88%, atau setara Rp109.728 juta, menjadi Rp838.291 juta. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan dari beban akrual ke kontraktor.

Current Liabilities

Compared to Current Liabilities in 2019 of IDR 699,277 million, the Current Liabilities of 2020 decreased by 19.88% or equal to IDR109,728 million to be IDR 838,291 million. It is due to a significant decrease in accrued expenses to the contractors.

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2016 – 2020 (Rp Juta)
Current Liabilities Year 2016 – 2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 262.755 | 466.942 | 382.883 | 699.277 | 838.291 |

| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Utang Usaha <i>Account Payables</i> | 1.510 | 2.270 | (760) | (33,48) |
| Utang Kontraktor dan Konsultan <i>Payables to Contractor and Consultants</i> | 56.946 | 146.819 | (89.873) | (61,21) |
| Utang Retensi <i>Retention Payable</i> | 431.065 | - | 431.065 | 100 |
| Beban Akrua <i>Accrued Expenses</i> | 169.256 | 369.967 | (200.710) | (54,25) |
| Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek <i>Short-term Unearned Revenues</i> | 137.007 | 127.615 | 9.393 | 7,36 |
| Utang Pajak <i>Tax Payables</i> | 13.221 | 52.606 | (37.442) | (74,87) |
| Liabilitas Sewa <i>Lease Liability</i> | 29.286 | - | 29.286 | 100 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i> | 838.291 | 699.277 | 139.014 | 19,88 |

- Utang Usaha**
Penurunan Utang Usaha sebesar 33,48% atau setara Rp760 juta, dari Rp2.270 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp1.510 juta per 31 Desember 2020.
- Utang Retensi**
Peningkatan Utang Retensi sebesar 100% atau setara Rp431.065 juta, dari Nihil juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp431.065 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi oleh reklasifikasi Utang Retensi pada liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek.
- Utang Kontraktor dan Konsultan**
Penurunan Utang Kontraktor dan Konsultan sebesar 61,21% atau setara Rp89.873 juta, dari Rp146.819 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp56.946 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi oleh pembayaran hutang 2019 di tahun 2020.
- Beban Akrua**
Penurunan Beban Akrua sebesar 54,25% atau setara Rp200.710 juta, dari Rp369.967 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp169.256 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembayaran akrual di tahun 2020.
- Account Payables**
Account Payables decreased by 33.48% or equal to IDR760 million, from IDR2,270 million as of December 31, 2019 to be IDR1,510 million as of December 31, 2020.
- Retention Payables**
Retention Payables increased by 100% or equal to IDR 480,065 million, from nil as of December 31, 2019 to be IDR 431,065 million as of December 31, 2020. It was influenced by the reclassification of retention payables on non-current liabilities to be current liabilities.
- Payables to Contractors and Consultants**
Payables to Contractors and Consultants decreased by 61.21% or equal to IDR89,873 million, from IDR 146,819 million as of December 31, 2019 to be IDR56,946 million as of December 31, 2020. It was influenced by the payment of payables of 2019 in 2020.
- Accrued Expenses**
Accrued Expenses decreased by 54.25% or equal to IDR200,710 million from IDR369,967 million as of December 31, 2019, to be IDR IDR169,256 million as of December 31, 2020. It was influenced by accrual payment in 2020.

- **Pendapatan Diterima Dimuka**

Peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 7,36% atau setara Rp9.393 juta, dari Rp127.615 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp137.007 juta per 31 Desember 2020. Peningkatan disebabkan adanya pendapatan yang diterima dari kontrak baru di 2020.

- **Utang Pajak**

Penurunan Utang Pajak sebesar 74,87% atau setara Rp37.442 juta, dari Rp52.606 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp13.221 juta per 31 Desember 2020. Penurunan Utang Pajak dipengaruhi oleh pembayaran utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- **Liabilitas Sewa**

Peningkatan Liabilitas Sewa sebesar 100% atau setara Rp29.286 juta, dari Nihil juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp29.286 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi oleh dampak atas penerapan PSAK 73 yang baru efektif per 1 Januari 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 mencapai Rp198.958 juta, turun 69,73% atau setara Rp458.409 juta dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp657.367 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh reklasifikasi pada utang retensi dari liabilitas jangka Panjang ke liabilitas jangka pendek.

- **Unearned Revenues**

Unearned Revenues increased by 7.36% or equal to IDR9,393 million, from IDR127,615 million as of December 31, 2019 to be IDR137,007 million as of December 31, 2020. The increase was caused due to revenues generated from new contracts in 2020.

- **Tax Payables**

Tax Payables decreased by 74.87% or equal to IDR37,442 million, from IDR 52,606 million as of December 31, 2019 to be IDR13,221 million as of December 31, 2020. The decrease was caused by the payment of Land and Building Tax (PBB).

- **Lease Liability**

The Lease Liability increased by 100% or equal to IDR 29,286 million from nil as of December 31, 2019 to be IDR 29,286 million as of December 31, 2020. It was influenced by the impacts of the implementation of PSAK 73 that came into effect as of January 1, 2020.

Non-Current Liabilities

Non-Current Liabilities as of December 31, 2020 reached IDR198,958 million, decreased by 69.73% or equal to IDR458,409 million compared to December 31, 2019 of IDR 657,367 million. The decrease was caused by the reclassification of retention payables from non-current liabilities to be current liabilities.

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2016 – 2020 (Rp Juta)

Non-Current Liabilities Year 2016 – 2020 (IDR Million)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 345.127 | 555.256 | 748.155 | 657.367 | 198.958 |

| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Utang Retensi <i>Retention Payables</i> | - | 480.756 | (480.756) | (100) |
| Liabilitas Sewa <i>Unearned Revenues</i> | 1.802 | - | 1.802 | 100 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang <i>Long-term Unearned Revenues</i> | 138.085 | 134.734 | 3.351 | 2,49 |
| Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan <i>Liabilities for Employee Benefit</i> | 44.763 | 28.855 | 15.908 | 55,13 |
| Jaminan Uang Pelanggan <i>Customers' Security Deposit</i> | 14.307 | 13.021 | 1.286 | 9,88 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i> | 198.958 | 657.367 | (458.409) | (69,63) |

- **Utang Retensi**

Penurunan Utang Retensi sebesar 100% atau setara Rp480.756 juta, dari Rp480.756 juta per 31 Desember 2019 menjadi Nihil per 31 Desember 2020. Penurunan Utang Retensi dipengaruhi adanya reklasifikasi pada utang retensi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek.

- **Liabilitas Sewa**

Peningkatan Liabilitas Sewa sebesar 100% atau setara Rp1.802 juta, dari Nihil per 31 Desember 2019 menjadi Rp1.802 juta per 31 Desember 2020. Hal dipengaruhi oleh dampak atas penerapan PSAK 73 yang baru efektif per 1 Januari 2020.

- **Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang**

Peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 2,49% atau setara Rp3.351 juta, dari Rp134.734 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp138.085 juta per 31 Desember 2020.

- **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Peningkatan Liabilitas Imbalan Karyawan sebesar 55,13% atau setara Rp15.908 juta, dari Rp28.855 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp44.763 juta per 31 Desember 2020. Penyebabnya karena adanya peningkatan jumlah karyawan di 2020.

- **Uang Jaminan Pelanggan**

Peningkatan Uang Jaminan sebesar 9,88% atau setara Rp1.286 juta, dari Rp13.021 Juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp14.307 juta per 31 Desember 2020.

- **Retention Payables**

Retention Payables decreased by 100% or equal to IDR 480,756 million, from IDR 480,756 million as of December 31, 2019 to be nil as of December 31, 2020. The decreased Retention Payables occurred due to the reclassification of retention payables from non-current liabilities to be current liabilities.

- **Lease Liability**

The Lease Liability increased by 100% or equal to IDR 1,802 million from nil as of December 31, 2019 to be IDR 1,802 million as of December 31, 2020. It was influenced by the impacts of the implementation of PSAK 73 that came into effect as of January 1, 2020.

- **Long-term Unearned Revenues**

Unearned Revenues increased by 2.49% or equal to IDR3,351 million, from IDR134,734 million as of December 31, 2019 to be IDR138,085 million as of December 31, 2020.

- **Liabilities for Employee Benefits**

Liabilities for Employee Benefits increased by 55.13% or equal to IDR15,908 million, from IDR 28,855 million as of December 31, 2019 to be IDR44,763 million as of December 31, 2020. It was caused by the increasing number of employees in 2020.

- **Customers' Security Deposit**

Security Deposit increased by 9.88% or equal to IDR1,286 million, from IDR13,021 million as of December 31, 2019 to be IDR14,307 million as of December 31, 2020.

Ekuitas

Ekuitas Neto Perseroan per 31 Desember 2020 mencapai Rp17.359.906 juta, bertambah 8,51% atau setara Rp1.393.143 juta dibandingkan Ekuitas Neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.996.763 juta. Kenaikan dipengaruhi adanya tambahan modal disetor dari Pemprov DKI Jakarta.

Equity

The Corporation's Net Equity as of December 31, 2020 reached IDR17,359,906 million, increased by 8.51% or equal to IDR1,393,143 million compared to Net Equity as of December 31, 2019 of IDR15,996,763 million. The increase was driven due to additional paid-up capital from the Government of DKI Jakarta Province.

Total Ekuitas Tahun 2016 – 2020 (Rp Juta)

Total Equity Year 2016 – 2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 5.487.339 | 8.759.643 | 12.282.862 | 15.996.763 | 17.359.906 |

| Ekuitas Equity | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Modal Saham <i>Shared Capital</i> | 16.339.169 | 12.771.972 | 3.567.197 | 27,93 |
| Modal Disetor Lainnya <i>Other Paid-Up Capital</i> | 1.433.474 | 567.202 | 2.135.392 | 59,82 |
| Defisit <i>Deficit</i> | (412.737) | (342.411) | (70.326) | 20,54 |
| Total Ekuitas <i>Total Equity</i> | 17.359.906 | 15.996.763 | 1.393.143 | 8,51 |

Modal Saham

Peningkatan Modal Saham sebesar 27,93% atau setara Rp3.567.197 juta, dari Rp12.771.972 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp16.339.169 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi adanya tambahan modal disetor dari Pemprov DKI Jakarta.

Modal Disetor Lainnya

Penurunan Modal Disetor Lainnya sebesar 59,82% atau setara Rp2.135.392 juta, dari Rp567.202 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp1.433.474 juta per 31 Desember 2020.

Defisit

Peningkatan Defisit sebesar 20,54% atau setara Rp70.326 juta, dari Rp342.411 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp412.737 juta per 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19 berpengaruh pada Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain. Berkurangnya mobilitas warga Jakarta berdampak pada penurunan jumlah pengguna jasa, sehingga mempengaruhi perolehan pendapatan tiket.

Shared Capital

Shared Capital increased by 27.93% or equal to IDR 3,567,197 million, from IDR 12,771,972 million as of December 31, 2019 to be IDR16,339,169 million as of December 31, 2020. It is due to additional paid-up capital from the Government of DKI Jakarta Province.

Other Paid-Up Capital

Other Paid-Up Capital decreased by 59.82% or equal to IDR2,135,392 million, from IDR567,202 million as of December 31, 2019 to be IDR1,433,474 million as of December 31, 2020.

Deficit

Deficit increased by 20.54% or equal to IDR70,326 million from 342,411 million as of December 31, 2019 to be IDR412,737 million as of December 31, 2020.

Profit (Loss) and Other Comprehensive Revenues

The implementation of PSBB due to the COVID-19 pandemic impacted the Profit (Loss) and Other Comprehensive Revenues. The decreased mobility of the citizens of Jakarta resulted in a decreased number of passengers, impacting the farebox revenue generation.

Laba (Rugi) Tahun 2019-2020

Profit (loss) Year 2019-2020

| Laba (Rugi) Profit (Loss) | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| | 1 | 2 | 1-2 | 1:2 |
| Pendapatan <i>Revenue</i> | 1.085.498 | 933.230 | 152.268 | 16,32 |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenue</i> | (976.692) | (760.415) | (216.277) | 28,44 |
| Laba Kotor <i>Gross Profit</i> | 108.806 | 172.815 | (64.009) | (37,04) |
| Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expense</i> | (189.754) | (221.750) | 31.996 | (14,43) |

| Laba (Rugi) Profit (Loss) | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| | 1 | 2 | 1-2 | 1:2 |
| Laba (Rugi) Usaha <i>Operating Profit (Loss)</i> | (80.948) | (48.935) | (27.589) | 65,42 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expense)</i> | 35.731 | 120.854 | (89.547) | (70,43) |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Final Tax Expense and Income Tax Benefits</i> | (45.217) | 71.919 | (117.136) | (162,87) |
| Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i> | (17.492) | (7.973) | (9.519) | 119,39 |
| Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Income Tax Benefits</i> | (62.709) | 63.946 | (126.655) | (198,07) |
| Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan <i>Deferred Income Tax Benefits</i> | (6.385) | 79.434 | (85.819) | (108,04) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Income (Loss) for the year</i> | (69.094) | 143.380 | (212.474) | (148,19) |
| Penghasilan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i> | (1.732) | 3.324 | (5.056) | (152,10) |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income</i> | (70.826) | 146.704 | (217.530) | (148,28) |
| Laba (Rugi) per Saham (Rupiah Penuh) <i>Earning (Loss) per Share (full Rupiah)</i> | (4.429) | 11.226 | (15.455) | (137,67) |

Pendapatan

Pendapatan Perseroan didapatkan dari pendapatan tiket termasuk subsidi prasarana dan sarana dari Pemprov DKI Jakarta, serta pendapatan non-tiket. Informasi lengkap lihat halaman 184 Laporan ini, pada bahasan tentang Kinerja Pendapatan Dari Kegiatan Segmen Usaha.

Revenue

Revenue of the Corporation is generated from farebox revenue including infrastructure and facility subsidy from the Government of DKI Jakarta, and non-farebox revenue. Further information is presented on page 184 of this Report, under the discussion of Revenue Performance by Business Segment.

Pendapatan Tahun 2019-2020 Revenues Year 2019-2020

| Pendapatan Revenue | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 82.025 | 191.552 | (109.527) | (57,18) |
| Pendapatan Subsidi <i>Subsidy Revenue</i> | 620.801 | 534.070 | 86.731 | 16,24 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 382.672 | 207.608 | 175.064 | 84,32 |
| Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i> | 1.085.498 | 933.230 | 152.268 | 16,32 |

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan pada periode pelaporan sebesar Rp976.692 juta.

Cost of Revenues

The Cost of Revenue during the reporting period was IDR976,692 million.

Beban Pokok Pendapatan Tahun 2019-2020

Cost of Revenues Year 2019-2020

| Pendapatan Revenue | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Penyusutan Depreciation | 520.750 | 388.170 | 132.580 | 34,16 |
| Keamanan dan Kebersihan Security and Hygiene | 132.271 | 102.876 | 29.395 | 28,57 |
| Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employees Welfare | 120.860 | 94.628 | 26.232 | 27,72 |
| Energi dan Utilitas Energy and Utility | 81.576 | 92.528 | (10.952) | (11,84) |
| Asuransi Insurance | 25.792 | 20.675 | 5.117 | 24,75 |
| Keperluan Rumah Tangga Household Appliances | 61.431 | 49.013 | 12.418 | 25,34 |
| Pemeliharaan Maintenance | 34.012 | 12.525 | 21.487 | 171,56 |
| Jumlah Total | 976.692 | 760.415 | 216.277 | 28,44 |

Laba Kotor

Laba Kotor didapatkan dari akun Pendapatan yang diakumulasi dengan Beban Pokok Pendapatan. Pada periode pelaporan Perseroan membukukan Laba Kotor sebesar Rp108.806 juta, turun 37,04% atau setara Rp64.009 juta dibanding perolehan Laba Kotor tahun 2019 yang mencapai Rp172.815 juta. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok pendapatan.

Gross Profit

Gross Profit is generated from the Revenue account which is accumulated with the Cost of Revenue. During the reporting period, the Corporation accounted Gross Profit of IDR108,806 million decreased by 37.04% or equal to IDR64,009 million compared to the Gross Profit in 2019 of IDR172,815 million. It is driven by the increased cost of revenues.

Beban Umum dan Administrasi

Penurunan jumlah Beban Umum dan Administrasi pada periode pelaporan sebesar 14,43% atau setara Rp31.996 juta, dari Rp221.750 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp189.754 juta per 31 Desember 2020. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi biaya yang dilakukan oleh Perseroan.

General and Administrative Expenses

The General and Administrative Expenses during the reporting period decreased by 14.43% or equal to IDR31,996 million, from IDR 221,750 million as of December 31, 2019 to be IDR189,754 million as of December 31, 2020. Such condition was driven by cost efficiency measures taken by the Corporation.

Beban Umum dan Administrasi Tabel 2019-2020
General and Administrative Expenses Year 2019-2020

| Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employee's Welfare | 86.425 | 106.969 | (20.544) | (19,21) |
| Perlengkapan Kantor Office Supplies | 18.448 | 30.051 | (11.602) | (38,61) |
| Pelatihan dan Keanggotaan Training and Membership | 4.901 | 18.852 | (13.951) | (74,00) |
| Sewa Kantor dan Kendaraan Office and Vehicle Rent Expenses | 2.247 | 17.330 | (15.084) | (87,04) |
| Jasa Profesional Professional Fee | 32.914 | 17.082 | 15.832 | 92,68 |
| Promosi dan Pameran Promotion and Exhibition | 6.582 | 8.989 | (2.407) | (26,78) |
| Keperluan Rumah Tangga Household Appliance | 8.319 | 6.585 | 1.734 | 26,33 |
| Penyusutan Depreciation | 9.768 | 4.213 | 5.555 | 131,87 |
| Hak Guna Usaha Lease Depreciation | 11.824 | - | 11.824 | 100 |
| Rapat Koordinasi dan RUPS Coordination and Shareholder's Meetings | 2.019 | 3.490 | (1.471) | (42,14) |
| Transportasi dan Parkir Transportation and Parking | 2.054 | 2.707 | (653) | (24,12) |
| Amortisasi Amortisation | 2.814 | 2.192 | 622 | 28,36 |
| Sumbangan Donation | 1.066 | 1.648 | (583) | (35,35) |
| Komunikasi, Energi dan Utilitas Communication, Energy and Utility | 328 | 1.567 | (1.239) | (79,07) |
| Administrasi Bank Bank Administration | 44 | 73 | 29 | (39,44) |
| Jumlah Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense | 189.754 | 221.750 | (31.996) | (14,43) |

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) Usaha didapatkan dari akun Laba Kotor yang diakumulasi dengan beban usaha. Rugi Usaha tahun 2020 sebesar Rp80.948 juta, naik 65,42% atau setara Rp32.013 juta, dibanding tahun 2019 sebesar Rp48.935 juta. Peningkatan Rugi Usaha ini sejalan dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya di 2020.

Operating Profit (Loss)

Operating Profit (Loss) is generated from Gross Profit accumulated with operating expenses. Operating Losses in 2020 were IDR80,948 million, increased by 65,42% or equal to IDR32,013 million compared to Operating Losses in 2019 of IDR48,935 million. The increased Operating Loss is aligned with the increased revenue and cost efficiency in 2020.

Laba (Rugi) Usaha Tahun 2016-2020
Operating Profit (Loss) Year 2016-2020

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| (79.457) | (136.266) | (207.263) | (48.935) | (80.948) |

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penurunan Penghasilan (Beban) Lain-lain sebesar 70,43% atau setara Rp85.123 juta, dari Rp120.854 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp35.731 juta per 31 Desember 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perbedaan selisih kurs dan bagian kerugian dari perusahaan ventura.

Other Income (Expenses)

Other Income (Expenses) decreased by 70.43% or equal to IDR85,123 million, from IDR 120,854 million as of December 31, 2019 to be IDR35,731 million as of December 31, 2020. The condition was influenced by various drivers such as foreign exchange rate difference and part of joint venture loss.

Penghasilan (Beban) Lain-lain Tahun 2019-2020
Other Income Year 2019-2020

| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income</i> | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Laba Selisih Kurs - Neto <i>Gain on Foreign Exchange - Net</i> | (19.651) | 48.213 | (67.865) | (140,76) |
| Penghasilan Bunga <i>Interest Income</i> | 52.243 | 38.511 | 13.732 | 35,66 |
| Bagian Kerugian Ventura Bersama <i>Share of loss of joint venture</i> | (6.951) | - | (6.951) | (100) |
| Penghasilan Denda <i>Penalty Income</i> | - | 23.420 | (23.420) | (100) |
| Penghasilan Keuangan <i>Finance Income</i> | (11.436) | 11.979 | (23.415) | (195,47) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto <i>Other Income (Expense) – Net</i> | 21.527 | (1.269) | 22.796 | 1.796,42 |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Total Other Income (Expense) - Net</i> | 35.731 | 120.854 | (85.123) | (70,43) |

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan merupakan Laba atau Rugi Bersih Perseroan yang didapatkan dari akun Laba (Rugi) Usaha yang diakumulasikan dengan Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto. Rugi Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp69.094 juta, menurun 148,19% atau setara Rp212.474 juta, dibanding Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp143.380 juta. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok pendapatan yang tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan akibat dampak pandemi.

Current Year Profit (Loss)

Current Year Profit (Loss) is Net Profit or Loss of the Corporation generated from Operating Profit (Loss) accumulated with Other Income (Expenses). Current Year Losses in 2020 were IDR69,094 million, decreased by 148.19% or equal to IDR212,474 million compared to Current Year Profit in 2019 of IDR143,380 million. This condition is driven by the increase in the cost of revenues that is not balanced with the revenue increase due to the pandemic.

Perkembangan Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2016-2020 (Rp Juta)

Progress of Income (Loss) for The Year 2016-2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| (36.413) | (115.130) | (138.719) | 143.380 | (69.094) |

Total Penghasilan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan didapatkan dari akun Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diakumulasikan dengan penghasilan (beban) komprehensif lain. Total Rugi Komprehensif tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp70.826 juta, menurun 148,28% atau setara Rp217.530 juta, dibanding perolehan Total Laba Komprehensif Tahun 2019 sebesar Rp146.704 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan pada pendapatan lain-lain dan manfaat pajak penghasilan tangguhan.

Current Year Total Comprehensive Income (Loss)

The Current Year Total Comprehensive Income (Loss) is generated from the Current Year Profit (Loss) Account accumulated with Other Comprehensive Income (Loss). The Current Year Total Comprehensive Loss in 2020 was IDR70,826 million, decreased by 148.28% or equal to IDR217,530 million, compared to the generation of Total Comprehensive Profit in 2019 of IDR 146,704 million. The decrease is caused by the decrease of other revenues and deferred income tax benefits.

Perkembangan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 2016 – 2020 (Rp Juta)

Progress of Total Comprehensive Income (Loss) for The Year 2016 – 2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| (35.964) | (116.894) | (137.506) | 146.704 | (70.826) |

Laba (Rugi) per Saham

Laba (Rugi) Per Saham merupakan Laba Bersih yang dialokasikan ke setiap Saham yang Beredar, yang didapatkan dari Laba Tahun Berjalan dibagi dengan rata-rata tertimbang Jumlah Saham yang Beredar.

Laba Per Saham tahun 2020 sebesar (Rp4.229) per lembar saham. Nilai tersebut menurun 137,67% atau setara (Rp4.229) per lembar saham. Nilai tersebut menurun 137,67% atau setara Rp15.455 dibanding Laba Per Saham 2019 sebesar Rp11.226 per lembar saham. Penurunan ini dipengaruhi oleh Perseroan yang mencatat rugi usaha di 2020.

Earnings (Loss) per Share

Earnings (Loss) per Share is Net Profit allocated to each Outstanding Share, which is obtained from the Current Year Profit divided by the weighted average of Total Outstanding Shares.

Profit per Share in 2020 was (IDR4,229) per share. This value decreased by 137.67% or equal to (IDR4,229) per share. This value decreased by 137,67% or equal to Rp15.455 compared to Earnings per Share in 2019 of IDR11,226 per share. Such a decrease is caused by the operating losses recorded by the Corporation in 2020.

Laba (Rugi) Per Saham Tahun 2019-2020
Earning (Loss) Per Share Year 2019-2020

| Laba (Rugi) Per Saham <i>Earning (Loss) Per Share</i> | 2020 | 2019 | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|--|------------|------------|--|--|
| | | | Nominal Total (Rp Juta <i>Million IDR</i>) | Persentase <i>Percentage</i> (%) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp Juta) <i>Income (Loss) for The Year (Rp Million)</i> | (69.094) | 143.380 | (191.946) | (148) |
| Jumlah Saham yang Beredar (Lembar) <i>Number of Outstanding Shares</i> | 16.339.169 | 12.771.972 | 3.567.197 | 28 |
| Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Rp/Lembar) <i>Income (Loss) Per Basic Share (Rp/Share)</i> | (4.229) | 11.226 | (15.455) | (137,67) |

Perkembangan Laba (Rugi) Per Saham 2016 – 2020 (Rp)
Progres of Earning (Loss) Per Share 2016 – 2020 (IDR)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|----------|----------|--------|---------|
| (9.198) | (20.121) | (22.498) | 11.266 | (4.229) |

Informasi Tentang Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Pada periode pelaporan, Perseroan telah membentuk entitas anak, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, dan PT Integrasi Transit Jakarta. Total rugi yang diatribusikan kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp616,7 juta.

Laporan Arus Kas

Kas dan Setara Kas pada akhir periode pelaporan, tercatat naik 25,41% atau setara Rp248.182 juta menjadi Rp1.224.727 juta, dari Rp976.545 juta di awal periode pelaporan.

Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perseroan dalam suatu periode tertentu. Peningkatan Kas dan Setara Kas akhir periode 2020 menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola arus kas yang baik, sehingga Kas dan Setara Kas awal periode 2020 tercatat meningkat apabila dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas awal periode 2020.

Information concerning Current Year Profit (Loss) and Current Year Total Comprehensive Profit (Loss) Attributable to Owners of Parent Entity and Non-Controlling Interests

During the reporting period, the Corporation has established subsidiaries, namely PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek and PT Integrasi Transit Jakarta. The total losses attributable to non-controlling interests was IDR616.7 million.

Cash Flow Statement

Cash and Cash Equivalent as of the end of the reporting period were recorded to increase by 25.41% or equal to IDR248,182 million to be IDR1,224,727 million, from IDR976,545 million at the beginning of the reporting period.

Cash flow provides an overview of the number of revenues and expenses of the Corporation in a certain period. An increase in Cash and Cash Equivalent as of the end of 2020 shows the Corporation's ability in the good management of cash flow, so that the Cash and Cash Equivalents as of the end of 2020 was recorded to increase compared to the Cash and Cash Equivalents at the beginning of 2020.

Arus Kas Tahun 2019-2020

Cash Flow Year 2019-2020

| Arus Kas Cash Flow | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities | 327.622 | 561.816 | (234.194) | (41,69) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow Investing Activities | (79.940) | (190.162) | 110.222 | (57,96) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities | 500 | - | 500 | 100 |
| Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash (Equivalents) | 248.182 | 371.654 | (123.472) | (33,22) |
| Kas dan Setara Kas Awal tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year | 976.545 | 604.891 | 371.654 | 61,44 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at end of Year | 1.224.727 | 976.545 | 248.182 | 25,41 |

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp327.622 juta, menurun 41,69% atau setara Rp234.194 juta dibanding Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp561.816 juta. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok.

Cash Flow from Operating Activities

Net Cash used in Operating Activities in 2020 was IDR327,622 million, decreased by 41.69% or equal to IDR234,194 million compared to Net Cash used in Operating Activities in 2019 of IDR561,816 million. This decrease was mainly caused by the increase in cash payments to suppliers.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019-2020
Cash Flow From Operating Activities Year 2019-2020

| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers | 419.384 | 601.047 | (181.663) | (30,22) |
| Penerimaan dari Subsidi Receipts from Subsidy | 641.762 | 427.027 | 214.735 | 50,29 |
| Penerimaan Penghasilan Bunga Receipts from Interest Income | 39.338 | 29.862 | 9.476 | 31,73 |
| Pembayaran kepada Pemasok Payment to Vendors | (564.156) | (347.315) | (216.842) | 62,43 |
| Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan Payment to Commissioners, Directors, and Employees | (208.706) | (148.806) | (59.900) | 40,25 |
| Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi Net Cash Received (Used) in Operating Activities | 327.622 | 561.816 | (234.194) | (41,69) |

- **Penerimaan dari Pelanggan**

Penurunan Penerimaan dari Pelanggan sebesar 30,22% atau setara Rp181.663 juta, dari Rp601.047 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp419.384 juta per 31 Desember 2020. Penurunan Penerimaan dari Pelanggan pada periode pelaporan dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pengguna jasa karena adanya pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai dampak pandemi COVID-19.

- **Penerimaan dari Subsidi**

Peningkatan Penerimaan dari Subsidi menjadi Rp641.762 juta per 31 Desember 2020, dari Rp427.027 juta per 31 Desember 2019. Subsidi diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa subsidi prasarana dan sarana.

- **Penerimaan Penghasilan Bunga**

Peningkatan Penerimaan Penghasilan Bunga sebesar 31,73% atau setara Rp9.476 juta, dari Rp29.862 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp39.338 juta per 31 Desember 2020. Peningkatan Kas dari Penerimaan Bunga dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang naik sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia.

- **Pembayaran kepada Pemasok**

Peningkatan Pembayaran kepada Pemasok sebesar 62,43% atau setara Rp216.842 juta, dari Rp347.315 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp564.156 juta per 31 Desember 2020.

- **Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan**

Peningkatan Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan sebesar 40,25% atau setara Rp59.899 juta, dari Rp148.806 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp208.706 juta per 31 Desember 2020. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah karyawan di 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp79.940 juta, menurun 57,96% atau setara Rp110.222 juta dibanding Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp190.162 juta. Penurunan disebabkan menurunnya pembayaran kas untuk peroleh aset tetap.

- **Receipts from Customers**

Receipts from Customers decreased by 30.22% or equal to Rp181.663 million, from IDR601,047 million as of December 31, 2019 to be IDR419,384 million as of December 31, 2020. The decrease of receipts from customers was caused by the decrease of passengers due to the implementation of PSBB by the Government of DKI Jakarta Province as an impact of the COVID-19 pandemic.

- **Receipts from Subsidy**

Receipts from Subsidy increased to be IDR 641,762 million as of December 31, 2020, from IDR 427,027 million as of December 31, 2019. The subsidy is provided by the Government of DKI Jakarta in the form of an infrastructure and facility subsidy.

- **Receipts from Interest Income**

Receipts from Interest Income increased by 31.73% or equal to IDR9,476 million, from IDR29,862 million as of December 31, 2019 to be IDR39,338 million as of December 2020. The increase in Receipts from Interest Income is driven by the deposit interest rate that increased in line with the reference rate of Bank Indonesia.

- **Payment to Vendors**

Payment to vendors increased by 62.43% or equal to IDR216,842 million, from IDR347,315 million as of December 31, 2019 to be IDR564,156 million as of December 31, 2020.

- **Payment to Commissioners, Directors, and Employees**

Payment to Commissioners, Directors, and Employees increased by 40.25% or equal to IDR59,899 million, from IDR148,806 million as of December 31, 2019 to be IDR208,706 million as of December 31, 2020. It is driven by the increased number of employees in 2020.

Cash Flow from Investing Activities

Net Cash used for Investing Activities in 2020 was IDR79,940 million, decreased by 57.96% or equal to IDR110,222 million compared to the Net Cash used for Investing Activities in 2019 of IDR190,162 million. The decrease was caused by the decrease in cash payment for fixed asset acquisition.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019-2020
Cash Flow From Investing Activities Year 2019-2020

| Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flow From Investing Activities</i> | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Investasi Entitas Anak <i>Subsidiary Investment</i> | (40.800) | - | (40.800) | 100 |
| Penambahan Aset Tetap <i>Additions to Fixed Assets</i> | (37.351) | (172.436) | 135.085 | (78,34) |
| Penambahan Aset Tak Berwujud <i>Additions to Intangible Assets</i> | (1.788) | (17.726) | 15.937 | (89,91) |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi <i>Net Cash Used in Investing Activities</i> | (79.940) | (190.162) | 110.222 | (57,96) |

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019-2020
Cash Flow From Financing Activities Year 2019-2020

| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flow From Financing Activities</i> | 2020 (Rp Juta Million IDR) | 2019 (Rp Juta Million IDR) | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta Million IDR) | Persentase Percentage (%) |
| Modal disetor lainnya <i>Other Paid-up Capital</i> | 500 | - | 500 | 100 |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Used in Financing Activities</i> | 500 | - | 500 | 100 |

• **Modal Disetor Lainnya**

Aktivitas pendanaan merupakan transaksi penyertaan modal Anak Perusahaan ke Pemegang Saham non Pengendali.

• **Other Paid-up Capital**

Financing activities are capital investment transaction of Subsidiary to Non-Controlling Shareholders.

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Serta Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas dari Aktivitas Investasi seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas di sepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp248.182 juta. Dengan demikian, Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2020 sebesar Rp1.224.727 juta.

Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents and Cash and Cash Equivalent as of the End of Year

With the accumulation of Cash Flow from Operating Activities and Cash Flow from Investing Activities as described above, Cash and Cash Equivalent throughout 2020 increased by IDR248,182 million. Therefore, the Cash and Cash Equivalent in 2020 was IDR1,224,727 million

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2016 - 2020 (Rp Juta)
Progress of Cash and Cash Equivalents End of Year 2016 - 2020 (IDR Million)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 471.254 | 780.343 | 604.891 | 976.545 | 1.224.727 |

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND ACCOUNT RECEIVABLE COLLECTABILITY

Kemampuan Membayar Hutang

Ability to Pay Debt

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas

Kemampuan membayar Utang Jangka Pendek Perseroan dicerminkan dengan Rasio Likuiditas, dimana tingkat likuiditas dapat dilihat dari Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat.

- Rasio Lancar dihitung sebagai Aset Lancar berbanding dengan Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Kas dihitung sebagai Kas dan Setara Kas dibanding Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Cepat dihitung sebagai Aset Lancar dikurang Persediaan, dibanding Liabilitas Jangka Pendek.

The Corporation's ability to meet its obligation can be measured using the Solvency Ratio and Liquidity Ratio. Solvency Ratio is a ratio that measures the ability of the Corporation to pay all of its debt, including short-term and long-term debts. Liquidity Ratio is a ratio to measure the ability of the Corporation to pay its short-term debt.

Liquidity Ratio

The ability to pay Corporation Short-Term Debts is reflected by the Liquidity Ratio, where the liquidity rate is represented by the Current Ratio, Cash Ratio, and Quick Ratio.

- The Current Ratio is calculated as the Current Asset divided by Short-Term Liabilities;
- The Cash Ratio is calculated as Cash and Cash Equivalent divided by Short-Term Liabilities;
- The Quick Ratio is calculated as Current Asset minus Inventory, divided by Short-Term Liabilities.

Rasio Likuiditas Tahun 2019-2020

Liquidity Ratio Year 2019-2020

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|-----------|-----------|---|------------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) |
| | | | 1-2 | (1-2):2 |
| Kas dan Setara Kas (Rp Juta) Cash and Cash Equivalent (Rp Million) | 1.224.727 | 976.545 | 248.182 | 25,41 |
| Persediaan (Rp Juta) Inventory (Rp Million) | 13.364 | 3.621 | 9.742 | 269,04 |
| Aset Lancar (Rp Juta) Current Assets (Rp Million) | 1.490.592 | 1.185.263 | 305.329 | 25,76 |
| Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta) Current Liabilities (Rp Million) | 838.290 | 699.277 | 139.014 | 19,88 |
| Rasio Likuiditas Liquidity Ratio | | | | |
| Rasio Lancar (Kali) Current Ratio (Times) | 1,78 | 1,69 | 0,08 | 4,91 |
| Rasio Kas (Kali) Cash Ratio (Times) | 1,46 | 1,40 | 0,06 | 4,62 |
| Rasio Cepat (Kali) Quick Ratio (Times) | 1,76 | 1,69 | 0,07 | 4,28 |

Rasio Lancar mengalami peningkatan dari 1,69 kali pada tahun 2019 menjadi 1,78 kali pada tahun 2020. Rasio Kas mengalami peningkatan dari 1,40 kali pada tahun 2019 menjadi 1,46 kali pada tahun 2020. Sementara Rasio Cepat mengalami peningkatan dari 1,69 kali pada tahun 2019 menjadi 1,76 kali pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan ketersediaan kas Perseroan dalam membayar utang.

The Current Ratio increased from 1.69 times in 2019 to be 1.78 times in 2020. The Cash ratio increased from 1.40 times in 2019 to be 1.46 times in 2020. The Quick Ratio increased from 1.69 times in 2019 to be 1.76 times in 2020. It shows the cash availability of the Corporation to pay debts.

Perkembangan Rasio Lancar Kas Tahun 2016 – 2020 (Kali)

Progress of Current Ratio Cash Year 2016 – 2020 (Times)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 1,81 | 1,68 | 1,61 | 1,69 | 1,78 |

Perkembangan Rasio Kas Tahun 2016 – 2020 (Kali)

Progress of Cash Ratio Year 2016 – 2020 (Times)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 1,79 | 1,67 | 1,58 | 1,40 | 1,46 |

Perkembangan Rasio Cepat Tahun 2016 – 2020 (Kali)

Progress of Quick Ratio Cash Year 2016 – 2020 (Times)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 1,81 | 1,68 | 1,61 | 1,69 | 1,76 |

Rasio Solvabilitas

Kemampuan membayar Utang Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Perseroan terlihat dari Rasio Solvabilitas yang terdiri dari Rasio Utang terhadap Modal atau Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER), baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang, maupun Rasio Utang terhadap Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

- *Debt to Equity Ratio* dihitung sebagai Total Liabilitas dibanding Ekuitas Neto;
- *Debt to Asset Ratio* dihitung sebagai Total Liabilitas dibanding Total Aset.

Solvability Ratio

The ability to pay Short-Term Debts and Long-Term Debts is reflected in the Solvency Ratio consisting of Debt-to-Equity Ratio (DER), both Short-Term and Long-Term Debts, and Debt-to-Asset Ratio (DAR).

- *The Debt-to-Equity Ratio is calculated as Total Liabilities divided by Net Equity;*
- *The Debt-to-Asset Ratio is calculated as Total Liabilities divided by Total Assets.*

Rasio Solvability Tahun 2019-2020
Solvability Ratio Year 2019-2020

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|------------|------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) |
| Jumlah Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million) | 18.397.155 | 17.353.407 | 1.043.748 | 6,01 |
| Jumlah Utang Jangka Pendek (Rp Juta) Total Current Liabilities (Rp Million) | 838.290 | 699.277 | 139.014 | (19,88) |
| Jumlah Utang Jangka Panjang (Rp Juta) Total Non-Current Liabilities (Rp Million) | 198.958 | 657.367 | (458.409) | (69,73) |
| Lumlah Liabilitas (Rp Juta) Total Liabilities (Rp Million) | 1.037.248 | 1.356.644 | (319.395) | (23,54) |
| Ekuitas Net (Rp Juta) Total Liabilities (Rp Million) | 17.359.906 | 15.996.763 | 1.362.027 | 8,51 |
| Rasio Solvabilitas (Kali) Solvability Ratio (Times) | 17,74 | 12,79 | 4,95 | 38,66 |
| Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (Kali) Liability to Equity Ratio (Times) | 0,06 | 0,08 | (0,02) | (29,55) |
| Rasio Utang Jangka Pendek Terhadap Ekuitas (Kali) Short-term Debt to Equity Ratio (Times) | 0,05 | 0,04 | 0,01 | (10,47) |
| Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (Kali) Long-term Debt to Equity Ratio (Times) | 0,01 | 0,04 | (0,03) | (72,11) |
| Rasio Utang Terhadap Aset (Kali) Debt to Assets Ratio (Times) | 0,06 | 0,08 | (0,02) | (27,88) |

Rasio Utang terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2020 sebesar 0,06 kali, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,08 kali. Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas tahun 2020 sebesar 0,05 kali, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,04 kali. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar 0,01 kali, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,04 kali.

Sementara rasio Utang terhadap Aset Perseroan tahun 2020 sebesar 0,06 kali, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dalam membayar utang dengan menggunakan aset.

The Corporation's Debt to Equity Ratio in 2020 was 0.06, less than the Debt-to-Equity Ratio in 2020 of 0.08. The Short-Term-Debt-to-Equity Ratio in 2020 was 0.05, decreased compared to that of 2019 of 0.04. The Long-Term-Debt-to-Equity Ratio in 2020 was recorded at 0.01, which decreased from that of 2019 of 0.04.

The Corporation's Debt-to-Asset Ratio in 2020 was 0.06, which decreased compared to the ratio in 2019 of 0.08. It shows that the Corporation can pay the debts using assets.

Perkembangan Debt To Equity Ratio (DER) Tahun 2016 – 2020 (Kali)*Progress of Debt to Equity Ratio (DER) Year 2016 – 2020 (Times)*

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |

Perkembangan Debt To Asset Ratio (DAR) Tahun 2016 – 2020 (Kali)*Progress of Debt To Asset Ratio (DAR) Year 2016 – 2020 (Times)*

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|
| 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Lama Penagihan Rata-rata atau *Collection Period* serta Rasio Perputaran Piutang. Semakin kecil nilai *Collection Period* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

- Lama Penagihan Rata-rata dihitung sebagai Piutang Usaha dibanding Pendapatan Usaha dikalikan 365 hari;
- Rasio Perputaran Piutang dihitung sebagai Piutang Usaha dibanding Pendapatan Usaha.

Account Receivable Collectability

The Corporation's ability to collect receivable can be determined by calculating the Average Collection Period and Receivable Turnover Ratio. The smaller value of the Collection Period shows the Corporation's ability in collecting receivable faster.

- The Average Collection Period is calculated as Account Receivables divided by Operating Revenue times 365 days;
- The Receivables Turnover Ratio is calculated as Account Receivables divided by Operating Revenue.

Piutang Usaha Perseroan Tahun 2019-2020*The Trade Receivables of The Corporation Year 2019-2020*

| Piutang Usaha Perseroan <i>The Trade Receivables of The Corporation</i> | 2020 | 2019 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------|--------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) |
| Piutang Usaha Pihak Berelasi <i>Trade Receivable Related Party</i> | 2 | 4 | (2) | (50,00) |
| Piutang Usaha Pihak Ketiga <i>Trade Receivable Third Party</i> | 146.125 | 78.189 | 67.216 | 85,18 |
| Jumlah Piutang Usaha <i>Total Trade Receivable</i> | 146.127 | 78.193 | 67.214 | 85,17 |

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun 2019-2020

Receivable Collectibility Rate Ratio Year 2019-2020

| Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivable Collectibility Rate Ratio | 2020 | 2019 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|-----------|---------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) |
| | 1 | 2 | 1-2 | (1-2):2 |
| Piutang Usaha (Rp Juta) Trade Receivable (Rp Million) | 146.127 | 78.193 | 67.934 | 86,88 |
| Pendapatan (Rp Juta) Operating Revenue (Rp Million) | 1.085.498 | 933.230 | 152.268 | 16,32 |
| Lama Penagihan Rata-rata (Hari) Average Collectible Period (Days) | 49,14 | 30,58 | 21,34 | 60 |
| Rasio Perputaran Piutang (Kali) Receivables Turnover Ratio (Times) | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 70 |

Lama penagihan rata-rata tahun 2020 adalah 49,14 hari meningkat 60% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 30,58 hari, sedangkan Rasio Perputaran Piutang tahun 2020 sebesar 0,14 kali meningkat 70% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan waktu yang dibutuhkan atas pembayaran piutang pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2019 yang disebabkan oleh menurunnya perputaran bisnis secara umum dampak dari pandemi COVID-19.

The average collection period in 2020 was 49.14 days, increased by 60% compared to that of 2019 of 30.58 days, while the Receivable Turnover Ratio in 2020 was 0.14, increased by 70% compared to that of 2019 of 0.08. It shows the increased time required to collect receivables in 2020 compared to the performance in 2019. It is caused by the general increase in trade turnover as an impact of the COVID-19 pandemic.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Management Policy for Capital Structure

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perseroan

Management Policy for the Capital Structure of the Corporation

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi penggunaan modal berdasarkan Arus Kas yang digunakan untuk kegiatan operasi;
- Pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

In managing its capital, the Corporation always maintains business continuity and maximises the benefits for the shareholders and other stakeholders. The Corporation actively and routinely reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and optimal returns for the Shareholders by taking into account:

- The Efficiency of capital usage based on Cash Flow used for operating activities;
- Capital expenditures and future capital requirements.

Struktur Modal Perseroan

Capital Structure of the Corporation

Struktur Modal Perseroan tahun 2020, terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas. Struktur Modal Perseroan tahun 2020 didominasi oleh Ekuitas yang berkontribusi hingga 94,36%.

The Corporation Capital Structure in 2020 consists of interest- and equity-based debts. The Corporation Capital Structure in 2020 is dominated by Equity with a contribution of up to 94.36%.

Struktur Modal Tahun 2019-2020 Capital Structure Year 2019-2020

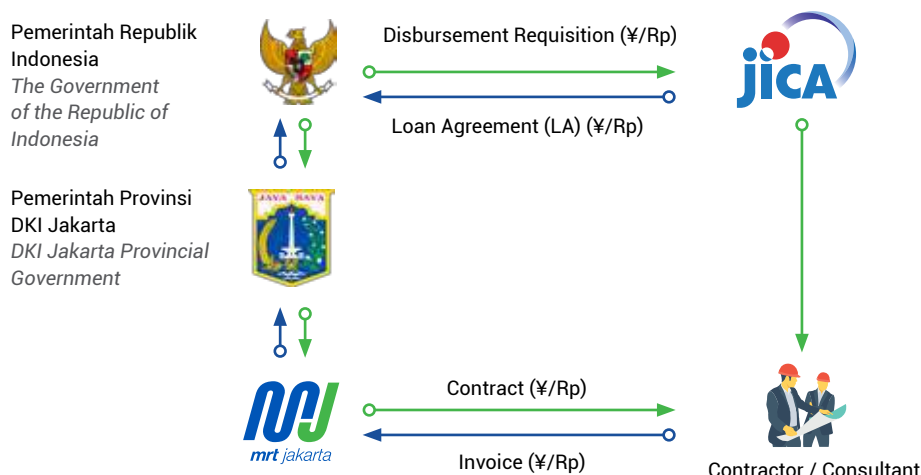
| Struktur Modal Capital Structure | 2020 | | 2019 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | Nominal Total (Rp. Juta) (IDR Million) | Kontribusi Contribution (%) | Nominal Total (Rp. Juta) (IDR Million) | Kontribusi Contribution (%) | Nominal Total (Rp. Juta) (IDR Million) | Persentase Percentage (%) |
| Liabilitas <i>Liability</i> | | | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 838.291 | 4,56 | 699.277 | 4,03 | 139.013 | 19,88 |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 198.958 | 1,08 | 657.367 | 3,79 | (458.409) | (69,73) |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.037.248 | 5,64 | 1.356.644 | 7,82 | (319.394) | (23,54) |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 17.359.906 | 94,36 | 15.996.763 | 92,18 | 1.362.027 | 8,51 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i> | 18.397.155 | 100,00 | 17.353.407 | 100,00 | 1.043.748 | 6,01 |

Pendanaan Proyek MRT Jakarta

MRT Jakarta Project Funding

Pada periode pelaporan, Perseroan melanjutkan pekerjaan MRT Jakarta Fase 2. Pendanaan untuk pekerjaan kontraktor dan jasa konsultan proyek MRT Jakarta, baik Fase 1 maupun Fase 2, bersumber dari Pinjaman Luar Negeri JICA oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diteruskan dan diteruskan-pinjamkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan ini kemudian diteruskan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Penyertaan Modal Daerah.

During the reporting period, the Corporation carried on Phase 2 MRT Jakarta construction works. The funding for contractor works and consultant services of the MRT Jakarta Project, both Phase 1 and Phase 2, is sourced from JICA Foreign Loans by the Government of the Republic Indonesia which was then given as an on-granting and on-lending funds to the Government of DKI Jakarta Province. The funding is later conveyed to PT MRT Jakarta (Perseroda) through Regional Capital Participation.

Skema Penerusan Hibah dan Pinjaman JICA Kepada Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*Flow Scheme of JICA Grant and Loan for the Government of Indonesia and the Government of DKI Jakarta Province***Dampak Nilai Mata Uang Asing Bagi Kinerja Perseroan**

Selain Rupiah, transaksi Perseroan juga menggunakan mata uang Yen Jepang dalam melakukan pencatatan hutang atas *invoice* dan uang muka konstruksi dan konsultan. Pencatatan atas transaksi tersebut dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai tanggal *invoice*.

Laba atau rugi yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat dan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif pada tahun berjalan. Posisi keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Laporan Keuangan dengan menggunakan kurs laporan akhir tahun. Perseroan mencatatkan realisasi Laba/Rugi Selisih Kurs pada akhir tahun 2020 sebesar Rp12.455 juta.

Menguat atau melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang pada saat pembayaran kepada kontraktor/konsultan menyebabkan adanya selisih kurs pada pencatatan laporan keuangan.

Impact of Foreign Exchange on the Corporation's Performance

Apart from the Indonesian Rupiah, the Corporation also use Japanese Yen to make transactions of recording debts on invoices and advances for constructions and consultants. The record of such transactions is converted into Rupiah according to the invoice date.

Profits or losses arising from the conversion of assets and liabilities from foreign exchange are recorded and acknowledged in the Comprehensive Profit Loss Statement of the current year. Financial position in foreign currency is converted in the Financial Statements using the end-year report rate. The Corporation recorded the realisation of Profit/Loss from the Exchange Rate in 2020 of IDR 12,455 million.

The rise or fall of the exchange rate of Indonesian Rupiah to Japanese Yen upon the payment to contractors/consultants result in a difference of exchange rate in the financial statements.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL*Material Commitments for Capital Goods Investment*

Selama tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi pihak lain yang terkait.

In 2020, the Corporation has no Material Commitments for Capital Goods Investment. Therefore, the Corporation has no information concerning the party that agreed, the purpose of the agreement, the source of funds to fulfil the agreement, and the Corporation's plan to mitigate the risk from the other party's position.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Investasi barang modal dan penyertaan modal yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar Rp41.432 juta, dengan rincian dalam tabel berikut.

Investment in the form of Capital Goods (Capital Expenditure) is an activity of fund expenditure used to purchase several fixed assets or add the value of the fixed asset that is expected to add value in the future. Capital goods investment and capital participation realised in 2020 were IDR41,432 million with the details as follows:

Realisasi Investasi Perseroan Tahun 2020

Realisation of Investments by Corporation in 2020

| Investasi Barang Modal <i>Capital Goods Investment</i> | Tujuan <i>Purpose</i> | Nilai Investasi <i>Investment Value</i> (Rp Juta IDR Million) |
|---|--|---|
| Peralatan Pemeliharaan <i>Maintenance Equipment</i> | Investasi pada peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana MRT pasca beroperasi secara penuh <i>Investment in MRT's maintenance equipment for facilities and infrastructure, after full operation</i> | 14.402 |
| Peralatan dan Perabotan Kantor <i>Office Equipment and Furniture</i> | Fasilitas pendukung kegiatan perkantoran <i>Facilities to support office activities</i> | 27.030 |
| Total | | 41.432 |

Secara keseluruhan nilai Investasi Barang Modal pada tahun 2020 mengalami kenaikan 190% atau setara Rp27.158 juta, dari Rp14.274 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp41.432 juta per 31 Desember 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dimulainya pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2.

Overall, the Capital Goods Investment value in 2020 increased by 190% or equal to IDR27,158 million, from IDR14,274 million as of December 31, 2019 to be IDR41,432 million as of December 31, 2020. This condition was caused by the commencement of Phase 2 MRT Jakarta construction.

Investasi Barang Modal Perseroan Tahun 2019-2020

Corporation's Capital Good Investment Year 2019-2020

| Struktur Modal <i>Capital Structure</i> | 2020 (Rp Juta IDR Million) | 2019 (Rp Juta IDR Million) | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Nominal (Rp Juta IDR Million) | Persentase Percentage (%) |
| | 1 | 2 | 1-2 | (1-2):2 |
| Realisasi Investasi Barang Modal <i>Realisation of Capital Goods Investment</i> | 41.432 | 14.274 | 27.157 | 190 |

PENCAPAIAN TARGET/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021

Target Achievement/Budget Absorption in 2020 and Projection for 2021

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021
Comparison of The Realisation with Target in 2020 and The 2021 Projection

| Uraian Description | 2020 | | | 2021 | |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| | Realisasi Realisation (Rp Juta IDR Million) | Target (Rp Juta IDR Million) | Realisasi Terhadap Target Realisation of Target (%) | Proyeksi Projection (Rp Juta IDR Million) | Proyeksi Terhadap Realisasi 2020 Projection to Realisation 2020 (%) |
| | 1 | 2 | 1-2 | 3 | 3:1 |
| Operasi <i>Operation</i> | | | | | |
| Rata-rata Jumlah Pengguna Jasa Per Hari <i>Average Number of Passangers per Day</i> | 27.122 | 26.605 | 104 | 65.000 | 240 |
| Pendapatan <i>Revenue</i> | | | | | |
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 82.025 | 76.318 | 107,48 | 189.800 | 231,39 |
| Pendapatan Subsidi dari Pemprov DKI Jakarta <i>Subsidy form DKI Jakarta Provincial Government</i> | 620.801 | 642.159 | 96,67 | 915.000 | 147,39 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 382.672 | 321.000 | 119,21 | 450.682 | 117,77 |
| Total Pendapatan <i>Total Revenue</i> | 1.085.498 | 1.039.477 | 104,43 | 1.555.482 | 143,30 |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenues</i> | (976.692) | 1.007.813 | 96,91 | 1.134.479 | 116,16 |
| Laba (Rugi) Kotor <i>Gross Profit (Loss)</i> | 108.806 | 31.663 | 343,63 | 421.003 | 386,93 |
| Total Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expense</i> | (189.754) | (196.183) | 96,72 | 168.246 | 88,67 |
| Laba (Rugi) Usaha <i>Operating Profit (Loss)</i> | (80.948) | (164.520) | 49,20 | 256.756 | (317,19) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expense)</i> | 35.731 | 19.477 | 183,45 | 21.780 | 60,96 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif <i>Comprehensive Income (Loss)</i> | (70.826) | (145.042) | 120,61 | 274.536 | (387,62) |

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dividend Policy and Distribution

Dasar Kebijakan Terkait Dividen dan Pembagiannya

Basic Policies regarding Dividend and Its Distribution

Kebijakan dasar pembagian dividen Perseroan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 20 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20.

1. Laba Bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The basic policy for Corporation dividend distribution refers to the Articles of Association of the Corporation Article 20 concerning the Use of Profit and Dividend Distribution. The Article of Association of the Corporation Article 20.

1. *Corporation's net profit in one financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation, which has been approved by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method decided by the GMS.*
2. *If the GMS does not determine its usage, net profit, after deducting the allowance for reserves required by the Law and Articles of Association of the Corporation is distributed as dividends.*
3. *If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and the next financial year. The Corporation is considered to have no profit as long as the loss is recorded and included in the calculation of profit and loss that has not been completely covered.*
4. *Profit distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after being available for payment is put into a reserve fund specifically designated for this purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled shareholders before 5 (five) years have passed, by providing proof of their rights to the dividends, that can be accepted by the Board of Directors of the Corporation.*
5. *The Corporation can distribute interim dividends before the fiscal year ends following the prevailing laws and regulations.*

Informasi Tentang Pembagian Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham

Information Concerning Cash Dividend Distribution to Shareholders

Sampai dengan akhir tahun 2020, PT MRT Jakarta (Persero) belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang pembagian dividen tunai kepada pemegang saham.

As of the end of 2020, the Corporation has not yet distributed profits to shareholders. Therefore, there is no information concerning cash dividend distribution to shareholders.

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Information Concerning Employee and/or Management Share Ownership Programme (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau *Employee Stock Option Program (ESOP)* dan *Manajemen atau Management Stock Option Program (MSOP)*.

As of the end of 2020, the Corporation has never implemented an Employee Stock Option Programme (ESOP) or Management Stock Option Programme (MSOP).

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Information Concerning the Realisation of the Usage of Proceeds from Public Offering

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari efek yang diterbitkan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not issue any bonds, securitisation (sukuk), convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information related to the realisation of the use of proceeds from public offering issued by the Corporation.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Material Information Concerning Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun buku, khususnya yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perseroan.

Material information concerning Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring that occurs during the financial year, especially those that affect the Corporation's financial statements/performance.

Informasi Material Mengenai Investasi

Material Information Concerning Investment

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai investasi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transaction concerning an investment that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Material Information Concerning Expansion

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai ekspansi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transactions concerning expansion that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Material Information Concerning Divestment

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai divestasi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transaction concerning divestment that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Penggabungan Usaha

Material Information Concerning Merger

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai penggabungan usaha yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transaction concerning merger that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Material Information Concerning Acquisition

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai akuisisi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transaction concerning acquisition that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Concerning Debt/Capital Restructuring

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai informasi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

As of the end of 2020, the Corporation did not conduct material transaction concerning debt/capital restructuring that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Information Concerning Material Transactions With Conflicts Of Interest And/Or Transactions With Affiliations

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Policies on Related Parties

Perseroan menerapkan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The Corporation implements PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures, which require disclosure of relationships, transactions, and balances of related parties, including commitments, in financial statements. This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Names of Transacting Parties, Nature of Relationship, Nature of Transactions, and Reasons for Transactions

Nama-nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perseroan pada tahun 2019 dan 2020, disampaikan dalam tabulasi berikut.

The names of transacting parties and the nature of the affiliate relationship for the Corporation's transactions throughout 2019 and 2020 are presented in the table as follows.

Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi dan Alasan Dilakukan Transaksi

The Transaction Parties, Nature of Affiliation and Reasons of Transaction

| Pihak yang Berelasi <i>Related Partners</i> | Sifat Hubungan <i>Nature of Relationship</i> | Sifat Transaksi <i>Nature of Transaction</i> | Alasan Dilakukannya Transaksi <i>Reasons for Transaction</i> |
|---|--|--|---|
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Provincial Government</i> | Pemegang Saham Utama <i>Main Shareholder</i> | Pendapatan subsidi dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan <i>Subsidy Income & Tax on Land & Building</i> | Subsidi dan Pajak Bumi dan Bangunan <i>Subsidy and Tax on Land & Building</i> |
| PT Bank Daerah Khusus Ibukota | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Under control of DKI Jakarta Provincial Government</i> | Penempatan Deposito & Rekening Giro <i>Placement of Time Deposit and Current Account</i> | Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga <i>The interest rates obtained from related party banks are proportional to the interest rates obtained from third party banks</i> |
| PT Jakarta Infrastruktur Propertindo | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Under control of DKI Jakarta Provincial Government</i> | Penyediaan layanan periklanan pada MRT Jakarta Fase 1 untuk pendapatan non-tiket <i>Provision of adverts in MRT Jakarta Phase 1, for non-Farebox Revenues</i> | Kerja sama layanan periklanan <i>Cooperation in Advertising services</i> |
| Perumda Pembangunan Sarana Jaya | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Under control of DKI Jakarta Provincial Government</i> | Jasa konsultasi konstruksi <i>Construction consultancy service</i> | Kerja sama jasa konsultasi konstruksi <i>Cooperation in construction consultancy service</i> |

Penjelasan Mengenai Kebijakan Perseroan Terkait Review atas Kewajaran Transaksi

Explanation Concerning Corporate Policies Regarding the Review of Transaction Fairness

Perseroan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga transaksi dengan pihak-pihak berelasi tetap disajikan dalam maupun dengan pihak ketiga, berdasarkan peraturan yang berlaku dari setiap instansi yang melakukan perikatan. Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan bebas dari benturan kepentingan.

The Corporation is controlled by the Government of DKI Jakarta, hence transactions with related parties are still presented in or with third parties, in compliance with the prevailing regulations of each institution that engaged in the commitment. Transaction fairness and compliance with the regulation concerning the transaction with related parties have been reviewed and audited by internal and external auditors. The Corporation carries out transaction with related parties following PSAK No. 7 concerning "Disclosure of Related Parties" and the transactions are free from conflicts of interest.

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Balance and Realisation of Related Party Transactions

Saldo yang signifikan dengan Pihak Berelasi untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, disampaikan dalam tabulasi berikut.

Significant balances with Related Parties for the Years Ended December 31, 2019 and December 31, 2020 are presented in the table as follows.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Tahun 2020
Transaction of Related Parties in Assets Year 2020

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset <i>Transaction of Related Parties in Assets</i> | 31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i> | | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | |
|--|--|---|--|---|
| | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets (%)</i> | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets (%)</i> |
| Bank <i>Bank</i> | 96.250 | 0,52 | 294.823 | 1,70 |
| Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i> | 823.094 | 4,47 | 384.000 | 2,21 |
| Piutang Usaha <i>Trade Receivables</i> | 2 | 0,01 | 4 | 0,01 |
| Piutang Subsidi <i>Subsidy Receivables</i> | 83.970 | 0,46 | 105.708 | 0,61 |
| Piutang Bunga <i>Interest Receivables</i> | - | - | 422 | 0,01 |
| Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Assets of Related Parties</i> | 1.003.316 | 5,45 | 784.957 | 4,52 |
| Jumlah Aset <i>Total Assets</i> | 18.397.154 | 100,00 | 17.353.407 | 100,00 |

Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas Tahun 2020
Transaction of Related Parties in Liabilities Year 2020

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas <i>Transaction of Related Parties in Liabilities</i> | 31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i> | | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | |
|---|--|--|--|--|
| | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) |
| Utang Pajak Bumi dan Bangunan <i>Payable on Land and Property Tax</i> | - | - | 42.670 | 3,15 |
| Pendapatan Diterima Di Muka <i>Unearned Revenues</i> | 825 | 0,09 | 825 | 0,06 |
| Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Liabilities of Related Parties</i> | 825 | 0,09 | 43.495 | 3,21 |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 922.894 | 100,00 | 1.356.644 | 100,00 |

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Tahun 2020
Transaction of Related Parties in Revenues Year 2020

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan <i>Transaction of Related Parties in Revenues</i> | 31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i> | | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | |
|--|--|--|--|--|
| | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) |
| Pendapatan Subsidi <i>Subsidy Revenues</i> | 620.800 | 57,19 | 534.069 | 57,23 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenues</i> | 13.848 | 1,28 | 2.475 | 0,27 |
| Jumlah Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Revenues of Related Parties</i> | 634.649 | 58,47 | 536.544 | 57,49 |
| Jumlah Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 1.085.498 | 100,00 | 933.230 | 100,00 |

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Tahun 2020
Transaction of Related Parties in Cost of Revenues Year 2020

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan <i>Transaction of Related Parties in Cost of Revenues</i> | 31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i> | | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | |
|---|--|--|--|--|
| | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> (%) |
| Pajak Bumi dan Bangunan <i>Land and Property Tax</i> | 42.670 | 4,37 | 32.002 | 4,21 |
| Jumlah Beban Pokok Pendapatan dari Pihak- pihak Berelasi <i>Total Cost of Revenues of Related Parties</i> | 42.670 | 4,37 | 32.002 | 4,21 |
| Jumlah Beban Pokok Pendapatan <i>Total Cost of Revenues</i> | 976.692 | 100,00 | 760.415 | 100,00 |

Transaksi Pihak Berelasi dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain Tahun 2020
Transaction of Related Parties in Other Income (Expense) Year 2020

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Transaction of Related Parties in Other Income (Expense)</i> | 31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i> | | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | |
|---|--|--|--|--|
| | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets (%)</i> | (Rp Juta) <i>(IDR Million)</i> | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets (%)</i> |
| Penghasilan Bunga <i>Interest Income</i> | 28,944 | 81,00 | 38.511 | 31,87 |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Other Income (Expense) of Related Parties</i> | 28,944 | 81,00 | 38.511 | 31,87 |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Total Other Income (Expense)</i> | 35.731 | 100,00 | 120.854 | 100,00 |

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Financial Information Bearing Extraordinary and Rare Events

Pada tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

In 2020, the Corporation did not have any financial information-bearing extraordinary and rare events.

INFORMASI PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

Information Concerning Amendments to Laws and Regulations that Affect the Corporation

Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara material kepada Perseroan. Namun terdapat penerbitan peraturan perundang-undangan baru, di antaranya:

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 136 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) untuk Melaksanakan Kerja Sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Pengintegrasian Perkeretaapian Umum;
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi.

As of December 31, 2020, there were no amendments to laws and regulations that materially affect the Corporation. However, there were several new laws and regulations issued as follows:

1. *Governor's Regulation of DKI Jakarta Number 136 Year 2020 concerning Assignment of Limited Liability Company Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) to Implement Collaboration with Limited Liability Company Kereta Api Indonesia (Persero) in Integration of Public Railways;*
2. *Governor's Regulation of DKI Jakarta Number 63 Year 2020 concerning Assignment of Regionally-Owned Enterprises to Implement Integrated Payment System Among Modes of Transportation.*

INFORMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN

Information Concerning Changes of Accounting Policies Implemented by the Corporation

Di tahun 2020, terdapat 3 (tiga) perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan, namun 2 (dua) di antaranya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan konsolidasian Perseroan. Adapun rincian perubahan kebijakan akuntansi tersebut serta pengaruhnya terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

In 2020, there were 3 (three) changes of accounting policies implemented, but 2 (two) of them have no significant impacts on the consolidated financial statements of the Corporation. The details of the changes of accounting policies and the impacts on the Corporation are as follows:

| Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes of Accounting Policy</i> | Pengaruh Terhadap Perseroan <i>Impacts on the Corporation</i> |
|---|--|
| Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" <i>Implementation of PSAK 71 "Financial Instruments"</i> | Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan. <i>The implementation of PSAK 71 does not impact on the initial balance of unappropriated retained earnings in the consolidated financial statements of the Corporation.</i> |
| Penerapan atas PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" <i>Implementation of PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers"</i> | Penerapan atas PSAK 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. <i>The implementation of PSAK 72 does not impact significantly on the consolidated financial statements of the Corporation.</i> |

Perubahan Kebijakan Akuntansi
*Changes of Accounting Policy*Pengaruh Terhadap Perseroan
Impacts on the Corporation

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa"
Implementation of PSAK 73
"Leases"

PSAK 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Perseroan dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa periode sewa.

PSAK 73 especially impacts the accounting practices for office, building, and vehicle leases, which used to be classified as operating leases based on PSAK 30. The implementation of these accounting standards increased the assets and obligation of the Corporation and impacted the expense recognition period on consolidated profit, loss, and other comprehensive revenue statements during the period of the lease.

ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Tax Aspects and Contribution for the Country

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu, Perseroan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Pemerintah Pusat.

Pada periode pelaporan, kontribusi pembayaran pajak Perseroan tercatat sebesar Rp63.406 juta. Jumlah tersebut meningkat 56.84% atau setara Rp22.980 juta dibanding kontribusi pembayaran pajak tahun 2019 sebesar Rp40.426 juta. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya transaksi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada tahun 2020.

Based on Law No. 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, Taxes are a mandatory contribution to the State owed by a person or agency, which is forced by Law, with no direct compensation, and is used for the State's purposes for the maximum prosperity of the people.

Taxpayers are individuals or entities, including tax-payers, tax-cutters, and tax collectors, who have taxation rights and obligations following the provisions of the regulations concerning tax. Because of this, the Corporation should fulfil tax obligations as a contribution to the State/Central Government.

During the reporting period, the tax contribution of the Corporation was recorded at IDR 63,406 million. It increased by 56.84% or equal to IDR 22,980 million compared to the tax contribution in 2019 of IDR 40,426 million. Such a condition was driven by the amount of transaction in maintaining the infrastructures and facilities in 2020.

Pembayaran Pajak Perseroan Tahun 2019 dan 2020 *The Corporation's Tax Payments for 2019 and 2020*

| Pajak Taxes | 2020 (Rp Juta IDR Million) | 2019 (Rp Juta IDR Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp Juta IDR Million) | Persentase Percentage (%) |
| PPh Pasal 21-26 <i>Income Tax of Article 21-26</i> | 28.244 | 20.643 | 7.601 | 37.82 |
| PPh Pasal 23-26 <i>Income Tax of Article 23-26</i> | 3.012 | 2.364 | 648 | 27.41 |
| PPh Pasal 4 ayat 2 <i>Income Tax of Article 4 paragraph 2</i> | 2.590 | 2.866 | (276) | (9.63) |
| PPN VAT | 29.560 | 14.552 | 15.008 | 103.13 |
| Jumlah Kontribusi Pajak <i>Tax Contributions</i> | 63.406 | 40.425 | 22.980 | 56.84 |

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Information of Business Continuity



Sebagai penyelenggara layanan transportasi publik, kelangsungan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan dalam menyediakan layanan yang memuaskan pengguna jasa dan mendukung mobilitas mereka. Perseroan berkomitmen terus meningkatkan layanan guna melayani lebih banyak pengguna jasa setiap tahunnya, serta secara bertahap memperluas rute yang dilayani. Bertumbuhnya jumlah pengguna jasa MRT Jakarta secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Perseroan, baik pendapatan tiket, termasuk subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun pendapatan non-tiket.

Untuk mencapai target pertumbuhan pengguna jasa, Perseroan telah melakukan beberapa upaya pendukung, di antaranya:

1. Manajemen operasi yang andal untuk memastikan tingkat ketepatan waktu kedatangan, ketepatan jarak antar-kereta, dan ketepatan waktu tempuh antar stasiun;
2. Manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana/prasarana untuk memastikan keunggulan dan keamanan operasi;
3. Survei kepuasan pengguna jasa (*Customer Satisfaction Index*); serta
4. Peningkatan penerapan aspek tata kelola, risiko dan kepatuhan melalui perolehan sertifikasi ISO 37001:2018 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

As a public transportation service provider, the business continuity of the Corporation depends on the ability to provide services that satisfy the passengers and supports their mobility. The Corporation is committed to improve the services to serve more passengers every year and gradually expand the network. The growth of MRT Jakarta passengers will directly impact the improvement of Corporation revenue, both farebox revenue including subsidy from the Government of DKI Jakarta Province and non-farebox revenue.

To achieve the target of passenger growth, the Corporation has taken several supporting measures as follows:

1. *Reliable operational management to ensure arrival punctuality, headway accuracy, and traveling punctuality;*
2. *Infrastructure/facility maintenance management to ensure operational excellence and safety;*
3. *Customer satisfaction survey (Customer Satisfaction Index); and*
4. *Improvement of governance, risk, and compliance implementation through certification of ISO 37001:2018 Anti-Bribery Management System.*

Perseroan tetap berkomitmen meningkatkan pertumbuhan pengguna jasa, meski pada periode pelaporan dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi jumlah pengguna jasa selama tahun 2020, sehingga pertumbuhan yang dihadapkan tidak dapat terealisasi.

Kondisi tersebut berpengaruh pada penerimaan Perseroan dari pendapatan tiket. Namun demikian, Perseroan tetap dapat mengoptimalkan pendapatan dari non-tiket, sehingga kinerja keuangan selama tahun 2020 tidak mengganggu kinerja operasi MRT Jakarta termasuk dalam hal keamanan dan keselamatan pengguna jasa. Perseroan juga tetap dapat mengembangkan usaha dengan membentuk satu perusahaan patungan dan satu anak usaha, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) dan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). MITJ mengimplementasikan penugasan atas seluruh inisiatif integrasi terkait dengan perkeretaapian Jabodetabek termasuk mengimplementasikan penugasan atas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di 81 Stasiun. Penugasan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit PT MRT Jakarta.

Salah satu tujuan dari pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut adalah untuk merealisasikan rencana peremajaan Kawasan Stasiun MRT sesuai dengan yang tertuang dalam Panduan Rancang Kota. Peremajaan tersebut diwujudkan dengan adanya sinergi dan dukungan pemangku kepentingan di dalam Kawasan yang menjadi salah satu tugas PT ITJ sebagai pelaksana. Adapun peran Perseroan dalam mendukung PT ITJ melakukan implementasi tugasnya, yaitu dengan memberikan rekomendasi teknis dan analisa awal terhadap rencana-rencana pengembangan yang merujuk pada Panduan Rancang Kota yang telah ditetapkan. Harmonisasi dalam menjalankan fungsi dan tugas antara Perseroan dan entitas anak usaha PT ITJ, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Kawasan Berorientasi Transit PT MRT Jakarta (Perseroda).

Selain itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan dukungan Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Republik Indonesia juga melanjutkan pengembangan MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI – Kota. Keberadaan MRT Jakarta Fase 2A akan meningkatkan layanan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan bagi warga Jakarta hingga 200.000 pengguna jasa per hari.

The Corporation maintains the commitment to increase passenger growth despite the challenge of the COVID-19 pandemic during the reporting period. The implementation of PSBB by the Government of DKI Jakarta impacted the number of passengers throughout 2020, hence the expected growth was not realised.

The condition impacts the Corporation income from farebox revenue. However, the Corporation maintains to optimise non-farebox revenue, so that the financial performance in 2020 did not impact negatively the operations of MRT Jakarta, including the safety and health of the passengers. The Corporation was able to expand the business by establishing one joint venture and one subsidiary, namely PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) and PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). MITJ implements the assignment of all integration initiatives concerning the railway system in Jabodetabek including implementing the assignment to manage and develop Transit-Oriented Development in 81 Stations. Meanwhile, PT ITJ is assigned to implement the Management and Development of Transit-Oriented Development Areas of the Corporation.

The management and development of TOD areas aim to realise the revitalisation plans of MRT Station Areas in line with the Urban Design Guidelines. The revitalization is carried out with synergy and support from stakeholders in the Area which is one of the responsibilities of PT ITJ. The role of the Corporation in supporting PT ITJ in implementing their duties is by providing technical recommendation and initial analysis of the development plans based on the Urban Design Guidelines. Alignment in carrying out the functions and duties of the Corporation and PT ITJ as a subsidiary, as well as coordination with the Government of DKI Jakarta Province as a stakeholder is a crucial step in realizing Transit-Oriented Development (TOD) areas of the Corporation.

Also, the Corporation under the support of the Government of DKI Jakarta Province and the Government of the Republic of Indonesia proceeds with the development of Phase 2A MRT Jakarta from Bundaran HI to Kota. The presence of Phase 2A MRT Jakarta will increase the efficient and environmentally friendly public transportation for the citizen of Jakarta of up to 200,000 daily passengers.

Di samping itu, sehubungan dengan dampak COVID-19 yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan dalam rangka menghindari dampak kinerja keuangan Perseroan yang lebih dalam serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha Perseroan, maka Perseroan menerapkan pengendalian biaya ("cost control").

Cost Control mengedepankan urgensi dan peninjauan yang dilakukan secara bulanan dengan mekanisme pengambilan keputusan sesuai ketentuan internal Perseroan.

Besides, due to the impacts of the COVID-19 on Corporation financial performance, and to prevent further impacts on Corporation financial performance and to consider the business continuity of the Corporation, the Corporation implements cost control measure.

Cost Control highlights the urgency and review that is carried out monthly with a decision-making mechanism based on Corporation internal requirements.

Strategi Menjaga Kelangsungan Usaha

Strategy to Maintain Business Continuity

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi semua dunia usaha di Indonesia termasuk MRT Jakarta sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Demi menjaga keberlangsungan usaha, Perseroan melakukan strategi sebagai berikut:

1. Kolaborasi dengan Pemerintah/ Regulator terkait beberapa kebijakan
 - Mendukung pemerintah untuk rekomendasi penerapan kebijakan ganjil genap di seluruh Jakarta;
 - Rekomendasi penyesuaian tarif parkir untuk area Sudirman dan Thamrin;
 - Rekomendasi penyesuaian rute TransJakarta di area Jakarta Selatan;
 - Penerapan rute sepeda di area TB Simatupang;
 - Pengembangan rute pedestrian di sekitar area Sudirman dan Thamrin;
 - Rekomendasi pelaksanaan sistem ERP (*Electronic Road Pricing*);
2. Pengembangan dan digitalisasi dalam program akuisisi dan retensi pelanggan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti *E-Commerce*, *OTT Players*, Tenan Gedung, Penyedia Telekomunikasi, dan lainnya.
 - Pada tahun 2020, kerja sama terkait pemberian *benefit* bagi pelanggan difokuskan pada area kesehatan, seperti kerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam hal *rapid test*, PCR dan *swab test*, dan lainnya.
 - Selain itu, mendukung pembelajaran jarak jauh (*online education*), UMKM yang berada di sekitar stasiun MRT, *E-Commerce*, dan *E-Wallet*.
3. Pengembangan dan Digitalisasi dalam *Customer Experience* dan *Customer Journey*
 - *Customer Experience*: kerja sama integrasi dengan pihak ketiga yang berperan sebagai sistem pengumpan (*feeder/ride sharing*), *park and ride*, dan *bike sharing*.

2020 was a challenging year for all business sectors in Indonesia, including MRT Jakarta, due to the COVID-19 pandemic. In order to maintain business continuity, the Corporation implements strategies as follows:

1. Collaboration with the Government/Regulator concerning various policies:
 - Supporting the government to recommend the implementation of odd-even plate policy across Jakarta;
 - Recommendation to adjust parking fee for Sudirman and Thamrin areas;
 - Recommendation to adjust TransJakarta route in South Jakarta;
 - Implementation of bike lane in TB Simatupang area;
 - Development of pedestrian lane in Sudirman and Thamrin areas;
 - Recommendation to implement ERP (*Electronic Road Pricing*) system.
2. Development and digitisation in customer acquisition and retention programme through collaboration with third parties, such as *E-Commerce*, *OTT Players*, Building Tenants, Telecommunication Providers, and others.
 - In 2020, a collaboration concerning benefit distribution to customers is focused on health issues, such as collaboration with hospitals and other healthcare facilities for rapid tests, PCR tests, and swab tests.
 - Supporting distance learning (*online education*), MSMEs around the MRT stations, *E-Commerce*, and *E-Wallet*.
3. Development and Digitization of Customer Experience and Customer Journey
 - *Customer Experience*: integration with third parties as a feeder system, park and ride, and bike-sharing.

- Pada tahun 2020, telah dilakukan inisiasi kerja sama dengan PPD, TransJakarta, Grab, dan Blue Bird; yang akan berperan sebagai *feeder system* untuk mempermudah pengguna jasa MRT dari dan ke tempat tujuan.
- Selain itu, telah dilakukan inisiasi kerja sama dengan Dinas Perhubungan terkait dengan *Park and Ride* yang berada di Ragunan dan Lebak Bulus.
- *Customer Journey*:
 - Pengembangan aplikasi MRT yang lebih *user friendly* dan program *Loyalty/Reward Points* yang dapat menaikkan *ridership*.

4. Pengembangan *Customer Care*

- Pengembangan sistem *omni channel platform* yang terintegrasi dalam suatu kerangka *Customer Relationship Management*.
- *Continuous improvement* pada standarisasi layanan maupun sosialisasi terkait dengan protokol COVID-19 yang ada.

5. *Digital Engagement* melalui optimalisasi media sosial

- Perbaikan dan optimalisasi penggunaan media sosial dalam *campaign* ke pelanggan.

Untuk mengelola segala risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi dengan anggota Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Direktur Konstruksi, Direktur Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Corporate Secretary, Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi PMO, Kepala Divisi Engineering, Kepala Divisi Railway Operation, Kepala Divisi Railway Maintenance, Kepala Divisi OMFS, Kepala Divisi Finance & Accounting, Kepala Divisi TOD, Kepala Divisi Commercial & Retail, dan Kepala Divisi Corporate Strategy.

Adanya komite tersebut menjadi bagian dari keinginan Perseroan untuk melakukan pengelolaan risiko yang utuh, mengingat Manajemen Risiko berperan bukan hanya mengelola potensi dampak negatif dalam pencapaian tujuan Perseroan, namun juga mengeksplorasi potensi dan peluang-peluang positif untuk meningkatkan nilai Perseroan dan pendekatan pengelolaan risiko tersebut mempunyai orientasi rentang waktu ke masa depan yang cukup jauh untuk dapat membangun kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjaga nilai Perseroan.

- *In 2020, collaboration has been initiated with PPD, TransJakarta, Grab, and Blue Bird, which will act as the feeder system to facilitate MRT passengers to go from and to the destination.*
- *Also, collaboration has been initiated with the Department of Transportation concerning Park and Ride in Ragunan and Lebak Bulus.*
- *Customer Journey*:
 - *Development of more user-friendly MRT application and Loyalty/Reward Point programme that can increase ridership.*

4. *Customer Care Development*

- *Development of integrated omni-channel platform system in a Customer Relationship Management framework.*
- *Continuous improvement on the service standardisation and dissemination concerning the applicable COVID-19 protocols.*

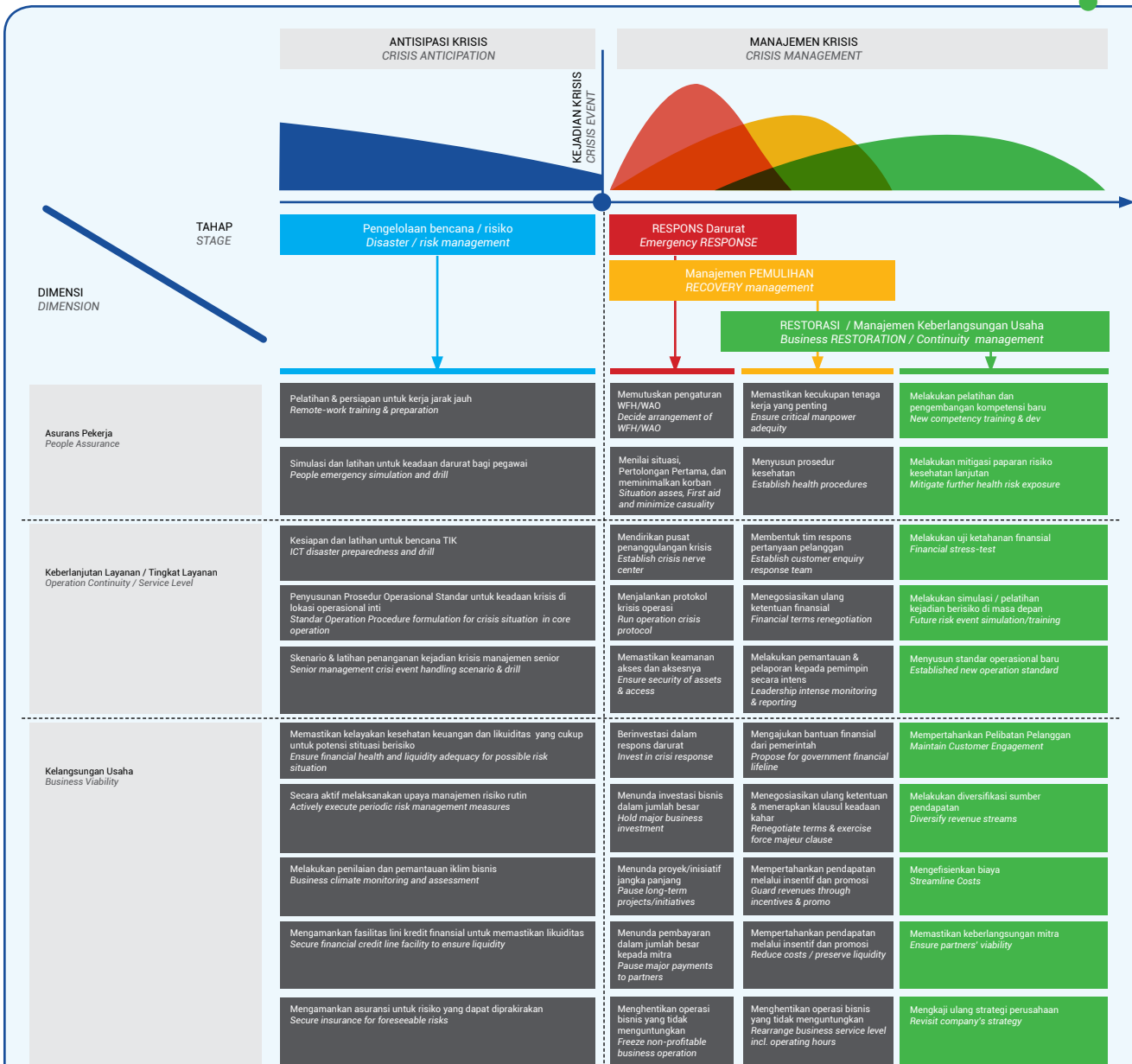
5. *Digital Engagement through social media optimisation*

- *Improvement and optimisation of social media utilisation for campaigns to the customers.*

To manage all risks that may impact the business continuity, the Corporation has established a Risk Management Committee that is chaired by the Finance and Corporate Management Director whose member consists of Operational and Maintenance Director, Construction Director, Business Development Director, Head of Corporate Secretary Division, Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division, Head of Internal Audit Division, Head of PMO Division, Head of Engineering Division, Head of Railway Operation Division, Head of Railway Maintenance Division, Head of OMFS Division, Head of Finance & Accounting Division, Head of TOD Division, Head of Commercial & Retail Division, and Head of Corporate Strategy Division.

The presence of the committee is a part of the Corporation intention to implement exhaustive risk management, considering that Risk Management does not only manage the potential negative impact in achieving the objectives of the Corporation, but also to explore the potential positive opportunities to increase the value of the Corporation and such risk management approach is oriented for the future to establish organisational readiness and capacity in managing the value of the Corporation.

Strategi Pemulihan Bisnis Strategi Pemulihan Bisnis



Pandemi COVID-19 membawa situasi sulit bagi seluruh pihak, tidak terkecuali Perseroan. Namun demikian, patut disyukuri bahwa dalam situasi krisis, Perseroan masih bisa bertahan dan tetap berkegiatan dengan baik. Sejalan dengan kerangka *Business Continuity Management* ("BCM") yang telah diratifikasi oleh Perseroan maka Direksi memutuskan untuk mengaktifkan *Crisis Management Team* ("CMT") dan melakukan rapat koordinasi setiap harinya. CMT kemudian mendefinisikan strategi tanggap darurat yang dikembangkan selama masa sulit pandemi yang sedang berlangsung. Terdapat 3 dimensi utama yang menjadi perhatian utama Perseroan, yaitu proteksi karyawan, kelangsungan pengoperasian MRT, dan keberlangsungan bisnis Perseroan.

The COVID-19 pandemic caused difficult situations for all parties, including the Corporation. However, it is fortunate that during the crisis, the Corporation can remain strong and deliver good activities. In line with the Business Continuity Management ("BCM") framework ratified by the Corporation, the Board of Directors decided to establish the Crisis Management Team ("CMT") and carry out daily coordination meeting. Then, CMT defines the emergency strategies developed during the ongoing times of hardship. There are three main dimensions as the focuses of the Corporation, i.e., employee protection, MRT operational continuity, and Corporation business continuity.

Pada proteksi karyawan, Perseroan melakukan sejumlah tindakan preventif dan kuratif bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali. Tindakan preventif yang dilakukan, antara lain pemberlakuan kebijakan kombinasi bekerja dari rumah dan bekerja di kantor, penyesuaian tempat kerja untuk mengakomodir jaga jarak, penerapan protokol kesehatan yang baik di area kerja, *online screening* harian terhadap seluruh karyawan, pemeriksaan RT-PCR bagi karyawan yang memerlukan, dan penyediaan paket sehat pada interval waktu tertentu terutama bagi karyawan yang harus masuk setiap hari selama pandemi berlangsung. Adapun tindakan kuratif yang dilakukan antara lain pengobatan dan perawatan yang difasilitasi oleh Perusahaan bagi karyawan yang terinfeksi virus COVID-19.

Dalam kaitannya dengan dimensi kelangsungan pengoperasian MRT, Perseroan melakukan sejumlah inisiatif internal yang diselaraskan dengan kebijakan PSBB dan PPKM yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti penyesuaian jadwal kereta, pemasangan *sticker* jaga jarak di seluruh kereta, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan lain demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa juga dilakukan seperti disinfektasi kereta secara rutin, pemasangan UVC untuk membunuh virus dan bakteri, rekayasa teknis di *elevator* dan beberapa kegiatan lainnya untuk mengurangi kemungkinan paparan virus kepada pengguna jasa. Selain itu juga, sejumlah simulasi dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh CMT. Dimensi terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu keberlangsungan bisnis. Perseroan menghadapi situasi serius dengan turunnya jumlah pengguna jasa secara signifikan yang berdampak pada kondisi finansial Perseroan dan entitas bisnis yang secara langsung bekerja sama dengan Perseroan. Selama periode krisis, Perseroan menetapkan sejumlah skenario sebagai dasar dalam penyesuaian arus kas dan budget Perseroan antara lain skenario moderat, berat, sangat berat, dan buruk.

Selain itu Perseroan melakukan *cost containment* dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan terhadap pendapatan Perseroan. Terakhir yang menjadi pelengkap dari dimensi ini yaitu mempersiapkan strategi bisnis yang adaptif dan mengambil kesempatan baru *post* COVID-19.

Concerning employee protection, the Corporation carries out various preventive and curative measures for all employees without exception. Preventive measures include the implementation of combination between working from home and working at the office, adjustment of the workplace to accommodate physical distancing, implementation of good health protocols at the workplace, daily online screening to all employees, RT-PCR testing for employees that require it, and provision of care package during a certain interval, especially for the employees that must work at the office every day during the pandemic. The curative measures include the provision of medication and treatment facilitated by the Corporation for employees that suffer from COVID-19.

Concerning MRT operational continuity, the Corporation implements several internal initiatives in line with PSBB and PPKM policies issued by the Government, such as by adjusting train schedule, stickers to maintain physical distance in all trains, and others. Other activities for the safety and comfort of the passengers are carried out as well, such as frequent disinfecting, UVC installation to kill virus and bacteria, technical engineering at the elevators and other activities to reduce the possibility of virus transmission to the passengers. Also, various simulation has been carried out based on the formulation of CMT. The last dimension that is as important is business continuity. The Corporation faces a serious situation with the significant decrease of passengers, which in turn impacts the Corporation financial condition and business entities that are in cooperation with the Corporation. During the crisis, the Corporation implements various scenario as the basis to manage cash flow and Corporation budgets such as a moderate scenario, difficult scenario, very difficult scenario, and a bad scenario.

Also, the Corporation implements cost containment by comparing the cost spent with the Corporation revenue. The last dimension is preparing adaptive business strategies and taking new opportunities after COVID-19.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS

Business Prospects and Strategic Plans for 2021

Prospek Usaha Tahun 2021

Business Prospects in 2021

Strategi bisnis MRT Jakarta mengedepankan pemahaman kepada kompetensi inti Perseroan sebagai penyedia layanan transportasi terdepan yang fokus, efisien, dan berkelas dunia. Tujuan dari MRT Jakarta adalah untuk membangun Perseroan menjadi organisasi yang berkesinambungan dan dikenal oleh masyarakat dalam memberikan layanan publik yang andal.

Dinamika pada tahun 2020 yang dihadapkan pada pandemi COVID-19 tidak mengurangi prospek usaha Perseroan pada masa mendatang. Penurunan jumlah pengguna jasa pada tahun 2020 diyakini bersifat sementara dan akan kembali pulih seiring terkendalinya pandemi COVID-19 pasca upaya Pemerintah mendatangkan vaksin yang diikuti vaksinasi setiap warga negara, termasuk penduduk DKI Jakarta.

Memasuki tahun 2021, kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia termasuk DKI Jakarta, perlahan akan pulih setelah pada tahun 2020 terkena dampak pandemi COVID-19. Kembali bergeraknya sektor ekonomi membutuhkan dukungan mobilitas, terutama bagi para pekerja. MRT Jakarta menjadi salah satu alternatif mengingat rute yang dilayani sangat strategis, yakni menghubungkan wilayah selatan dan pusat kota yang saat ini berkembang sebagai kawasan permukiman dan perekonomian.

Perseroan memperkirakan, pengguna jasa MRT Jakarta pada tahun 2021 akan tumbuh signifikan. Kondisi ini tidak hanya akan berpengaruh pada pendapatan tiket, tapi juga mendorong kinerja positif pendapatan non-tiket. Tingginya lalu lintas pengguna jasa MRT Jakarta menjadi pasar bagi jasa periklanan yang merupakan salah satu sumber pendapatan non-tiket Perseroan.

Potensi pertumbuhan pengguna jasa MRT Jakarta sangat terbuka. Publikasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2019 jumlah penggunaan transportasi umum di wilayah Jabodetabek baru mencapai 30% dari jumlah

The business strategy of MRT Jakarta prioritises the understanding of the core competencies of the Corporation as a leading, focused, efficient, and world-class transportation service provider. MRT Jakarta aims to establish the Corporation to be a sustainable organisation that is known by the public as a reliable public service provider.

The dynamics of 2020 including the COVID-19 pandemic did not impact negatively the business prospects of the Corporation in the future. The decreased number of passengers in 2020 is believed to be a temporary condition and it will eventually recover along with the containment of the COVID-19 pandemic after the efforts of the Government by providing vaccines and vaccination of the Indonesian citizens, including the citizens of DKI Jakarta.

By 2021, the social and economic condition in Indonesia including DKI Jakarta will gradually recover following its hardship in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The reactivation of the economic sector requires supports in terms of mobility, especially for the workers. MRT Jakarta is an alternative for them considering its highly strategic routes that connect the southern part of Jakarta with the central part of the city that is currently being developed as a residency and economic area.

The Corporation estimates that the passengers of MRT Jakarta in 2021 will significantly grow. Such condition will not only impact the farebox revenue, but also drive the positive performance of non-farebox revenue. The high traffic of MRT Jakarta passengers is the market share for the advertising service as a non-farebox revenue source for the Corporation.

The increased number of MRT Jakarta passengers is a highly potential scenario. A publication from the Greater Jakarta Transportation Management Body (BPTJ) states that as of 2019, the number of public transportations in the Jabodetabek area only reached 30% of the total citizens of

penduduk Jabodetabek. Berdasarkan rencana pengelolaan transportasi yang disiapkan BPTJ, ditargetkan jumlah pengguna transportasi publik dapat mencapai 60% dalam beberapa tahun mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah mendorong sistem transportasi publik yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi kepada transportasi publik.

Jabodetabek. Based on the transportation management plan developed by BPTJ, the target of public transportation users can reach 60% in the few years to come. To realise the plan, the Government encourages an integrated public transportation system as a lever to increase the interest of the public to shift from private vehicles to public transportations.

Rencana Strategi

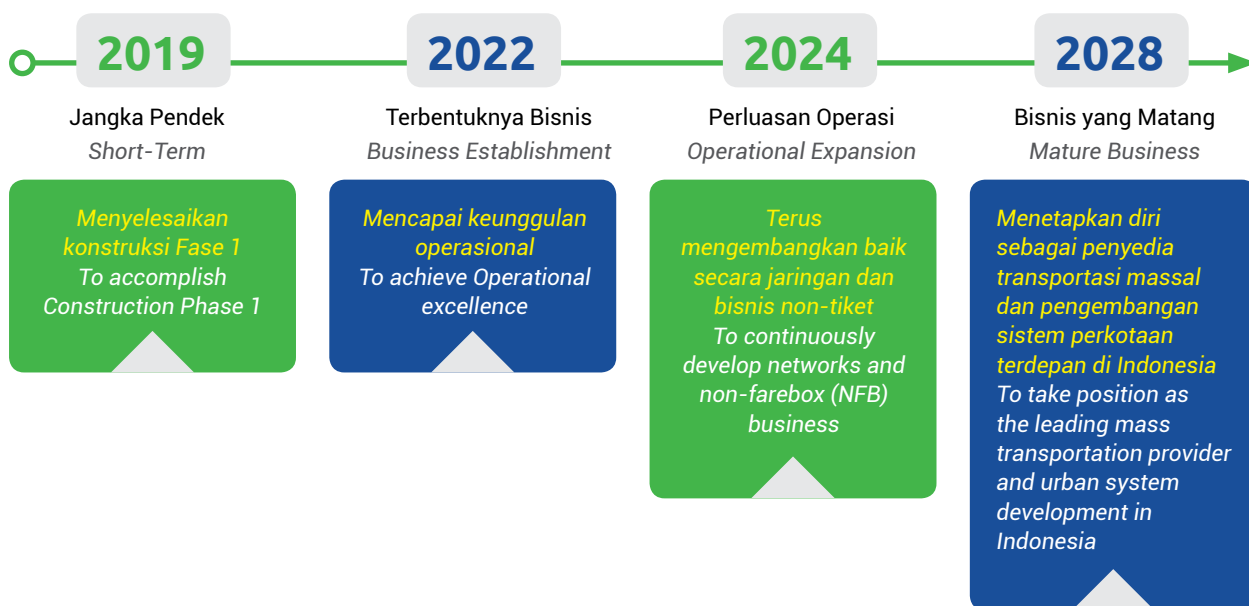
Strategic Plans

Perseroan telah menyusun Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai strategi untuk menjamin keberlanjutan usaha dan operasi. Sesuai Peta Jalan, Perseroan menargetkan pada tahun 2022 akan terbentuk bisnis dan mencapai keunggulan operasional; memperluas operasi dan pengembangan secara jaringan maupun bisnis nontiket pada tahun 2024; serta mencapai kematangan bisnis sebagai penyedia transportasi massal dan pengembang sistem perkotaan terdepan di Indonesia pada tahun 2028. Pemutakhiran Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) akan mulai dilakukan pada tahun 2021.

Long-Term Development Plan of PT MRT Jakarta (Perseroda) as a strategy to guarantee the business and operational continuity. Following the Roadmap, the Corporation sets the target in 2022 to establish the business and achieve operational excellence; to expand the operations and development in terms of network and non-farebox revenue in 2024; and to achieve business maturity as a leading public transportation provider and developer of the urban system in Indonesia in 2028. The Update of the Corporate Business Plan will be started in 2021.

Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Business Road Map: Long Term Development Plant



Perseroan juga melanjutkan penerapan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2020 tentang Penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan MRT Jakarta. Rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu melalui pengelolaan dan komersialisasi kawasan KBT oleh Anak Usaha Pengelolaan KBT.

Selain fokus terhadap ekspansi pengembangan bisnis dan anak usaha, Perseroan juga meningkatkan pengelolaan perencanaan internal. Sesuai metode pengelolaan strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), pengelolaan strategi Perseroan mencakup empat perspektif yang ada dalam usaha, yakni *Financial* (Finansial), *Customer* (Pelanggan), *Internal Business Process* (Proses Internal Bisnis), dan *Learning & Growth* (Pembelajaran & Pengembangan).

Dalam perspektif *Financial*, target utama adalah mewujudkan Perseroan yang sehat secara keuangan dengan memaksimalkan pendapatan Perseroan. Perspektif *Customer* berfokus pada upaya peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan, serta melaksanakan tugas-tugas layanan publik yang terkait dengan peningkatan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat sebagai implikasi dari sistem layanan transportasi publik yang semakin meningkat.

Terkait perspektif *Internal Business Process*, fokus Perseroan adalah pada *operational excellence* (memastikan kualitas dalam kegiatan operasional), pengembangan jaringan MRT, pengembangan *platform* digital, peningkatan penghasilan non-tiket, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), serta pengembangan anak usaha dan Perseroan patungan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan.

Sementara perspektif *Learning & Growth* sebagai fondasi dari kerangka strategis ini ditargetkan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya karyawan MRT Jakarta, meningkatkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), *Safety*, dan implementasi *Knowledge Management*.

The Corporation also maintains to implement Governor's Regulation No. 67 Year 2019 concerning the Implementation of Transit-Oriented Development and Governor's Regulation No. 15 Year 2020 concerning Assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) as Developer of Transit-Oriented Development in North-South Corridor of MRT Jakarta. The action plan to be implemented is through the management and commercialisation of the TOD area by the TOD Management Subsidiary.

Apart from focusing on the expansion of business development and subsidiaries, the Corporation improves internal planning management as well. Following strategy management method based on Balanced Scorecards (BSC), the Corporate strategy management covers four perspectives of the business, i.e., Financial, Customer, Internal Business Process, and Learning & Growth.

From a Financial perspective, the main target is to establish a financially healthy Corporation by maximising the Corporation revenue. The customer perspective focuses on the efforts to increase the services and customer satisfaction, and to carry out public service duties concerning the improvement of mobility and welfare of the public as an implication of an enhanced public transportation service system.

Internal Business Process perspective focuses on operational excellence (ensuring quality in operational activities), development of MRT network, development of the digital platform, improvement of non-farebox revenue, development of Transit-Oriented Development (TOD), and development of subsidiaries and joint ventures following the requirement of the Corporation development.

Finally, the Learning & Growth perspective as a foundation of this strategic framework aims to increase the capability and capacity of the human capital of MRT Jakarta, improve Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Safety, and implement Knowledge Management.

Berdasarkan visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2022, aspirasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan sarana dan prasarana moda transportasi di DKI Jakarta, yaitu terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pada 8 Oktober 2018, Pemprov DKI Jakarta memulai kampanye Jak Lingko. Kampanye ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi untuk menciptakan *customer journey* dan *customer experience* yang terintegrasi secara *end-to-end* bagi seluruh warga DKI Jakarta. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan mengambil posisi untuk memainkan 6 peranan strategis yang telah dan akan diemban oleh MRTJ dalam mewujudkan aspirasi Pemerintah tersebut. Adapun 6 peranan strategis tersebut, antara lain:

1. Sebagai *master integrator* transportasi berbasis rel
Untuk mewujudkan peranan strategis ini, MRTJ diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi integrasi seluruh moda transportasi umum berbasis rel baik dari segi interkoneksi dan penyetaraan tingkat *operational excellence*. Untuk menjalankan peranan strategis ini, MRT Jakarta dibantu oleh MITJ yang dibentuk pada awal 2020 bersama dengan PT KAI untuk mewujudkan integrasi transportasi berbasis rel di DKI Jakarta dan daerah penyangga dengan baik.
2. Sebagai integrator pembayaran dan tarif
Tujuan dari peranan strategis ini, yaitu untuk menjalankan fungsi dalam mengintegrasikan platform pembayaran *cashless* dan mengintegrasikan tarif antar moda transportasi. Pada tanggal 30 Desember 2020, MRT Jakarta bersama dengan PT Jakarta Propertindo ("JakPro"), PT Transportasi Jakarta ("TJ"), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("MITJ") menandatangani akta pendirian dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Keamanan untuk kelembagaan PT Jakarta Lingko Indonesia ("JakLingko Indonesia"). Perusahaan patungan yang dibentuk ini nantinya akan mendukung MRT Jakarta dalam menjalankan peranan strategis sebagai integrator pembayaran dan tarif.
3. Sebagai *developer* ekspansi jaringan transportasi berbasis rel
Peranan strategis ini untuk menjalankan fungsi dalam pelaksanaan ekspansi jaringan cakupan pelayanan transportasi berbasis rel untuk mencapai target 60% penetrasi transportasi umum.

Based on the vision and missions of the Government of DKI Jakarta as stipulated in the Regional Middle-Term Development Plan (RPJMD) 2018 – 2020, the Government of DKI Jakarta aspires to provide facilities and infrastructures for modes of transportation in DKI Jakarta, including the realisation of safe, reliable, modern, integrated, environmentally friendly, and affordable transportation facilities and infrastructures for all citizens of DKI Jakarta. On October 8 2018 the Government of DKI Jakarta Province started the campaign of Jak Lingko. This campaign aims to realise an integrated transportation ecosystem to create an end-to-end integrated customer journey and customer experience for all citizens of DKI Jakarta. To realise this, the Corporation plays 6 strategic roles that have been and will be a responsibility of MRTJ in realizing the aspiration of the Government. The six strategy roles are as follows:

1. *As a master integrator of railway-based transportation*
To realise this strategic role, MRTJ is expected to be able to carry out coordination and integration functions of all railway-based public modes of transportation in terms of interconnectivity aspects and alignment of operational excellence. To carry out this strategic role, MRT Jakarta is assisted by MITJ that was established at the beginning of 2020 with PT KAI to realise railway-based transportation integration in DKI Jakarta and the surrounding area.
2. *As a payment and fee integrator*
This strategic role aims to carry out the function to integrate a cashless payment platform and to integrate the fee among modes of transportation. On December 30, 2020, the Corporation in collaboration with PT Jakarta Propertindo ("JakPro"), PT Transportasi Jakarta ("TJ"), and PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("MITJ") signed a deed of establishment and registered to the Law and Security to institutionalise PT Jakarta Lingko Indonesia ("JakLingko Indonesia"). This joint venture will support MRT Jakarta to carry out strategy roles as payment and fee integrator.
3. *As a developer of railway-based transportation network expansion*
This strategic role aims to carry out the functions of railway-based transportation service network scope to achieve the target of 60% of public transportation penetration.

4. Sebagai *master developer* Kawasan TOD
Salah satu mandat yang diamanahkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PERDA No. 9 tahun 2018, Perseroan dituntut untuk menjalankan fungsi dalam pengembangan Kawasan *Transit-Oriented Development* (TOD) sebagai bagian dari pengembangan kota. Perseroan juga membentuk PT Integrasi Transit Jakarta ("ITJ") untuk mengoptimalkan peranan strategis ini.
5. Sebagai *revenue generator* bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perseroan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan tujuan peningkatan profitabilitas perusahaan dan pengurangan ketergantungan terhadap PSO/APBD.
6. Sebagai agen pembangunan DKI Jakarta melalui sinergi BUMD
Sebagai lengan perpanjangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan diminta untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai salah satu agen pembangunan Kota DKI Jakarta melalui pelaksanaan sinergi dengan BUMD lainnya.

Selain itu, pada tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan dan pengembangan bagi MRTJ. Strategi utama Perseroan adalah tetap mengutamakan GRC yang taat pada penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, sambil melakukan berbagai langkah pemulihan dan bergerak maju menjalankan misi utama dan mandat pengembangan. Strategi 2021 yang akan dijalankan Perseroan, yaitu Strategi 4-5-2, yang mana 4 adalah Strategi Dasar, 5 sebagai Strategi Tengah, dan 2 sebagai Strategi Depan.

Adapun 4 (empat) komponen utama dari Strategi Dasar adalah:

1. Memperkuat *Business Continuity Management* (BCM) di mana Perseroan akan menjalankan strategi pemulihan dan restorasi yang kokoh sebagai landasan bagi setiap aksi yang dilakukan;
2. Meningkatkan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC), di mana Perseroan akan memperkuat aspek GRC secara terintegrasi untuk menghadapi tantangan kedepan;
3. Meningkatkan maturitas dari *Knowledge Management* (KM), di mana manajemen pengetahuan dan inovasi akan didorong menjadi budaya korporasi;
4. Memperkuat Manajemen Talenta, di mana pembinaan terhadap setiap individu MRTJ ditempatkan dalam sebuah sistem manajemen talenta yang efektif dan berkesinambungan.

4. As a *master developer* of TOD Areas
A mandate was given by the Government of DKI Jakarta Province through Regional Regulation No. 9 Year 2018, the Corporation was expected to carry out the function in developing Transit-Oriented Development (TOD) areas as a part of urban development. The Corporation has formed a PT Integrasi Transit Jakarta ("ITJ") to optimise this strategic role.
5. As a *revenue generator* for the Development of DKI Jakarta Province
The Corporation is also expected to carry out the functions in sustainable business development that aims to increase Corporate profitability and reduce the dependency on PSO/APBD.
6. As a *development agent* of DKI Jakarta through BUMD synergy.
As an extension of the Government of DKI Jakarta Province, the Corporation is expected to carry out the functions as an agent of development for DKI Jakarta through ROE synergy.

Also, in 2021, the recovery and development of MRTJ will be carried out. The Corporation main strategy is by prioritizing GRC who obeys the implementation of health protocols strictly, while taking various corrective actions and moves forward in carrying out the core mission and development mandate. The strategy to be implemented by the Corporation in 2021 is 4-5-2 Strategy, with 4 Basic Strategies, 5 Intermediate Strategies, and 2 Advanced Strategies.

There are four (4) main components of Basic Strategy:

1. *Strengthening Business Continuity Management (BCM), where the Corporation carries out rigid recovery and restoration strategies as foundation of each actions taken;*
2. *Improving Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), where the Corporation strengthen integrated GRC aspects to face the challenges in the future;*
3. *Increasing the maturity of Knowledge Management (KM), where knowledge management and innovation are encouraged to be a Corporate culture;*
4. *Strengthening Talent Management, where assistance to each individual at MRTJ is carried out through an effective and continuous talent management system.*

Sementara 5 (lima) komponen dari Strategi Tengah adalah:

1. Mendorong keunggulan operasional, dimana MRT Jakarta harus terus mempertahankan kualitas layanannya yang berstandar internasional yang mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan;
2. Meneruskan ekspansi jaringan rel, dimana upaya-upaya untuk melakukan percepatan Fase 2, Fase 3, dan Fase 4 perlu dilakukan;
3. Mengembangkan bisnis TOD, dimana kawasan-kawasan TOD yang sudah dimandatkan kepada MRT perlu segera dikembangkan;
4. Melakukan transformasi digital, dimana pola dan tata kerja korporasi termasuk ekosistem pelayanannya, harus bertransformasi menjadi budaya digital;
5. Mempercepat integrasi transportasi antar moda, dimana pengintegrasian sistem layanan dan sistem pembayaran akan diimplementasikan.

Selain itu, 2 (dua) komponen dari Strategi Depan atau ujung tombak, yang akan dilihat dan dirasakan oleh publik, yaitu:

1. Keunggulan layanan publik, dimana masyarakat akan menilai bagaimana layanan yang diberikan oleh MRT Jakarta, baik dari segi tingkat kepuasan pengguna dan tingkat *ridership*, maupun dari keberhasilan MRT menjalankan tugas-tugas pembangunan yang dimandatkan oleh Pemerintah;
2. Keunggulan finansial, yaitu kemampuan MRTJ untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan cara mengoptimalkan pendapatan tiket dan non-tiket dengan tetap menjaga efektivitas penyerapan biaya operasional.

Strategi 4-5-2 akan dijalankan oleh seluruh unit dan karyawan MRT Jakarta dengan saling mengisi dan bergerak selaras menjalankan strategi ini. Dengan melaksanakan Strategi 4-5-2 secara selaras, Perseroan dapat menjalankan misi *Revive and Grow Sustainably* dengan berhasil.

Meanwhile, there are five (5) components of Intermediate Strategy:

1. *Encouraging operational excellence, where MRT Jakarta maintains the service quality of international standards that prioritises safety, security, comfort, health, and environmental sustainability;*
2. *Continuing railway expansion, where the efforts to accelere Phase 2, Phase 3, and Phase 4 must be carried out;*
3. *Developing TOD business, where TOD areas as mandated to the Corporation must be developed;*
4. *Implementing digital transformation, where Corporate governance including service ecosystem must transform to be digital culture;*
5. *Accelerating transportation integration across modes of transportation, where service and payment system integration will be implemented.*

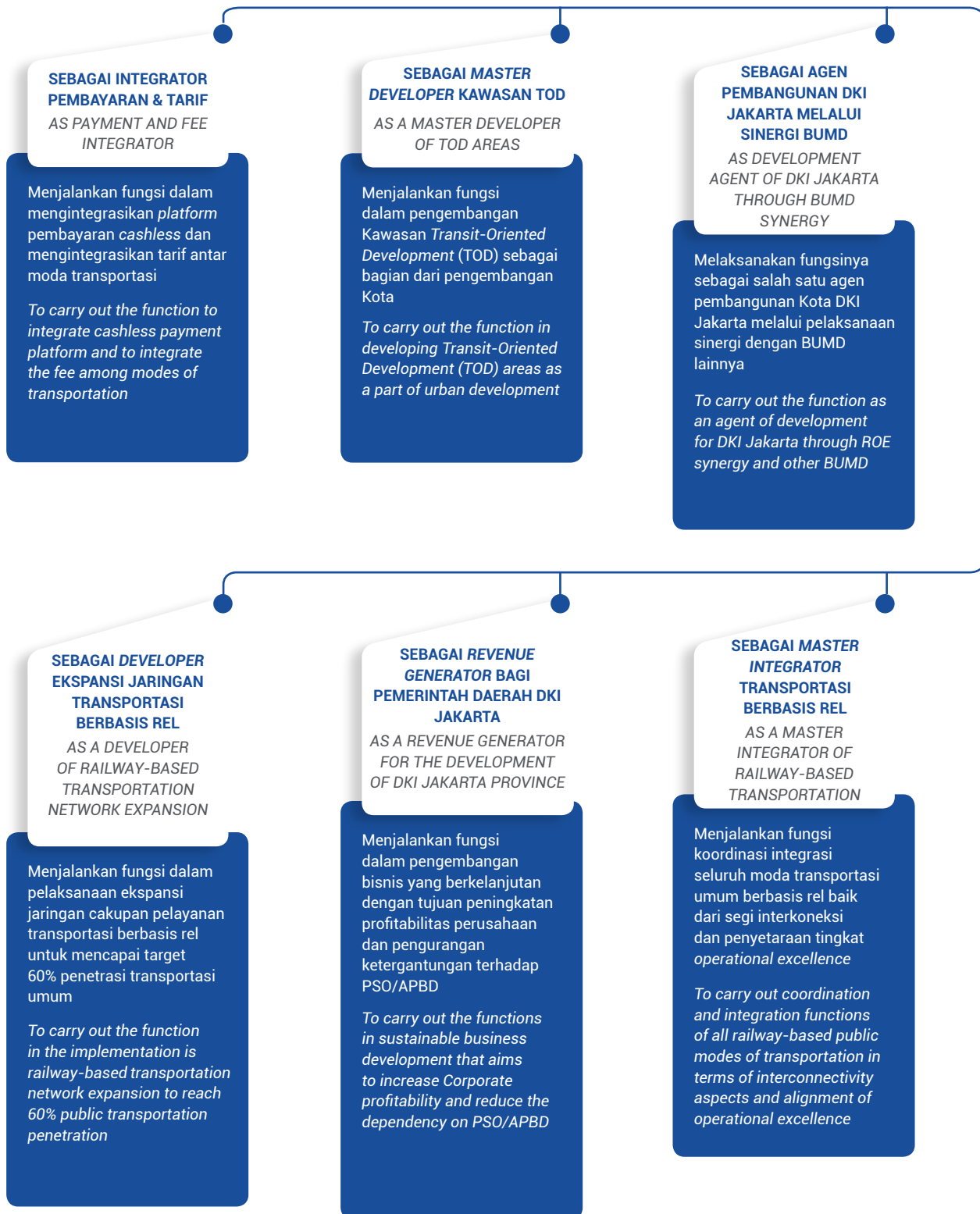
Lastly, there are two (2) components of Advanced Strategy to be witnessed and experienced by the public:

1. *Public service excellence, where the community will assess the service provided by MRT Jakarta, in terms of passenger satisfaction and ridership rate, and the successful efforts of MRT in carrying out development duties as mandated by the Government;*
2. *Financial excellence, which is the ability of MRTJ to generate revenue and profits by optimizing farebox and non-farebox revenues while maintaining the activity of operational budget absorption.*

Strategy 4-5-2 will be carried out by all units and employees of MRT Jakarta by completing each other and move in harmony to implement the strategy. By implementing aligned Strategy 4-5-2, the Corporation can carry out the Revive and Grow Sustainably mission well.

Peranan Strategis yang telah dan akan diemban oleh MRT Jakarta dalam Mewujudkan Aspirasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Strategic Roles that have been and will be a Responsibility of MRT Jakarta in Realizing the Aspiration of the Governor DKI Jakarta Province



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Occurred after the Date of Accounting Reports

Informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2020 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 22 Maret 2021.

1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler tanggal 5 Februari 2021, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Sdr. Farchad Mahfud sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

Keputusan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 47 tanggal 27 Februari 2021.

2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas luasnya. PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Perseroan masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode pelaporan berikutnya.

Material information and facts that occurred between the end of the reporting period on December 31, 2020 and the accounting report date March 22, 2021.

1. *Following the Shareholders' Decree Outside Circular General Meeting of Shareholders on February 5, 2021, the Shareholders have agreed to appoint Farchad Mahfud as Business Development Director.*

The decision has been ratified through the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 47 dated February 27, 2021.

2. *Government Regulation No. 35 Year 2021 – Omnibus Law on Job Creation. On February 2, 2021, the Government enacted and promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to carry out the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation that aims to create job opportunities. PP 35/2021 governs the fixed-term employment agreement (contract employees), outsourcing, working hours, rest hours, and termination of employment that may impact the minimum benefits as rights of the employees. On the date of authorisation of the consolidated financial statements, the Corporation still evaluates the potential impacts of the implementation of applying regulations of PP 35/2021, including the impacts on the consolidated financial reports of the Corporation for the upcoming reporting period.*



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Development of Good Corporate Governance Implementation

Perseroan berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna menciptakan transparansi, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, serta memiliki manajemen bisnis yang bertanggung jawab.

The Corporation is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles to realize transparency, gain trust from stakeholders, and exercise responsible business management.

Dasar Penerapan dan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Foundation for Implementation and Principles of Good Corporation Governance

Perseroan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik melibatkan seluruh struktur tata kelola perusahaan dan melalui proses yang terintegrasi dengan kepatuhan, manajemen risiko, serta pengendalian internal. Komitmen pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan mengantarkan Perseroan mencapai visi dan misinya.

The Corporation is committed to implementing good Corporation governance (GCG) principles as a foundation to create values and sustainability for the interest of shareholders, community, and other stakeholders. GCG incorporates the overall structure of corporate governance through processes integrated with compliance, risk management, and internal control. We believe that our commitment to GCG facilitates the Corporation in achieving its vision and missions.

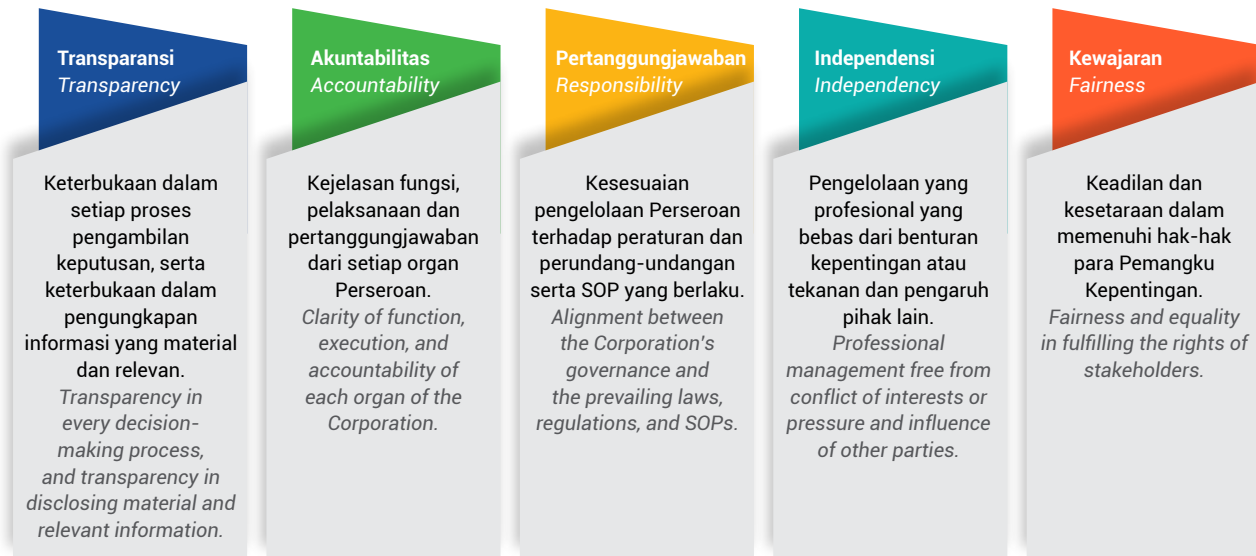
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Perseroan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah sesuai berbagai ketentuan yang menjadi pedoman:

GCG implementation refers to five basic principles: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, as stated in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance (KNKG). The Corporation ensures that GCG implementation complies with the following provisions:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
 - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2019.
- *Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Corporate (PT);*
 - *Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 9 Year 2018 concerning Limited Liability Corporate MRT Jakarta (Perseroan Daerah);*
 - *Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Regionally-Owned Enterprises (ROEs) within the Special Capital Region of Jakarta;*
 - *General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia issued by the National Committee on Governance (KNKG) Year 2019.*

Prinsip-prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Basic Principles of Good Corporate Governance



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Objectives of GCG Implementation

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan;
- Mendorong dan mendukung perkembangan Perseroan;
- Mengelola sumber daya dan risiko Perseroan secara lebih efektif dan efisien;
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- Mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Perseroan;
- Memaksimalkan nilai Perseroan dalam bentuk peningkatan kinerja serta citra Perseroan yang baik;
- Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
- Mendorong organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan;
- Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perseroan dan Karyawan dalam menjalankan bisnis Perseroan;
- Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perseroan.
- *To control and direct relations between shareholders, the Board of Commissioners, Board of Directors, employees, clients, business partners, as well as community and the environment;*
- *To encourage and support the development of the Corporation;*
- *To manage the Corporation's resources and risks effectively and efficiently;*
- *To increase accountability towards stakeholders;*
- *To prevent acts of misconduct in managing the Corporation;*
- *To maximise the Corporation's value in the form of improving work performance as well as maintaining the Corporation's image;*
- *To encourage the Corporation management in a professional, transparent, and efficient manner and also to empower its functions and strengthen independence of the Corporation organs;*
- *To encourage organs within the Corporation to make decisions and execute actions based on high ethical/moral values that comply with the prevailing laws and regulations, as well as having the awareness of the Corporation's social responsibility towards stakeholders;*
- *To reduce the possible conflict of interests between organs and employees in conducting the Corporation's business; and*
- *To create a business environment that support efforts to achieve the Corporation's goals.*

Perkembangan dan Pencapaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2020

Development and Achievement of GCG in 2020

Januari January 2020

1. Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan oleh seluruh Insan Perseroan;
3. Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 22 Januari 2020;
4. Pembaruan Peraturan Direksi No. 004 Tahun 2020 tentang Hierarki Norma PT MRT Jakarta (Perseroan) tanggal 30 Januari 2020;
5. Pengesahan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2020 tentang pedoman Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroan) tanggal 30 Januari 2020.

1. *Integrity Pact signing by the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing Good Corporate Governance;*
2. *Compliance Statement Signing by all Employees of the Corporation;*
3. *Dissemination concerning Filling Out the Report of State Officials' Wealth (LHKPN) by the Corruption Eradication Commission (KPK) on January 22, 2020;*
4. *Amendment to Directors' Regulation No. 004 Year 2020 concerning Norm Hierarchy of PT MRT Jakarta (Perseroan) dated January 30, 2020;*
5. *Ratification of the Directors' Regulation No. 005 Year 2020 concerning Guidelines of Decision-Making in PT MRT Jakarta (Perseroan) dated January 30, 2020.*

Februari February 2020

1. Pendampingan pengisian dan pelaporan LHKPN kepada seluruh Wajib LHKPN;
 2. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik kepada seluruh unit kerja.
1. *Assistance of preparation and reporting of LHKPN to all Obliges;*
 2. *Delivery of recommendations from the results of GCG assessment to all work units.*

Mei May 2020

1. Pembaruan Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran tanggal 19 Mei 2020;
2. Internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

1. *Amendment to Directors' Regulation No. 011 Year 2020 concerning the Guidelines of Whistleblowing System dated May 19, 2020;*
2. *Internalization of the Code of Conduct and Guidelines of Gratification Control.*

April April 2020

1. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan resmi dikelola oleh Pihak Independen;
2. 100% Tingkat Pemenuhan Pelaporan LHKPN oleh Wajib Lapo Perseroan.

1. *Whistleblowing System is officially managed by an Independent Party;*
2. *100% Completion Rate of LHKPN Report by Obligees.*

Maret March 2020

1. Penyelenggaraan Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Elektronik tanggal 13 Maret 2020 secara elektronik;
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LB tanggal 24 Maret 2020 secara elektronik;
3. Pengesahan Peraturan Direksi No. 009 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tanggal 16 Maret 2020.

1. *Virtual Annual Pre-General Meeting of Shareholders and Annual General Meeting of Shareholders on March 13, 2020;*
2. *Virtual Annual GMS and Extraordinary GMS on March 24, 2020;*
3. *Ratification of Directors' Regulation No. 009 Year 2020 concerning the Guidelines of Usage of Electronic Signature dated March 16, 2020.*

Juni June
2020

1. Sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada seluruh Direktorat di Perseroan;
 2. Penandatanganan Pernyataan Komitmen Sistem manajemen Anti Penyuapan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
1. *Dissemination of Whistleblowing System to all Directorates in the Corporation;*
 2. *Signing of Commitment Statement to Anti-Bribery Management System by the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

Juli July
2020

1. Pembahasan Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Kode Etika dan Perilaku dan Pedoman Benturan Kepentingan;
 2. Pembahasan perancangan Pedoman Hubungan Perseroan Dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan.
1. *Discussion concerning Amendment to Guidelines of Corporate Governance, Guidelines of Code of Conduct, and Guidelines of Conflicts of Interest;*
 2. *Discussion concerning preparation of Guidelines of Corporate Relationship with Subsidiaries and/or Joint Ventures.*

Agustus August
2020

1. Pelaksanaan Audit Internal ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 5-7 Agustus 2020;
 2. Sosialisasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 14, 19, dan 24 Agustus 2020;
 3. Pembaruan Peraturan Direksi No. 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran tanggal 31 Maret 2020.
1. *Internal Audit of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System on August 5-7, 2020;*
 2. *Dissemination of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System on August 14, 19, and 24, 2020;*
 3. *Amendment to Directors' Regulation No. 031 Year 2020 concerning the Guidelines of Whistleblowing System dated March 31, 2020.*

November November
2020

1. Penyelenggaraan Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2020 secara elektronik;
 2. Penyelenggaraan RUPS LB tanggal 30 November 2020 secara elektronik;
 3. Tersertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen anti Penyuapan oleh TUV Rheinland;
 4. Perubahan Pertama atas Pedoman Pengambilan Keputusan, disahkan dengan Peraturan Direksi No. 046 tahun 2020 tanggal 12 November 2020.
1. *Virtual Extraordinary Pre- General Meeting of Shareholders November 25, 2020;*
 2. *Virtual Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30, 2020;*
 3. *Certified with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System by TUV Rhineland.*
 4. *First Amendment to the Guidelines of Decision Making, ratified by Directors' Regulation No. 046 Year 2020 dated November 12, 2020.*

Oktober October
2020

1. Meraih 4 (empat) Penghargaan dalam ajang Penghargaan TOP GRC 2020;
 2. Mendapat Rekomendasi Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh TUV Rheinland.
1. *Received 4 (four) Awards in TOP GRC Awards 2020;*
 2. *Received the Recommendation of Certification for ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System by TUV Rheinland.*

September September
2020

1. Internalisasi Pedoman Benturan Kepentingan;
 2. Pembentukan Satuan Pengawas Etika dan Perilaku tanggal 11 September 2020;
 3. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 37001:2016 oleh TUV Rheinland pada 22-25 September 2020.
1. *Internalisation of the Guidelines of Conflict of Interests;*
 2. *Establishment of Code of Conduct Supervision Unit on September 11, 2020;*
 3. *External Audit of ISO 37001:2016 by TUV Rheinland on September 22-25, 2020.*

Desember *December*
2020

1. Pelaksanaan Webinar *GRC Series* dengan Tema "Tantangan dan Peluang Penerapan GRC dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi" tanggal 3-4 Desember;
 2. Meraih Penghargaan *Trusted Company* dengan skor 82,98 dalam program *Corporate Governance Perception Index*;
 3. Pembaharuan Peraturan Direktur tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, disahkan dengan Peraturan Direksi No. 048 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
 4. Pembaharuan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan, No. 012 Tahun 2020 dan No. 065 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 5. Pembaharuan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi No. 010 Tahun 2020 dan No. 066 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 6. Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Etika dan Perilaku, No. 011 Tahun 2020 dan No. 067 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 7. Pembaharuan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Benturan Kepentingan No. 013 Tahun 2020 dan No.071 Tahun 2020;
 8. Pengesahan Pedoman Hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, No. 051 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 9. Sosialisasi LHKPN kepada Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan Patungan;
 10. Pelaksanaan Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai 90,13.
1. *GRC Series Webinar on December 3-4, 2020 with the Theme "Challenges and Opportunities of GRC Implementation in Corporate Transformation during the Era of Disruption";*
 2. *Received Trusted Company Award with score of 82.98 in Corporate Governance Perception Index programme;*
 3. *Amendment to Directors' Regulation concerning the Management of Report of State Officials' Wealth, ratified with the Director's Regulation No. 048 Year 2020 dated December 15, 2020;*
 4. *Amendment to Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors concerning the Guidelines of Corporate Governance, No. 012 Year 2020 and No 065 Year 2020 dated December 28, 2020.*
 5. *Amendment to Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors concerning the Board Manual of the Board of Commissioners and Directors, No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020 dated December 28, 2020.*
 6. *Amendment to Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors concerning the Code of Conduct, No. 011 Year 2020 and No. 067 Year 2020 dated December 28, 2020.*
 7. *Amendment to Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors concerning the Guidelines of Conflict of Interests, No. 013 Year 2020 and No.071 Year 2020;*
 8. *Ratification of Guidelines of Corporate Relationship with Subsidiaries and/or Joint Ventures, No. 051 Year 2020 dated December 28, 2020;*
 9. *Dissemination of the Reports of State Officials Wealth to Subsidiaries and Joint Ventures;*
 10. *Implementation of GCG Implementation Assessment in 2020 by Finance Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta Province, resulting in the score of 90.13.*

Struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance Structure



Struktur Perangkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Organizational Structure of Good Corporate Governance

Struktur Tata Kelola Perseroan dibentuk sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perangkat Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Mekanisme pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik didukung perangkat ketentuan maupun aturan yang mengatur hubungan antar perangkat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ komite, yaitu Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan, dan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, serta didukung Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara Direksi memiliki organ pendukung, yaitu Divisi *Corporate Secretary, Corporate Strategy, Internal Audit, Risk Management & QSSHE Assurance*, dan Komite Manajemen Risiko.

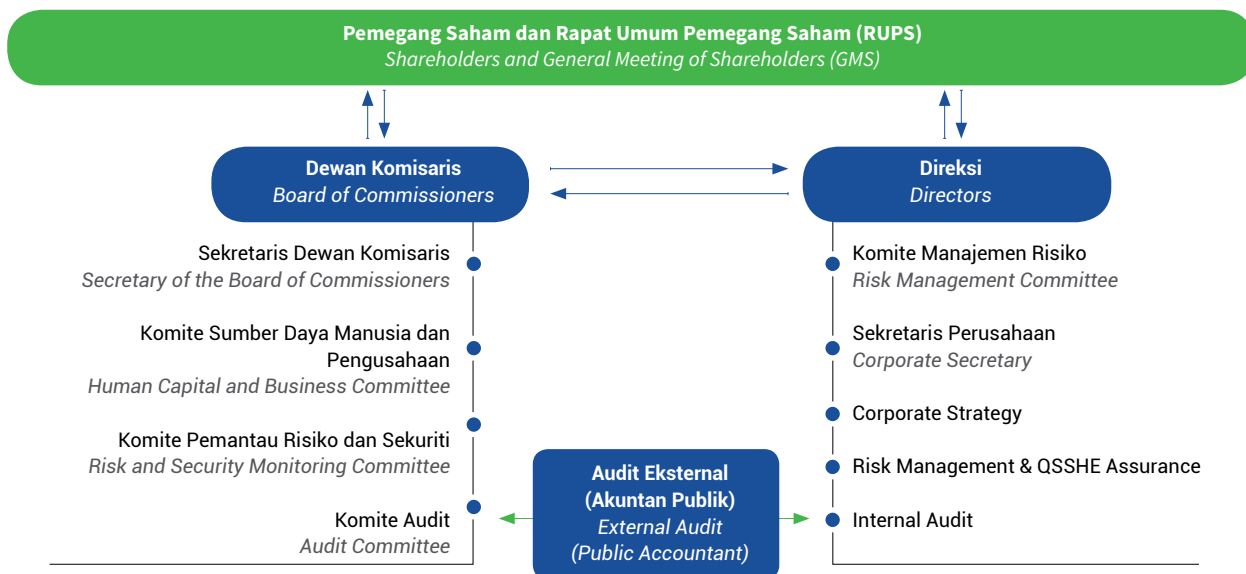
Komite Audit dan Divisi *Internal Audit* bekerja sama dengan Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Komisaris.

The Governance structure of the Corporation complies with the prevailing laws and regulations. As stated in Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Corporate, the Corporate Governance structure includes the General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum to discuss the critical decisions that affect our Shareholders, the Board of Commissioners as a supervisory board of the company management, and the Board of Directors as the management of the company. The mechanism of GCG implementation is supported by a series of provisions and regulations that govern the relationship between the organs.

In carrying out the duties, the Board of Commissioners is supported by 3 (three) committees: Audit Committee, HC & Business Committee, and Risk & Security Monitoring Committee, and these are supported by the Secretary of the Board of Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors is supported by Corporate Secretary Division, Corporate Strategy Division, Internal Audit Division, Risk Management & QSSHE Assurance Division, and Risk Management Committee.

The Audit Committee and Internal Audit Committee collaborate with an External Auditor as appointed by the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners.

Struktur Perangkat Tata Kelola Governance Organ Structure



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Policy

Sampai dengan akhir tahun 2020, penerapan GCG Perseroan didukung kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

As of the end of 2020, GCG implementation in the Corporation is supported by the following policies:

| No | Kebijakan Policy | Dasar Penetapan Basis of Establishment |
|----|---|---|
| 1 | Anggaran Dasar Perseroan <i>Corporate Articles of Association</i> | Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 tanggal 17 Juni 2008. <i>Deed of Establishment of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 dated June 17, 2008.</i> |
| 2 | Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i> | Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 010 Tahun 2020 dan No. 066 Tahun 2020. <i>Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020.</i> |
| 3 | Pedoman Tata Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Guidelines</i> | Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 012 Tahun 2020 dan No. 065 Tahun 2020. <i>Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 012 Year 2020 and No. 065 Year 2020.</i> |
| 4 | Pedoman Etika dan Perilaku <i>Guidelines of Code of Conduct</i> | Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 011 Tahun 2020 dan No. 067 Tahun 2020. <i>Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 011 Year 2020 and No. 067 Year 2020.</i> |
| 5 | Pedoman Benturan Kepentingan <i>Guidelines of Conflict of Interest</i> | Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 013 Tahun 2020 dan No. 071. <i>Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 013 Year 2020 and No. 071 Year 2020.</i> |
| 6 | Piagam Audit Internal <i>Internal Audit Charter</i> | Ditetapkan oleh Direktur Utama dan Plt. Komisaris Utama pada 20 Desember 2020. <i>Established by the President Director and Acting Official of President Commissioner on December 20, 2020.</i> |

| No | Kebijakan Policy | Dasar Penetapan Basis of Establishment |
|----|--|--|
| 7 | Pedoman Sistem Pengendalian Internal <i>Guidelines of Internal Control System</i> | Peraturan Direksi No. 032-1 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 032-1 Year 2020.</i> |
| 8 | Kebijakan Manajemen Risiko <i>Corporate Articles of Association</i> | Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 018 Year 2020.</i> |
| 9 | Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Guidelines of the Management of the Report of State Officials Wealth (LHKPN)</i> | Peraturan Direksi No. 048 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 048 Year 2020.</i> |
| 10 | Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control Guidelines</i> | Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019. <i>Directors' Regulation No. 005 Year 2019.</i> |
| 11 | Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan <i>Whistleblowing System Guidelines</i> | Peraturan Direksi No. 031 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 031 Year 2020.</i> |
| 12 | Pedoman Pengambilan Keputusan <i>Decision-Making Guidelines</i> | Peraturan Direksi No. 046 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 046 Year 2020.</i> |
| 13 | Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan <i>Implementation of Anti-Bribery Management system</i> | Peraturan Direksi No. 035 Tahun 2020. <i>Directors' Regulation No. 035 Year 2020</i> |

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dissemination of Good Corporate Governance Policy

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan kepada karyawan dilakukan secara rutin. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang baik. Sosialisasi dilakukan melalui *email* kepada seluruh karyawan, publikasi pada situs web Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh oleh karyawan maupun para pemangku kepentingan, media tatap muka, *video conference*, *Learning Management System* Perseroan, "*Kinetic*" *Knowledge Management Portal*, dan melalui video pada layar televisi Perseroan.

Perseroan akan melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya, antara lain vendor, pemasok, dan mitra kerja untuk tahun-tahun berikutnya guna meningkatkan efektivitas dan cakupan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

The dissemination of Good Corporate Governance to all employees is conducted regularly. It aims to provide an understanding of the implementation of good corporate governance and policies related to good corporate governance. The dissemination is carried out via several mediums - through emails sent to all employees; publications on the Corporation website that can be viewed and downloaded by all employees and stakeholders; through face-to-face media; via the Corporation Learning Management System; via the "Kinetic" or Knowledge Management Portal; and through video shown on the Corporation's television screens.

The Corporation will carry out the dissemination GCG information to other stakeholders, such as vendors, suppliers, and partners for the years to come so as to increase the effectivity and scope of GCG implementation.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance Mechanism



Rapat Umum Pemegang Saham *General Meeting of Shareholders*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate Organ that has the authority not given to the Board of Directors nor the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. GMS as an organ of the Corporation is a place for Shareholders to make important decisions relating to the capital invested in the Corporation, taking into account the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without limiting the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations; including replacing or dismissing the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan

Perseroan merupakan BUMD Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepemilikan ini terdiri atas kepemilikan langsung 99,997% dan kepemilikan tidak langsung melalui PD Pasar Jaya sebesar 0,003%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hak Pemegang Saham

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham memiliki hak:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan secara lengkap, tepat waktu dan teratur;
3. Memperoleh pembagian laba Perseroan (dividen);
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu;
5. Mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;
6. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang RUPS

1. Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan komposisi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menetapkan target dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Information on Ultimate/Controller Shareholder of the Corporation

The Corporation is a Regionally-Owned Enterprise of DKI Jakarta Province, with 100% share ownership by the Government of DKI Jakarta Province through direct ownership or indirect ownership. It consists of 99.997% direct ownership and 0.003% indirect ownership through PD Pasar Jaya. Therefore, the Ultimate/Controller Shareholder is the Government of DKI Jakarta Province.

Shareholders' Rights

In accordance with the Articles of Association of the Corporation, the rights of Shareholders are:

1. *Attending the GMS and vote at the GMS;*
2. *Obtaining material information (including the right to ask) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding financial matters or other matters concerning the Corporation in a complete, timely, and orderly manner;*
3. *Receiving a part of the company's profit (dividend);*
4. *Organizing the GMS in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fail to hold Annual GMS and at any time request an Extraordinary GMS if deemed necessary;*
5. *Making a binding resolution without the GMS on the condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the proposal in question;*
6. *Exercising other rights based on Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies.*

Authorities of GMS

1. *Determining and implementing the appointment and dismissal of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the prevailing laws and regulations;*
2. *Determining the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
3. *Determining the target and performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and providing an assessment of the achievement of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
4. *Determining the salary/honorarium, benefits, facilities, and bonuses/incentives for the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
5. *Carrying out assessment of prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*

6. Menyetujui atau menolak Rencana Bisnis Perseroan (RBP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan;
7. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi Perseroan yang perlu mendapat persetujuan RUPS;
8. Menetapkan Auditor Eksternal;
9. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
10. Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (bila saldo laba positif).

Jenis-Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS Perseroan

RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya merupakan hak dan wewenang Pemegang Saham dalam mengendalikan kinerja Perseroan, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan diselenggarakan secara rutin setiap tahun, dan RUPS Lainnya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, atau dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya. Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Risalah rapat dibuat secara tertulis dan didarkan kepada seluruh Pemegang Saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

Dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS, dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sementara untuk pengambilan keputusan sirkuler, keputusan dinyatakan sah apabila seluruh Pemegang Saham menyetujui usulan yang telah didistribusikan secara tertulis.

6. *Approving or rejecting the Corporation's Business Plan and the Corporation's Work Plan and Budget;*
7. *Giving approval/decisions on the proposed Corporate actions that require the approval from the GMS;*
8. *Establishing External Auditors;*
9. *Approving and ratifying annual reports including financial statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners;*
10. *Determining the use of net income including the determination of the amount of allowance for reserves (if the balance of profit is positive).*

Types of GMS

According to the Articles of Association of the Corporation and the Law concerning Limited Liability Companies, GMS consists of Annual GMS and Other GMS.

Provisions for the Implementation of the Corporation's GMS

Annual GMS and Other GMS are the rights and authorities of Shareholders in controlling the Corporation's performance, within the limit as determined by the prevailing Laws and the Articles of Association. Decisions resulting in Annual GMS and Other GMS are made transparently with due regard to the Corporation's business interests.

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Corporation, Annual GMS is held regularly every year and Other GMS can be held at any time based on the needs and in accordance with the prevailing laws and regulations. GMS is held in the domicile of the Corporation or where the Corporation carries out the business activities, or carried out through teleconference, video conference, or other electronic media. The summons are made by registered mail no later than 14 days prior to the date of the GMS. The minutes of meeting is made in writing and circulated to all participating Shareholders for approval and signature. GMS is chaired by the President Commissioners.

Regarding the decision-making during the GMS, it is conducted through a deliberation for consensus mechanism. Whereas for circular decision-making, the decision shall be declared valid if all Shareholders approve the proposal which is distributed in writing.

Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 23 April 2020

Resolutions of Shareholders Without the GMS, April 23, 2020



Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 21 Februari 2020

Resolutions of Shareholders without GMS, February 21, 2020

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat saudara Tuhayat dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi. 2. Dengan dilakukan pengangkatan tersebut di atas, susunan Direksi Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama: William P. Sabandar • Direktur Konstruksi: Silvia Halim • Direktur Operasi & Pemeliharaan: Muhammad Effendi • Direktur Pengembangan Bisnis: Ghamal Peris 1. To honourably dismiss Mr. Tuhayat from his position as Finance and Corporation Management Director from the date of signing of the Resolutions of Shareholders without GMS and express the highest gratitude and appreciation for his services during his tenure as Finance and Corporate Management Director. 2. With such appointment, the composition of the Board of Directors of the Corporate is as follows: <ul style="list-style-type: none"> • President Director: William P. Sabandar • Construction Director: Silvia Halim • Operations and Maintenance Director: Muhammad Effendi • Business Development Director: Ghamal Peris | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku setelah ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang saham pada tanggal 21 Februari 2020. Keputusan telah dituangkan dalam Akta Nomor 18 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Menkumham No AHU-AH.01.03-0152066 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda).</p> <p><i>The resolution became effective immediately after the signing of Resolutions of Shareholders on February 21, 2020. The resolution formulated in the Deed Number 18 dated March 16, 2020 concerning the Statement of Resolutions of Shareholders without General Meeting of Shareholders if PT MRMT Jakarta (Perseroda) and the reception of the notice notice concerning the amendment of Corporate Data has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0152066 dated March 19, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to Corporate Data of Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda).</i></p> |

Arahan Pemegang Saham Terkait Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 21 Februari 2020

Direction of Shareholders Concerning the Resolutions of Shareholder without GMS, February 21, 2020

| No | Arahan Direction | Pelaksanaan Implementation |
|----|---|---|
| 1 | <p>Menugaskan kepada Direksi untuk menetapkan pelaksana tugas Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi.</p> <p><i>Assign the Board of Directors to determine the person in charge for the duties of Finance and Corporate Management Director.</i></p> | <p>Telah dilaksanakan dengan Keputusan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).</p> <p><i>Has been carried out with the Decree of the Board of Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) Number 011 Year 2020 concerning the Acting Official of Finance and Corporate Management Director in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i></p> |

Pelaksanaan
Execution

Dilaksanakan secara sirkuler
pada tanggal 20 April 2020
Held in circular on April 20, 2020

**Keputusan Pemegang Saham Di
Luar RUPS, 20 April 2020**
*Resolutions of Shareholders without
GMS, April 20, 2020*

Akta Notaris
Notarial Deed

Nomor 02 tanggal 5 Mei 2020
Number 02 dated May 5, 2020

Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 20 April 2020

Resolutions of Shareholders without GMS, April 20, 2020

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Mengangkat saudara Roy Rahendra sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Memberhentikan dengan hormat saudara Ghamal Peris dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis. Dengan dilakukan pengangkatan tersebut di atas, Susunan Direksi Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama: William P. Sabandar Direktur Konstruksi: Silvia Halim Direktur Operasi & Pemeliharaan: Muhammad Effendi Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi: Roy Rahendra Direktur Pengembangan Bisnis: Plt. Diangkat berdasarkan Keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku setelah ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang saham pada tanggal 20 April 2020. Keputusan telah dituangkan dalam Akta Nomor 02 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Menkumham No AHU-AH.01.03-0214023 tanggal 8 Mei 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.</p> <p><i>The resolution became effective immediately after the signing of the Resolutions of Shareholders on April 20, 2020. The resolution formulated in the Deed Number 02 dated May 5, 2020 concerning the Statement of Resolutions of Shareholders without General Meeting of Shareholders if PT MRT Jakarta (Perseroda) and the reception of the notice concerning the amendment of Corporate Data has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0214023 dated May 8, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to Corporate Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda).</i></p> |
| <ol style="list-style-type: none"> To appoint Mr. Roy Rahendra as Finance and Corporate Management Director, from the signing of the Resolutions of Shareholders without GMS. To honorably dismiss Mr. Ghamal Peris from his position as Business Development and Support Director from the date of signing of the Resolutions of Shareholders without GMS and express the highest gratitude and appreciation for his services during his tenure as Business Development and Support Director. With such appointment, the composition of the Board of Directors of the Corporation is as follows: <ul style="list-style-type: none"> President Director: William P. Sabandar Construction Director: Silvia Halim Operations and Maintenance Director: Muhammad Effendi Finance & Corporate Management Director: Roy Rahendra Business Development Director: Acting Official to be Appointed by Decree of the Board of Directors after consultation with the Board Commissioners | | |

Arahan Pemegang Saham Terkait Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 20 April 2020
Direction of Shareholders concerning the Resolutions of Shareholder without GMS, April 20, 2020

| No | Arahan Direction | Pelaksanaan Implementation |
|----|---|---|
| 1 | Menugaskan kepada Direksi untuk menetapkan pelaksana tugas Direktur Pengembangan Bisnis. <i>Assign the Board of Directors to determine the acting official of Business Development Director.</i> | Telah dilaksanakan dengan Keputusan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Nomor 026 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksanaan (Plt) Direktur Pengembangan Bisnis di Lingkungan PT MRT Jakarta tanggal 4 Mei 2020. <i>Has been carried out with the Decree of the Board of Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) Number 026 Year 2020 concerning the Acting Official of Business Development Director in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> |

Pelaksanaan
Execution

Dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 13 Oktober 2020
Held in circular on October 13, 2020

Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 13 Oktober 2020
Resolutions of Shareholders without GMS, October 13, 2020

Akta Notaris
Notarial Deed

Nomor 21 tanggal 12 November 2020
Number 21 dated November 12, 2020

Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, 13 Oktober 2020
Resolutions of Shareholders without GMS, October 13, 2020

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Sdr. Rukijo sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. 2. Dengan dilakukan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: Muhammad Syaugi - Komisaris: Rukijo - Komisaris: Adnan Pandu Praja - Komisaris: Mukhtasor - Komisaris: Zulfikri b. Direksi <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama: William P. Sabandar - Direktur Konstruksi: Silvia Halim - Direktur Operasional & Pemeliharaan: Muhammad Effendi - Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi: Roy Rahendra - Direktur Pengembangan: Plt diangkat berdasarkan keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku setelah ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang saham pada tanggal 13 Oktober 2020. Keputusan telah dituangkan dalam Akta Nomor 21 tanggal 12 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Menkumham No AHU-AH.01.03-0410006 tanggal 20 November 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.</p> <p><i>The resolution became effective immediately after the signing of the Resolutions of Shareholders on October 13, 2020. The resolution formulated in the Deed Number 21 dated November 12, 2020 concerning the Statement of Resolutions of Shareholders without General Meeting of Shareholders if PT MRT Jakarta (Perseroda) and the reception of the notice concerning the amendment of Corporate Data has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0410006 dated November 20, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to Corporate Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda).</i></p> |

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal Serta RKA 2020 dan 2021

Extraordinary GMS for Capital Increase and RKA 2020 and 2021

Undangan *Summon*

Diumumkan pada tanggal 18
November 2019
Summoned on November 18, 2019

**RUPS Luar Biasa 29 November 2019
Peningkatan Modal Serta Rencana
Kerja Anggaran 2020**
*Recapitulation of Attendance at
Extraordinary GMS for Capital
Increase and Work Plan & Budget
2020*

Pelaksanaan *Execution*

- Dilaksanakan pada Kamis, 29 November 2019
Held on Thursday, November 29, 2019
- Waktu pelaksanaan pukul 10.17 WIB
Held at 10:17 Western Indonesian Time
- Tempat pelaksanaan Kantor PT MRT Jakarta (Perseroda), Wisma Nusantara Lantai 21, Jalan MH Thamrin 59, Jakarta 10530 – Indonesia.
Held at the Office of PT MRT Jakarta (Perseroda), Wisma Nusantara 21st Floor, Jalan MH Thamrin 59, Jakarta 10530 – Indonesia.

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal Serta Rencana Kerja Anggaran 2020

Recapitulation of Attendance at Extraordinary GMS for Capital Increase and Work Plan & Budget 2020

| No | Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Kehadiran <i>Presence</i> |
|--|---------------------|---|------------------------------|
| Perwakilan Pemegang Saham <i>Shareholder Representatives</i> | | | |
| 1 | Sri Haryati | Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, sebagai Perwakilan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham mayoritas. <i>Assistant for Economic and Financial Affairs, Regional Secretariat of DKI Jakarta Province, as Representative. The Government of DKI Jakarta Province as the ultimate Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Ramses Butar-butar | Direktur Keuangan dan Administrasi PD Pasar Jaya, sebagai Perwakilan PD Pasar Jaya selaku Pemegang Saham minoritas. <i>Finance and Administration Director of PD Pasar Jaya, as Representative of PD Pasar Jaya as minority Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | | | |
| 1 | William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Tuhyat | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 5 | Ghamal Peris | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | |
| 1 | Muhammad Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Adnan Pandu Raja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |

*Rukijo tidak hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2019 dikarenakan menghadiri Rapim dengan Menteri Keuangan
Rukijo did not attend the Extraordinary GMS on November 29, 2019 as he was attending a Meeting with the Minister of Finance

Keputusan RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal Serta Rencana Kerja Anggaran 2020
Resolutions of the Extraordinary GMS for Capital Increase and Work Plan & Budget 2020

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|--|--|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP Tahun Buku 2020. <i>Resolutions on Agenda 1: To approve and ratify Corporate Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2020.</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 52 dated November 29, 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda).</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2: Menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp14.659.000.000.000,- (empat belas triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp40.757.353.000.000,- (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta Rupiah). <i>Resolutions on Agenda 2: To approve and ratify authorized capital increase of the Corporation from IDR 14,659,000,000,000 (fourteen trillion six hundred fifty-nine billion Indonesian Rupiah) to be IDR 40,757,353,000,000 (forty trillion seven hundred fifty-seven billion three hundred fifty-three million Indonesian Rupiah).</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Telah dituangkan dalam Akta Nomor 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MRT Jakarta (Perseroda) yang perubahan anggaran dasarnya tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105309.AG.01.02 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. <i>The resolution has been set forth in Deed Number 23 dated December 13, 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0105309.AG.01.02 Year 2019 dated December 16, 2019 concerning the Approval to the Amendment of the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 3: 1. Penerbitan saham baru sejumlah 3.660.724 (tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor dan Ditempatkan penuh dalam Perseroan. 2. Menyetujui mengesahkan peningkatan modal disetor dan ditempatkan perseroan yang semula sebesar Rp9.111.248.000.000,- (sembilan triliun seratus sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.771.972.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus tujuh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). <i>Resolutions on Agenda 3: 1. To issue new share of 3,660,724 (three million six hundred sixty thousand seven hundred twenty-four) shares with nominal value of IDR 1,000,000 (one million Indonesian Rupiah) per share to the Government of DKI Jakarta Province in the context of converting capital deposits which has been carried out by the Government of DKI Jakarta Province to become Paid-Up and Fully Placed Capital in the Corporation; 2. To approve and ratify paid-up and fully placed capital increase of the Corporation from IDR 9,111,248,000,000 (nine trillion one hundred eleven billion two hundred forty-eight million Indonesian Rupiah) to be IDR 12,771,972,000,000 (twelve trillion seven hundred seventy-one billion nine hundred seventy-two million Indonesian Rupiah).</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Telah dituangkan dalam Akta Nomor 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MRT Jakarta (Perseroda) yang perubahan anggaran dasarnya tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105309.AG.01.02 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. <i>The resolution has been set forth in Deed Number 23 dated December 13, 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) whose amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0105309.AG.01.02 Year 2019 dated December 16, 2019 concerning the Approval to the Amendment of the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.</i></p> |

Keputusan RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal Serta Rencana Kerja Anggaran 2020
Resolutions of the Extraordinary GMS for Capital Increase and Work Plan & Budget 2020

| Keputusan <i>Resolutions</i> | Pelaksanaan <i>Implementation</i> | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 <i>Follow Up as of the End of 2020</i> |
|---|--|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Nomenklatur Direktur Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direktur Utama; b) Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi; c) Direktur Konstruksi; d) Direktur Operasi dan Pemeliharaan; dan e) Direktur Pengembangan Bisnis. <p><i>Resolutions on Agenda 4: To approve and ratify the amendment to the Nomenclature of the Corporation Director to be as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>President Director;</i> b) <i>Finance and Corporate Management Director;</i> c) <i>Construction Director;</i> d) <i>Operation and Maintenance Director; and</i> e) <i>Business Development Director.</i> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Telah dituangkan dalam Akta Nomor 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MRT Jakarta (Perseroda) dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Menkumham No AHU-AH.01.03-0373409 tanggal 16 Desember 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.</p> <p><i>The resolution has been set forth in Deed Number 23 dated December 13, 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) and the reception of the notice concerning the amendment to Authorized Capital has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0373409 dated December 16, 2020 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to the Articles of Association</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 5: Menyetujui Pembentukan Anak Perusahaan Sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><i>Resolutions on Agenda 5: To approve the establishment of facility subsidiary in accordance with the provisions of the prevailing Laws and Regulations.</i></p> | <p>Belum terlaksana <i>Not yet implemented</i></p> | <p>Bahwa terdapat penundaan pembentukan anak perusahaan sarana sampai dengan diputuskan kembali dalam mekanisme RUPS atas pertimbangan pajak, trend penurunan ridership dan kondisi global akibat virus COVID-19, sebagaimana dituangkan ke dalam dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat MRT Jakarta Perseroda.</p> <p><i>There is a postponement to the establishment of subsidiary facilities until it is decided in GMS mechanism based on the considerations concerning tax, ridership decrease trend, and global condition due to the COVID-19 pandemic as set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah also known as MRT Jakarta.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 6: Menyetujui Pembentukan Anak Perusahaan Transit-Oriented Development (TOD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p><i>Resolutions on Agenda 6: To approve the establishment of a Transit-Oriented Development (TOD) Subsidiary in accordance with the provisions of the prevailing Laws and Regulations.</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 19 tanggal 12 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda).</p> <p><i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 19 dated November 12, 2020 concerning Resolutions of the Shareholders without General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda).</i></p> |

Undangan
Summon

Diumumkan pada tanggal 13 Maret 2020
Summoned on 13 Maret, 2020

RUPS Luar Biasa 24 Maret 2020
Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020
Extraordinary GMS March 24, 2020
Amendment to 2020 Work Plan and Budget

Pelaksanaan
Execution

- Dilaksanakan secara daring pada Selasa, 24 Maret 2020
- Waktu pelaksanaan pukul 14.17 WIB
- *Held virtually on Tuesday, March 24, 2020*
- *Held at 14:17 Western Indonesian Time*

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Luar Biasa 24 Maret 2020
Recapitulation of Attendance at Extraordinary GMS on March 24, 2020

| No | Nama Name | Jabatan Position | Kehadiran Presence |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| Perwakilan Pemegang Saham <i>Shareholder Representatives</i> | | | |
| 1 | Sri Haryati | Asisten perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, sebagai Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham mayoritas. <i>Assistant for Economic and Financial Affairs, Regional Secretariat of DKI Jakarta Province, as Representative of the Government of DKI Jakarta Province as the ultimate Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Arief Nasrudin | Direktur Utama PD Pasar Jaya, sebagai Perwakilan PD Pasar Jaya selaku Pemegang Saham minoritas. <i>President Director of PD Pasar Jaya, as Representative of PD Pasar Jaya as minority Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | | | |
| 1 | William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Ghamal Peris Aulia | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | |
| 1 | Muhammad Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 5 | Adnan Pandu Raja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |

Keputusan RUPS Luar Biasa Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020

Resolutions of the Extraordinary GMS for Amendment to 2020 Work Plan and Budget

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|---|--|--|
| <p>Mata Acara 1: Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2020 Agenda 1: To Approval and Ratify the Amendment to Corporation Work Plan and Budget (RKA) of Fiscal Year 2020</p> | Sudah terlaksana <i>Implemented</i> | Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS LB No. 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah Disingkat MRT Jakarta. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Minutes of Extraordinary GMS No. 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah also known as MRT Jakarta.</i> |
| <p>Mata Acara 2: Persetujuan Penundaan Pembentukan Anak Perusahaan Sarana Agenda 2: To Ratify the Postponement of the Establishment of Subsidiary Facilities.</p> | Sudah terlaksana <i>Implemented</i> | Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS LB No. 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah Disingkat MRT Jakarta. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Minutes of Extraordinary GMS No. 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah also known as MRT Jakarta.</i> |

Undangan Summon

Diumumkan pada tanggal
25 November 2020
Summoned on November
25, 2020

RUPS Luar Biasa 30 November 2020
Peningkatan Modal, Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020 Serta Rencana Kerja Anggaran 2021
Extraordinary GMS November 30, 2020 Capital Increase, Amendment to 2020 Work Plan and Budget and 2021 Work Plan and Budget

Pelaksanaan Execution

- Dilaksanakan secara daring pada Senin, 30 November 2020
Held virtually on Monday, November 30, 2020
- Waktu pelaksanaan pukul 08.00 WIB
Held at 08:00 Western Indonesian Time

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal, Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020 Serta Rencana Kerja Anggaran 2021

Recapitulation of Attendance at Extraordinary GMS for Capital Increase, Amendment to Work Plan and Budget 2020 and Work Plan and Budget 2021

| No | Nama Name | Jabatan Position | Kehadiran Presence |
|--|---------------------|--|-------------------------|
| Perwakilan Pemegang Saham Shareholder Representatives | | | |
| 1 | Sri Haryati | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham mayoritas. <i>Acting Official of the Regional Secretary of DKI Jakarta Province, as Representative. The Government of DKI Jakarta Province as the ultimate Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Ratih Mayasari | Direktur Keuangan dan Administrasi PD Pasar Jaya, sebagai Perwakilan PD Pasar Jaya selaku Pemegang Saham minoritas. <i>Finance and Administration Director of PD Pasar Jaya, as Representative of PD Pasar Jaya as minority Shareholder.</i> | Hadir <i>Present</i> |
| Direksi Board of Directors | | | |
| 1 | William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Roy Rahendra | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | Hadir <i>Present</i> |

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

| | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | Muhammad Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 2 | Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 3 | Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 4 | Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |
| 5 | Adnan Pandu Raja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir <i>Present</i> |

Keputusan RUPS Luar Biasa Peningkatan Modal, Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020 Serta Rencana Kerja Anggaran 2021

Resolutions of the Extraordinary GMS for Capital Increase, Amendment to Work Plan and Budget 2020 and Work Plan and Budget 2021

| Keputusan <i>Resolutions</i> | Pelaksanaan <i>Implementation</i> | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 <i>Follow Up as of the End of 2020</i> |
|--|--|---|
| <p>Mata Acara 1: Menyetujui dan Mengesahkan Peningkatan Modal ditempatkan dan Disetor. Agenda 1: <i>To Approve and Ratify the Paid-up and Fully Placed Capital Increase.</i></p> | Sudah terlaksana <i>Implemented</i> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 46 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MRT Jakarta (Perseroda) yang pemberitahuan perubahan Anggaran dasarnya tersebut telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Menkumham No AHU-AH.01.03-0421641 tanggal 21 Desember 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar. <i>The resolution is effective immediately has been set forth in Deed Number 46 dated December 16, 2020 concerning Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) whose notice concerning the amendment to the Articles of Association has been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0421641 dated December 21, 2019 concerning the Reception of the Notice regarding the Amendment to the Articles of Association</i></p> |
| <p>Mata Acara 2: Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (RKA) Perseroan Tahun Buku 2020, sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran RUPS. Agenda 2: <i>To Approve and Ratify the Amendment to the Corporation Workplan and Budget (RKA) for Fiscal Year 2020, to be as attached in the Appendix of GMS.</i></p> | Sudah terlaksana <i>Implemented</i> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS LB No. 61 tanggal 30 November 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah Disingkat PT MRT Jakarta. <i>The resolution is effective immediately has been set forth in Minutes of EGMS Number 61 dated November 30, 2020 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah also known as MRT Jakarta.</i></p> |
| <p>Mata Acara 3: Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan RUPS. Agenda 3: <i>To Approve and Ratify the Amendment to the Corporation Workplan and Budget (RKA) for Fiscal Year 2021, to be as attached in the Appendix of GMS.</i></p> | Sudah terlaksana <i>Implemented</i> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS LB No. 61 tanggal 30 November 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah Disingkat MRT Jakarta. <i>The resolution is effective immediately has been set forth in Minutes of EGMS Number 61 dated November 30, 2020 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan Daerah also known as MRT Jakarta.</i></p> |

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Annual GMS for Fiscal Year 2019

Undangan Summon

Diumumkan pada
tanggal 13 Maret 2020
Summoned on March
13, 2020

RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Annual GMS for Fiscal Year 2019

Pelaksanaan Execution

- Dilaksanakan secara daring pada Selasa, 24 Maret 2020
Held virtually on Tuesday, March 24, 2020
- Waktu pelaksanaan pukul 14.17 WIB
Held at 14:17 Western Indonesia Time

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Recapitulation of Attendance at Annual GMS for Fiscal Year 2019

| No | Nama Name | Jabatan Position | Kehadiran Presence |
|--|---------------------|---|-----------------------|
| Perwakilan Pemegang Saham Shareholder Representatives | | | |
| 1 | Sri Haryati | Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, sebagai Perwakilan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham mayoritas. <i>Assistant for Economic and Financial Affairs, Regional Secretariat of DKI Jakarta Province, as Representative. The Government of DKI Jakarta Province as the ultimate Shareholder.</i> | Hadir Present |
| 2 | Arief Nasrudin | Direktur Utama PD Pasar Jaya, sebagai Perwakilan PD Pasar Jaya selaku Pemegang Saham minoritas. <i>President Director of PD Pasar Jaya, as Representative of PD Pasar Jaya as minority Shareholder</i> | Hadir Present |
| Direksi Board of Directors | | | |
| 1 | William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Hadir Present |
| 2 | Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | Hadir Present |
| 3 | Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | Hadir Present |
| 4 | Ghamal Peris Aulia | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i> | Hadir Present |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | | | |
| 1 | Muhammad Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Hadir Present |
| 2 | Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir Present |
| 3 | Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir Present |
| 4 | Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir Present |
| 5 | Adnan Pandu Raja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Hadir Present |

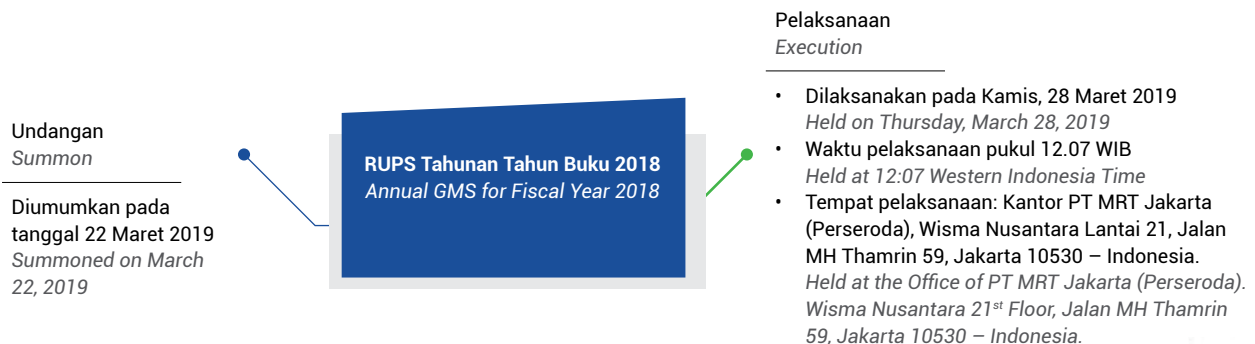
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pelaksanaannya

Resolutions of the Annual GMS for Fiscal Year 2019 and Its Implementation

| Keputusan <i>Resolutions</i> | Pelaksanaan <i>Implementation</i> | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 <i>Follow Up as of the End of 2020</i> |
|---|--|--|
| <p>Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 <i>Agenda 1:</i> <i>To Approve Annual Report for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Mata Acara 2: Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 <i>Agenda 2:</i> <i>To Ratify Annual Report for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 <i>Agenda 3:</i> <i>To Determine the Use of Net Income of the Corporate in 2019</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Mata Acara 4: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP guna mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 <i>Agenda 4:</i> <i>To give authority to the Board of Commissioners to determine KAP to audit the Financial Statements for Fiscal Year 2020</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Mata Acara 5: Penetapan gaji Direksi Tahun Buku 2020 dan honorarium Dewan komisaris Tahun buku 2020 serta Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. <i>Agenda 5:</i> <i>To determine the salary of the Board of Directors for Fiscal Year 2020 and honorarium for the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020 and Incentives of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2019.</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 31 dated March 24, 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Annual GMS for Fiscal Year 2018



Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pelaksanaannya

Resolutions of the Annual GMS for Fiscal Year 2018 and Its Implementation

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|---|--|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 <i>Resolutions on Agenda 1: To Approve the Annual Report and Ratify the Supervision Duty Report as implemented by the Board of Commissioners for Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 32 Year 2019 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2: Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ersnt & Young) sesuai dengan laporannya No. 00183/2.1032/ AU/1/06/0691 - 2/1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia</p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution is effective immediately and has been set forth in Deed Number 32 Year 2019 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi adanya tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan yang patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.</p> | | |
| <p><i>Resolutions on Agenda 2: To ratify the Financial Statement of the Corporation for the Fiscal Year ended on December 31, 2018, audited by Public Accountant Office Purwantono, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young) in accordance with the report No. 00183/2.1032/AU/1/06/0691-2/1/III/2019 dated March 14, 2019 with Fair Opinion in All Material Respects, and in conformity with the accounting principles that are generally applicable in Indonesia</i></p> | | |
| <p><i>Furthermore, with the approval of the Annual Report and the ratification of the Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2018, the GMS provides full redemption and release from responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management efforts and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory efforts carried out during the fiscal year ending December 31, 2018 to the extent that such actions are reflected in the Corporation's Financial Statements. If in the future, indications of abuse of office are found that cause losses to the Corporation that are reasonably suspected of being done due to deliberateness, inadvertence, unprofessionalism, and non-proportional decision-making, the Management (the Board of Commissioners and the Board of Directors) can be asked for personal responsibility.</i></p> | | |

| Keputusan Resolutions | Pelaksanaan Implementation | Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020 Follow Up as of the End of 2020 |
|--|--|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 3: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan Prosedur Pengadaan yang berlaku di Perseroan, untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p><i>Resolutions on Agenda 3: To give authority to the Board of Commissioners to appoint an external auditor (Public Accountant Office) in accordance with the Procurement Procedures applied to the Corporation, to carry out an audit for the Fiscal Year ending December 31, 2019.</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 telah diterbitkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja pada tanggal 12 Maret 2020. <i>Audit of the Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2019 has been issued by Public Accountant Office Purwanto, Sungkoro & Surja on March 12, 2020.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Untuk penetapan Gaji/Honorarium, Insentif, dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dilakukan oleh Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang hasilnya disampaikan melalui Dewan Komisaris.</p> <p><i>Resolutions on Agenda 4: To stipulate the Salary/Honorarium, Incentives, and Remunerations for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2019 was carried out by the Shareholder the Government of DKI Jakarta Province based on the recommendation from the Board of Commissioners by referring to the provisions of the Governor Regulations of DKI Jakarta Province concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisors, and Board of Commissioners of Regionally-Owned Enterprises belonging to DKI Jakarta Province whose results are submitted through the Board of Commissioners.</i></p> | <p>Sudah terlaksana <i>Implemented</i></p> | <p>Persetujuan Pemegang Saham melalui Surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) tanggal 31 Juli 2019 perihal remunerasi pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda) 2018 dan 2019. <i>Approval of Shareholders through Letter of the Acting Head of the Regionally-Owned Enterprise Development Agency dated July 31, 2019 concerning the remuneration for the Management of PT MRT Jakarta (Perseroda) in 2018 and 2019.</i></p> |

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kelangsungan usaha, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi dan kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki integritas, kompetensi dan pengetahuan mendasar terkait aspek keuangan yang memadai;
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Memahami manajemen Perseroan;
- Memiliki pengetahuan yang memahami di bidang usaha Perseroan;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam peraturan yang dimiliki Perseroan, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Swasta/Milik Negara/Milik Daerah lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan. Di samping itu, Perseroan melarang adanya hubungan darah keluarga sesama anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi atau antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

The Board of Commissioners has the duty to carry out supervision of business continuity, including the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors. The Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors, and direct, monitor, and evaluate the implementation of strategic Corporation policies.

Criteria and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The members of the Board of commissioners must meet the qualifications and criteria as follows:

- *Have adequate integrity, competence, and basic financial knowledge;*
- *Have never been declared bankrupt and/or convicted for leading a company into bankruptcy;*
- *Have never committed disgraceful acts and have never been convicted of a felony;*
- *Able to carry out legal actions;*
- *Understand Corporation management;*
- *Have knowledge to understand the Corporation's field of business; and*
- *Provide sufficient time to carry out their duties.*

In the Corporation's regulation, members of the Board of Commissioners are not permitted to concurrently hold position of Director in other Private/State-Owned/Regional-Owned enterprises that may cause conflicts of interest either directly or indirectly against the interests of the Corporation. In addition, the Corporation prohibits any family related background between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Directors or between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai keputusan RUPS di tahun 2019 yang telah dituangkan dalam Akta No. 13 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari lima orang.

Appointment, Dismissal, and Provision of the Terms of Office of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and/or terminated by the mechanism of the GMS. In accordance with the resolutions of GMS in 2019 that has been stipulated in Deed No. 13 of 2019 dated 12 June 2019 regarding the Statement of GMS's Resolutions, the term of office of the Board of Commissioners is 4 (four) years referring to Government Regulation No. 54 Year 2017 regarding Regionally-Owned Enterprise, and can only be reappointed for the next 1 (one) period of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Number, Composition, and Structure of the Board of Commissioners in 2020

In 2020, there was no change to the composition of the members of the Board of Commissioners. As of the end of 2020, the Board of Commissioners consists of five persons.

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2019

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Bases of Appointment | Periode Jabatan Terms of Office |
|------------------|---|---|--|
| Muhammad Syaugi | Komisaris Utama President Commissioner | Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. | Periode Jabatan Pertama: 31 Mei 2019 - 30 Mei 2023 First Terms of Office: May 31, 2019 until May 30, 2023 |
| Rukijo | Komisaris Commissioner | Akta No. 1 Tanggal 19 Agustus 2015, Notaris Miki Tanumiharja, S.H. Deed No. 1 August 19, 2015, Notary Miki Tanumiharja, S.H. Pengangkatan kembali berdasarkan Akta No. 21 tanggal 12 November 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Reappointment based on Deed No. 21 dated November 12, 2020, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. | Periode Jabatan Kedua: 19 Agustus 2020 - 18 Agustus 2024 Second Terms of Office: August 19, 2020 until August 18, 2024 |
| Zulfikri | Komisaris Commissioner | Akta No. 19 Tanggal 6 Juli 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 19 Date 6 July 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. | Periode Jabatan Pertama: 4 Mei 2018 - 3 Mei 2022 First Terms of Office: May 4, 2018 until May 3, 2022 |
| Mukhtasor | Komisaris Commissioner | Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. | Periode Jabatan Pertama: 29 Oktober 2018 - 28 Oktober 2022 First Terms of Office: October 29, 2018 until October 28, 2022 |
| Adnan Pandu Raja | Komisaris Commissioner | Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. | Periode Jabatan Pertama: 31 Mei 2019 - 30 Mei 2023 First Terms of Office: May 31, 2019 until May 30, 2023 |

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi: Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan perannya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 010 Tahun 2020 dan No.066 Tahun 2020.

Board Manual: Work Procedures of the Board of Commissioners

In carrying out its role, the Board of Commissioners refers to the Corporation's Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, or Board Manual, based on the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020.

| Board Manual Dewan Komisaris <i>Board Manual of the Board of Commissioners</i> | |
|---|---|
| 1 | Masa Jabatan Dewan Komisaris <i>Term of Office of the Board of Commissioners</i> |
| 2 | Program Pengenalan <i>Introduction Programme</i> |
| 3 | Program Peningkatan Kapabilitas <i>Capability Improvement Programme</i> |
| 4 | Tanggung Jawab <i>Responsibilities</i> |
| 5 | Tugas dan Kewajiban <i>Duties and Obligations</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan <i>Supervision</i> b. Kontrak Manajemen <i>Management Contract</i> c. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPS <i>Implementation of Tasks Regarding GMS</i> d. Pengurusan Manajemen Risiko <i>Risk Management</i> e. Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i> f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi <i>Information Transparency and Confidentiality</i> g. Etika Berusaha dan Anti Korupsi <i>Business Ethics and Anti-Corruption</i> |
| 6 | Wewenang <i>Authorities</i> |
| 7 | Hak <i>Rights</i> |
| 8 | Etika Jabatan <i>Ethics of Position</i> |
| 9 | Rapat <i>Meeting</i> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Dewan Komisaris dengan Dihadiri Direksi <i>Meeting of the Board of Commissioners Attended by the Board of Directors</i> a. Prosedur Kehadiran, Prosedur Rapat serta Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan <i>Procedures of Attendance, Meeting, Discussion of Problems, and Decision-Making</i> b. Pembuatan Risalah Rapat <i>Minutes of Meetings</i> |
| 10 | Laporan Tugas Pengawasan <i>Supervision Task Report</i> |
| 11 | Komite-komite <i>Committees</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Audit <i>Audit Committee</i> b. Komite yang Dianggap Perlu <i>Committees Deemed Necessary</i> |

Independensi Terkait Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai aturan tersebut disebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat berasal dari profesional maupun pejabat negara. Aturan tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak diperkenankan memiliki ikatan atau hubungan afiliasi guna menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Tanggung Jawab, Tugas dan Kewajiban, Wewenang, Serta Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas apabila dapat membuktikan:

Independence related to Conflicts of Interests

The Board of Commissioners is appointed based on the rules stated in the Articles of Association and Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 50 Year 2018 concerning Procedures to Appoint and Dismiss Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Commissioners of Regionally-Owned Enterprises. It is stated that the Board of Commissioners can be sourced from professionals and state officials. It is also stated that the Board of Commissioners is not permitted to have any ties nor affiliations in order to avoid conflicts of interest.

Responsibilities, Duties and Obligations, Authorities, and Rights of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies, the general management and the business of the Corporation, and giving advice to the Board of Directors. Supervision and provision of advice by the Board of Commissioners is carried out with the following principles:

1. *In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;*
2. *Each Member of the Board of Commissioners must be prudent, responsible, and acting in good faith when carrying out their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the interests of the Corporation and in accordance with the aims and objectives of the Corporation;*
3. *Each Member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Corporation's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties as referred above;*
4. *In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibilities as referred to in item (3) shall apply jointly to each Member of the Board of Commissioners;*
5. *In carrying out supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners;*
6. *Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses as referred to in item 3 (three) if they can prove that:*

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.
 8. Atas nama Perseroan, Pemegang Saham dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
 9. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris

1. Umum
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS;
 - b. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memantau efektivitas praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diterapkan Perseroan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - e. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya;

- a. *They have supervised in good faith and prudence for the interests of the Corporation and in accordance with the goals and objectives of the Corporation;*
 - b. *They have no personal interests either directly nor indirectly for the management actions of the Board of Directors which results in losses; and have given advice to the Board of Directors to prevent such losses from arising or continuing.*
7. *Supervision may not extend to execution of executive tasks, except in the case that the Corporation does not have a Board of Directors. In such case, the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more Members of the Board of Commissioners for the responsibilities of the Board of Commissioners;*
 8. *On behalf of the Corporation, Shareholders may sue Members of the Board of Commissioners who due to their mistakes or negligence have caused losses to the Corporation, to a district court;*
 9. *The Board of Commissioners may use the services of independent professionals and/or form Committees to assist the duties of the Board of Commissioners.*

Duties and obligations of the Board of Commissioners

1. *General*
 - a. *Complying with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations as well as the resolutions of the GMS;*
 - b. *Supervising and providing advice that is carried out for the interests of the Corporation and in accordance with the goals and objectives of the Corporation;*
 - c. *Supervising the Corporation's management policies carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including regarding the Corporation development plans, Long-Term Plan, Corporation Work Plan and Budget, implementation of the Articles of Association and resolution of the GMS and the prevailing laws and regulations;*
 - d. *Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance practices implemented by the Corporation, by, among other strategies, holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance;*
 - e. *Preparing a work plan for the Board of Commissioners for the following year;*

- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
 - g. Membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap:
 - i. Rencana Bisnis Perseroan (RBP);
 - ii. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Perseroan;
 - iii. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan;
 - iv. Laporan kinerja Perseroan;
 - v. Laporan akhir masa jabatan anggota Direksi;
 - vi. Laporan keuangan Perseroan yang sudah diaudit; dan
 - vii. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - h. Melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP), Rencana Kerja Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perseroan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD);
 - i. Melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui BP BUMD mengenai adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi;
 - j. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur melalui BP BUMD secara berkala triwulanan, semester, atau tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:
- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perseroan;
 - b. Melakukan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Melakukan kunjungan ke unit kerja/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
 - d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
 - e. Menugaskan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti, dan Komite SDM dan Pengusahaan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan tertentu sesuai Piagam masing-masing komite.
3. Kontrak Manajemen:
Dewan Komisaris melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS.
4. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPS:
Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris
- f. *Being responsible for the implementation of their duties to the GMS;*
 - g. *Discussing, providing advice and consideration or input on the following plans:*
 - i. *Corporate Business Plan (RBP);*
 - ii. *Corporate Strategic Business Plan (Renstra);*
 - iii. *Corporation Work Plan and Budget (RKA);*
 - iv. *Corporate Performance Report;*
 - v. *Final report on the terms of office of the members of the Board of Directors;*
 - vi. *Audited financial statement of the Corporation; and*
 - vii. *Other matters related to the Corporation business activities;*
 - h. *Reporting the results of assessment on the implementation of RJP, Renstra, and RKAP by the Board of Commissioners to the Governor through ROE Development Agency (BP BUMD);*
 - i. *Reporting as early as possible to the Governor through BPBUMD concerning the findings and/or mistakes and/or negligence and/or mismanagement of the Corporation by the Board of Directors;*
 - j. *Preparing and reporting the results of supervision to the Governor through BP BUMD periodically, quarterly, semesterly, or annually or at any time as required; and*
 - k. *Preparing and submitting the final reports on the end of terms of office of the Board of Commissioners.*
2. *Supervision by the Board of Commissioners is carried out by:*
- a. *Requesting written information to the Board of Directors concerning an issue in the Corporation;*
 - b. *Conducting joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
 - c. *Visiting certain work units/projects, with or without prior notification to the Board of Directors; and*
 - d. *Providing responses to periodic reports from the Board of Directors;*
 - e. *Assigning the Audit Committee to carry out certain supervisory tasks in accordance with the Audit Committee Charter.*
3. *Management Contract:*
The Board of Commissioners enters into a management contract before the GMS.
4. *Implementation of Tasks Regarding the GMS:*
In conjunction with the GMS, the Board of

bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Memimpin RUPS. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan atas:
 - i. Program kerja yang diajukan Direksi;
 - ii. Laporan keuangan Perseroan;
 - iii. Laporan kinerja Perseroan; dan
 - iv. Laporan akhir masa jabatan Direksi.
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dalam kepengurusan Perseroan;
 - e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana aksi pengurusan Perseroan oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS;
 - g. Meneliti dan menelaah, serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS;
 - h. Dalam hal ada Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis;
 - i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
 - k. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan.
5. **Pengurusan Manajemen Risiko:**
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
6. **Sistem Pengendalian Internal:**
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Commissioners has the duties and obligations as follows:

- a. *The GMS is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is unable to attend, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners;*
 - b. *Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the annual RKAP on:*
 - i. *Work programme proposed by the Board of Directors;*
 - ii. *Corporate's financial statements;*
 - iii. *Corporate's performance report; and*
 - iv. *Final report at the end of terms of office of the Board of the Directors.*
 - c. *Following the development of the Corporation's activities;*
 - d. *Providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important in the management of the Corporation;*
 - e. *Reporting immediately to the GMS if there is a symptom of decline in the Corporation's performance accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken;*
 - f. *Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the action plan for the management of the Corporation by the Board of Directors that requires the approval from the GMS;*
 - g. *Researching and analysing as well as signing the Annual Report compiled and submitted by the Board of Directors to the GMS;*
 - h. *In the event that any members of the Board of Commissioners do not sign the Annual Report, they must state the reasons in writing;*
 - i. *Performing other supervisory duties as determined by the GMS;*
 - j. *Being responsible for the implementation of their duties to the GMS;*
 - k. *Proposing an External Auditor candidate to the GMS along with the reasons and amount of the proposed fee.*
5. **Risk Management:**
The Board of Commissioners has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of the implementation of risk management.
6. **Internal Control System:**
The Board of Commissioners has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system.

7. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi:

- a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif;
- b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan;
- c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan masalah material yang dihadapi;
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data Perseroan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Etika Berusaha dan Anti Korupsi:

- a. Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perseroan;
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, sebelum, selama, dan setelah menjabat dan wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

7. Information Transparency and Confidentiality:

- a. *The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors discloses important information in the Annual Report and the Corporation's Financial Statements to Shareholders, and related Government Agencies in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner;*
- b. *The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors takes the initiative to disclose not only the problems required by the laws and regulations, but also important information required by the Stakeholders;*
- c. *The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors actively discloses the implementation of Good Corporate Governance principles and the material problems they face;*
- d. *The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of Corporate information and data. Confidential information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with the prevailing laws and regulations.*

8. Business Ethics and Anti-Corruption:

- a. *The Board of Commissioners is prohibited from directly or indirectly giving, offering, or accepting anything of value to/from a customer or a Government official to influence their actions or as a reward for their actions. Additionally, the Board of Commissioners must carry out duties and actions in accordance with the applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Commissioners are not permitted to request or accept gifts and the like from any party concerned, for themselves, family, or colleagues where this can affect their objectivity in representing the interests of the Corporation;*
- c. *Members of the Board of Commissioners are required to be willing to inspect their wealth before, during, and after taking office and must report and announce their wealth before and after taking office.*

Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menggunakan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, dan persediaan barang mati;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mengajukan pemberhentian ke Pemegang Saham melalui RUPSLB.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Atas usulan Direksi, Dewan Komisaris berwenang mengangkat seorang Karyawan Perseroan untuk menjadi Sekretaris Dewan Komisaris dan tidak mengubah statusnya sebagai pegawai Perseroan.

Authority of the Board of Commissioners

1. *The Board of Commissioners has the authority to approve or reject the plan of the Board of Directors in writing concerning:*
 - a. *Borrowing or lending money on behalf of the Corporation;*
 - b. *Establishing a new business or participating in other companies both in Indonesia and abroad;*
 - c. *Placing fixed assets required for carrying out short-term credit withdrawals;*
 - d. *Releasing and writing off moveable assets within economic life normally applicable in the industry, in general up to 5 (five) years, and writing off bad debts and dead inventory;*
2. *The Board of Commissioners at any time during office hours has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Corporation and has the right to examine all books, letters, and other evidence, examine and match the situation of cash and others and has the right to know all the actions taken by the Directors;*
3. *If all Members of the Directors are suspended and the Corporation does not have any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to take care of the Corporation. In such case the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more Members of the Board of Commissioners upon the responsibility of the Board of Commissioners;*
4. *The Board of Commissioners is authorised to temporarily dismiss one or more Members of the Board of Directors, if they act in contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there is an urgent reason for the Corporation in accordance with prevailing laws and regulation. Then, the Board of Commissioners submits a termination to the Shareholders through the EGMS;*
5. *Requesting the Directors and / or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners' meeting;*
6. *At the suggestion of the Directors, the Board of Commissioners has the authority to appoint an employee of the Corporation to become the Secretary of the Board of Commissioners without changing their status as an employee of the Corporation;*

7. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Direksi.
 8. Memberikan teguran dan peringatan kepada Direksi atas pengelolaan/pengurusan Perseroan yang tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra), dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan.
 9. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.
 10. Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
 11. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi.
 12. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan Perseroan.
 13. Meminta Direksi dan/atau pejabat lain Perseroan untuk hadir dalam rapat yang diadakan Dewan Komisaris.
 14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan sesuai agenda rapat.
 15. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan.
 16. Memberikan persetujuan atas permohonan cuti yang diajukan oleh Direksi.
 17. Memberikan persetujuan atas permohonan izin yang diajukan Direksi untuk perjalanan dinas luar negeri.
7. *Providing input, suggestions, and considerations to the Directors;*
 8. *Giving warnings to the Board of Directors concerning the management of the Corporation that is not in accordance with the RBP, Strategic Plan, and/or RKA of the Corporation;*
 9. *Examining the members of the Board of Directors who are suspected of carrying out actions that are detrimental to the Corporation;*
 10. *Providing recommendations regarding the management of the Corporate by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders (GMS)/Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);*
 11. *Requesting data and information regarding the Corporation's business activities and/or management of the Corporation by the Board of Directors;*
 12. *Requesting clarification from the Board of Directors regarding the Corporation's development'*
 13. *Requesting the Board of Directors and/or other officials of the Corporation to attend the meeting held by the Board of Commissioners;*
 14. *Attending the Board of Directors' meeting and providing input, suggestions, or considerations according to the meeting agenda;*
 15. *Providing an assessment of the performance of the Board of Directors of the Corporation;*
 16. *Giving approval for leave applications submitted by the Board of Directors; and*
 17. *Giving approval of the permit application submitted by the Directors for overseas business travel.*

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi No. 010 Tahun 2020 dan No. 066 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

| Nama Name | Jabatan Position | Pembagian Tugas dan Wewenang Distribution of Duties and Authorities |
|------------------|---|---|
| Muhammad Syaugi | Komisaris Utama President Commissioner | Koordinator seluruh bidang penugasan pengawasan Dewan Komisaris. Coordinator of all areas of supervisory assignment of the Board of Commissioners. |
| Rukijo | Komisaris Commissioner | <ul style="list-style-type: none"> Bidang Keuangan dan Anggaran Ketua Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Finance and Budget Chairman of the Human Capital and Business Committee |
| Zulfikri | Komisaris Commissioner | <ul style="list-style-type: none"> Bidang Operasi dan Pemeliharaan Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Operations and Maintenance Chairman of the Risk & Security Oversight Committee |
| Mukhtasor | Komisaris Commissioner | Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha Business and Business Development |
| Adnan Pandu Raja | Komisaris Commissioner | <ul style="list-style-type: none"> Bidang Konstruksi Ketua Komite Audit Construction Chairman of the Audit Committee |

Program Pengenalan Perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan. Program Pengenalan, meliputi pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan; gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan atau ke proyek, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Komisaris Utama. Pada tahun 2020, Perseroan tidak menyelenggarakan program pengenalan, mengingat tidak ada anggota Dewan Komisaris baru.

Distribution of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Based on the Board Manual, the responsibilities of the Board of Commissioners are collective. The division of duties and responsibilities of the Members of the Board of Commissioners of the Corporation in 2020 based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020 is as follows:

Corporate Induction Program

Members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time must undertake the Corporate Induction Programme. Induction Programmes include the implementation of Corporate Governance Principles; a description of the Corporation relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, long-term business plans, risk, and other strategic issues, as well as internal and external audits, internal control systems and policies, with involvement from the Audit Committee.

The Corporation Induction Programme can take the form of presentations, meetings, visits to the Corporation or projects, and review of documents or other programmes deemed appropriate to the Corporation where the programme is implemented. The responsibility for conducting such an introduction programme is carried out by the President Commissioner. In 2020, the Corporation did not carry out induction programme as there were no new members of the Board Commissioners.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan memfasilitasi program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris.

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan pelatihan diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris tahun 2020, dapat dilihat di halaman 115 Laporan ini, pada bahasan tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris.

Competency Improvement of the Board of Commissioners

The Corporation facilitates the capability improvement program for the Board of Commissioners.

1. Capability improvement programme is implemented in order to increase work effectiveness of the Board of Commissioners.
2. Plans to conduct capability improvement program must be included in Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
3. Each member of the Board of the Commissioners who participates in capacity building programs such as seminar and training are required to present a presentations to other Members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge.
4. The relevant member of the Board of Commissioners is responsible to make a report on the implementation of the capability improvement programme. The report is submitted to the Board of Commissioners.

Information concerning the competency improvement activities of the Board of Commissioners in 2020 is presented in page 115 of this report under the discussion of Education and Training of the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

Implementation of the Board of Commissioners' Tasks in 2020

| Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris <i>Realization of the Board of Commissioners' Work Plan</i> | |
|--|--|
| Rencana Kerja <i>Work Plan</i> | Realisasi <i>Realization</i> |
| Pelaksanaan Rapat Gabungan Bulanan dengan Direksi minimal 1x dalam 1 bulan <i>Monthly Joint Meeting with the Board of Directors, at least once in a month</i> | Terlaksana 12x dalam setahun <i>Held 12x in a year</i> |
| Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris minimal 1x dalam 2 bulan <i>Internal Meeting of the Board of Commissioners at least once in 2 months</i> | Terlaksana 12x dalam setahun <i>Held 12x in a year</i> |
| Pelaksanaan Rapat Gabungan dengan seluruh Komite Komisaris minimal 2x dalam 1 tahun <i>Joint Meeting with all Committees of the Board of Commissioners at least 2x in a year</i> | Terlaksana 4x dalam setahun <i>Held 4x in a year</i> |
| Memberikan arahan tertulis minimal 1x dalam 1 bulan kepada Direksi dan / atau Komite untuk menjaga penerapan tata kelola oleh Perusahaan <i>Written direction at least once in a month for the Board of Directors and/or Committees to maintain the implementation of Good Corporate Governance</i> | Mengirimkan 56 arahan tertulis sepanjang tahun 2020 kepada Direksi maupun Komite Komisaris <i>Sent 56 written instructions in 2020 to the Board of Directors and Committees</i> |

| Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris <i>Realization of the Board of Commissioners' Work Plan</i> | |
|---|--|
| Rencana Kerja <i>Work Plan</i> | Realisasi <i>Realization</i> |
| <p>Melakukan evaluasi, <i>review</i>, dan memberikan persetujuan atas pengajuan RKA 2021</p> <p><i>Evaluation, review, and approval of RKA 2021</i></p> | <p>Proses evaluasi dan <i>review</i> atas pengajuan RKA 2021 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu Komite Komisaris melalui rapat dan korespondensi tertulis memberikan umpan balik terhadap draft RKA yang diajukan. Persetujuan pengajuan RKA 2021 telah diberikan Dewan Komisaris untuk diajukan Direksi pada RUPS Luar Biasa bulan November 2020.</p> <p><i>Evaluation and review process of RKA 2021 has been carried out by the Board of Commissioners assisted by the Committee of the Board of Commissioners through meeting and written correspondence to give feedback for the proposed RKA draft. Approval of RKA 2021 draft has been carried out by the Board of Commissioners to be proposed by the Board of Directors at Extraordinary GMS on November 2020.</i></p> |
| <p>Melakukan evaluasi dan <i>review</i> atas laporan keuangan dan serapan RKA 2019</p> <p><i>Evaluation and review of financial statements and 2019 RKA absorption</i></p> | <p>Proses evaluasi dan <i>review</i> atas laporan keuangan dan serapan RKA 2019 telah dilakukan pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Januari 2020 serta dibantu kajian tertulis laporan keuangan oleh Komite Audit.</p> <p><i>Evaluation and review process of the financial statements and 2019 RKA absorption has been carried out at the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 2020 and assisted by financial statement written study by the Audit Committee.</i></p> |
| <p>Melakukan evaluasi, <i>review</i>, dan pengawasan berkala atas pelaksanaan RKA 2020</p> <p><i>Evaluation, review, and periodic monitoring of the implementation of 2020 RKA</i></p> | <p>Proses evaluasi, <i>review</i>, dan pengawas berkala atas pelaksanaan RKA 2020 dilakukan melalui pembahasan rutin realisasi RKA pada rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui pengkinian rutin data RKA 2020 pada Dashboard Dewan Komisaris.</p> <p><i>Evaluation, review, and periodic monitoring of the implementation of 2020 RKA is carried out through routine discussion of RKA realisation during the monthly joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and through routine update of 2020 RKA data on the Dashboard of the Board of Commissioners.</i></p> |
| <p>Mengikuti minimal 1x pelatihan, <i>workshop</i>, seminar atau konferensi terkait isu GRC ataupun isu lain yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris</p> <p><i>Training, workshop, seminar, or conference concerning GRC issues or other relevant issues at least once for capacity improvement of the Board of Commissioners</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 2 Dewan Komisaris mengikuti pelatihan "Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan" oleh PPIA YPIA pada bulan Januari 2020. 2. Seluruh Dewan Komisaris mengikut pelatihan Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001:2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris oleh CRMS Indonesia pada bulan September 2020. <p><i>1. There were 2 Commissioners that participated in the training "Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners Committee in Monitoring Risk Management Practices and Internal Control in the Corporation" by PPIA YPIA in January 2020.</i></p> <p><i>2. All Commissioners participated in the training "Mechanism and Monitoring of ISO 37001:2016 Implementation by the Board of Commissioners" by CRMS Indonesia in September 2020.</i></p> |
| <p>Melaksanakan observasi/<i>site visit</i> progres konstruksi Fase 2 dan pelaksanaan operasi MRT Fase 1 setidaknya 3x dalam 1 tahun</p> <p><i>Observation/site visit concerning the progress of Phase 2 construction and operations of Phase 1 MRT at least three times in a year</i></p> | <p>Melakukan 12 observasi / <i>site visit</i> sepanjang tahun 2020</p> <p><i>Held 12 observations/site visits in 2020</i></p> |
| <p>Melaporkan Pengawasan Triwulanan kepada Pemegang Saham</p> <p><i>Reporting the Quarterly Monitoring Report to the Shareholders</i></p> | <p>Mengirimkan laporan triwulanan pengawasan Dewan Komisaris kepada kedua Pemegang Saham Perusahaan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya.</p> <p><i>Delivered the Quarterly Monitoring Report of the Board of Commissioners to two Shareholders, i.e., the Government of DKI Jakarta Province and PD Pasar Jaya.</i></p> |

Realisasi Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Realization of the Board of Commissioners' Site Visit

| Rencana Kerja <i>Work Plan</i> | Kunjungan Kerja <i>Site Visit</i> |
|--|--|
| <p>Melaksanakan observasi/site visit progres konstruksi Fase 2 dan pelaksanaan operasi MRT Fase 1 setidaknya 3x dalam 1 tahun <i>Observation/site visit concerning the progress of Phase 2 construction and operations of Phase 1 MRT at least three times in a year</i></p> | <p>Kunjungan pada area integrasi, jalur sepeda, dan jalur pedestrian dari area stasiun Bundaran HI hingga stasiun Istora pada 31 Januari 2020. <i>Site visit to integration area, bike lane, and pedestrian lane from Bundaran HI Station until Istora Station on January 31, 2020.</i></p> |
| | <p>Kunjungan penataan 4 stasiun KCI sebagai bagian KSD MRT Jakarta pada 28 Februari 2020. <i>Site visit to the arrangement of 4 KCI stations as a part of CSR of MRT Jakarta on February 28, 2020.</i></p> |
| | <p>Benchmark sistem keamanan siber ke Pusat Siber Kementerian Pertahanan pada 3 Maret 2020. <i>Benchmark of cyber security system to the Centre for Cyber of the Ministry of Defence on March 3, 2020.</i></p> |
| | <p>Kunjungan ke Depo dan OCC MRT Jakarta pada 5 Maret 2020. <i>Site visit to MRT Jakarta Depot and OCC on March 5, 2020.</i></p> |
| | <p>Kunjungan ke stasiun-stasiun MRT Jakarta untuk melihat persiapan operasi kereta dengan diberlakukannya PSBB pada 2 Juni 2020. <i>Site visit to MRT Jakarta stations to observe the preparation of train operations during PSBB on June 2, 2020.</i></p> |
| | <p>Kunjungan penataan 5 stasiun KCI sebagai bagian KSD MRT Jakarta pada 9 Juni 2020. <i>Site visit to the arrangement of 5 KCI stations as a part of KSD of MRT Jakarta on June 9, 2020.</i></p> |
| | <p>Menghadiri acara peresmian program penataan Kawasan stasiun KCI pada 17 Juni 2020. <i>Attended the inauguration of KCI Station Arrangement on June 17, 2020.</i></p> |
| | <p>Menghadiri acara penandatanganan perjanjian pokok penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi pada 30 Juni 2020. <i>Attended the signing of Agreement for the Implementation of Integrated Payment System Among Modes of Transportation on June 30, 2020.</i></p> |
| | <p>Menghadiri acara penandatanganan <i>Shareholder Agreement</i> Perusahaan Patungan EFC pada 15 Juli 2020. <i>Attended the signing of Shareholder Agreement of EFC Joint Venture on July 15, 2020.</i></p> |
| | <p>Kunjungan ke Kawasan Monas untuk melihat penataan dan realokasi pohon pada pekerjaan konstruksi fase 2 pada 11 Agustus 2020. <i>Site visit to Monas area to observe the tree arrangement and relocation for Phase II construction project on August 11, 2020.</i></p> |
| <p>Menghadiri peresmian kantor anak perusahaan patungan MITJ pada 12 Agustus 2020. <i>Attended the inauguration of the office of MITJ Joint Venture on August 12, 2020.</i></p> | |
| <p>Menghadiri acara top BUMD Awards oleh majalah Top Business. <i>Attended the event Top BUMD Awards by Top Business Magazines.</i></p> | |

Rekomendasi Dewan Komisaris

Recommendation from the Board of Commissioners

Aspek Konstruksi Construction Aspects

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Fase 2 dilakukan dengan menegakkan protokol kesehatan sesuai peraturan PSBB yang ditetapkan Pemerintah Provinsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan karyawan MRT Jakarta maupun karyawan kontraktor.

Implementation of Phase 2 Construction Project to be carried out by enforcing health protocols in accordance with the requirements of PSBB as set forth by the Regional Government to maintain safety and security of the employees of the Corporation and employees of the contractors.

Perseroan untuk menyiapkan beberapa skenario mitigasi untuk penyelesaian *Financing Charges* Fase 1 dan terus mengawal progress di pihak eksternal agar isu tidak berlarut. Untuk disiapkan juga strategi agar kejadian *Financing Charges* tidak berulang pada konstruksi Fase 2.

The Corporation to prepare various mitigation scenarios for the resolution of Phase 1 Financing Charges and to monitor the progress by the external parties to prevent the issues from getting carried on, and to prepare strategies to prevent Financing Charges from occurring in Phase 2 construction.

Perseroan untuk memastikan menjaga tata kelola proses pengadaan kontraktor konstruksi Fase 2, jika akan dilakukan proses *Direct Contracting* agar dikawal terus prosesnya oleh BPKP maupun *Internal Audit* Perusahaan.

The Corporation to ensure the maintenance of contractor procurement process governance for Phase 2 construction, in the event Direct Contracting, the process is to be monitored by Finance Development Supervisory Agency (BPKP) and an internal audit of the Corporation.

Perseroan untuk melakukan kajian komprehensif terkait rencana perubahan sistem tiket dari JAVA ke RC-500 untuk membantu pengambilan keputusan dan justifikasi tindakan oleh Kementerian Perhubungan.

The Corporation to carry out comprehensive study on the plan to change ticketing system from JAVA to RC-500 to assist the decision-making and action justification by the Ministry of Transportation.

Perseroan untuk melakukan kajian komprehensif terkait kebutuhan *Rolling Stock* di Fase 2 dengan mempertimbangkan *demand* pelanggan dan rencana *headway* yang akan ditetapkan.

The Corporation to carry out comprehensive study on the requirements of Rolling Stock in Phase 2 by considering customer demand and headway plan to be determined.

Perseroan untuk mengoptimalkan penggunaan *Building Information Management* pada manajemen proyek konstruksi Fase 2.

The Corporation to optimise the utilisation of Building Information Management during Phase 2 construction project management.

Aspek Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Aspects

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kereta dilakukan dengan menegakkan protokol kesehatan sesuai peraturan PSBB yang ditetapkan Pemerintah Provinsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan juga karyawan MRT Jakarta.

The implementation of operations and train maintenance to be carried out by enforcing health protocols in accordance with the requirements of large scale social restrictions as set forth by the Regional Government to maintain safety and security of the passengers and the employees of the Corporation.

Karyawan *frontline* operasi untuk menegakkan protokol kesehatan secara disiplin kepada pengguna MRT Jakarta dan secara rutin melakukan sosialisasi protokol kesehatan di area stasiun maupun gerbong kereta.

Operational frontline employees to enforce health protocols discipline to the passengers of MRT Jakarta and to socialise routinely the health protocols in the stations and inside the train.

Perseroan untuk mengoptimalkan penggunaan peralatan-peralatan *maintenance* yang telah dibeli, digunakan secara rutin, dan dilaporkan secara berkala pencegahan atau perbaikan-perbaikan apa yang telah dilakukan oleh Divisi Railway Maintenance.

The Corporation to optimise the utilisation of the purchased maintenance equipment, to be used routinely, and reported frequently concerning the prevention and corrective actions carried out by the Railway Maintenance Division.

Perseroan untuk meningkatkan aspek keamanan di area operasi dengan menjalin kerja sama dengan beberapa instansi Angkatan Bersenjata dan memperkuat juga koordinasi antar Badan Usaha Jasa Pengamanan.

The Corporation to improve the security in operational area by collaborating with various Armed Forces institutions and to strengthen the coordination between Security Service Business Entity.

Perseroan secara rutin mengadakan *customer survey* untuk mengetahui keluhan dan masukan pelanggan, kemudian menindaklanjuti masukan-masukan dan temuan tersebut, sehingga kepuasan pelanggan selalu meningkat dan terjaga.

The Corporation to routinely carry out customer survey to find out complaints and input from passengers, then to follow up the input and findings in order to improve and maintain customer satisfaction.

Aspek Pengembangan Bisnis *Business Development Aspects*

Perseroan untuk mengelola dengan baik dan mempertahankan nilai ekonomis dari renegotiasi kontrak dengan mitra bisnis akibat situasi pandemi. Disarankan untuk mencari *win-win solution* untuk kedua belah pihak, dimana MRT Jakarta tetap terjamin penerimaan pendapatannya, dan MRT Jakarta dapat menyuguhkan opsi-opsi *benefit* tambahan atau keringanan lain pada masa pandemi.

The Corporation to manage well and maintain the economic value of contract renegotiation with business partners caused by the pandemic. It is suggested to find a win-win solution for both parties, that the revenue of PT MRTJ Jakarta is secured and MRT Jakarta can offer additional benefit options or other facilities during the pandemic.

Perseroan untuk menyiapkan landasan regulasi yang kuat tentang pengelolaan TOD dan hal ini harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi, sehingga peran MRT Jakarta maupun anak perusahaan MRT Jakarta dalam hal ini jelas. Disarankan untuk menyiapkan juga strategi dan kajian prioritas wilayah mana yang terlebih dahulu akan dikembangkan area TOD-nya.

The Corporation to prepare a strong regulation foundation concerning the management of TOD and it is to be coordinated with the Regional Government, so that the role of MRT Jakarta and its subsidiaries can be clear. It is suggested to prepare strategies and priority studies on the area to be prioritised to develop TOD area.

Perseroan untuk menyiapkan strategi dan model bisnis yang matang saat akan masuk ke bisnis *digital asset* dan rencana monetisasinya. Menetapkan prioritas *channel digital* mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu dan bagaimana *forecast Return of Investment*-nya.

The Corporation to prepare rigid business strategy and model upon entering digital asset business and monetisation plan, Prioritise the channel digital to be developed and the forecasted Return of Investment.

Perseroan untuk lebih kreatif menggali ide untuk penambahan *revenue* dari aspek *non-farebox*. Strategi-strategi sumber pendapatan yang baru, seperti penambahan area *naming rights*, rencana pemasangan iklan di area tiang *elevated*, CTVT, terowongan, serta utilisasi ruang stasiun untuk *coworking space* harap disiapkan dengan matang dan dapat dieksekusi.

The Corporation to be more creative in looking for ideas to add revenue from non-fare box aspects. New revenue source strategy, such as additional area naming rights, advertising plan in elevated poles area, CTVT, tunnels, and station space utilisation for coworking space to be prepared well and to be executed well.

Aspek Governance, Risk, dan Compliance, serta Keuangan
Governance, Risk, and Compliance, and Financial Aspects

Perseroan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dari proses bisnis berdasarkan masukan dan temuan dari *audit assessment* tata kelola perusahaan yang baik dari BPKP, auditor eksternal, maupun auditor internal.

The Corporation to remain implementing continuous improvement of the business processes based on the input and findings of GCG audit assessment by Finance Development Supervisory Agency (BPKP), external auditor, and internal auditor.

Perseroan untuk melakukan pemutakhiran dari dokumen tata kelola Perusahaan, seperti dokumen *Board Manual*, *Code of Conduct*, *Pedoman Tata Kelola* dan *Charter*, sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan *best practice* industri.

The Corporation to update all documents concerning Corporate Governance, such as the Board Manual, Code of Conduct, Guidelines of Governance, and Charter, to adjust with the prevailing laws and regulations and best practices in the industry.

Perseroan untuk memperbaiki proses pengawasan dari realisasi RKA tahun berjalan, dimana Perusahaan harus memiliki informasi terkini dan mendetail terkait rencana realisasi kegiatan, anggaran yang dibutuhkan, dan *progress report* dari tiap rencana ini.

The Corporation to improve monitoring process and RKA realisation in the running year, that the Corporation must own the latest and detailed information concerning activity realisation plans, required budgets, and progress reports of each plan.

Perseroan untuk memperbaiki format laporan keuangan, format pengajuan program kerja dan RKA, sehingga lebih mudah terbaca dan dapat menyorot (*highlight*) isu-isu penting untuk dipantau Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

The Corporation to improve the format of financial statements, format of work programme proposal, and RKA, in order to be easier to read and to highlight important issues to be reviewed by the Board of Commissioners and the Shareholders.

Perseroan untuk menyiapkan strategi pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya strategi suksesi, *talent management*, dan *knowledge management* untuk menjaga kontinuitas *performance* dari Perusahaan.

The Corporation to prepare HC management strategy, including succession strategies, talent management, and knowledge management to maintain performance continuity of the Corporate.

Perseroan untuk menyiapkan *roadmap* transformasi digital maupun GRC terintegrasi, sehingga proses bisnis di Perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memudahkan pengawasan dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

The Corporation to prepare digital transformation and integrated GRC roadmap, so that the Corporation business process can be carried out more effectively and efficiently and to ease the monitoring by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Informasi Tentang Keberadaan Komisaris Independen Perseroan

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; baik terafiliasi dalam hubungan bisnis, maupun hubungan keluarga. Jika terdapat lebih dari 1 Komisaris Independen, salah satu diantaranya harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Information on Independent Commissioners of the Corporation

According to the Law concerning Limited Liability Companies, Independent Commissioners are appointed based on the resolutions of the GMS from parties who are not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors, and/or other members of the Board of Commissioners; whether affiliated in business relationships or family relationships. If there is more than 1 (one) Independent commissioner, one of the Independent Commissioners must have an accounting or financial background.

Pada tahun 2020, Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen. Pengangkatan Komisaris Independen sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham Perseroan, sehingga tidak ada pembahasan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

In 2020, the Corporation did not have any Independent Commissioners. The appointment of an Independent Commissioner is the authority of the Government of DKI Jakarta province as the Shareholder of the Corporation, therefore there is no information concerning the independence of each Independent Commissioner.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berperan dalam menjalankan aktivitas operasional secara keseluruhan. Direksi mengelola Perseroan berdasarkan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perseroan. Direksi ditentukan dan diangkat dalam RUPS.

The Board of Directors is a Corporation organ that plays a role in carrying out overall operational activities. The Board of Directors manages the Corporation in accordance with the Corporation Business Plan as the explanation of the Vision and Missions of the Corporation. The Board of Directors is appointed during the GMS.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Direksi

Perseroan mewajibkan anggota Direksi untuk berdomisili di Indonesia. Anggota Direksi yang dinominasikan diharuskan tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Qualifications and Criteria of the Members of the Board of Directors

The Corporation requires the members of the Board of Directors to reside in Indonesia. The nominated members for the Board of Directors must never be declared bankrupt and/or convicted for causing a corporation to go bankrupt and have never committed any disgraceful acts and have never been convicted of a felony.

Perseroan melarang rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Direksi, atau pejabat eksekutif pada perusahaan sejenis, dan/atau lembaga lain. Untuk menghindari benturan kepentingan, Perseroan tidak mengizinkan anggota Direksi yang dinominasikan untuk memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Perseroan. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Perseroan.

The Corporation prohibits concurrent positions for the members of the Board of Directors as Director or executive officer of a similar company and/or other institution. To avoid conflicts of interest, the Corporation does not permit the nominated members for the Board of Directors to have financial and family relationship with the members of the Board of Commissioners, fellow Directors, and/or Shareholders of the Corporation. The majority members of the Board of Directors have more than 5 years of experience in operational field as executive officers of the Corporation.

Pengangkatan/Pemberhentian dan Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Direksi diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai keputusan RUPS pada tahun 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019, dan telah disahkan melalui Akta No. 13 Tahun 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pengecualian atas pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) Periode hanya dapat dilakukan kepada anggota Direksi yang berkinerja baik, dan kompetensi Direksi bersangkutan sangat dibutuhkan Perseroan. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 52 ayat (4).

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Direksi Tahun 2020

Pada periode pelaporan telah terjadi perubahan komposisi keanggotaan Direksi. Sesuai Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS tanggal 21 Februari 2020, Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat saudara Tuhayat dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi.

Menunggu pejabat definitif untuk posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, dan sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS tanggal 21 Februari 2020, maka untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Keuangan dan manajemen Korporasi, Direksi melalui Keputusan Direksi No. 011 Tahun 2020 menetapkan saudara Silvia Halim untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi.

Sesuai Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS tanggal 20 April 2020, Pemegang Saham mengangkat saudara Roy Rahendra sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, serta memberhentikan dengan hormat saudara Ghamal Peris dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham.

Appointment/Dismissal and Conditions of Terms of the Board of Directors

The Board of Directors is appointed and/or dismissed by the GMS mechanism. In accordance with the resolutions of 2019 GMS held 28 March 2019 and has been ratified through Deed No. 13 of 2019 concerning Statement of GMS Decree, the term of office of the Board of Directors is 5 (five) years and can only be reappointed for another 1 (one) term, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss at any time.

An exception for the limitation of 2 (two) periods of terms of office may only be given to members of the Board of Directors with excellent working performance whose competence is required by the Corporation. The provision is in accordance with the Regulations of the Provincial Governor of the Jakarta Special Capital Region No. 109 of 2011 concerning Management of ROE, Article 52 paragraph (4).

Number and Composition of the Board of Directors in 2020

During the reporting period, there was a change in the composition of the Board of Directors. In accordance with the Resolution of Shareholders without GMS dated February 21, 2020, the Shareholders honourably dismissed Mr. Tuhayat from his position as the Finance and Corporate Management Director.

While expecting a definitive official for the Finance and Corporate Management Director, and in line with the Resolutions of Shareholders Outside GMS dated February 21, 2020, to fulfil the vacant position of Finance and Corporate Management Director, the Board of Directors through Directors' Decree No. 011 Year 2020 appointed Silvia Halim to be the Acting Official for the position of Finance and Corporate Management Director.

In accordance with the Resolution of Shareholders without GMS dated April 20, 2020, the Shareholders appointed Mr. Roy Rahendra as the Finance and Corporate Management Director and honourably dismissed Mr. Ghamal Peris from his position of Business Development Director, from the date of signing of the Resolution of Shareholders without the General Meeting of Shareholders.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS tanggal 20 April 2020 dan untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Pengembangan Bisnis, Direksi melalui Keputusan Direksi No. 026 Tahun 2020 menetapkan saudari Silvia Halim untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengembangan Bisnis.

Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan Direksi Perseroan selengkapnya seperti ditampilkan sebagai berikut.

In accordance with the Resolution of Shareholders without GMS dated April 20, 2020, and to fulfil the vacant position of Business Development Director, the Board of Directors through Directors' Resolution No. 026 Year 2020 appointed Mrs. Silvia Halim to be the Acting Official for Business Director.

By such appointment and dismissal, the composition of the Board of Directors of the Corporation is presented as follows.

Susunan Direksi Per 31 Desember 2020

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2020

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Bases of Appointment |
|---------------------|--|--|
| William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 51 Dated October 21, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi Plt. Direktur Pengembangan Bisnis <i>Construction Director Acting Official of Business Development Manager</i> | Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Keputusan Direksi No. 026 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 <i>Deed No. 48 Dated September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Directors' Decree No. 026 Year 2020 dated May 4, 2020</i> |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operation & Maintenance</i> | Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 16 dated 17 November 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> |
| Roy Rahendra | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance and Corporate Management</i> | Akta No. 02 Tanggal 05 Mei 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 02 dated May 05, 2020, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> |

Integritas

Direktur Perseroan tidak diperkenankan:

1. Memberi atau menerima hadiah dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
2. Memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
3. Mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.
4. Ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai Direktur atau Komisaris) di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak Perseroan.
5. Memiliki saham di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.

Integrity

The Board of Directors of the Corporation are not allowed to:

1. *Give or receive gifts from the Corporation's business partners and/or subsidiaries;*
2. *Give improper advantages to any third party that harm the Corporation and/or its subsidiaries;*
3. *Take advantage of business opportunities, which are the rights of the Corporation (and/or its subsidiaries), both for themselves, their partners, children, and relatives who have blood relations or marriage relationship to the second degree;*
4. *Participate, directly or indirectly, in the management (as a Director or Commissioners) in a competing company of the Corporation and/or its subsidiary; or*
5. *Own shares in a competing company of the Corporation and/or its subsidiary that causes conflicts of interest.*

Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
2. Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut, informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:
 - a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
 - b. Rencana strategis Perseroan;
 - c. Informasi yang terkait dengan perjanjian kerahasiaan;
 - d. Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
 - e. Keunikan teknologi;
 - f. Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

Etika dan Anti Korupsi

1. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Direktur Perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benturan Kepentingan

Dalam pengambilan keputusan, Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam mengambil keputusan. Direksi dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan. Apabila terjadi sesuatu hal, dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Confidentiality

During their term of office and after the term of office expires, each member of the Board of Directors is prohibited from using or disclosing (directly or indirectly) any confidential information held by the Corporation. The Members of the Board of Directors are also prohibited from misusing the Confidential Information. Confidential Information includes documents and/or strategic information created and/or obtained by the Corporation which may not be disclosed or provided to outside parties, with the following considerations:

1. *To maintain the competitive advantage of the Corporation and/or its subsidiaries;*
2. *To comply with the agreements or laws that require the Corporation to maintain confidentiality of information. Information categorised as Confidential Information category is:*
 - a. *Financial reports and/or material transactions that have not been disclosed to the public;*
 - b. *Corporate strategic plan;*
 - c. *Information that is bound by non-disclosure agreement;*
 - d. *Products of the Corporation and/or its subsidiaries that are still in the development stage;*
 - e. *Technological uniqueness;*
 - f. *Other information considered confidential.*

Ethics and Anti-Corruption

1. *The Board of Directors is obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance;*
2. *The Directors of the Corporation are prohibited from giving or offering or accepting, directly or indirectly, anything of value to government officials to influence or in return for what they have done and other actions in accordance with statutory provisions.*

Conflicts of Interest

In decision making, the Board of Directors must avoid any activities that may influence their independence in making decisions. The Board of Directors is prohibited to participate in the decision-making process if there are conflict of interest. In the event of such occurrence the interest of the Corporation is conflicting with that of a member of the Board of Directors, the Corporation will be represented by another member of the Board of Directors. If such conflict of interests occurs for all members of the Board of Directors, the Corporation will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners.

Direksi juga dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus setiap tahunnya yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.

Selain itu, seluruh anggota Direksi juga menandatangani Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan pada awal pengangkatannya dan diperbaharui setiap tahun. Pada tahun 2020, Perseroan memastikan tidak ada transaksi maupun pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbarui dan disahkan pada tanggal 31 Desember 2020 melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 010 tahun 2020 dan No. 066 Tahun 2020.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dapat diakses selengkapnya di laman PPID MRT Jakarta melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

The Board of Directors is prohibited to participate in any procurement activities that engage a company where the party in question or their family member has significant ownership of share or financial interests for the transaction. The Board of Directors must complete a Special List annually concerning their ownership of shares and/or that of their family in other companies in an accurate and valid manner.

In addition, all members of the Board of Directors sign the 'Statement of No Conflicts of Interest' at the start of their appointment that is to be renewed annually. For the year of 2020, the Corporation guarantees that there is no transaction nor decision making with conflicts of interest.

In carrying out the duties and responsibilities, the Board of Director refers to the Board Manual as recently amended and ratified on December 31, 2020 through Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020.

The Board Manual can be accessed through the MRT Jakarta PPID website at <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

Tugas dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang, serta Hak Direksi

Duties and Obligations, Responsibilities, Authorities, and Rights of the Board of Directors

Tugas, wewenang, serta hak Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Umum

- Menjalankan tugas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
- Membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan;
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan/atau Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan *standard operational procedure* (SOP) Perseroan;
- Mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Perseroan;
- Menyusun Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Strategis (Renstra) Perseroan;
- Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
- Menyampaikan RKA yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam RUPS untuk mendapat persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Menyusun laporan keuangan Perseroan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Perseroan setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemegang Saham;
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja Perseroan;
- Melaksanakan Program Kerja, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang sudah ditetapkan/disahkan;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dalam RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Duties, authorities, and rights of the Board of Directors of the Corporation are as follows:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. General

- *Carrying out the management of the Corporation for the benefit of the Corporation in good faith and responsibility;*
- *Compiling and preparing the list of shareholders, special list, minutes of GMS, and minutes of Directors' meetings;*
- *Preparing the Annual Report and Corporation financial documents;*
- *Maintaining all lists, minutes of meetings, and financial documents of the Corporation;*
- *Reporting to the Corporation concerning shares owned by the member of the Board of Directors and/or their family members in the Corporation and/or other companies to be registered in the special list;*
- *Deciding operational policies and standard operational procedures (SOP) of the Corporation;*
- *Representing the Corporation, internally and externally;*
- *Preparing Corporation Business Plan and Strategic Plan (Renstra) of the Corporation;*
- *Preparing work plan and budget (RKA) as annual elaboration of the Corporation business plan before the start of the upcoming fiscal year and submitting it to the Board of Commissioners;*
- *Submitting the RKA as reviewed by the Board of Commissioners in the GMS to be approved no later than 30 (thirty) days before the start of the upcoming fiscal year;*
- *Preparing the Corporation's financial statements;*
- *Preparing and submitting Corporation development report quarterly to the Shareholders;*
- *Improving productivity, efficiency, and performance of the Corporation;*
- *Carrying out the Work Program, Long-Term Plan, Strategic Plan, and Corporation Work Plan and Budget as ratified;*
- *Preparing and submitting Annual Report at the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;*

- Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - Menyiapkan susunan organisasi pengurus Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten;
 - Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para Anggota Dewan Komisaris atau para ahli yang membantunya;
 - Memahami kebijakan tentang kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaksanakannya;
 - Melaksanakan program pengenalan dan pelatihan bagi setiap anggota Direksi baru;
 - Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain jika ada yang diterima dari anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan.
2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
- Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseroan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
 - Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tutup buku, Direksi menyusun Laporan Tahunan, ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk diajukan dalam RUPS Tahunan.
- *Complying with the prevailing laws and regulations, Articles of Association of the Corporation, and Resolutions of the GMS and ensuring that all activities of the Corporation are in accordance with the prevailing laws and regulations, Articles of Association of the Corporation, and Resolutions of the GMS;*
 - *Preparing the organisational structure of the Corporation organization along with the job description;*
 - *Implementing Good Corporation Governance consistently;*
 - *Providing explanation on any questions from the Board of Commissioners or the experts helping the Board of Commissioners;*
 - *Understanding the policy concerning the State Official Wealth Report (LHKPN) and complying with the policy;*
 - *Participating in the induction and training programme for each new member of the Board of Directors;*
 - *The Board of Directors must submit information concerning their identity, main jobs, position as Commissioner in subsidiary/joint venture and/or other companies, including meetings participated in one fiscal year (internal meeting and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salary, facility, and other incentives received from the subsidiary/joint venture in question to be included in the Annual Report.*
2. *Related to the General Meeting of Shareholders*
- *The Board of Directors must hold and maintain the Register of Shareholders that shall at least consists of:*
 - a. *Name and address of shareholders;*
 - b. *Amount, number, date of share purchase of the share owned by shareholders, and classification in case of more than one share classification issued;*
 - c. *Paid-up amount for each share; and*
 - d. *Name and address of the corporation individual or legal entities with lien of share or as receiver of share fiduciary collateral and the date of reception of the lien or date of registration of the fiduciary collateral.*
 - *In no more than 5 (five) months after the end of fiscal year, the Board of Directors prepares the Annual Report, signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that assume office in the relevant fiscal year to be submitted to the Annual GMS.*

- Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
 - Mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan mengumumkan secara tertulis mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.
 - Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
 - Rencana Kerja dan Anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama;
 - Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan RKA setiap triwulan, tahunan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemegang Saham.
4. Terkait dengan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP)
- Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Perusahaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Perusahaan sebelumnya;
 - b. Posisi Perseroan saat ini;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan; dan
 - d. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Bisnis Perusahaan.
 - Dewan Komisaris bersama Direksi menandatangani Rencana Bisnis Perusahaan yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum RBP periode sebelumnya habis masa berlakunya.
 - Perubahan atas RBP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi.
- *Summoning and holding Annual GMS and/or Extraordinary GMS;*
 - *Announcing in 1 (one) daily periodical in the Indonesian language newspaper that is issued and distributed in the domicile/area where the Corporation carries out their business activities and announcing in writing the plan of the merger, dissolution, and acquisition of the Corporation no later than 30 (thirty) days before the GMS is summoned;*
 - *Providing GMS materials to Shareholders;*
 - *Requesting GMS approval in the event of amendment to the Articles of Association of the Corporation.*
3. *Concerning the Work Plan and Budget*
- *Preparing Work Plan and Budget as annual collaboration of business plan;*
 - *Work Plan and Budget shall at least cover the details of work programs and annual budget;*
 - *Submitting the Work Plan and Budget to the Board of Commissioners no later than the end of November to be jointly signed;*
 - *Presenting the Work Plan and Budget that has been jointly signed with the Board of Commissioners in the GMS to be ratified; and*
 - *Submitting the report on Work Plan and Budget implementation quarterly, annually, and as required to the Shareholders.*
4. *Concerning the Corporate Business Plan*
- *The Board of Directors shall prepare the Corporate Business Plan that must cover the following:*
 - a. *Evaluation of the previous Corporation Business Plan implementation;*
 - b. *Current position of the Corporation;*
 - c. *Assumptions used to prepare Corporate Business Plan; and*
 - d. *Establishment of Vision, Missions, Objectives, Strategy, Policy, and Work Programme of the Corporate Business Plan.*
 - *The Board of Commissioners with the Board of Directors shall sign the Corporation Business Plan as agreed and submit the document to the Shareholders no later than 60 (sixty) days before the end of the previous Corporate Business Plan period.*
 - *Amendment to Corporate Business Plan can only be carried out in the event of material changes outside the control of the Board of Directors.*

- Direksi harus menyampaikan usulan atau revisi RBP kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan dalam RUPS.
5. Terkait dengan Laporan Tahunan
- Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan dalam RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
 - Menandatangani Laporan Tahunan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham.
 - Menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan dinyatakan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan jika tidak menandatangani Laporan Tahunan.
6. Terkait dengan Pengurusan Manajemen Risiko
- Menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko, dan penanganannya;
 - Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko;
 - Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan Perseroan;
 - Menyusun rencana kerja Perseroan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko;
 - Melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS);
 - Memastikan penerapan sistem manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Menetapkan toleransi risiko Perseroan sesuai dengan kapasitas risikonya;
 - Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- *The Board of Directors must submit input or revision of Corporate Business Plan to the Board of Commissioners to obtain response and approval to be proposed in the GMS.*
5. *Concerning the Annual Report*
- *Preparing the Annual Report that consists of financial statements as a form of responsibility in managing the Corporation.*
 - *Submitting the Annual Report in the GMS after it is reviewed by the Board of Commissioners no later than 6 (six) months after the end of the Corporation's fiscal year.*
 - *Signing the Annual Report from the day of Summons to GMS to be reviewed by the Shareholders.*
 - *Stating reasons in writing, or in a separate letter attached to the Annual Report, if the Annual Report is not signed.*
6. *Concerning Risk Management*
- *Preparing a risk management policy consisting of the framework, risk management implementation stages, risk reporting, and risk mitigation;*
 - *Being responsible to carry out the risk management programme;*
 - *Disseminating the risk management Policy to all employees of the Corporation;*
 - *Developing Corporation work plan to implement risk management policy;*
 - *Carrying out the risk management programme (the programme consists of risk identification and mitigation in the business process, projects, and proposed Corporation actions to be approved by the Board of Commissioners and/or in the GMS);*
 - *Ensuring adequate implementation of a risk management system that is in line with the characteristics, complexity, and risk profile of the Corporation. Establishing Corporation risk tolerance in line with the risk capacity;*
 - *Ensuring the follow-up of any material risks and the impacts arising from such risks;*
 - *Submitting a report on that covers the development and issues of material risks along with the completed, ongoing, and planned corrective actions to the Board of Commissioners frequently.*

7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

- Perseroan menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha, dan aset Perseroan;
- Memberikan masukan atas sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan serta melakukan tindak lanjut dan *monitoring* atas rekomendasi yang diberikan oleh Divisi *Internal Audit* untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif;
- Menyelenggarakan pengawasan internal dengan membentuk Divisi *Internal Audit*. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Divisi *Internal Audit* diatur dalam *Internal Audit Charter* yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara periodik kepada Dewan Komisaris;
- Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di Perseroan.

8. Tugas sebagai Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan

Anggota Direksi dapat diangkat menjadi Komisaris di anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Anggota Direksi yang menjabat sebagai Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

9. Tugas terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

- Memastikan SMAP, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan di Perseroan;
- Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam seluruh proses dalam Perseroan;
- Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari SMAP;
- Mengomunikasikan Pedoman SMAP secara internal dan eksternal;
- Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP;
- Memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya;
- Mengarahkan dan mendukung Insan Perseroan untuk berkontribusi pada keefektifan SMAP;

7. Concerning the Internal Control System

- *The Corporation establishes policy concerning an effective internal control system to secure the investment, business activities, and assets of the Corporation;*
- *Providing input on an internal control system implemented by the Corporation and following up, as well as monitoring, the recommendation provided by the Internal Audit Division to ensure effective internal control;*
- *Carrying out the internal control system by forming the Internal Audit Division. Further explanation concerning the tasks and functions of the Internal Audit Division is detailed in the Internal Audit Charter as set forth with the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
- *Submitting the report concerning the implementation of the internal supervisory function periodically to the Board of Commissioners;*
- *Maintaining and evaluating the quality of the internal control function in the Corporation.*

8. Duties as the Commissioner of Subsidiary and/or Joint Venture

The members of the Board of Directors may be appointed as Commissioner in subsidiary and/or joint venture without disregarding the prevailing regulations. The members of the Board of Directors that act as Commissioner of subsidiary and/or joint venture have tasks and authorities as set forth by the Articles of Association of the subsidiary and/or joint venture.

9. Duties concerning the Anti-Bribery Management System (SMAP)

- *Ensuring that SMAP, including its policies and objectives, has been established, implemented, maintained, and adequately reviewed in order to prevent the risk of bribery in the Corporation;*
- *Ensuring the integration of SMAP requirements to all process of the Corporation;*
- *Providing adequate and appropriate resources for effective operations on SMAP;*
- *Communication SMAP Guidelines internally and externally;*
- *Communicating internally concerning the importance of effective anti-bribery management and fulfillment of SMAP requirements;*
- *Ensuring that SMAP is properly designed to achieve the target;*
- *Directing and supporting the Employees of the Corporation to contribute to SMAP effectiveness;*

- Mendorong budaya anti penyuapan sesuai dengan yang di telah ditetapkan Perseroan;
 - Mendorong peningkatan berkelanjutan atas implementasi sistem manajemen anti penyuapan di Perseroan;
 - Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di unit kerjanya;
 - Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual;
 - Memastikan tidak ada Insan Perseroan yang mengalami tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan Perseroan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis Perseroan (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);
 - Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke Dewan Komisaris mengenai implementasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.
- *Supporting proper anti-bribery culture as implemented by the Corporation;*
 - *Supporting continuous improvement of the anti-bribery management system implementation in the Corporation;*
 - *Supporting other relevant management roles to leverage their leadership in preventing and detecting bribery occurring in their working unit;*
 - *Encouraging the usage of reporting procedures for suspected and actual bribery;*
 - *Ensuring that there is no Employee of the Corporation experiencing retaliation, discrimination, or disciplinary action for the report they made in good faith or based on fair confidence of the violation or suspected violation due to the Corporation's anti-bribery policy, or for refusing to participate in bribery even though such refusal may cause loss to the business of the Corporation (unless there is individual participation in such violation); and*
 - *During the planned period, reporting to the Board of Commissioners of the implementation concerning anti-bribery management system and serious accusation or structured bribery.*

Wewenang

1. Kolegial

- Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas, hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga;
- Mewakili Perseroan di luar atau di dalam pengadilan;
- Menetapkan visi, misi, dan strategi Perseroan;
- Menetapkan kebijakan Perseroan;
- Mengajukan usulan pengelolaan Perseroan yang memerlukan persetujuan RUPS dan melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS;
- Menetapkan sasaran kinerja dan evaluasi kinerja Perseroan;
- Menetapkan usulan dan perubahan Rencana Bisnis Perusahaan dan RKA Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Authorities

1. Collegial

- *Appointing, transferring, dismissing, and assigning duties, rights, and obligations of the employees in accordance with the prevailing laws and regulations;*
- *Signing legally binding contracts with third parties;*
- *Representing the Corporation outside or within the court;*
- *Establishing the vision, missions, and strategy of the Corporation;*
- *Establishing Corporation policy;*
- *Submitting a Corporation management proposal that requires approval of the GMS and implementation in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Corporation and Resolutions of the GMS;*
- *Establishing performance objectives and performance evaluation of the Corporation; and*
- *Establishing the proposal and changes to the Corporate Business Plan and Corporation Work Plan and Budget in accordance with the prevailing laws and regulations.*

2. Wewenang yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris

- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan modal Perseroan dalam perusahaan lain;
- Perubahan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan yang membutuhkan pengesahan RUPS;
- Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati sesuai dengan kebijakan keuangan dan akuntansi yang berlaku di Perseroan;
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun yang nilai pertahun bukunya ;
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak yang nilainya sesuai dengan kebijakan keuangan dan akuntansi yang berlaku di Perseroan;
- Menetapkan, menyesuaikan mengubah struktur/susunan Direksi Perseroan;
- Pengelolaan dana cadangan oleh Direksi agar dana tersebut memperoleh laba;
- Menetapkan Rencana Bisnis Perseroan;
- Menetapkan dan merubah logo Perseroan.

3. Wewenang yang harus mendapat persetujuan dari RUPS

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

2. *Authorities requiring written approval from the Board of Commissioners*

- *Borrowing or lending money on behalf of the Corporation (excluding withdrawing Corporation money at the bank);*
- *Establishing a new business or participating in other companies, both in Indonesia and abroad;*
- *Releasing a part of all of authorised capital of the Corporation in other companies;*
- *Amending the budget in the Corporation Work Plan and Budget (RKA) that requires it with approval gained from the GMS;*
- *Writing off bad debts and dead inventory from bookkeeping in line with the prevailing finance and accounting policy in the Corporation;*
- *Releasing and writing off moveable assets within economic life normally applicable in the industry, in general up to 5 (five) years, whose value per fiscal year;*
- *Releasing and writing off immovable assets of which the value is in line with the prevailing finance and accounting policy in the Corporation;*
- *Establishing, adjusting, and changing the structure of the Board of Directors of the Corporation;*
- *Managing reserve funds by the Board of Directors in order to gain profits;*
- *Establishing Corporation Business Plan; and*
- *Establishing and Changing the Corporation's logo.*

3. *Authorities requiring approval from the GMS*

Legal actions to transfer, release the rights, or make a debt guarantee of more than 50% (fifty percent) of the total net worth of the Corporation in one fiscal year, whether it is in one transaction or several individual transactions or interrelating transactions.

Hak

1. Menerima penghasilan yang paling banyak terdiri atas:
 - Gaji;
 - Tunjangan;
 - Fasilitas; dan/atau
 - Tantiem atau insentif kinerja yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
2. Memperoleh hak cuti, sebagai berikut:
 - Cuti tahunan;
 - Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji;
 - Cuti bersalin;
 - Cuti alasan penting; dan
 - Cuti sakit.

Kewajiban

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan.
5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.
7. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
8. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rights

1. Receiving income that at most consists of:
 - Salary;
 - Allowance;
 - Facilities; and/or
 - Performance bonus or incentive whose amount is determined by the GMS.
2. Receiving rights of leave as follows:
 - Annual leave;
 - Sabbatical/long leave/Hajj pilgrimage;
 - Maternity leave;
 - Bereavement leave; and
 - Sick leave.

Obligations

1. Endeavoring and guaranteeing the implementation of the Corporation's business and activities in accordance with the goals and objectives and business activities;
2. Preparing Corporation Work Plan and Budget and its amendment and submitting the document to the Board of Commissioners no later than the end of November.
3. Preparing the Register of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, and Minutes of Directors' Meeting;
4. Preparing Annual Report as a form of responsibility in managing the Corporation;
5. Preparing financial statements in line with Finance Accounting Standards and submitting the document to a Public Accountant to be audited;
6. Maintaining and storing the Register of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Board of Directors' Meeting, Annual Report, and Corporate financial documents in the Corporation's domicile;
7. Preparing the organisational structure of the Corporation along with the details and the duties;
8. Providing explanation to the matters being questioned or requested by the Board of Commissioners;
9. Carrying out other obligations in line with the provisions as set forth by the Articles of Association of the Corporation and as determined by the GMS in accordance with the prevailing laws and regulations.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Scope of Delegation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembedaan tugas di antara anggota Direksi. Pembedaan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perseroan.

The Board of Directors has collegial duties, but in order to be more efficient and effective in carrying out the tasks, delegation of duties is done among the members of the Board of Directors. The assignment of duties among the Directors does not eliminate collegial responsibilities in the management of the Corporation.

Direktur Utama *President Director*

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 2. Berperan sebagai wakil Perseroan dalam berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan. 3. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan semua kegiatan di seluruh Direktorat. 4. Menetapkan kebijakan Perseroan yang mencakup seluruh aktivitas Perseroan. 5. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol internal serta mengevaluasi pelaksanaannya. 6. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang akan ditimbulkan telah ditetapkan rencana mitigasinya dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. 7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan. 8. Membangun budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan. 9. Memastikan Implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Perkeretaapian, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Mutu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. 10. Memberikan persetujuan rencana audit tahunan. 11. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal. 12. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan manajemen mutu. 13. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perseroan. 14. Memastikan pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan target. 15. Memberikan laporan kepada pemangku kepentingan utama mengenai <i>progress</i> pembangunan proyek MRT Jakarta. 16. Menyampaikan informasi Perseroan kepada Pemangku Kepentingan. 17. Jika salah seorang Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Rapat Direksi dapat menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya untuk dapat berhak dan berwenang atas nama Direktur yang bersangkutan serta mewakili Perseroan. 18. Sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; • Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acting for and on behalf of the Directors and represent the Corporation.</i> 2. <i>Acting as a representative of the Corporation. in coordination with the Stakeholders.</i> 3. <i>Leading, controlling, and coordinating all activities in all Directorates.</i> 4. <i>Establishing Corporation policies that cover all Corporation activities.</i> 5. <i>Establishing policies and strategies in the areas of governance, risk management and internal control and evaluate their implementation.</i> 6. <i>Ensuring that all material risks and impacts that will result from the mitigation plan have been determined and reported to the Board of Commissioners periodically.</i> 7. <i>Ensuring that the application of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Corporation.</i> 8. <i>Building culture that manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction.</i> 9. <i>Ensuring the Implementation of Occupational Safety and Health Systems, Railway Safety, Environmental Management Systems, and Quality Management Systems in accordance with the standards as set forth by the prevailing laws and regulations.</i> 10. <i>Giving approval for the annual audit plan.</i> 11. <i>Being responsible for overseeing the follow-up of the results of the audit both internally and externally.</i> 12. <i>Being responsible for overseeing the follow-up to the results of quality management supervision.</i> 13. <i>Performing overall supervision of the implementation of the Corporation's performance.</i> 14. <i>Ensuring the achievements of the Corporation performance are in accordance with the targets.</i> 15. <i>Providing reports to key stakeholders. regarding the progress of the Jakarta MRT project development.</i> 16. <i>Delivering Corporation information to Stakeholders.</i> 17. <i>If one of the Directors is absent or is unable to attend due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director or the a joint decision attained from the Directors' Meeting can appoint one of the other Directors to be entitled and authorized on behalf of the Director concerned and represent the Corporation.</i> 18. <i>Being the person responsible for implementing and monitoring GCG, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitor and maintain that the Corporation business activities do not deviate from the applicable provisions;</i> • <i>Monitor and maintain the Corporation's compliance with all agreements and commitments made by the Corporation with third parties.</i> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| 19. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik, baik yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun secara penilaian sendiri. | 19. <i>Being responsible for overseeing the follow-up of the results of the good corporate governance implementation assessment both by external parties and by self-assessment.</i> |
| 20. Menetapkan kebijakan tentang penyusunan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Perseroan. | 20. <i>Determining policies concerning the development of Corporation Key Performance Indicator (KPI).</i> |
| 21. Mengembangkan dan mengkomunikasikan pemahaman strategi bisnis Perseroan. | 21. <i>Developing and communicating the understanding of Corporation business strategy.</i> |
| 22. Mengembangkan Rencana Bisnis Perseroan guna menjamin keberlanjutan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta. | 22. <i>Developing Corporation Business Plan to ensure the sustainability and continuity of the management and operations of MRT Jakarta.</i> |
| 23. Me- <i>monitoring</i> pencapaian dan evaluasi sasaran kinerja Perseroan. | 23. <i>Monitoring the achievement and evaluation of Corporation performance objectives.</i> |
| 24. Menyetujui alternatif strategi untuk mencapai sasaran Perseroan. | 24. <i>Approving strategy alternatives to achieve Corporation objectives.</i> |
| 25. Menetapkan dan mengembangkan strategi keberlanjutan dan pengembangan Perseroan. | 25. <i>Determining and develop strategy for the sustainability and development of the Corporation.</i> |
| 26. Menetapkan visi dan misi Perseroan | 26. <i>Determining the vision and missions of the Corporation.</i> |
| 27. Menetapkan <i>Business Process Framework</i> Perseroan. | 27. <i>Determining Corporation Business Process Framework.</i> |
| 28. Menetapkan rencana pengelolaan mutu Perseroan dan memonitor penerapannya. | 28. <i>Determining Corporation quality management plan and monitor its implementation.</i> |
| 29. Menetapkan dan mengembangkan <i>Knowledge Management System</i> Perseroan. | 29. <i>Determining and developing the Corporation Knowledge Management System.</i> |
| 30. Menetapkan dan mengembangkan <i>Improvement program</i> Perseroan. | 30. <i>Determining and developing the Corporation Improvement Programme.</i> |
| 31. Menetapkan kebijakan dan prosedur <i>quality</i> Perseroan. | 31. <i>Determining Corporation policy and quality procedures.</i> |
| 32. Memonitor pengelolaan hubungan dengan Pemangku Kepentingan dan media. | 32. <i>Monitoring relationship management with Stakeholders and the media.</i> |
| 33. Me- <i>monitoring</i> pengelolaan pengembangan <i>image</i> Perseroan dan komunikasi di dalam dan ke luar Perseroan. | 33. <i>Monitoring the management of Corporation image development and internal and external communication.</i> |

| Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | |
|---|--|
| Tugas Pokok | Main Tasks |
| 1. Bertanggung jawab atas pembangunan prasarana dan sarana MRT Jakarta; | 1. <i>Being responsible for the construction of MRT infrastructure and facilities in Jakarta;</i> |
| 2. Pengendalian biaya, waktu, maupun kualitas dalam kegiatan pembangunan MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan Direksi; | 2. <i>Controlling the cost, time, and quality in MRT Jakarta development activities in accordance with the strategy set by the Directors;</i> |
| 3. Mengoordinasikan dan mengawasi semua pelaksanaan proyek yang berada dalam kewenangannya; | 3. <i>Coordinating and supervising all project implementation which is within its authority;</i> |
| 4. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan Konstruksi; dan | 4. <i>Building culture that manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in Construction management; and</i> |
| 5. Mengimplementasikan aspek-aspek <i>Governance, Risk and Compliance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan. | 5. <i>Implementing the aspects of Governance, Risk, and Compliance in the management of the Corporation.</i> |

| Aspek Teknis | Technical Aspects |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian atas aspek-aspek strategis dari setiap kegiatan besar dan pelaksanaan manajemen risiko konstruksi. Menjamin terlaksana secara efektif, baik pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan, maupun pada tahap persiapan operasi prasarana dan sarana MRT Jakarta atas aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> Rencana pengelolaan proyek; Sistem kontrol dan pengendalian kualitas; Manajemen risiko dan pengelolaan keselamatan. Pelaksanaan kajian terhadap produk atau output pekerjaan. Ketersediaan jadwal induk dari tahap perencanaan sampai selesainya pembangunan. Ketersediaan <i>Project Charter</i>. Mengoordinasikan konsultan yang terlibat pada masa konstruksi. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan dalam perancangan dan spesifikasi teknis <i>Rolling Stock, Station Building & facilities</i>, dan berbagai sistem perkeretaapian dan pekerjaan terkait lainnya. Berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan Bisnis dalam perancangan dan spesifikasi <i>retail</i> Mengarahkan dan mengoordinasikan Manajer Proyek dalam rangka memastikan seluruh aktivitas telah berjalan dalam arah pencapaian tujuan pekerjaan, serta dapat diselesaikan dalam batasan-batasan waktu dan pendanaan. Memimpin penyusunan prosedur operasional untuk pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi atau selaras dengan kebutuhan pencapaian sasaran proyek. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kerapian administrasi kontrak konstruksi, termasuk kelengkapan perizinan dan lisensi terkait yang harus diperoleh. Mengembangkan Rencana Bisnis Perusahaan dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan melaksanakan pekerjaan pembangunan. | <ol style="list-style-type: none"> <i>Controlling the strategic aspects of each major activity and the implementation of construction risk management.</i> <i>Ensuring the effective implementation, both at the stage of preparation and implementation of development as well as at the stage of preparation for the operation of infrastructure and facilities of the Jakarta MRT on the following aspects:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Project management plan;</i> <i>Quality control and management system;</i> <i>Risk and safety management.</i> <i>Carrying out a review of the product or work output.</i> <i>Availability of a master schedule from the planning stage to the completion of development.</i> <i>Availability of the Project Charter.</i> <i>Coordinating consultants involved in the construction period.</i> <i>Coordinating with the Operation and Maintenance Director on the design and technical specifications of the Rolling Stock, Station Building & facilities, and various railway systems and other related works.</i> <i>Coordinating with the Business Development Director on retail design and specification.</i> <i>Directing and coordinating the Project Manager in order to ensure all activities have been carried out so as to achieve the work objectives and can be completed within time and funding constraints.</i> <i>Leading the preparation of operational procedures for project implementation and ensuring that procedures have met or are aligned with the needs of achieving the project objectives.</i> <i>Being responsible for the correctness and tidiness of administration of construction contracts, including the completeness of permits and related licenses that must be obtained.</i> <i>Developing the organisation's long-term plan in relation to the target of capacity building or ability to carry out development work.</i> |
| Tanggung Jawab Pada Tahap Pra Konstruksi | Responsibilities in Pre-Construction Stage |
| <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Proyek <ol style="list-style-type: none"> Melakukan finalisasi rencana kerja; Menetapkan strategi pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan proyek; Menganalisis perkiraan biaya dan menetapkan rencana biaya proyek secara keseluruhan; Membuat jadwal utama proyek secara keseluruhan; Mengembangkan sistem atau prosedur komunikasi dan persetujuan; Mempersiapkan perencanaan tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan aspek pengelolaan lingkungan. Reviu Desain <ol style="list-style-type: none"> Memastikan spesifikasi design dan gambar termasuk <i>scope of work</i> kontraktor dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan strategi Perseroan; Sebagai representatif dari pemegang saham dan memberikan persetujuan terhadap seluruh dokumen konstruksi; Mengoordinasikan integrasi desain antar kontraktor; Memimpin rapat koordinasi proyek dengan pihak eksternal pemangku kepentingan; Memastikan terpenuhinya aspek hukum; Memastikan <i>design</i> konstruksi selaras dengan ketentuan perundangan-undangan standar bangunan dan aspek lingkungan. | <ol style="list-style-type: none"> <i>Project Planning</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Finalising the work plan;</i> <i>Establishing procurement strategies related to project implementation;</i> <i>Analysing cost estimates and determine overall project cost plans;</i> <i>Making the overall project master schedule;</i> <i>Developing a system or procedure for communication and approval;</i> <i>Preparing planning on occupational aspects of health and safety and environmental management.</i> <i>Design Review</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Ensuring the design specification and picture including the scope of work of contractor in project implementation is in accordance with the Corporation strategy;</i> <i>Being a representative of the shareholders and giving approval to all construction documents;</i> <i>Coordinating design integration among contractors;</i> <i>Leading project coordination meeting with external shareholders</i> <i>Ensuring compliance with legal aspects;</i> <i>Ensuring that construction design is in accordance with the prevailing laws and regulations of building standards and environmental aspects.</i> |

| <p>3. Berkaitan dengan Pengadaan Konstruksi Melaksanakan dan memastikan pengadaan kontrak konstruksi sesuai rencana sampai dengan penandatanganan kontrak.</p> | <p>3. <i>In Regard to the Procurement of Construction Projects Carrying out and ensuring that procurement of construction contracts is in accordance with the plan until the signing of the contract.</i></p> |
|--|---|
| Tanggung Jawab Pada Tahap Konstruksi | <i>Responsibilities in the Construction Stage</i> |
| <p>1. Persiapan Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan mengaplikasikan system pengendalian proyek. • Membantu dalam pemilihan dan pelaksanaan sistem manajemen proyek. • Memonitor arus kas proyek. • Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi proyek. • Memeriksa kesiapan implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek lingkungan. <p>2. Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas aktivitas konstruksi lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap kontrak dan peraturan perundangan. • Memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai aktivitas dan interaksi dengan pihak lain mencakup kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan <i>supplier</i>. • Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas. • Mengendalikan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan pengamanan area proyek oleh kontraktor dalam tahapan konstruksi. • Memastikan administrasi pembayaran proyek terkait pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai jadwal. • Melakukan review dan mempersiapkan rekomendasi pembayaran atas seluruh tagihan. • Melakukan negosiasi terhadap jumlah pembayaran untuk <i>variation order</i>, <i>price adjustment</i>, <i>delay payment</i>, dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan konstruksi. • Mengawasi <i>progress</i> konstruksi dan mengembangkan strategi penyesuaian jadwal. • Mengoordinasikan rapat integrasi pelaksanaan proyek dan sistem dokumentasinya. • Memberikan solusi atas perselisihan dalam aspek waktu, kepraktisan, maupun biaya. • Memastikan terlaksananya pelaporan kemajuan konstruksi bulanan. • Mengoordinasikan dokumentasi proyek secara keseluruhan. <p>3. Penyelesaian Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi pengguna jasa kereta dalam melakukan perjalanan. • Memastikan terlaksananya inspeksi terhadap pelaksanaan pekerjaan seluruh konstruksi sebelum serah terima maupun habisnya masa jaminan kontraktor. • Memastikan aspek keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan telah dipenuhi oleh kontraktor sesuai dengan kontrak. • Melakukan review terhadap dokumen yang diberikan oleh kontraktor. • Menetapkan penjadwalan penyelesaian proyek. • Memastikan serah terima berlangsung sesuai dengan kontrak. | <p>1. <i>Project Preparation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Developing and applying a project control system.</i> • <i>Assisting the selection and implementation of project management systems.</i> • <i>Monitoring project cash flow.</i> • <i>Establishing project information and communication procedures.</i> • <i>Checking the readiness to implement occupational safety and health aspects and environmental aspects.</i> <p>2. <i>During the Construction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Being responsible for field construction activities and guaranteeing compliance with the contract and the prevailing laws and regulations.</i> • <i>Submitting report to the Shareholders concerning the activities and interactions with other parties including contractors, consultants, sub-consultants, and suppliers.</i> • <i>Developing and implementing control plan and quality assurance.</i> • <i>Controlling the implementation of occupational safety and health system, environmental management, and security of project area by the contractors in construction stage.</i> • <i>Ensuring project payment administration concerning construction works are on time.</i> • <i>Reviewing and preparing payment recommendation for all invoices.</i> • <i>Negotiating the amount of payment for variation order, price adjustment, delay payment, and other payment concerning construction works.</i> • <i>Supervising construction progress and developing strategies to adjust the schedule.</i> • <i>Coordinating integration meeting for project implementation and its documentation system.</i> • <i>Providing solutions on disputes in the aspects of time, practicality, and fee.</i> • <i>Ensuring the implementation of monthly construction progress report.</i> • <i>Coordinating the overall project documentation.</i> <p>3. <i>Project Completion</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinating with the Central Government or Regional Government and other related agencies or institutions in order to prepare the sustainable facilities and service system for passengers during their trip.</i> • <i>Ensuring the implementation of inspection to the implementation of all construction works before handover or the end of contractor guarantee period.</i> • <i>Ensuring that safety and quality aspects as set forth have been fulfilled by the contractors as stated in the contract.</i> • <i>Reviewing documents provided by contractors.</i> • <i>Establishing project completion schedule.</i> • <i>Ensuring that the handover is carried out in accordance with the contract.</i> |

Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operations and Maintenance Director

| Tugas Pokok | Main Tasks |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi penyusunan, penetapan dan evaluasi kebijakan, prosedur serta <i>Service Level Agreement (SLA)</i> sarana dan prasarana MRT. 2. Memastikan kebijakan tahapan pembangunan, survei, dan standarisasi desain kelayakan operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharaannya. 3. Menetapkan standar layanan prima operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharaannya (<i>Reliability Availability Maintainability Safety</i>). 4. Menetapkan standar keselamatan dan keamanan dalam operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta. 5. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimum operasional (<i>service level</i>) MRT Jakarta. 6. Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dari tahap <i>basic design</i> sampai serah terima pekerjaan sebelum dioperasikan. 7. Bertanggung jawab atas persiapan pengoperasian, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha prasarana dan sarana MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan oleh Direksi dan standar pelayanan minimum. 8. Memastikan kajian sistem dan struktur kelembagaan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan. 9. Memastikan kesiapan operasi dan pemeliharaan melalui pelaksanaan <i>Independent Safety Assessment</i> atau mekanisme <i>assurance</i> lainnya yang sesuai. 10. Membantu berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dalam perancangan dan spesifikasi teknis <i>Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, Power System & OCS System, Environmental Control System</i> dan <i>Automatic Fare Collection (AFC)</i>. 11. Mengimplementasikan aspek-aspek <i>Governance, Risk and Compliance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan 12. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi. 13. Memonitor penyusunan dan penerapan prosedur dan kebijakan mengenai pelayanan pelanggan. 14. Menetapkan target kinerja serta tolak ukur keberhasilan pelayanan pelanggan baik jangka panjang, menengah dan pendek. 15. Memonitor pelaksanaan program pelayanan pelanggan. 16. Memonitor pengelolaan hubungan dengan pelanggan. 17. Memonitor pengelolaan logistik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coordinating the preparation, establishment, and evaluation of policies, procedures, and the Service Level Agreement (SLA) of facilities and infrastructure of MRT.</i> 2. <i>Ensuring the policies for construction stages, survey, and design standardization of facility and infrastructure operational feasibility and the maintenance program</i> 3. <i>Establishing the standards of excellent service for facility and infrastructure operations and the maintenance program (Reliability Availability Maintainability Safety)</i> 4. <i>Establishing safety and security standards in operations and maintenance of MRT Jakarta.</i> 5. <i>Coordinating the preparation and establishment of operational minimum service level of MRT Jakarta.</i> 6. <i>Taking responsibility for the implementation of construction, from basic design stage until handover before operations.</i> 7. <i>Being responsible for the preparation of operations, operations, maintenance, and business of facility and infrastructure of MRT Jakarta in accordance with the strategy as set forth by the Board of Directors and minimum service standards.</i> 8. <i>Ensuring the review of institutional system and structure for operations and maintenance.</i> 9. <i>Ensuring operational and maintenance readiness through the implementation of an Independent Safety Assessment or other appropriate assurance mechanism.</i> 10. <i>Helping to coordinate with the Construction Director in terms of design and technical specification of Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, Power Systems & OCS Systems, Environmental Control Systems, and Automatic Fare Collection Systems.</i> 11. <i>Implementing Governance, Risk, and Compliance aspects in the management of the Corporation.</i> 12. <i>Building culture that manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in construction management.</i> 13. <i>Monitoring the preparation and implementation of procedures and policies concerning customer service.</i> 14. <i>Setting performance target and success benchmark for customer service in short-, medium- and long-term.</i> 15. <i>Monitoring the implementation of the customer service programme.</i> 16. <i>Monitoring relationship management with customers.</i> 17. <i>Monitoring logistics management.</i> |

| Aspek Teknis | Technical Aspects |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keteknisan dan kerekayasaan baik di lingkungan internal (tim) maupun dengan <i>technology provider</i>. 2. Memberikan dukungan teknis pada kegiatan pelaksanaan proyek guna memenuhi standar desain yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Pengendalian Aspek Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan setiap upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis dalam organisasi. b. Menentukan, menginformasikan, mensosialisasikan, dan menetapkan pelaksanaan standar atau ketentuan teknis. c. Memonitor dan mengusulkan perubahan-perubahan atas solusi atau hasil desain dalam hubungannya terhadap lingkup, kemampuan atau kinerja teknis, efektivitas biaya, ketahanan atau umur layanan, dan kemudahan pemeliharaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ensuring the technical and engineering aspects both in the internal environment (team) and with technology providers.</i> 2. <i>Providing technical support to project implementation activities in order to meet predetermined design standards.</i> 3. <i>Control of Technical Aspects</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Coordinating every effort in the context of increasing technical knowledge in the organisation.</i> b. <i>Determining, informing, disseminating, and determining the implementation of standards or technical provisions.</i> c. <i>Monitoring and proposing changes to the solution or design results in relation to the scope, capability or technical performance, cost effectiveness, durability or service life, and ease of maintenance of Jakarta MRT Operation Preparation.</i> |

| Persiapan Operasi MRT Jakarta | Preparation of MRT Jakarta Operation |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasan dengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta. Melakukan koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang berbasis pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian. Memberi masukan kepada unit kerja SDM dalam rangka struktur organisasi dan sertifikasi bagi karyawan operasional dan pemeliharaan sesuai ketentuan. Koordinasi dalam kesiapan <i>database asset</i> terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan. Menetapkan kebijakan investasi dan <i>outsourcing</i> perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem MRT. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi pengguna jasa kereta dalam melakukan perjalanan. Memastikan komunikasi dan edukasi bagi pelanggan pengguna MRT Jakarta untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> <i>Coordinating the formulation and development of policies in the context of work safety and harmony with existing work safety standards, including the safety of users of the Jakarta MRT.</i> <i>Coordinating the preparation of provisions and guidelines for the operation and maintenance of the Jakarta MRT based on regulations issued by the authorised institutions / institutions.</i> <i>Coordinating with authorised institutions in the context of determining standards for testing infrastructure or facilities before operation.</i> <i>Providing input to HR work units in the framework of organisational structure and certification for operational and maintenance employees in accordance with the provisions.</i> <i>Coordinating in the preparation of a database of assets related to railroad infrastructure and facilities, along with a maintenance schedule and control system.</i> <i>Establishing investment policies and outsourcing of infrastructure maintenance equipment and MRT system facilities.</i> <i>Coordinating with the Central Government or Regional Government and other related institutions or institutions in order to prepare facilities and a continuous service system for train passengers in traveling.</i> <i>Ensuring communication and education to the users of MRT Jakarta to maintain customer satisfaction and Corporate reputation.</i> |
| Aspek Perencanaan | Planning Aspects |
| <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dalam penetapan dan pengembangan standar teknis yang diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta. Memastikan ketersediaan tim yang berkemampuan dalam peningkatan kebutuhan perancangan terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem MRT Jakarta. Berkoordinasi dalam proses perencanaan pembuatan paket pekerjaan konstruksi dalam kaitan dengan pelaksanaan desain dan pekerjaan konstruksi. Membantu mengembangkan rencana strategi operasi dan pemeliharaan sistem MRT sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan guna menjamin keberlanjutan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta. Melakukan koordinasi penyusunan dan pengkajian rancangan teknis operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan hasil rancangan dalam kaitan dengan lingkup pembangunan, kinerja teknis, efektivitas biaya, usia layanan, dan aspek pemeliharaan. Melakukan koordinasi antar bidang disiplin dalam rangka kesuksesan operasi MRT Jakarta. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pengurusan seluruh perijinan yang diperlukan dalam keberlangsungan operasi dan pemeliharaan sistem MRT Jakarta. | <ol style="list-style-type: none"> <i>Coordinating the determination and development of technical standards required in the operation and maintenance of Jakarta MRT facilities.</i> <i>Preparing a team capable of increasing the design requirements related to the operations and maintenance of Jakarta MRT system.</i> <i>Coordinating in planning the construction work package in relation to the implementation of design and construction work.</i> <i>Helping to develop the operational and maintenance strategy for the MRT system as part of the Corporation Business Plan to ensure the sustainability and continuity of the operation and operation of the Jakarta MRT.</i> <i>Coordinating the preparation and review of operational, maintenance, and technical maintenance designs.</i> <i>Monitoring and recommending changes to the design results in relation to the scope of development, technical performance, cost effectiveness, service life, and maintenance aspects.</i> <i>Coordinating between disciplines in the context of the success of the Jakarta MRT operation.</i> <i>Being responsible for preparing and administering all licenses needed in Jakarta MRT operation and maintenance.</i> |

**Tanggung jawab pada
Tahap Operasi dan Pemeliharaan**

Responsibilities in the Operation and Maintenance Stage

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Operasi dan Pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa kesiapan implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek lingkungan; • Memastikan perizinan operasi dan pemeliharaan didapatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Operasi dan Pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas aktivitas operasi dan pemeliharaan lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. • Memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai kinerja operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta. • Menetapkan kebijakan terkait interaksi dengan <i>vendor, supplier, dan tenant</i> dalam skema operasi dan pemeliharaan. • Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas. • Mengendalikan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan oleh selama tahapan operasi dan pemeliharaan. • Mengoordinasikan rapat integrasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan sistem dokumentasinya. • Memastikan terlaksananya pelaporan rutin terkait aspek-aspek operasi dan pemeliharaan. • Mengoordinasikan dokumentasi operasi dan pemeliharaan secara keseluruhan. • Menetapkan kebijakan sistem pengamanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan operasi dan pemeliharaan. • Memastikan implementasi sistem pengamanan sebagai bagian dari operasi dan pemeliharaan untuk menjamin keselamatan pengguna jasa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Operational and Maintenance Preparation</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Checking implementation readiness of occupational safety and health aspects and environmental aspects;</i> • <i>Ensuring that operational and maintenance permit has been obtained in accordance with the prevailing laws and regulations.</i> 2. <i>Operations and Maintenance</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Being responsible for field operational activities and maintenance and guaranteeing compliance with the prevailing laws and regulations.</i> • <i>Submitting a report to Shareholders concerning the operational and maintenance performance of MRT Jakarta.</i> • <i>Establishing policies concerning interaction with vendors, suppliers, and tenants in operational and maintenance scheme.</i> • <i>Developing and implementing a control plan and quality assurance.</i> • <i>Controlling the implementation of an occupational safety and health management system during the operational and maintenance stage.</i> • <i>Coordinating integration meeting for operational and maintenance implementation as well as a documentation system.</i> • <i>Ensuring the implementation of a routine report on operational and maintenance aspects.</i> • <i>Coordinating the overall operational and maintenance documentation.</i> • <i>Establishing an integrated safety system policy as a part of operational and maintenance service.</i> • <i>Ensuring the implementation of a security system as a part of the operational and maintenance service to guarantee passengers' safety.</i> |
|---|--|

**Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director**

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi <i>Information System & Technology, Finance & Accounting</i> dan Divisi <i>Human Capital</i>, dan berkoordinasi dengan Direksi. 2. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi. 3. Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan, dan akuntansi Perseroan. 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perseroan. 5. Berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan Bisnis untuk menetapkan Kebijakan Investasi. 6. Memfasilitasi proses perencanaan keuangan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan. 7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perseroan. 8. Melakukan pengendalian anggaran, biaya, dan pendapatan Perseroan. 9. Melakukan koordinasi laporan keuangan dan laporan RKAP. 10. Mengendalikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi administratif kegiatan impor keperluan konstruksi MRT Jakarta. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coordinating the preparation and determination of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Information System & Technology, Finance & Accounting Division and the Human Capital Division, and coordinate with the Directors.</i> 2. <i>Supervising and evaluating all activities related to the functions of the Directorate of Finance and Corporate Management.</i> 3. <i>Establishing the Corporation and financial and accounting policies.</i> 4. <i>Carrying out monitoring and evaluation of the realisation of the Corporation budget.</i> 5. <i>Coordinating with the Business Development Director to establish Investment Policy.</i> 6. <i>Facilitating the process of financial planning and Corporation Work Plan and Budget (RKA) preparation.</i> 7. <i>Monitoring and evaluating the realisation of Corporate budget.</i> 8. <i>Controlling the Corporation budget, costs, and revenues.</i> 9. <i>Coordinating financial statements and RKAP reports.</i> 10. <i>Controlling and coordinating the administrative functions of the import activities of the Jakarta MRT construction.</i> |
|--|--|

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director

- | | |
|---|--|
| <p>11. Menetapkan kebijakan teknologi dan sistem informasi Perseroan.</p> <p>12. Melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi Perseroan.</p> <p>13. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi dan sistem informasi Perseroan.</p> <p>14. Bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan dan penempatan hingga pemutusan hubungan kerja.</p> <p>15. Menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.</p> <p>16. Menetapkan standar kompetensi strategis untuk organisasi.</p> <p>17. Menetapkan pola pengembangan dan pelatihan karyawan.</p> <p>18. Menetapkan pola pengelolaan sistem kompensasi dan hubungan industri.</p> <p>19. Menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan tempat kerja yang aman dan nyaman.</p> <p>20. Melakukan koordinasi proses penilaian kinerja karyawan dan sistem <i>reward & punishment</i> atas prestasi kerja dan pelanggaran di Perseroan.</p> <p>21. Berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, khususnya dalam bidang <i>engineering</i> (keteknisan), untuk penyiapan dokumen pengadaan.</p> <p>22. Menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengakomodasi aspek keselamatan sesuai SMK3KP.</p> <p>23. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan masalah hukum.</p> <p>24. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha Perseroan.</p> <p>25. Melakukan <i>monitoring</i> Daftar Pemegang Saham dan pemutakhirannya.</p> <p>26. Memastikan ketersediaan sumber daya untuk implementasi fungsi <i>Governance, Risk and Compliance</i>.</p> <p>27. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi SMK3KP, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Mutu di lingkungan MRT Jakarta.</p> <p>28. Memastikan skema pendanaan dan ketersediaan alokasi anggaran untuk kejadian tanggap darurat keselamatan, keamanan dan bencana.</p> <p>29. Mengimplementasikan aspek-aspek <i>Governance, Risk and Compliance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan.</p> <p>30. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi.</p> | <p>11. <i>Establishing technology policies and information systems of the Corporation.</i></p> <p>12. <i>Developing technology and information systems in the Corporation.</i></p> <p>13. <i>Monitoring and evaluating the application of technology and information systems of the Corporation.</i></p> <p>14. <i>Taking responsibility in the system of Human Capital Management, from recruitment, development, and appointment until termination.</i></p> <p>15. <i>Establishing policies related to the Human Resources Management System.</i></p> <p>16. <i>Establishing strategic competency standards for the organisation</i></p> <p>17. <i>Establishing employee training and development plans.</i></p> <p>18. <i>Establishing a compensation and industrial relationship relation management system.</i></p> <p>19. <i>Establishing safe and comfortable working environment policy and management.</i></p> <p>20. <i>Coordinating the employee performance appraisal process and the implementation of reward & punishment systems for work performance and violations in the Corporation.</i></p> <p>21. <i>Coordinating with Construction Director and Operation and Maintenance Director especially on engineering aspects, to prepare procurement documents.</i></p> <p>22. <i>Establishing policy for goods and service procurement that accommodate safety aspects in accordance with SMK3KP.</i></p> <p>23. <i>Handling activities in relation with the management of legal issues.</i></p> <p>24. <i>Providing input based on legal aspects to the Board of Directors, in relation with the operations and development of Corporation business.</i></p> <p>25. <i>Monitoring the Register of Shareholders and its update.</i></p> <p>26. <i>Ensuring the availability of resource for the implementation of Governance, Risk, and Compliance functions.</i></p> <p>27. <i>Ensuring the availability of adequate resources to implement SMK3KP, the Environmental Management System, and the Quality Management System within MRT Jakarta.</i></p> <p>28. <i>Ensuring funding scheme and availability of budget allocation of safety, security, and disaster emergency response plan.</i></p> <p>29. <i>Implementing Governance, Risk, and Compliance aspects in the management of the Corporation.</i></p> <p>30. <i>Building culture that manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in construction management.</i></p> |
|---|--|

Direktur Pengembangan Bisnis
Business Development Director

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi <i>Commercial & Retail</i>, Divisi <i>Transit-Oriented Development</i>, dan Divisi <i>Business Expansion</i>. 2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan investasi Perseroan yang bersifat pengembangan usaha dan pembinaan kerja sama usaha yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan. 3. Menetapkan kebijakan pengembangan usaha <i>Non-Farebox</i> dan pengelolaan kawasan sekitar stasiun; 4. Menetapkan kebijakan kemitraan strategis. 5. Melakukan koordinasi dalam mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan Perseroan. 6. Menetapkan formulasi TOD, untuk menjamin kesinambungan (<i>sustainability</i>) operasional MRT Jakarta (<i>potential future direction of system, recommend service and capital improvements</i>). 7. Mencari peluang usaha sesuai dengan perencanaan jangka panjang Perseroan dengan persetujuan Direksi. 8. Membangun, mengorganisir, dan mengoordinasikan perencanaan dan strategi pengembangan usaha. 9. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan pengembangan usaha, khususnya penggunaan ruang dalam stasiun dan fasilitas kereta api, sampai tersusunnya model bisnis, perkiraan, dan validasi asumsi untuk kebutuhan pengembangan usaha. 10. Mengupayakan jalur pengembangan usaha yang menguntungkan dan tetap berada pada kondisi realistis dan sehat, selaras dengan bisnis utama Perseroan. 11. Melakukan koordinasi dalam merencanakan investasi jangka panjang Perseroan. 12. Memastikan optimalisasi atas biaya pengembangan usaha dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka perubahan rencana maupun implementasi pengembangan usaha. 13. Memastikan standar keselamatan, lingkungan, keamanan, dan mutu yang berlaku di MRT Jakarta dipatuhi dalam skema kerja sama dengan mitra. 14. Mengimplementasikan aspek-aspek <i>Governance, Risk and Compliance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan; dan 15. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan Konstruksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coordinating the preparation and establishment of policy on the implementation of all activities concerning the functions of Commercial & Retail Division, Transit-Oriented Development Division, and Business Expansion Division.</i> 2. <i>Coordinating the preparation of policy concerning Corporation investment management for business expansion and business cooperation assistance in relation with the business line of the Corporation.</i> 3. <i>Establishing the policy for Non-Farebox business development and development of area surrounding the stations;</i> 4. <i>Establishing the policy on strategic partnership.</i> 5. <i>Coordinating to develop strategic partnership with relevant stakeholders in order to develop the Corporation.</i> 6. <i>Establishing TOD formulation to ensure sustainability of MRT Jakarta operations (potential future direction of system, recommended service, and capital improvements).</i> 7. <i>Finding business opportunities in line with Corporation long-term planning with approval from the Board of Directors.</i> 8. <i>Developing, organizing, and coordinating the planning and strategy for business development.</i> 9. <i>Coordinating with Finance and Corporate Management Director in developing strategy and implementation of business development, especially for the utilisation of space in the station and railway facilities, to the establishment of business model, estimation, and assumption validation for business development.</i> 10. <i>Promoting profitable business development pathways while remaining in realistic and healthy condition, in line with the Corporation main business.</i> 11. <i>Coordinating in planning long-term investment of the Corporation.</i> 12. <i>Ensuring optimisation of business development cost and implementing the required measures in terms of plan changes and implementation of business development.</i> 13. <i>Ensuring that safety, environmental, security, and quality standards applicable in MRT Jakarta are fulfilled in collaboration scheme with partners.</i> 14. <i>Implementing Governance, Risk, and Compliance aspects in the management of the Corporation; and</i> 15. <i>Building culture that manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in Construction management.</i> |
|---|--|

Program Pengenalan Perseroan

Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Perseroan bagi anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama atau Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau dapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan yang diberikan meliputi:

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum;
- Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Perseroan;
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Sesuai putusan Pemegang Saham di luar RUPS, pada tahun 2020 Pemegang Saham mengangkat saudara Roy Rahendra sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi yang baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyelenggarakan program pengenalan Perseroan kepada beliau yang dilaksanakan pada 27 Mei 2020.

Program Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Perseroan menyertakan anggota Direksi pada program peningkatan kompetensi dan kapabilitas. Pelaksanaan program dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kerja Direksi. Sesuai program berbagi pengetahuan, anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kompetensi dan kapabilitas, akan berbagai informasi hasil program dengan anggota Direksi lainnya. Informasi tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020, lihat halaman 116 Laporan ini pada bahasan tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi.

Corporate Induction Program

The Corporation carries out the Corporate induction programme for the members of the Board of Directors appointed for the first time. The President Director or other Director appointed by the President Director or the Corporate Secretary is responsible for carrying out the induction programme.

The Induction Programme covers:

- *Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Boards of Directors in a legal context;*
- *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Corporation;*
- *Review of the Corporation concerning the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive advantages, risks, and other strategic issues;*
- *Remarks concerning the delegate authorities, internal and external audits, internal control system and policies, and Audit Committee.*

In accordance with the resolutions of Shareholders without GMS, in 2020 the Shareholders appointed Mister Roy Rahendra as the new Finance and Corporate Management Director. The Corporation has carried out the Corporate Induction Programme for him on May 27, 2020.

Competency and Capability Improvement Programme

In accordance with the Corporation Work Plan and Budget (RKAP), the Corporation obliges the members of the Board of Directors to participate in the competency and capability improvement programme. The programme aims to improve the effectiveness of the Directors' work. In line with this knowledge-sharing programme, the member of the Board of Directors that has participated in the competency and capability improvement programme will share the information of the results of the programme with the other members of the Board of Directors. Information concerning competency improvement activities participated in by the Board of Directors in 2020 is presented on page 116 of this Report under the discussion of Education and/or Training of the Board of Directors.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan;
- Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan;
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan mengenai tiap keputusan dan kebijakan Direksi yang diambil dalam rangka pengurusan Perseroan;
- Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan Perseroan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a. Tercapainya *Value of the Firm* sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
 - b. Terlaksananya kontrol internal dan manajemen risiko;
 - c. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perseroan;
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is in accordance with the following principles:

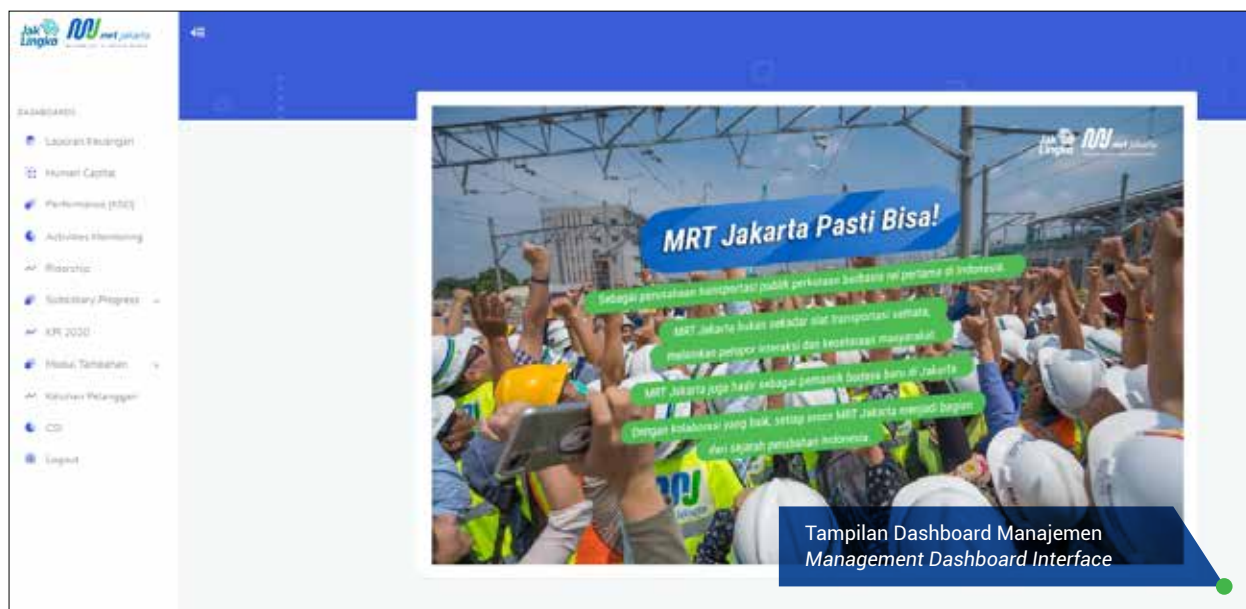
- *The Board of Commissioners respects the responsibilities and authorities of the Board of Directors in managing the Corporation as stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Corporation;*
- *The Board of Directors respects the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the policies and management of the Corporation;*
- *Each working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standardised mechanism or accountable correspondence;*
- *The Board of Commissioners is entitled to obtain accurate, complete, and timely Corporation information;*
- *The Board of Commissioners is entitled to obtain reports regarding each decision and policy of the Board of Directors taken in managing the Corporation;*
- *The Board of Directors is responsible for the accuracy, completeness, and timeliness of the delivery of Corporation information to the Board of Commissioners.*

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a check and balance relationship in order to achieve the goals of the Corporation. In line with this matter, in accordance with their respective functions, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a high commitment to jointly:

1. *Realise the goals of the Corporation in the form of achieving long-term business continuity as reflected in:*
 - a. *The achievement of the Value of the Firm as expected by the Shareholders;*
 - b. *The implementation of internal control and risk management;*
 - c. *Fair protection to the Shareholders' interests;*
 - d. *The implementation of leadership succession and continuity of management in all levels of the Corporation's organisation;*
 - e. *The fulfilment of the implementation of Good Corporate Governance.*

2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta strategi Perseroan:
 - a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja, dan anggaran tahunan;
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perseroan, unit-unit dalam organisasi Perseroan, dan personalianya;
 - d. Struktur organisasi Perseroan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perseroan.
2. Agree on the following matters to support the achievement of the Corporation's vision and missions as well as the Corporation strategy:
 - a. Business goals, strategies, long-term plans, as well as work plans and annual budgets;
 - b. Policies in meeting the provisions of the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Corporation;
 - c. Policies and methods to evaluate the performance of the Corporation, units of the Corporation's organisation and its personnel;
 - d. Organisational structure of the Corporation at the executive level that may support the achievement of the Corporation's business goals.

Management Dashboard



Pada tahun 2020, pembentukan *dashboard* manajemen digunakan seluruh Kepala Divisi, Direksi, dan Dewan Komisaris guna memantau secara *real-time* dan terkini mengenai isu-isu strategis perusahaan, seperti *Ridership*, KPI Korporasi, realisasi dana operasional dan proyek, pendapatan, keluhan pelanggan dan progres pembentukan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.

In 2020, the management dashboard was established and is now used by all Division Heads, Directors, and the Board of Commissioners to monitor Corporate strategic issues in real time, such as Ridership, Corporate KPI, realisation of operational and project funds, revenue, customer complaint, and progress of establishment of Subsidiaries/ Joint Venture.

Dashboard Manajemen terdiri dari 10 modul, antara lain:

1. Laporan Keuangan

Modul ini menggambarkan posisi Kas, Total Pendapatan Tiket & Non Tiket (NFB), serta Realisasi Dana Operasional dan Proyek setiap akhir periode (bulan) sebelumnya.

2. Human Capital

Modul ini menggambarkan demografi karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang di-update setiap tanggal 18 periode sebelumnya.

3. Performance (KSD)

Modul ini menggambarkan capaian KSD yang menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta (Perseroda) per Direktorat dengan disertai detail per kegiatan.

4. Activities Monitoring

Menggambarkan progress fisik dan realisasi keuangan per kegiatan per direktorat/divisi dengan membandingkan antara CDP, Target Rencana Kegiatan dengan realisasi kegiatan setiap akhir periode (bulan) sebelumnya.

5. Ridership

Menggambarkan jumlah pengguna jasa secara *realtime* (H-1) dengan menunjukkan jenis alat pembayaran yang digunakan.

6. Subsidiary Progress

Menggambarkan progres pembentukan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan yang didirikan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

7. KPI 2020

Menggambarkan Capaian KPI Korporasi setiap akhir periode (bulan) sebelumnya.

8. Modul Tambahan

Terdiri dari 5 modul tambahan yang menunjukkan KPI Dewan Komisaris, Komitmen terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Tindak Lanjut Rapat BoD-BoC, penilaian tata kelola perusahaan yang baik oleh BPKP, dan Tindak Lanjut Auditor Eksternal.

9. Keluhan Pelanggan

Menggambarkan *update* keluhan pelanggan per akhir periode (bulan) sebelumnya berdasarkan kategori keluhan, sumber keluhan, kecepatan respon, stasiun, dan detail keluhan pelanggan.

10. Customer Satisfaction Index (CSI)

Menggambarkan Indeks Kepuasan Pelanggan yang diadakan sekali setiap tahunnya berdasarkan kategori stasiun dan beberapa kategori penilaian lainnya.

The Management Dashboard Consists of 10 modules as follows:

1. Financial Reports

This module shows the position of Cash, Total Fare Box and Non-Farebox Revenue, and Realisation of Operational and Project Funds for the end of the previous period (month).

2. Human Capital

This module shows the demographics of employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) and is updated on the 18th day of the previous period.

3. Performance (KSD)

This module shows KSD achievement as the responsibility of PT MRT Jakarta (Perseroda) by Directorate along with the details of each activity.

4. Activities Monitoring

Represents the physical progress and financial realisation by activities of each directorate/division by comparing the CDP and Activity Plan Target with the realisation of activities at the end of the previous period (month).

5. Ridership

Shows real-time number of passengers (H-1) by showing the type of payment method used.

6. Subsidiary Progress

Shows the progress of establishment of Subsidiaries/ Joint Ventures established by PT MRT Jakarta (Perseroda).

7. KPI 2020

Shows the Achievements of Corporate KPIs at the end of the previous period (month).

8. Additional Module

Consists of 5 additional modules that show the KPI of the Board of Commissioners, Commitment to Anti-Bribery Management System (SMAP), Follow-up on Meetings of BoD-BoC, BPKP GCG assessment, and Follow-up of External Auditor Findings.

9. Customer Complaints

Representing the update of customer complaints at the end of the previous period (month) by category of complaint, source of complaint, response speed, station, and details of customer complaint.

10. Customer Satisfaction Index (CSI)

Shows the Customer Satisfaction Index conducted one a year by station category and other scoring categories.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Disclosure of Affiliate Relationship between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Ultimate/Controlling Shareholders

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali, disampaikan dalam tabulasi berikut.

In accordance with the Articles of Association of the Corporation, among members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, there is no family relationship to the third degree, either in a straight line, sideways, or in a relationship. The family relationship of the members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and the Government of DKI Jakarta Province as the Ultimate/Controlling Shareholder is presented in the table as follows:

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali/Utama

Affiliate Relationship between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Ultimate/Controlling Shareholder

| Nama dan Jabatan Name and Position | Hubungan Keuangan Financial Relation | | Hubungan Keluarga Family Relation | | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Government of DKI Jakarta Province |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | Direksi Board of Directors | Dewan Komisaris Board of Commissioners | Direksi Board of Directors | Dewan Komisaris Board of Commissioners | |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | | | | | |
| Muhammad Syaugi Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | X | X | X | X | X |
| Rukijo Komisaris <i>Commissioner</i> | X | X | X | X | ✓ |
| Zulfikri Komisaris <i>Commissioner</i> | X | X | X | X | ✓ |
| Mukhtasor Komisaris <i>Commissioner</i> | X | X | X | X | X |
| Adnan Pandu Raja Komisaris <i>Commissioner</i> | X | X | X | X | ✓ |
| Direksi Board of Directors | | | | | |
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | X | X | X | X | X |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | X | X | X | X | X |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | X | X | X | X | X |
| Roy Rahendra Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | X | X | X | X | X |

Anggota Dewan Komisaris, yakni saudara Rukijo, Zulfikri dan Adnan Pandu Raja memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan masing-masing pada lembaga pemerintahan. Hubungan afiliasi tersebut, tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang hal ini lihat halaman 316 Laporan ini, pada bahasan Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Members of the Board of Commissioners, i.e. Mr Rukijo, Mr Zulfikri, and Mr Adnan Pandu Raja have affiliate relations to the Ultimate/Controlling Shareholder through the position of each person in a governmental institution. Such affiliation does not violate the prevailing laws and regulations. Further information on this matter is presented in page 316 of this Report, under the discussion of Disclosure of Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Any appointment of the Board of Commissioners has fulfilled a fit and proper test.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak ada rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Rangkap jabatan hanya berkaitan dengan afiliasi beberapa anggota Dewan Komisaris sebagai pejabat publik, dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Anggota Dewan Komisaris Rukijo merangkap jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Anggota Dewan Komisaris Zulfikri merangkap jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Anggota Dewan Komisaris Adnan Pandu Praja merangkap jabatan sebagai Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

As of the end of 2020, there is no concurrent position of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Any concurrent position only concerns with the affiliation of several members of the Board of Commissioners as public official with the Ultimate/Controlling Shareholder. Member of the Board of Commissioners Rukijo has concurrent position in the Ministry of Finance as a part of the end owner entity of the Corporation. Member of the Board of Commissioners Zulfikri has a concurrent position in the Ministry of Transportation as a part of the end owner entity of the Corporation. Member of the Board of Commissioners Adnan Pandu Praja has concurrent position as a member of the 'Open Selection Committee for High and Middle Leadership Positions' of the Government of DKI Jakarta Province.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i> |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Juli 2020-sekarang). <i>Head of the Human Resources Bureau, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (July 2020-present).</i> |
| Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017-sekarang). <i>Director General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2017-present).</i> |
| Adnan Pandu Praja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Komisaris PT TASPEN Properti Indonesia (2019-Sekarang) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2019 – Sekarang). <i>Commissioner of PT TASPEN Properti Indonesia (2019-Present) Open Selection Committee for High and Middle Leadership Position of DKI Jakarta Provincial Government (2019 – Present).</i> |

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Director

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi harus dipertimbangkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan termasuk memperhatikan unsur keberagaman, yang meliputi latar belakang gender, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian. Informasi tentang hal tersebut, lihat halaman 88-93 Laporan ini, pada bahasan tentang Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be considered in such a way to enable an effective, precise, and quick decision making. The Corporation still does not own written regulations governing the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, based on Shareholders' policy, the determination of the composition of the Corporation's Board of Commissioners and Board of Directors has been carried out taking into account the needs and complexity of the Corporation including taking into account the diversity element covering gender, education background, professional experience, and skills. Information on this matter is presented in page 88-93 of this Report, under the discussion of Profile of the Board of Commissioners and Profile of the Board of Directors.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Table on the Diversity of the Composition of the Board of Commissioners

| Nama Name | Jabatan Position | Usia (Tahun) Age (Years) | Gender Gender | Pendidikan Education Background | Pengalaman Kerja Professional Experience | Keahlian Skills |
|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| Muhammad Syaugi | Komisaris Utama President Commissioner | 60 Tahun 60 Years Old | Laki-laki Male | Magister Manajemen Master of Management | Pertahanan dan Keamanan Defense and Security | Manajemen dan Perencanaan Management and Defense Planning |
| Rukijo | Komisaris Commissioner | 53 Tahun 53 Years Old | Laki-laki Male | Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Doctor of Economics | Keuangan dan Manajemen SDM Finance and Human Resources Management | Keuangan dan Manajemen SDM Finance and Human Resources Management |
| Zulfikri | Komisaris Commissioner | 58 Tahun 58 Years Old | Laki-laki Male | Magister Sistem dan Teknik Jalan, serta Magister Ekonomi Transportasi Master of Road System and Technique and Master of Transportation Economy | Perhubungan Transportation | Perkeretaapian Railway |
| Mukhtasor | Komisaris Commissioner | 51 Tahun 51 Years Old | Laki-laki Male | Ph.D Rekeyasa Sipil Ph.D. in Civil Engineering | Penasehat dan Guru Besar Advisor and Professor | Energi dan Lingkungan Energy and Environment |
| Adnan Pandu Praja | Komisaris Commissioner | 60 Tahun 60 Years Old | Laki-laki Male | Magister Hukum Master of Law | Praktisi Hukum dan Penulisan Legal Practitioner and Writer | Hukum dan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Law and Good Corporate Governance (GCG) |

| Nama Name | Jabatan Position | Usia (Tahun) Age (Years) | Gender Gender | Pendidikan Education Background | Pengalaman Kerja Professional Experience | Keahlian Skills |
|---------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | 54 | Laki-laki <i>Male</i> | Doktor Geografi Transportasi <i>Doctor of Transportation Geography</i> | Pembangunan energi baru terbarukan dan konservasi energi <i>Development of new and renewable energy and energy conservation</i> | Manajemen krisis <i>Crisis management</i> |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | 38 | Perempuan <i>Female</i> | Sarjana Teknik Sipil <i>Bachelor of Civil Engineering</i> | Manajer Proyek Jalan Raya di Singapura <i>Manager of Main Road Project in Singapore</i> | Konstruksi transportasi <i>Transportation construction</i> |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i> | 56 | Laki-laki <i>Male</i> | Magister Manajemen <i>Master of Management</i> | Kepala Divisi Manajemen Proyek <i>Head of Project Management Division</i> | Operasi & Transportasi <i>Operations & Transportation</i> |
| Roy Rahendra | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | 50 | Laki-laki <i>Male</i> | Magister Perdagangan <i>Master of Trade</i> | Kepala Penasihat Teknis untuk Kemitraan untuk Kesiapan Pasar <i>Chief Technical Advisor for Partnerships for Market Readiness</i> | Keuangan & Manajemen <i>Finance & Management</i> |

Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Komisaris bersama-sama Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pemegang Saham yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk Indikator Kinerja Utama (KPI) tahun 2020. Capaian atas KPI Direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan berkala setiap 3 bulan (triwulan) oleh Perseroan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). BP BUMD selaku pembina BUMD kemudian melakukan pengawasan atas kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No.131 tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

The Board of Commissioners together with the Board of Directors signed a Management Contract with the Shareholders represented by the Governor of DKI Jakarta Province for the Key Performance Indicators (KPIs) in 2020. The achievement of the Board of Directors and the Board of Commissioners is reported quarterly by the Corporation to the Government of DKI Jakarta through ROE Development (BP BUMD). BP BUMD as the ROE supervisor that supervises the performance of DKI Jakarta Province's ROEs to be subsequently reported to the Governor of DKI Jakarta Province, in accordance with Governor's Decree No. 131 Year 2019 concerning Supervision of Regionally-Owned Enterprises.

Alur Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi *Flow of Performance Assessment of The Board of Commissioners and Directors*

Kontrak Manajemen sebagai Indikator Kinerja Utama (KPI) ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi
The Management Contract as a Key Performance Indicator (KPI) is signed by the Board of Commissioners and Directors

Pelaporan KPI kepada Pemegang Saham, melalui BP BUMD
KPI reporting to Shareholders, through BP BUMD

Pengawasan kinerja oleh BP BUMD
Performance monitoring by BP BUMD

Laporan hasil kinerja oleh BP BUMD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Performance report by BP BUMD to the Governor of DKI Jakarta Province

Hasil Penilaian dan Pencapaian KPI Dewan Komisaris

Assessment Result and KPI Achievement of the Board of Commissioners

| No. | Sasaran Strategis Strategic Objectives | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicator (KPI) | Bobot IKU KPI Weight | Target Target | Realisasi Realisation | Skor Final Final Score |
|-----|---|-----------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Penyelesaian Perencanaan Perusahaan Corporate Planning Completion | 25% | Tingkat ketepatan waktu persetujuan Dewan Komisaris atas RKA Tahun 2021 <i>Punctuality rate of Board of Commissioners' approval for 2021 RKA</i> | 50% | 100% | 100% | 100,83% |
| 2. | | | Tingkat ketepatan waktu persetujuan Dewan Komisaris atas Kinerja Korporasi Tahun 2021 <i>Punctuality rate of Board of Commissioners' approval for 2021 Corporate Performance</i> | 50% | 100% | 100% | |
| 3. | Pelaksanaan Tugas Pengawasan Implementation of Supervisory Duties | 41,67% | Pencapaian Skor Perjanjian Kinerja Korporasi 2020 <i>Achievement of 2020 Corporate Performance Agreement Score</i> | 50% | 100% | 105,00% | |
| 4. | | | Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan terhadap Pengelolaan BUMD <i>Delivery of the Report of Supervisory Results on ROE Management</i> | 50% | 100% | 100% | |
| 5. | Pelaksanaan Tugas Konsultasi Implementation of Consulting Duties | 20,83% | Persentasi kehadiran Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulanan <i>Attendance percentage of the Board of Commissioners at the monthly joint meetings</i> | 40% | 100% | 98,33% | |
| 6. | | | Tingkat Penyelesaian agenda rapat gabungan berdasarkan notulensi <i>Rate of resolution of joint meeting agenda based on the minutes of meeting</i> | 60% | 100% | 99,40% | |
| 7. | Monitoring Pelaksanaan Program Unggulan dan/ atau Strategis-KSD <i>Monitoring of the Implementation of Leading and/or Strategic Programs - KSD</i> | 12,50% | Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengawasan terhadap program unggulan dan strategis / KSD yang dilaksanakan BUMD <i>Punctuality rate of the reports of monitoring of leading and strategic programs / KSD carried out by ROEs</i> | 100% | 100% | 100% | |

Secara umum, pada tahun 2020 Dewan Komisaris mampu mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham. Hal ini ditunjukkan dengan skor pencapaian final sebesar 100,95% atau melebihi target 100%. Pencapaian kinerja yang melebihi target ini disebabkan oleh aspek kinerja korporasi tahun 2020 yang melampaui target dan merefleksikan kerja keras manajemen didukung oleh arahan dan masukan berkala yang diberikan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite di bawah Komisaris. Adapun evaluasi Dewan Komisaris terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai,

In general, in 2020 the Board of Commissioners was able to achieve the performance target as agreed with the Shareholders. It is proven by the final achievement score of 100.95%, exceeding the target of 100%. The achievement over the target was caused by the corporation performance aspects in 2020 that exceeds the target and reflects the hard work of the management supported by the frequent directions and inputs from the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners. The evaluation of the Board of Commissioners for performance indicators that are not achieved, i.e., attendance rate at

yaitu pada tingkat kehadiran rapat gabungan dengan menjaga komitmen seluruh Dewan Komisaris untuk selalu hadir pada agenda rapat gabungan bulanan baik hadir secara fisik maupun secara virtual. Sementara untuk aspek tingkat penyelesaian agenda rapat gabungan yang juga tidak tercapai sepenuhnya, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pemberian peringatan tertulis kepada manajemen agar berupaya lebih keras, sehingga agenda tindak lanjut tidak melewati tenggat waktu yang telah disepakati bersama.

monthly joint meetings, results in the commitment of all members of the Board of Commissioners by always attending the monthly joint meeting, either by physical attendance or by virtual attendance. Meanwhile, for the rate of resolutions of meeting agenda that is not achieved, the Board of Commissioners will carry out more rigid monitoring and deliver written reminders to the management to work harder so that the follow up of the agenda does not exceed the timeline as agreed.

Hasil Penilaian dan Pencapaian KPI Direksi
Assessment Result and KPI Achievement of the Board of Directors

| No. | Perspektif Perspective | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicator (KPI) | Polaritas Polarity | Bobot IKU (%) KPI Weight | Target Target | Realisasi Realisation | Skor IKU 2020 (%) 2020 KPI Score | Skor Final 2020 Final Score |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| 1. | <i>Financial</i> | | | 34 | | 36,22% | | |
| | | <i>Operating Expense</i> | Min | 6,0 | 188.623.259.861 | 189.753.827.326 | 5,96 | |
| | | <i>COGS</i> | Min | 5,0 | 1.015.374.330.873 | 976.692.302.552 | 5,20 | |
| | | <i>NFB Revenue</i> | Max | 7,0 | 321.000.000.000 | 382.672.123.116 | 8,34 | |
| | | <i>EBITDA</i> | Max | 6,0 | 371.189.816.267 | 447.696.686.247 | 7,20 | |
| | | <i>CAPEX Phase 1 & 2</i> | Max | 5,0 | 1.587.186.000.000 | 1.433.474.235.721 | 4,52 | |
| | | <i>Financial Commitment</i> | Max | 5,0 | 100% | 100% | 5,00 | |
| 2. | <i>Customer</i> | | | 26 | | 27,59% | | |
| | | <i>Average ridership per day</i> | Max | 7,0 | 26,065 | 27.122 | 7,28 | |
| | | <i>Customer satisfaction index</i> | Max | 7,0 | 85 | 86,64 | 7,31 | |
| | | <i>#50 Top application in travel category</i> | Min | 5,0 | 50 | 37 | 6,00 | |
| | | <i>Completion of public service assignment (COVID-19 Initiatives)</i> | --- | 3,0 | 100% | 100% | 3,00 | |
| | | <i>Completion of public service assignment (Development Arm)</i> | --- | 4,0 | 100% | 100% | 4,00 | |
| 3. | <i>Internal Business Process</i> | | | 30 | | 30,55% | | 105,00% |
| | | <i>Zero fatality</i> | Min | 5,0 | 0 | 0 | 5,00 | |
| | | <i>One Time Performance</i> | Max | 5,0 | 90% | 99,98% | 5,55 | |
| | | <i>Number of New Line Launched</i> | --- | 5,0 | 1 | 1 | 5,00 | |
| | | <i>Number of KLB deals</i> | --- | 5,0 | 5 | 5 | 5,00 | |
| | | <i>On-time launch of subsidiaries establishment (TOD)</i> | --- | 2,5 | Q2 (6) | Q2 (6) | 2,50 | |
| | | <i>On-time launch of JV establishment (Jaklingko)</i> | --- | 2,5 | Q4 (12) | Q4 (12) | 2,50 | |
| | | <i>% Milestone completion for PT MITJ (JV with KAI)</i> | --- | 5,0 | 100% | 100% | 5,00 | |
| | <i>Learning & Growth</i> | | | 10 | | 10,64% | | |
| | | <i>GCG Score</i> | Max | 2,5 | 88,00 | 90,13 | 2,56 | |
| 4 | | <i>Risk Maturity Level</i> | Max | 2,5 | 3,55 | 3,73 | 2,63 | |
| | | <i>Knowledge Management Maturity</i> | Max | 2,5 | 5,00 | 7,69 | 3,00 | |
| | | <i>Talent Management Index</i> | Max | 2,5 | 100% | 97,98% | 2,45 | |

Pengungkapan Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan dan perusahaan lain diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Demi menjaga independensi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga.

Hingga akhir tahun 2020, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan, dan/atau perusahaan lain di atas lima persen (5%). Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Share ownership of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Corporation and other companies is disclosed periodically through the list of share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors. In order to maintain independence, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors are required to submit the transparency of purchase and sale on securities transaction.

As of the end of 2020, there is no member of the Board of Commissioners nor the Board of Directors who owns shares of the Corporation and/or other companies of more than five percent (5%). Therefore, there is no evidence of the existence of conflicts of interest in decision-making process.

Tabel Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris
Table of Share Ownership by the Board of Commissioners

| Nama Name | Jabatan Position | Kepemilikan Saham Share Ownership | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Perusahaan Lain >5% Other Companies of >5% |
| Muhammad Syaugi | Komisaris Utama President Commissioner | X | X |
| Rukijo | Komisaris Commissioner | X | X |
| Zulfikri | Komisaris Commissioner | X | X |
| Mukhtasor | Komisaris Commissioner | X | X |
| Adnan Pandu Raja | Komisaris Commissioner | X | X |

Tabel Kepemilikan Saham Oleh Direksi
Table of Share Ownership by the Board of Directors

| Nama Name | Jabatan Position | Kepemilikan Saham Share Ownership | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Perusahaan Lain >5% Other Companies of >5% |
| William Sabandar | Direktur Utama President Director | X | X |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi Plt. Direktur Pengembangan Bisnis Construction Director | X | X |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Director | X | X |
| Roy Rahendra | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director | X | X |

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

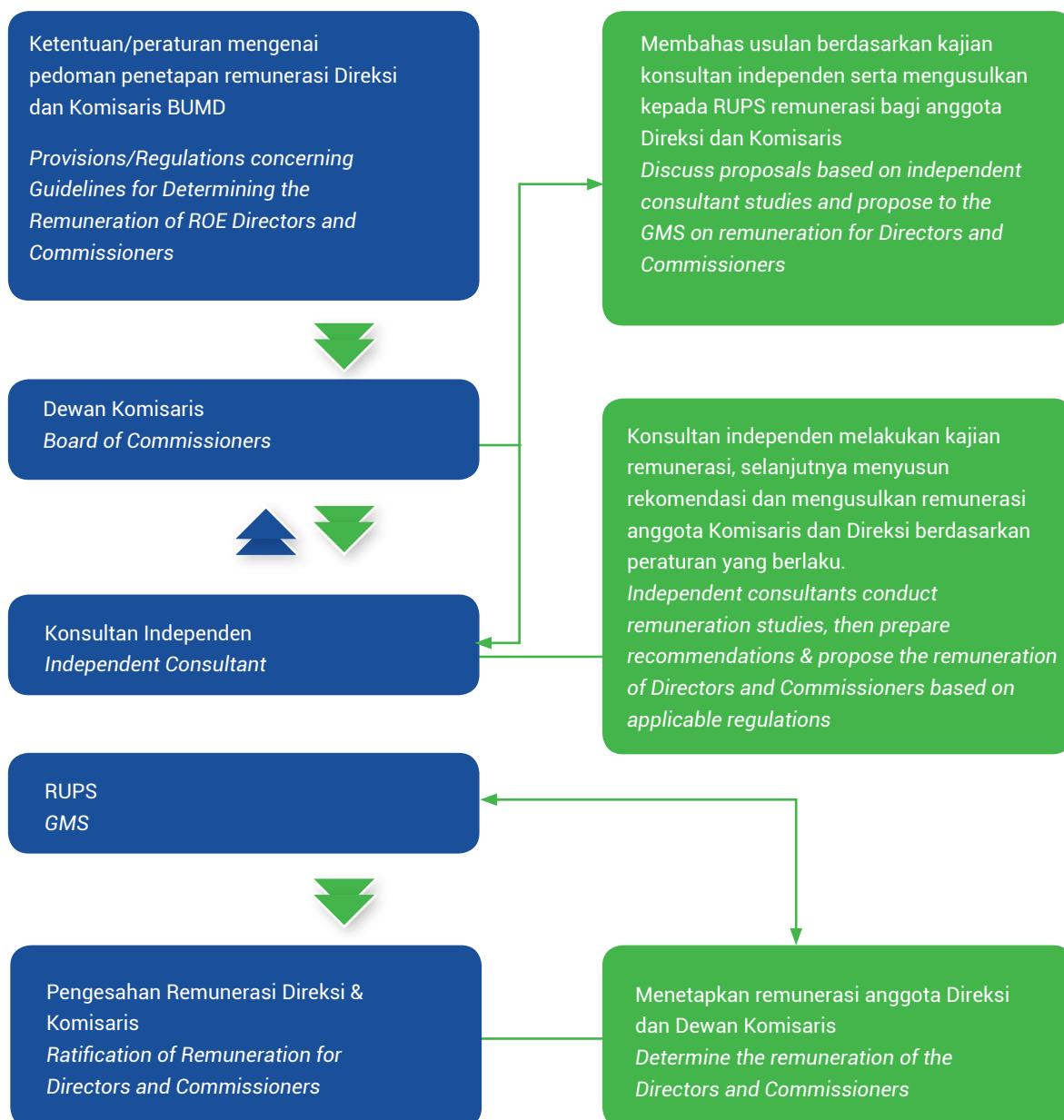
Remunerations for the Boards of Commissioners and Directors

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Proposal Procedure to the Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

The remuneration mechanism for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS. It is in accordance with the Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Commissioners of ROEs.



Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Underlying Policies concerning the Indicator and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2020

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 79 Tahun 2019;
- Kinerja Perseroan;
- Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perseroan.

The formulation of the structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors consider the factors as follows:

- *The Prevailing laws and regulations, primarily Governor Regulation of DKI Jakarta Province No 79 Year 2019.*
- *Performance of the Corporation;*
- *Professional achievement of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
- *Applicable remuneration within the industry based on the business activities of the Corporation with similar business type and scale with the Corporation.*

Komponen Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019
*Component of income of the Board of Commissioners and the Board of Directors
In accordance with Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019*

| Remunerasi Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Remuneration</i> | Remunerasi Direksi <i>Board of Directors' Remuneration</i> |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium <i>Honorarium</i> 2. Tunjangan <i>Allowance</i> 3. Fasilitas <i>Facilities</i> 4. Tantiem/Insentif Kinerja Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan; Pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. <i>Performance bonus/incentives Taxes on Honorarium, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners are borne by the Corporation; Tax on Performance Bonus/Incentives for the Board of Commissioners is borne by each member of the Board of Commissioners.</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium <i>Honorarium</i> 2. Tunjangan <i>Allowance</i> 3. Fasilitas <i>Facilities</i> 4. Tantiem/Insentif Kinerja Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi. <i>Performance bonus/incentives Taxes on Salaries, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners are borne by the Corporation; Tax on Performance Bonus/Incentives for the Board of Directors is borne by each member of the Board of Directors.</i> |

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris *Structure and Components of the Remuneration for the Board of Commissioners*

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Honorarium <i>Honorarium</i> | Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 35% dari gaji Direktur Utama. | <i>Fixed income in the form of money received monthly by the members of the Board of Commissioners with the following provisions:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The calculation of the salary of the President Commissioners is 45% of the salary of the President Director.</i> • <i>The calculation of the salary of Commissioner is 35% of the salary of the President Director.</i> |
| Tunjangan <i>Allowance</i> | Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. • Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari honorarium per bulan. • Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. | <i>Income in the form of money or something that can be valued with money received at certain time by the members of the Board of Commissioners in addition to the Honorarium which can be in the form of:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Holiday allowance, given every year of no more than 1 (one) times the amount of monthly fixed income.</i> • <i>Position allowance, given monthly of no more than 50% of the monthly honorarium.</i> • <i>Retirement Insurance Benefit, provided with the provisions of premium borne by the Corporation of no more than 25% of the annual honorarium.</i> |

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris
Structure and Components of the Remuneration for the Board of Commissioners

| | | |
|--|---|--|
| <p>Fasilitas <i>Facilities</i></p> | <p>Penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan. Fasilitas diberikan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan. • Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perseroan. • Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/ pendaftaran dan uang iuran tahunan. • Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menurut ketentuan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi kepengurusan dan kepenasehatan Perseroan secara aktif, maka dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian dan kemampuan keuangan Perseroan. | <p><i>Insurance that can be used/ utilised by the members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on the laws and regulations. Facilities provided can be in the form of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Facilities, provided in the form of health insurance.</i> • <i>Legal Assistance Facilities, provided if necessary, in the event of any actions for and on behalf of their position relating to the Corporation.</i> • <i>Professional Association Facilities, given for no more than 2 (two) associations, and are provided in the form of registration and annual fees.</i> • <i>In the case that the members of the Board of Commissioners who according to statutory provisions carry out the operational functions of who carry out the Corporation's management and advisory functions actively, vehicle facilities may be given considering the principles of efficiency, propriety, and financial capability of the Corporation.</i> |
| <p>Tantiem / Insentif Kinerja <i>Performance Bonus/ Incentives</i></p> | <p>Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.</p> <p>Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi apabila Perseroan terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.</p> <p>Komposisi besarnya Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris mengikuti Faktor Jabatan, yaitu Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, dan Komisaris sebesar 35% dari Direktur Utama.</p> | <p><i>Performance bonus is an award given to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors if the Corporation makes a profit and does not record accumulated losses.</i></p> <p><i>Performance incentive is an income as an award given to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors if the Corporation performance increases despite losses or accumulated losses.</i></p> <p><i>The composition of Performance Bonus/Incentive for the Board of Commissioners follows the Factor of Position, i.e., for the President Director it is 45% of the amount for the President Director, and for each Commissioner it is 35% of the mount for the President Director.</i></p> |

Struktur dan Komponen Remunerasi Direksi *Structure and Components of the Remuneration for the Board of Directors*

| | | |
|--|---|--|
| Gaji Salary | <p>Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan rumus perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 79 Tahun 2019, serta pedoman internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. | <p><i>Fixed income in the form of money received monthly with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Salary of the President Director is determined by using the calculation formula stated in Governor Regulation of DKI Jakarta No 79 Year 2019 as well as internal guidelines for the Government of DKI Jakarta Province.</i> <i>The salary of other members of the Board of Directors is determined by Factor of Position, which is 90% of the salary of the President Director.</i> |
| Tunjangan Allowances | <p>Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya, paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari gaji per bulan. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari gaji per tahun. Tunjangan Cuti Tahunan, diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan. Tunjangan Cuti Besar, diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap per bulan. | <p><i>Income in the form of money or something that can be valued with money received at certain time by the members of the Board of Directors in addition to the Salary which can be in the form of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Holiday allowance, given no more than 1 (one) time of the amount of monthly fixed income every year.</i> <i>Position allowance, given monthly of no more than 50% of the monthly honorarium.</i> <i>Retirement Insurance Benefit, provided with the provisions of premium borne by the Corporation of no more than 25% of the annual honorarium.</i> <i>Annual Leave Allowance, given every year of no more than 1 (one) times the amount of monthly fixed income.</i> <i>Sabbatical Leave Allowance, given once in 3 (three) years of no more than 2 (two) times the amount monthly fixed income.</i> |
| Fasilitas Facilities | <p>Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Fasilitas diberikan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan. Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perseroan. Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Jabatan. Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/pendaftaran dan uang iuran tahunan. Fasilitas <i>Club Membership/ Corporate Member</i>, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/pendaftaran dan uang iuran Tahunan. | <p><i>Income in the form of facilities and/or benefits and/or insurance that can be used/ utilised by the members of the Board of Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on the laws and regulations.</i></p> <p><i>Facilities provided can be in the form of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Health Facilities, provided in the form of health insurance.</i> <i>Legal Assistance Facilities, provided if necessary, in the event of any actions for and on behalf of their position relating to the Corporation.</i> <i>Vehicle Facilities, as many as 1 (one) official vehicle and provisions for maintenance and operational costs with specifications and standards according to the Position.</i> <i>Professional Association Facilities, for no more than 2 (two) associations are provided in the form of registration and annual fees.</i> <i>Club Membership/Corporate Member Facilities, for no more than 2 (two) membership are provided in the form of registration and annual fees.</i> |
| Tantiem / Insentif Kinerja Performance Bonus/ Incentive | <ul style="list-style-type: none"> Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja Perseroan, meskipun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi mengikuti Faktor Jabatan, yaitu anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Performance Bonus is an award given to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors if the Corporation makes a profit and does not record accumulated losses.</i> <i>Performance Incentive is an income as an award given to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors if the Corporation performance increases despite losses or accumulated losses.</i> <i>The composition of Performance Bonus/Incentive for the Board of Directors follows the Factor of Position, i.e., for the members of the Board of Directors is 90% of the amount for the President Director.</i> |

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 79 Tahun 2019
Calculation of The Remuneration Amount of The Board of Commissioners and Directors (In Accordance with Governor Regulation of DKI Jakarta Province No 79 Year 2019

| Jabatan | Besaran Amount | Position |
|-------------------|--|------------------------|
| Direktur Utama | 100% | President Director |
| Direksi Lainnya | Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of President Director salary | Other Directors |
| Komisaris Utama | Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of President Director salary | President Commissioner |
| Komisaris Lainnya | Sebesar 35% dari gaji Direktur Utama 35% of President Director salary | Other Commissioners |

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020
Transparency of The Remuneration For The Boards Of Commissioners and Directors In 2020

Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1907/-071.241 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) besarnya gaji yang diterima Direktur Utama Perseroan pada tahun 2020, adalah Rp104.496.667. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

In accordance with the Letter of Regional Secretary of Special Capital Region of Jakarta Province Number 1907/-071.241 concerning Income of Board of Directors and Board of Commissioners of PT MRT Jakarta (Perseroda), the amount of salary received by the President Director of the Corporation in 2020 is IDR104,496,667. The salary of the President Director becomes the reference to calculate the salary of other members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as stated in Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019 concerning Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Commissioners of Regionally-Owned Enterprises.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020
Amount of Remuneration of Board of Commissioner and Directors Year 2020

| Uraian | Jumlah Amount (Rp) | Description |
|---|--------------------|--|
| Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris | 8.923.806.739 | Amount of remuneration of Board of Commissioners |
| Jumlah Remunerasi Direksi | 18.679.835.170 | Amount of remuneration of Board of Directors |
| Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi | 27.603.641.908 | Amount of remuneration of Board of Commissioners and Directors |

Informasi mengenai Rasio Gaji disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan PT MRT Jakarta (Perseroda), yang disusun dan diterbitkan terpisah dari Laporan ini.

Information concerning the Salary Ratio is presented in the Sustainability Report of PT MRT Jakarta (Perseroda), that is prepared and published separately from this Report.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI

The Board of Commissioners and the Board of Directors Meeting

Dewan Komisaris maupun Direksi dapat menyelenggarakan rapat untuk membahas hal-hal strategis, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan operasi dan usaha Perseroan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors may hold meetings to discuss strategic issues that impact on the continuity of operational and business activities of the Corporation.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap 2 bulan, atau dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu. Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris tanpa mengundang Direksi dan/atau Unit Kerja sebanyak 12 kali. Rata-rata tingkat kehadiran rapat setiap anggota Dewan Komisaris adalah 93,33%.

Board of Commissioners' Meetings are held at least once every 2 months or can be held at any time if deemed necessary. In 2020, the Board of Commissioners held 12 Internal Board of Commissioners' Meetings without inviting the Board of Directors and/or Work Unit. The average attendance rate of each member of the Board of Commissioners is 93.33%.

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas tentang:

In general, the agenda of the Board of Commissioners' meeting discusses:

- Evaluasi Kinerja Perseroan;
- Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan RKAP;
- Menindaklanjuti temuan Auditor Internal;
- Menindaklanjuti temuan Auditor serta Penilai Eksternal;
- Melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawahnya;
- Melakukan pembahasan terkait hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Dewan Komisaris.

- *Evaluation of Corporation Performance;*
- *Discussion of Corporate Long-Term Plan and Corporate Work Plan and Budget;*
- *Follow-up on the findings from Internal Auditors;*
- *Follow-up on the findings of External Auditors and Assessors;*
- *Coordination with the committees;*
- *Discussion on matters that require the approval of the Board of Commissioners;*
- *Other agenda of the authority of the Board of Commissioners.*

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat. Sebagai bentuk persiapan Perseroan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, di awal tahun Perseroan telah melakukan penyusunan dan penetapan jadwal tahunan yang turut mencantumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk rencana rapat Dewan Komisaris. Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait, di antaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya, seperti Divisi *Internal Audit* dan Divisi-Divisi yang ada.

Based on the provisions as stated in the Board Manual, the publication concerning the plan to conduct a Board of Commissioners' meeting shall be made no later than 3 (three) days prior to the date of the meeting. The publication shall inform the date and time of meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting, and the parties invited to attend the meeting. As a form of preparation of the Corporation in the implementation of the system and mechanism of Good Corporate Governance, at the beginning of the year the Corporation has conducted the preparation and determination of annual schedule including the times of meeting that covers the Board of Commissioners' meeting. Information concerning the planned meeting has been distributed widely to related parties such as the Secretary of the Board of Commissioners, the Corporate Secretary, and other organs such as the Internal Audit Division and other existing Divisions.

Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku. Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat, serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir, serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Sebagai bentuk akuntabilitas Perseroan terkait dengan pendokumentasian aktivitas tata kelola yang dijalankan, Perseroan memiliki kebijakan umum yang mewajibkan dilakukannya pembuatan risalah rapat pada rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi.

Setelahnya, risalah tersebut juga diwajibkan untuk diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diberikan salinannya kepada peserta rapat. Penyusunan risalah laporan tahunan Perseroan, telah memenuhi prosedur penyusunan risalah rapat oleh Sekretaris Dewan Komisaris, yang meliputi pemenuhan kebijakan umum terkait aspek prosedural dan administrasi serta rapat yang menggambarkan jalannya rapat.

In the event that a proposed meeting is incidental, the publication can be carried out as effectively and efficiently as possible while still following the prevailing documentation procedures. In ensuring the implementation of transparency and accountability principles, the minutes of meeting (in this case the Board of Commissioners' meetings) are well documented, that includes the discussion of the meeting agenda, dissenting opinions, and decisions made. Documentation of the meeting is then signed by the leader and all participants present then distributed according to its delegation.

Decisions of the Board of Commissioners' Meeting are adopted by consensus. If no agreement is reached, then the decision is taken by voting, based on a vote of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting. As a form of Corporation accountability concerning documenting governance processes implemented, the Corporation has a general policy that requires the making of minutes of meetings at internal meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings by inviting the Board of Directors.

Then, the minutes are also required to be administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other appointed official to provide a copy to the participants. The preparation of the minutes of the Corporation's annual report has complied with the procedures to prepare minutes of meeting by the Secretary of the Board of Commissioners which includes the fulfilment of general policies concerning procedures and administrative aspects as well as meeting that describe the course of meeting.

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Pada Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Recapitulation of Attendance of the Members of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' Meeting in 2020

| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | Persentase Percentage (%) |
|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| Muhammad Syaugi Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Rukijo Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 11 | 1 | 91,67 |
| Zulfikri Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 9 | 3 | 75 |
| Mukhtasor Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Adnan Pandu Praja Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Rata-Rata <i>Average</i> | 12 | 11,2 | 0,8 | 93,33 |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|---|---|
| 1 | <p>Tanggal: 29 Januari 2020 <i>Date: January 29, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Location: Wisma Nusantara 22nd Floor</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi KPI Dewan Komisaris 2019; Pengajuan KPI dan RKA Dewan Komisaris 2020; • Review Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik 2019 oleh BPKP untuk Dewan Komisaris dan Komite Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Board of Commissioner's KPI Evaluation of 2019, Drafting the KPI dan Budget for 2020;</i> • <i>GCG Assessment review based on the Finance Development Supervisory Agency finding for BOC and Committee.</i> |
| 2 | <p>Tanggal: 4 Februari 2020 <i>Date: February 4, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Location: Wisma Nusantara 22nd Floor</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi KPI dan RKA Dewan Komisaris untuk tahun 2020; • <i>Detail</i> program kerja Dewan Komisaris dan Komite Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>BOC KPI and Budget finalisation for year 2020;</i> • <i>Detailed work programme for BOC and Committee.</i> |
| 3 | <p>Tanggal: 12 Maret 2020 <i>Date: March 12, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 23 <i>Location: Wisma Nusantara 23rd Floor</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Detail utilisasi anggaran Dewan Komisaris tahun 2020; • Pembagian tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2020; • Rangkuman tugas dan wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundangan. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>BOC detailed budget plan for year 2020;</i> • <i>Deciding oversight duties between BOC;</i> • <i>Summary of BOC's duties and authorities based on regulation.</i> |
| 4 | <p>Tanggal: 16 April 2020 <i>Date: April 16, 2020</i></p> <p>Tempat: Teleconference Zoom <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Arahan korespondensi Dewan Komisaris ke Direksi; • Rekomendasi IKT dan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi ke Pemegang Saham. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Correspondence plan from BOC to Board of Directors;</i> • <i>Performance Bonus and Salary increase recommendation to shareholders.</i> |
| 5 | <p>Tanggal: 22 April 2020 <i>Date: April 22, 2020</i></p> <p>Tempat: Teleconference Zoom <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <p>Finalisasi rekomendasi IKT dan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi ke Pemegang Saham.</p> | <p><i>Finalisation of Performance Bonus and Salary increase recommendation to shareholders.</i></p> |
| 6 | <p>Tanggal: 26 April 2020 <i>Date: April 26, 2020</i></p> <p>Tempat: Teleconference Zoom <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <p>Sosialisasi pertimbangan dan keputusan Dewan Komisaris atas rekomendasi IKT dan Honorarium kepada Direktur Utama.</p> | <p><i>Socialisation of BOC's consideration and recommendation regarding Performance bonus and salary increase to President Director.</i></p> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|--|--|
| 7 | <p>Tanggal: 16 Juni 2020 <i>Date: June 16, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Dashboard Dewan Komisaris untuk mekanisme pengawasan; • Review Board Manual 2020; • Review Pelaksanaan WBS tahun 2019. | <ul style="list-style-type: none"> • BOC Dashboard overview presentation; • 2020 Board Manual Review; • WBS implementation review in 2019. |
| 8 | <p>Tanggal: 10 Juli 2020 <i>Date: July 10, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Progres pendirian anak perusahaan patungan EFC; • Progres pembaharuan Piagam Komite Komisaris; • Progres pembaharuan Board Manual; • Penyusunan arahan untuk pengendalian internal. | <ul style="list-style-type: none"> • Progress of establishing EFC as Joint Venture; • Progress of Committee Charter update; • Progress of Board Manual update; • Drafting letter for internal control concern. |
| 9 | <p>Tanggal: 13 Juli 2020 <i>Date: July 13, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <p>Diskusi persetujuan dan arahan untuk pendirian perusahaan patungan EFC.</p> | <p><i>Approval and Concerns for establishing EFC as a joint venture.</i></p> |
| 10 | <p>Tanggal: 7 Agustus 2020 <i>Date: August 7, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi skor KPI Dewan Komisaris untuk tahun 2019; • Persiapan untuk laporan tengah tahun ke Pemerintah Provinsi; • Rencana pelatihan ISO 37001 untuk Dewan Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> • BOC's KPI finalization for 2019; • Preparation for mid-year report to the provincial government; • BOC training plan for ISO 37001. |
| 11 | <p>Tanggal: 25 Agustus 2020 <i>Date: August 25, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <p>Pembahasan detail pembaharuan Board Manual tahun 2020.</p> | <p><i>Detailed discussion on Board Manual update for 2020.</i></p> |
| 12 | <p>Tanggal: 9 Oktober 2020 <i>Date: October 09, 2020</i></p> <hr/> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Teleconference Zoom</i></p> <hr/> <p>Peserta Rapat <i>Participants of Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi • Rukijo • Zulfikri • Mukhtasor • Adnan Pandu Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja dan kontrak Komite Komisaris; • Evaluasi unit kerja di bawah Direksi; • Saran perbaikan format laporan keuangan dan pengajuan RKA tahunan. | <ul style="list-style-type: none"> • Performance and contract evaluation of Committee; • Evaluation of several work units under Director; • Suggestion for financial report and budget submission procedure for management. |

Rapat Gabungan: Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Joint Meeting: Board of Commissioners' Meeting Inviting the Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris juga dapat mengundang Direksi atau rapat gabungan. Selama tahun 2020, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan sebanyak 97,08%.

Secara umum, agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

- Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional Perseroan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- Pembahasan dan penetapan RKAP;
- Evaluasi dan rekomendasi Komite-Komite di bawah Direksi;
- Persiapan pelaksanaan RUPS;
- Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait, di antaranya Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya, seperti SPI dan departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin, namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku dengan membuat berita acara.

The Board of Commissioner's Meeting may also invite the Board of Directors to be a joint meeting. In 2020, there were 12 joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The average attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors is 97.08%.

In general, the agenda of joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors discusses:

- *Evaluation of Corporation Financial and Operational Performance (monthly, quarterly, semesterly, and annually);*
- *Discussion and establishment of the Corporate Work Plan and Budget;*
- *Evaluation and recommendation of Committees under the Board of Directors;*
- *Preparation for the GMS;*
- *Other agenda of the authority of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

Information concerning the plan to conduct a Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be made no later than 7 (seven) days prior to the scheduled date. The publication shall inform the date and time of meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting, and the parties invited to attend the meeting.

Information concerning the planned meeting has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as Internal Audit and existing departments. In the event of incidental meeting proposal, the publication still can be made as effectively and efficiently as possible in accordance with the applicable documentation procedures (making minutes of meeting).

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Attendance Recapitulation at the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors 2020

| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | Persentase Percentage (%) |
|--|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| Muhammad Syaugi Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Rukijo Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Zulfikri Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 11 | 1 | 91,67 |

| Mukhtasor Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
|--|--|---|------------------------------|--|
| Adnan Pandu Praja Komisaris <i>Commissioner</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Rata-Rata Kehadiran Dewan Komisaris <i>Average Amount of Attendance of Board of Commissioners</i> | | | | 98,33% |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | Persentase <i>Percentage</i> (%) |
| William P Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi**** <i>Acting Official of Finance and Corporate Management Director****</i> | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Plt. Direktur Pengembangan Bisnis***** <i>Acting Official of Business Development Director*****</i> | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operation & Maintenance</i> | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Roy Rahendra* Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Financial and Corporate Management</i> | 9 | 9 | 0 | 100 |
| Tuhayat** Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Financial and Corporate Management</i> | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Ghamal Peris*** Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i> | 3 | 2 | 1 | 66,67 |
| Rata-Rata Kehadiran Direksi <i>Average Amount of Attendance of Directors</i> | | | | 95,83% |
| Rata-Rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi <i>Average Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors</i> | | | | 97,08% |

*Roy Rahendra duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 20 April 2020

**Tuhayat tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 21 Februari 2020

***Ghamal Peris tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 20 April 2020

****Silvia Halim ditunjuk sebagai Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi sejak tanggal 21 Februari 2020 melalui SK/011/BOD-MRT/II/2020

*****Silvia Halim ditunjuk sebagai Plt. Direktur Pengembangan Bisnis sejak tanggal 04 Mei 2020 melalui SK/026/BOD-MRT/V/2020

*Roy Rahendra is appointed as a Director starting April 20, 2020

**Tuhayat is does not serve as a Director anymore starting February 21, 2020

***Ghamal Peris does not serve as a Director anymore starting April 20, 2020

****Silvia Halim is appointed as the Acting Official of Finance and Corporate Management Director starting February 21, 2020 through SK/011/BOD-MRT/II/2020

*****Silvia Halim is appointed as the Acting Official of Business Development Director starting May 4, 2020 through SK/026/BOD-MRT/V/2020

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020*Minutes of Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Attendance of the Board of Commissioners in 2020*

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|--|---|
| 1 | <p>Tanggal 29: Januari 2020 <i>Date: January 29, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Location: Wisma Nusantara, 22nd Floor</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja.</p> <p>Direksi <i>Board of Directors:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris, Tuhayat</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Desember 2019 – Januari 2020; Tindak Lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulan Desember 2019. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between December 2019 – January 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in December 2019.</i> |
| 2 | <p>Tanggal: 28 Februari 2020 <i>Date: February 28, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Location: Wisma Nusantara, 22nd Floor</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> Muhammad Syaugi, Rukijo, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Januari – Februari 2020; Tindak Lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulan Januari 2020; Pengajuan KPI Korporasi 2020. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between January – February 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in January 2020;</i> <i>Corporate KPI submission for 2020.</i> |
| 3 | <p>Tanggal: 26 Maret 2020 <i>Date: March 26, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners:</i> Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan KSD Kuartal 1 2020; Tindak Lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulan Februari 2020; Laporan final audit keuangan oleh auditor eksternal; Persiapan Perusahaan menghadapi pandemi COVID-19. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report and State Strategic Activities for 1st Quarter of 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in February 2020;</i> <i>Financial Audit report by external auditor;</i> <i>Corporate preparation in handling COVID-19 pandemic.</i> |
| 4 | <p>Tanggal: 30 April 2020 <i>Date: April 30, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners:</i> Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Maret – April 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan Maret 2020; Laporan rencana efisiensi RKA 2020 karena pandemi COVID-19; Laporan strategi Perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between March – April 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in March 2020</i> <i>Cost efficiency plan due to COVID-19 pandemic;</i> <i>Corporate strategy in dealing with COVID-19 pandemic.</i> |
| 5 | <p>Tanggal: 29 Mei 2020 <i>Date: May 29, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> <i>Location: Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners:</i> Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode April – Mei 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan April 2020; Laporan progres efisiensi RKA 2020 karena pandemi COVID-19; Laporan strategi Perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between April – May 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in April 2020;</i> <i>Cost efficiency progress report due to COVID -19 pandemic;</i> <i>Corporate strategy in dealing with COVID-19 pandemic.</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|--|---|
| 6 | <p>Tanggal: 30 Juni 2020 <i>Date: June 30, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> Location: <i>Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners</i>: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors</i>: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan KSD Kuartal 2 2020; Tindak Lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulan Mei 2020; Penyesuaian proses kerja dan bisnis Perusahaan pada periode PSBB. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report and State Strategic Activities for 2nd Quarter of 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in May 2020;</i> <i>Work and business process adjustment due to PSBB policy.</i> |
| 7 | <p>Tanggal: 29 Juli 2020 <i>Date: July 29, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> Location: <i>Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners</i>: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors</i>: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Juni – Juli 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan Juni 2020; Penyesuaian proses kerja dan bisnis Perusahaan pada periode PSBB. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between June - July 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in June 2020;</i> <i>Work and business process adjustment due to PSBB policy.</i> |
| 8 | <p>Tanggal: 31 Agustus 2020 <i>Date: August 31, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> Location: <i>Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners</i>: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors</i>: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Juli - Agustus 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan Juli 2020; Penyesuaian proses kerja dan bisnis Perusahaan pada periode PSBB. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between July - August 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in July 2020;</i> <i>Work and business process adjustment due to PSBB policy.</i> |
| 9 | <p>Tanggal: 29 September 2020 <i>Date: September 29, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> Location: <i>Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners</i>: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors</i>: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan KSD Kuartal 3 2020; Tindak Lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan bulan Agustus 2020; Penyesuaian proses kerja dan bisnis Perusahaan pada periode PSBB jilid 2. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report and State Strategic Activities for 3rd Quarter of 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in August 2020;</i> <i>Work and business process adjustment due to 2nd phase of PSBB policy.</i> |
| 10 | <p>Tanggal: 27 Oktober 2020 <i>Date: October 27, 2020</i></p> <p>Tempat: <i>Teleconference Zoom</i> Location: <i>Zoom Teleconference</i></p> <p>Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i> Komisaris <i>Board of Commissioners</i>: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Board of Directors</i>: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode September - Oktober 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan September 2020; Penyesuaian proses kerja dan bisnis Perusahaan pada periode PSBB jilid 2. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Management report of Corporation management between September - October 2020;</i> <i>Follow up of BOC input and feedback from BOC BOD Meeting in September 2020;</i> <i>Work and business process adjustment due to 2nd phase of PSBB policy.</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat Date, Location, and Participants of Meeting | Agenda Rapat Agenda of Meeting |
|----|---|--|
| 11 | <p>Tanggal: 27 November 2020 Date: November 27, 2020</p> <p>Tempat: Teleconference Zoom Location: Zoom Teleconference</p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants Komisaris Board of Commissioners: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi Board of Directors: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan periode Oktober – November 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan Oktober 2020; Laporan progress penyelesaian KPI dan serapan RKA untuk akhir tahun 2020; Pengajuan KPI dan RKA Korporasi untuk tahun 2021. |
| 12 | <p>Tanggal: 29 Desember 2020</p> <p>Tempat: Teleconference Zoom Location: Zoom Teleconference</p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants Komisaris Board of Commissioners: Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi Board of Directors: William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi, Roy Rahendra</p> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan KSD Kuartal 4 2020; Tindak lanjut masukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan November 2020; Laporan progress penyelesaian KPI dan serapan RKA untuk akhir tahun 2020. |

Rapat Direksi

The Board of Directors' Meeting

Rapat Direksi diselenggarakan setiap bulannya dan dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu. Di sepanjang tahun 2020, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali dengan tingkat rata-rata kehadiran 92,86%.

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Direksi membahas tentang:

- Laporan Manajemen mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional Perseroan;
- Pembahasan Persiapan RUPS;
- Pembahasan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan & RKAP;
- Menindaklanjuti temuan SPI;
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Direksi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi selambat lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat.

The Board of Directors' Meetings are held once per month and can be held at any time if deemed necessary. In 2020, the Board of Directors' held 57 (fifty-seven) meetings with average attendance rate of 92.86%

In general, the agenda of the Board of Directors' Meeting discusses:

- Management Reports on Financial and Operational Performance of the Corporation;
- Preparation of the GMS;
- Preparation of the Corporation's Long-Term Plan and Corporate Work Plan and Budget;
- Follow-up on Internal Audit's findings;
- Other agenda of the authority of the Board of Directors.

Based on the provisions stated in the Code of Corporate Governance, the publication concerning the plan to conduct Board of Directors' Meeting shall be made no later than 3 (three) days prior to the scheduled date. The publication shall inform the date and time of meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting, and the parties invited to attend the meeting.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi Pada Rapat Direksi Tahun 2020

Recapitulation of Directors Attendance at Directors' Meeting

| Direksi Board of Directors | Jumlah Wajib Rapat Amount of Mandatory Meeting | Jumlah Kehadiran Amount of Attendance | Tidak Hadir Absent | Persentase (%) Percentage |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|
| William P. Sabandar Direktur Utama <i>President Director</i> | 57 | 57 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i> | 57 | 57 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi**** <i>Acting Official of Finance and Corporate Management Director****</i> | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Silvia Halim Plt. Direktur Pengembangan Bisnis***** <i>Acting Official of Business Development Director*****</i> | 41 | 41 | 0 | 100 |
| Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operation & Maintenance</i> | 57 | 57 | 0 | 100 |
| Roy Rahendra* Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance and Corporate Management</i> | 40 | 40 | 0 | 100 |
| Tuhyat** Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance and Corporate Management</i> | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Ghamal Peris*** Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i> | 16 | 8 | 8 | 50 |
| Rata-Rata Average | | | | 92,86 |

*Roy Rahendra duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 20 April 2020

**Tuhyat tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 21 Februari 2020

***Ghamal Peris tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 20 April 2020

****Silvia Halim ditunjuk sebagai Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi sejak tanggal 21 Februari 2020 melalui SK/011/BOD-MRT/II/2020

*****Silvia Halim ditunjuk sebagai Plt. Direktur Pengembangan Bisnis sejak tanggal 04 Mei 2020 melalui SK/026/BOD-MRT/V/2020

*Roy Rahendra started as a member of the Board of Directors from April 20, 2020

**Tuhyat did not act as the Board of Directors started February 21, 2020.

***Ghamal Peris did not act as the Board of Directors started April 20, 2020.

****Silvia Halim is appointed as the Acting Official of Finance and Corporate Management Director starting February 21, 2020 through SK/011/BOD-MRT/II/2020

*****Silvia Halim is appointed as the Acting Official of Business Development Director starting May 4, 2020 through SK/026/BOD-MRT/V/2020

Sebagai bentuk persiapan Perseroan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, pada awal tahun Perseroan telah melakukan penyusunan dan penetapan jadwal tahunan (*calendar of event*) yang turut mencantumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk rencana rapat Direksi. Informasi terkait rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait, seperti Sekretaris Perusahaan dan organ-organ terkait lainnya. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

As a form of preparation of the Corporation in the implementation of the system and mechanism of Good Corporate Governance, at the beginning of the year the Corporation has conducted the preparation and determination of annual schedule including the times of meeting that covers the Board of Directors' meeting. Information concerning the planned meeting has been distributed widely to related parties such as the Corporate Secretary. In the event of incidental meeting proposal, the publication still can be made as effectively and efficiently as possible in accordance with the applicable documentation procedures (making minutes of meeting).

Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka ketua rapat Direksi yang menentukan. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari perbedaan pendapat.

Hasil pelaksanaan rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik, memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat, serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat.

Decisions of the Board of Directors' Meeting are adopted by consensus. If no agreement is reached, then the decision is taken by voting, based on a vote of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting. If the results of the vote are balanced, the chair of the Board of Directors' Meeting calls the decision. Minutes of meeting are made and administered by the Corporate Secretary or other official appointed by the Board of Directors and the copies are distributed to all meeting participants. In the event of dissenting opinions among the members of the Board of Directors concerning the decision made, the dissenting opinion must be included in the minutes of the meeting.

The results of the Board of Directors' Meetings are outlined in the minutes of meeting that are documented well and covers the discussion of the meeting agenda, dissenting opinions, and decisions made. The documentation is then signed by the leadership and all participants of the meeting to be distributed according to its designation. The minutes of meeting are prepared and administered by the Corporate Secretary and the copies must be distributed to all participants of the meeting.

Risalah Rapat Direksi Tahun 2020

Minutes of the Board of Commissioners's meeting in 2020

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> |
|----|--|--|
| | <p>Tanggal 06 Januari 2020 <i>Date: January 6, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Usulan KPI Korporasi 2020; • Strategic Deployment 2020. • Proposal for Corporate KPI in 2020; • Strategic Deployment 2020. |
| | <p>Tanggal 13 Januari 2020 <i>Date: January 13, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Anak Usaha Sarana; • Revisi Peraturan Gubernur No. 53; • Timeline Penyusunan Subsidi; • Pedoman Pengambilan Keputusan. • Establishment of Facility Subsidiary; • Amendment to Governor Regulation No. 53; • Timeline of Subsidy Preparation; • Guidelines for Decision-making |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|--|---|
| | <p>Tanggal 20 Januari 2020 <i>Date: January 20, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Progres, Tahapan dan Syarat Nominee Direktur Utama dan Komisaris PT MITJ; • Rekomendasi Nominasi Manajemen Anak Usaha. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Progress, Phases, and Requirements of President Director and Commissioner Nominee of the Corporation;</i> • <i>Recommendation of Nomination for the Management of Subsidiaries</i> |
| | <p>Tanggal 27 Januari 2020 <i>Date: January 27, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Konsultan Kajian Komprehensif PT MITJ; • Revisi Pergub 105 tahun 2017; • Usulan KSD PT MRT Jakarta 2020; • Antisipasi <i>Outbreak</i> Virus Corona. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Procurement of Consultant for Comprehensive Study of the Corporation</i> • <i>Amendment to Governor Regulation No. 105 Year 2017;</i> • <i>KSD Proposal of PT MRT Jakarta 2020;</i> • <i>Anticipation against Coronavirus Outbreak.</i> |
| | <p>Tanggal 03 Februari 2020 <i>Date: February 3, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <p>Reviu KPI Korporasi 2020</p> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Review of Corporate KPIs in 2020</i> |
| | <p>Tanggal 10 Februari 2020 <i>Date: February 10, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Progres Fase 2B • Status Event Penugasan MRT Jakarta | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Phase 2B Progress</i> • <i>Status of MRT Jakarta Assignment Event</i> |
| | <p>Tanggal 17 Februari 2020 <i>Date: February 17, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Tuhayat • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <p>Internal Direksi</p> | <p><i>Internal Board of Directors</i></p> |
| | <p>Tanggal 24 Februari 2020 <i>Date: February 24, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Ghamal Peris | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Audit BPKP; • <i>Shareholders</i> Minoritas Anak Usaha Sarana; • <i>Rebranding</i> Jaklingko + MRT Fest & Run; • <i>Penyertaan</i> Modal Daerah (PMD); • <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Appetite</i>; • <i>Evaluasi Procurement</i> PT MITJ. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>BPKP Audit Results;</i> • <i>Minority Shareholders of Facility Subsidiary;</i> • <i>Jaklingko Rebranding + MRT Fest & Run;</i> • <i>Regional Capital Participation;</i> • <i>Risk Tolerance and Risk Appetite;</i> • <i>Procurement Evaluation of PT MITJ</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|---|--|
| | <p>Tanggal 02 Maret 2020 <i>Date: March 2, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | Reviu KPI Korporasi 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Review of Corporate KPI in 2020</i> |
| | <p>Tanggal 09 Maret 2020 <i>Date: March 9, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Penularan Infeksi Virus COVID-19; • Analisis Internal Dampak COVID-19 terhadap KPI Korporasi, Penundaan Acara One Year Mobility, dan Setoran Modal Awal PT MITJ; • Skema Performance Bonus dan Sistem Job Grade PT MRT Jakarta 2019; • Kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT MITJ; • Hasil Audit ERP. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prevention of COVID-19 Transmission</i> • <i>Internal Analysis on the Impact of COVID-19 on the Corporation KPIs, Postponement of One Year Mobility Event, and Initial Capital Investment of PT MITJ;</i> • <i>Scheme of Performance Bonus and Job Grade system of the Corporation in 2019;</i> • <i>Review on the Remuneration of the BoD and BoC of PT MITJ;</i> • <i>Results of ERP Audit.</i> |
| | <p>Tanggal 16 Maret 2020 <i>Date: March 16, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | Internal Direksi | <i>Internal Board of Directors</i> |
| | <p>Tanggal 20 Maret 2020 <i>Date: March 20, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | Internal Direksi | <i>Internal Board of Directors</i> |
| | <p>Tanggal 23 Maret 2020 <i>Date: March 23, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi Denda Baru • Penjualan Kartu MTT | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Potential New Fine</i> • <i>MTT Card Sales</i> |
| | <p>Tanggal 30 Maret 2020 <i>Date: March 30, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | Internal Direksi | <i>Internal Board of Directors</i> |
| | <p>Tanggal 09 April 2020 <i>Date: April 9, 2020</i></p> <p>Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i></p> <p>Peserta Rapat Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | Reviu KPI Korporasi 2020 | <i>Review of Corporate KPIs in 2020</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|---|--|
| | <p>Tanggal 13 April 2020 <i>Date: April 13, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | <p>Evaluasi Proses Pembuatan; Laporan Tahunan 2019.</p> | <p><i>Evaluation of the Preparation of 2019 Annual Report</i></p> |
| | <p>Tanggal 20 April 2020 <i>Date: April 20, 2020</i> Tempat: Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Location: Wisma Nusantara, 21st Floor</i> Peserta Rapat <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi | <ul style="list-style-type: none"> • RKAP 2020; • Rencana Aksi Bersiap Menghadapi Kerusuhan di Tengah Wabah Corona; • Laporan Promosi Karyawan. | <ul style="list-style-type: none"> • 2020 RKAP; • <i>Action Plan to Prepare Against Riot Amidst the Pandemic;</i> • <i>Employee Promotion Report.</i> |
| | <p>Tanggal 27 April 2020 <i>Date: April 27, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • IT Audit ERP Fase 2; • Usulan Penonaktifan Suplai Listrik Pondok Indah untuk Penghematan Tagihan Listrik; • <i>Launching QR Ticketing;</i> • Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB); • Standar Keselamatan Penerapan Modifikasi Non WFH dan WFH. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>IT Audit Phase 2 ERP;</i> • <i>Proposal to Disable Electric Supply of Pondok Indah to Reduce Electricity Bills;</i> • <i>Launching of QR Ticketing;</i> • <i>Large-Scale Social Collaboration (KSBB);</i> • <i>Safety Standards of the Implementation Non-WFH and WFH Modification.</i> |
| | <p>Tanggal 04 Mei 2020 <i>Date: May 4, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <p>Reviu KPI Korporasi 2020</p> | <p><i>Review of Corporate KPI in 2020</i></p> |
| | <p>Tanggal 11 Mei 2020 <i>Date: May 11, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • WFH, WAO, WAP di Masa Tanggapan Darurat dan Masa Recovery COVID-19; • <i>Feasibility Study Transport-Hub;</i> • Peraturan Direksi TOD; • Naskah Perjanjian Subsidi dan OD Matrix; • RKA Perubahan; • <i>Restricted Cash.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>WFH, WAO, WAP at Emergency Response Period and Recovery Period of COVID-19;</i> • <i>Feasibility Study of Transport Hub;</i> • <i>Directors' Regulation concerning TOD;</i> • <i>Agreement Draft for Subsidy and OD Matrix;</i> • <i>RKA Amendment;</i> • <i>Restricted Cash.</i> |
| | <p>Tanggal 18 Mei 2020 <i>Date: May 18, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi Anak Usaha TOD dan Sarana; • Berita Acara Pembahasan dan Peraturan Direksi Tarif Penyelenggara; • Pola Operasi Juni onward (Pasca PSBB); • Skema Pembayaran Mitra Strategis; • Perkembangan QR Code. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Organisational Structure of TOD and Facility Subsidiaries;</i> • <i>Report on the Discussion and Directors' Regulation concerning Implementation Fare;</i> • <i>Operational Patterns for June onwards (Post-PSBB);</i> • <i>Payment Scheme for Strategic Partner;</i> • <i>QR Code Development.</i> |
| | <p>Tanggal 26 Mei 2020 <i>Date: May 26, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta <i>Meeting Participants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Komunikasi di masa Pandemi; • <i>HR Rotation Plan.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Communication Plan Amidst the Pandemic;</i> • <i>HR Rotation Plan.</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|--|--|
| | <p>Tanggal 02 Juni 2020 <i>Date: June 2, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <p>Prioritas Tindaklanjut Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi bulan Mei 2020.</p> | <p><i>Follow-up Priorities from Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors on May 2020.</i></p> |
| | <p>Tanggal 08 Juni 2020 <i>Date: June 8, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <p>Revisi RKA 2020</p> | <p><i>2020 RKA Revisions</i></p> |
| | <p>Tanggal 15 Juni 2020 <i>Date: June 15, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <p>Internal Direksi</p> | <p><i>Internal Board of Directors</i></p> |
| | <p>Tanggal 22 Juni 2020 <i>Date: June 22, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Progres Integrasi sistem <i>ticketing</i> (EFC) dan Pembentukan JV; • Revisi Cost Control Juni 2020; • Anggaran <i>Consumable Overhaul</i> Tahun Jamak; • Rekrutmen <i>Train Driver</i>; • Program Kerja Implementasi PRK TOD Kawasan Lebak Bulus, Fatmawati dan Blok M. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Integration Process of Ticketing System (EFC) and Establishment of JV;</i> • <i>Revision of Cost Control in June 2020;</i> • <i>Multi-years Consumable Overhaul Budget;</i> • <i>Train Driver Recruitment;</i> • <i>Work Program to Implement PRK TOD at Lebak Bulus, Fatmawati, and Blok M Area.</i> |
| | <p>Tanggal 29 Juni 2020 <i>Date: June 29, 2020</i> Tempat: Gedung A Lantai 2, Depo Lebak Bulus <i>Location: Building A, 2nd Floor, Lebak Bulus Depo</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Opsi Pembiayaan Jalur MRT (<i>Strategic Financing</i>); • <i>Job Grade Anak Usaha TOD & Sarana</i>; • <i>Update Tindaklanjut Rapat BOD.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Financing Options for MRT Track (Strategic Financing);</i> • <i>Job Grade of TOD & Facility Subsidiaries;</i> • <i>Update on the Follow-up from BoD Meeting.</i> |
| | <p>Tanggal 06 Juli 2020 <i>Date: July 6, 2020</i> Tempat: Gedung A Lantai 2, Depo Lebak Bulus <i>Location: Building A, 2nd Floor, Lebak Bulus Depo</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perkembangan PT MITJ per Juni 2020; • Kebutuhan <i>Manpower</i> untuk Kegiatan <i>Rollingstock Overhaul</i>; • Tindaklanjut Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi Juni 2020. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Progress Report of PT MITJ as of June 2020;</i> • <i>Manpower Requirement for Rolling stock Overhaul Activities;</i> • <i>Follow-up on Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in June 2020.</i> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|--|--|--|
| | <p>Tanggal 13 Juli 2020 <i>Date: July 13, 2020</i></p> <p>Tempat: Gedung A Lantai 2, Depo Lebak Bulus <i>Location: Building A, 2nd Floor, Lebak Bulus Depo</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Hasil Seleksi UMKM; • Update pedoman WBS • Shareholders' Agreement (SHA) Anak Usaha EFC; • Update TOD dan Rapim BKPRD. | <ul style="list-style-type: none"> • Approval of MSME Selection Results; • Update on WBS Guidelines; • Shareholders' Agreement (SHA) of EFC Subsidiary; • Update on TOD and Rapim BKPRD. |
| | <p>Tanggal 20 Juli 2020 <i>Date: July 20, 2020</i></p> <p>Tempat: Gedung A Lantai 2, Depo Lebak Bulus <i>Location: Building A, 2nd Floor, Lebak Bulus Depo</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Usulan Dispute Board Member Kontrak Konstruksi Fase 2; • Persiapan Pembentukan Anak Usaha (PT ITJ); • Strategy dan Rencana Aksi Recovery; • KPI Perubahan 2020. | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal for Dispute Board Member of Phase 2 Construction Contract; • Preparation of Subsidiary Establishment (PT ITJ); • Recovery Strategy and Action Plan; • Amendment to 2020 KPI. |
| | <p>Tanggal 27 Juli 2020 <i>Date: July 27, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • MRTJ Accel; • Pemenuhan MPP 2020 • Food Map Kerjasama JakTour; • Revisi Anggaran (pengendalian biaya) dan Penyesuaian Proyeksi Farebox Revenue. | <ul style="list-style-type: none"> • MRTJ Accel; • Fulfillment of 2020 MPP • Food Map in Collaboration with JakTour • Budget Amendment (Cost Control) and Adjustment of Farebox Revenue Adjustment. |
| | <p>Tanggal 04 Agustus 2020 <i>Date: August 4, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perkembangan PT MITJ per Juli 2020; • KPI Korporasi dan Direktorat 2021; • Persiapan Audit ISO 37001. | <ul style="list-style-type: none"> • Progress Report of PT MITJ as of July 2020; • 2021 Corporate and Directorate KPI; • Preparation for Audit of ISO 37001. |
| | <p>Tanggal 10 Agustus 2020 <i>Date: August 10, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Usulan Revisi Cost Control; • Kronologi Perbedaan Perhitungan IKU; • KPI Korporasi 2021. | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal for Revised Cost Control; • Chronology of Discrepancy in IKU Calculation; • 2021 Corporate KPI |
| | <p>Tanggal 14 Agustus 2020 <i>Date: August 14, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <p>Perkembangan Pembangunan Konstruksi Fase 2A dan 2B.</p> | <p>Phase 2A and 2B Construction Progress.</p> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|--|---|
| | <p>Tanggal 18 Agustus 2020 <i>Date: August 18, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan/Update Peraturan Direksi; Laporan Pekerjaan Lintas Unit Kerja yang melibatkan BUMD: Transformasi BUMD, MITJ, JLI, ITJ; Update Recovery Strategy 2020; Tindak lanjut Monitoring Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi bulan Juli 2020. | <ul style="list-style-type: none"> Update on Directors' Regulation; Report on Works Across Work Unit that Involves ROE: ROE Transformation, MITJ, JLI, ITJ; Update on 2020 Recovery Strategy; Follow-up on the Monitoring of Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors in July 2020. |
| | <p>Tanggal 24 Agustus 2020 <i>Date: August 24, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Usulan Perubahan RKA 2020; KPI Korporasi dan Direktorat 2021. | <ul style="list-style-type: none"> Proposal of 2020 RKA Amendment; 2021 Corporate and Directorate KPI. |
| | <p>Tanggal 31 Agustus 2020 <i>Date: August 31, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Construction Complaint Handling Management System Visitor Center di Area Konstruksi CP201; Tindak lanjut Monitoring Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi bulan Agustus 2020 Peraturan Direksi TOD. | <ul style="list-style-type: none"> Construction Complaint Handling Management System; Visitor Center at CP201 Construction Area; Follow up the Monitoring of Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors on August 2020, Directors' Regulation concerning TOD. |
| | <p>Tanggal 07 September 2020 <i>Date: September 7, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan PT MITJ per Agustus 2020; Usulan Revisi Cost Control; Evaluasi Kinerja PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019; Hasil Market Sounding dan Rekomendasi Advertisement Entrance & CTVT; Permohonan Mitra Strategis pada Pengusahaan Pilar dan Viaduct. | <ul style="list-style-type: none"> Progress Report of PT MITJ as of August 2020; Proposal for Revised Cost Control; Performance Evaluation of the Corporation in 2019; Results of Market Sounding and Recommendation for Advertisement Entrance & CTVT; Strategic Partner Request for Pillar and Viaduct Business. |
| | <p>Tanggal 14 September 2020 <i>Date: September 14, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Variation Order (VO) CP 200; Hasil Rapat Koordinasi Tagihan Proyek Fase 1 & 2; Persiapan Tagihan Akhir Tahun. | <ul style="list-style-type: none"> Variation Order (VO) of CP 200; Results of Coordination Meeting for Phase 1 & 2 Project Bills; Preparation for End-of Year Bills. |
| | <p>Tanggal 21 September 2020 <i>Date: September 21, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Skenario PSBB Cost Control Persiapan Audit Stage 2: Sistem Manajemen Anti Penyuapan; Revisi Pedoman Pengadaan. | <ul style="list-style-type: none"> Scenario of PSBB Cost Control Preparation for Audit Stage 2: Anti-Bribery Management System; Revision of Procurement Guidelines. |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|--|---|
| | <p>Tanggal 28 September 2020 <i>Date: September 28, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Pompa di Stasiun sebagai Pencegahan Banjir; Pagu Sementara RKAP. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Provision of Pump at the Stations to Prevent Flood;</i> <i>Temporary ceiling of RKAP.</i> |
| | <p>Tanggal 05 Oktober 2020 <i>Date: October 5, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan PT MITJ; RKA 2021; Laporan Perkembangan PT ITJ. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Progress Report of PT MITJ;</i> <i>2021 RKA;</i> <i>Progress Report of PT ITJ.</i> |
| | <p>Tanggal 09 Oktober 2020 <i>Date: October 9, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <p>Pendanaan atas Penebalan Keamanan di Koridor MRT Jakarta.</p> | <p><i>Financing for Safety Enhancement at Jakarta MR Corridors.</i></p> |
| | <p>Tanggal 12 Oktober 2020 <i>Date: October 12, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> RKAP 2021; Update Laporan Keuangan; Laporan Penataan Kantor; Proses Tender OMCS Fase 2. | <ul style="list-style-type: none"> <i>2021 RKAP;</i> <i>Update on Financial Statements;</i> <i>Office Arrangement Report;</i> <i>Phase 2 OMCS Tender Process.</i> |
| | <p>Tanggal 15 Oktober 2020 <i>Date: October 15, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <p>Usulan Pagu Indikatif RKA 2021.</p> | <p><i>Proposed Indicative Ceiling of 2021 RKA.</i></p> |
| | <p>Tanggal 19 Oktober 2020 <i>Date: October 19, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Digital Asset Task Force; Review Materi Press Conference Fase 2 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Digital Asset Task Force;</i> <i>Material Review for Phase 2 Press Conference</i> |
| | <p>Tanggal 23 Oktober 2020 <i>Date: October 23, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <p>Usulan Pagu Indikatif RKA 2021.</p> | <p><i>Proposed Indicative Ceiling of 2021 RKA.</i></p> |

| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|---|---|
| | <p>Tanggal 26 Oktober 2020 <i>Date: October 26, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Rencana Penguatan Implementasi GRC; RKA 2021 dan Usulan Revisi RKA 2020; Usulan MPP Overhaul. | <ul style="list-style-type: none"> GRC Implementation Enhancement Plan; 2021 RKA and Proposed Revision to 2020 RKA; Overhauled MPP Proposal. |
| | <p>Tanggal 03 November 2020 <i>Date: November 3, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | Laporan Perkembangan PT MITJ per Oktober 2020. | <i>Progress Report of PT MITJ as of October 2020;</i> |
| | <p>Tanggal 09 November 2020 <i>Date: November 9, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Komite Proyek Direktorat Konstruksi; Revisi Anggaran ke-8; Restrukturisasi TOD. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Project Committee of Construction Directorate;</i> <i>The 8th Budget Amendment;</i> <i>TOD Restructuration.</i> |
| | <p>Tanggal 16 November 2020 <i>Date: November 16, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Penyertaan Modal PT MITJ; Usulan Pemasangan Safety Net Aluminium di Stasiun Dukuh Atas; Replacement Manpower RM & RO yang Mutasi ke OCC; Update Kebutuhan Material Overhaul 2 Trainset; Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PLN; Investasi dan Revenue Digital Asset. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Capital Investment on PT MITJ;</i> <i>Proposal to Install Safety Net Aluminium at Dukuh Atas Station;</i> <i>Replacement of Manpower RM & RO who are transferred to OCC;</i> <i>Update on Material Requirements of 2 Trainset Overhaul;</i> <i>Amendment to Electricity Purchase Agreement with PLN;</i> <i>Investment and Digital Asser Revenue.</i> |
| | <p>Tanggal 23 November 2020 <i>Date: November 23, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Rapat Induk - Anak Usaha ITJ; Corporate Venturing Program; Update Pendapatan NFB Materi Pra-RUPS; Cost Control. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Meeting between Holding – Subsidiary ITJ;</i> <i>Corporate Venturing Programme;</i> <i>Update on Pre-GMS Material NFB Revenue;</i> <i>Cost Control.</i> |
| | <p>Tanggal 01 Desember 2020 <i>Date: December 1, 2020</i></p> <p>Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i></p> <p>Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> Cost Control; Transformasi Digital; Update Pengisian Posisi Pejabat Struktural; Transport Hub: Pengadaan. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Cost Control;</i> <i>Digital Transformation;</i> <i>Update on the Fulfilment of Structural Officers;</i> <i>Transport Hub: Procurement.</i> |

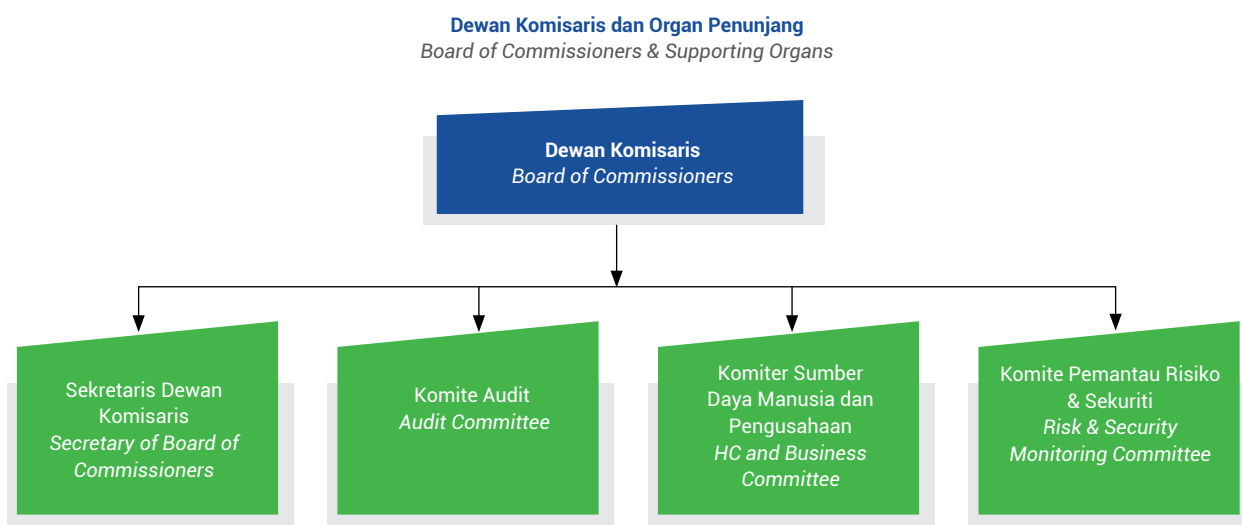
| No | Tanggal, Tempat Rapat dan Peserta Rapat <i>Date, Location, and Participants of Meeting</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | |
|----|---|---|---|
| | <p>Tanggal 07 Desember 2020 <i>Date: December 7, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | Usulan Pengendalian Biaya | <i>Cost Control Proposal</i> |
| | <p>Tanggal 14 Desember 2020 <i>Date: December 14, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 | <i>2020 Annual Report and Sustainability Report</i> |
| | <p>Tanggal 21 Desember 2020 <i>Date: December 21, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Renovasi Wisnus dan Lokasi Sementara Direksi; • Cost Control; • Hasil Evaluasi Pengadaan CP203; • Pengusahaan Area Komersial PT MRT Jakarta. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Development of Domestic Traveller Renovation and Temporary Location of the Board of Directors;</i> • <i>Cost Control;</i> • <i>Report on CP203' Procurement Evaluation;</i> • <i>Commercialization of Commercial Area of the Corporation.</i> |
| | <p>Tanggal 28 Desember 2020 <i>Date: December 28, 2020</i> Tempat: Zoom Conference Call <i>Location: Zoom Conference Call</i> Peserta Meeting Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • William P. Sabandar • Silvia Halim • Muhammad Effendi • Roy Rahendra | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Improvement Infrastruktur Depo;</i> • <i>Agenda Divisi Human Capital;</i> • <i>Strategic Deployment 2021;</i> • <i>Permohonan Relaksasi Mitra Strategis;</i> • <i>Perkembangan Transformasi Digital Korporasi.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Depot Infrastructure Improvement;</i> • <i>Human Capital Division Agenda;</i> • <i>2021 Strategic Deployment;</i> • <i>Relaxation Request for Strategic Partners;</i> • <i>Progress of Corporate Digital Transformation.</i> |

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris dibantu oleh organ-organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia, dan Pengusahaan, serta Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.

In carrying out the duties and responsibilities in supervising as well as providing advice and recommendations, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, i.e., Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Human Capital and Business Committee, and Risk & Security Monitoring Committee.



Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secretary of the Board of Commissioners has the duties and functions in carrying out administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duty and reports directly to the Board of Commissioners. In addition, the Secretary of the Board of Commissioners has an important role in ensuring that the Board of Commissioners applies GCG principles in accordance with best practices and the prevailing laws and regulation.

Kualifikasi Menjadi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 harus memenuhi persyaratan memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan badan usaha; memiliki integritas yang baik, memahami fungsi kesekretariatan, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Qualifications of the Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 must fulfil the requirements in understanding the management, supervision, and development system of enterprise; having good integrity, understanding secretarial functions, and being able to communicate and coordinate well.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam Anggaran Dasar maupun Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pengangkatan dilakukan oleh Dewan Komisaris, kemudian dicatatkan dalam perjanjian kerja dengan Perseroan secara tahunan.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Rendi Alhial berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor SK/281-1/BOD-MRT/X/2019.



Rendi Alhial
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Terms of Office Period

Provisions concerning the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners are not regulated in the Articles of Association nor in the Board Manual. The appointment is carried out by the Board of Commissioners then recorded in an annual work agreement with the Corporation.

Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is Rendi Alhial in accordance with Decree of the Board of Directors of the Corporation Number SK/281-1/BOD-MRT/X/2019.

| | | |
|--|---|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 Oktober 2019 – 30 September 2021 | October 1 st 2019 – September 30 th 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 36 Tahun | 36 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta | Jakarta |
| Domisili <i>Domicile</i> | Bekasi | Bekasi |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | Ditetapkan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada 1 Oktober 2019 | Appointed as Board of Commissioner Secretary on October 1, 2019 |
| Pendidikan <i>Education</i> | S2 Magister Psikologi Klinis Dewasa Universitas Indonesia | Master's Degree in Adult Clinical Psychology, University of Indonesia |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dewan Komisaris MRT Jakarta (2019 – sekarang) • Human Capital Services Department Head MRT Jakarta (2018 – 2019) • Human Resources Department Head MRT Jakarta (2016 – 2018) • HR Operation Specialist CSUL Finance (2013 – 2016) • HR Planning & Development Supervisor Toyota Manufacturing (2012 – 2013) • Training & Development Consultant Experd Consultant (2011 – 2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Board of Commissioner Secretary (2019 – now) • Human Capital Services Department Head MRT Jakarta (2018 – 2019) • Human Resources Department Head MRT Jakarta (2016 – 2018) • HR Operation Specialist CSUL Finance (2013 – 2016) • HR Planning & Development Supervisor Toyota Manufacturing (2012 – 2013) • Training & Development Consultant Expert Consultant (2011 – 2012) |
| Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi <i>Certification and Competency Development</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris oleh CRMS Indonesia (2020); • Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan oleh PPIA – YPIA (2020); • Best Practices in Implementing Effective Governance from Rules to Principles Oleh PPIA – YPIA (2019). | <ul style="list-style-type: none"> • ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms for Board of Commissioners by CRMS Indonesia (2020); • Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation by PPIA – YPIA (2020); • Best Practices in Implementing Effective Governance from Rules to Principles Oleh PPIA – YPIA (2019). |

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, tugas pokok dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam kegiatan kesekretariatan yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi, maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, seperti:
 - a. Pemantauan tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan;
 - c. Membuat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang;
 - d. Mendokumentasikan hasil rapat Dewan Komisaris;
 - e. Menyampaikan salinan risalah Rapat Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris;
 - f. Mengelola data, informasi, dukungan administrasi dan pemantauan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
5. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib;
6. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
7. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Based on the Board Manual, the core duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities including:

1. Carrying out secretarial administration activities;
2. Organising the Board of Commissioners' meeting and meetings between the Board of Commissioners with Shareholders/Capital Owners, the Board of Directors, and other relevant parties;
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and Committees within the Board of Commissioners such as:
 - a. Monitoring the follow-up of the decisions, recommendations, and direction of the Board of Commissioners
 - b. Administrative materials concerning the reports/activities of the Board of Directors in managing the Corporation;
 - c. Making invitations to the Board of Commissioners' Meetings, to be delivered to all members of the Board of Commissioners and other invited parties;
 - d. Documenting the results of the Board of Commissioners' Meeting;
 - e. Delivering copies of the minutes of the Board of Commissioners' meeting to the members of the Board of Commissioners;
 - f. Managing data, information, administrative supports, and monitoring relating to matters that require approval or recommendations from the Board of Commissioners.
4. Collecting technical data from the Committees within the Board of Commissioners and Board of Commissioners' experts as required by the Board of Commissioners;
5. Administering outgoing and incoming letters from and to the Board of Commissioners as well as other documents, in an orderly manner;
6. Preparing the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
7. Preparing the Draft of Reports of the Board of Commissioners;
8. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the prevailing laws and regulation and implements Good Corporate Governance principles;
9. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request;

10. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
11. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain;
12. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

10. Coordinating the members of Committee, if required in order to expedite the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
11. Being a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties;
12. Carrying out other duties from the Board of Commissioners.

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, terdiri dari honorarium per bulan dan tunjangan jabatan.

Remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners by taking into account the Corporation's ability, consisting of monthly honorarium and position allowance.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Competency Development for the Secretary of the Board of Commissioners

| No | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training | Waktu Pelaksanaan Time of Event | Penyelenggara Organizer |
|----|--|--|---|----------------------------|
| 1 | Training & Onsite Learning | Best Practices in Implementing Effective Governance from Rules to Principles | 24 – 28 November 2019 November 24-28, 2019 | PPIA – YPIA |
| 2 | Training | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan Roles and Responsibilities of the Commissioners' Committee in Overseeing Risk Management Practices and Internal Control at the Corporation | 10 – 11 Januari 2020 January 10 – 11, 2020 | PPIA – YPIA |
| 3 | Training | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 oleh Komisaris dan Dewan Komisaris ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms for Board of Commissioners | 9 – 10 September 2020 September 9-10, 2020 | CRMS Indonesia |

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020

Reports on the Delivery of Duties and Performance Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners in 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas dengan baik, meliputi:

1. Menyusun notulensi untuk rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat internal Dewan Komisaris, maupun rapat Komite Komisaris;

In 2020, the Secretary of the Board of Commissioners has delivered the duties well, including:

1. Preparing the minutes of meeting for the joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the internal meetings of the Board of Commissioners, and the meetings of the Committees of the Board of Commissioners;

2. Menyusun korespondensi arahan tertulis dari Dewan Komisaris kepada Komite Komisaris maupun Direksi Perusahaan;
 3. Menyusun laporan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham termasuk di dalamnya laporan triwulanan, laporan pelatihan, laporan persetujuan KPI dan RKA Korporasi, serta surat rekomendasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
 4. Menindaklanjuti semua temuan dan masukan untuk Dewan Komisaris maupun Komite Komisaris berdasarkan penilaian tata kelola perusahaan yang baik dari BPKP;
 5. Mengawal tindak lanjut manajemen atas arahan atau masukan Dewan Komisaris yang disampaikan pada rapat gabungan maupun korespondensi tertulis;
 6. Mengelola *dashboard* Dewan Komisaris termasuk di dalamnya informasi surat masuk, surat keluar, daftar tindak lanjut manajemen, laporan realisasi RKA, laporan pelaksanaan audit eksternal dan internal untuk memudahkan pengawasan Dewan Komisaris dari mana saja dan kapan saja.
2. *Preparing correspondence of written directives from the Board of Commissioners to the Committees of the Board of Commissioners and to the Board of Directors;*
 3. *Preparing written reports of the Board of Commissioners for the Shareholders including quarterly report, training reports, Corporate KPI & RKA Approval reports, and recommendations of remunerations for the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
 4. *Following up all findings and input for the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners based on GCG assessment by BPKP;*
 5. *Overseeing management follow-up on the directives or input from the Board of Commissioners delivered at Joint Meeting as well as from written correspondence;*
 6. *Managing the dashboard of the Board of Commissioners, including information on incoming letters, outgoing letters, list of management follow-up, RKA realisation report, external and internal audit report in order to ease the supervision of the Board of Commissioners from any place at any time.*

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Oleh Dewan Komisaris

Performance Evaluation and Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners by the Board of Commissioners

| Sasaran Strategis <i>Strategic Goals</i> | Indeks Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score (%)</i> |
|---|---|---|
| Aspek Kualitas <i>Quality Aspects</i> | Ketepatan data dan informasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris <i>Accuracy of data and information submitted to the Board of Commissioners</i> | 98,08 |
| | Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris <i>Punctuality of work completion based on the request of the Board of Commissioners</i> | 98,08 |
| Aspek Ketepatan Waktu <i>Punctuality Aspects</i> | Ketepatan waktu untuk mendapatkan informasi terkini <i>Punctuality in obtaining updated information</i> | 96,15 |
| | Ketepatan waktu penyelesaian <i>output</i> yang dibutuhkan tanpa mengakami hambatan <i>Punctuality of completion of output required without encountering obstacles</i> | 92,31 |
| Aspek Sikap <i>Behaviour Aspects</i> | Kemudahan melakukan koordinasi dan komunikasi <i>Ease of coordination and communication</i> | 98,08 |
| | Kesiapan membantu apabila dibutuhkan <i>Readiness to help whenever required</i> | 100 |
| Skor Total <i>Total Score</i> | | 97,12 |

Komite Remunerasi dan Nominasi *Remuneration and Nomination Committee*

Fungsi komite Komisaris dalam hal menentukan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dilaksanakan oleh Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan. Informasi tentang Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan, lihat halaman 364 Laporan ini.

The functions of this committee of the Board of Commissioners are concerning the determination of remuneration and nomination for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, carried out by the Human Capital and Business Committee. Information concerning Human Capital and Business Committee is presented on page 364 of this Report.

Komite Audit *Audit Committee*

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Perseroan, dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners whose function is to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision, providing input and recommendations to the Board of Directors, encouraging the implementation of GCG principles across the Corporation, and improving the quality of financial disclosure and reporting. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners and carries out the functions in accordance with the regulations and instructions from the Board of Commissioners.

Kualifikasi Anggota Komite Audit

1. Persyaratan Independensi

- a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, dan atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.

Qualifications of Members of the Audit Committee

1. Independence Requirements

- a. Not working for a Public Accountant Firm appointed as external auditor of the Corporation, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, or other consultancy services to the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;
- b. Not being a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control Corporation activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;
- c. Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation;
- d. Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Shareholders of the Corporation.

2. Persyaratan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perseroan;
- e. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

2. Requirements

- a. Having high integrity, ability, knowledge, and adequate experience in accordance with their educational background, and being able to communicate well;
- b. At least one member of the Audit Committee must have an educational background and experience in finance and accounting;
- c. Having sufficient knowledge to read and understand financial statements;
- d. Having adequate knowledge concerning the laws and regulations, especially those concerning Regionally-Owned Enterprises and laws and regulations concerning the business operations of the Corporation;
- e. A member of the Audit Committee must be having the ability and understanding concerning the Corporation's business scope.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan jangka waktu masa Jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Terms of Office

The terms of office for the members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners of the Corporation is in line with the Terms of Office of the Board of Commissioners without prejudice to the right of the Board Commissioners to dismiss them at any time.

Jumlah Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit Tahun 2020**Number and Composition of the Members of the Audit Committee in 2020****Susunan Komite Audit Per 31 Desember 2020**

Composition of the Audit Committee as of December 31, 2020

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Periode Jabatan Terms of Office |
|-------------------|--|--|--|
| Adnan Pandu Praja | Ketua Komite Chairman of the Audit Committee | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Mohamad Hasan | Anggota Komite Member of the Audit Committee | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Krishna Mochtar | Anggota Komite Member of the Audit Committee | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Hary Budiarto | Anggota Komite Member of the Audit Committee | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 November 1, 2020 – October 31, 2021 |

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit

Ketua Komite Audit dijabat Adnan Pandu Praja, yang juga Komisaris Perseroan. Profil Ketua Komite Audit Adnan Pandu Praja, lihat halaman 92 pada bahasan tentang profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan.

Profile of Chairman and Members of Audit Committee

The Chairperson of the Audit Committee is Adnan Pandu Praja who is a Commissioners for the Corporation as well. The profile of the Chairperson of the Audit Committee Adnan Pandu Praja is presented on page 92 under the discussion of Profile of the Board of Commissioners on the Chapter Corporate Profile.



Mohamad Hassan
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

| | | |
|--|--|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 60 Tahun | 60 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta, 21 Desember 1960 | Jakarta, December 21, 1960 |
| Domisili <i>Domicile</i> | Tangerang Selatan, Banten | South Tangerang, Banten |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | SK/007/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> S-2 Internal Audit, Cleveland State University, USA, 1993; D-IV Akunting, STAN, 1991 | <ul style="list-style-type: none"> S-2 Internal Audit, Cleveland State University, USA, 1993; D-IV Accounting, STAN, 1991. |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> Komite Audit, PT Bakrieland Development, Tbk, November 2019 – Sekarang; Direktur Akademis, Pusat Pelatihan Internal Audit, April 2018 – Sekarang; Komisaris, Bina Audita Indonesia, April 2018 – Sekarang; Komite Audit, Universitas Indonesia, Maret 2017 - Sekarang; Komite Audit, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Maret 2016 – Sekarang; Komite Audit, PT MRT Jakarta (Perseroda), Februari 2016 – Sekarang; Komite Audit, PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk, November 2018 – Oktober 2019; Direktur, PT Bina Audita Indonesia – YPIA, Desember 2014 – Maret 2018; Komite Audit, PT Perkebunan Nusantara 5 (Persero), Oktober 2014 – September 2017; Komite Audit, PT Darma Henwa, Desember 2007 – September 2017; Komite Audit, PT Bakrieland Development Tbk, Maret 2008 – Juli 2016; Senior Consultant, PT Bina Audita Indonesia YPIA, Januari 2013 – Desember 2014 Komite Audit, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Juni 2013 – September 2014; Komite Audit, PT Pupuk Indonesia Holding Company, April 2011 – September 2014; Komite Audit, PT Asabri (Persero), Maret 2008 – Juli 2014 | <ul style="list-style-type: none"> Audit Committee, PT Bakrieland Development, Tbk, November 2019 - Present; Academic Director, Internal Audit Training Centre, April 2018 - Present; Commissioner, Bina Audita Indonesia, April 2018 - Present; Audit Committee, University of Indonesia, March 2017 - Present; Audit Committee, Deposit Insurance Agency (LPS), March 2016 - Present; Audit Committee, PT MRT Jakarta (Perseroda), February 2016 - Present; Audit Committee, PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk, November 2018 - October 2019; Director, PT Bina Audita Indonesia - YPIA, December 2014 - March 2018; Audit Committee, PT Perkebunan Nusantara 5 (Persero), October 2014 - September 2017; Audit Committee, PT Darma Henwa, December 2007 - September 2017; Audit Committee, PT Bakrieland Development Tbk, March 2008 - July 2016; Senior Consultant, PT Bina Audita Indonesia - YPIA, January 2013 - December 2014; Audit Committee, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, June 2013 - September 2014; Audit Committee, PT Pupuk Indonesia Holding Company, April 2011 - September 2014; Audit Committee, PT Asabri (Persero), March 2008 - July 2014 |

**Krishna Mochtar**

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

| | | |
|--|---|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 59 Tahun | 59 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta, 21 September 1961 | Jakarta, September 21, 1961 |
| Domisili <i>Domicile</i> | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | SK/007/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2000; • Master of Science in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 1994; • Sarjana Teknik Sipil (Struktur), University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2000; • Master of Science in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 1994; • Bachelor of Science in Civil Engineering (Structure), University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1987 |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Head of Senate, 2016 – Sekarang; • Komite Audit MRT Jakarta, 2019 - Sekarang • Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik ITI, 2000-2008; • Kepala Laboratorium Material Konstruksi ITI, 2000-2001; • Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik, Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, 1996-1997; • Head of Civil Engineering Studio, 1994-1996; • Kepala Laboratorium Soil Mechanics, ITI, 1990-1991; • Sekretaris Laboratorium Soil Mechanics, ITI, 1989-1990 | <ul style="list-style-type: none"> • Head of Senate, 2016 – Present; • Audit Committee MRT Jakarta, 2019 - Present • ITI Vice Rector in Academic Affairs (Vice Rector 1), 2000-2008; • Head of ITI Construction Materials Laboratory, 2000-2001; • Vice Dean in Academic Affairs (Assistant Dean 1), Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, 1996-1997; • Head of Civil Engineering Studio, 1994-1996; • Head of Soil Mechanics, Laboratory ITI, 1990-1991; • Secretary of Soil Mechanics, ITI Laboratory, 1989-1990 |



Hary Budiarto
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

| | | |
|---|---|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | <i>Indonesia</i> |
| Usia <i>Age</i> | 53 Tahun | <i>53 Years Old</i> |
| Kelahiran <i>Born</i> | Surabaya, 28 Juni 1967 | <i>Surabaya, June 28, 1967</i> |
| Domisili <i>Domicile</i> | Depok, Jawa Barat | <i>Depok, West Java</i> |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/007/BOC-MRT/X/2020 | <i>SK/007/BOC-MRT/X/2020</i> |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Doktor (S3), Science and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology (Titech) Japan, 1999-2004; • Magister (S2), Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, 1996- 1999; • Sarjana (S1), Department of Informatics, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 1985-1990. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Doctoral Degree (S3), Science and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology (Titech) Japan, 1999-2004;</i> • <i>Master Degree (S2), Faculty of Computer Science, University of Indonesia, 1996- 1999;</i> • <i>Bachelor Degree (S1), Department of Informatics, Sepuluh November Institute of Technology (ITS) Surabaya, 1985-1990.</i> |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Perekayasa Ahli Utama (Profesor) Principal Engineering, Pusat Pelayanan Teknologi, (2019-sekarang); • Komite Audit MRT Jakarta, (2019 – sekarang) • Professional Staff of Bank Rakyat Indonesia (BRI), Institut Teknologi dan Bisnis BRI, (2019-sekarang); • Deputy of Data and Information, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2015-2019); • Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPT (2014-2015); • Kepala Pusat Data, Informasi, dan Standardisasi, Sekretariat Utama BPPT (2010-2014); • Kepala Divisi Sistem Komunikasi Multimedia, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPT (2005-2009); • Peneliti untuk Pusat Penelitian untuk Penilaian dan Aplikasi Teknologi Lingkungan, BPPT (1992-2005); • Pemrogram untuk Indosoft Teknologi Utama Lts. (1991-1994). | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Principal Engineering Expert (Professor) Principal Engineering, Technology Services Centre, (2019-present);</i> • <i>Audit Committee MRT Jakarta (2019 – present);</i> • <i>Professional Staff of Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Institute of Technology and Business, (2019-present);</i> • <i>Deputy of Data and Information, Corruption Eradication Commission (KPK), (2015-2019);</i> • <i>Director of Research Centre for Information and Communication Technology, BPPT, (2014- 2015);</i> • <i>Head of Centre for Data, Information and Standardization, in the principal secretary, BPPT, (2010-2014);</i> • <i>Head of Division for Multimedia Communication Systems in the Centre for Information and Communication Technology, BPPT, (2005-2009);</i> • <i>Researchers in the Research Centre for the Assessment and Application for Environmental Technology, BPPT, (1992-2005);</i> • <i>Programmers in Indosoft Utama Technology Lts, (1991-1994).</i> |

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016.

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Audit Committee of the Corporation has a Charter as a reference and work guidelines for the Audit Committee in carrying out their duties and authorities concerning the obligations to comply with the prevailing laws and regulations and internal control of the Corporation. The Audit Committee Charter is stipulated through the Commissioners' Decree No. 002 Year 2016, dated January 29, 2016.

| Piagam Komite Audit Audit Committee Charter | | |
|--|--|--|
| 1 | Struktur Komite Audit | Audit Committee Structure |
| 2 | Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit | Formation and appointment of members of the Audit Committee |
| 3 | Persyaratan dan Masa Tugas Anggota Komite Audit | Requirements and tenure of members of the Audit Committee |
| 4 | Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Komite Audit | The functions, duties, authorities and responsibilities of the Audit Committee |
| 5 | Lingkup Pekerjaan | Scope of work |
| 6 | Kode Etik dan Mekanisme Rapat | Code of ethics and meeting procedures |

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi.

- Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Audit.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee of the Corporation are required to meet the following independence criteria.

- Not working for a Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, or other consultancy services to the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;
- Not being a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control Corporation activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners, except for Members of Audit Committee from the Board of Commissioners;
- Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the Audit Committee;
- Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Ultimate / Controlling Shareholders of the Corporation.

Transparansi Independensi Komite Audit
Transparency of Independence of the Audit Committee

| Aspek Independensi <i>Independence Aspects</i> | Anggota Komite Audit <i>Members of Audit Committee</i> | | |
|--|--|-----------------|---------------|
| | M. Hassan | Krishna Mochtar | Hary Budiarto |
| Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>A person who provides audit services, non-audit services, or other consulting services to the Corporation within the last 6 (six) months</i> | X | X | X |
| Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>A person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation's activities within the last 6 (six) months</i> | X | X | X |
| Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan <i>Have a business relationship, both directly and indirectly related to the Corporation's business</i> | X | X | X |
| Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family relations with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i> | X | X | X |

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Tugas Komite Audit

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi *Internal Audit* maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Audit Committee

Duties of the Audit Committee

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and performance of external and internal auditors;
2. Assessing the implementation and results of audit carried out by the Internal Audit Division and external auditor;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding improvement of management control system and the implementation;
4. Ensuring that satisfactory review procedures for all information released by the Corporation have been in place;
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Tanggung jawab Komite Audit

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris,
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan, sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - b. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

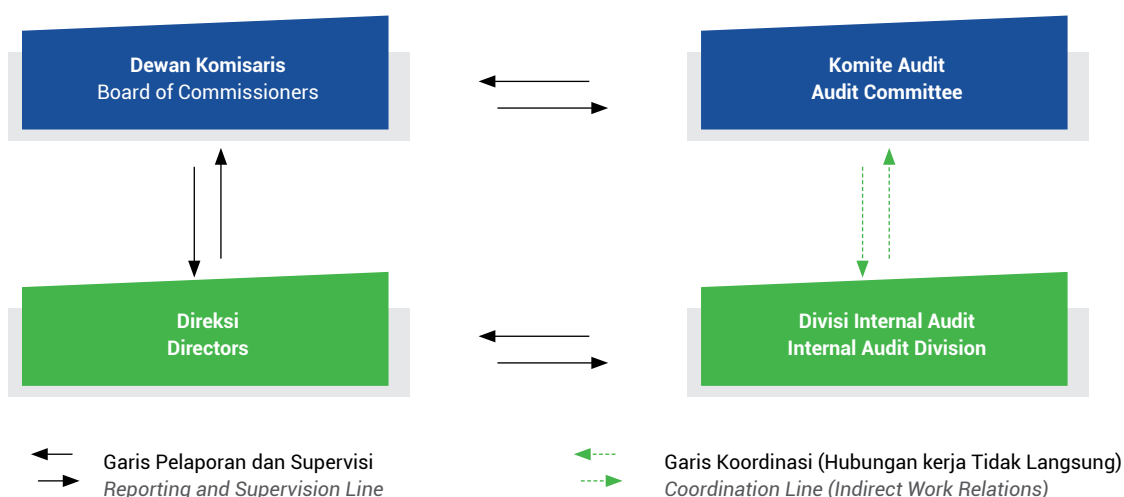
1. Mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Bekerja sama dengan Divisi *Internal Audit*, dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan.

Responsibilities of the Audit Committee

1. The Audit Committee reports to the Board of Commissioners;
2. The accountability of the Audit Committee to the Board of Commissioners are reported with the reports as follows:
 - a. Annual reports on the implementation of duties of the Audit Committee;
 - b. Quarterly reports on the implementation of duties of the Audit Committee;
 - c. Reports for each implementation of special duties of the Audit Committee;
3. The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of documents, data, and information of the Corporation.

Authorities of the Audit Committee

1. Fully and freely obtaining information concerning the employees, funds, assets, and other resources of the Corporation concerning the implementation of the duties;
2. Collaborating with the Internal Audit Division in adherence to the established procedures;
3. Whenever required, with the approval from the Board of Commissioners, being able to seek assistance from experts and/or consultants.

Hubungan Kerja Komite Audit*Work Relationship of the Audit Committee*

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Audit
Distribution of Duties and Responsibilities Among Members of the Audit Committee

| Nama Anggota dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tugas dan Tanggung Jawab | <i>Duties and Responsibilities</i> |
|--|---|---|
| Adnan Pandu Praja Ketua <i>Chairman</i> | Mengawasi keseluruhan tugas dan tanggung jawab semua anggota Komite | <i>Oversee the overall duties and responsibilities of all committee members</i> |
| Krishan Mochtar Anggota <i>Member</i> | Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan | <i>Construction, Operation and Maintenance</i> |
| Mohamad Hassan Anggota <i>Member</i> | Bidang <i>Governance, Risk, and Compliance</i> dan Keuangan | <i>Governance, Risk, and Compliance and Finance</i> |
| Hary Budiarto Anggota <i>Member</i> | Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi | <i>Information Technology & Communication</i> |

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Competency Development of Audit Committee

The Corporation facilitates the implementation of development programmes for the Audit Committee in order to improve the competency of the members of the Audit Committee. The programme is expected to have positive impacts on the productivity and effectiveness on the performance of the Audit Committee.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development of Audit Committee

| Nama Anggota dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Kegiatan Pelatihan <i>Training Programme</i> | Pelaksanaan <i>Implementation</i> |
|--|---|--|
| Adnan Pandu Praja Ketua <i>Chairman</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA</i> |
| Mohamad Hassan Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| Krishna Mochtar Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA</i> |
| Hary Budiarto Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA</i> |

Rapat Komite Audit

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite.

Selama tahun 2020, Komite Audit melakukan rapat-rapat dengan unit kerja dengan topik pembahasan sesuai lingkup pengawasan komite diantaranya pembahasan *Governance, Risk & Compliance*. Aspek Konstruksi yang terdiri dari proses *engineering, procurement* hingga *project management*. Aspek *Operation & Maintenance* terkait railway management. Aspek *IT Governance & Control* yang terdiri dari Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga proses transformasi digital.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan dua puluh empat kali. Setiap pelaksanaan rapat disertai risalah yang ditandatangani seluruh anggota Komite yang hadir. Risalah rapat Komite Audit sesuai ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum, serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat. Risalah disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Komite Audit dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan, dan didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait, di antaranya Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya, seperti SPI dan divisi-divisi yang ada. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Audit Committee's Meeting

The Committee holds meetings at least with the frequency of similar requirements with the meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board as set forth by the Articles of Association. The attendance of Committee members in the meeting is reported in the quarterly and annual report of the Committee.

In 2020, the Audit Committee held meetings with the work units with the topics that within the scope of committee supervisory, including discussion on Governance, Risk, & Compliance; Construction aspects of engineering, procurement, and project management; Operation & Maintenance aspects on railway management; IT Governance & Control on ICT Systems and digital transformation.

In 2020, the Audit Committee held twenty-four meetings. Each meeting is recorded in the Minutes of Meeting that is signed by the present members of the Committee. The Minutes of Audit Committee Meeting has fulfilled the procedural provisions, legal administration, and reflects the situation and chronology of the meeting including dissenting opinions and delegating of the chair of meeting in the event of the Chair of Meeting is not available to attend the meeting. The minutes are delivered in writing by the Committee to the Board of Commissioners.

The publication concerning the plan to conduct an Audit Committee meeting shall be made no later than 7 days prior to the date of the meeting and it is widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as SPI and existing divisions. The publication shall inform the date and time of meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting, and the parties invited to attend the meeting. In the event of incidental meeting proposal, the publication still can be made as effectively and efficiently as possible in accordance with the applicable documentation procedures (making minutes of meeting).

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2020*Recapitulation of Attendance at the Audit Committee Meetings in 2020*

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Jumlah Ketidakhadiran <i>Amount of Absence</i> | Persentase Kehadiran <i>Attendance Percentage (%)</i> |
|---|--|---|---|--|
| Adnan Pandu Praja Anggota Komite <i>Committee Member</i> | 24 | 24 | - | 100 |
| Mohamad Hassan Anggota Komite <i>Committee Member</i> | 24 | 16 | 8 | 66,67 |
| Hary Budiarto Anggota Komite <i>Committee Member</i> | 24 | 15 | 9 | 62,50 |
| Krishna Mochtar Anggota Komite <i>Committee Member</i> | 24 | 16 | 8 | 66,67 |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 74,00 |

Kebijakan Remunerasi

Perseroan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Audit. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan berdasarkan keputusan persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit yang ditetapkan oleh SK Direksi No. 027/BOD- MRT/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penyesuaian Honorarium Anggota Komite di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2020

Realisasi program kerja Komite Audit tahun 2020:

Aspek GRC

- Agar sistem pelaporan keuangan di PT MRT Jakarta harus terintegrasi dengan laporan keuangan *retail* dan *commercial* terkait dengan *revenue sharing*, sehingga perlu dibuatkan standar tinggi terkait *monitoring* keuangan karena akan adanya *peer review*.
- PT MRT Jakarta harus lebih proaktif dan focus terhadap pembenahan mekanisme pembayaran terkait *financing charges*, sehingga sebelum terjadi keterlambatan pembayaran, hal yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu penagihan dari kontraktor setelah *interim payment statement* diterbitkan.
- Terdapat teori terkait COSO, bahwa manajemen dapat melakukan fungsi *over ride*, yaitu jika ada sesuatu diluar kebijakan dapat dilakukan pengabaian (diskresi) dan hanya dapat dilakukan sekali oleh *top level* yang memiliki akuntabilitas. Jika diskresi dilakukan lebih dari satu kali berarti harus dilakukan perubahan kebijakan dan peraturan.

Remuneration Policy

The Corporation has a policy concerning the remuneration for the Audit Committee. The approval to grant remuneration of the Audit Committee is established in accordance with the decree of approval to grant remuneration for the Audit Committee as regulated by the Directors' Decree No. 027/BOD- MRT/V/2020 dated May 2020 concerning Establishment of Honorarium for Members of Committee in PT MRT Jakarta (Perseroda).

Brief Report of the Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee in 2020

Realisation of work programme of the Audit Committee in 2020:

GRC Aspects

- *In order to integrate the financial reporting system of the Corporation with the retail and commercial financial reporting concerning revenue sharing, high standards concerning financial monitoring is required as there will be peer review.*
- *The Corporation must be more proactive and focused in improving payment mechanism concerning financing charges, so that before late payment, punctual collection to collector must be a focus after the issuance of interim payment statement.*
- *There is a theory on COSO, that the management can carry out override function, i.e., in the event of an occurrence outside the policy, discretion can be carried out once by a top level with accountability. If discretion is carried out more than once, an amendment to policy and regulation is required.*

- Perlu dilakukan telaah terhadap proses pengadaan sehingga dapat meminimalisir potensi *fraud*.
- Setiap panitia pengadaan wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan.

Aspek Konstruksi

- Dengan pembelajaran pada Fase 1, untuk proyek Fase 2 pihak MRT perlu menekankan penguatan pada fungsi administrasi kontrak, dimana hal-hal yang diatur dalam kontrak harus mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak dengan saling menguntungkan dan memperkecil *dispute* pada saat proyek berjalan atau ketika serah terima.
- Perlu melibatkan masyarakat dalam awareness terhadap kondisi fasilitas sarana dan prasarana sehingga apabila terdapat hal-hal yang biasa dilaporkan oleh pengguna jasa atau masyarakat terdapat saluran pengaduan untuk dapat ditindaklanjuti.
- Memastikan dilakukan *feasibility study* secara komprehensif untuk *Grade of Automation level* yang akan digunakan pada operasi kereta Fase 3 dan Fase selanjutnya, dimana pertimbangan mencakup aspek teknologi, finansial, *interoperability*, penyerapan sumber daya manusia, maupun aspek-aspek lain yang penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

Aspek IT Governance

- Karyawan yang berhubungan dengan audit dan pengadaan perlu memiliki sertifikasi seperti *Certified Fraud Examiner (CFE)* dan *Certified Fraud Detection in Procurement (CFDP)*, untuk meningkatkan kapabilitas serta meningkatkan kapabilitas serta meningkatkan integritas dan menjadikan MRT lebih baik lagi.
- Perlu dilakukan kajian berapa besar investasi yang harus dikeluarkan jika mengganti SAM nya karena jika ada perubahan SAM maka harus merubah semua sistem yang ada di Fase 1 dan disesuaikan dengan sistem yang akan dioperasikan di Fase 2.
- Manajemen perlu mengatur *security governance*, *awareness* dari unit kerja, *cyber risk management* dan *cyber technology*. Belum secara detail mengatur kebijakan dan *framework* tersebut, direkomendasikan untuk segera menyusun rencana terkait *cyber security*.

- *Review must be carried out over procurement process to minimize fraud potential.*
- *Each procurement committee must own procurement expert certification.*

Construction Aspects

- *With the learnings from Phase 1, the Corporation must highlight the strengthening of contract administration function for the Phase 2 of the project, where the contracts regulation can accommodate the requirements of both parties that benefit each other and minimise dispute during the implementation of the project or upon handover.*
- *It is imperative to involve the community to be aware of the conditions of infrastructures and facilities, therefore whenever there are issues to be reported by passengers or the community, a channel has been put in place to follow up.*
- *Ensuring comprehensive feasibility study for the Grade of Automation level to be used in the operations of Phase 3 and the Phase to come, that must consideration cover the aspects of technology, finance, interoperability, human capital absorption, and other crucial aspects as a consideration for decision-making by the Shareholders.*

IT Governance Aspects

- *Employees whose scope of work concerns with audit and procurement must be certified with, for example, Certified Fraud Examiner (CFE) and Certified Fraud Detection in Procurement (CFDP) to improve the capability and integrity and to improve the Corporation as well.*
- *A study on the investment to be made upon SAM changes must be carried out, as SAM changes requires to change all system in the Phase 1 to be aligned with the system to be operated in Phase 2.*
- *The management must manage security governance, awareness of work unit, cyber risk management, and cyber technology. The Corporation has not regulated such policy or framework in details; thus it is recommended to develop a cyber security plan.*

Penilai Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris Berdasar Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2020
*Performance Assessment of the Audit Committee by the Board of Commissioners
Based on Key Performance Indicator (KPI) of 2020*

| Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator | Satuan Unit | Bobot Weight (%) | Target Target | Realisasi Realization | Capaian Achievement (%) | Skor Capaian Achievement Score (%) |
|---|--|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Terlaksananya Rapat Bulanan Komite Audit <i>Execution of Monthly Meeting of Audit Committee</i> | Jumlah rapat <i>Number of Meeting</i> | 40 | 12 | 24 | 200 | 80 |
| Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Komite Audit <i>Completion of Quarterly Report of Audit Committee from Q1 – Q4</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 4 | 4 | 100 | 30 |
| Terlaksananya Tindaklanjut assessment BPKP tahun 2019 <i>Execution of follow-up on BPKP assessment in 2019</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 17 | 17 | 100 | 30 |

Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan *Human Capital and Business Committee*

Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan dibentuk guna membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris, terkait fungsi nominasi dan fungsi remunerasi di lingkungan kerja Perseroan. Komite memastikan proses nominasi dan remunerasi di Perseroan telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan perundang-undangan.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Sesuai Piagam Komite, komposisi keanggotaan Komite paling kurang terdiri dari 3 anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris;
- Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - Memiliki pengalaman terkait pengelolaan SDM dan pengelolaan bisnis korporasi.
- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

The Human Capital and Business Committee was established in order to assist the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties concerning the nomination and remuneration function within the Corporation. The Committee ensures that the nomination and remuneration processes in the Corporation have met GCG requirements and adhere to the prevailing laws and regulations.

Qualifications of Members of the Human Capital and Business Committee

In accordance with the Committee Charter, the composition of Committee membership shall consist of at least 3 members with the provisions as follows:

- 1 (one) chairperson and also a member, who is a Commissioner;
- Other members who may come from:
 - Member of the Board of Commissioners
 - Parties outside the Corporation that fulfil the requirements as follows:
 - Not having affiliations with the Corporation, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Ultimate Shareholders of the Corporation.
 - Having experiences concerning HC management and Corporate business management.
- Not having concurrent positions as other members of Committees of the Corporation.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan jangka waktu masa Jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Terms of Office

The terms of office of the members of Human Capital and Business Committee who are not members of the Board of Commissioners is in accordance with the terms of office of the Board of Commissioners without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to terminate them at any time.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Tahun 2020 Number, Structure, and Composition of the Members of Human Capital and Business Committee in 2020

Susunan Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Per 31 Desember 2020
Composition of Human Capital and Business Committee as of December 31, 2020

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Periode Jabatan Terms of Office |
|---------------|--|--|---|
| Rukijo | Ketua Komite <i>Chairmen of the Committee</i> | SK 009/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Irwan Rei | Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | SK 009/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Helda Chandra | Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | SK 009/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |

Profil Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Ketua Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan dijabat Rukijo, yang juga Komisaris Perseroan. Profil Ketua Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan, Rukijo, lihat halaman 89 pada bahasan tentang profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan.

Profile of the Members of Human Capital and Business Committee

The Chairperson of Human Capital and Business Committee is Rukijo who is a Commissioner of the Corporation. The profile of the Chairperson of Human Capital and Business Committee, Rukijo is presented on page 89 under the discussion of Profile of the Board of Commissioners in Chapter Corporate Profile.



Irwan Rei

Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan
Member of Human Capital and Business Committee

| | | |
|---|--|---|
| Periode Jabatan Term of Position | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara Citizen | Indonesia | Indonesia |
| Usia Age | 55 Tahun | 55 Years old |
| Kelahiran Born | Manado, 9 Oktober 1965 | Manado, October 9, 1965 |
| Domisili Domicile | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| Riwayat Penunjukkan History of Appointment | SK 009/BOC-MRT/X/2020 | SK 009/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan Education | <ul style="list-style-type: none"> MBA (S2) Mt. Eliza Business School, Monash University (1997); MSc. (S2) Teknik Perminyakan University of Southern California (1993); Sarjana (S1) Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (1989). | <ul style="list-style-type: none"> MBA (S2) from Monash Mt. Eliza Business School, Monash University, Australia (1997); MSc (S2) in Petroleum Engineering from the University of Southern California, USA (1993); Bachelor's degree in Petroleum Engineering from the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1989). |
| Pengalaman Kerja History of Employment | <ul style="list-style-type: none"> Pengajar, School of Business Management (SBM) ITB, 2009–sekarang; Tim Penulis Buku "Ketahanan Industri Indonesia 2018-2030", Dewan Analisis Strategis BIN, 2017; Tim Penulis Buku "Practical Human Resources", Gramedia, 2016; Strategy Advisor, Daya Dimensi Indonesia, 2014–2018; Komite SDM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2013–2017; Komite Remunerasi, Donggi Senoro-LNG, 2011–2018; Komite SDM, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), 2010–2015; Managing Director, MTI Consulting, 2006–sekarang; Managing Director & Partner, SRW&Co., 2003-2006; Sr. Consultant, Towers Perrin, Singapore, 2001-2003; Business Team Leader/Director, Hewitt Associates, 1997–2001; Petroleum Engineer, Conoco Indonesia, 1993-1995; Petroleum Engineer, Hubday Oil, 1990-1991. | <ul style="list-style-type: none"> Lecturer, School of Business Management (SBM) ITB, 2009 - present; Writer Team of 'Indonesia's Industry Resilience 2018-2030' Book, BIN Strategic Analysis Board, 2017; Writer Team of 'Practical Human Resources' Book, Gramedia, 2016; Strategy Advisor, Daya Dimensi Indonesia, 2014 - 2018 ; HR Committee, OJK (Financial Services Authority), 2013 - 2017; Remuneration Committee, Donggi SenoroLNG, 2011 - 2018; HR Committee, LPS (Loan Insurance Agency), 2010 - 2015; Managing Director, MTI Consulting, 2006 - present; Managing Director & Partner, SRW&Co., 2003 - 2006; Sr. Consultant, Towers Perrin, Singapore, 2001 -2003; Business Team Leader/Director, Hewitt Associates, 1997 - 2001; Petroleum Engineer, Conoco Indonesia, 1993 - 1995; Petroleum Engineer, Hubday Oil, 1990 - 1991. |



Helda Chandra

Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan
Member of Human Capital and Business Committee

| | | |
|--|---|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 40 Tahun | 40 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Pontianak, 11 Mei 1980 | Pontianak, May 11, 1980 |
| Domisili <i>Domicile</i> | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK 009/BOC-MRT/X/2020 | SK 009/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kandidat Master of Communication, Universitas Indonesia, Juni 2018–sekarang; • Associate's Degree, Sastra & Budaya Cina, Beijing Language and Culture University, 2003-2004; • Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia, 2002. | <ul style="list-style-type: none"> • Candidate of Master of Communication, University of Indonesia, June 2018 - present; • Associate's Degree, Chinese Literature & Culture, Beijing Language and Culture University, 2003-2004; • Bachelor's Degree in Economics, Marketing Management, University of Indonesia, 2002. |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli Bidang Komersial PT Angkasa Pura II, Juli 2020-sekarang; • Partner, Commerce Development Research Institute, Taiwan, 2019; • Partner, Red & White, China, Alibaba Project, 2016; • CEO, Communic 8 Agency, 2014–sekarang; • Salah satu juri kompetisi Debat Pemasaran & Perencanaan Pemasaran Indonesia, 2013–2014; • Senior Marketing Communication Manager, Fujitsu, 2011–2013; • Marketing Communication, Adira Finance, 2008–2011; • Marketing Communication, LG Indonesia, 2005–2008. | <ul style="list-style-type: none"> • Experts in Commercial, PT Angkasa Pura II, July 2020 - present; • Partner, Commerce Development Research Institute, Taiwan, 2019; • Partners, Red & White, China, Alibaba Project, 2016; • CEO, Communic 8 Agency, 2014 - present; • A jury of Indonesia Marketing Debate & Marketing Plan competition, University of Indonesia, 2013 - 2014; • Senior Marketing Communication Manager, Fujitsu, 2011 - 2013; • Marketing Communication, Adira Finance, 2008 - 2011; • Marketing Communication, LG Indonesia, 2005 - 2008. |

Pedoman Kerja: Piagam Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Perseroan telah menyusun Piagam Komite, untuk menjadi pedoman Komite dalam menjalankan tugasnya. Piagam Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan antara lain berisi:

- Pembentukan dan Keanggotaan;
- Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab.
- Prosedur Kerja dan Mekanisme Rapat;
- Kode Etik.

Work Guidelines: Human Capital and Business Committee Charter

The Corporation has established Committee Charter to be guidelines for the Committee in carrying out their duties. Human Capital and Business Committee Charter covers:

- Establishment and Membership;
- Functions, Duties, Authorities, and Responsibilities;
- Work Procedures and Meeting Mechanism;
- Code of Conduct.

Independensi Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi.

- Bukan merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan;
- Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Independence of Human Capital and Business Committee

Members of Human Capital and Business Committee of the Corporation are required to meet the criteria as follows:

- Not being a part of a consultancy firm in the field of human resources working for the Corporation;
- Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the Human Capital and Business Committee;
- Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Ultimate / Controlling Shareholders of the Corporation;
- Not holding concurrent position as administrators of political parties and/or legislative members/candidates and/or governor/vice governor candidates, and other positions in accordance with the statutory regulations that may potentially lead to conflicts of interest.

| Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i> | Anggota Komite <i>Committee Member</i> | |
|---|---|---------------|
| | Irwan Rei | Helda Chandra |
| Merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perseroan. <i>Part of a consulting firm in the field of human resources working for the Corporation.</i> | X | X |
| Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan. <i>Has business relationships either directly or indirectly related to the Corporation's business.</i> | X | X |
| Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali. <i>Has family relations with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders.</i> | X | X |
| Memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. <i>Holds dual positions as an official of a political party and/or a legislative candidate/member and/or a regional head/deputy official/candidate, and other positions in accordance with the statutory regulations that can potentially lead to conflicts of interest.</i> | X | X |

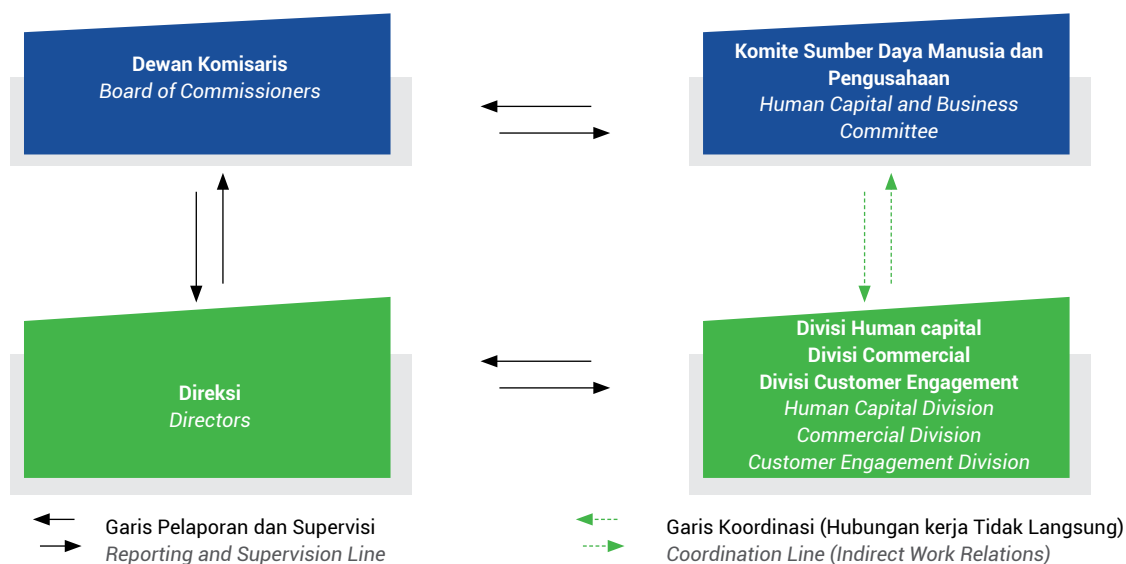
Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi konsultasi pada pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan perusahaan Perseroan. Komite mempunyai hubungan kerja langsung dengan Dewan Komisaris, serta berkoordinasi dengan Divisi Human Capital, Divisi Customer Engagement, dan Divisi Commercial and Retail.

Functions, Duties, Responsibilities, and Authorities of Human Capital and Business Committee

The Human Capital and Business Committee functions as an extension of the Board of Commissioners in carrying out the consultancy function concerning human capital management and business management of the Corporation. The Committee has direct work relationship with the Board of Commissioners and coordinate with Human Capital Division, Customer Engagement Division, and Commercial and Retail Division.

Hubungan Kerja Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Work Relationship of Human Capital and Business Committee



Tugas Komite Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

- Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta implementasi inisiatif perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis korporasi dan pendapatan korporasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan manajemen perusahaan;
- Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan terkait aspek manajemen SDM dan manajemen perusahaan;

Duties of Human Capital and Business Committee

- Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of policies, strategies, and implementation of Corporate human capital management;
- Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of policies, strategies, and implementation of business initiative to increase the business competitiveness of the Corporation and Corporate revenue;
- Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the improvement and implementation of human capital management and business management system;
- Submitting an evaluation report to the Board of Commissioners concerning the implementation of Corporate Long-Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the running year concerning HC management and business management aspects;

- Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan Rencana Bisnis dan RKAP;
 - Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan manajemen perusahaan.
 - Memberikan rekomendasi dan pertimbangan sumber daya manusia dan bisnis kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Melakukan penilaian atas situasi yang turut memperhitungkan risiko dan tingkat bahayanya yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia PT MRT Jakarta (Perseroda), sehingga Dewan Komisaris dapat melaporkannya kepada Pemegang Saham.
 - Menyusun pembaharuan pedoman dan tata tertib kerja Komite yang tertuang di dalam Piagam Komite, dengan melakukan review sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai kebutuhan untuk supervisi dan pengawasan kepada korporasi.
- *Submitting an evaluation report concerning RJPP and RKAP proposal as proposed by the Board of Directors in accordance with the schedule as determined by the Board of Commissioners;*
 - *Providing recommendations to the Board of Commissioners in approving RJPP and RKAP;*
 - *Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning the policies taken by the Board of Directors concerning Human Capital management and business management;*
 - *Providing Human Capital and business recommendation and consideration to the Board of Commissioners concerning the activities requiring approval of the Board of Commissioners as required by the Articles of Association;*
 - *Assessing the situation while considering the risk and the level of negative impact on the continuity of the business and Human Capital management of the Corporation, to be reported by the Board of Commissioners to the Shareholders;*
 - *Preparing the update of work guidelines for the Committee as stated by the Committee charter by reviewing as required, at least once in 3 (three) years.*
 - *Carrying out other duties and responsibilities as appointed by the Board of Commissioners as required for the supervision of the Corporation.*

Tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun program kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan;
 - b. Laporan triwulanan;
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus dari Dewan Komisaris.
4. Komite bertanggung jawab dan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Responsibilities of Human Capital and Business Committee

1. *The Committee reports to the Board of Commissioners.*
2. *Developing an annual work programme approved by the Board of Commissioners.*
3. *The accountability of the Committee to the Board of Commissioners are reported with the reports as follows:*
 - a. *Annual report;*
 - b. *Quarterly reports;*
 - c. *Reports for each implementation of special duties from the Board of Commissioners.*
4. *The Committee is responsible for and obliged to maintain the confidentiality of Corporation documents, data, and information.*

Wewenang Piagam Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan

1. Komite berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang karyawan, dana, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite.
2. Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komite bekerja sama dengan Divisi *Human Capital*, Divisi *Customer Engagement*, dan Divisi *Commercial & Retail* sesuai prosedur kerja yang telah ditentukan.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite.

Authorities of Human Capital and Business Committee

1. The Committee has the authority to obtain full information concerning the employees, funds, and other resources of the Corporation relating to the implementation of duties of the Committee;
2. In carrying out the authority, the Committee cooperates with the Human Capital Division, Customer Engagement Division, and Commercial & Retail Division in accordance with the established work procedures;
3. Whenever required, with the approval from the Board of Commissioners, being able to seek assistance from experts and/or consultants.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan

Distribution of Duties and Responsibilities Among Members of Human Capital and Business Committee

| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab | Duties and Responsibilities |
|--|--|--|
| Rukijo Ketua Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan/Komisaris <i>Chairman of Human Capital and Business Committee/ Commissioner</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada Komisaris Utama. 2. Memberikan saran terkait pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perusahaan kepada Komisaris Utama. 3. Bertanggung jawab atas program kerja tahunan kepada Komisaris Utama. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Submit monthly and quarterly reports to the President Commissioner. 2. Provide advice related to Human Capital and business developments to the President Commissioner. 3. Responsible for the reporting of the annual work program to the President Commissioner. |
| Irwan Rei Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan <i>Member of Human Capital and Business Committee</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Tahunan aspek sumber daya manusia 2. Menyampaikan saran terkait pengembangan sumber daya manusia kepada Unit Kerja <i>Human Capital</i> dan melaporkan kepada Ketua Komite. 3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja <i>Human Capital</i> dan Sekretaris Dewan Komisaris dalam rapat bulanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Develop the Annual Work Programme for the human capital Aspect. 2. Deliver advice related to Human Capital development to the Human Capital Work Unit and report to the Chair of the Committee. 3. Coordinate with Human Capital Work Units and Board of Commissioners Secretary in monthly meetings. |
| Helda Chandra Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan <i>Member of Human Capital and Business Committee</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Tahunan aspek Perusahaan 2. Menyampaikan saran terkait pengembangan usaha kepada Unit Kerja <i>Commercial & Retail</i> serta <i>Customer Engagement</i> dan melaporkan kepada Ketua Komite. 3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja <i>Business Development</i> dan Sekretaris Dewan Komisaris dalam rapat bulanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Develop the Annual Work Program for the Business Aspect. 2. Deliver advice related to business developments to the Commercial & Retail also Customer Engagement Work Unit and report to the Chair of the Committee. 3. Coordinate with the Commercial & Retail also Customer Engagement Work Unit and Board of Commissioners Secretary in monthly meetings. |

Pengembangan Kompetensi Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite.

Competency Development of Human Capital and Business Committee

The Corporation facilitates the implementation of development programmes for the members of Human Capital and Business Committee. The programme is expected to have positive impacts on the productivity and effectiveness on the performance of the Committee.

Pengembangan Kompetensi Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Competency Development of Human Capital and Business Committee

| Nama Anggota dan Jabatan Name of Member and Position | Kegiatan Pelatihan Training Programme | Pelaksanaan Implementation |
|---|---|--|
| Rukijo Ketua <i>Chairman</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia |
| Irwan Rei Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA |
| Helda Chandra Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA |

Rapat Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan

Rapat Komite diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite yang akan bertindak sebagai pimpinan rapat.

Human Capital and Business Committee Meeting

Committee Meetings are held with the following conditions:

- Meetings are held periodically at least once in one month;
- Meetings can only be held if:
 - Attended by the majority of the Committee members; and
 - Among the majority of the committee members attending as mentioned in item a is the Chairperson of the Committee who will act as the chair of the meeting.

3. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka pimpinan rapat dapat dikuasakan kepada salah satu anggota Komite;
 4. Setiap orang dapat menghadiri rapat dari waktu ke waktu atas undangan Ketua Komite;
 5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 7. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, Komite dapat meminta pendapat anggota Dewan Komisaris di luar Komite;
 8. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
 9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan;
 10. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris, melalui Sekretaris Dewan Komisaris;
 11. Sekretaris Dewan Komisaris, menghadiri rapat Komite dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada Komite. Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite menerima informasi dan dokumen tepat waktu untuk memungkinkan pertimbangan penuh dan tepat dari topik yang ada.
3. *In the event that the Chair of the Committee is not available to attend, the chair of the meeting can be granted to one of the committee members;*
 4. *Everyone can attend the Meetings from time to time at the invitation of the Chair of the Committee;*
 5. *Decisions of the Committee meetings are made based on consensus;*
 6. *In the event that a decision based on consensus is not reached, the decision-making is carried out based on the most votes;*
 7. *In the event that equal numbers of votes occurred in a voting, the Committee may request the opinion of members of the Board of Commissioners outside the Committee;*
 8. *In the event that the decision-making process includes dissenting opinions, such dissenting opinions must be included in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinions;*
 9. *The results of the Committee must be submitted in the minutes of meeting and documented by the Corporation;*
 10. *Minutes of Committee meeting must be submitted in written to the Board of Commissioners, through the Secretary of the Board of Commissioners;*
 11. *The Secretary of the Board of Commissioners attends the Committee meetings and provides the necessary supports as required by the Committee. The Secretary of the Board of Commissioners ensures that the Committee receives the information and document in timely manner to enable full and appropriate consideration of the topics at hand.*

Selama tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan melakukan rapat-rapat dengan unit kerja dengan topik pembahasan yang sesuai dengan lingkup pengawasan Komite, di antaranya pembahasan strategi manajemen talenta, pemutakhiran kebijakan sumber daya manusia, digitalisasi sistem pengelolaan sumber daya manusia, usulan remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi, strategi pendapatan *farebox* serta *non-farebox*, strategi negosiasi dengan mitra bisnis, serta rencana monetisasi aset digital.

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk perbedaan pendapat atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat. Selama tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan melakukan 19 kali rapat, dengan rata-rata persentase kehadiran 70,17%.

In 2020, the Human Capital and Business Committee held meetings with work units whose agenda is in line with the Committee's oversight scope, including discussion concerning talent management strategy, amendment to policies concerning human capital, digitisation of human capital management system, a remuneration proposal for the Board of Commissioners and the Board of Directors, farebox and non-farebox revenue strategy, negotiation strategy with business partners, and digital asset monetisation plan.

A summary report of the minutes of meeting of Human Capital and Business Committee has fulfilled the procedural provisions, legal administration, and reflects the situation and chronology of the meeting including dissenting opinions and delegating of the chair of meeting in the event of the Chair of Meeting is not available to attend the meeting. In 2020, Human Capital and Business Committee held 19 meetings, with average attendance percentage of 70.17%.

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Tahun 2020
Recapitulation of Attendance at Human Capital and Business Committee's Meeting in 2020

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Jumlah Ketidakhadiran <i>Amount of Absence</i> | Persentase Kehadiran <i>Attendance Percentage (%)</i> |
|--|---|--|--|---|
| Rukijo (Ketua Komite) <i>Chairperson of the Committee</i> | 19 | 17 | 2 | 89,47 |
| Irwan Rei (Anggota Komite) <i>Member of the Committee</i> | 19 | 12 | 7 | 63,16 |
| Helda Chandra (Anggota Komite) <i>Member of the Committee</i> | 19 | 11 | 8 | 57,89 |
| Rata-rata Average | | | | 70,17 |

Kebijakan Remunerasi

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan remunerasi bagi anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan yang berasal dari unsur non-komisaris. Ketentuan remunerasi adalah sebagai berikut SK Human Capital terkait besaran honor komite di 2020.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite SDM & Pengusahaan Tahun 2020

Evaluasi Komite SDM & Pengusahaan terhadap kegiatan penyelenggaraan manajemen SDM, manajemen perusahaan, dan penyusunan KPI korporasi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - *Succession Planning*: Perseroan harus memetakan posisi kritical dan memetakan calon suksesor untuk tiap-tiap posisi ini. Jika ada *gap* kompetensi pada suksesor, maka Perseroan harus menetapkan *action plan* spesifik, sehingga *gap* ini dapat terpenuhi. *Succession Planning* juga harus didukung dalam kebijakan KPI, dimana salah satu KPI tiap Kepala Divisi adalah wajib menyiapkan pengganti, serta didukung juga oleh sistem *Knowledge Management* yang baik, sehingga pejabat baru dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari kebutuhan dan progres kerja dari jabatannya.
 - *Audit dan Checklist Kebijakan Sumber Daya Manusia*: setelah Divisi Human Capital menyiapkan perangkat-perangkat kebijakan sesuai masukan temuan audit tugas selanjutnya adalah melakukan implementasi dan sosialisasi kebijakan. Pastikan kebijakan Human Capital disosialisasikan dengan

Remuneration Policy

The Corporation has the policy to provide remuneration for the members of Human Capital and Business Committee who are not the commissioners. Policy on the remuneration is in line with the Decree of Human Capital concerning the amount of honorarium for Committee in 2020.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of HC & Business Committee in 2020

Evaluation of HC & Business Committee of the implementation of HC management, business management, and Corporate KPI development is as follows:

1. Human Capital Management Functions
 - *Succession Planning*: The Corporation must map critical positions and map the candidate of successor for such positions. In case of competency gap in the successors, the Corporation must establish specific action plans to fulfil such gaps. The *Succession Planning* must be supported in KPI policy, where a KPI of each Division Head is to prepare the succession, and prepared by a good *Knowledge Management* system, so that the new official can easily access and learn the requirement and work progress of the position.
 - *Audit and Checklist of Human Capital Policy*: After the Human Capital Division prepares the policies based on audit findings, the next duty is to carry out the implementation and dissemination of the policy. Ensure that the Human Capital Policy is

baik dan bertahap kepada seluruh karyawan. Kemudian dalam implementasi pastikan untuk perhatikan prinsip *ease to administer*, serta terintegrasi dalam sistem digital yang dimiliki Divisi.

- **Talent Management:** Pengelolaan *talent* untuk dimulai dengan melakukan *assessment* kepada seluruh SDM Perseroan dan menetapkan standar kompetensi yang dibutuhkan tiap jabatan, dengan begitu terlihat *gap* antara kebutuhan dan kondisi sekarang. Untuk program pengembangan *talent*, Perseroan tidak boleh bertumpu pada *training* konvensional, tapi kegiatan, seperti *coaching* atasan, penugasan atau pemberian proyek tertentu juga harus dilakukan. Untuk pelatihan sendiri, di masa pandemi Perseroan dapat mengoptimalkan proses *e-learning*, baik dengan modul yang dibangun sendiri maupun menggunakan jasa vendor *e-learning* internasional yang memiliki kamus materi yang bagus dan lengkap.
- **Employee Engagement Survey:** Survei yang dilakukan untuk menggali aspirasi dan masukan karyawan terkait pengelolaan pekerjaan di masa pandemi ini, serta dapat mengukur kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Untuk disiapkan juga pertanyaan-pertanyaan di luar aspek *engagement* untuk menggali aspirasi lain dari karyawan dalam hal pengelolaan SDM Perseroan. Langkah terpenting berikutnya adalah bagaimana Divisi HC dapat melakukan tindak lanjut dari hasil *survey* dan menginformasikan juga kepada karyawan serta manajemen bentuk-bentuk tindak lanjut yang dilakukan.

2. Fungsi Perusahaan

- **Strategi negosiasi dengan mitra bisnis:** Pastikan dalam proses negosiasi dapat tetap mempertahankan *value* ekonomis yang akan dibayarkan ke Perseroan, walaupun skema pembayaran dapat berubah. Perusahaan dapat mengarahkan proses negosiasi dengan memberi *added benefit* dari MRT Jakarta untuk menjaga vendor tidak lepas atau mengurangi nominal pembayaran mereka. Proses negosiasi ini juga dijaga agar tidak sampai ditempuh jalur hukum dan dapat diselesaikan dengan diskusi antar pihak.
- **Inisiatif-inisiatif untuk Non-Fare Business (Co Working Space, Penambahan Naming Rights):** Perseroan harus kreatif dan menekankan pada inisiatif-inisiatif baru mencari pendapatan lewat NFB mengingat sumber pendapatan tiket yang menurun. Untuk rencana pendapatan melalui *naming rights*, iklan pada CTVT hingga CWS,

disseminated well and gradually to all employees. Then, in the implementation, ensure consideration of the ease to administer, and integration with the digital system of the Division.

- **Talent Management:** *Talent management is carried out by conducting assessment to all human capital of the Corporation and ensuring the required competency standards for each position, therefore the gaps between the requirements and current conditions become clear. For the talent management programme, the Corporation cannot benchmark on conventional training, rather activities such as supervisor coaching, assignment, or certain projects must be carried out. As for the training, during the pandemic, the Corporation can optimise the e-learning process, both with the independently developed module or with an international e-learning vendor service with adequate and extensive materials.*
- **Employee Engagement Survey:** *Survey carried out to seek aspirations and inputs from the employees concerning the business management in the pandemics, and to measure the discipline of the employees in working. Questions outside engagement aspects must be prepared as well to seek out more aspirations from the employees concerning HC Corporation. The most important next step to consider is how HC Division can carry out follow-up of the survey results and inform the employees and the management concerning the form of follow-up conducted.*

2. Business Functions

- **Negotiation strategy with business partners:** *Ensure that in the negotiation process, Corporation can maintain the economic values to be paid to the Corporation, even though the payment scheme may change. The Corporation may instruct the negotiation process by providing added benefits from MRT Jakarta to prevent the vendors from termination or reduction of their payment amount. The negotiation process must prevent the taking of legal actions and to be completed with discussion among the parties.*
- **Initiatives for Non-Fare Businesses (Co-working Space, More Naming Rights):** *The Corporation must be creative and focuses on new initiatives for additional NFB revenue, considering the decreasing revenue source from ticketing. As for the revenue plan through naming rights, advertisement on*

Perseroan dipastikan mendapatkan klien di tahun 2020 walaupun skema pembayaran belum optimal di masa pandemi, namun ketika situasi pandemi telah selesai, klausul-klausul khusus akan diselesaikan dan dikembalikan pada *arrangement* bisnis normal.

- Monetisasi *Digital Asset*: Perseroan untuk terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator terukur apa yang akan diraih untuk optimalisasi *digital asset*. Setelah indikator ditetapkan, maka strategi yang dibutuhkan untuk tiap *channel digital* maupun biaya yang dibutuhkan akan teridentifikasi. Divisi *Commercial Retail* harus menyiapkan model bisnis, prioritas program kerja, *timeline*, dan biaya hingga *forecast ROI* untuk disajikan ke manajemen terkait rencana penambahan pendapatan dari *asset digital* ini, sehingga *feasibility* dan *worthiness* dapat terlihat oleh manajemen.
- Strategi pendapatan NFB tahun 2021: Pastikan untuk skema-skema kontrak yang mengalami *adjustment* di tahun 2020, karena dalam situasi pandemi dapat ditentukan klausul dan *cut-off* yang jelas kapan dapat kembali ke skema bisnis semula setelah pandemi selesai. Mengingat target pendapatan NFB yang lebih tinggi di tahun 2021, agar dipastikan kebutuhan SDM dan *budget* untuk eksekusi rencana-rencana tersebut oleh Perseroan dan dipastikan juga bahwa investasi ini akan berbalik membawa *profit* untuk Perusahaan. Kemudian untuk inisiatif-inisiatif bisnis baru, agar disiapkan juga perangkat kebijakan atau keputusan manajemen yang diperlukan, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada isu tata kelola.

3. KPI Korporasi 2021

- Untuk komponen-komponen KPI pastikan pembobotan tiap komponen mencerminkan prioritas Perseroan dan merefleksikan *concern* dari Pemegang Saham;
- Untuk standar penetapan KPI maupun norma pembobotan pastikan dikoordinasikan dengan BPBUMD, sehingga dapat ditetapkan target yang SMART dan *challenging*, serta menjadi alasan kuat bagi Pemegang Saham nantinya dalam menetapkan tantiem untuk Perseroan, karena Perseroan telah menunjukkan *performance* yang baik dengan target menantang;
- Memastikan proses *cascading* KPI ini berjalan lancar hingga level individu dan memastikan KPI yang turun *align* dengan KPI korporasi dan memiliki tema/ titik tekan prioritas yang sama;

CTVT and CWS, the Corporation is guaranteed to get clients in 2020 despite the suboptimal payment scheme during the pandemic. However, after the end of the pandemic, the special clauses will become invalid and normal business arrangement will prevail.

- *Digital Asset Monetisation: The Corporation to determine the measurable indicators to be achieved for digital asset optimisation. Only after the indicators are determined, strategies required for each digital channel and the cost will be clear. Commercial Retail Division must prepare the business model, priority of work programmes, timeline, and cost, as well as an ROI forecast to be presented to management concerning the plan for additional revenue from digital assets, so that the feasibility and worthiness can be understood by the management.*
- *NFB Revenue Strategy in 2021: Ensure for the contract scheme that underwent adjustment in 2020 because in the pandemics can have clear cut-off clauses concerning the return to initial business scheme after the pandemic. Considering the higher target of NFB revenue for 2021, ensure the requirements of HC and budget to execute the plans are available by the Corporation and ensure that such investment will generate profit for the Corporation. Then, prepare the policies or the required managerial decision for new business initiatives, so that the programme can be carried out seamlessly without any governance issues.*

3. Corporate KPI in 2021

- *Concerning KPI components, ensure that the weight of each component reflects the priority of the Corporation and reflects the concerns of the Shareholders;*
- *For the standards of KPI determination and weighting norms, ensure that it is coordinated with BP BUMD so that SMART and challenging target can be established to be strong reasons for the Shareholders to determine performance bonus for the Corporation, as the Corporation has shown good performance with challenging target;*
- *Ensure the cascading process of KPI is carried out well to the level of individual and ensure that the cascaded KPI aligns with the Corporation KPI and with the same theme/priority;*

- Setelah KPI ditetapkan untuk dipastikan, dilakukan pemetaan risiko terhadap masing-masing KPI, sehingga Perseroan dapat menyiapkan mitigasi bila ada hambatan ke depannya. Pastikan juga proses pengawalan progres pencapaian dilakukan secara rutin untuk menjaga *performance* Perseroan tetap *on track* sesuai target KPI.
- *After the KPI is determined, risk mapping is carried out for each KPI, so that the Corporation can prepare mitigation measures in the event of obstacles in the future. Ensure that the oversight process of achievement progress is carried out routinely to maintain the performance of the Corporation to be on track with the KPI target.*

Penilaian Kinerja Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan oleh Dewan Komisaris *Performance Assessment of the Human Capital and Business Committee by the Board of Commissioners*

Penilai Kinerja Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan oleh Dewan Komisaris
Berdasar Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2020
*Performance Assessment of the Human Capital and Business Committee by the Board of Commissioners
Based on Key Performance Indicator (KPI) of 2020*

| Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i> | Satuan <i>Unit</i> | Bobot Weight (%) | Target Target | Realisasi Realization | Capaian Achievement (%) | Skor Capaian Achievement Score (%) |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Terlaksananya Rapat Bulanan Komite SDM & Pengusahaan <i>Execution of Monthly Meeting of HC & Business Committee</i> | Jumlah rapat <i>Number of Meeting</i> | 40 | 19 | 18 | 96,49 | 39 |
| Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Komite SDM & Pengusahaan <i>Completion of Quarterly Report of HC & Business Committee from Q1 – Q4</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 4 | 4 | 100 | 30 |
| Terlaksananya Tindak Lanjut assessment BPKP tahun 2019 <i>Execution of follow-up on BPKP assessment in 2019</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 3 | 3 | 100 | 30 |

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan dasar terkait suksesi Direksi dilingkup Perseroan sebagai BUMD mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan. Sesuai ketentuan tersebut, Bakal Calon Direksi BUMD dapat berasal dari beberapa sumber.

1. Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain.
2. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain.
3. Pejabat atau karyawan internal BUMD 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
4. Pegawai lembaga/instansi Pemerintah.
5. Individu selain yang telah disebutkan di atas yang paling sedikit memiliki pengalaman sebagai Direksi atau 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
6. Individu selain yang telah disebutkan di atas yang diusulkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Directors Succession Policy

The basic policy related to the succession of Directors in the Corporation as an ROE refers to Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 5 Year 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of Regionally-Owned Enterprises and Joint Ventures. Based on the provisions, the Candidates for ROE Directors may come from:

1. Directors who are currently serving in a relevant ROA or other ROEs.
2. Members of the Board of Commissioners or Supervisory Board who are currently serving in a relevant ROE or other ROEs.
3. ROE officials or internal employees of 1 (one) level under the Directors.
4. Employees of Government institutions/agencies.
5. Individuals other than those mentioned above who have experience as Directors or 1 (one) level under Directors.
6. Individuals other than those mentioned above who are proposed by the Governor of DKI Jakarta Province.

BPBUMD Provinsi DKI Jakarta selaku lembaga yang ditunjuk melakukan pembinaan dan optimalisasi BUMD di lingkup Provinsi DKI Jakarta, berperan dalam mengusulkan, melakukan proses seleksi administrasi, serta proses uji kelayakan dan kepatutan. Uji yang dilakukan, meliputi proses pengukuran kelayakan kepatutan yang terdiri dari psikotes/penilaian; serta paparan dan wawancara terkait rencana kerja Bakal Calon jika terpilih menjadi Direksi. Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, BPBUMD Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.

The DKI Jakarta ROE Development Agency (BPBUMD DKI Jakarta) as the agency appointed to carry out guidance and optimisation duties of ROEs in DKI Jakarta Province has the role in proposing, carrying out the administrative selection process, and conducting fit and proper test. The test covers measurement of appropriateness and propriety consisting of a psychological test/assessment, as well as explanations and interview related to the work plan of the Candidates if they are elected as Directors. In conducting the Fit and Proper Test, BPBUMD DKI Jakarta may establish a team and/or be assisted by a professional institutions/resource persons/experts.

Di samping persyaratan formal dan material, bakal calon Direksi harus memenuhi beberapa persyaratan.

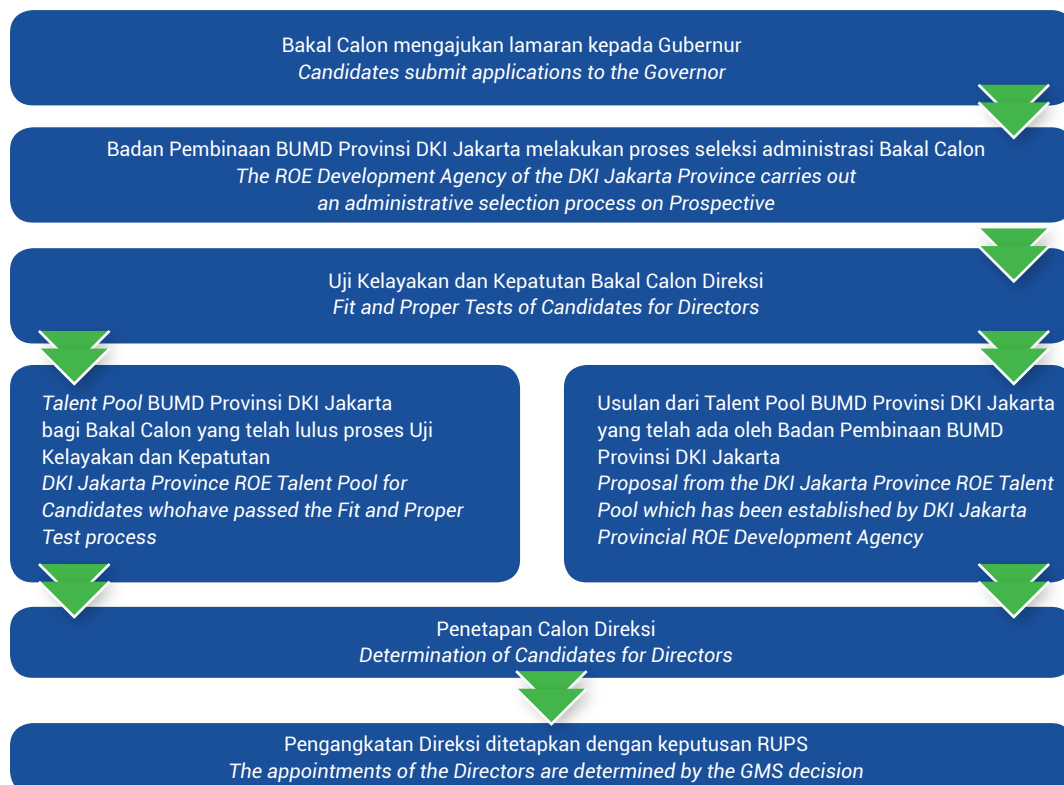
In addition to formal and material requirements, the Candidates must meet several requirements.

- Bakal calon bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
- Bakal calon bukan merupakan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bakal calon bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
- Bakal calon tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama.
- Bakal calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ASN.

- *Candidates are not members and/or administrators of political parties and/or candidates of legislative members and/or legislative members;*
- *Candidates are not state officials who are prohibited based on the prevailing laws and regulations.*
- *Candidates are not candidates for governor/vice governor and/or governor/vice governor.*
- *Candidates are not currently service as Directors for 2 (two) periods within the same ROE.*
- *Candidates who are listed as State Civil Employees shall state that they are willing to fulfil the prevailing laws and regulations related to their status.*

Proses Pengusulan Hingga Penetapan Direksi Perusahaan

The Process to Determine Corporate Directors from Proposal to Appointment



Selain menerima pendaftaran secara terbuka, BPBUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki manajemen talenta sebagai proses manajemen sumber daya manusia untuk Direksi, dalam rangka pengembangan, penguatan dan pemeliharaan, dan kesinambungan BUMD. Manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan wadah kandidat sebagai wadah para talenta untuk calon Direksi dalam rangka keberlanjutan, kesinambungan pengurusan BUMD. BPBUMD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan wadah kandidat berupa daftar kandidat per posisi/rumpun jabatan serta wadah kandidat secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

In addition to openly accepting applications, BPBUMD DKI Jakarta has its talent management programme serving as a human resource management process for Directors for the development, enhancement, and maintenance, and sustainability of ROEs. Talent management is carried out through talent pool management as a vessel for candidates for Directors in achieving the continuity and sustainability of ROE management. BPBUMD DKI Jakarta delivers a candidate pool report in the form of list of candidates per position/cluster as well as candidate pool periodically to the Governor of DKI Jakarta Province.

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Risk & Security Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 002 Tahun 2019. Komite bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perseroan dalam pengelolaan risiko dan sekuriti.

Risk & Security Monitoring Committee was established through Commissioners' Decree No. 002 Year 2019. The Committee assists the Board of Commissioners in carrying out Corporation supervisory duties in relation to risk and security management.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti berhak mengusulkan pergantian jika salah seorang anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Sekretaris Komite ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.

Qualifications of the Members of Risk & Security Monitoring Committee

The Members of the Risk & Security Monitoring Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairperson of the Risk & Security Monitoring Committee has the right to propose the replacement if a member of the Committee ends their terms of office, resigns, or is dismissed. The Secretary of the Committee is appointed based on the decision of the Committee meeting.

Sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, komposisi keanggotaan Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu:

1. Seorang Komisaris Independen;
2. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
3. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko, bersertifikasi ISO 31000.

In accordance with the Risk & Security Monitoring Committee Charter, the composition of the members of the Committee shall be at least 3 persons as follows:

1. *An Independent Commissioner;*
2. *An Independent Party who is an academic/practitioner with expertise in finance;*
3. *An Independent Party who is an academic/practitioner with expertise in Risk Management, certified with ISO 31000.*

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan jangka waktu masa Jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Terms of Office

The terms of office of the members of Risk & Security Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners is in line with the terms of office of the Board of Commissioners without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Jumlah, Susunan Dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2020

Number, Structure, and Composition of the Members of the Risk & Security Monitoring Committee in 2020

Susunan Komite Pemantau Risiko & Risiko Per 31 Desember 2020

Structure of the Risk & Security Monitoring Committee as of December 31, 2020

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Periode Jabatan Terms of Office |
|---------------------|--|--|---|
| Zulfikri | Ketua Komite <i>Chairmen of the Committee</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Ivan Malik | Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Singgih Budihartono | Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |
| Sutrisno | Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 <i>November 1, 2020 – October 31, 2021</i> |

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti dijabat Zulkifri, yang juga Komisaris Perseroan. Profil Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, Zulkifri, lihat halaman 90 pada bahasan tentang profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan.



Ivan Malik

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti

Member of Risk and Security Oversight Committee

Profile of the of Risk & Security Monitoring Committee

The Chairperson of the Risk & Security Monitoring Committee is Zulkifri, who is a Commissioner of the Corporation. The Profile of the Chairperson of the Risk & Security Monitoring Committee, Zulkifri is presented on page 90 under the discussion of Profile of the Board of Commissioners in Chapter Corporate Profile.

| | | |
|--|---|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 58 Tahun | 58 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta, 27 Agustus 1962 | Jakarta, August 27, 1962 |
| Domisili <i>Domicile</i> | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | SK/008/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> Doktoral (S3), Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, 2012; Magister (S2), Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, 2001; Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), 1997; Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 1987. | <ul style="list-style-type: none"> Doctoral Degree, Financial Management, University of Indonesia, 2012; Master's Degree, Financial Management, University of Indonesia, 2001; Adjunct Indonesian Insurance Expert – Losses (AAAIK), 1997; Bachelor of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology, 1987. |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti MRT Jakarta, 2018-sekarang; Komite GCG & MR Pelindo 3, 2017-2018; Direktur, PT Aero Hotel Management 2016; Direktur Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), 2013-2015; Mengelola Bagian Audit Internal, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 2003-2013; Manager di Departemen Finance and Accounting, PT Asuransi Intra Asia, 2001–2003; Mengelola dan terlibat dalam berbagai unit kerja, PT Bank Duta, 1991-2000; Agen di Beckmen-Jorgensen International Ltd, 1989–1990; Menganalisis struktur pesawat CN 235, PT IPTN, 1988–1989. | <ul style="list-style-type: none"> Risk & Security Oversight Committee MRT Jakarta, 2018-Present; Pelindo GCG & MR Committee 3, 2017-2018; Director, PT Aero Hotel Management, 2016; Director of Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), 2013 - 2015; Managing Internal Audit Section, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 2003 - 2013; Finance and Accounting Department Head PT Asuransi Intra Asia, 2001- 2003; Managed and involved in several work units, PT Bank Duta, 1991 - 2000; Agent of the Beckmen – Jorgensen International Ltd, 1989 - 1990; Analysed CN-235's aircraft frame structure, PT IPTN, 1988 – 1989. |



Singgih Budihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Member of Risk & Security Oversight Committee

| | | |
|--|---|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 57 Tahun | 57 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta, 22 Oktober 1963 | Jakarta, October 22, 1963 |
| Domisili <i>Domicile</i> | Tangerang Selatan, Banten | South Tangerang, Banten |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | SK/008/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Sains, Program Administrasi dan Kebijakan Publik, FISIP UI, 2003; • Diploma IV, Akuntansi, STAN, 1993. | <ul style="list-style-type: none"> • Master of Science, Administration and Public Policy Program, FISIP UI, 2003; • Diploma IV, Accounting, STAN, 1993. |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, MRT Jakarta, 2018 – Sekarang; • Direktur, PT Tujuh Karta Wesi, Mei 2014–2019; • Komite Audit Perum LKBN Antara, 2014-2018; • Direktur Utama, PT Target Citra Konsultama, 2013–2014; • Direktur, PT SPA Consulting, 2010–2011; • Konsultan Individu, Bappenas, 2009; • Komite Audit, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, 2008–2014; • Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, 2004–2009. | <ul style="list-style-type: none"> • Risk & Security Oversight Committee, MRT Jakarta, 2018 – Present; • Director, PT Tujuh Karta Wesi, Mei 2014–2019; • Audit Committee Perum LKBN Antara, 2014-2018; • President Director, PT Target Citra Konsultama, 2013–2014; • Director, PT SPA Consulting, 2010–2011; • Individual Consultant, Bappenas, 2009; • Audit Committee, TVRI Public Broadcasting Institute, 2008–2014; • Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, 2004–2009. |

**Sutrisno**

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Member of Risk & Security Oversight Committee

| | | |
|--|--|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 1 November 2020 – 31 Oktober 2021 | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 60 Tahun | 60 Years Old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Kudus, 7 November 1960 | Kudus, November 7, 1960 |
| Domisili <i>Domicile</i> | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | SK/008/BOC-MRT/X/2020 | SK/008/BOC-MRT/X/2020 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Diskpespa Pers, Surabaya, 2012; • Dikcapareg, Surabaya, 2002; • Dikcabaregsus, Surabaya, 1991; • Diktaifib, Surabaya, 1983; • Dik mata Wamil, Surabaya, 1980. | <ul style="list-style-type: none"> • Diskpespa Pers, Surabaya, 2012; • Dikcapareg, Surabaya, 2002; • Dikcabaregsus, Surabaya, 1991; • Diktaifib, Surabaya, 1983; • Dik mata Wamil, Surabaya, 1980. |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, 2019 – Sekarang; • Wadantim, Satgas Intel Bais Leuser-04, NAD, 2009-2010; • Wadantim, Satgas Intel Bais TNI/Gajah Putih, NAD, 2000 – 2001; • Anggota, Satgas Keris Tim Tim, Timor Timur, 1984 – 1985; • Anggota, Satgas Tim Tim Pasmars-11, Timor Timur, 1980 – 1981. | <ul style="list-style-type: none"> • Risk & Security Oversight Committee, MRT Jakarta, 2019 – Present; • Wadantim, Satgas Intel Bais Leuser-04, NAD, 2009-2010; • Wadantim, Satgas Intel Bais TNI/Gajah Putih, NAD, 2000 – 2001; • Member, Satgas Keris Tim Tim, East Timor, 1984 – 1985; • Member, Satgas Tim Tim Pasmars-11, East Timor, 1980 – 1981. |

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

- 1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2 Memiliki pendidikan dan pengetahuan di bidang Keuangan, Manajemen Proyek Konstruksi/ Pembangunan Infrastruktur, Manajemen Risiko Korporat (ERM) yang berbasiskan ISO 31000, Manajemen Sekuriti, Manajemen Mutu, Manajemen Anti Penyuapan yang berbasiskan ISO:37001, serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- 3 Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Asosiasi Profesi Manajemen Risiko Indonesia;
- 4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMD dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;
- 5 Salah seorang dari anggota komite memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Perseroan memiliki Piagam yang digunakan sebagai acuan dan pedoman kerja, yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No.002/BOC-MRT/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020. Piagam berisi:

- Struktur Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
- Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
- Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
- Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
- Lingkup pekerjaan;
- Kode etik dan mekanisme rapat.

Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan supervisi/pengawasan. Komite mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

Qualifications of Members of the Risk & Security Monitoring Committee

- 1 *High integrity, adequate skills, and experience, and able to communicate well;*
- 2 *Education and knowledge on Finance, Construction Project/Infrastructure Development Management, Enterprise Risk Management based on ISO 31000 Security Management, Quality Management, Anti-Bribery Management based on ISO:37001, and other relevant laws and regulations;*
- 3 *Willingness to comply with the Code of Conduct of the Corporation and Indonesian Risk Management Professional Association;*
- 4 *Adequate knowledge on the laws and regulations, especially those concerning ROEs and laws and regulations concerning Corporate operations;*
- 5 *Skills and understanding on Corporate business scope.*

Work Guidelines: Risk & Security Monitoring Committee Charter

The Risk & Security Monitoring Committee of the Corporation has a Charter as a reference and work guidelines that are stipulated through the Commissioners' Decree No.002/BOC-MRT/VII/2020 dated July 23, 2020. The Charter covers:

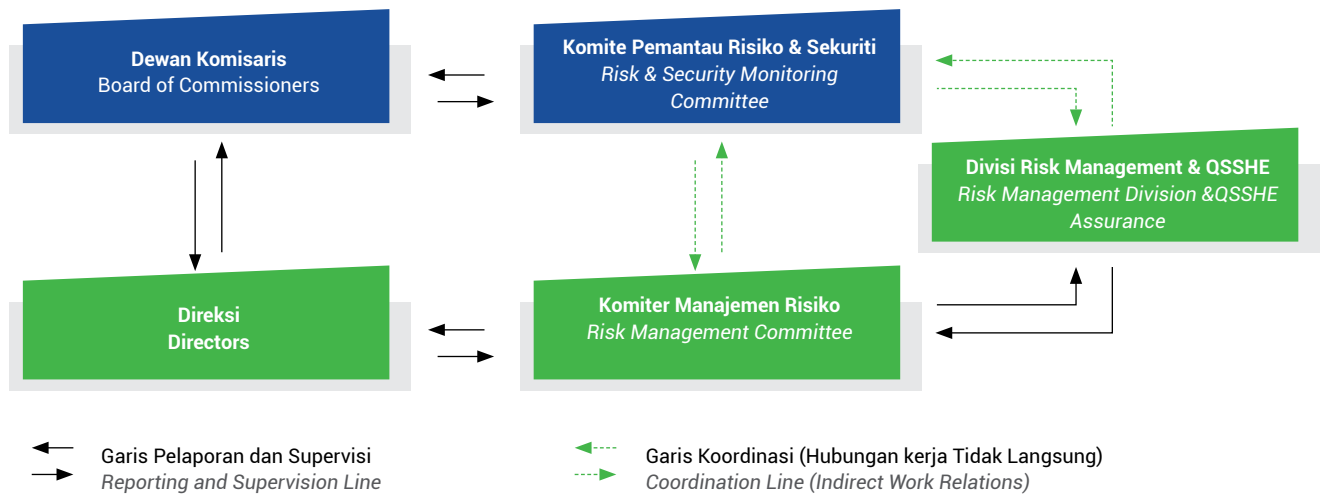
- *Structure of the Risk & Security Monitoring Committee;*
- *Establishment and appointment of the members of the Risk & Security Monitoring Committee;*
- *Requirements and terms of office of the members of the Risk & Security Monitoring Committee;*
- *Functions, duties, authorities, and responsibilities of the Risk & Security Monitoring Committee;*
- *Scope of work;*
- *Code of conduct and meeting mechanism.*

Functions, Duties, and Authorities of the Risk & Security Monitoring Committee

The Risk & Security Monitoring Committee functions as an extension of the Board of Commissioners in carrying out the supervision function. The Committee has a direct working relationship with the Board of Commissioners and indirect relationship with the Risk Management Committee and Risk Management Division.

Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Work Relationship of the Risk & Security Monitoring Committee



Tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko Perseroan, serta pelaksanaannya;
3. Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun berjalan;
4. Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan RJPP dan RKAP;
6. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko;
7. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan risiko kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar;
8. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan proyek MRT Jakarta, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham;

Duties of The Risk & Security Monitoring Committee

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of risk management and duties of the Risk Management Committee and Risk Management Division;
2. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the improvement of the Risk Management system of the Corporation and its implementation;
3. Submitting evaluation reports to the Board of Commissioners related to the implementation of Corporate Long-Term Plan (RJPPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the running year;
4. Submitting evaluation reports of the RJPP and RKAP proposals as proposed by the Board of Directors according to the schedule as determined by the Board of Commissioners;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners in granting approvals for RJPP and RKAP;
6. Delivering recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies that have been administered by the Board of Directors concerning risk management;
7. Providing recommendations and risk considerations to the Board of Commissioners concerning the activities requiring the approvals from the Board of Commissioners as regulated by the Articles of Association;
8. Conducting assessments of situations projected to potentially threaten the continuity of MRT Jakarta project to be reported by the Board of Commissioners to the Shareholders;

9. Melakukan evaluasi atas rekomendasi perihal komunikasi risiko dilaksanakan, pembinaan budaya sadar Risiko diselenggarakan, penciptaan situasi yang kondusif untuk penerapan manajemen risiko diciptakan dan pembentukan *tone at the top* terlaksana;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali;
11. Memberikan persetujuan atas risiko kritis sebelum ditetapkannya tahun anggaran yang baru;
12. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai keseluruhan Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan strategi Perseroan serta melakukan pengawasan implementasi strategi Perseroan;
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko & Sekuriti kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - i. Laporan Profil Risiko Triwulanan
 - ii. Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
 - iii. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RJPP dan RKAP
3. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
4. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
5. Laporan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti ditandatangani oleh Ketua Komite. Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Mendapatkan informasi secara penuh tentang informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*;
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti wajib bekerja sama dengan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

9. *Evaluating recommendations on risk communications to be carried out, fostering the culture of risk awareness, and creating conducive situations to implement risk management, and ensuring the establishment of tone at the top;*
10. *Developing guidelines and work rules for the Committee (Charter) and reviewing them as required, at least once in 3 (three) years;*
11. *Granting approval for critical risks before the new fiscal year;*
12. *Providing considerations and advice to the Board of Commissioners concerning the overall Risk Appetite, Risk Tolerance, and Corporation strategy as well as carrying out the monitoring of Corporation strategy implementation;*
13. *Carrying out other duties and responsibilities as directed by the Board of Commissioners from time to time.*

Responsibilities of the Risk & Security Monitoring Committee

1. *The Risk & Security Monitoring Committee reports directly to the Board of Commissioners;*
2. *The accountability of the Risk & Security Monitoring Committee to the Board of Commissioners are reported with the reports as follows:*
 - i. *Quarterly Risk Profile Report;*
 - ii. *Evaluation Report on the Implementation of Risk Management;*
 - iii. *Evaluation Report of RJPP & RKAP Implementation.*
3. *Reports for each implementation of special duties of the Risk & Security Monitoring Committee;*
4. *Reports of the Risk & Security Monitoring Committee is signed by the Chairperson of the Committee;*
5. *The Report of Risk & Security Monitoring Committee is signed by the Head of the Committee. The staffs of Risk & Security Monitoring Committee are required to maintain the confidentiality of Corporate document, data, and information.*

Authorities of the Risk & Security Monitoring Committee

1. *Fully and freely obtaining information concerning Corporation information on the implementation of duties through Risk Management & QSSHE Assurance Division;*
2. *In carrying out the duties as stated in the previous point, the Risk & Security Monitoring Committee shall collaborate with Risk Management & QSSHE Assurance Division through the established procedures.*

Kriteria dan Independensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Perseroan telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.

1. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian dan pihak-pihak yang pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan proyek MRT Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu selama 6 (enam) bulan;
2. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan, termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
4. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.

Criteria and Independence of the Risk & Security Monitoring Committee

The Corporation has determined several requirements that must be met in order to become members of the Risk & Security Monitoring Committee.

1. Not being a former member of the Board of Directors or Executive Officer of the Government of DKI Jakarta Province or the Ministry or any parties related to MRT Jakarta project that can influence their ability to act independently, cannot become an independent parties in the Committee's membership before undergoing a waiting period of 6 (six) months;
2. Not working for a Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, or other consultancy services to the Corporation within the last (6) months before being appointed by the Commissioners;
3. Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the Risk & Security Monitoring Committee;
4. Not being a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control Corporation activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners, except for Members of Audit Committee from the Board of Commissioners;
5. Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Shareholders of the Corporation.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti *Distribution of Duties and Responsibilities Among the Members of Risk & Security Monitoring Committee*

| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab | Duties and Responsibilities |
|---|---|--|
| Zulfikri Ketua Komite /Komisaris <i>Chairperson of the Committee/Commissioner</i> | <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada Komisaris Utama. Memberikan saran terkait pengelolaan risiko dan sekuriti kepada Komisaris Utama. Bertanggung jawab atas Program Kerja Tahunan kepada Komisaris Utama. | <ol style="list-style-type: none"> Submitting monthly and quarterly reports to the President Commissioner. Providing advice related to risk management and security to the President Commissioner. Responsible for the Annual Work Program to the President Commissioner. |
| Ivan Malik Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Kerja Tahunan. Menyampaikan saran terkait pengelolaan risiko kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dan melaporkan kepada Ketua Komite. Berkoordinasi dengan Unit Kerja RM dan Sekdekom dalam rapat bulanan. | <ol style="list-style-type: none"> Developing an Annual Work Programme. Delivering advice related to risk management to the Risk Management Unit and reporting to the Chair of the Committee. Coordinating with Risk Management Division and Secretary of the Board of Commissioners in monthly meetings. |
| Singgih Budihartono Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Kerja Tahunan. Menyampaikan saran terkait pengelolaan risiko kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dan melaporkan kepada Ketua Komite. Berkoordinasi dengan Unit Kerja RM dan Sekdekom dalam rapat bulanan. | <ol style="list-style-type: none"> Developing an Annual Work Programme. Delivering advice related to risk management to the Risk Management Unit and reporting to the Chair of the Committee. Coordinating with Risk Management Division and Secretary of the Board of Commissioners in monthly meetings. |
| Sutrisno Anggota Komite <i>Member of the Committee</i> | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Kerja Tahunan. Menyampaikan saran terkait pengelolaan keamanan kepada Unit Sekuriti dan melaporkan kepada Ketua Komite. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Sekuriti dan Sekdekom dalam rapat bulanan. | <ol style="list-style-type: none"> Developing an Annual Work Programme. Delivering advice related to security management to the Security Unit and reporting to the Chair of the Committee. Coordinating with the Security Department and Secretary of the Board of Commissioners in monthly meetings. |

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.

Competency Development of the Risk & Security Monitoring Committee

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the members of Risk & Security Monitoring Committee. The program is expected to have positive impacts on the productivity and effectiveness on the performance of the Risk & Security Monitoring Committee.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti *Competency Development of the Risk & Security Monitoring Committee*

| Nama Anggota dan Jabatan Name and Position | Kegiatan Pelatihan Training Programme | Pelaksanaan Implementation |
|--|---|--|
| Zulfikri Ketua Chairman <i>Chairperson</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020 Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020 Organiser: PPIA YPIA</i> |

| Nama Anggota dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Kegiatan Pelatihan <i>Training Programme</i> | Pelaksanaan <i>Implementation</i> |
|--|---|--|
| Ivan Malik Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 Oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020</i> <i>Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020</i> <i>Organiser: PPIA YPIA</i> |
| Singgih Budihartono Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020</i> <i>Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020</i> <i>Organiser: PPIA YPIA</i> |
| Sutrisno Anggota <i>Member</i> | Mekanisme Pengawasan Implementasi ISO 37001: 2016 oleh Komisaris dan Dewan Komisaris <i>ISO 37001: 2016 Oversight Mechanisms Implementation by Commissioners and Board of Commissioners</i> | Waktu: 9 – 10 September 2020 Penyelenggara: CRMS Indonesia <i>Date: September 9-10, 2020</i> <i>Organiser: CRMS Indonesia</i> |
| | Peran dan Tanggung Jawab Komite Komisaris dalam Mengawasi Praktik Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal di Perusahaan <i>Commissioner Committee's Roles and Responsibilities on Risk Management and Internal Control Oversight in Corporation</i> | Waktu: 10 – 11 Januari 2020 Penyelenggara: PPIA YPIA <i>Date: January 10-11, 2020</i> <i>Organiser: PPIA YPIA</i> |

Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Ketentuan atau mekanisme rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Rapat Komite dilakukan 10 (sepuluh) kali dalam setahun dan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2020, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti melakukan 20 kali rapat, dengan rata-rata persentase kehadiran 100%.

Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya. Jadwal dan agenda serta program kerja harus dibuat dalam program tahunan yang ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. Kuorum rapat sekurang-kurangnya dihadiri 51% dari jumlah anggota termasuk Ketua Komite dan seorang pihak independen.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite

Risk & Security Monitoring Committee Meeting

The provisions or mechanism of the Risk & Security Monitoring Committee Meetings are regulated in the Risk & Security Monitoring Committee Charter. The Committee Meetings are held 10 (ten) times in a year and at least once in 3 (three) months. In 2020, the Risk & Security Monitoring Committee held 20 meetings with average attendance percentage of 100%.

The meetings can be held either by physical presence or through electronic media or a combination of the two. The schedule and agenda and work programmes must be made in the annual programme established at the end of the previous year. The meeting quorum is attended by at least 51% of the members including the Chairperson of the Committee and an independent party.

Decisions of the Committee Meetings are made based on deliberations to reach a consensus. In the event that consensus is not reached, the decision is made based on the majority votes. The results of the Committee Meetings

wajib dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditandatangani seluruh anggota Komite yang hadir, serta diketahui dan ditandatangani anggota Komite yang tidak hadir. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti melakukan rapat-rapat dengan unit kerja dengan topik pembahasan yang sesuai dengan lingkup pengawasan Komite, di antaranya pembahasan *top risk* korporasi bulanan, persiapan Perseroan menghadapi pandemi COVID-19, penegakkan protokol kesehatan di Perseroan dan area operasi, pelaksanaan manajemen mutu khususnya implementasi ISO terintegrasi serta proses sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengelolaan keamanan di area operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk perbedaan pendapat atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

must be stated in the Minutes of Meeting prepared by the Committee Secretary, and signed by all present members of the Committee, and known and signed by members of the Committee that are absent. Dissenting opinions in decision-making must be stated clearly in the Minutes of Meeting, including the reasons of the dissenting opinions.

In 2020, Risk & Security Management Committee carried out meetings with work units with discussion topics within the Committee supervisory scope, including monthly top risk of the Corporation, preparation of the Corporation to face the COVID-19 pandemic, enforcement of health protocols within the Corporation and operating areas, implementation of quality management especially implementation of integrated ISO and certification process of the Anti-Bribery Management System, security management within operational and maintenance areas, and management of Security Service Business Entity.

The Minutes of Risk & Security Monitoring Committee's Meeting has fulfilled the procedural provisions, legal administration, and reflects the situation and chronology of the meeting including dissenting opinions and delegating of the chair of meeting in the event of the Chair of Meeting is not available to attend the meeting.

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2020

Recapitulation of Attendance at the Risk & Security Monitoring Committee Meeting in 2020

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jumlah Wajib Rapat Amount of Mandatory Meeting | Jumlah Kehadiran Amount of Attendance | Jumlah Ketidakhadiran Amount of Absence | Persentase Kehadiran Attendance Percentage (%) |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Zulfikri | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Ivan Malik | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Singgih Budihartono | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Sutrisno | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Rata-rata Average | | | | 100 |

Kebijakan Remunerasi

Persetujuan pemberian remunerasi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.098/BOD-MRT/XI/2017 tanggal 30 November 2017. Remunerasi yang diberikan telah mempertimbangkan berbagai ketentuan peraturan di internal Perseroan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Remuneration Policy

Approval to grant remuneration for the Risk & Security Monitoring Policy is stipulated based on Directors' Decree No. 098/BOD-MRT/XI/2017 dated November 30, 2017. The remuneration granted has considered various regulatory provisions of the Corporation and the prevailing laws and regulations.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2020

Realisasi program kerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti tahun 2020:

- Laporan Skema dan perhitungan subsidi PT MRT Jakarta;
- Laporan *Top Risk* setiap bulan dari Januari sampai Desember 2020;
- Analisa Risiko Dampak Pandemi COVID-19 terhadap MRT Jakarta;
- Pendampingan konsultasi implementasi dan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan (ISO 37001:2016);
- Monitoring implementasi *risk management* di unit kerja;
- Laporan Departemen Sekuriti;
- Pengawasan Kinerja Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Risk & Security Monitoring Committee in 2020

Realisation of work programme of the Risk & Security Monitoring Committee in 2020:

- Reports of subsidy scheme and calculation of the Corporation;
- Reports of *Top Risks* every month from January to December 2020;
- Risk Analysis of COVID-19 Pandemic Effect on MRT Jakarta;
- Assistance in implementation consulting and certification of anti-bribery management system (ISO 37001:2016);
- Monitoring of risk management implementation at work units;
- Reports of Security Department;
- Performance Monitoring of Security Service Business Entity.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment of Risk & Security Monitoring Committee by the Board of Commissioners

Penilai Kinerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti oleh Dewan Komisaris Berdasar Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2020

Performance Assessment of the Risk & Security Monitoring Committee by the Board of Commissioners
Based on Key Performance Indicator (KPI) of 2020

| Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator | Satuan Unit | Bobot Weight (%) | Target Target | Realisasi Realisation | Capaian Achievement (%) | Skor Capaian Achievement Score (%) |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Terlaksananya Rapat Bulanan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Execution of Monthly Meeting of Risk & Security Monitoring Committee</i> | Jumlah rapat <i>Number of Meeting</i> | 40 | 12 | 20 | 167 | 66 |
| Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Completion of Quarterly Report of Risk & Security Monitoring Committee from Q1 – Q4</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 4 | 4 | 100 | 30 |
| Terlaksananya Tindak lanjut Assessment BPKP tahun 2019 <i>Execution of follow-up on BPKP assessment in 2019</i> | Jumlah TL <i>Number of TL</i> | 30 | 4 | 4 | 100 | 30 |

ORGAN PENUNJANG DIREKSI

Supporting Organs of the Board of Directors

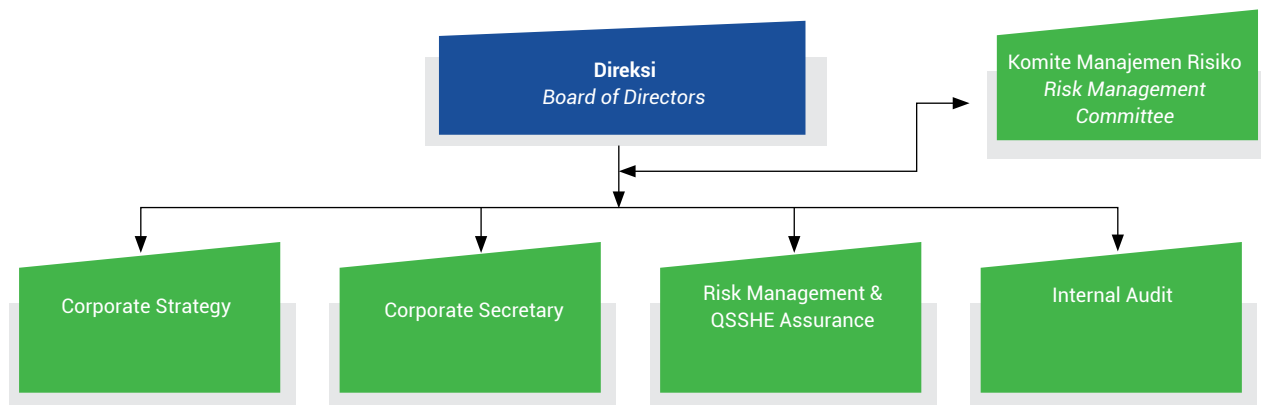


Dari Kiri ke Kanan: Kepala Divisi Corporate Secretary, Komisaris, Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Konstruksi
From Left to Right: Head of Corporate Secretary, Commissioner, President Commissioner, President Director, Construction Director

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, *Corporate Strategy*, *Internal Audit*, *Risk Management and QSSHE Assurance*, dan Komite Manajemen Risiko.

In carrying out the duties and responsibilities in managing the Corporation, the Board of Directors is assisted by supporting organs, i.e., Secretary of the Board of Directors, Corporate Strategy, Internal Audit, Risk Management and QSSHE Assurance, and Risk Management Committee.

Direksi dan Organ Pendukung *The Board of Directors and Supporting Organs*



Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko dalam memberikan dukungan bagi Direksi dalam memantau langsung pengelolaan risiko Perseroan yang mencakup risiko proyek konstruksi, risiko pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta, risiko pengelolaan bisnis, serta risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

The Corporation established the Risk Management Committee to provide support for the Board of Directors in directly monitoring the risk management of the Corporation including construction project risk, MRT Jakarta operations and maintenance risks, business management risks, and the risks that can affect the Corporation performance.

Keanggotaan dan Peran Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Komite berperan untuk memantau independensi Divisi Risk Management & QSSHE Assurance sesuai Peraturan No. 18 Tanggal 10 Juli 2020. Keanggotaan Komite terdiri atas Direktur selain Direktur Utama, Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Divisi terkait penanganan risiko Perseroan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Komite Manajemen Risiko dapat diketuai oleh salah satu Direktur selain Direktur Utama.

Membership and Roles of Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the role to monitor the independence of Risk Management & QSSHE Assurance Division in accordance with Directors' Decree No. 18 dated July 10, 2020. Membership of the Committee consists of a Director other than the President Director, Head of the Risk Management & QSSHE Assurance Division, and at least 1 (one) Head of Division related to the handling of Corporation risk determined through a Directors' Decree. Risk Management Committee can be chaired by a Director other than the President Director.

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Keanggotaan Komite sesuai Surat Keputusan Direksi No. 12 Tanggal 28 Februari 2020 terdiri dari Ketua yang pada periode pelaporan dijabat oleh Direktur Konstruksi. Anggota Komite terdiri atas beberapa pejabat perusahaan.

The Risk Management Committee reports directly to the President Director. The membership of the Committee is in accordance with the Directors' Decree No. 12 dated February 28, 2020 consisting of a Chair, whose position is held by Construction Director of the reporting period. Members of the Committee consists of several officials of the Corporation.

Ketua: Direktur Konstruksi
Chairman: Construction Director

Sekretaris : Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance
Secretary : Risk Management & QSSHE Assurance Division Head

Anggota | Members

| | | |
|--|--|--|
| Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi Finance & Corporate Management Director | Kepala Divisi Project Management Office Project Management Office Division Head | Kepala Divisi Transit-Oriented Development Transit-Oriented Development Division Head |
| Direktur Operasi dan Pemeliharaan Railway Operation & Maintenance Director | Kepala Divisi Engineering Engineering Division Head | Kepala Divisi Commercial & Retail Commercial & Retail Division Head |
| Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director | Kepala Divisi Railway Operation Railway Operation Division Head | Kepala Divisi Corporate Strategy Corporate Strategy Division Head |
| Kepala Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division Head | Kepala Divisi Operation & Maintenance Facility Service Operation & Maintenance Facility Service Division Head | Kepala Divisi Financial & Accounting Finance & Accounting Division Head |
| Kepala Divisi Internal Audit Internal Audit Division Head | Kepala Divisi Business Expansion Business Expansion Division Head | |

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan dan persetujuan batas (limit) risiko, penetapan top risiko Perusahaan serta perubahan Kebijakan Manajemen Risiko (apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kegiatan Perseroan secara signifikan);
2. Menyampaikan top risiko Perseroan yang telah ditetapkan dalam rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan fasilitasi dan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Perseroan yang memiliki eksposur risiko yang signifikan;
4. Mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh karyawan Perseroan melalui kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan risiko dan sosialisasi hal-hal yang bersifat strategis, yaitu menyampaikan profil, peta, risiko kritis, dan batas toleransi risiko Perseroan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
5. Menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi Perseroan secara keseluruhan;
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko serta memberikan arahan berdasarkan laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko dan memantau kinerjanya;
7. Diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan menghimpun seluruh data dan informasi termasuk penjelasan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis risiko.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Risk Management Committee

1. *Establishing risk management policies including the establishment and approval of risk limits, determination of the Corporation top risk, and changes in Risk Management Policies (if there are changes in factors that can significantly affect Corporation activities);*
2. *Informing Corporation top risks as determined in the meeting of Risk Management Committee to the President Director and the Board of Commissioners;*
3. *Providing facilitation and consultation to the Board of Directors, especially the President Director, in decision-making process of Corporation activities with significant risk exposure;*
4. *Developing risk awareness culture for all Corporation employees through capacity building activities for risk management and dissemination of strategic matters such as submitting profile, maps, critical risks, and Corporation risk tolerance limits at least once a year;*
5. *Providing adequate resources and ensuring alignment of risk management programs with the overall Corporate strategy;*
6. *Evaluating the implementation of risk control and providing directions based on the Corporation risk profile report submitted by the Risk Management Department to ensure the effectiveness of the implementation of risk management and monitoring its performance;*
7. *Having the authority to obtain and collect all data and information including explanations required to carry out risk analysis.*

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Brief Report of the Implementation of Duties of the Risk Management Committee in 2020

| Bulan | Agenda | Agenda | Month |
|-----------|--|---|-----------|
| Januari | Rapat pembahasan Top Risk bulan Januari 2020 | Meeting to discuss Top Risk in January 2020 | January |
| Februari | Rapat pembahasan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Top Risk bulan Februari 2020 | Meeting to discuss Risk Appetite, Risk Tolerance, and Top Risk in February 2020 | February |
| Maret | Rapat pembahasan Top Risk bulan Maret 2020 | Meeting to discuss Top Risk in March 2020 | March |
| April | Rapat pembahasan Top Risk bulan April 2020 | Meeting to discuss Top Risk in April 2020 | April |
| Mei | Rapat pembahasan Top Risk bulan Mei 2020 | Meeting to discuss Top Risk in May 2020 | May |
| Juni | Rapat pembahasan Top Risk bulan Juni 2020 | Meeting to discuss Top Risk in June 2020 | June |
| Juli | Rapat pembahasan Top Risk bulan Juli 2020 & Progress Implementasi SMAP berbasis ISO 37001:2016 | Meeting to discuss Top Risk in July 2020 & Progress of Implementation of Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016 | July |
| Agustus | Rapat pembahasan Top Risk bulan Agustus 2020 | Meeting to discuss Top Risk in August 2020 | August |
| September | Rapat pembahasan Top Risk bulan September 2020 | Meeting to discuss Top Risk in September 2020 | September |
| Oktober | Rapat pembahasan Top Risk bulan Oktober 2020 | Meeting to discuss Top Risk in October 2020 | October |
| November | Rapat pembahasan Top Risk bulan November 2020 | Meeting to discuss Top Risk in November 2020 | November |
| Desember | Rapat pembahasan Top Risk bulan Desember 2020 | Meeting to discuss Top Risk in December 2020 | December |

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan berfungsi mendukung pembentukan citra positif Perseroan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, untuk merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman; perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal; pemasaran; tanggung jawab sosial; protokoler; legal; administrasi; dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

The Corporate Secretary is an official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and appointed and dismissed by the President Director based on the Corporation's internal mechanism. The Corporate Secretary reports their responsibilities directly to the President Director.

The Corporate Secretary supports the establishment of positive Corporation image through effective communication program management with all stakeholders. The Corporate Secretary also assists the Board of Directors in carrying out their duties concerning formulation and development of policies and guidelines; planning, evaluations, and external relations; marketing; corporate social responsibility; protocols; legal matters; administration; and Corporation internal communication in accordance with the policies, guidelines, and planning as established.

Profil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi SK/001/BOD-MRT/I/2019. Sesuai ketentuan tersebut, Direksi mengangkat saudara Muhamad Kamaluddin sebagai Kepala Divisi *Corporate Secretary* dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.



Muhamad Kamaluddin
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary Division

Profile of the Head of Corporate Secretary Division

Appointment of the Corporate Secretary is in accordance with the Directors' Decree SK/001/BOD-MRT/I/2019. In accordance with the provisions, the Board of Directors appointed Muhamad Kamaluddin as the Head of Corporate Secretary Division and has been approved by the Board of Commissioners.

| | | |
|--|---|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | Menjabat sejak 03 Januari 2019 | <i>Serving since January 3, 2019</i> |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | <i>Indonesian</i> |
| Usia <i>Age</i> | 46 Tahun | <i>46 Years old</i> |
| Kelahiran <i>Born</i> | Jakarta, 21 April 1974 | <i>Jakarta, April 21, 1974</i> |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta | <i>Jakarta</i> |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | 03 Juli 2017 | <i>July 3, 2017</i> |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • S2 Business Administration, London Business School, 2008; • S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB), 1997. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Master's Degree in Business Administration, London Business School, 2008;</i> • <i>Bachelor's Degree in Physics Engineering, Bandung Institute of Technology, 1997.</i> |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Corporate Secretary, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2019 – sekarang; • Kepala Divisi Corporate Strategy, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 – 2018; • Strategy and Performance Specialist, RasGas Company Limited, Qatar, 2009 – 2017; • Portfolio Projects Manager, SHELL, 2008 – 2009. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Head of Corporate Secretary Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2019 - present;</i> • <i>Head of Corporate Strategy Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 - 2018;</i> • <i>Strategy and Performance Specialist, RasGas Company Limited, Qatar, 2009 – 2017;</i> • <i>Portfolio Projects Manager, SHELL, 2008 – 2009.</i> |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry; • Pelatihan <i>Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy</i>; • Pelatihan <i>Leadership in Urban Regeneration: The Role on BUMD DKI</i>; • Pelatihan Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD: Resiko Investasi atau Korupsi?. • Pelatihan <i>Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader</i>. • Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Sustainability Report</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop on the Performance Measurement Management System with Korn Ferry;</i> • <i>Training of Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy;</i> • <i>Training of Leadership in Urban Regeneration: The Role on BUMD DKI;</i> • <i>Workshop "Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD: Resiko Investasi atau Korupsi?";</i> • <i>Training of Executive Management Development Program (EMDP), Managing Business-Inspiring Leadership Series: Becoming a High-Performing Leader</i> • <i>Workshop (In House) Sustainability Report.</i> |

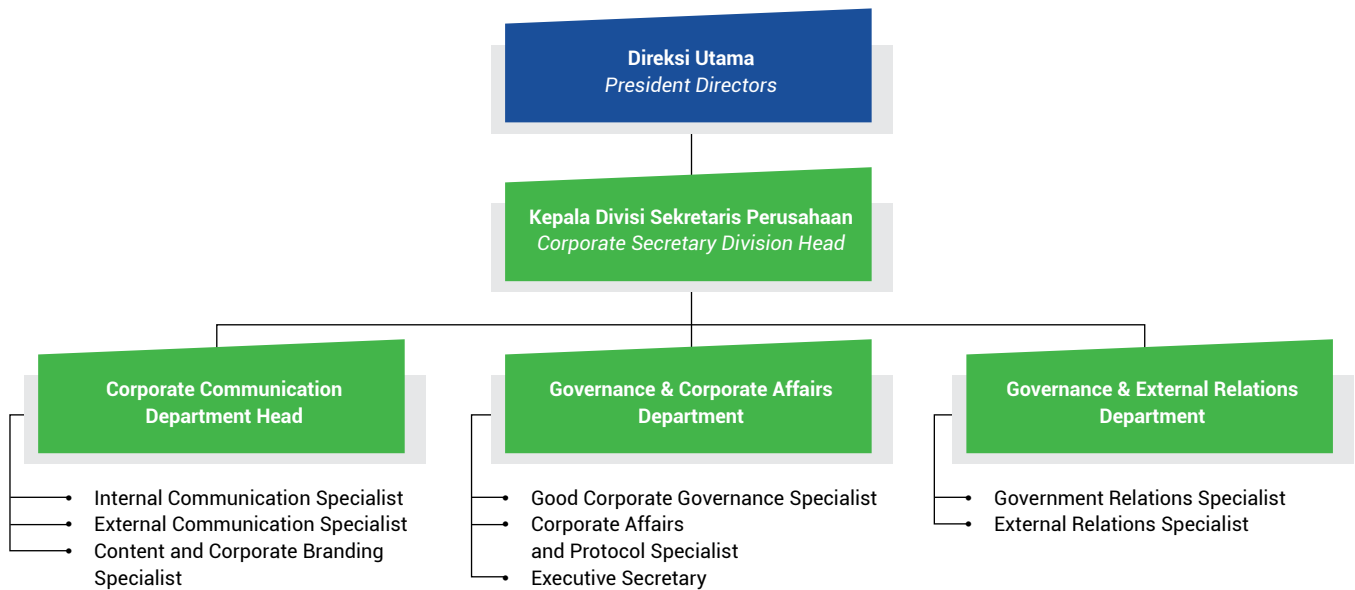
Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi SK/009/BOD-MRT/II/2020. Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 23 orang.

Corporate Secretary Structure

The organizational structure of the Corporate Secretary is established in accordance with Directors' Decree SK/009/BOD-MRT/II/2020. As of the end of 2020, the number of employees within the Corporate Secretary unit is 23 employees.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Organizational Structure of the Corporate Secretary



Jumlah Karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Jabatan
Number of Employees of Corporate Secretary Division based on Position

| Jabatan | Jumlah Total | Position |
|--|--------------|---|
| Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan | 1 | Head of Corporate Secretary Division |
| Kepala Departemen Corporate Communication | 1 | Head of Department Corporate Communication |
| Kepala Departemen Governance and Corporate Affairs | 1 | Head of Department Governance and Corporate Affairs |
| Kepala Departemen Government and External Relation | 1 | Head of Department Government and External Relation |
| Internal Communication Specialist | 1 | Internal Communication Specialist |
| External Communication Specialist | 3 | External Communication Specialist |
| Content and Corporate Branding Specialist | 3 | Content and Corporate Branding Specialist |
| External Communication Staff | 1 | External Communication Staff |
| Content and Corporate Branding Staff | 1 | Content and Corporate Branding Staff |
| Good Corporate Governance Specialist | 2 | Good Corporate Governance Specialist |
| Corporate Affair and Protocol Specialist | 2 | Corporate Affair and Protocol Specialist |
| Executive Secretary | 3 | Executive Secretary |
| Government Relations Specialist | 0 | Government Relations Specialist |
| External Relations Specialist | 1 | External Relations Specialist |
| Jumlah | 21 | Total |

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Fungsi Pokok:

- a. Sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan organ Perseroan dan Pemangku Kepentingan;
- b. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pengelolaan masalah kehumasan.

Tugas Pokok:

1. Memberikan laporan secara periodik kepada Direktur Utama;
2. Menyusun pusat data dan penyimpanan dokumen asli Perseroan;
3. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal.
5. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS;
7. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan Pemangku Kepentingan lainnya;
8. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan;
9. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
2. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya;
4. Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala;
6. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari setiap unit kerja;

Functions and Duties of the Corporate Secretary

Main Functions:

- a. Acting as a liaison officer between the Corporation with the Corporation Organs and Stakeholders;
- b. Handling matters concerning the secretariat and management of public relation.

Main Duties:

1. Providing periodic reports to the President Director;
2. Organizing database and storage of original Corporation documents;
3. Building network of mutually beneficial cooperations;
4. Communicating Corporation policies to internal and external parties;
5. Preparing Corporation reports in accordance with the applicable regulations;
6. Coordinating the preparation of management and project reports for purposes other than GMS;
7. Coordinating report materials of the Board of Directors' Meeting, Board of Commissioners' Meeting, GMS, and other Stakeholders' meetings;
8. Carrying out Corporate secretarial activities;
9. Preparing reports on the activities of Corporate Secretary in a proper and timely manner.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary

1. Preparing the execution of GMS;
2. Attending the Board of Directors' meeting and joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors;;
3. Managing and storing documents related to Corporation activities, including GMS documents, minutes of the Board of Directors' meeting, minutes of the joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and other important Corporation documents;
4. Recording a special list concerning the Directors and their families and the Commissioners and their families both in the Corporation and its affiliates that covers share ownership, business relationships, and other roles that cause conflicts of interests with the Corporation;
5. Reporting the implementation of their duties and responsibilities to the President Director periodically;
6. Gathering all important information about the Corporation from each work unit;

7. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada Pemangku Kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
8. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan yang disampaikan kepada Pemangku Kepentingan, baik dalam situs web atau media informasi lainnya;
9. Menyelenggarakan *database* dan penyimpanan dokumen asli Perseroan;
10. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk Pemangku Kepentingan;
11. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal.
12. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS;
14. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan Pemangku Kepentingan lainnya;
15. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan;
16. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan Pedoman hubungan masyarakat, pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, protokoler, legal, administrasi dan komunikasi internal Perseroan;
17. Menyetujui dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;
18. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Perilaku, dan Pedoman-Pedoman lain yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan;
19. Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke seluruh karyawan; dan
20. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan. Informasi kegiatan pengembangan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama periode pelaporan dapat dilihat pada halaman 122 laporan ini.

Competency Development of the Corporate Secretary

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the Head of the Corporate Secretary Division and employees of the Corporate Secretary Division. Information on the facilities participated during the reporting period can be found on page 122 in this report.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2020

1. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan pada situs web Perseroan.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan media, seperti pembuatan Siaran Pers, pelaksanaan Forum Jurnalis per bulan, dan juga konferensi pers maupun kunjungan lapangan.
3. Perkembangan media sosial sebagai berikut: Facebook 64.309, Twitter 63.597, Instagram 292.252, Youtube 17,6 ribu pengikut.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan para pemangku kepentingan.
5. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penandatanganan *Shareholder Agreement* (SHA), *Memorandum of Understanding* (MoU), dan *Head of Agreement* (HoA) pada tahun 2020.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LB di Tahun 2020.
7. Menghadiri Rapat Direksi sebanyak 57 kali dan penyusunan risalah Rapat Direksi.
8. Menghadiri Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali dan mempersiapkan materi Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi dengan Kepala Divisi (*Directorate Review*) bulan Januari sampai dengan Desember 2020.
10. Mengelola dan menyimpan dokumen Perseroan, seperti Peraturan Direksi (49), Keputusan Direksi (68), Surat Tugas (39), Surat Edaran (77), risalah rapat Direksi (57), Peraturan Direktur Utama (9), Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi (7), Peraturan Direktur Operasi dan Pemeliharaan (5), dan Peraturan Direktur Konstruksi (4) yang disahkan pada tahun 2020.
11. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan bulanan Kemajuan Pembangunan, Operasi dan Pengusahaan Proyek Fase 1, laporan bulanan Kemajuan Persiapan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Kota), dan Laporan Bulanan MITJ dan Quick Wins Penataan Stasiun dari bulan Januari sampai dengan Desember kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa Pemangku Kepentingan lainnya.
12. Membuat dan memutakhirkan kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama periode Januari-Desember 2020, telah dibuat/dimutakhirkan dan disahkan 8 (delapan) Peraturan Direksi, 3 (tiga) Keputusan Direksi, dan dokumen-dokumen lainnya

Implementation of Duties of the Corporate Secretary in 2020

1. *Maintained and updated information concerning the Corporation on the Corporation website;*
2. *Coordinated the implementation of media relationship, such as the preparation of Press Release, implementation of monthly Journalist Forum, and press conference as well as field visit;*
3. *Improved social media to be as follows: Facebook 64,309, Twitter 63,597, Instagram 292,252, and Youtube 17.6 thousand of followers;*
4. *Coordinated the execution of stakeholder visits;*
5. *Coordinated all signings of Shareholder Agreement (SHA), Memorandum of Understanding (MoU), and Head of Agreement (HoA) in 2020;*
6. *Coordinated the execution of Annual GMS and Extraordinary GMS in 2020;*
7. *Attended the Board of Directors' Meetings 57 times and the preparation of the minutes of the Board of Directors' Meetings;*
8. *Attended the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors 12 times and prepared the materials for the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
9. *Coordinated the execution of the Board of Directors' Meeting with Division Head (Directorate Review) in January to December 2020;*
10. *Maintained and stored Corporation documents, such as Directors' Regulations (49), Directors' Decrees (68), Letters of Assignment (39), Circular Letters (77), Minutes of the Board of Directors' Meetings (57), President Director's Regulation (9), Finance and Corporate Management Director's Regulation (7), Operation and Maintenance Director's Regulation (5), and Construction Director's Regulation (4) that were ratified in 2020.*
11. *Coordinating the preparation and submission of monthly report concerning the Construction, Operations, and Business Progress of Phase 1 Project, monthly report concerning the Progress of the Preparation for Phase 2 MRT Jakarta Project Construction (Bundaran HI-Kota), and Monthly Report of MITJ and Quick Wins of Station Arrangement from January to December to the Regional Secretary of DKI Jakarta Province and other Stakeholders;*
12. *Creating and updating policies concerning Good Corporate Governance. In January-December 2020, 8 (eight) Directors' Regulation, 3 (three) Directors' Decree, and other Documents including Special List of Share Ownership of the Board of Commissioners*

- termasuk Daftar Khusus Saham Dewan Komisaris dan Direksi, Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan, serta Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Mengadakan sosialisasi pengisian dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1 (satu) kali. Internalisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Sosialisasi Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada karyawan sebanyak 5 (lima) pertemuan, sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Dokumen sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, dan sosialisasi terkait pengelolaan LHKPN kepada Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan Patungan sebanyak 1 (1 kali).
 14. Melaksanakan program pengenalan bagi Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi baru pada tanggal 27 Mei 2020.
 15. Sebagai Unit Pengendali Gratifikasi, melakukan pemantauan terhadap pengelolaan gratifikasi di Perseroan. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, telah diterima 20 laporan penolakan gratifikasi yang dikembalikan kepada pihak Pemberi dan 1 laporan penerimaan gratifikasi yang tidak dilarang dan tidak wajib dilaporkan. Selain itu, 4 (empat) barang penerimaan gratifikasi yang masuk pada tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPK Menjadi Milik negara telah diserahkan ke KPK.
 16. Melakukan asistensi/pendampingan pengisian dan pelaporan LHKPN kepada Wajib Laporkan LHKPN dan menyerahkan dokumen kelengkapan LHKPN kepada KPK. Sampai dengan 31 Desember 2020, 91 dari 91 Wajib Laporkan telah melaporkan LHKPN (100%).
 17. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran. Terdapat 8 (delapan) laporan yang masuk pada sistem, 3 (tiga) di antaranya tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dan 5 di antaranya memenuhi kriteria tindak lanjut.
 18. Mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik telah diinformasikan kepada seluruh unit kerja terkait.
 19. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku. Perseroan membentuk Satuan Pengawas Etika dan Perilaku melalui SK/056/BOD-MRT/IX/2020. Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 4 (empat) laporan Pelanggaran Norma Ketentuan dan Peraturan Perusahaan yang masuk melalui sistem pelaporan dugaan pelanggaran.
- and the Board of Directors, Statements of No Conflict of Interest, and Integrity Pact of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been compiled/updated;*
13. *Conducted the dissemination of Filing and Reporting the Report of State Officials Wealth (LHKPN) by the Corruption Eradication Commission (KPK) once. Internalization of Good Corporate Governance Guidelines was carried out 4 (four) times. Dissemination of Whistleblowing System Guidelines for the employees was carried out in 5 (five) meetings, dissemination of Gratification Control and Document Management was carried out in 3 (three) meetings, and dissemination concerning LHKPN management for Subsidiaries and Joint Venture was carried out once;*
 14. *Conducted induction program for the newly appointed Finance and Corporate Management Director on May 27, 2020;*
 15. *As a Gratification Control Unit, monitored the gratification control in the Corporation. In January until December 2020, 20 reports of gratification refusal that has been returned to the Giver and 1 report of allowed acceptance of gratification that is not mandatory for report has been received. In addition, 4 (four) objects of gratification accepted in 2019 have been declared by KPK to be Owned by the State and have been submitted to KPK;*
 16. *Provided assistance in the filing and reporting of LHKPN to LHKPN Obligees and submitted their documents to KPK. As of December 31, 2019, 92 out of 92 Obligees have submitted the LHKPN (100%);*
 17. *Monitored the management of Whistleblowing System. There were 8 (eight) reports received by the system, 3 (three) of which did not meet the criteria to be followed up and 5 (five) of which fulfilled the criteria;*
 18. *Coordinated the follow-up monitoring of GCG assessment. Recommendations from the results of GCG assessment have been informed to all relevant work units;*
 19. *Carried out monitoring of the implementation of the Code of Conduct. The Corporation established Code of Conduct Supervision Unit through SK/056/BOD-MRT/IX/2020. As of December 31, 2020, there were 4 (four) reports of Violations against Corporate Terms and Regulations through the whistleblowing system.*

Corporate Strategy

Corporate Strategy

Perseroan membentuk Divisi *Corporate Strategy* untuk memastikan proses formulasi strategi, pengukuran kinerja yang terstruktur dari level korporasi hingga ke level divisi. Selain itu Divisi *Corporate Strategy*, memastikan terlaksananya manajemen pengetahuan korporasi serta perbaikan bisnis yang berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas karyawan dan proses bisnis yang dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Profil Kepala Divisi *Corporate Strategy*

Sampai dengan akhir tahun 2020, Plt. Kepala Divisi *Corporate Strategy* dijabat oleh saudara Rifkiandi Darajatun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/INT/BOD-MD-MRT/ST-PL/VII/2020 tentang Pelaksana Tugas *Corporate Strategy Division Head*.

The Corporation established Corporate Strategy Division to ensure the strategy formulation processes, structured performance evaluation from the Corporation to Division level. In addition, Corporate Strategy Division ensures the implementation of Corporate knowledge management and sustainable business improvement, to increase the quality of the employees and business process that support the operational activities of the Corporation.

Profile of the Head of *Corporate Strategy Division*

As of the end of 2020, the Acting Official of the Head of Corporate Strategy Division is Rifkiandi Darajatun as appointed by the Directors' Decree No. 046/INT/BOD-MD-MRT/ST-PL/VII/2020 concerning Acting Official of Corporate Strategy Division Head.

**Rifkiandi Darajatun**

Plt. Kepala Divisi Corporate Strategy
Acting Corporate Strategy Division Head

| | | |
|---|---|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 8 Juli 2020 - sekarang | 8 July 2018 - now |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesian |
| Usia <i>Age</i> | 47 tahun | 47 years old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Bogor | Bogor |
| Domisili <i>Domicile</i> | Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | Tangerang Selatan, Banten, Indonesia |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appoinment</i> | 02 Januari 2018 | January 2, 2018 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung, 2020 • Sarjana Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, 1997 | <ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration, Institut Teknologi Bandung, 2020 • Bachelor's Degree in Engineering Physics, Institut Teknologi Bandung, 1997 |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Plt. Kepala Divisi Corporate Strategy, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2020 – sekarang; • Kepala Divisi Project Management Office, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2018 – sekarang; • Manager Corporate Social Responsibility, TOTAL E&P, 2015 – 2017; • Contract Manager, TOTAL E&P, 2009 – Mei 2015; • Senior Project Engineer, TOTAL E&P, 2006 – 2009; • Project Coordinator, Kangean Energy Indonesia, 2004 –2006. | <ul style="list-style-type: none"> • Acting Corporate Strategy Division Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2020 – now; • Project Management Office Division Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2018 – now; • Corporate Social Responsibility Manager, TOTAL E&P, 2015 – 2017; • Contract Manager, TOTAL E&P, 2009 – Mei 2015; • Senior Project Engineer, TOTAL E&P, 2006 – 2009; • Project Coordinator, Kangean Energy Indonesia, 2004 -2006 |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Insinyur Profesional Madya (IPM), lisensi no. 2-07-00-000739-00 dari Persatuan Insinyur Indonesia; • Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), lisensi no. S-40-1609-465. | <ul style="list-style-type: none"> • Insinyur Profesional Madya (IPM), licence no. 2-07-00-000739-00 from Persatuan Insinyur Indonesia; • Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), license no. S-40-1609-465. |

Pengembangan Kompetensi Divisi Corporate Strategy

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Kepala Divisi dan karyawan Divisi Corporate Strategy. Informasi kegiatan yang diikuti selama periode pelaporan disajikan dalam tabel.

Competency Development of the Corporate Strategy Division

The Corporation facilitates the implementation of development programmes for the Corporate Strategy Division in order to improve the competency of the and employees of the Corporate Strategy Division. Information concerning the activities carried out during the reporting period is presented in the table as follows.

Pengembangan Kompetensi Divisi Corporate Strategy
Competency Development of the Corporate Strategy Division

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Types of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i> | Jumlah Karyawan Peserta <i>Number of Participants</i> |
|--|--|--|
| Soft Skill | Directorship Program "High-Performance Boards" | 1 |
| Soft Skill | Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader | 1 |
| Technical Skill | Workshop Ecosystem Edge: Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis | 1 |
| Technical Skill | International Workshop: Public Policy for The Future | 1 |
| Soft skill | Creative Thinking | 1 |
| Soft skill | Managing Conflict | 1 |
| Soft skill | HR for Non-HR | 3 |
| Soft skill | Managing Team Performance in Time of Crisis | 3 |
| Technical Skill | Process Improvement | 1 |
| Technical Skill | Mini Company: Empowering People for KAIZEN in New Era With BCA | 1 |
| Technical Skill | KM Tools for SMEs | 1 |

Pelaksanaan Tugas Divisi Corporate Strategy 2020

1. Pelaksanaan siklus perencanaan strategis dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (KPI) 2020 di level Perseroan, Direktorat, dan Divisi.
2. Pendampingan pembentukan atas anak perusahaan.
3. Pendampingan dan *monitoring* KM Indeks 2020 kepada unit kerja setingkat di bawah Direksi.
4. Pelaksanaan *Knowledge Capture* dalam bentuk Buku Seri MRT Jakarta (Fokus: Konstruksi Fase 1).
5. Perilisan Buku Serial Pembelajaran pertama "Menuju Ratangga Kereta Kota Kita".
6. Penguatan Budaya *Knowledge Management* dalam bentuk *Cafe Talk* (*knowledge sharing*), KM Newsletter, penulisan *lesson learned* dan artikel pengetahuan, pelaksanaan CoP (*Community of Practice*), KM Award, dan lain sebagainya.
7. Pemutakhiran tata kelola *Knowledge Management* melalui pedoman, SOP, form, dan lainnya.

Implementation of Duties of the Corporate Strategy Division in 2020

1. Implementation of strategic planning cycle and development of Key Performance Indicator (KPI) in 2020 at the Corporation, Directorate, and Division levels.
2. Assistance for the establishment of subsidiary.
3. Assistance and monitoring of 2020 KM Index for the work unit below the Board of Directors.
4. Implementation of Knowledge Capture in the form of MRT Jakarta Serial Books (Focus: Phase I Construction).
5. Launching of the first Learning Series Book "To Ratangga, the Train of Our City".
6. Knowledge Management Culture Strengthening through Café Talk (Knowledge Sharing), KM Newsletter, lesson learned writings and knowledge articles, CoP (Community of Practices) implementation, KM Award, and others.
7. Knowledge Management governance update through guidelines, SOP, forms, and others.

8. Peluncuran dan penambahan fitur teknologi pendukung *knowledge management* (Kinetic: *Knowledge, Information, and Education Center*).
9. Fasilitator dan mentor dalam implementasi *Business & Process Improvement* melalui *Continuous Improvement Project* yang dilakukan oleh unit kerja di PT MRT Jakarta.
10. Koordinator dalam penyusunan, finalisasi dan penyampaian capaian untuk setiap Rencana Aksi yang terdapat dalam Rencana Strategis Daerah.
11. Pengukuran tingkat maturitas KM (*KM Maturity Level*) korporasi.

Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

Risk Management & QSSHE Assurance Division

Perseroan berkomitmen mengelola risiko guna melindungi nilai-nilai Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2020 Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko Korporasi sesuai Standar ISO 31000:2018, yang didukung Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001:2018, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Khusus untuk pengelolaan K3, Perseroan tidak hanya menerapkan standar internasional sebagai referensi dalam pengelolaan korporasi. Perseroan tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun standar nasional keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

Untuk memastikan penerapan manajemen pengelolaan risiko serta pengelolaan mutu, K3 dan lingkungan (QSSHE), Perseroan membentuk struktur organisasi pengelolaan risiko yang terdiri dari:

- Komite Pemantau Risiko & Sekuriti di tingkat Dewan Komisaris;
- Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi;
- Divisi *Risk Management* (RM) & *QSSHE Assurance* sebagai penanggung jawab implementasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Pemilik Risiko/Unit Pengelola Risiko yang ditetapkan di tingkat Divisi/Departemen;
- *Risk Officers* yang terdapat di tiap unit kerja setingkat Divisi/Departemen;

The Corporation is committed to manage risks in order to protect the values of the Corporation. As of the end of 2020, the Corporation has implemented Corporate Risk Management System in accordance with ISO 31000:2018 Standards, supported by Quality Management System ISO 9001:2015, Environmental Management System ISO 14001:2015, and Occupational Safety and Health (OSH) ISO 45001:2018, and Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016.

For OSH management, the Corporation does not only implement the international standards as the reference in the management of the Corporation. The Corporation ensures compliance to the regulations and national standards of occupational safety and health (OSH), i.e., Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in compliance with Government Regulation No. 50 Year 2012.

To ensure the implementation of risk management and quality management, OSH, and environmental (QSSHE), the Corporation established risk management organizational structure consisting of:

- *Risk & Security Monitoring Committee at the Board of Commissioners level;*
- *Risk Management Committee at the Board of Directors level;*
- *Risk Management (RM) and QSSHE Assurance Division as the responsible division for the implementation of Risk Management Policies;*
- *Risk Owners/Risk Management Unit established at the level of Division/Department;*
- *Risk Officers stationed at each work unit equal to Division/Department;*

- Divisi *Internal Audit* sebagai unit yang melakukan pengawasan dan *assurance* terhadap proses Manajemen Risiko.

Sementara untuk memastikan penerapan pengelolaan mutu, K3 dan lingkungan, Perseroan membentuk struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terdiri dari :

- Ketua: Direktur Utama PT MRT Jakarta;
- Sekretaris I: Kepala Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*;
- Sekretaris II: Kepala Departemen *QSSHE Assurance*;
- Sekerretaris III: Kepala Departemen *QSHE OM*;
- Anggota (Ketua Komite Keselamatan Perkeretaapian): Direktur Operasi dan Pemeliharaan;
- Anggota (Ketua Komite Keselamatan Konstruksi): Direktur Konstruksi.

Profil Kepala Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/081/BOD-MRT/XII/2014, Direktur Utama mengangkat saudara Ernie Widianty Rahardjo sebagai Kepala Divisi RM & QSSHE Assurance. Struktur organisasi *Corporate Strategy* ditetapkan sesuai Peraturan Direksi No. SK/009/BOD-MRT/II/2020. Hingga akhir tahun 2020 jumlah karyawan yang tergabung dalam unit *Risk Management & QSSHE Assurance* sebanyak 15 orang.

- *Internal Audit Division* as the unit that carries out supervision and assurance of Risk Management processes.

As to ensure the implementation of quality management, OSH, and environment, the Corporation established organizational structure of Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) consisted of:

- Chair: President Director of the Corporation;
- Secretary I: Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division;
- Secretary II: Head of QSSHE Assurance Department;
- Secretary III: Head of QSHE OM Department;
- Members (Head of railway Safety Committee): Operations and Maintenance Directors;
- Member (Head of Construction Safety Committee): Construction Director.

Profile of the Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division

In accordance with Directors' Decree No. SK/081/BOD-MRT/XII/2014, the President Directors appointed Ernie Widianty Rahardjo as the Head of RM & QSSHE Assurance Division. The organizational structure of *Corporate Strategy* is established in accordance with Directors' Regulation No. SK/009/BOD-MRT/II/2020. As of the end of 2020, there are 15 employees within the Corporate Secretary unit.

**ERNIE WIDIANTY RAHARDJO, DR., M. KES, MBA**

Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division

| | | |
|--|--|---|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 2017-sekarang | 2017 – present |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 47 tahun | 47 years old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Surabaya, 16 April 1973 | Surabaya, April 16, 1973 |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia | South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia |
| Riwayat Penunjukkan <i>History of Appointment</i> | 02 Januari 2010 | January 02 nd 2010 |
| Pendidikan <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Master Administrasi Bisnis (MBA), Nanyang Business School, Nanyang Technological University, 2009; • Magister Kesehatan, Universitas Indonesia, 2003; • Dokter, Universitas Airlangga, 1998. | <ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration (MBA), Nanyang Business School, Nanyang Technological University, 2009; • Master of Health, University of Indonesia, 2003; • Doctor, Airlangga University, 1998 |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 - Sekarang; • Kepala Divisi Risk Management, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2014 - 2017; • Kepala Divisi Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2013 - 2014; • Kepala Departemen Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2010 - 2013; • Asisten Eksekutif Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Pemprov. DKI Jakarta, 2009 – 2010; • Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Bappeda DKI Jakarta, 2004 - 2008; • Manajer Mutu Layanan, Rumah Sakit Daerah Cengkareng DKI Jakarta, 2002 - 2003; • Manajer dan Fasilitator Proyek Implementasi Total Quality Management (TQM), Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, 2001 - 2003. | <ul style="list-style-type: none"> • Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 – Present; • Head of Risk Management Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2014 -2017; • Head of Human Resources Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2013 – 2014); • Head of Human Resources Department, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2010 -2013; • Executive Assistant of the Deputy of the Governor of DKI Jakarta for Environmental and Spatial Affairs, the Government of DKI Jakarta Province, 2009 -2010; • Assistant of the Head of Development Planning Agency of DKI Jakarta, 2004 – 2008; • Manager of Service Quality, Regional Hospital of Cengkareng, DKI Jakarta, 2002 – 2003; • Manager and Facilitator of Total Quality Management (TQM) Implementation Project, Department of Health of North Jakarta, 2001 – 2003. |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Certified Talent Management; • Certified Human Resource Professional; • Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Enterprise Risk Management Academy, Singapore; • Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Kemenakertrans RI; • Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Kemenakertrans RI. | <ul style="list-style-type: none"> • Certified Talent Management; • Certified Human Resource Professional; • Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Enterprise Risk Management Academy, Singapore; • Expert of General Occupational Safety and Health (AK3U), Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia; • Auditor of Occupational Safety and Health Management System (SMK3), Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia. |

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan pengelolaan manajemen risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Informasi sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi RM & QSSHE disampaikan dalam tabulasi berikut.

Professional Certification of Risk Management

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of risk management, especially concerning compliance with the regulations and industrial current development. Information concerning professional certificates obtained by the employees of the RM & QSSHE Assurance Division is presented on the table as follows:

Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
Type of Certification of Risk Management Profession

| Jenis dan Level Sertifikasi <i>Type and Level of Certification</i> | Jumlah Karyawan Divisi RM&QSSHE Assurance yang Memiliki Sertifikasi <i>Number of Employees in the RM&QSSHE Assurance Division with the certification</i> |
|---|---|
| ERMCP | 1 |
| ERMAP | 6 |
| CRMP | 4 |
| BCMCP | 1 |
| AK3U | 7 |
| Auditor SMK3 | 4 |
| Lead Auditor ISO 9001:2015 | 2 |
| Lead Auditor ISO 14001: 2015 | 1 |
| Lead Auditor ISO 45001:2018 | 1 |
| Lead Auditor ISO 37001:2016 | 1 |
| P3K | 2 |
| Jumlah Total | 29 |

Perseroan berkomitmen meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance. Informasi pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam tabulasi berikut.

The Corporation is committed to improve the professional certification level for the employees of Risk Management & QSSHE Assurance Division. Information concerning such activities is presented in the table as follows.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Divisi RM&QSSHE
Education and Training Activities of RM & QSSHE Division

| Jenis dan Level Sertifikasi <i>Type and Level of Certification</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i> | Jumlah Karyawan Peserta <i>Number of Participants</i> |
|---|--|--|
| Hard skill | Ahli K3 Umum <i>General OSH Expert</i> | 1 |
| Hard skill | Auditor SMK3 PP 50/2012 <i>Auditor of SMK3 PP 50/2012</i> | 2 |
| Hard skill | Accident Investigation | 1 |
| Soft skill | Creative Thinking | 4 |
| Soft skill | Managing Conflict | 5 |
| Soft skill | HR for Non-HR | 2 |
| Soft skill | Managing Team Performance in Time of Crisis | 2 |
| Hard Skill | Risk Beyond 2020 (International Conference) | 3 |
| Hard Skill | Master Class Program Series XIX, "Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization | 1 |
| Hard Skill | Penguatan Manajemen Risiko BUMN dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi <i>Strengthening SOE Risk Management to Support the Acceleration of Economic Recovery</i> | 3 |

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Risiko Tahun 2020

1. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Salah satu bagian penting dalam implementasi Manajemen Risiko Korporasi adalah Selera Risiko dan Toleransi Risiko yang menjadi alat dalam pelaksanaan evaluasi risiko maupun proses pengambilan keputusan berbasis risiko. MRT Jakarta melakukan pembaharuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko tiap tahunnya disesuaikan dengan *Key Performance Indicators (KPI)* Korporasi yang pada tahun 2020 ini MRT Jakarta menerapkan metode *Balance Score Card (BSC)*.

Dalam implementasi Manajemen Risiko hal penting lainnya adalah penerapan *Key Risk Indicators (KRI)*, dimana pada tahun 2020 MRT Jakarta baru mulai menerapkannya untuk risiko – risiko strategis korporasi, serta membangun sistem aplikasi untuk membantu penerapan KRI di tahun 2021. Pada tahun 2020, PT MRT Jakarta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga penggaris risiko atau objective *impact matrix* yang ada dilengkapi dengan standar untuk mengevaluasi risiko penyuapan. Salah satu aspek penting dalam implementasi SMAP adalah dilaksanakannya *Bribery Risk Assessment (BRA)* atau Analisa Risiko Penyuapan. Pelaksanaan Analisa Risiko Penyuapan ini memperluas cakupan proses manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.

2. Monitoring & Pelaporan Risiko

Proses *monitoring* dan pelaporan risiko dilakukan melalui mekanisme pelaporan pada Komite Manajemen Risiko (KMR). Unit-unit pengelola risiko yang tergabung dalam Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/012/BOD-MRT/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020, Ketua Komite Manajemen Risiko pada tahun 2020 adalah Direktur Konstruksi, Ibu Silvia Halim.

Pelaporan *Top Risk* Korporasi dilakukan dalam rapat Komite Manajemen Risiko tiap bulannya. Materi *Top Risk* yang telah dibahas oleh Komite Manajemen Risiko, dilaporkan kepada Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti sebagai organ dibawah Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Bulanan Direksi dan Dewan Komisaris. Arahan – arahan maupun masukan yang didapatkan untuk pengelolaan risiko selanjutnya disampaikan dalam rapat *Monitoring Kinerja* Bulanan bersama Direksi.

Brief Report of the Implementation of Duties of Risk Management in 2020

1. Establishment of Risk Appetite and Risk Tolerance

A crucial part in the implementation of Corporate Risk Management is Risk Appetite and Risk Tolerance to become a tool for risk evaluation and risk-based decision-making process. The Corporation updates the Risk Appetite and Risk Tolerance annually in accordance with eh Corporate Key Performance Indicators (KPI) that employs Balance Score Card (BSC) in 2020.

In Risk Management implementation, another important aspect is Key Risk Indicators (KRI) implementation, that in 2020 the Corporation has started to apply KRI for Corporate strategic risks, and developed application system to support the implementation of KRI in 2021. In 2020, the Corporation implements Anti-Bribery Management System (SMAP), hence the existing objective impact matrix is complemented with standards to evaluate bribery risk. An important aspect in the implementation of Anti-Bribery Management System is the execution of Bribery Risk Assessment (BRA). The execution of Bribery Risk Assessment extends the scope of risk management processes implemented in the Corporation.

2. Risk Monitoring & Reporting

Risk monitoring and reporting process is carried out through the reporting mechanism of Risk Management Committee. The risk manager units under the Risk Management Committee are established in the Directors' Decree No. SK/012/BOD-MRT/II/2020 dated February 28, 2020, and the Head of Risk Management Committee in 2020 is the Construction Director, Silvia Halim.

Corporate Top Risk Reporting is carried out in the Risk Management Committee's monthly meeting. The Top Risk materials as discussed by the Risk Management Committee is reported to the Risk & Security Monitoring Committee as the organ under the Board of Commissioners to be reported to the Board of Commissioners during the monthly joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The directions and inputs obtained for risk management is delivered in the Monthly Performance Monitoring meeting with the Board of Directors.

Dalam mendokumentasikan proses manajemen risiko, telah tersedia aplikasi berbasis web yang disebut Sistem ERM. Sistem ini dapat diakses oleh *Risk Officers* dari tiap unit kerja, Kepala Divisi selaku penanggung jawab risiko unit kerja dan juga Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti sebagai organ dibawah Dewan Komisaris.

3. Permodelan dan Analisis Risiko

Permodelan dan Analisis Risiko merupakan bagian dari implementasi proses Manajemen Risiko. Unit – unit pengelola risiko merupakan garda terdepan dalam implementasi proses manajemen risiko, terutama dalam situasi Pandemi.

Demi memperkuat permodelan dan analisis risiko, pada tahun 2020 ini, dilakukan Kerja sama dengan SBM ITB untuk melakukan studi permodelan menggunakan pendekatan permodelan berbasis agen (*agent-based modelling*) untuk me-review implementasi upaya mitigasi yang telah diterapkan oleh Perseroan dalam mencegah penularan COVID-19. Studi permodelan ini membantu memastikan upaya – upaya pencegahan penularan di level operasional layanan pengguna jasa dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan layanan pengguna jasa. Kerja sama dengan SBM ITB ini dipayungi dengan Perjanjian Kerja sama (PKS) No. CON/014-1/MRT/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020. Demi memperkuat proses Analisa Risiko Korporasi, pada tahun 2020, Perseroan telah berhasil melakukan penyediaan *software* khusus permodelan.

4. Pengembangan Budaya Risiko

Proses mengembangkan Manajemen Risiko Korporasi berbasis ISO 31000:2018 oleh PT MRT Jakarta telah berlangsung sejak tahun 2014 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Proses pengembangan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya korporasi untuk mengelola risiko. Peran Pimpinan dalam pengembangan suatu sistem maupun budaya korporasi sangatlah penting, namun hal tersebut tetap perlu didukung oleh pucuk–pucuk pimpinan dibawahnya dan juga agen perubahan.

Peran agen perubahan dalam pengembangan budaya mengelola risiko di MRT Jakarta ini berada pada *Risk Officers*. *Risk Officers* adalah personel yang dilatih dan disertifikasi teknik identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang kemudian ditugaskan untuk memfasilitasi proses manajemen risiko di tiap

To document the risk management process, a web-based application known as ERM System has been prepared. The system can be accessed by Risk Officers from each work unit, Division Head as the person in charge for work unit risk, and Risk & Security Monitoring Committee as an organ below the Board of Commissioners.

3. Risk Modelling and Analysis

Risk Modelling and Analysis is a part of Risk Management implementation. Risk management units are the front liners in terms of risk management implementation, especially during the pandemic.

To strengthen the risk modelling and analysis, in 2020, a collaboration with SBM ITB has been started to carry out modelling study employing agent-based modelling to review the implementation of mitigation measures as implemented by the Corporation to prevent the transmission of COVID-19. This modelling study helps to ensure the transmission prevention measures at operational level so that the passengers can contribute to the significant impacts in COVID-19 transmission prevention within the service areas. The collaboration with SBM ITB is governed by Collaboration Agreement (PKS) No. CON/01401/MRT/VII/2020 dated July 1, 2020. To strengthen the Corporation Risk Analysis process, in 2020 the Corporation has put in place a software for modelling.

4. Development of Risk Culture

The process to develop Corporate Risk Management based on ISO 31000:2018 by the Corporation has been carried out starting 2014 and is still ongoing. The development process is a part of corporate culture management for risk management. The role of Leadership in system development and corporate culture is crucial, but it must be supported by the leaders below them and change agents.

The role of change agent for risk management culture development at the Corporation is held by Risk Officers. Risk Officers are personnel trained and certified with risk identification technique, risk analysis, and risk evaluation that are assigned to facilitate the risk management process at each Work

– tiap Unit Kerja atau Unit Pengelola Risiko. Demi melaksanakan tugasnya, *Risk Officers* ditetapkan melalui Surat Tugas Direksi. Ketentuan mengenai tugas – tugas *Risk Officers* dan Standar Kompetensi yang harus dipenuhi, serta *Key Performance Indicators* (KPI) yang harus dipenuhi, tertuang dan disahkan melalui Peraturan Direksi. Pada tahun 2020, terdapat 34 orang *Risk Officers*. Proses pelatihan dan sertifikasi *Risk Officers* juga telah dilakukan. Sebanyak 28 orang *Risk Officers* telah bersertifikat.

Beberapa upaya lain yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat budaya mengelola risiko di MRT Jakarta adalah :

- **Penyusunan dan publikasi *Newsletter***
Newsletter ini mencakup topik-topik yang relevan, seperti waspada musim hujan dan potensi banjir, penurunan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19, bagaimana tetap produktif walau *Work From Home*, waspada varian SARS-Cov-2 baru, tips berkegiatan di tempat dan fasilitas umum saat *new normal*, dan lainnya. *Newsletter* ini dipublikasikan berkala melalui *email* kepada seluruh karyawan. Pada tahun 2020, Perseroan juga melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga *newsletter* terkait tema SMAP pun juga disusun untuk kemudian dipublikasikan secara berkala.
- **Penyelenggaraan *Risk and Safety Competition***
Risk and Safety Competition merupakan kompetisi antar unit kerja dalam melakukan analisa risiko dan juga beberapa praktek keterampilan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti praktek pemadaman kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) maupun pengetahuan dan keterampilan lainnya yang relevan dengan pengelolaan risiko maupun aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaan *Risk and Safety Competition* di tahun 2020 ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu babak penyisihan berupa kompetisi Cepat Tepat dan Babak Final.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Cepat Tepat bukan hanya mengenai Manajemen Risiko namun juga mengenai implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan maupun yang terkait dengan pengelolaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada Babak Final peserta diharuskan melakukan analisa risiko sesuai dengan *Key Performance Indicators* (KPI) unit kerjanya dan menyusun dalam bentuk paparan untuk kemudian dipaparkan dihadapan juri.

Unit or Risk Management Unit. To carry out their duties, Risk Officers are appointed based on the Letter of Assignment from the Board of Directors. Provisions concerning the duties of Risk Officers and Competency Standards required, as well as the Key Performance Indicators (KPI) to be fulfilled are stated in and ratified as Directors' Regulation. In 2020, there are 34 Risk Officers. The training and certification processes for Risk Officers have been carried out as well. 28 Risk Officers are certified.

Various efforts carried out to develop and strengthen risk management culture at the Corporations include:

- ***Newsletter preparation and publication***
The Newsletter covers relevant topics, such as alertness in raining season and flood potential, decreasing immunity during the pandemic, how to remain productive during Working from Home, alertness against new variant of SARS-Cov-2, tips for activities in public places and facilities during the new normal, and others. The newsletter is published frequently through email for all employees. In 2020, the Corporation implements Anti-Bribery Management System as well, thus the newsletter concerning Anti-Bribery Management system is prepared to be published frequently.
- ***Implementation of Risk and Safety Competition***
Risk and Safety Competition is a form of competition among work units in carrying out risk analysis and various skill practices related to occupational safety and health, such as practice to utilize Fire Extinguishers and other knowledge and skills relevant with risk management and occupational safety and health aspects. Risk and Safety Competition in 2020 was carried out in 2 rounds, i.e., elimination round of Quiz and the Final round.

The questions asked in the Quiz are not only about Risk Management, but also concerning implementation of Anti-Bribery Management System and occupational safety and health management system. During the Final Round, the participants are asked to analyze risks based on the Key Performance Indicators (KPI) of their work unit and create an explanation to be presented in front of the judges.

Demi menjaga objektivitas penilaian, PT MRT Jakarta (Perseroda) mengundang 1 (satu) orang tenaga ahli manajemen risiko dan 1 (satu) orang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjadi juri dalam kompetisi ini. Divisi yang berhasil menjadi juara dalam *Risk and Safety Competition* tahun 2020, yaitu Divisi *Engineering*, Divisi *Human Capital* dan Divisi *Internal Audit*. Pada tahun 2020, *Risk and Safety Competition* dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat karyawan untuk tetap berkompetisi dan berkreasi.

- **Penyelenggaraan Webinar GRC Series**
Setiap tahunnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelenggarakan *roundtable* manajemen risiko dengan mengundang narasumber, baik pembuat kebijakan, ahli maupun praktisi manajemen risiko dan *Governance, Risk and Compliance*. Tema yang dihadirkan berbeda setiap tahunnya. Penyelenggaraan pada tahun ini merupakan tahun kelima. Tema yang dibawakan pada tahun 2020 adalah *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi. Pada tahun 2020, penyelenggaraan dilakukan secara daring melalui *webinar*. Acara ini dilangsungkan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 323 peserta pada hari pertama dan 204 peserta pada hari kedua. Adapun pembicara yang menyampaikan materi pada acara ini terlihat pada flyer berikut.

To maintain scoring objectivity, the Corporation invites an expert of risk management and an expert in occupational safety and health to be judges in the competition. The Division that became the winner in the Risk and Safety Competition 2020 was Engineering Division, Human Capital Division, and Internal Audit Division. In 2020, Risk and Safety Competition was carried out virtually due to the pandemic. However, the pandemic did not discourage the employees to compete and be creative.

- **Execution of GRC Series Webinar**
Every year, the Corporation carries out roundtable of risk management inviting various speakers, including regulators, experts, and practitioners of risk management and Governance, Risk, and Compliance. The theme presented is different each year. The execution in 2020 is the fifth execution. The theme in 2020 was Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Corporate Transformation in the Era of Disruption. In 2020, the event was carried out virtually through webinar. The event was carried out in 2 (two) days and participated by 323 participants in the first day and 204 participants in the second day. The speakers are presented in the flyer as follows.

Jak Lingko **GRC Series 2020** **mrt jakarta**

Tantangan dan Peluang Penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi

3 - 4 Desember 2020
14.00 WIB

Zoom
Pindai untuk Mendaftar

3 Des 2020 **Topik 1**
Best Practice GRC dalam Menghadapi Era Disrupsi

4 Des 2020 **Topik 2**
Peran Sistem Manajemen Anti Penipuan Memperkuat GRC

Speakers

William P. Sabandar
Head of Internal Audit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Muhammad Syangri
Business Unit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Keynote Speaker

Mas Achmad Daniri
Risiko Internal GRC
Indonesia

Hidayat Prabowo
Chief Internal Audit
General Management Risk
and Compliance Institute Ltd

Adnan Pandu Praja
Business Unit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sally Salemah
Chief Risk Officer
Kotaku Finance Group

Panelist

M. Wahyu Wibowo
Manajer Manajemen Risiko dan Keperluan
PT Jasa Rahayu

Chandra Hamzah
Manajer Risiko
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Silvia Halim
Executive Director &
Chief Internal Audit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Ricardo Pardebe
Chief Internal Audit
General Management Risk
& Compliance Institute Ltd

Victor Riwu Kaho
Manajer Risiko
MRT Jakarta

Angela Simatupang
Manajer
MRT Jakarta

Doni Muhandiansyah
Chief Risk Officer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Ernie Widianty
Manajer
MRT Jakarta

LIVE ON YOUTUBE
MRTv

ikuti kuis berhadiah menarik pada sesi ini

5. Pengukuran Budaya Risiko

Pada tahun 2020, serangkaian upaya untuk membangun budaya mengelola risiko telah dilakukan, sehingga untuk mengetahui tingkat budaya mengelola risiko yang telah terbangun, pada bulan September 2020 dilakukan Pengukuran Budaya Risiko. Proses pengukuran ini dilakukan melalui survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan – pertanyaan. Jumlah *sample* dalam proses pengukuran ini sebanyak 688 responden pada level karyawan dan pimpinan. Dari hasil penghitungan jawaban yang disampaikan melalui survei dan analisa, diperoleh Skor Budaya Risiko tahun 2020 adalah sebesar 7,59. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan tahun 2019.

5. Risk Culture Measurement

In 2020, a series of efforts to develop risk management culture has been applied, thus, to find out the development rate of risk management culture, Risk Culture Measurement was conducted in September 2020. The measurement process is carried out through a survey that employees a series of questions. The number of samples in this measurement process in 688 respondents of employees and leaders. Based on the calculation results of responses of the survey and analysis the Risk Culture Score in 2020 was 7.59. The score increased by 3% compared to that of 2019.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 343 tentang Perlunya Pembentukan Komite Audit dan Internal Audit pada BUMD, serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan membentuk Divisi *Internal Audit*. Pembentukan Divisi *Internal Audit* dimaksudkan untuk mendukung penerapan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko berdasarkan Standar Prosedur Operasi Audit Internal yang disusun dengan mengacu kepada Piagam Audit Internal.

In accordance with Law No.23 Year 2014, Article 343 concerning the Need for the Establishment of Audit Committee and Internal Audit in ROEs, and Governor's Decree of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 dated October 7, 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally-Owned Enterprises (ROEs) of the Government of DKI Jakarta Province, the Corporation established Internal Audit Division. The Establishment of Internal Audit Division aims to support the implementation of risk-based internal supervision and control system based on the Internal Audit Standard Operating Procedures as established by referring to the Internal Audit Charter.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

The Party that Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit Division

Divisi *Internal Audit* bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama. Kepala Divisi *Internal Audit* diangkat oleh Direktur Utama dengan mekanisme internal yang berlaku di Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal di Perseroan, kepala dan anggota unit kerja Divisi *Internal Audit* harus dilengkapi sertifikasi/kualifikasi audit internal.

The Internal Audit Division reports directly to the President Director. The Head of Internal Audit Division is appointed by the President Director with the internal mechanism applicable in the Corporation. To support the implementation of Internal Audit in the Corporation, the Head and Members of Internal Audit Division work units must be certified/qualified in internal audit.

Profil Kepala Divisi Internal Audit

Profile of the Head of Internal Audit Division

Kepala Divisi *Internal Audit* Perseroan per 31 Desember 2020 dijabat oleh saudara Andy Revy Rohadian. Pengangkatan sebagai Kepala Divisi *Internal Audit* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK/044/BOD-MRT/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017.

The Head of Internal Audit Division of the Corporation as of December 31, 2020 is Andy Revy Rohadian. The appointment as the Head of Internal Audit Division is based on Directors' Decree No. SK/044/BOD-MRT/VI/2017, dated June 6, 2017.



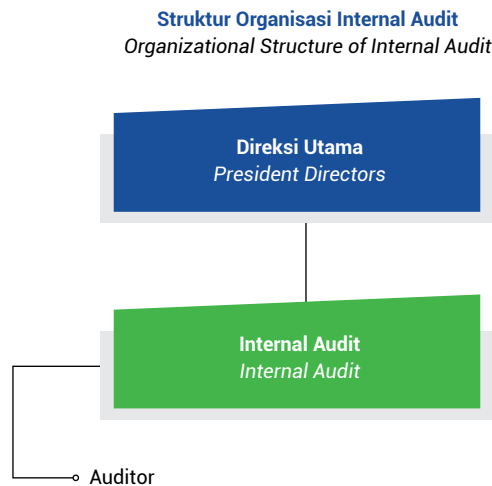
Andy Revy Rohadian
Kepala Divisi Internal Audit
Head of Internal Audit Division

| | | |
|--|--|--|
| Periode Jabatan <i>Term of Position</i> | 2017 - Sekarang | 2017- Now |
| Warga Negara <i>Citizen</i> | Indonesia | Indonesia |
| Usia <i>Age</i> | 54 tahun | 54 Years old |
| Kelahiran <i>Born</i> | Pontianak, 23 Maret 1966 | Pontianak, March 23, 1966 |
| Domisili <i>Domicile</i> | Perum. Taman Kenari Blok A3 no.8, Ciluar - Bogor | Perum. Taman Kenari Blok A3 no.8, Ciluar - Bogor |
| Bergabung di Perseroan <i>Joint the Corporation</i> | 01/Maret/2017 | 01/March/2017 |
| Riwayat Pendidikan <i>Education History</i> | Sarjana Ekonomi, Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1996 | Bachelor of Economics, Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1996 |
| Pengalaman Kerja <i>History of Employment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 – sekarang: Audit Internal PT MRT Jakarta (Perseroda); • 2016 - 2017: Kepala Sub Direktorat Investigasi dan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan, BPKP; • 2014 – 2016: Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Lainnya dalam Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputy Pengawas Lembaga Pemerintah: Politik, Sosial, dan Keamanan, BPKP Jakarta; • 2013-2014: Kepala Subdirektorat Investigasi dan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan (IHKP) - Badan Usaha Milik Negara, Deputy Investigasi, BPKP Jakarta; • 2001- 2013: Deputy Investigasi, BPKP Jakarta, sebagai Auditor Senior; • 1996 - 2001: Penelitian dan Pengembangan untuk Sistem Pengendalian, BPKP; • 1987 - 1993: Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan BPKP sebagai Akuntan Junior/ Auditor. | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 – present: Internal Audit of PT MRT Jakarta (Perseroda); • 2016 – 2017: Head of Sub-Directorate of Investigation and Resolution of Development Constraints, BPKP; • 2014 – 2016: Head of Sub-Directorate of Oversight of Other Governmental Institution in Political, Social, and Security Sector, Deputy of Governmental Institution Overseer: Political, Social, and Security, BPKP Jakarta; • 2013 – 2014: Head of Sub-Directorate of Investigation and Resolution of Development Constraint (IHKP) – State-Owned Enterprises, Deputy of Investigation, BPKP Jakarta; • 2001 – 2013: Senior Auditor at Deputy of Investigation, BPKP Jakarta; • 1996 – 2001: Research and Development for Control System, BPKP; • 1987 – 1993: Junior Accountant/Editor for Representative of BPKP in West Kalimantan. |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 2018, Enterprise Risk Management Certified Professional; • 2017, Institute of Internal Auditor International Conference, Sydney; • 2016, Certified Accountant (CA); • 2013, Certified Forensic Auditor (CFrA); • 2002, Certified Fraud Examiner (CFE). | <ul style="list-style-type: none"> • 2018, Enterprise Risk Management Certified Professional; • 2017, Institute of Internal Auditor International Conference, Sydney; • 2016, Certified Accountant (CA); • 2013, Certified Forensic Auditor (CFrA); • 2002, Certified Fraud Examiner (CFE). |

Struktur Organisasi Internal Audit *Organizational Structure of Internal Audit*

Struktur organisasi Divisi *Internal Audit* ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 213 Tahun 2019. Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Internal Audit sebanyak 8 (delapan) orang.

The organizational structure of Internal Audit Division is established in accordance with the Directors' Decree No. 213 Year 2019. As of the end of 2020, there are 8 (eight) employees working on the Internal Audit Division.



Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit Per 31 Desember 2020
Number of Employees of Internal Audit Division as of December 31, 2020

| Jabatan | Jumlah Total | Position |
|--|--------------|--|
| Kepala Divisi Internal Audit | 1 | Head of Internal Audit Division |
| Auditor | 6 | Auditor |
| Petugas Kendali Dokumen dan Administrasi | 1 | Document and Administrative Control Specialist |
| Jumlah | 8 | <i>Total</i> |

Persyaratan Keahlian dan Kecermatan Profesional *Professional Skills and Accuracy Requirements*

Auditor internal pada Divisi *Internal Audit* harus memiliki kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang tugasnya, sejalan dengan syarat tuntutan tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan, dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Persyaratan jabatan Auditor pada Divisi Internal Audit tertuang dalam Peraturan Direksi No.017 Tahun 2020 tentang Pedoman *Job Description* bagi Karyawan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Internal auditors of the Internal Audit Division must have sufficient professional skills and meticulousness in their area of work, in accordance with the requirements of duties, based on educational aspects, technical skills, scope, and complexity of the duties. The requirements for the Auditor of Internal Audit Division are governed by Directors' Regulation No. 017 Year 2020 concerning Guidelines for Job Description of the Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda).

Perseroan menugaskan Tim Audit yang terdiri dari Pengawas Tim Audit, Ketua Tim Audit, serta anggota Tim Audit yang berpengalaman dan ahli, sehingga terlaksana supervisi yang baik mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Salah satu bentuk kecakapan profesional auditor internal adalah sertifikasi profesi, yang merupakan aspek penting untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah karyawan pada Divisi *Internal Audit* yang akan mengikuti program *Qualified Internal Auditor (QIA)* pada jenjang manajerial sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai jenjang terakhir sebelum mendapatkan sertifikasi QIA. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan pada Divisi *Internal Audit*.

The Corporation assigns the Audit Team, consisting of qualified and expert Supervisors of the Audit Team, Head of the Audit Team, and members of the Audit Team, in order to carry out proper supervision from the planning to audit execution, audit reporting, and monitoring of the follow-up of audit results.

Professional Certifications of Internal Audit

A form of professional skills of internal auditor is professional certification, which is an important aspect to understand the development of audit, especially related to compliance with regulations and industrial developments. As of the end of 2020, the number of employees who participated in Qualified Internal Auditor (QIA) program at the managerial level were 3 (three) employees, as the last level before obtaining QIA certification. The Corporation is committed to increase the level of professional certification for the employees of Internal audit Division by enrolling the employees in professional certification programs.

Sertifikasi Karyawan Divisi Internal Audit Per 31 Desember 2020

Certification of Employees of the Internal Audit Division as of December 31, 2020

| Jenis dan Level Sertifikasi <i>Type and Level of Certification</i> | Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit yang Memiliki Sertifikasi <i>Number of Certified Employees of the Internal Audit Division</i> | Persentase Terhadap Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit (%) <i>Percentage to the Total Employees of the Internal Audit Division</i> |
|--|---|--|
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar <i>Basic Qualified Internal Audit Certification</i> | 0 | 0 |
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Lanjutan <i>Advanced Level Qualified Internal Audit Certification</i> | 3 | 37,5 |
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Manajerial <i>Managerial Level Qualified Internal Audit Certification</i> | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 3 | 37,5 |

Piagam Audit Internal: Pedoman dan Tata Tertib

Internal Audit Charter: Guidelines and Rules

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi *Internal Audit* berpedoman pada Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal disusun untuk menjadi norma-norma acuan kerja bagi Divisi *Internal Audit* agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya.

Piagam Audit Internal telah diperbaharui pada tanggal 31 Januari 2019. Piagam Audit Internal antara lain berisi:

1. Kedudukan dan Fungsi *Internal Audit*
2. Tugas dan Tanggung Jawab *Internal Audit*
3. Wewenang *Internal Audit*
4. Lingkup Kerja *Internal Audit*
5. Hubungan Kerja dan Koordinasi
6. Persyaratan Pelaksanaan dan Pelaporan Audit
7. Kode etik

Tanggung jawab Divisi *Internal Audit*

1. Memastikan/asuransi pelaksanaan proses bisnis di unit-unit kerja telah sesuai dengan kebijakan Direksi, peraturan perundang-undangan, dan didukung akuntabilitas yang baik.
2. Memastikan asuransi pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi di setiap proses pada unit-unit kerja.
3. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik, serta penilaian kesesuaian dengan ketentuan/kebijakan peraturan Perseroan yang berlaku.
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur, serta rencana investasi Perseroan, sehubungan dengan risiko Perseroan.
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
 - a. Administrasi dan keuangan;
 - b. Operasional dan proyek;
 - c. Investasi dan belanja modal;
 - d. SDM dan organisasi;
 - e. Manajemen risiko;
 - f. Kegiatan Perseroan lainnya.
6. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala Unit Kerja di lingkungan Perseroan.
7. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti:

In carrying out their duties, the Internal Audit Division refers to the Internal Audit Charter as established by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Internal Audit Charter was compiled to become the norms of reference for the Internal Audit Division to be able to work professionally in accordance with the objectives of the assignments.

The Internal Audit Charter has been amended on January 31, 2019. The Internal Audit Charter covers:

1. *Position and Functions of Internal Audit;*
2. *Duties and Responsibilities of Internal Audit*
3. *Authorities of Internal Audit*
4. *Scope of Work of Internal Audit*
5. *Work Relationship and Coordination*
6. *Audit Implementation and Reporting Requirements*
7. *Code of Conduct.*

Responsibilities of the Internal Audit Division

1. *Ensuring/guaranteeing that the implementation of business processes in the Work Units are in accordance with the Directors' policies, prevailing laws and regulations, and supported by good accountability.*
2. *Ensuring/guaranteeing the implementation of integrated risk management at each process in Work Units.*
3. *Carrying out inspections/audits of the implementation of the internal control system and implementation of GCG, as well as assessment of compliance with the applicable Corporation regulations/policies.*
4. *Analyzing and evaluating the effectiveness of system and procedures, as well as investment plan of the Corporation in relation with the Corporation risks.*
5. *Supervising and examining activities carried out concerning:*
 - a. *Administration and Finance;*
 - b. *Operations and Projects;*
 - c. *Investment and Capital Expenditure;*
 - d. *HC and Organization;*
 - e. *Risk Management;*
 - f. *Other Corporation activities.*
6. *Testing and assessing the periodic reports of Work Units within the Corporation.*
7. *Assessing and ensuring that the activities of each Work Unit of the Corporation are carried out in accordance with the established provisions such as:*

- a. Informasi penting Perseroan terjamin keamanannya;
 - b. Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
 - c. Penyajian laporan Perseroan dan kegiatan-kegiatan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit, serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perseroan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan Perseroan dan biaya usaha.
 9. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

Wewenang Divisi *Internal Audit*

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas objek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya.
4. Bermitra dengan Komite Audit untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Internal Audit tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit, tetapi tanggung jawab *Internal Audit* adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Competency Development of Internal Audit

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawan Divisi *Internal Audit*. Selama tahun 2020, karyawan Divisi *Internal Audit* telah mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.

- a. *The safety and security of Corporation important information;*
 - b. *Functions of the Corporate Secretary in controlling information to be carried out effectively;*
 - c. *Presentation of Corporation reports and Corporate activities are in compliance with the prevailing laws and regulations.*
8. *Monitoring and evaluating the results of audit findings and submitting suggestions for improvement in the implementation of Corporation activities and systems/policies/rules that are relevant with the Corporation development and business costs.*
 9. *Carrying out special duties within the scope of internal control as assigned by the President Director.*

Authorities of the Internal Audit Division

1. *Developing, changing, and implementing internal audit policies, including determining the procedures and scopes of audit works.*
2. *Accessing all documents, records, personal and physical, information concerning the place of audit objects, obtaining data and information relating to the implementation of the duties.*
3. *Verifying and testing the reliability of information obtained, in relation with evaluating the effectiveness of the audited system.*
4. *Partnering with the Audit Committee to provide information relating to the implementation of duties.*

The Internal Audit does not have the authority to implement and responsibility for the activities being reviewed/audited, the Internal Audit bears the responsibility of assessing and analyzing the activities.

The Corporation facilitates the implementation of development programs and competency development of the employees of Internal Audit Division. In 2020, the employees of the Internal Audit Division have participated various education and/or training programs.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Divisi Internal Audit
Education and Training Programs of Internal Audit Division

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i> | Jumlah Karyawan Peserta <i>Number of Participating Employees</i> |
|---|---|---|
| Pelatihan <i>Training</i> | <i>HR for Non-HR: Leader Creates Leaders</i> | 1 |
| Pelatihan <i>Training</i> | <i>MDP "Building Innovation Culture: Being an Innovative Leader"</i> | 1 |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tahun 2020 (Tingkat Lanjutan) <i>Education and Training Program for Qualified Internal Auditor Certification 2020 (Advanced Level)</i> | 3 |
| Pelatihan <i>Training</i> | <i>Supervisory Development Program (SDP) "Managing Conflict"</i> | 5 |
| Pelatihan <i>Training</i> | <i>Creative Thinking</i> | 1 |
| Pelatihan <i>Training</i> | Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (<i>Design Build</i>) <i>Guidelines for Procurement of Construction Work Procurement Integrated with Design Build</i> | 1 |
| Seminar | <i>Workshop Towards a Socially Responsible Company: Understanding MRT Sustainability Context</i> | 1 |
| Seminar | <i>ISO 37001: Beyond Certification- Implementing Effective Anti- Bribery Controls in Organization</i> | 1 |
| Seminar | Webinar GRC Series 2020: Tantangan dan Peluang Penerapan <i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi <i>Webinar GRC Series 2020: Challenges and Opportunities in the Implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Corporate Transformation during the Era of Disruption</i> | 4 |
| Pelatihan <i>Training</i> | Meningkatkan Peran Tim <i>Procurement</i> <i>Improving the Roles of Procurement Team</i> | 1 |
| Sertifikasi <i>Certification</i> | Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko (<i>Certified Risk Management Officer</i>) <i>Training and Certification for Risk Management (Certified Risk Management Officer)</i> | 1 |
| Pelatihan <i>Training</i> | <i>Safety Officer Development (SOD) Training - Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)</i> <i>Safety Officer Development (SOD) Training - Occupational Safety and Health Management System (SMK3)</i> | 2 |
| Seminar | Auditor Jaman Now: Mengungkap Lirikan Mata di Ruang Virtual <i>Nowadays Auditor: Uncovering Glances in Virtual Spaces</i> | 1 |
| Seminar | <i>Threat Hunter : How to Find Vulnerability in Your System</i> | 1 |
| Seminar | <i>How to Monitor and Secure Your Network</i> | 1 |
| Seminar | SATU DATA INDONESIA: Menyoal Data Penerima Bansos COVID-19 Pentingnya Audit Teknologi Untuk Menguraikan Ketidak-harmonisan Data <i>SATU DATA INDONESIA: On the Data of Receivers of COVID-19 Social Assistance the Importance of Technological Audit to Untangle Data Discrepancies</i> | 1 |
| Seminar | Peran Audit Teknologi Dalam Revolusi Industri 4.0 Dan Penandatanganan MOU BPPT Dan Huawei Tentang Pengkajian Bersama Kecerdasan Artifisial dan Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia <i>Roles of Technological Audit in Industrial Revolution 4.0 and Signing of MoU between BPPT and Huawei concerning Joint Review of Artificial Intelligence and Development of Indonesian Digital Ecosystem</i> | 1 |
| Seminar | Mengontrol Akses Karyawan ke Dokumen Rahasia dalam Situasi Pandemi <i>Controlling Employee's Access to Confidential Documents during the Pandemic</i> | 1 |
| Seminar | <i>Sharing Knowledge : IT Risk Management</i> | 1 |

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2020

Brief Report of the Implementation of Duties of Internal Audit in 2020

Selama tahun 2020, Divisi Internal Audit telah melaksanakan tugas asurans dan konsultasi. Secara keseluruhan realisasi mencapai 104,55% untuk asurans dan 150% untuk konsultasi.

In 2020, the Internal Audit Division has carried out the assurance and consultation duties. The overall realization reached 104.55% for assurance and 150% for consultation.

Rencana, Realisasi dan Pencapaian Tugas Divisi Internal Audit Tahun 2020
Plan, Realization, and Achievement of Duties of the Internal Audit Division in 2020

| Asuransi Assurance | | | Konsultasi Consultation | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rencana Plan | Realisasi Realization | Pencapaian Achievement | Rencana Plan | Realisasi Realization | Pencapaian Achievement |
| 22 | 23 | 104,55% | 30 | 58 | 150% |

Selain asurans yang dilakukan secara mandiri, Divisi *Internal Audit* juga menggunakan pihak ketiga untuk melakukan asurans:

- *Post Audit* atas *Variation Order* Kontrak CP 106 untuk pembayaran sampai dengan 31 Desember 2019 pada PT MRT Jakarta oleh BPKP.
- *Post Audit* atas *Variation Order* Kontrak CP107 untuk realisasi pembayaran per 31 Desember 2019 Pekerjaan Kontrak Amandemen no 5, 6, 7 pada PT MRT Jakarta oleh BPKP.
- *Post Audit VO* atas Kontrak CON/004/MRT/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 paket CP 108 pekerjaan kereta rel listrik (*rolling stock*) pada proyek PT MRT Jakarta oleh BPKP.
- *Audit Financing Charge/Delay Payment* atas Kontrak CP 104, CP 105, CP 106, CP 107 pada PT MRT Jakarta oleh BPKP.
- *Audit Klaim terhadap financing charge/delay payment* kontrak CP 108 pada PT MRT Jakarta oleh BPKP.
- *Audit* atas Laporan Keuangan PT MRT Jakarta Tahun Buku 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.

In addition to the independent assurance, the Internal Audit Division employed a third party to carry out assurances as follows:

- *Post-Audit of Variation Order of CP106 Contract for the payment until December 31, 2019 at PT MRT Jakarta by BPKP.*
- *Post-Audit of Variation Oder of CP107 Contract for the payment realization of December 31, 2019, Contract Work Amendment No. 5, 6, 7 at PT MRT Jakarta by BPKP.*
- *Post-Audit VO of the Contract CON/004/MRT/III/2015 dated March 3, 2015 for CP108 electric railway works (rolling stock) at PT MRT Jakarta Project by BPKP.*
- *Audit on Financing Charge/Delay Payment of FP 104, CP 105, CP 106, and CP 107 Contracts at PT MRT Jakarta by BPKP.*
- *Audit on the Claim of financing charge/delay payment of CP 108 Contract at PT MRT Jakarta by BPKP.*
- *Audit of the Corporation Financial Statements for the Fiscal Year 2020 by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, and Surja.*

AUDIT EKSTERNAL

External Audit

Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Akuntan Perseroan ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Perseroan ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor Eksternal yang ditunjuk harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan.

Perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Auditor Eksternal/KAP sehingga memungkinkan KAP memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan SAK Indonesia. KAP wajib memberitahu Perseroan bila ada kejadian di Perseroan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

External Auditors/Public Accounting Firm or Corporate Accountants are appointed to conduct financial audits and provide independent and objective opinions regarding the fairness, compliance, and suitability of the Corporation's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards and the prevailing laws and regulations. Corporate Accountants are appointed by the GMS based on the candidates nominated by the Board of Commissioners. External Auditors who are appointed must be independent from the influence of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and parties with interests in the Corporation.

The Corporation is required to provide all accounting records and supporting data required to the External Auditor/Public Accounting Firm in order to enable them to give their opinions on the fairness, compliance, and suitability of the Corporation's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Public Accounting Firm is obliged to notify the Corporation if there are incidents in the Corporation that are not in accordance with the prevailing laws and regulations.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Compliance with the Indonesian Financial Accounting Standards

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The Management is responsible for the presentation of the Corporation's financial statements and complies with the Indonesian Financial Accounting Standards established by Indonesian Institute of Accounting (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

External Audit Procedures and Audit Standards

- Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi
- *Audits of the Corporation's financial statements are carried out in accordance with the Public Accountant professional standards that cover all audit procedures deemed necessary by the situations.*
- *The audits include testing and evaluation of the internal control system, as well as inspections, on the basis of testing, evidence that support the amounts and disclosures within the financial statements. The audit will also cover assessments of accounting*

yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di reviu oleh badan atau otoritas terkait.
- Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Auditor Eksternal berhubungan dengan organ di internal Perseroan.

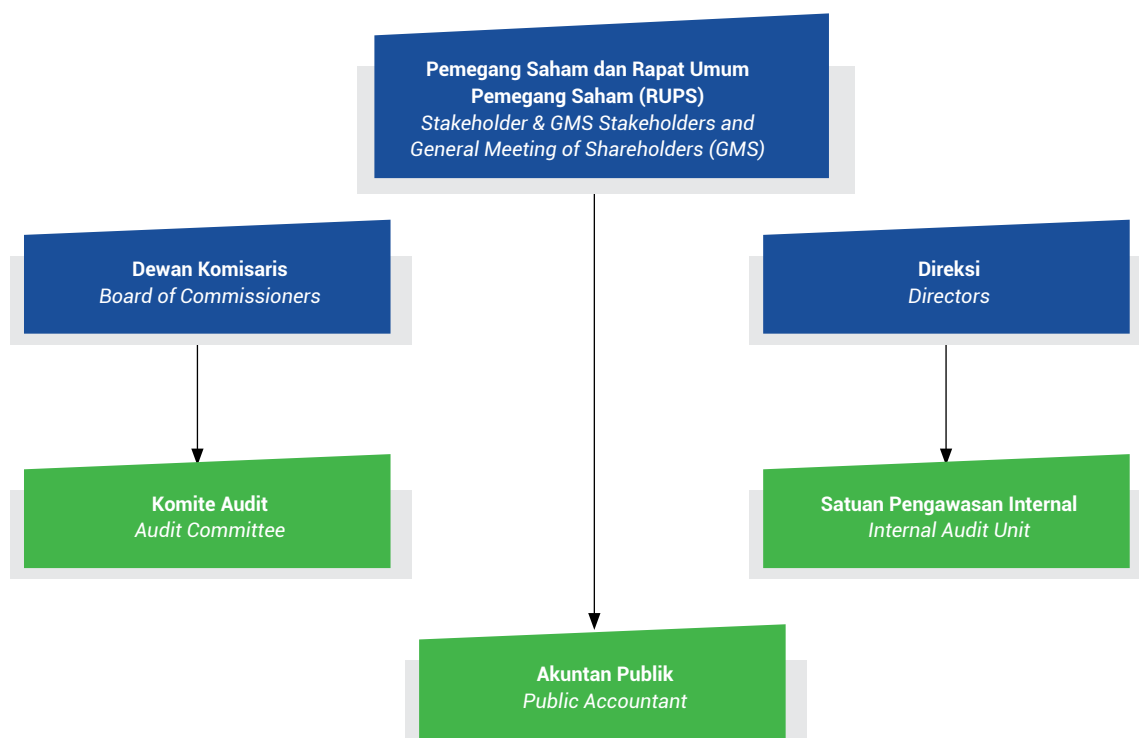
principles used and significant estimations created by the management, as well as assessment of the overall financial statement presentation as regulated by the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) established by the IAI.

- *As a part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts an interview with the management regarding management statements as stated in the financial statements.*
- *The audit carries an inherent risk that if there are material errors and irregularities, the KAP will notify the management.*
- *The Management approves the KAP examination work papers on the Corporation to be reviewed by the relevant agencies or authorities.*
- *The Audit was conducted based on the Professional Standards of Public Accountant issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountant (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, then the audit is carried out based on the State Financial Examination Standards (SPKN) issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) RI.*

In carrying out the duties and responsibilities, the External Auditors have relationship with internal organ of the Corporation.

Hubungan Auditor Eksternal dengan Organ Internal Perseroan

Relationship between the External Auditor and the Internal Organs of the Corporation



Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Mechanism to Appoint a Public Accountant

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

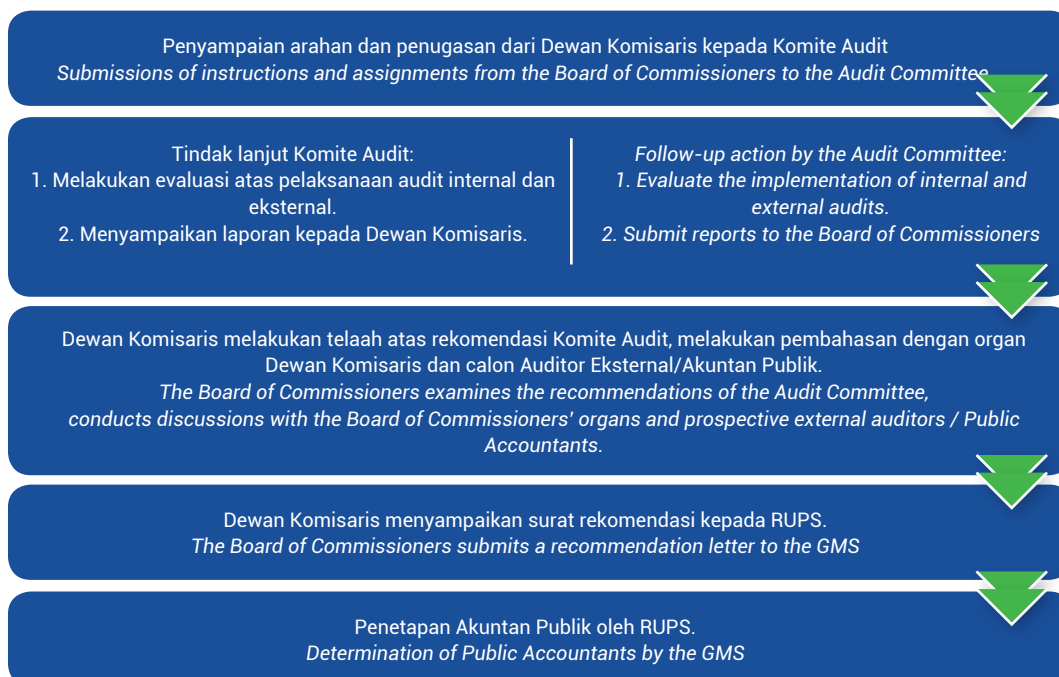
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;
- Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali Auditor Eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan;
- Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;
- Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan;
- Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
- Untuk proses penunjukan calon Auditor Eksternal dan atau penunjukan kembali Auditor Eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Stages of the mechanism for the appointment of KAP:

- The Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointing candidates of External Auditors by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions of the procurement of goods/services;
- The Board of Commissioners may reappoint an External Auditor based on the performance evaluation results of the External Auditor in auditing financial statements;
- The Board of Commissioners submits the reasons for the nomination to the GMS and the amount of the proposed fee/honorarium for the External Auditor;
- The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter which is part of the Board of Commissioners' response letter to the Corporation's annual performance;
- The Board of Commissioners evaluates the performance of the External Auditor through the Audit Committee in accordance with the applicable regulations and standards;
- As for the process of appointing a prospective external auditor and/or re-appointing an external auditor carried out by the GMS, the Board of Commissioners only have to provide the authorities to the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Public Accountant Appointment to Determination Mechanism by the GMS



Akuntan Publik Tahun 2020

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja untuk melakukan pekerjaan audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Laporan Keuangan Perseroan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mendapatkan opini wajar, dalam semua hal yang material, dan telah disampaikan kepada Direksi.

Public Accountant in 2020

The Corporation has appointed Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (KAP) to carry out general audit work on the Financial Statements of the Fiscal Year 2020. To guarantee the independence and quality of assessment results, the appointed External Auditor may not have conflicts of interest with the Corporation. The Corporation's Financial Statement for the reporting period that ended on December 31, 2020 has received the opinion of fairly, in all material respects that has been submitted to the Directors.

| Audit Eksternal Tahun Buku 2020 External Audit for Fiscal Year 2020 | | |
|--|---|------------------------|
| Kantor Akuntan Publik | KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) | Public Accounting Firm |
| No. Izin | 603/KM.1/2015 | Permit Number |
| Akuntan Publik | Damestar Hutagalung, CPA | Public Accountant |
| No. Izin | AP.1609 | Permit Number |
| Jasa | Audit atas Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. <i>Audit of the PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Corporation") Financial Statements for the year ending on December 31, 2020.</i> | Services |
| Opini | Wajar, dalam Semua Hal yang Material <i>Fairly, in All Material Respects</i> | Opinion |
| Jasa Lainnya | 1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2020. 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2020. <i>1. Assurance services for compliance with the 2020 legislation. 2. Assurance services for the report on compliance with internal control in 2020.</i> | Other Services |
| Biaya Jasa | Rp684.799.000 (termasuk PPN) <i>Rp684,799,000 (including VAT)</i> | Service Fee |

Daftar Akuntan Publik List of Public Accountants

Pemilihan Auditor Eksternal dilakukan secara profesional dan independen, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Sesuai ketentuan tersebut diatur bahwa 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) Tahun Buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Mitra) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Informasi mengenai daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik bertugas, dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan Perseroan, disampaikan dalam tabulasi berikut.

The Selection of External Auditor is carried out professionally and independently in adherence to the provisions as stated in the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accounting Firms. In accordance with the provisions, it is stipulated that 1 (one) Public Accounting Firm may only audit a maximum of 6 (six) consecutive Fiscal Year while Public Accountant (Partner) may only audit a maximum of 3 (three) consecutive Fiscal Years.

Information concerning the list of Public Accounting Firms, appointed Public Accountant, and fees involved in the audits of the Corporation's financial statements is presented in the table as follows.

Audit Eksternal Tahun Buku 2019
External Audit for Fiscal Year 2019

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Kantor Akuntan Publik | Purwanto, Sungkoro & Surja | Public Accounting Firm |
| No. Izin | 603/KM.1/2015 | Permit Number |
| Akuntan Publik | Damestar Hutagalung, CPA | Public Accountant |
| No. Izin | AP.1609 | Permit Number |
| Jasa | Audit atas Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. <i>Audit of the PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Corporation") Financial Statements for the year ending on December 31, 2019.</i> | Services |
| Opini | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> | Opinion |
| Jasa Lainnya | 1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2019. 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2019. <i>1. Assurance services for compliance with the 2019 legislation.</i> <i>2. Assurance services for the report on compliance with internal control in 2019.</i> | Other Services |
| Biaya Jasa | Rp670.000.000 (termasuk PPN) <i>IDR670,000,000 (including VAT)</i> | Service Fee |

Audit Eksternal Tahun Buku 2018
External Audit for Fiscal Year 2018

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Kantor Akuntan Publik | Purwanto, Sungkoro & Surja | Public Accounting Firm |
| No. Izin | 603/KM.1/2015 | Permit Number |
| Akuntan Publik | Drs. David Sungkoro, CPA | Public Accountant |
| No. Izin | AP.0691 | Permit Number |
| Jasa | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2018.</i> | Services |
| Opini | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> | Opinion |
| Jasa Lainnya | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> | Other Services |
| Biaya Jasa | Rp581,4 juta <i>IDR581.4 million</i> | Service Fee |

Audit Eksternal Tahun Buku 2017
External Audit for Fiscal Year 2017

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| Kantor Akuntan Publik | Purwanto, Sungkoro & Surja | Public Accounting Firm |
| No. Izin | 603/KM.1/2015 | Permit Number |
| Akuntan Publik | Drs. David Sungkoro, CPA | Public Accountant |
| No. Izin | AP.0691 | Permit Number |
| Jasa | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2017.</i> | Services |
| Opini | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> | Opinion |
| Jasa Lainnya | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> | Other Services |
| Biaya Jasa | Rp508,8 juta <i>IDR508.8 million</i> | Service Fee |

Audit Eksternal Tahun Buku 2016
External Audit for Fiscal Year 2016

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| Kantor Akuntan Publik | Purwanto, Sungkoro & Surja | Public Accounting Firm |
| No. Izin | 603/KM.1/2015 | Permit Number |
| Akuntan Publik | E. Batara Manurung, CPA | Public Accountant |
| No. Izin | AP.0693 | Permit Number |
| Jasa | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2016.</i> | Services |
| Opini | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> | Opinion |
| Jasa Lainnya | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> | Other Services |
| Biaya Jasa | Rp480 juta <i>IDR480 million</i> | Service Fee |

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direksi Perseroan telah menetapkan sebuah Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Sistem Pengendalian Internal ini mencakup lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, pengukuran risiko, rencana mitigasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta atau pemantauan.

In accordance with Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Corporations, Law No. 23 Year 2014 concerning Regional Government, and Governor's Decree of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally-Owned Enterprises (ROEs) of the Government of DKI Jakarta Province, the Board of Directors of the Corporation has established an effective Internal Control System to secure investment and Corporation assets. The Internal Control System covers the control environment, risk identification, risk measurement, risk mitigation plans, control activities, communication and information, and monitoring.

Pedoman Sistem Pengendalian Internal

Guidelines of Internal Control System

Perseroan telah menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Internal melalui Peraturan Direksi No. PER/032-1/BOD-MRT/VIII/2020 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Tujuan pembuatan dan penerapan Pedoman:

1. Menunjukkan komitmen Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. Pemahaman bagi internal Perseroan tentang kerangka dan manajemen Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

The Corporation has established 'Guidelines of Internal Control System' through Directors' Regulation No. PER/032-1/BOD-MRT/VIII/2020 concerning Guidelines of Internal Control System in PT MRT Jakarta (Perseroda). The development and implementation of the Guidelines aims to:

1. Showcase the Corporation's commitment in realising Good Corporate Governance to all Stakeholders;
2. Reach understanding of all internal parties of the Corporation concerning the framework and management of the Corporation's Internal Control System.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkup Perseroan

Implementation of Internal Control System within the Corporation

Direksi Perseroan telah merancang Sistem Pengendalian Internal dengan acuan *Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commission (COSO) Framework*. Sesuai definisi dalam COSO, pengendalian internal diartikan merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai guna menjamin pencapaian tujuan perseroan yang efektivitas dan efisiensi, dengan didukung keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan telah menyesuaikan dengan COSO Framework, melalui penerapan 5 (lima) unsur yang diperhatikan Perseroan dalam pengembangan pengendalian internal.

1. Lingkungan Pengendalian Perusahaan

Perseroan telah mengembangkan dan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui pembangunan budaya Perseroan, seperti adanya kesepakatan seluruh karyawan Perseroan akan nilai-nilai Perseroan dan aturan perilaku, serta adanya penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pen dele gasian kewenangan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan strategi Perseroan, kebijakan SDM yang berbasis kepada kompetensi, dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik secara terus menerus.

2. Penilaian Risiko

Guna menjamin adanya sadar risiko pada setiap karyawan, Perseroan telah membangun budaya risiko di setiap unsur dan proses utama. Perseroan telah menetapkan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* sebagai *leader* dalam pengembangan manajemen risiko, baik itu pada risiko level korporasi maupun unit kerja sehingga tersedia *Risk Register* di masing-masing unit kerja. *Risk Register* selalu dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

3. Aktivitas Pengendalian

Untuk menjamin bahwa seluruh proses utama Perseroan telah dilakukan secara baik, memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan dilengkapi dengan akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang baik. Perseroan telah melakukan identifikasi proses-proses yang diperlukan dalam pengelolaan, baik itu

The Board of Directors of the Corporation have designed the Internal Control System in reference to the Committee of Sponsoring Organisation of Treadway Commission (COSO) Framework. In accordance with the COSO definition, internal control is defined as a process affected by the Board of Directors, management, and other parties designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of Corporation objectives effectively and efficiently, supported by reliability of financial reporting, and compliance with the prevailing laws and regulations.

Internal Control System development at the Corporation has fulfilled the COSO Framework through the implementation of 5 (five) elements to consider in internal control development.

1. Corporate Control Environment

The Corporation has developed and created a good control environment through the development of Corporation culture, such as the agreement by all Corporation employees on Corporation values and an arrangement of organisational structure that reflects clear authority and task delegations that align with the Corporation Strategy, human capital policies based on competency, and continuous good corporate governance development.

2. Risk Assessment

To ensure risk awareness of each employee of the Corporation, the Corporation has built risk culture in every main element and process. The Corporation has appointed the Risk Management & QSSHE Assurance Division as the leader in developing risk management, both on the Corporate level and Work Unit level. The Risk Management & QSSHE Assurance Division maintain the 'Risk Register' in each Work Unit. The Risk Register is evaluated every 3 (three) months.

3. Control Activities

To ensure that all Corporate main processes have been carried out properly and fulfilled the effectiveness and efficiency elements and are equipped with good accountability, the Corporation has conducted identification processes required in managing the Corporation, both on technical divisions and supporting

pada divisi yang bersifat teknis maupun pada Divisi pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan telah dilengkapi standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dari masing-masing *Risk Register* unit kerja yang bersangkutan. Dalam penyusunan SOP untuk operasi, pemeliharaan dan perawatan MRT Jakarta, Perseroan dibantu oleh Konsultan Internasional.

4. Komunikasi dan informasi

Sebagai Perseroan yang sedang mengerjakan proyek untuk kepentingan publik, manajemen sangat menyadari pentingnya komunikasi dan informasi, khususnya komunikasi dan informasi tentang jalannya pekerjaan proyek, progres proyek dan dampaknya terhadap pelayanan publik lainnya. Fungsi komunikasi dan informasi dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Secretary*. Hal-hal yang telah dilakukan, di antaranya membangun, memantau, dan mengevaluasi situs web. Di samping itu, kegiatan lain dilakukan melalui sosialisasi kegiatan proyek, baik dengan cara tinjauan langsung kepada masyarakat sekitar jalur proyek maupun melakukan seminar dan konferensi pers.

5. Monitoring

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah berjalan dengan baik, manajemen dan unit-unit kerja terkait diwajibkan melakukan pemantauan dan perbaikan secara terus menerus atas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, *Internal Audit* secara terpisah juga melakukan pemantauan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal. Fungsi pemantauan juga dilakukan Komite Audit dan Auditor Publik.

Untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian pada setiap proses utama telah dilakukan secara baik, Auditor Internal telah melakukan pemetaan tentang proses-proses utama atas penyusunan SOP. Hasil pemetaan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan selanjutnya diserahkan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan perbaikan SOP. Selain itu, Direksi telah mengesahkan Peraturan Direksi tentang Panduan Penyusunan Pedoman, SOP, dan Instruksi Kerja, sebagai panduan dalam menyusun SOP pada proses-proses yang ada di unit kerjanya.

divisions. This is done to ensure that every management process has been equipped with standard operating procedures. The standard operating procedures established by the Board of Directors are part of the risk mitigation of each work unit's Risk Register. In formulating the operational procedures, maintenance, and care SOPs of MRT Jakarta, the Corporation is assisted by International Consultants.

4. Communication and information

As a Corporation that is currently handling a major project relating to public interests, the management is completely aware of the importance of communication and information, especially information concerning the implementation of the project, the progress of the project, and the impacts on other public services. Communication and information dissemination are coordinated by the Corporate Secretary Division and includes building, monitoring, and evaluating of the website. In addition, other activities are conducted through dissemination of project activities, either through direct visit to the community along the project route or through seminars and press conferences.

5. Monitoring

To ensure that the Internal Control System has been implemented properly, the management and relevant work units are obligated to conduct continuous monitoring and improvement of the Internal Control System implementation. In addition, the Internal Audit Division separately conducts monitoring on the implementation of Internal Control system. The monitoring function is carried out by the Audit Committee and Public Auditor as well.

To ensure that control activities on each main process have been conducted properly, the Internal Auditor has mapped the main processes that have been equipped with satisfactory and unsatisfactory SOPs. The mapping results have been communicated to the President Director, who then directed process owners to improve the existing SOPs. In addition, the Board of Directors issued a Directors' Decree concerning SOP for SOPs as guidelines for the work unit in preparing SOPs for the processes in their work units.

Pengendalian Atas Aspek Operasional dan Aspek Keuangan

Control Over Operational and Financial Aspects

Terkait aspek operasional, Divisi Internal Audit telah melakukan asurans terkait SOP pada unit kerja yang telah direncanakan pada Rencana Audit Tahunan (RAT) 2020. Total 22 kegiatan asurans, dengan realisasi kegiatan asurans hingga 31 Desember 2020 mencapai 23 kegiatan asurans atau 104,55% dari target.

Untuk pengendalian Aspek Keuangan, Divisi Internal Audit juga sudah melakukan asurans pada Divisi Keuangan dan Akuntansi, yang merupakan fungsi lapis kedua pada *3 Lines of Defense*. Asurans yang dilakukan, meliputi Kebijakan Anggaran, Kebijakan Akuntansi, dan Kebijakan Keuangan. Selain itu juga dilakukan asurans untuk SOP dan prosedur pada SOP Akuntansi, SOP Asuransi, SOP Anggaran, dan SOP Keuangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi.

Concerning operational aspects, the Internal Audit Division has ascertained assurance that the SOPs at the work units have been planned in the Annual Audit Plan (RAT) in 2020. In total, there were 22 assurance activities based on the RAT 2020, with the realisation of assurance activities as of December 31, 2020 reaching 23 assurance activities, 104.55% of the target.

As for the control over Financial Aspects, the Internal Audit Division has carried out assurance on the Finance and Accounting Division, which is a second-layer function for the finance division in the '3 Lines of Defense'. The assurance conducted covers Budget Policy, Accounting Policy, and Financial Policy. In addition, assurance was carried out for SOPs and procedures for Accounting SOPs, Insurance SOPs, Budget SOPs, and Financial SOPs of the Finance and Accounting Division.

Penilaian, Evaluasi, dan Pernyataan Pengendalian Internal

Assessment, Evaluation, and Statement of Internal Control

Untuk mengetahui kondisi terkini atas Sistem Pengendalian Internal, Perseroan melakukan penilaian terhadap 2 (dua) tingkatan pengendalian.

1. Penilaian atas Pengendalian tingkat Perseroan (*entity level*) Proses

Proses Pengendalian Internal merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis dan pengelolaan risikonya. Proses tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan pada seluruh unit kerja di Perseroan (*entity level*).

Pelaksanaan proses pengendalian internal pada unit kerja akan dievaluasi dan dinilai melalui penilaian mandiri setiap tahun. Divisi *Internal Audit* merupakan salah satu unit yang memberikan kontribusi dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian internal tingkat Perseroan sesuai dengan COSO tahun 2013. Penugasan tersebut dapat direncanakan dan tertuang dalam Rencana Audit Tahunan (RAT).

Hasil pelaksanaan penilaian mandiri, Divisi *Internal Audit* menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit atas hasil penilaian dan rekomendasi terhadap peningkatan pengendalian internal Perseroan. Selanjutnya, hasil penilaian akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

To ascertain the latest condition of the Internal Control system, the Corporation evaluates 2 (two) levels of control.

1. Assessment of Corporate-level control (*entity level*) Process

Internal Control Process is an inseparable process in every business process and its risk management. The process must be carried out by every employee in all work units of the Corporation (entity level).

The implementation of internal control processes in work units will be evaluated and assessed through annual self-assessment. The Internal Audit Division is one of the units that contribute to carry out self-assessment of the internal control at the entity level in accordance with 2013 COSO. The assignment can be planned and stated in the Annual Audit Plan (RAT).

Concerning the results of self-assessment, the Internal Audit Division submits a report to the President Director with a copy to the Audit Committee on the results of the assessments and recommendations in improving the Corporation's internal control. Then, the assessment results will be included in the Annual Report.

2. Penilaian atas Pengendalian tingkat Aktivitas

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional bersifat tanpa batas dan melekat pada semua aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang transportasi umum, maka risiko operasional merupakan prioritas utama untuk pengendalian internal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian atas kecukupan efektivitas pengendalian ("Control") pengendalian internal yang sudah ditetapkan Perseroan berdasarkan Pedoman dan Prosedur ("Compliance").

Divisi *Internal Audit* melaksanakan penilaian pengendalian internal tingkat aktivitas sesuai dengan metode *Control & Compliance Self-Assessment (CCSA)*. Setiap unit kerja (*risk owner*) melaksanakan identifikasi risiko dan aktivitas pengendalian atas proses kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara periodik. Hasil identifikasi tersebut dikoordinasikan kepada Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* dalam bentuk Daftar Risiko (*Risk Register*).

Divisi *Internal Audit* melaksanakan penilaian kecukupan kontrol dan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan aktivitas operasional yang terdapat pada Daftar Risiko. Bilamana pengendalian yang dimiliki dianggap belum memadai oleh Divisi *Internal Audit* untuk mengantisipasi risiko maka Divisi *Internal Audit* merekomendasikan pengendalian tambahan dalam rencana mitigasi risiko dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, infrastruktur, waktu, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Divisi *Internal Audit* /pihak independen lainnya, maka Direksi dapat menyatakan efektivitas Pengendalian Internal telah memadai yang didukung oleh pernyataan setiap Kepala Divisi. Dewan Komisaris dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik/ konsultan independen untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal setiap tahunnya. Biaya yang muncul atas evaluasi tersebut akan dibebankan dalam anggaran Dewan Komisaris. Laporan pihak independen akan disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Assessment of Activity-Level Control

Operational risks are the risks caused by the inadequacy and/or failure of the internal processes, human error, system failure, or external problems that affect the Corporation operations. Operational risk is unlimited and is inherent in all business and operational activities of the Corporation. Given that the Corporation operates in the public transportation sector, operational risk is a top priority for internal control. Therefore, it is necessary to assess the adequacy of the effectiveness of internal control ("Control") that has been established by the Corporation based on the Guidelines and Procedures ("Compliance").

The Internal Audit Division carries out the internal control assessment at activity level based on the method of Control & Compliance Self-Assessment (CCSA). Each work unit (risk owner) periodically carries out risk identification and control activities over the work processes according to their duties and responsibilities. The results of the identification are coordinated to the Risk Management & QSSHE Assurance in the form of Risk Register.

The internal Audit Division conducts assessment of control adequacy and compliance with the policies and procedures set for the implementation of operational activities stated in the Risk Register. If the control provided is deemed inadequate by the Internal Audit Division, to anticipate risks, the Internal Audit Division will recommend extra control in the risk mitigation plan while considering the available resources (budget, HC, infrastructure, time, etc.).

Based on the assessment results from the Internal Audit Division/other independent parties, the Board of Directors can declare whether the effectiveness of Internal Control is adequate, supported by the statements of each Division Head. The Board of Commissioners may appoint a Public Accounting Firm/Independent Consultant to evaluate the internal control system annually. The cost arising from the evaluation will be borne by the budget of the Board of Commissioners. Report from independent party will be submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

Proses dan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020

Process and Results of Internal Control System Evaluation in 2020

Untuk memastikan penerapan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif, Perseroan melakukan penilaian dan evaluasi. Proses penilaian dan evaluasi telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Tugas Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2020 No. S-226/PW09/4.2/2021 tanggal 23 Februari 2021.

To ensure the effective implementation of Internal Control System, the Corporation conducts assessments and evaluations. The assessment and evaluation process has been carried out by Representatives of BPKP for DKI Jakarta Province with the Letter of Duty for Evaluation of Internal Control System of PT MRT Jakarta (Perseroda) Year 2020 No. S-226/PW09/4.2/2021 dated February 23, 2021.

| Proses dan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020 Process and Results of Internal Control System Evaluation in 2020 | | |
|--|--|-------------------|
| Penilaian | Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta Evaluation of the Implementation of Internal Control System of PT MRT Jakarta | Assessment type |
| Penilai | BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Representatives of BPKP for DKI Jakarta Province | Assessor |
| Periode Evaluasi | 2020 | Evaluation period |
| Waktu Pengukuran | Februari- Maret 2021 February-March 2021 | Measurement time |

Ruang lingkup evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Perseroan, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Dari kelima komponen tersebut, evaluasi menggunakan 17 prinsip dan 80 atribut.

The scope of evaluation covers all aspects that support the implementation of internal control system at the Corporation, i.e., Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. From the 5 (five) components, the evaluation employed 17 principles and 80 attributes.

Hasil Evaluasi Evaluation Result

| Komponen | Bobot Weight (%) | Prinsip Principle | Atribut Attribute | Component |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Lingkungan Pengendalian | 25 | 5 | 20 | Control Environment |
| Penilaian Risiko | 25 | 4 | 20 | Risk Assessment |
| Aktivitas Pengendalian | 20 | 3 | 16 | Control Activities |
| Informasi dan Komunikasi | 17,5 | 3 | 14 | Information & Communications |
| Pemantauan | 12,5 | 2 | 10 | Monitoring |
| Jumlah | 100 | 17 | 80 | Total |

Rentang Skor dan Tingkat Efektivitas
Range of Scores and Effectiveness Levels

| Skor | Tingkat Efektivitas <i>Effectiveness Levels</i> | Score |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Skor ≤ 50 (Tidak Efektif) | Pengendalian internal masih sederhana. <i>Internal control is still simple.</i> | Score ≤ 50 (Not Effective) |
| 50 < Skor ≤ 60 (Kurang Efektif) | Pengendalian internal belum terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi. <i>Internal control is not integrated and has not been adjusted to organisational changes that occur.</i> | 60 < Score ≤ 75 (Less effective) |
| 60 < Skor ≤ 75 (Cukup Efektif) | Pengendalian internal belum sepenuhnya terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi. <i>Internal control is not fully integrated and has not been adjusted to organisational changes that occur.</i> | 60 < Score ≤ 75 (Effective enough) |
| 75 < Skor ≤ 85 (Efektif) | Pengendalian internal telah terintegrasi namun belum memungkinkan dilakukan perubahan secara cepat mengikuti tuntutan perubahan organisasi dan operasional. <i>Internal control has been integrated but does not allow changes to be made quickly following the demands of organisational and operational changes.</i> | 75 < Score ≤ 85 (Effective) |
| Nilai di atas 85 (Sangat Efektif) | Pengendalian internal telah terintegrasi dan memungkinkan dilakukan perubahan dengan cepat sesuai tuntutan perubahan organisasi dan operasional. <i>Internal control has been integrated and allows changes to be made quickly according to the demands of organisational and operational changes.</i> | Value above 85 (Very effective) |

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Perseroan untuk tahun 2020 menunjukkan capaian 81,81. Dengan demikian tingkat efektivitas sistem pengendalian internal berada pada tingkatan "Efektif".

Based on the evaluation, the results show that the Corporation Internal Control System in 2020 indicates an achievement of 81.81. Therefore, the effectiveness level of the Internal Control System is at the level of "Effective".

Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020
Evaluation Results of Internal Control System Implementation in 2020

| No | Komponen <i>Components</i> | Bobot <i>Weight</i> | Skor <i>Score</i> | Capaian <i>Achievement</i> (%) | Atribut <i>Attribute</i> |
|----|--|------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Lingkungan Pengendalian <i>Control Environment</i> | 25,00 | 20,30 | 81,2 | 5 |
| 2 | Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i> | 25,00 | 20,23 | 80,9 | 4 |
| 3 | Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i> | 20,00 | 16,93 | 84,7 | 3 |
| 4 | Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communication</i> | 17,50 | 14,22 | 81,3 | 3 |
| 5 | Pemantauan <i>Monitoring</i> | 12,50 | 10,13 | 81 | 2 |
| 6 | Hasil Akhir <i>Final Score</i> | 100,00 | 81,81 | 81,8 | 17 |

Pelaksanaan evaluasi berlangsung dari tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021, sehingga belum ada hasil yang dapat ditindaklanjuti oleh Perseroan.

The evaluation was executed on February 24, 2020 to March 19, 2021, therefore the results of the evaluation has yet to be followed up by the Corporation.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Sebagai entitas usaha di bidang penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan, Perseroan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan risiko yang timbul dalam melaksanakan proses usahanya. Oleh sebab itu, Perseroan perlu menerapkan Manajemen Risiko, yang merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan penerapan Manajemen Risiko, diharapkan potensi kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila memungkinkan pemanfaatan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan Perseroan.

Sejak Tahun 2014, Perseroan telah menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan secara terstruktur. Perseroan terus berupaya maksimal melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran dan strategi dengan prinsip Manajemen Risiko Perusahaan yang bersifat melindungi, menciptakan nilai, transparan dan inklusif.

Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu sesuai kondisi internal dan eksternal Perseroan. Manajemen Risiko tak hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata, tetapi juga dapat menjadi alat strategi utama dalam menentukan perencanaan strategis Perseroan.

Sistem Manajemen Risiko Korporasi MRT Jakarta dibangun dan dikembangkan berdasarkan ISO 31000 yang telah diterapkan sejak akhir tahun 2014. Dalam perjalanan pengembangan dan implementasi Pengelolaan Risiko Korporasi, tahun 2020 merupakan tahun kelima sebagai suatu sistem dibangun dan dikembangkan. Beberapa kemajuan dan prestasi yang berhasil diwujudkan pada tahun 2020 pada aspek Manajemen Risiko Korporasi ini, di antaranya:

1. Capaian Tingkat Kesesuaian Sistem Manajemen Risiko (*Risk Conformity*) sebesar 85,41;
2. Capaian skor Budaya Risiko (*Risk Culture*) sebesar 7,59;
3. Capaian Tingkat Kematangan Pengelolaan Risiko (*Risk Maturity*) sebesar 3,73;

As a business entity that carries out business activities regarding urban railway infrastructure, the Corporation always faces potential risks that arise in the process of conducting its business. Therefore, the Corporation is required to implement Risk Management as coordinated efforts to direct and control the Corporation in facing risks related to its business activities. By implementing Risk Management, it is expected that the loss potential can be made as low as possible, or, if possible, capitalise on risk to create opportunities to increase the profit of the Corporation.

Since 2014, the Corporation has implemented and developed a structured Corporate Risk Management System. The Corporation exerts maximum effort in the implementation of Risk Management in accordance with the foundation of thoughts as stated in the Corporate Long-Term Plan (RJPP) based on the values, targets, and strategies with Corporate Risk Management principles that are protective, value-adding, transparent, and inclusive.

Risk Management is an integral part of business and decision-making processes that are systematic, structured, and timely based on the internal and external conditions of the Corporation. Risk Management is not only a measuring tool of daily operational performance, but also a key tool in determining the strategic planning of the Corporation.

The Risk Management System of the Corporation is established and developed in accordance with ISO 31000 that has been implemented starting 2014. In the journey of Corporate Risk Management development and implementation, 2020 was the fifth year of system development and implementation. Various improvements and achievements reached in 2020 in terms of Corporate Risk Management include:

1. *Achievement of Risk Management System Conformity Rate (Risk Conformity) of 85.41;*
2. *Achievement of Risk Culture of 7.59;*
3. *Achievement of Risk Management Maturity Rate (Risk Maturity) of 3.73;*

4. Terselesaikan dan tersertifikasinya implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dikembangkan dengan berbasis pada ISO 37001:2016;
5. Keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO Terintegrasi, meliputi ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu;
6. Menjaga keberlangsungan Korporasi melalui penerapan Manajemen Keberlangsungan Usaha (*Business Continuity Management*).

Atas capaian – capaian tersebut, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* turut berkontribusi dalam capaian KPI Korporasi maupun Penghargaan yang diraih dalam *Top GRC*, dimana PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapat kategori Bintang 4 dan juga Penghargaan sebagai *Trusted Company* dalam penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) di tahun 2020. Adapun pencapaian prestasi – prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa komponen penting dalam implementasi Manajemen Risiko Korporasi, meliputi:

1. Strategi pengeloaan risiko (*risk strategy*);
2. Selera risiko dan toleransi risiko (*risk appetite & risk tolerance*);
3. Profil Risiko (*risk profile*);
4. Tata kelola manajemen risiko (*governance structure*);
5. Kebijakan manajemen risiko (*risk policy*);
6. *Monitoring* dan pelaporan risiko korporasi (*risk monitoring & reporting*);
7. Permodelan dan analisis risiko (*risk modeling and analysis*);
8. Teknologi pengelolaan risiko (*risk technology*);
9. Budaya risiko (*risk culture*).

Kesembilan komponen pengelolaan Risiko tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan adanya Kepemimpinan Risiko (*Risk Leadership*) yang baik. Sebagai suatu sistem yang penerapannya menggunakan pendekatan dari level manajemen atas ke bawah atau biasa disebut dengan istilah *top down*, sangatlah penting komitmen dan dukungan manajemen puncak, yaitu Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko korporasi yang dikenal sebagai *Tone at the Top*.

4. *Completion and certification of the implementation of Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016;*
5. *Maintenance of Integrated ISO certification, including ISO 45001:2018 Occupational Safety and Health Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System, and ISO 9001:2015 Quality Management System;*
6. *Maintenance of Corporate continuity through Business Continuity Management.*

The Risk Management & QSSHE Assurance Division contributes to the achievements of Corporation KPIs and Awards received during the TOP GRC. In 2020, the Corporation received the Four Stars categorisation and was Awarded the title of 'Trusted Company' in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) assessment in 2020. Such achievements were due in part to various important components in Corporate Risk Management implementation, covering:

1. *Risk strategy;*
2. *Risk appetite & risk tolerance;*
3. *Risk profile;*
4. *Risk Management Governance structure;*
5. *Risk policy;*
6. *Risk monitoring and reporting;*
7. *Risk modeling and analysis;*
8. *Risk technology;*
9. *Risk culture.*

The nine components of Risk Management can be implemented well due to good Risk Leadership. In a system whose implementation employs a top-down approach, the commitment and support of top management, i.e., the Board of Directors and the Board of Commissioners is crucial to implement Corporate Risk Management, also known as 'Tone at the Top'.

Latar Belakang dan Tujuan Penerapan Manajemen Risiko Perseroan

Background and Objectives of the Implementation of Corporate Risk Management

Manajemen Risiko menjadi salah satu pilar penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perseroan. Sejalan dengan perkembangan operasi dan usaha, Perseroan telah menetapkan Rencana Bisnis yang berisi Visi, Misi, Tujuan Strategis Perseroan, Model Bisnis, dan Risiko-risiko Strategis Korporasi melalui mekanisme keputusan RUPS LB. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pengelolaan manajemen risiko perlu dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan strategis Perseroan.

Tujuan dari pengelolaan risiko di Perseroan:

- Melindungi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan, serta mendorong manajemen untuk bertindak pro-aktif terhadap pengelolaan risiko dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja Perseroan;
- Membangun kesadaran bertindak hati-hati dan kemampuan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terintegrasi;
- Meningkatkan kinerja Perseroan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

Risk Management is one of the pillars of the implementation of GCG at the Corporation. In line with the operational and business development, the Corporation has established its Business Plan consisting of the Vision, Missions, Corporate Strategic Objectives, Business Model, and Corporate Strategic Risks through the mechanism of Extraordinary GMS Resolution. The logical consequences include that the risk management must be carried out professionally in order to achieve the strategic objectives of the Corporation.

Objectives of risk management in the Corporation:

- *Protecting from significant risks that can hinder the achievement of the Corporation objectives and encouraging the management to act proactively towards risk management and make it as a source of competitive advantages and Corporation performance;*
- *Building awareness of mindful actions and risk management competency according to the positions and responsibilities of each employees as a part of integrated risk management;*
- *Improving the Corporation performance by providing risk level information as outlined in the risk map, which is useful for management in developing strategies and improving the risk management process continuously and sustainably.*

Peta Jalan Manajemen Risiko Perseroan

Roadmap of the Corporate Risk Management

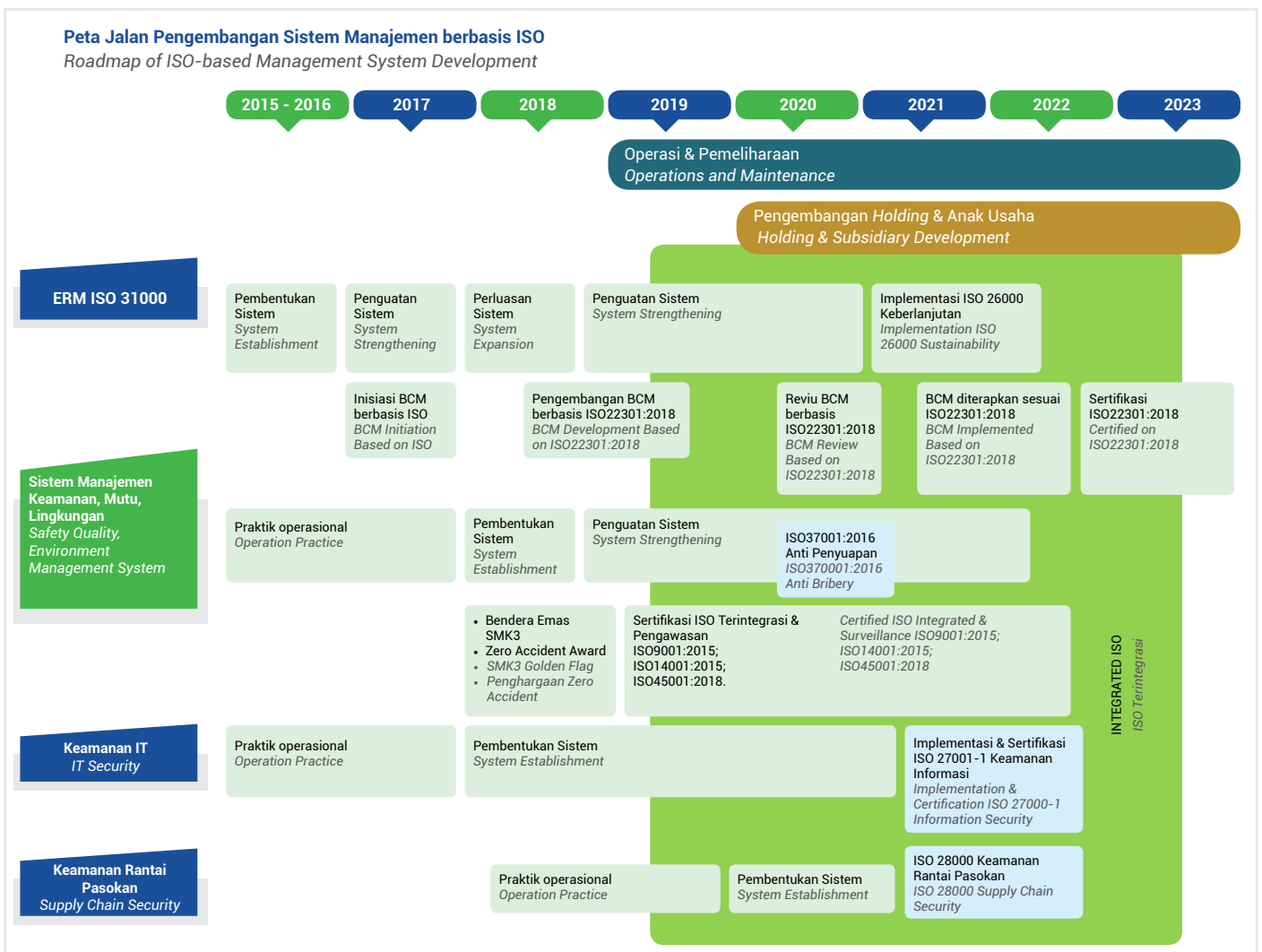
Manajemen Risiko mulai diterapkan di Perseroan pada tahun 2011, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 42 Tahun 2009 tentang Penetapan Satuan Tugas Manajemen Risiko Perseroan, dan Surat Keputusan Direksi No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko (Satgas MR) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Pada tahun 2011 Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk Tim Ad-Hoc, dan digantikan Divisi *Risk Management* pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Risk Management began to be implemented in the Corporation in 2011, as stipulated in the Directors' Decree No. 42 Year 2009 concerning the Establishment of the Corporation's Risk Management Task Force, and Directors' Decree No. 33 Year 2011 concerning the Establishment of the Risk Management Task Force (Satgas MR) in PT MRT Jakarta (Perseroda). In 2011, the Corporation implemented risk management in the form of the Ad-Hoc Team, replaced by the Risk Management Division in 2014 through Directors' Decree No. 29 Year 2014 dated March 20, 2014 concerning Changes in the Organisational Structure of PT MRT Jakarta (Perseroda).

Tahun 2018 Divisi *Risk Management* mengalami perubahan menjadi Divisi Risk, Quality and Safety Management melalui Surat Keputusan Direksi No. 001 tahun 2018. Pada Tahun 2019, melalui Surat Keputusan Direksi No. 213 Divisi Risk, Quality and Safety Management berubah menjadi Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*. Seiring dibentuknya Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*, Perseroan menyusun Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2022. Peta Jalan ini diperbarui setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan internal maupun eksternal Perseroan.

In 2018, the Risk Management Division underwent a change to become Risk, Quality, and Safety Management Division through Directors' Decree No. 001 Year 2018. Then, in 2019, through Directors' Decree No. 213, the Risk, Quality, and Safety Management Division was changed to be Risk Management & QSSHE Assurance Division. With the establishment of the Risk Management & QSSHE Assurance Division, the Corporation designed the Roadmap of Risk Management Development from 2008 until 2022. The roadmap is updated annually to adjust to the internal and external development of the Corporation.

Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko PT MRT Jakarta (Perseroda)
Road Map of The Risk Management Development of PT MRT Jakarta (Perseroda)



Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan

Corporate Risk Management Policy

Prinsip dan kebijakan Manajemen Risiko merupakan aturan dasar bagi pengembangan kebijakan kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan manajemen risiko. Adapun Komitmen Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

- Manajemen Risiko dilakukan dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Bisnis berdasarkan pada tata nilai, sasaran, dan strategi dengan prinsip manajemen risiko Perseroan yang bersifat melindungi, menciptakan nilai, transparan, dan inklusif;
- Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perseroan;
- Manajemen Risiko adalah alat strategi utama dalam penentuan perencanaan strategis Perseroan, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata.
- Manajemen Risiko dimulai dari integritas Direksi, dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan seluruh aspek risiko yang terdapat dalam Perseroan, sehingga manajemen anti kecurangan menjadi hal yang wajib dilakukan, khusus untuk risiko yang berhubungan dengan integritas, Direksi tidak memberikan toleransi;
- Manajemen Risiko menjamin seluruh laporan yang menyajikan pengukuran kinerja Perseroan, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga terhindar dari potensi kecurangan;
- Manajemen Risiko mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja bagi Karyawan yang merupakan aset utama yang dimiliki oleh Perseroan;
- Manajemen Risiko ditujukan untuk menjaga Perseroan tidak berseberangan dengan hukum dan segala bentuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Manajemen Risiko menjamin diterapkannya proses penghargaan dan konsekuensi terhadap segenap Karyawan tanpa terkecuali;
- Manajemen Risiko dikembangkan sebagai suatu sistem yang dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan perkembangan Perseroan dan menjadi fasilitas untuk mendeteksi terjadinya perubahan serta proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi;
- Manajemen Risiko merupakan sistem yang mendukung perbaikan dan peningkatan Perseroan secara berkelanjutan;

The principles and policies of Risk Management are the basic rules for developing risk management work policies as pillars for the implementation of risk management. The Corporate Risk Management Commitments are as follows:

- *Risk Management is carried out with the foundation of thoughts as stated in the Business Plan based on the values, objectives, and strategies with principles of corporate risk management that are protective, value-adding, transparent, and inclusive;*
- *Risk Management is an integral part of the business and decision-making processes that are carried out in a systematic, structured, and timely manner based on the available information that is adjusted to the internal and external conditions of the Corporation;*
- *Risk Management is the key strategic tool in determining the Corporation's strategic planning and not merely a tool to measure daily operational performance;*
- *Risk Management starts with the integrity of the Board of Directors, carried out with the principles of effectiveness and efficiency by taking into account risk aspects within the Corporation, so that anti-fraud management is imperative to implement. Meanwhile, for risks concerning integrity, the Board of Directors apply zero tolerance.*
- *Risk Management guarantees that all reports that present the measurement of the Corporation performance are carried out carefully so as to avoid potential frauds;*
- *Risk Management prioritises occupational safety and health factors for Employees who are the main assets of the Corporation.*
- *Risk Management is intended to keep the Corporation from conflicting with the law and all forms of the prevailing laws and regulations;*
- *Risk Management guarantees the implementation of the reward and punishment process for all employees without exception;*
- *Risk Management is developed as a dynamic, repetitive, and responsive system to changes in the Corporation development and as a facility to detect changes and the process to adjust to the changes;*
- *Risk Management is a system that supports continuous improvement of the Corporation;*

- Manajemen Risiko harus menjadi bagian sistem budaya Perseroan, sebagai landasan dalam mewujudkan cita-cita menjadi Perseroan terkemuka di Indonesia dan sasaran Perseroan tercapai.

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko di lingkup Perseroan didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang efektif menurut ISO 31000:2018, yaitu:

1. **Penciptaan dan Perlindungan Nilai**
Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang dinyatakan dalam objektif korporasi.
2. **Terintegrasi**
Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam korporasi.
3. **Terstruktur dan Komprehensif**
Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang sebanding dan konsisten.
4. **Disesuaikan**
Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan diatur secara berimbang sesuai dengan konteks internal dan eksternal korporasi yang terkait dengan tujuannya.
5. **Inklusif**
Pertimbangan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk memperoleh pengetahuan, pandangan, dan persepsi dalam menentukan kriteria risiko. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan pengelolaan risiko yang diinformasikan.
6. **Dinamis**
Risiko bisa muncul, berubah atau menghilang ketika konteks internal dan eksternal korporasi berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan atas kejadian tersebut dengan cara yang tepat dan tepat waktu.
7. **Informasi Terbaik yang Tersedia**
Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai, seperti data historis, pengalaman Perseroan, umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, dan penilaian ahli sehingga para pengambil keputusan dapat meyakini bahwa keputusannya telah memperhitungkan semua informasi yang tersedia pada waktu keputusan tersebut dibuat.
8. **Faktor Manusia dan Budaya**
Pengelolaan risiko seharusnya memperhitungkan faktor manusia dan budaya karena mempengaruhi secara signifikan secara aspek manajemen risiko di setiap level dan tahap.
9. **Perbaikan Berkelanjutan**
Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

- *Risk Management must be a part of the Corporate culture, as a foundation in realising the goal of becoming a leading Corporation in Indonesia and achieving Corporate objectives.*

Guidelines of Risk Management Policy in the Corporation are based on the principles of effective risk management according to ISO 31000:2018 as follows:

1. **Value Creation and Protection**
Risk management creates and protects the value stated in the Corporate objectives;
2. **Integration**
Risk management is an integrated part of the whole process in the Corporation.
3. **Structured and Comprehensive**
A structured and comprehensive approach to risk management contributes to comparable and consistent results;
4. **Customisation**
The risk management framework and processes are adjusted and regulated in a balanced manner in accordance with the internal and external contexts of the Corporation in relation to its objectives;
5. **Inclusivity**
Consideration of the involvements of stakeholders to obtain knowledge, views, and perceptions in determining risk criteria. This results in increased informed risk awareness and management;
6. **Dynamicity**
Risks can appear, change, or disappear when the internal and external contexts of the Corporation change. Risk management anticipates, detects, recognises, and responds to changes in an appropriate and timely manner;
7. **Best Available Information**
Risk management requires adequate information availability such as historical data, Corporation experience, stakeholders' feedback, observation, and expert assessments so that decision-makers can be sure that their decisions have taken in to account all the available information at the time the decision was made;
8. **Human and Cultural Factors**
Risk management should consider the human and cultural factors because they significantly influence the aspects of risk management at all levels and stages;
9. **Continuous Improvement**
Risk management continues to be improved through learnings and experience.

Pada tahun 2020, PT MRT Jakarta (Persero) telah memperbaharui Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi No.PER/018/BOD-MRT/VII/2020. Penyesuaian Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Perubahan struktur organisasi Korporasi;
2. Perubahan kondisi lingkungan internal Korporasi, dimana telah diterapkannya Sistem Manajemen Terintegrasi yang telah berhasil mencapai sertifikasi di tahun 2019 serta implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2020;
3. Keberlangsungan Usaha ditengah situasi Pandemi.

Kebijakan Manajemen Risiko disusun berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Setiap Pemilik Proses di dalam lingkungan Perseroan mempunyai kewajiban menerapkan manajemen risiko yang terkait dengan aktivitas usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan mendokumentasikan seluruh aktivitas manajemen risiko di unit kerjanya;
2. Pemimpin Pemilik Proses bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di unit kerjanya sebagaimana mestinya;
3. Manajemen Risiko diterapkan untuk seluruh aktivitas dan kepentingan Perseroan, antara lain:
 - a. Aktivitas Konstruksi;
 - b. Aktivitas Operasi; dan
 - c. Aktivitas Pengembangan Usaha.
4. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Pengawasan aktif pemimpin tertinggi di tiap Pemilik Proses;
 - b. Adanya kebijakan, prosedur, dan penetapan batasan risiko yang memadai;
 - c. Penetapan toleransi risiko yang sejalan dengan rencana strategis, pengelolaan, penganggaran risiko, dan kemampuan manajemen Perseroan dalam mengelola portofolio bisnis;
 - d. Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif dan penyediaan data yang terintegrasi;
 - e. Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja dilakukan;
 - f. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
 - g. Keseluruhan proses bisnis Perseroan; dan
 - h. Peningkatan pengetahuan mengenai manajemen risiko khususnya pada tingkat Manajemen.

In 2020, the Corporation amended the Risk Management Policy and Guidelines through Directors' Regulation No. Per/018/BOD-MRT/VII/2020. The adjustment to the Risk Management Policy and Guidelines was carried out by considering:

1. *Changes in Corporate organisation structure;*
2. *Changes of internal environment conditions of the Corporation, with the implementation of the Integrated Management System, certified in 2019, and implementation of the Anti-Bribery Management System in 2020;*
3. *Business Continuity amidst the Pandemic.*

The Risk Management Policy is prepared based on the following aspects:

1. *Each Process Owner within the Corporation has an obligation to implement risk management concerning business activities that are their responsibility and document all risk management activities at their work unit;*
2. *The Process Owner is responsible for implementing risk management in the work unit properly;*
3. *Risk Management is applied to all activities and interests of the Corporation, including:*
 - a. *Construction Activities;*
 - b. *Operational Activities; and*
 - c. *Business Development Activities.*
4. *The application of risk management should at least include:*
 - a. *Active supervision of the highest leader in each Process Owner;*
 - b. *Availability of policies, procedures, and determination of adequate risk limits;*
 - c. *Determination of risk tolerance that is in line with the strategic plan, management, risk budgeting, and the ability of the Corporation's management to manage business portfolio;*
 - d. *Availability of risk identification, measurement, monitoring, and control process as well as comprehensive risk management information system and integrated data provision;*
 - e. *Adequate procedures and requirements for evaluating and approving new business activities and changes to the implemented system and work procedures;*
 - f. *A comprehensive internal control system - the entirety of the Corporate business process;*
 - g. *The entirety of the Corporation business process; and*
 - h. *Increased knowledge concerning risk management, especially at the Management level.*

Proses manajemen risiko sendiri merupakan implementasi dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk mempermudah integrasi penerapan pengelolaan risiko baik di tingkat korporasi, unit kerja, dan individu. Perseroan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh tingkatan korporasi. Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan membantu pengelolaan risiko yang efektif dan memastikan informasi risiko yang lengkap dan memadai tersedia untuk digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan Perseroan.

Untuk memperkuat Tata Kelola Manajemen Risiko Korporasi di tahun 2020, penyesuaian pada struktur Komite Manajemen Risiko (KMR) pada level Direksi dan Kepala Divisi dilakukan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/012/BOD-MRT/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020. Pada tingkat Dewan Komisaris, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab serta keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No. 008/BOC-MRT/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Di tingkat unit kerja, PT MRT Jakarta (Perseroda) menugaskan minimal 1 (satu) orang Risk Officers untuk memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko di setiap unit kerja. Dalam penunjukan Risk Officers, Perseroan telah menetapkan standar kompetensi personel yang tertuang dalam Peraturan Direksi No. PER/046/BOD-MRT/IX/2019 tentang Kriteria Persyaratan dan Tugas Risk Officer di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Penjelasan lebih lanjut mengenai Risk Officer akan disampaikan pada bagian Pengembangan Budaya Risiko.

Sebagai bentuk penguatan proses Manajemen Risiko, PT MRT Jakarta (Perseroda) menggunakan pendekatan menugaskan 1 (satu) orang Risk Officers minimal pada tiap Unit Pengelola Risiko untuk melakukan pengaturan mengenai hal ini termasuk standar kompetensi yang harus dipenuhi tertuang dalam Peraturan Direksi No. PER/046/BOD-MRT/IX/2019 tentang Kriteria Persyaratan dan Tugas Risk Officer di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Penjelasan lebih lanjut mengenai Risk Officer akan disampaikan pada bagian Pengembangan Budaya Risiko.

Meanwhile, the risk management process itself is an explanation of the Risk Management Framework to facilitate the integration of the risk management implementation at Corporate level, work unit level, or individual level. The Corporation established a risk management framework that forms the basis for implementing all risk management activities at all level of the Corporation. The Corporate Risk Management Framework helps the Corporation to manage risk effectively and will ensure that complete and adequate risk information is obtained from the risk management process to be used as a basis for decision-making.

To strengthen Corporate Risk Governance in 2020, adjustment was made to the structure of the Risk Management Committee at the Board of Directors level and Division Head level and it was ratified as the Directors' Decree No. SK/012/BOD-MRT/II/2020 dated February 28, 2020. At the Board of Commissioners level, the Detail of Duties and Responsibilities and Membership of Risk & Security Monitoring Committee is ratified as Commissioners' Decree No. 008/BOC-MRT/X/2020 dated October 21, 2020. At the work unit level, the Corporation assigns at least 1 (one) Risk Officer to facilitate risk management implementation in each work unit. In the appointment of Risk Officers, the Corporation has determined the personnel competency standards as stated in the Directors' Regulation No. PER/046/BOD-MRT/IX/2019 concerning the Requirements and Duties of Risk Officers at PT MRT Jakarta (Perseroda). Further information concerning Risk Officers is presented in the Risk Culture Development section.

To strengthen the Risk Management process, the Corporation assigns at least 1 (one) Risk Officer at each Risk Management Unit to establish the regulations including competency standards to be fulfilled as stated in the Directors' Regulation No. PER/046/BOD-MRT/IX/2019 concerning the Requirements and Duties of Risk Officers at PT MRT Jakarta (Perseroda). Further information concerning Risk Officers is presented in the Risk Culture Development section.

Di tahun 2020, Perseroan juga memperkuat implementasi *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016 melalui penetapan Kebijakan dan Pedoman SMAP dalam Peraturan Direksi No. PER/019/BOD-MRT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan perubahannya dalam Peraturan Direksi No. PER/035/BOD-MRT/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Dalam implementasinya, pelaksanaan SMAP dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 dan ISO Terintegrasi (ISO 9001-14001-45001) melalui:

1. Penetapan *Zero Tolerance* sebagai salah satu Objective Target Programs (OTP) seluruh unit kerja Perseroan.
2. Analisa risiko penyuapan dalam *Business Risk Assessment (BRA)* yang dilakukan pada semua proses bisnis oleh seluruh unit kerja Perseroan.
3. Pelaksanaan Uji Kelayakan untuk aktivitas yang melibatkan atau mengadakan pihak eksternal Perseroan, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, pengadaan vendor, dan perekrutan karyawan baru serta mutasi/promosi karyawan.
4. Penunjukan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) di tingkat Kepala Divisi fungsi *Governance, Risk and Compliance (GRC)*.
5. Pembangunan Infrastruktur Pelaporan Penyuapan berupa *Whistle Blowing System (WBS)* yang dikelola oleh pihak independen dan prosedur tindak lanjut laporan penyuapan di dalam Perseroan.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, Perseroan telah menyusun beberapa prosedur:

1. Prosedur Penentuan Konteks Risiko Perseroan (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
2. Prosedur Penilaian Risiko (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
3. Prosedur Pelaporan Periodik Risiko (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
4. Prosedur Penentuan Risiko Kritis Perseroan (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
5. Prosedur Kajian Risiko Insidental (PER/018/BOD-MRT/VII/2020).

In 2020, the Corporation strengthens Governance, Risk, and Compliance (GRC) implementation by implementing Anti-Bribery Management System (SMAP) based on the standards ISO 37001:2016 through the enactment of Anti-Bribery Management System Policy and Guidelines as Directors' Regulation No. PER/019/BOD-MRT/VII/2020 dated July 10, 2020, and the amendment as Directors' Regulation No. PER/035/BOD-MRT/IX/2020 dated September 31, 2020. The implementation of the Anti-Bribery Management System is carried out in integration with risk management based on ISO 31000:2018 and Integrated ISO (ISO 9001-14001-45001) through:

1. Establishment of 'Zero Tolerance' as an Objective Target Programmes (OTP) of all work units of the Corporation.
2. Bribery risk analysis in the Business Risk Assessment (BRA) that is carried out in all business processes of all work units of the Corporation.
3. Implementation of the Stress Test for activities that involves or procures external parties, including collaboration with a third party, vendor procurement, and recruitment of new employees as well as employee transfer/promotion.
4. Appointment of Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) at the Division Head Level of *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* function.
5. Development of Bribery Reporting Infrastructure as part of the Whistleblowing System (WBS) managed by an independent party as well as follow-up procedures of the reports for the Corporation.

To support Risk Management implementation, the Corporation has established several procedures:

1. Procedures to Determine Corporate Risk Context (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
2. Risk Assessment Procedures (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
3. Risk Periodical Reporting Procedures (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
4. Procedures to Determine Corporate Critical Risk (PER/018/BOD-MRT/VII/2020);
5. Incidental Risk Study Procedures (PER/018/BOD-MRT/VII/2020).

Implementasi Manajemen Keberlangsungan Usaha Perseroan *Implementation of Business Continuity Management of the Corporation*

Penerapan Manajemen Keberlangsungan Usaha merupakan salah satu upaya untuk melindungi nilai Perseroan dan dilekatkan sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Korporasi. Keberadaan Manajemen Keberlangsungan Usaha didasari Peta Jalan Manajemen Risiko yang disusun melalui penilaian risiko dan ancaman, dan disiapkan prosedur tanggap, pemulihan, dan restorasi apabila terjadi insiden. Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Usaha di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor PER/042/BOD-MRT/VIII/2019 yang menetapkan implementasi BCM sesuai Kebijakan dan Pedoman sebagai berikut:

- Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Usaha (BCM);
- Pedoman Rencana Tanggap Darurat (ERP);
- Pedoman Rencana Manajemen Krisis (CMP);
- Pedoman Rencana Kesiambungan Bisnis (BCP);
- Pedoman Rencana Pemulihan Bencana (DRP).

Selama periode pelaporan, Perseroan telah mengaktifkan Tim Manajemen Krisis (CMT) tepatnya 4 Maret 2020, untuk memastikan keberlangsungan usaha termasuk kegiatan operasi, dan keselamatan pengguna jasa maupun karyawan. Upaya yang dilakukan telah dapat memastikan tidak terganggunya kegiatan operasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan tetap menjamin keselamatan pengguna jasa maupun karyawan.

The implementation of Business Continuity Management (BCM) is an effort to protect the values of the Corporation and to be a part of the implementation of Corporate Risk Management. The presence of Business Continuity Management is based on the Risk Management Roadmap that is prepared through risk and threat assessments and equipped with response, recovery, and restoration procedures in the event of incidents. The Business Continuity Management Policy of the Corporation is established through Directors' Decree Number PER/042/BOD-MRT/VIII/2019 that stipulates the implementation of BCM in accordance with the following Policies and Guidelines:

- *Business Continuity Management (BCM) Policy;*
- *Emergency Response Plan (ERP) Guidelines;*
- *Crisis Management Plan (CMP);*
- *Business Continuity Plan (BCP) Guidelines;*
- *Disaster Recovery Plan (DRP) Guidelines.*

During the reporting period, the Corporation has activated the Crisis Management Team (CMT) to ensure business continuity including the operational activities and safety of the passengers and employees. The efforts taken has been able to ensure seamless operations that may impact the business continuity and guarantee the safety of the passengers and the employees.

| Waktu Time | Kejadian Event | Tindakan Action |
|---|---|---|
| Sejak Maret 2020 Starting March 2020 | Pandemi COVID-19 di Indonesia COVID-19 Pandemic in Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Tim Manajemen Krisis (CMT) secara harian untuk dapat memonitor kondisi operasional Perseroan, serta menyiapkan keputusan-keputusan yang perlu diambil dengan fokus terhadap perlindungan karyawan, keberlangsungan operasi, dan keberlanjutan Perseroan. • Menerapkan protokol Kesehatan yang dikeluarkan baik dari Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. • Melakukan beberapa inovasi untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 di lingkungan MRT Jakarta. • <i>Daily Coordination Meeting of Crisis Management Team (CMT) to monitor Corporation operational conditions and prepare all the required decisions to make, focusing on employee protection, operational continuity, and Corporation continuity.</i> • <i>Implementation of Health Protocols as issued by the Ministry of Health, COVID-19 Task Force, and the Government of DKI Jakarta Province.</i> • <i>Innovation to reduce potential COVID-19 transmission within the premises of MRT Jakarta.</i> |

| Waktu Time | Kejadian Event | Tindakan Action |
|---|--|---|
| 8 Oktober 2020 <i>October 8, 2020</i> | Huru-hara demonstrasi <i>Omnibus Law Riots during demonstration against the Omnibus Law</i> | <p>PT MRT Jakarta melakukan beberapa tindakan saat terjadinya demonstrasi <i>Omnibus Law</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan <i>Surveillance</i> dengan menjalin komunikasi dengan pihak TNI dan POLRI untuk mendapatkan informasi dari intelijen, serta melakukan pemantauan situasi unjuk rasa untuk mempersiapkan apabila dibutuhkan eskalasi pengamanan. • Kegiatan tanggap darurat dimana disaat demonstrasi terpantau tidak kondusif CMT diaktifkan untuk kondisi krisis. Proteksi terhadap pengguna dan karyawan MRT Jakarta dilakukan dengan melakukan penyesuaian operasional dan melakukan evakuasi pengguna dan petugas stasiun menggunakan kereta. Dilakukan penutupan di seluruh pintu masuk stasiun dengan menyisakan beberapa petugas keamanan di dalam stasiun yang telah dikondisikan tanpa ada penerangan. Pergerakan massa terus diamati dari <i>security command center</i> dan terus berkoordinasi dengan pihak TNI dan POLRI untuk mengamankan aset MRT Jakarta. • Melakukan tindakan <i>recovery</i> setelah situasi aman dengan melakukan pengecekan dan dokumentasi terhadap kerusakan yang terjadi di aset MRT Jakarta untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak asuransi terkait klaim yang dapat diajukan. Dilakukan pembersihan area yang terdampak dan dilakukan perbaikan sementara, agar MRT dapat dioperasikan secara aman kembali pada keesokan harinya. • Menyiapkan <i>lesson learned</i> atas kejadian kerusuhan sebagai acuan dalam peningkatan desain pembangunan fase 2. <p><i>The Corporation implemented various actions upon the demonstration against the Omnibus Law:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Surveillance activity involving communicating with the Army and the Police to obtain information from intelligence and monitoring of the demonstration to prepare for security effort escalation whenever required.</i> • <i>Emergency response action when the demonstration became unfavourable; CMT was activated for crisis protection of passengers and employees of MRT Jakarta through operational adjustment and evacuation of passengers and station workers by train. All entrances to the station were closed and several security guards were stationed in the station. The station also went without visible lighting to discourage the public from entering. Mass movement was monitored frequently from the command centre and coordination was maintained with the Army and the Police to secure the assets of MRT Jakarta.</i> • <i>Recovery action after the situation is safe is carried out through checking and documenting the damages on the assets of MRT Jakarta to be delivered to the insurer concerning potential claims. Impacted areas were cleaned and underwent temporary repair, so that MRT Jakarta could operate in full capacity the next day.</i> • <i>A compilation of the lessons learned from the riot are to be a reference for improving the construction design for Phase 2.</i> |

Berlangsungnya pandemi COVID-19 yang mulai menunjukkan kenaikan jumlah korban yang signifikan di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memberikan kesempatan bagi Sistem Manajemen Risiko Korporasi untuk mengaplikasikan Manajemen Keberlangsungan Usaha atau yang dikenal sebagai *Business Continuity Management (BCM)* pada kondisi nyata.

Adapun fase-fase pengelolaan Manajemen Keberlangsungan Usaha, meliputi:

1. Fase krisis;
2. Fase pemulihan;
3. Fase restorasi.

Hal yang ditemukan selama implementasi Manajemen Keberlangsungan Usaha dalam pengelolaan pandemi COVID-19 ini adalah pentingnya proses *surveillance* dilakukan. Perseroan telah memberikan perhatian dan melakukan *surveillance* proses atas berkembangnya kasus COVID-19 pada periode ketika masih disebut Novel Coronavirus (NCov) pada akhir Desember 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melaporkan perkembangan kasus yang saat itu masih berlangsung di RRT (Republik Rakyat Tiongkok) pada Januari 2020.

The COVID-19 pandemic that started to show a significant increase of victims in Indonesia starting March 2020 provided the opportunity for the Corporate Risk Management System to implement Business Continuity Management with real-world implications.

The phases of Business Continuity Management include:

1. *Crisis phase;*
2. *Recovery phase;*
3. *Restoration phase.*

A finding during the implementation of Business Continuity Management concerning the management of the pandemic is the importance of the surveillance process. The Corporation has given attention to and carried out the surveillance process of the development of COVID-19 cases during the period of Novel Coronavirus (NCov) at the end of December 2019, that was followed up by reporting the development when the pandemic occurred in People's Republic of China in January 2020.

Implementasi Manajemen Keberlangsungan Usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 berfokus dalam tiga aspek utama yang terdiri dari perlindungan karyawan dari paparan COVID-19 baik di lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggal yang diatur melalui Surat Edaran Direksi; menjaga operasional MRT Jakarta dengan penerapan protokol kesehatan yang baik untuk melindungi pengguna jasa maupun petugas dari paparan COVID-19 serta mengikuti segala regulasi dari Pemerintah terkait pengaturan operasional Transportasi Umum; dan menjaga keberlanjutan bisnis dengan menjalankan kebijakan pengendalian biaya untuk menjaga arus kas yang baik serta mengeksplorasi peluang mendapatkan aliran pendapatan baru. Selain itu, Perseroan tetap akan melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2.

Direksi memberikan arahan untuk segera melakukan tindakan mitigasi yang diperlukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa langkah pencegahan maupun edukasi pencegahan penularan baik bagi karyawan maupun pengguna jasa dalam bentuk:

1. Edukasi dan promosi pentingnya penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun) dan etika batuk yang benar;
2. Mewajibkan petugas dan pengguna jasa menggunakan masker sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait;
3. Melakukan pengukuran suhu baik bagi pengguna jasa maupun karyawan dan *tenant* MRT Jakarta;
4. Pembersihan area publik dan lokasi kerja menggunakan disinfektan;
5. Pengaturan *physical distancing* di area stasiun, kereta (berupa tanda lokasi berdiri dan tanda silang) maupun di area kantor MRT Jakarta;
6. Pembatasan jumlah pengguna jasa dan pembatasan karyawan MRT Jakarta yang berkantor dengan mengkombinasikan bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah;
7. Mengurangi jumlah pertemuan langsung antara petugas MRT Jakarta dan pengguna jasa dengan tidak mengaktifkan transaksi tunai (transaksi dapat menggunakan TVM yang tersedia di stasiun) dan meluncurkan sistem pembayaran baru yang berbasis *QR code*;
8. Perusahaan menjamin kesehatan petugas yang melayani pengguna jasa dengan melakukan proses *screening* kesehatan, serta pemberian vitamin kepada petugas;
9. Perusahaan juga melakukan beberapa pelatihan kepada petugas, seperti simulasi kepadatan pengguna jasa, penanganan pengguna jasa yang pingsan baik itu

The implementation of Business Continuity Management in facing the pandemic focuses on three core aspects, consisting of employee protection against the transmission of COVID-19 at the workplace and home as regulated by the Circulating Letter of the Board of Directors; operational maintenance of MRT Jakarta by implementing good health protocols to protect the passengers and employees from COVID-19 transmission and complying with the regulations from the Government concerning the operational setting of Public Transportation; and maintaining business continuity by carrying out cost control measures to maintain good cashflow while exploring the opportunities to obtain new revenue streams. In addition, the Corporation maintains the construction of Phase 2.

The Board of Directors provides directions to carry out anticipative actions required to be followed up by various prevention measures in the form of education to prevent transmission to employees and passengers in the form of:

1. *Education and promotion of the importance of wearing a mask, maintaining distance, and washing hands using soap and the proper coughing etiquettes;*
2. *Requirements for employees and passengers to wear mask based on the regulations issued by the relevant authorities;*
3. *Measurement of body temperature for passengers and employees as well as tenants of MRT Jakarta;*
4. *Cleaning of public area and working location using disinfectant;*
5. *Implementation of physical distancing in station areas, trains (in the form of sticker for standing area and forbidden area), and the area of MRT Jakarta office;*
6. *Limitation of passengers and limitation of employees that work at the office by combining work at the office and work from home;*
7. *Reduction of direct contact between employees of MRT Jakarta and Passengers by disabling cash transaction (transaction is carried out through TVM available at the stations) and launching a new QR-code payment system;*
8. *Protecting the health of officers who serve the passengers by screening their health and distribution of vitamins to the officers;*
9. *Training for officers, such as simulation of passenger overcrowding, handling unconscious passengers in the station and inside the train, and how to remain*

di stasiun maupun di kereta MRT Jakarta agar dapat tetap responsive dalam menghadapi beberapa kejadian yang terjadi di masa pandemi COVID-19.

MRT Jakarta menghadirkan Protokol BANGKIT untuk kembali menjadi pilihan transportasi publik yang bersih, aman, dan nyaman dengan menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan MRT Jakarta. Dalam masa transisi atau adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman dari COVID-19, MRT Jakarta juga kembali mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dalam mobilitas sehari-hari sebagai upaya terciptanya pelestarian lingkungan atau *go green*. Dalam menuju tatanan baru ini, MRT Jakarta tidak dapat melakukannya sendiri, maka daripada itu dengan adanya kolaborasi bersama dengan seluruh pihak baik masyarakat maupun mitra, untuk menghadirkan inovasi, yang juga dilakukan dengan tata kelola yang baik mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan terbitnya kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam masa pandemi COVID-19, terdapat penyesuaian kebijakan Perseroan sebagai salah satu implementasi kelangsungan usaha, yaitu melalui rekam jejak sebagai berikut :

responsive when handling various other occurrences during the pandemic.

The Corporation implements BANGKIT Protocol to become a hygienic, safe, and comfortable option of public transportation and to prevent the transmission of COVID-19 on the premises of MRT Jakarta. During the transition period or new normal period towards a productive community that is safe from COVID-19, MRT Jakarta has encouraged the community to utilise public transportation for their daily mobility in the effort to preserve the environment and to 'go green'. To prepare and carry out the new normal, the Corporation needed to collaborate with parties including the community and business partners. This allowed the Corporation to maximise innovation, integrity, transparency, accountability, and good corporate governance.

With the enactment of Government policies during the pandemic, there are various adjustments to the Corporation's policies as a form of business continuity implementation with the following history:

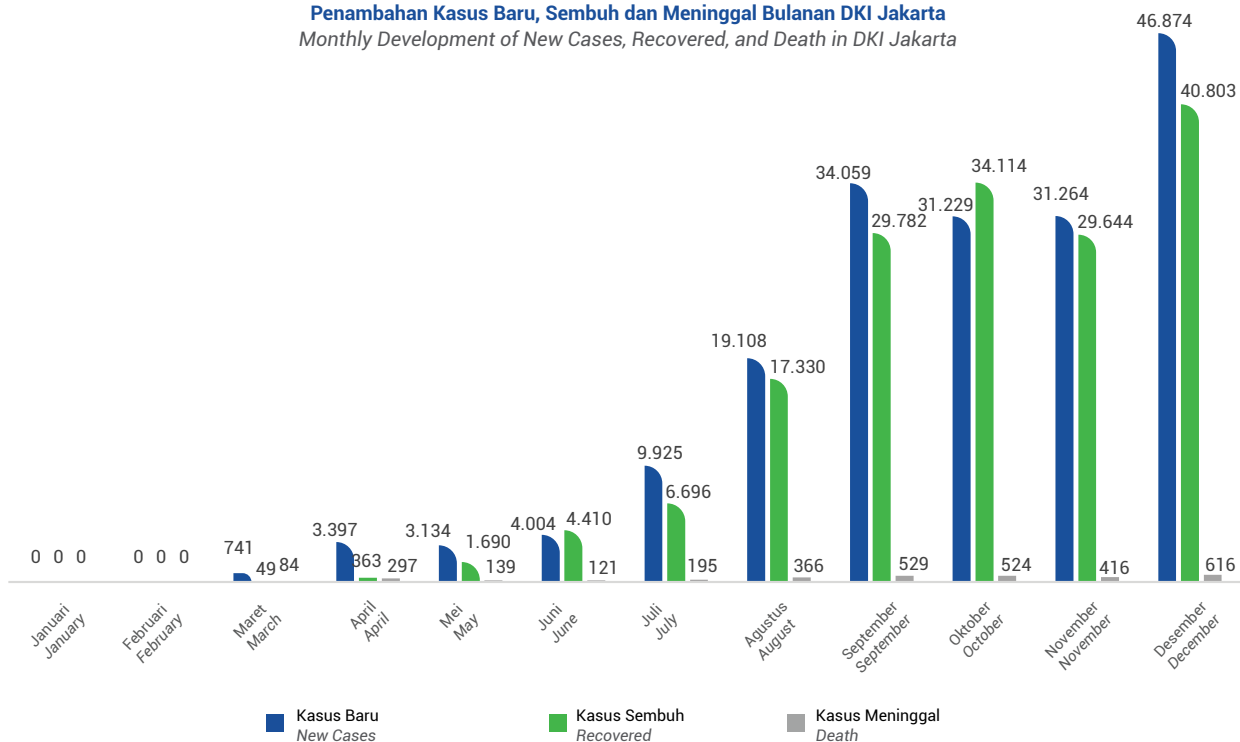
Penyesuaian Kebijakan MRT Jakarta terhadap Peraturan yang Berlaku
Adjustment of MRT Jakarta Policies to The Prevailing Laws and Regulations



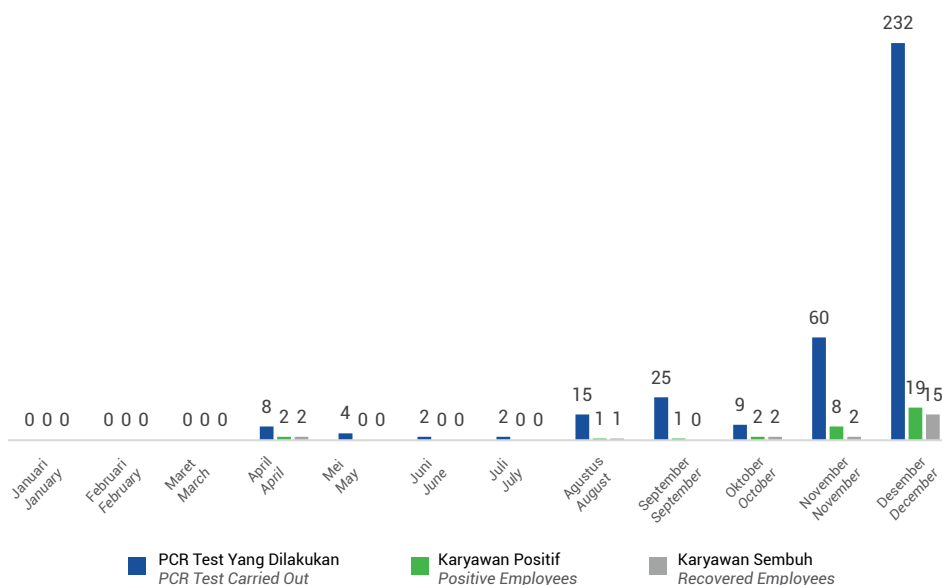
Rekam jejak jumlah karyawan dan keluarga karyawan yang terinfeksi COVID-19 dan proses *contact tracing* dengan pemeriksaan PCR Swab Test selama masa pandemi di tahun 2020, sebagai berikut:

The number of employees and employees' family members infected with COVID-19 and the contact tracing process by PCR Swab Testing during the pandemic in 2020 is presented as follows:

Penambahan Kasus Baru, Sembuh dan Meninggal Bulanan DKI Jakarta
Monthly Development of New Cases, Recovered, and Death in DKI Jakarta



Sebaran COVID-19 pada Karyawan MRT Jakarta
COVID-19 Cases Among Employees of MRT Jakarta





Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Evaluation of the Effectiveness of the Corporate Risk Management System

PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan metode pengukuran Kesesuaian/ Konformitas Risiko dan juga pengukuran Maturitas Risiko. Pengukuran Kesesuaian Risiko ini dilakukan oleh Divisi *Internal Audit* sebagai bagian dari proses asuransi terhadap Divisi Manajemen Risiko dan *QSSHE Assurance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Korporasi berdasarkan ISO 31000:2018.

Hasil pengukuran Konformitas Risiko pada tahun 2020 adalah sebesar 85,41. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,41. Hal – hal yang masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan adalah pada implementasi proses manajemen risiko.

Sementara evaluasi implementasi manajemen risiko dinilai melalui pengukuran Maturitas Risiko yang dilaksanakan oleh Divisi *Internal Audit*, pada 02 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021. Tujuan evaluasi adalah untuk:

- Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan tercapai sebagaimana diharapkan;
- Mengetahui tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko;
- Mengidentifikasi penerapan Manajemen Risiko yang memerlukan peningkatan berikut rekomendasi perbaikan.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada PT MRT Jakarta (Perseroda) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang terbagi dalam sembilan komponen, yaitu:

1. Strategi Risiko;
2. Selera Risiko;
3. Profil Risiko;
4. Struktur Tata Kelola;
5. Kebijakan Risiko;
6. Pemantauan dan Pelaporan Risiko;
7. Pemodelan Risiko;
8. Budaya Risiko;
9. Teknologi Risiko.

Hasil akhir evaluasi adalah skor/nilai capaian yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di Perseroan yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori.

The Corporation implements a Risk Conformity measurement method and Risk Maturity measurement. Risk Conformity measurement is carried out by the Internal Audit Division as a part of the assurance process of the Risk Management & QSSHE Assurance Division in carrying out their duties and functions to develop Corporate Risk Management System based on ISO 31000:2018.

The measurement of Risk Conformity in 2020 was 85.41. This achievement increased compared to the achievement in the previous year of 82.41. The areas of improvement include the implementation of the risk management process.

Meanwhile, evaluation of the risk management implementation is assessed through the measurement of Risk Maturity carried out by the Internal Audit Division from December 2, 2020 to January 20, 2021. The evaluation aims to:

- *Assess the adequacy of the design and effectiveness of the Risk Management Process as a management tool in providing confidence to stakeholders that the Corporation goals and objectives are achieved as expected;*
- *Find out the level of Risk Management maturity level;*
- *Identify the implementation of Risk Management that requires improvements, followed by recommendations for improvements.*

The scope of the evaluation of the implementation of Risk Management in the Corporation covered all aspects that support the implementation of Risk Management divided into nine components:

1. *Risk Strategy;*
2. *Risk Appetite;*
3. *Risk Profile;*
4. *Governance Structure;*
5. *Risk Policy;*
6. *Risk Monitoring and Reporting;*
7. *Risk Modeling;*
8. *Risk Culture;*
9. *Risk Technology.*

The final result of the evaluation is the score/achievement value that indicates the level of Risk Management maturity of the Corporation that is classified into 5 (five) categories.

Klasifikasi Tingkat Kematangan dan Ciri Kapabilitas

Classification of Risk Maturity and Characteristic of Capability

| Tingkat Kematangan Maturity Level | Nilai Capaian Score | Ciri Kapabilitas Characteristic of Capability |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| <i>Initial</i> | 1 | Kegiatan belum terdefinisikan, tidak terdokumentasi, dan tidak terorganisir. Proses bergantung pada kontribusi dari pelaku/individu kunci. <i>The activities are undefined, undocumented and unorganised. The process depends on contributions from key actors/individuals.</i> |
| <i>Repeatable</i> | 2 | Proses dasar sudah terbentuk dan dilakukan secara berulang, namun masih bergantung pada inisiatif berlanjut dari pelaku proses. <i>The basic process has been formed and carried out repeatedly, but still depends on the continuous initiatives of the process' actors.</i> |
| <i>Defined</i> | 3 | Kegiatan dan proses telah terdefinisikan dan terstandarisasi serta menjadi bagian dari kegiatan Perseroan. <i>The activities and processes have been defined and standardised, and have become part of the Corporation's activities.</i> |
| <i>Managed</i> | 4 | Risiko terus dianalisis, diukur, dan dikelola dalam Perseroan. <i>Risks continue to be analysed, measured, and managed within the Corporation.</i> |
| <i>Optimized</i> | 5 | Perseroan berfokus pada pengembangan berkelanjutan dari proses yang sudah dibentuk. Manajemen Risiko menjadi suatu keunggulan kompetitif. <i>The Corporation focuses on the continuous developments of the processes that have been formed. Risk management becomes a competitive advantage.</i> |

Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko (MR)

Results of the Evaluation of Risk Management (RM) Implementation

| No | Komponen/Atribut Penerapan MR Component/Attribute of RM Implementation | Survei Survey | Diskusi Kelompok Group Discussion | Observasi dan Review Dokumen Observation and Document Review | Tingkat Kematangan Maturity Level | |
|---------------------|---|------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | Bobot Weight (%) | 20% | 20% | 60% | Nilai Akhir Final Score | Keterangan Remarks |
| 1 | Strategi Risiko <i>Risk Strategy</i> | 4,45 | 4,00 | 4,00 | 4,09 | <i>Managed</i> |
| 2 | Selera Risiko <i>Risk Appetite</i> | 4,52 | 4,00 | 3,00 | 3,53 | <i>Defined</i> |
| 3 | Profil Risiko <i>Risk Profile</i> | 4,52 | 3,88 | 3,25 | 3,63 | <i>Defined</i> |
| 4 | Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i> | 4,38 | 3,89 | 3,77 | 3,92 | <i>Defined</i> |
| 5 | Kebijakan Risiko <i>Risk Policies</i> | 3,99 | 4,25 | 3,50 | 3,75 | <i>Defined</i> |
| 6 | Pemantauan dan Pelaporan Risiko <i>Risk Monitoring & Reporting</i> | 4,35 | 3,44 | 3,25 | 3,51 | <i>Defined</i> |
| 7 | Analisis & Pemodelan Risiko <i>Risk Modelling & Analysis</i> | 4,42 | 3,83 | 3,00 | 3,45 | <i>Defined</i> |
| 8 | Budaya Risiko <i>Risk Culture</i> | 4,30 | 3,88 | 3,00 | 3,44 | <i>Defined</i> |
| 9 | Teknologi Risiko <i>Risk Technology</i> | 4,24 | 4,21 | 3,71 | 3,92 | <i>Defined</i> |
| Jumlah Total | | 4,35 | 3,93 | 3,39 | 3,73 | <i>Defined</i> |

Proses pengukuran Maturitas Manajemen Risiko ini dilakukan setiap tahun untuk melihat besarnya peningkatan skor yang dicapai. Sesuai dengan peta jalan pencapaian maturitas risiko yang telah di perbaharui pada tahun 2019, target skor Maturitas Risiko tahun 2020 adalah 3,55. Besaran target ini ditetapkan dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Pada tahun 2020, realisasi capaian skor Maturitas Risiko adalah sebesar 3,73.

The Risk Maturity measurement process is carried out annually to find out the score increase achieved. Based on the roadmap of risk maturity achievement that has been amended in 2019, the target score of Risk Maturity in 2020 was 3.55. This target is established considering the achievement of the previous year and the ongoing pandemic. In 2020, the realisation of the Risk Maturity score was 3.73.

Jenis-jenis Risiko Perseroan Tahun 2020 dan Pengelolaannya

Types of Corporate Risks in 2020 and the Management

Sejalan dengan komitmen Direksi Perseroan untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko secara efektif di setiap jenjang korporasi, Perseroan harus memperhatikan prioritas kegiatan untuk keberhasilan pencapaian tujuan Perseroan berdasarkan Toleransi Risiko/Selera Risiko yang telah ditetapkan Perseroan.

In line with the commitment of the Board of Directors to implement risk management effectively at every Corporation level, the Corporation must pay attention to the priority of activities for achievement of Corporation objectives based on the Risk Tolerance/Risk Appetite as established by the Corporation.

Dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan selama periode pelaporan, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* menyusun kebijakan yang sudah ditandatangani Direksi. Kebijakan memuat antara lain matriks peringkat risiko yang dapat menunjukkan peringkat risiko dan selera risiko Perseroan.

During the implementation of Corporate Risk Management in the reporting period, the Risk Management & QSSHE Assurance Division developed a policy that has been signed by the Board of Directors. The policy covers arisk rating matrix that can show the risk level and risk appetite of the Corporation.

Peringkat Risiko dan Selera Risiko Perseroan Tahun 2020
Risk Rating and Risk Appetite of the Corporation in 2020

| Kemungkinan | Konsekuensi Consequence | | | | Likelihood |
|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | Minor Minor | Sedang Moderate | Signifikan Significant | Parah Severe | |
| Hampir Pasti | High | High | Extreme | Extreme | Almost Certain |
| Mungkin | Medium | High | Extreme | Extreme | Likely |
| Tidak Mungkin | Low | Medium | High | Extreme | Unlikely |
| Langka/Jarang | Low | Low | Medium | High | Rare |

Pada tahun 2020 ini, jumlah *Risk Register* yang terkumpul dari seluruh unit kerja sebanyak 390 risiko. Dari seluruh risiko tersebut, ada 57 risiko yang berdasarkan penilaian, berada di atas toleransi risiko yang sudah ditetapkan. Adapun 10 risiko tertinggi yang ada di Perusahaan di akhir tahun 2020 dengan perlakuan mitigasinya adalah sebagai berikut:

In 2020, the number of Risk Registers collected from all work units reached 390 risks. Among them, 57 risks are above the established risk tolerance based on the assessments. There are top 10 'top risks' in the Corporation as of the end of 2020 and the mitigation measures are as follows:

| Ranking 1 | |
|--------------------------------------|---|
| Risiko <i>Risk</i> | Kegagalan pengadaan <i>combined direct contracting</i> CP 202 & CP 205; <i>Failed to procure combined direct contracting CP 202 & CP 205</i> |
| Penyebab <i>Causes</i> | <ol style="list-style-type: none"> Skema <i>combined direct contracting</i> paket konstruksi CP 202 & 205 tidak mendapat dukungan Pemerintah Indonesia; Dokumen <i>pengadaan combined direct contracting</i> tidak siap untuk digunakan. <ol style="list-style-type: none"> <i>Failed to procure combined direct contracting CP 202 & CP 205;</i> <i>Procurement document for combined direct contracting is not ready to be used.</i> |
| Dampak <i>Impact</i> | Keterlambatan operasi fase 2A Segmen 1 (BHI-Monas) Maret 2025 dan Segmen 2 Agustus 2027 <i>Delayed operations of Phase 2A Segment 1 (BHI – Monas) to March 2025 and Segment 2 to October 2027</i> |
| Mitigasi <i>Mitigation</i> | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan <i>updating Minutes of Discussion (MoD)</i> atas perubahan metode pengadaan menjadi <i>Combined Direct Contracting</i> yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan JICA; Memastikan skema pengadaan <i>Combined Direct Contracting</i> paket sipil (CP 202) dan <i>Railway System</i> (CP205) untuk <i>section</i> CP201 dan CP202 sesuai usulan GOJ kepada Kemenhub (DJKA); Melakukan pendampingan <i>Direct Contracting</i> bersama BPKP; Menyusun RFP <i>Direct Contracting</i> secara kombinasi (Paket sipil dan <i>railway system</i>), termasuk mengurangi lingkup penyediaan <i>substation</i> pada <i>Segment-1</i> (operasi <i>Segment-1</i> menggunakan Penyediaan Listrik dari Fase 1); Menyiapkan prosedur internal, serta Tim Panitia Pengadaan dan Tim Negosiasi. <ol style="list-style-type: none"> <i>Updating the Minutes of Discussion (MOD) of the changes in procurement method to be 'Combined Direct Contracting' signed by the Government of Indonesia and JICA;</i> <i>Ensuring that the procurement scheme for Combined Direct Contracting of civil packages (CP 202) and Railway System (CP 205) for section CP201 and CP202 is in line with the GOJ proposal to the Ministry of Transportation (DJKA);</i> <i>Assisting the Direct Contracting with BPKP;</i> <i>Developing combined Direct Contracting RFP (civil package and railway system) including reducing the scope of substation provision at Segment 1 (operations of Segment 1 utilises Electricity Provision from Phase 1);</i> <i>Preparing internal procedure, and establishing Procurement Committee Team and Negotiation Team.</i> |

| Ranking 2 | | | |
|--|--|--|--|
| Risiko Risk | Kekurangan jumlah karyawan PT MRT Jakarta <i>Lack of employees in the Corporation</i> | | |
| Penyebab Causes | Terdapat karyawan yang positif COVID-19 <i>There are employees who suffer from COVID-19</i> | | |
| Dampak Impact | Terhambatnya operasional MRT Jakarta <i>Disrupted operations of MRT Jakarta</i> | | |
| Mitigasi Mitigation | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi CMT dan pelaksanaan <i>Daily Monitoring</i>, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan bila diperlukan; 2. Pelaksanaan Swab PCR untuk <i>train driver</i> dan instruktur; 3. Pengaturan <i>Work From Home, Work At Office, Work At Project</i>, dan <i>Worksite</i> di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Direktur Utama Nomor SE/036/BOD-MRT/V/2020, serta Implementasi Masa Transisi Aktifitas Normal Baru di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Nomor SE/061/BOD-MRT/X/2020 yang diedarkan pada tanggal 14 Oktober 2020; 4. Penerbitan Surat Edaran No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Karyawan dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda); 5. Penyediaan APD berupa: masker medis, masker N95, <i>face shield</i> dan sarung tangan bagi karyawan; 6. Pengumpulan wajib secara rutin untuk data terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor SE/009/BOD-MRT/III/2020 tentang Penanganan Penyebaran COVID bagi karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda); 7. Melakukan pemantauan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan yang tinggal satu atap, serta penelusuran karyawan yang masuk dalam kategori "kontak erat" dan sesegera mungkin melakukan pemeriksaan PCR Swab Test untuk memastikan kondisi karyawan; 8. Apabila dalam satu area kerja terdapat karyawan <i>outsourcing</i> yang berstatus positif, maka diinstruksikan kepada penyedia jasa untuk melakukan <i>tracing identification</i> dan SWAB test kepada karyawannya yang berkontak; 9. Menunda rotasi karyawan antar stasiun. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enabling CMT and carrying out Daily Monitoring, to accelerate the decision-making when required;</i> 2. <i>Implementing PCR Swab for train drivers and instructors;</i> 3. <i>Setting policies concerning Work from Home, Work at Office, Work at Project, and Works in the premises of the Corporation through President Director's Circular Letter No. SE/036/BOD-MRT/V/2020, and implementing Transition Phase to New Normal Activities within the premises of the Corporation initiative through Circular Letter Number SE/061/BOD-MRT/X/2020 dated October 14, 2020;</i> 4. <i>Issuing Circular Letter No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 concerning Implementation of Employees' Activity Control to Prevent the Transmission of COVID-19 during the National Holiday for Christmas 2020 and New Year 2021 at PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 5. <i>Preparing PPE such as: medical masks, N95 masks, face shields, and gloves for employees;</i> 6. <i>Collecting data concerning the prevention of COVID-19 transmission routinely, referring to Circular Letter No. SE/009/BOD-MRT/III/2020 concerning Mitigation of COVID Transmission for Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 7. <i>Monitoring the employees' health as well as that of their family members under one roof, and tracing the employees that have been in direct contact so that they can undergo a PCR Swab Test as soon as possible to ensure their condition;</i> 8. <i>If in a work area there is an outsourced employee that suffers from COVID, instructing the service provider to carry out tracing identification and Swab Testing of the employee;</i> 9. <i>Postponing employee rotation among the stations.</i> </td> </tr> </table> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi CMT dan pelaksanaan <i>Daily Monitoring</i>, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan bila diperlukan; 2. Pelaksanaan Swab PCR untuk <i>train driver</i> dan instruktur; 3. Pengaturan <i>Work From Home, Work At Office, Work At Project</i>, dan <i>Worksite</i> di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Direktur Utama Nomor SE/036/BOD-MRT/V/2020, serta Implementasi Masa Transisi Aktifitas Normal Baru di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Nomor SE/061/BOD-MRT/X/2020 yang diedarkan pada tanggal 14 Oktober 2020; 4. Penerbitan Surat Edaran No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Karyawan dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda); 5. Penyediaan APD berupa: masker medis, masker N95, <i>face shield</i> dan sarung tangan bagi karyawan; 6. Pengumpulan wajib secara rutin untuk data terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor SE/009/BOD-MRT/III/2020 tentang Penanganan Penyebaran COVID bagi karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda); 7. Melakukan pemantauan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan yang tinggal satu atap, serta penelusuran karyawan yang masuk dalam kategori "kontak erat" dan sesegera mungkin melakukan pemeriksaan PCR Swab Test untuk memastikan kondisi karyawan; 8. Apabila dalam satu area kerja terdapat karyawan <i>outsourcing</i> yang berstatus positif, maka diinstruksikan kepada penyedia jasa untuk melakukan <i>tracing identification</i> dan SWAB test kepada karyawannya yang berkontak; 9. Menunda rotasi karyawan antar stasiun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enabling CMT and carrying out Daily Monitoring, to accelerate the decision-making when required;</i> 2. <i>Implementing PCR Swab for train drivers and instructors;</i> 3. <i>Setting policies concerning Work from Home, Work at Office, Work at Project, and Works in the premises of the Corporation through President Director's Circular Letter No. SE/036/BOD-MRT/V/2020, and implementing Transition Phase to New Normal Activities within the premises of the Corporation initiative through Circular Letter Number SE/061/BOD-MRT/X/2020 dated October 14, 2020;</i> 4. <i>Issuing Circular Letter No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 concerning Implementation of Employees' Activity Control to Prevent the Transmission of COVID-19 during the National Holiday for Christmas 2020 and New Year 2021 at PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 5. <i>Preparing PPE such as: medical masks, N95 masks, face shields, and gloves for employees;</i> 6. <i>Collecting data concerning the prevention of COVID-19 transmission routinely, referring to Circular Letter No. SE/009/BOD-MRT/III/2020 concerning Mitigation of COVID Transmission for Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 7. <i>Monitoring the employees' health as well as that of their family members under one roof, and tracing the employees that have been in direct contact so that they can undergo a PCR Swab Test as soon as possible to ensure their condition;</i> 8. <i>If in a work area there is an outsourced employee that suffers from COVID, instructing the service provider to carry out tracing identification and Swab Testing of the employee;</i> 9. <i>Postponing employee rotation among the stations.</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi CMT dan pelaksanaan <i>Daily Monitoring</i>, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan bila diperlukan; 2. Pelaksanaan Swab PCR untuk <i>train driver</i> dan instruktur; 3. Pengaturan <i>Work From Home, Work At Office, Work At Project</i>, dan <i>Worksite</i> di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Direktur Utama Nomor SE/036/BOD-MRT/V/2020, serta Implementasi Masa Transisi Aktifitas Normal Baru di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui Surat Edaran Nomor SE/061/BOD-MRT/X/2020 yang diedarkan pada tanggal 14 Oktober 2020; 4. Penerbitan Surat Edaran No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Karyawan dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda); 5. Penyediaan APD berupa: masker medis, masker N95, <i>face shield</i> dan sarung tangan bagi karyawan; 6. Pengumpulan wajib secara rutin untuk data terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor SE/009/BOD-MRT/III/2020 tentang Penanganan Penyebaran COVID bagi karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda); 7. Melakukan pemantauan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan yang tinggal satu atap, serta penelusuran karyawan yang masuk dalam kategori "kontak erat" dan sesegera mungkin melakukan pemeriksaan PCR Swab Test untuk memastikan kondisi karyawan; 8. Apabila dalam satu area kerja terdapat karyawan <i>outsourcing</i> yang berstatus positif, maka diinstruksikan kepada penyedia jasa untuk melakukan <i>tracing identification</i> dan SWAB test kepada karyawannya yang berkontak; 9. Menunda rotasi karyawan antar stasiun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enabling CMT and carrying out Daily Monitoring, to accelerate the decision-making when required;</i> 2. <i>Implementing PCR Swab for train drivers and instructors;</i> 3. <i>Setting policies concerning Work from Home, Work at Office, Work at Project, and Works in the premises of the Corporation through President Director's Circular Letter No. SE/036/BOD-MRT/V/2020, and implementing Transition Phase to New Normal Activities within the premises of the Corporation initiative through Circular Letter Number SE/061/BOD-MRT/X/2020 dated October 14, 2020;</i> 4. <i>Issuing Circular Letter No. SE/074/BOD-MRT/XII/2020 concerning Implementation of Employees' Activity Control to Prevent the Transmission of COVID-19 during the National Holiday for Christmas 2020 and New Year 2021 at PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 5. <i>Preparing PPE such as: medical masks, N95 masks, face shields, and gloves for employees;</i> 6. <i>Collecting data concerning the prevention of COVID-19 transmission routinely, referring to Circular Letter No. SE/009/BOD-MRT/III/2020 concerning Mitigation of COVID Transmission for Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> 7. <i>Monitoring the employees' health as well as that of their family members under one roof, and tracing the employees that have been in direct contact so that they can undergo a PCR Swab Test as soon as possible to ensure their condition;</i> 8. <i>If in a work area there is an outsourced employee that suffers from COVID, instructing the service provider to carry out tracing identification and Swab Testing of the employee;</i> 9. <i>Postponing employee rotation among the stations.</i> | | |

| Ranking 3 | |
|------------------------|--|
| Risiko Risk | Potensi pengguna jasa tertular COVID-19 di area stasiun maupun kereta MRTJ <i>Potential transmission of COVID-19 to passengers at the stations and trains</i> |
| Penyebab Causes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran protokol PSBB di area MRT Jakarta meningkat; 2. Meningkatnya jumlah positif COVID-19 di area DKI Jakarta. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Increase in violation of PSBB protocols in MRT Jakarta</i> 2. <i>Increase in the number of positive COVID-19 cases in Jakarta</i> |
| Dampak Impact | Menurunnya <i>ridership</i> MRTJ, sehingga berkurangnya penerimaan kas (<i>cash inflow</i>) Perusahaan tahun 2020 dari <i>farebox</i> <i>Decreased MRTJ ridership, thus decreased cash inflow of the Corporation in 2020 from farebox</i> |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan <i>Thermal CCTV Scanner</i> di 5 stasiun besar dan Penggunaan <i>Thermogun</i> di 8 stasiun lainnya; 2. Pelaksanaan penertiban pelanggaran PSBB di area stasiun dan kereta bagi pengguna jasa maupun karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda); 3. Melakukan <i>monitoring</i> dan inspeksi terhadap petugas <i>security</i> atas fungsi <i>enforcement</i> peraturan protokol COVID-19 di area stasiun; 4. Penyediaan <i>hand sanitizer</i> dan edukasi bagi pengguna jasa untuk tindakan pencegahan berupa cuci tangan yang baik tata cara bersin dan batuk yang aman dan kewajiban menggunakan masker, pelarangan bicara di dalam ratangga; 5. Pengelolaan <i>crowd control</i>, protokol kesehatan dan penggunaan APD yang benar kepada petugas & pengguna jasa di stasiun maupun kereta dengan cara penyampaian <i>announcement</i> secara berkala; 6. Pembersihan rutin dengan disinfektan untuk <i>public area</i> di stasiun, Mushola, dan kereta; 7. Pemasangan <i>foot switch</i> untuk pengoperasian elevator dan pengumuman audio untuk menjaga jarak saat naik turun kereta, serta larangan berbicara dalam kereta; 8. Penyusunan Instruksi Kerja, jika ada calon pengguna jasa yang suhunya melebihi 37,3°C (berdasarkan SE Kemenkes HK.02.01/MENKES/335/2020) agar tidak diperbolehkan menggunakan MRTJ; 9. Penyediaan ruang isolasi dan paramedik; 10. Pembatasan jam operasional MRT hingga pukul 20:00 mulai 18 Desember 2020 sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 64 Tahun 2020 dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di periode libur NATARU. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Installing of Thermal CCTV Scanners at 5 major stations and utilising Thermo guns at the other 8 stations;</i> 2. <i>Reinforcing the protocols to violations against PSBB at the stations and in the trains for passengers and employees of the Corporation;</i> 3. <i>Monitoring and inspecting the security guards concerning the enforcement of COVID-19 protocols at the station;</i> 4. <i>Providing hand sanitisers and education to passengers concerning prevention measures such as proper hand-washing techniques, safe sneezing and coughing etiquettes and wearing a mask, and prohibition of talking inside Ratangga;</i> 5. <i>Managing crowd control, health protocols, and proper PPE utilisation for all employees and passengers in the station and at the trains by carrying out frequent announcements;</i> 6. <i>Disinfecting routinely at public areas at the stations, prayer rooms, and trains;</i> 7. <i>Installing a foot switch to operate elevators and audio announcements to maintain distance upon getting out of the train, and prohibiting talking inside the train;</i> 8. <i>Instruction that if a potential passenger has a temperature of more than 37.3°C (based on Circular Letter of the Ministry of Health HK.02.01/MENKES/335/2020) they are not to be allowed from using MRTJ;</i> 9. <i>Providing isolation room and paramedics;</i> 10. <i>Limiting the operating hours of MRT to 20:00 at the latest starting December 18, 2020, in line with the Instruction of the Governor of DKI Jakarta No. 64 Year 2020 concerning Prevention of COVID-19 Transmission During the Period of National Holiday for Christmas and New Year.</i> |
|--------------------------------|---|---|

Ranking 4

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Risiko Risk | Potensi gugatan ke <i>arbitrase internasional</i> dari pihak kontraktor terkait pembayaran <i>Financing Charges</i> <i>Potential claim to international arbitration from the contractor concerning payment of Financing Charges</i> | |
| Penyebab Causes | Ketidakepakatan nominal pembayaran <i>financing charge</i> CP 103 dan CP 104-105 yang diajukan dan penolakan pembayaran IPC 72 B untuk CP104-105 oleh Kemenkeu di tahun 2020 ("klaim kerugian finansial yang disebabkan oleh pembayaran retensi yang tertunda karena adanya EoT"). <i>Disagreement of the payment amount of the proposed financing charge for CP 103 and CP 104-105 and refusal of payment IPC 72 B for CP 104-105 by the Ministry of Finance in 2020 ("claim of financial loss arising from delayed retention payment due to EoT")</i> | |
| Dampak Impact | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim tambahan dan terjadinya <i>dispute</i>; 2. Reputasi perusahaan yang kurang baik akibat tidak terpenuhinya komitmen yang telah disepakati; 3. Penambahan biaya atas proses gugatan secara hukum (<i>arbitrase internasional</i>) sebesar USD 260.991/ Rp3.718.730.263,50 (belum termasuk <i>arbitrator expense</i>) . <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Additional claim and dispute;</i> 2. <i>Bad Corporate reputation due to the failure to fulfil the agreed commitment;</i> 3. <i>Additional cost for legal charge processes (international arbitration) of USD 260,991 or IDR 3,718,730,263.50 (excluding arbitrator expenses).</i> | |
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta BPKP untuk melakukan audiensi kepada Kemenkeu terkait penjelasan perbedaan pengajuan oleh MRTJ dengan Audit BPKP dengan harapan, agar Kemenkeu bisa membayarkan seluruh FC yang telah disepakati oleh Kontraktor dan PT MRT Jakarta; 2. Melakukan permintaan kepada Kementerian Keuangan untuk menganggarkan kembali pembayaran FC di tahun 2021; 3. Komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkeu terkait pembayaran sisa tagihan FC dan IPC 72B untuk CP104-CP105 terus berlangsung. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Requesting BPKP to ask for an audience to the Ministry of Finance concerning the explanation of the different proposal by MRTJ with BPKP Audit, in expecting that the MoF can pay all the FC as agreed by the Contractor and the Corporation;</i> 2. <i>Requesting the Ministry of Finance to allocate a budget for FC payment in 2021;</i> 3. <i>Communicating with the Government of DKI Jakarta Province and the Ministry of Finance concerning the remaining payment from FC bills and IPC 72B for CP104-CP105 that is ongoing.</i> |

Ranking 5

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Risiko Risk | Sabotase dan tindakan kriminal di lingkungan PT MRT Jakarta (HO, Depo, Stasiun dan area konstruksi) <i>Sabotage and crime at the premises of the Corporation (HO, Depot, Stations, and construction areas)</i> | |
| Penyebab Causes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Krisis ekonomi akibat COVID-19 yang berkepanjangan; 2. Kenaikkan level ancaman Keamanan; 3. Aksi kerusuhan dan demonstrasi yang ditanggapi provokasi. <p><i>1. Economic crisis due to the ongoing pandemic; 2. Increased level of security threat; 3. Riots and demonstrations caused by provocation.</i></p> | |
| Dampak Impact | Terhentinya operasional MRTJ serta <i>claim</i> EOT dan <i>cost</i> oleh kontraktor fase 2 yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, reputasi perusahaan dan keberlangsungan usaha bila besar magnitude-nya. <i>Operational termination of MRTJ and EOT claim and cost from the contractors of Phase 2 that may impact the service quality, Corporate reputation, and business continuity if the magnitude is major.</i> | |
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi sistem BCM dengan melakukan <i>Threat Analysis</i>; 2. Transfer risiko kepada Pihak ke-3 (BUJP, Asuransi Aset, dan <i>Business Interruption</i>); 3. Implementasi <i>Security Command Center</i>; 4. Kerjasama dengan Polri, TNI, dan BNPT; 5. Pengelolaan Operasi Sistem Pengamanan dan <i>monitoring</i> risiko operasional; 6. Perencanaan <i>drill</i> ancaman <i>bomb</i> kerja sama dengan pihak Gegana Polri; 7. Patroli pengamanan menggunakan K-9 dilakukan dengan intensitas lebih tinggi lagi serta peningkatan kewaspadaan; 8. Penerapan pola operasi terbatas dgn penutupan stasiun di area yg terjadi kerumunan massa demonstrasi dan melakukan <i>emergency drill</i> untuk kondisi demonstrasi/kerusuhan pada area proyek dan penerapan SOP Pola Operasi terbatas dalam situasi huru hara untuk mencegah kerusakan yg lebih besar yg mungkin terjadi; 9. Meminta Kontraktor untuk melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI untuk tambahan personel pengamanan dan fasilitas penunjang pengamanan (barikade kawat berduri, dan sebagainya) pada area rawan unjuk rasa; 10. Melakukan <i>assessment</i> untuk material pagar proyek pada masing-masing area, terutama untuk area yang memerlukan perhatian khusus; 11. Melakukan <i>assessment</i> untuk pemasangan pagar berduri di area <i>entrance</i> Stasiun yang lokasinya rawan unjuk rasa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Implementing BCM system by carrying out Threat Analysis</i>; 2. <i>Transferring the risk to a Third Party (BUJP, Asset Insurers, and Business Interruption)</i>; 3. <i>Implementation of Security Command Centre</i>; 4. <i>Collaborating with the Police, Army, and BNPT</i>; 5. <i>Managing the Operations of the Security System and monitoring operational risks</i>; 6. <i>Planning a drill on bomb threat in collaboration with Bomb Disposal Team of the National Police</i>; 7. <i>Carrying out security patrol using K-9 with higher intensity and increasing caution</i> 8. <i>Implementing limited operational scheme by closing the stations at the area of demonstration crowds and carrying out an emergency drill for demonstration/riots at project area, and implementing SOP of Limited Operational Scheme in riots to prevent the possible worse damages</i>; 9. <i>Requesting the Contractor to collaborate with the Army and the Police for additional security personnel and security supporting facilities (barbed wire, etc.) at the area prone to demonstration</i>; 10. <i>Assessing the materials of fences at project areas, especially for areas that require special attention</i>; 11. <i>Assessing the installation of barbed wire at the Station entrance whose locations are prone to demonstration.</i> |

Ranking 6

| | | |
|------------------------|---|--|
| Risiko Risk | Pekerjaan proyek Gedung <i>Transport Hub</i> Dukuh Atas tertunda <i>Postponement of the construction project for Dukuh Atas Transport Hub</i> | |
| Penyebab Causes | Belum tersedianya PKS dengan PD Pasar Jaya, karena belum ada kesepakatan skema bisnis dengan PD Pasar Jaya (Ketetapan Rencana Kota) KRK Dukuh Atas belum tersedia karena belum tersedianya PRK. <i>Agreement with PD Pasar Jaya has not been developed, as there has been no business scheme agreement with PD Pasar Jaya (Urban Planning Provisions) KRK of Dukuh Atas is not available due to the lack of Urban Design Guidelines (PRK).</i> | |
| Dampak Impact | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stigma buruk dari para pemangku kepentingan yang mempengaruhi reputasi MRT Jakarta yang memiliki mandat sebagai pengelola kawasan; 2. Kontraktor terpilih akan melakukan klaim. <p><i>1. Bad stigma from the stakeholders that impacts on the reputation of MRT Jakarta that is mandated as the area developer; 2. Chosen contractor will make a claim.</i></p> | |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi intensif antara MRT Jakarta dengan PD Pasar Jaya untuk segera memfinalkan PKS Skema Bisnis Gedung <i>Transport Hub</i> di lahan Pasar Blora; 2. <i>Hold Commencement</i> kepada kontraktor yang memenangkan tender konstruksi; 3. Terdapat klausul dalam BAB III Ketentuan dan Cara Pasal 18 ayat 3 bahwa pengadaan dapat dibatalkan walaupun sudah dilekuarkannya SPPBJ selama belum tanda tangan kontrak tanpa adanya kewajiban penjelasan alasan kepada peserta/pemenang pengadaan; 4. Berkoordinasi dengan PTSP dan Dinas Citata untuk mendapatkan penetapan KRK sesuai draft PRK; 5. Mencoba mengajukan sidang Andalalin dengan bukti submit perpanjangan KRK; 6. Penyelesaian permohonan SKKA dan Dokumen AMDAL paralel dengan proses penerbitan KRK baru; 7. Penggunaan IMB Pondasi sebagai izin konstruksi pendahuluan sebelum IMB diterbitkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coordinating intensively between the Corporation and PD Pasar Jaya to finalise the Collaboration Agreement for the Business Scheme of Transport Hub Building in Pasar Blora area;</i> 2. <i>Holding Commencement to the contractors that won the construction tender;</i> 3. <i>Stating a clause in CHAPTER III Provisions and Procedures Article 18 Paragraph 3 that procurement can be cancelled despite the issuance of SPPBJ (Letter of Appointment as Provider of Goods/Services) as long as the contract is not signed without the obligation to explain the reasons to the participant/procurement winner;</i> 4. <i>Coordinating with PTSP (One-Stop Integrated Service) and Department of Public Works and Spatial Layout to obtain Urban Planning Provisions (KRK) in line with the Urban Design Guidelines (PRK) draft;</i> 5. <i>Proposing a Traffic Impact Analysis hearing by providing proof of KRK extension submission;</i> 6. <i>Completing SKKA proposal and Environmental Impact Analysis (AMDAL) Document parallel with the issuance process of the new KRK</i> 7. <i>Utilising Building Construction Permit (IMB) of the Foundation as an initial construction permit before the issuance of IMB.</i> |
|--------------------------------|---|---|

| Ranking 7 | |
|----------------------------|---|
| Risiko Risk | Keterlambatan paket pekerjaan CP207 <i>Delay of work package CP207</i> |
| Penyebab Causes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada keputusan penggunaan tipe SAM yang akan digunakan; 2. Terdapat pemenuhan dokumen, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • JICA Concurrence; • Berita Acara Konsensus dari <i>stakeholders</i> untuk penggunaan IP578. 3. Surat Menhub ke BI untuk pengantian SAM dari JAVA menjadi RC-S500 dikarenakan hasil pengujian oleh KCI, didapatkan RC-S500 lebih cepat dalam melakukan transaksi tapping di PG. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>There are no decisions on the type of SAM to be used;</i> 2. <i>There is document fulfillment including:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>JICA Concurrence;</i> • <i>Report of Consensus of the stakeholders to utilise IP578.</i> 3. <i>Letter from the Ministry of Transportation to BI to replace SAM from JAVA to be RC-S500, because according to the testing results by KCI, RC-S500 is faster to carry out tapping transaction in the PG.</i> |
| Dampak Impact | Terhambatnya interoperabilitas dan proses integrasi antar MRTJ dan KCI pada September 2022 <i>Delayed interoperability and integration process between MRTJ and KCI in September 2022</i> |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Mitigasi Mitigation | 1. Bersurat kepada BI dan Kemenhub terkait perubahan jenis SAM dari JAVA menjadi RC-S500; | 1. <i>Sending a letter to BI and Ministry of Transportation concerning the changes of SAM from JAVA to be RC-S500;</i> |
| | 2. Melakukan validasi laporan pengujian RC-S500 dari KCI dengan melakukan pengujian oleh badan independen terhadap tipe SAM RC-S500 dan JAVA. | 2. <i>Validating the report of RC-S500 testing from KCI by carrying out the testing of SAM RC-S500 and JAVA by an independent party;</i> |
| | 3. Mendapatkan kesepakatan dari stakeholders terkait penggunaan IP578 untuk pekerjaan upgrading AFC fase 1; | 3. <i>Obtaining stakeholders' buy-in concerning the utilisation of IP578 for Phase 1 AFC upgrade works;</i> |
| | 4. Melakukan Audiensi ke kementerian Perhubungan terkait ruang lingkup paket pekerjaan CP207 dalam lingkup Loan Agreement IP-578; | 4. <i>Asking for an audience to the Ministry of Transportation concerning the scope of work of CP2017 concerning Loan Agreement IP-578;</i> |
| | 5. Berkoordinasi dengan JICA untuk mendapatkan JICA Concurrence; | 5. <i>Coordinating with JICA to obtain JICA Concurrence;</i> |
| | 6. Melakukan koordinasi secara berkala dengan PT KCI sebagai mitra yang akan melakukan integrasi berupa pembuatan legal documentation seperti NDA dan PKS; | 6. <i>Coordinating frequently with PT KCI as a partner to carry out the integration by drafting legal documents such as NDA and Agreement;</i> |
| | 7. Pembentukan <i>Join Working Group</i> antara MRTJ dan KCI; | 7. <i>Establishment of Joint Working Group between MRTJ and KCI;</i> |
| | 8. Memastikan batasan jangka waktu pekerjaan terkait integrasi antar penyelenggara transportasi; | 8. <i>Ensuring the timeline of works for integration among transportation providers;</i> |
| | 9. Meeting koordinasi dengan pihak PT Jaklingko Indonesia, agar isu <i>interfacing</i> pada CP207 menjadi lebih jelas dan lebih diminimalisir; | 9. <i>Holding a coordinating meeting with PT JakLingko Indonesia so that the interfacing issue for CP207 can be clearer and minimised;</i> |
| | 10. Melakukan <i>update</i> terkait kendala teknis integrasi MRT dan KCI kepada Bank Indonesia, agar mendapatkan perpanjangan waktu untuk proses interoperabilitasnya. | 10. <i>Updating the technical issues on MRT and KCI integration to Bank Indonesia to obtain an extension for the interoperability process.</i> |

Ranking 8

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Risiko Risk | Potensi PSO MRT dibayarkan 50% oleh Pemprov DKI Jakarta <i>Potential MRT PSO to be paid 50% by the Government of DKI Jakarta Province</i> | |
| Penyebab Causes | Menurunnya pendapatan Pemerintah Daerah karena pandemi COVID-19 berkepanjangan di Indonesia. <i>Decreased Regional Government income due to the ongoing COVID-19 pandemic in Indonesia.</i> | |
| Dampak Impact | Kurangnya penerimaan kas (<i>cash inflow</i>) tahun 2020 dari PSO, serta mempengaruhi <i>Profit & Loss</i> Perusahaan. <i>Lack of cash inflow in 2020 from PSO that impact on the Corporate Profit & Loss.</i> | |
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan TGUPP, BPKD & Bappeda dalam mengawal proses APBD Perubahan agar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak diturunkan, sehingga pembayaran subsidi sesuai dengan naskah yang telah ditandatangani; Mengirimkan Surat No. 800/BOD-MRT/IX/2020 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Pemberian Prioritas atas Alokasi Subsidi Transportasi Publik MRT Jakarta pada APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Menerbitkan Surat Edaran No. SE/073/BOD-MRT/XII/2020 sebagai penyesuaian dari Surat SE/068/BOD-MRT/XII/2020 tentang Perubahan RKA Perseroan Tahun 2020 dan Penerapan Pengendalian Biaya (<i>Cost Control</i>); Monitoring harian – mingguan - bulanan dan menyusun usulan perubahan RKA 2020 berkaitan dengan realisasi <i>top line</i>, COGS, OPEX, dan CAPEX agar dapat dilakukan penyesuaian skenario asumsi kinerja korporasi; Melakukan <i>review</i> <i>scenario</i> strategi <i>recovery</i> perusahaan setelah adanya penerapan PSBB Jilid II; Pengakuan piutang yang diperbolehkan Pemprov DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta atas PSO. | <ol style="list-style-type: none"> <i>Coordinating with TGUPP, BPKD, & Bappeda to assist the process of Amendment to Regional Budget so that the Budget Implementation Document (DPA) is not deprioritised, so that the subsidy payment can be in line with the signed draft;</i> <i>Delivering Letter No. 800/BOD-MRT/IX/2020 to the Governor of DKI Jakarta Province concerning the Request to Grant Priority of Subsidy Allocation for MRT Jakarta Public Transportation in the Amendment to Regional Budget of the Government of DKI Jakarta Province;</i> <i>Issuing Circular Letter No. SE/073/BOD-MRT/XII/2020 as an amendment to Letter SE/068/BOD-MRT/XII/2020 concerning Amendment to Corporate Work Plan and Budget (RKA) of 2020 and Implementation of Cost Control;</i> <i>Monitoring daily, weekly, and monthly and preparing an amendment to 2020 RKA concerning the realisation of top line, COGS, OPEX, and XAPEX to adjust Corporate performance assumption scenario;</i> <i>Reviewing the scenario of Corporate recovery strategies after the Second Implementation of PSBB;</i> <i>Disclosure of PSO receivables of the Corporation permitted by the Government of DKI Jakarta Province.</i> |

Ranking 9

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Risiko Risk | Tidak tersedianya lahan (<i>entrance, CT/VT</i>) untuk pembangunan Fase 2 <i>Lack of area (entrance, CT/VT) for Phase 2 construction</i> | |
| Penyebab Causes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa titik lahan yang pemiliknya menolak untuk dibebaskan; 2. Adanya potensi keterlambatan proses pengadaan lahan dampak Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan <i>mun-durnya access date</i> terhadap kontrak; 3. Terdapat lahan yang pada saat ini dalam sengketa. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>There are some areas whose landowners refuse to sell;</i> 2. <i>Potential delayed land acquisition process due to the impact of the pandemic, that postponed the access date to contract;</i> 3. <i>There are lands currently in dispute.</i> | |
| Dampak Impact | Keterlambatan mulainya konstruksi fase 2 <i>Postponed commencement of Phase 2 Constructions</i> | |
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Bank DKI, BPBUMD, dan Dishub terkait masalah sengketa pada lahan Thamrin 10 (Area CP 201 – Stasiun Thamrin); 2. Pihak Dishub akan menyurati pemilik lahan untuk ijin pengukuran, disertai pendampingan lembaga hukum pemerintahan (Area CP 202 – Stasiun Sawah Besar); 3. Pengukuran kembali dengan penyesuaian posisi VT (Area CP 202 – Stasiun Mangga Besar); 4. Bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan, agar proses pengadaan lahan dapat terus berlanjut dan diselesaikan Q1 2021 (Area CP 203 – Stasiun Kota); 5. PT MRT Jakarta bersurat kepada Dinas Perhubungan dan Dinas CKTRP untuk perpanjangan Penlok. Telah dilakukan pengukuran awal bersama Dinas CKTRP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coordinating with Bank DKI, BP BUMD, and Department of Transportation concerning the land dispute in Thamrin 10 Area (CP 201 Area – Thamrin Station);</i> 2. <i>The Department of Transportation to send a letter to the landowner to request permission to measure and assistance from state legal institutions (CP 202 Area – Sawah Besar Station);</i> 3. <i>Re-measuring while adjusting the VT position (CP 202 Area – Mangga Besar Station);</i> 4. <i>Sending a letter to the Head of the Department of Transportation, so that the land acquisition process can be continued and completed in Q1 2021 (CP 203 Area – Kota Station);</i> 5. <i>The Corporation is to send a letter to the Department of Transportation and Department of Public Works, Spatial Planning, and Land to extend Location Determination. Initial Measurement with the Department of Public Works, Spatial Planning, and Land has been carried out.</i> |

Ranking 10

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Risiko Risk | Keterlambatan mulainya pengadaan CP 206 <i>Postponement of the commencement of CP206 procurement</i> | |
| Penyebab Causes | <ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan JICA memberikan <i>concurrency</i> untuk dokumen tender CP 206 karena belum adanya penetapan lokasi depo fase 2, sehingga ruang lingkup dokumen tender CP 206 hanya 7 <i>trainset</i> sesuai dengan ketersediaan stabling di Depo Lebak Bulus dan <i>mainline</i>; • Pengadaan 7 <i>trainset</i> tersebut tidak menarik untuk pasar; • Kontraktor Jepang <i>overload</i> di tahun 2020. • <i>JICA lateness in providing concurrency for the tender document CP 206 is due to the lack of location determination for Phase 2 Depot, so that the scope of document of CP 206 tender is only 7 trainsets according to the stabling availability at Lebak Bulus and main line;</i> • <i>Improvement of 7 trainsets is not attractive for the market;</i> • <i>Overloaded Japanese Contractor in 2020.</i> | |
| Dampak Impact | Keterlambatan mulainya operasional fase 2 <i>Postponed commencement of Phase 2 Operations</i> | |
| Mitigasi Mitigation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan optimasi pengadaan jumlah <i>trainset</i> yang dapat ditampung di Depo Lebak Bulus dan <i>Mainline</i>, yaitu sebanyak 7 <i>trainset</i>; 2. Membuat rencana alternatif bersama OCG, yaitu <i>long contract period</i> (8 tahun) pengadaan sebanyak 14 <i>trainset</i>; 3. Kajian pengadaan <i>rolling stock</i> dari vendor internasional non-Jepang dan <i>risk/mitigation plan</i> yang sedang dilakukan oleh OCG, serta diskusi dengan JICA; 4. Rencana untuk diadakan <i>Market Sounding</i> terhadap vendor <i>Rolling Stock</i> CP206; 5. Menyiapkan bukti formal ketidaktertarikan industri <i>rolling stock</i> di Jepang untuk dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia dan JICA/Pemerintah Jepang agar dibahas dalam level G2G; 6. Merencanakan tender kereta sejumlah kebutuhan kereta Fase 2A & 2B, yaitu sebanyak 14 <i>trainsets</i> dengan memperhatikan durasi kontrak yang panjang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Optimising the number of trainsets to be stored at Lebak Bulus Depot and Mainline of 7 trainsets;</i> 2. <i>Developing an alternative plan with OCG, i.e., long contract period (8 years) for procurement of 14 trainsets;</i> 3. <i>Studying rolling stock procurement study from non-Japanese international vendor and risk/mitigation plan developed by OCG, and in discussion with JICA;</i> 4. <i>Planning to carry out Market Sounding for Rolling Stock CP 206 vendors;</i> 5. <i>Preparing formal proofs of lack of interest of the rolling stock in Japan to be reported to the Government of Indonesia and JICA/Government of Japan to be discussed at G2G level;</i> 6. <i>Planning trainset tender of train requirements for Phase 2A and 2B of 14 trainsets while considering the long duration of the contract.</i> |

PENILAIAN KINERJA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Performance Assessment of GCG Implementation



Direktur Utama Menerima Penghargaan "Trusted Company" pada Acara Corporate Governance Perception Index
The President Director Receiving "Trusted Company" Award at the Corporate Governance Perception Index Event

Untuk mengetahui kualitas hasil tata kelola perusahaan, Perseroan memiliki mekanisme penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara periodik. Penilaian dilakukan melalui 2 model:

1. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan Metode Penilaian BPKP Sebagai BUMD, oleh pihak independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
2. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

To find out the quality of the Corporate Governance, the Corporation employs an assessment mechanism of GCG implementation periodically. The assessment is carried out through 2 models:

1. *Assessment of GCG Implementation based on BPKP Assessment Method as an ROE, by an Independent Party, i.e., DKI Jakarta Province's Representative of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).*
2. *Assessment of Good Corporate Governance Implementation by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).*

Kepatuhan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan *Compliance with the Good Corporate Governance Guidelines*

Sebagai BUMD DKI Jakarta, Perseroan tunduk dan patuh terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pergub tersebut menjadi salah satu dasar penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

As an ROE of DKI Jakarta, the Corporation operates in compliance with the Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally-Owned Enterprise of the Government of DKI Jakarta Province. The Governor Regulation became one of the underlying foundations to implement Good Corporate Governance principles.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh BPKP *Assessment of Good Corporate Governance Implementation by BPKP*

Dasar Penilaian dan Metode

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan setiap tahun, untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkup Perseroan. Penilaian telah dilakukan sejak tahun 2015, menggunakan metode penilaian berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Sejak tahun 2017, penilaian dilakukan secara independen. Perseroan menunjuk BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana penilaian. Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD yang dikembangkan oleh BPKP. Indikator penilaian mencakup 4 (empat) aspek pengujian. Penilaian dilakukan dengan penelusuran kelengkapan dokumen-dokumen serta wawancara penilai kepada beberapa pihak di internal Perseroan. Hasil penilaian menggunakan skor dengan angka maksimal 100 yang disesuaikan dengan poin-poin kriteria.

Bases of Assessment and Methods

Assessment of GCG implementation is carried out every year, to find out the adequacy level of GCG implementation in the Corporation. The assessments have been carried out since 2015 by employing the assessment method based on the Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning the Indicator/Parameter of Assessments and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

Since 2017, the assessments have been carried out independently. The Corporation appoints DKI Jakarta Province's Representative of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to carry out the assessments. The Indicators or Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation for ROE are developed by BPKP. Assessment indicators cover 4 (four) assessment aspects. The assessment is carried out by tracing the completeness of documents and interviews by the assessor to various parties in the Corporation. The assessment result is a score with a maximum score of 100 adjusted to the points of criteria.

Parameter Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berbasis Penilaian oleh BPKP
The Composition of GCG Implementation Parameters Based on Assessment by BPKP

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Komitmen | <i>Commitment</i> |
| 2 | Kebijakan | <i>Policy</i> |
| 3 | Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Komite Dewan Komisaris • Direksi • Satuan Pengawasan Internal • Sekretaris Perusahaan | <i>GCG Participants</i> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders • Board of Commissioners • Committees of the Board of Commissioners • Directors • Internal Audit Unit • Corporate Secretary |
| 4 | Pengungkapan Informasi | <i>Information Disclosure</i> |

Kualifikasi Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Qualification of the GCG Application Quality

| | | |
|-------------|--------|-----------|
| Sangat Baik | 90-100 | Very Good |
| Baik | 75-90 | Good |
| Cukup Baik | 60-75 | Fair |
| Kurang Baik | 50-60 | Poor |
| Tidak Baik | 0-50 | Very Poor |

Proses dan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan Tahun Buku 2020

Process and Results of Good Corporate Governance Implementation Assessment in Fiscal Year 2020

Evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik periode Tahun Buku 2020 dilakukan dengan metode penilaian yang disusun dan dikembangkan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sesuai Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. S- 1516/PW09/4.2/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang *Assessment* Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT MRT Jakarta (Perseroda).

The evaluation of GCG implementation in the Fiscal Year 2020 was carried out by employing the assessment method as developed by DKI Jakarta Representative of BPKP, in accordance with the Letter of Duty of the Head of DKI Jakarta Representative of BPKP No. S-1516/PW09/4.2/2020 dated December 3, 2020 concerning the Assessment of GCG Implementation in PT MRT Jakarta (Perseroda).

Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020, Perseroan memperoleh skor sebesar 90,13 dengan predikat kualifikasi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan "Sangat Baik", meningkat 2,8 poin dari skor penilaian tahun 2019 yang tercatat sebesar 87,33 dengan predikat kualifikasi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan "Baik".

Based on the assessment results of GCG Implementation in the Fiscal Year 2020, the Corporation obtained the score of 90.13 with qualification of GCG implementation quality of "Very Good", increased by 2.8 points from the assessment score in 2019 that was recorded at 87.33 with the qualification of GCG implementation quality of "Good".

Berdasarkan hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik tahun 2020, terjadi peningkatan pada hampir seluruh aspek yaitu aspek Komitmen, pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Komite dewan Komisaris Direksi, Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen Perseroan untuk terus melakukan perbaikan atas aspek tata kelola perusahaan.

Based on the results of the GCG assessment in 2020, the score of almost every aspect increased, i.e., for the aspects of Commitment, Shareholder, Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committee, Board of Directors, Internal Audit Unit, and Corporate Secretary. It was due to the commitment of the Corporation to constantly improve corporate governance aspects.

Tabel Hasil Penilaian Tata kelola Perusahaan Yang Baik
Results of Good Corporate Governance Assessment

| | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--|
| Komitmen | 84,44 | 87,33 | 91,23 | <i>Commitment</i> |
| Kebijakan | 93,94 | 97,49 | 89,97 | <i>Policy</i> |
| Pemegang Saham | 89,35 | 88,11 | 91,31 | <i>Shareholders</i> |
| Dewan Komisaris | 78,71 | 82,23 | 83,74 | <i>Board of Commissioners</i> |
| Komite dewan Komisaris | 84,64 | 79,73 | 93,13 | <i>Board of Commissioners' Committee</i> |
| Direksi | 78,85 | 85,14 | 92,68 | <i>Board of Directors</i> |
| Satuan Pengawas Internal | 82,3 | 83,22 | 85,24 | <i>Internal Audit Unit</i> |
| Sekretaris Perusahaan | 90,96 | 93,88 | 94,96 | <i>Corporate Secretary</i> |
| Pengungkapan | 91,07 | 94,25 | 95,36 | <i>Disclosure</i> |

Perseroan mencatat, dari hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik tahun 2020 juga ada penurunan untuk aspek Kebijakan dari 97,49 pada tahun 2019 menjadi 89,97. Hal ini dipengaruhi terdapatnya kebijakan terkait Anak usaha dan/atau Perusahaan Patungan yang masih dalam tahap perancangan /drafting, dan terdapat juga Kebijakan yang perlu diperbaharui. Perseroan menyikapi hal ini dengan melakukan upaya untuk perbaikan, yakni:

1. Memperbaharui dan/atau memutakhirkan pedoman Tata Kelola Perusahaan;
2. Memperbaharui dan/atau memutakhirkan Pedoman Board Manual;
3. Mengesahkan pedoman terkait Tata Kelola Perusahaan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
4. Memperbaharui dan/atau memutakhirkan Pedoman Umum Audit Internal.

The Corporation recorded that based on the results of the GCG assessment in 2020, the score for Policy aspect decreased from 97.49 in 2019 to be 89.97. It is influenced by the policy concerning Subsidiaries and/or Joint Ventures that were in the drafting stage, and there are some Policies to be updated. The Corporation follows up on this matter by taking corrective actions as follows:

1. *Updating the Guidelines of Corporate Governance;*
2. *Updating the Board Manual;*
3. *Ratifying guidelines of Subsidiary and/or Joint Venture Corporate Governance;*
4. *Updating the General Guidelines of Internal Audit.*

Proses dan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020*Process and Results of GCG Implementation Assessment in Fiscal Year 2020*

| Jenis Penilaian | Penilaian Assessment | Type of Assesment |
|----------------------|--|----------------------------|
| Penilai | BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No.S-1515/PW09/4.2/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>DKI Jakarta Provincial BPKP in accordance with the Letter of Duty of the Head of BPKP DKI Jakarta Representative No. S-1515 / PW09 / 4.2 / 2020 dated December 3, 2019 concerning Assessment of GCG Implementation in PT MRT Jakarta (Perseroda)</i> | Assessor |
| Periode Penerapan | 1 Januari-31 Desember 2020 <i>January 1 - December 31, 2020</i> | Application Period |
| Tahun Ukur | Tahun Buku 2020 <i>2020 Fiscal Year</i> | Measure Year |
| Waktu Pengukuran | 4 Desember 2020–29 Januari 2021 <i>December 4, 2020 - January 29, 2021</i> | Time of Measurement |
| Waktu Terbit Laporan | | Date of Report Publication |

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Perbandingannya dengan Pencapaian Tahun 2019*Assessment Results of GCG Implementation in Fiscal Year 2020 Compared to the Achievement in Fiscal Year 2019*

| Aspek Pengujian Assessment Aspect | 2020 | | | | 2019 |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|
| | Bobot Weight | Capaian Aktual Actual Achievement | Capaian Achievement (%) | Kualifikasi Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Qualification of GCG Implementation Quality | Capaian Tahun Buku 2019 Achievement of Fiscal Year 2019 |
| Komitmen <i>Commitment</i> | 15,00 | 13,68 | 91,23 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 13,10 |
| Kebijakan <i>Policy</i> | 10,00 | 8,99 | 8,99 | Baik <i>Good</i> | 9,75 |
| Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>GCG Participation</i> | | | | | |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | 24,00 | 21,91 | 91,31 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 21,15 |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | 18,00 | 15,07 | 83,74 | Baik <i>Good</i> | 14,80 |
| Komite Dewan Komisaris <i>Committees of Board of Commissioners</i> | 5,00 | 4,66 | 93,13 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 3,99 |
| Direksi <i>Directors</i> | 14,00 | 12,98 | 92,68 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 11,92 |
| Satuan Pengawasan Internal <i>Internal Audit Unit</i> | 5,00 | 4,26 | 85,24 | Baik <i>Good</i> | 4,16 |
| Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i> | 4,00 | 3,79 | 94,96 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 3,75 |
| Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i> | 5,00 | 4,768 | 95,36 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 5,00 |
| Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i> | 100,00 | 90,13 | 90,13 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | 87,33 |

Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik BPKP 2020*Recommendations of the Assessment of GCG Implementation in 2020*

| Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2020</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Actions That Have Been Done / Follow-Up Plans</i> |
|---|--|
| Kebijakan <i>Policies</i> | |
| <p>Menyempurnakan Pedoman tata kelola perusahaan yang baik dengan menambahkan muatan Proses Penunjukan dan peran Auditor Eksternal. <i>Improving GCG Guidelines by adding a section on the Appointment Process and roles of External Auditor.</i></p> | <p>Pedoman tata kelola perusahaan yang baik disempurnakan dengan menambahkan ketentuan Proses Penunjukan dan Peran Auditor Eksternal. <i>Improved GCG Guidelines by adding the Terms of Appointment Process and Roles of External Auditor.</i></p> |
| <p>Menyempurnakan <i>Board Manual</i> dengan menambahkan materi Opini atas Laporan Keuangan. <i>Improving Board Manual a section on opinion of Opinion for Financial Statements.</i></p> | <p><i>Board Manual</i> disempurnakan dengan menambahkan materi Opini atas Laporan Keuangan. <i>Improved Board Manual by adding a section on Opinion of Financial Statements.</i></p> |
| <p>Menyempurnakan Kebijakan Pengelolaan hubungan Induk dengan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan dengan menambahkan materi tata cara pembubaran (likuidasi) anak perusahaan. <i>Improving Policy concerning Relationship Management between the Parent Corporation and Subsidiary or Joint Venture by adding content concerning procedures of subsidiary liquidation</i></p> | <p>Materi tata cara pembubaran (likuidasi) anak perusahaan disempurnakan dalam kebijakan Pengelolaan hubungan Induk dengan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan. <i>Improved the procedures of subsidiary liquidation in policy concerning Relationship Management between Parent Corporation and Subsidiary or Joint Venture.</i></p> |
| Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>GCG Participants</i> | |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | |
| <p>Disarankan kepada Pemegang Saham untuk menyempurnakan Mekanisme dan pelaksanaan penilaian kinerja direksi oleh Pemegang Saham masih dilakukan secara kolegiat, belum secara individual. <i>It is recommended to Shareholders to improve the Mechanism and implementation of the Board of Directors' performance assessment by Shareholders that is still carried out collectively instead of individually.</i></p> | <p>Mekanisme dan pelaksanaan penilaian kinerja direksi oleh Pemegang Saham secara individual akan disempurnakan oleh Pemegang Saham. <i>Mechanism and implementation of Board of Directors' performance assessment individually by Shareholders will be improved by Shareholders.</i></p> |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | |
| <p>Rencana Kerja Tahunan Dekom agar disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham. <i>Annual Work Plan of BoC to be delivered in writing to Shareholders.</i></p> | <p>Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris akan disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan diterapkan ditahun 2021. <i>Annual Work Plan of BoC is delivered in writing to Shareholders starting 2021.</i></p> |
| <p>Dewan Komisaris belum membuat kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan anak usaha. <i>The Board of Commissioners has not formulated a policy concerning monitoring and advising of subsidiary management.</i></p> | <p>Dewan Komisaris akan memberikan arahan dan nasihat terhadap pengelolaan anak usaha. <i>The Board of Commissioners will provide directions and advice concerning subsidiary management.</i></p> |
| <p>Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja secara self-assessment. <i>The Board of Commissioners has not carried out performance self-assessment.</i></p> | <p>Dewan Komisaris akan melakukan penilaian kinerja secara self-assessment. <i>The Board of Commissioners will carry out a performance self-assessment.</i></p> |

| Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2020</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Actions That Have Been Done / Follow-Up Plans</i> |
|--|---|
| Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Committees</i> | |
| <p>Dewan Komisaris agar menginstruksikan seluruh Komite Dewan Komisaris untuk melakukan revisi/pemutakhiran Program kerja tahunan Komite Audit. Program kerja tahunan Komite Audit belum sepenuhnya memuat telaah untuk Prosedur Reviu yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.</p> <p><i>The Board of Commissioners to instruct all Committees under the Board of Commissioners to revise/update the Annual Work Program of the Audit Committee. The Annual Work Plan of Audit Committee has not covered adequate review for the Review Procedure of all information released by the Corporation.</i></p> | <p>Program kerja tahunan Komite Audit akan disempurnakan.</p> <p><i>The annual work programme of the Audit Committee will be improved.</i></p> |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | |
| <p>Menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan dengan menambahkan proyeksi keuangan BUMD dan Anak Perusahaan.</p> <p><i>Improving Annual Work Plan by adding Financial Projection of ROE and Subsidiary.</i></p> | <p>Menyempurnakan Rencana Kerja tahunan dengan menambahkan proyeksi keuangan BUMD dan Anak Perusahaan.</p> <p><i>Improving Annual Work Plan by adding Financial Projection of ROE and Subsidiary.</i></p> |
| Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit <i>Internal Audit Unit</i> | |
| <p>Pedoman Umum Audit Internal Tahun 2020 belum dimutakhirkan.</p> <p><i>General Guidelines of Internal Audit 2020 has not been updated</i></p> | <p>Pedoman Umum Audit Internal akan dimutakhirkan.</p> <p><i>General Guidelines of Internal Audit will be updated.</i></p> |
| Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i> | |
| <p>Kebijakan SOP LHKPN belum diunggah dalam website Perseroan.</p> <p><i>Policy concerning LHKPN SOP has not been uploaded in the Corporation website.</i></p> | <p>Kebijakan SOP LHKPN akan diunggah dalam website Perseroan.</p> <p><i>Policy concerning LHKPN SOP has been uploaded in the Corporation website.</i></p> |

Perkembangan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perseroan

Secara umum, penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perseroan terus memperlihatkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai rekomendasi yang disampaikan dalam proses penilaian, sehingga hal-hal yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil penilaian menjadi masukan yang sangat penting bagi Perseroan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Development of Assessment Results of GCG Implementation of the Corporation

In general, GCG implementation in the Corporation shows constant improvement. It is reflecting the strong commitment of the Corporation to implement GCG principles based on the recommendations as stated in the assessment process, so that issues that require improvement can be identified. The assessment results become a crucial input for the Corporation in the decision-making process in the future.

Perkembangan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan *Development of Assessment Results of GCG Implementation*

| Tahun Ukur Penilaian* <i>Measurement Year*</i> | Skor Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>GCG Assessment Score</i> | Kategori <i>Category</i> | Jenis Penilaian dan Pelaksanaan <i>Type of Assessment & Implementation</i> |
|---|--|------------------------------|--|
| 2020 | 90,13 | Sangat Baik <i>Very Good</i> | |
| 2019 | 87,33 | Baik <i>Good</i> | Penilaian; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>Assessment: BPKP DKI Jakarta Province Representative</i> |
| 2018 | 85,14 | Baik <i>Good</i> | |
| 2017 | 80,45 | Baik <i>Good</i> | |
| 2016 | 71,20 | Baik <i>Good</i> | |

*) Sejak tahun 2017 penilaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan menggunakan parameter yang disusun oleh BPKP. Hal ini berbeda dengan tahun 2015 dan 2016, dimana parameter yang digunakan adalah Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

*) Since 2017, the GCG assessment has been carried out using parameters compiled by BPKP. This is different from 2015 and 2016, during which the parameter used was the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012.

Pencapaian Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 2016 - 2020 *Achievement of Assessment Results of GCG Implementation in 2016 – 2020*

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 65,79 | 71,2 | 80,45 | 85,14 | 87,33 | 90,13 |

Penilaian Index Persepsi Tata Kelola *Corporate Governance Perception Index Assessment*

Pada tahun 2020, Perseroan melanjutkan upaya peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan melakukan Penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola, berdasar *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) untuk Tahun Buku 2019.

Riset dan pemeringkatan oleh IICG akan melihat implementasi tata kelola perusahaan dari perspektif yang berbeda, dengan menggunakan kerangka Struktur Governansi, Proses Governansi dan Hasil Governansi. Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan istilah "Terpercaya".

In 2020, the Corporation carried out efforts to increase the level of GCG implementation by conducting a Governance Perception Index Assessment based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) from the Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) for the Fiscal Year 2019.

The research and ranking by IICG will show the implementation of corporate governance from a different perspective, by using the framework of Governance Structure, Governance Process, and Governance Results. The results of the GCPI Assessment are in the form of score ranges achieved by the participants with categorisation of GCG implementation quality level using the term "Trusted".

| Aspek Penilaian CGPI <i>CGPI Assessment Aspects</i> | | |
|--|---|--|
| Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i> | Proses Tata Kelola <i>Governance Process</i> | Hasil Tata Kelola <i>Governance Results</i> |
| Kualifikasi Indeks Persepsi Tata Kelola <i>Qualification of Corporate Governance Perception Index</i> | | |
| Sangat Terpercaya | 85,00-100% | <i>Very Trusted</i> |
| Terpercaya | 70,00-84,99% | <i>Trusted</i> |
| Cukup Terpercaya | 55,00-69,99% | <i>Fairly Trusted</i> |

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2020 dan Rekomendasi serta Tindak Lanjutnya

Hasil penilaian CGPI tahun 2020 menunjukkan perolehan skor 82,98 dari skala 100, dengan kategori "Terpercaya". Pencapaian tersebut meningkat dibanding penilaian tahun 2019 sebesar 80,47 dari skala 100 dengan kategori "Terpercaya".

Dari penilaian yang dilaksanakan, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkup Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di lingkup Perseroan.

Results of CGPI Assessment in 2020 and Recommendation and Follow-Up

The result of the GCPI assessment in 2020 showed the a score of 82.98 out of 100, with the category of "Trusted". The achievement underwent improvement compared to the achievement in 2019 with a score of 80.47 out of 100 with the category "Trusted".

Based on the assessment, there were several recommendations from IICG concerning GCG implementation in the Corporation. The recommendations will be an input for improvement whose implementation is to be followed up in the governance implementation in the Corporation.

Hasil Penilaian Assessment Results

| Aspek dan Indikator <i>Aspect and Indicator</i> | Bobot <i>Weight</i> | Nilai Perseroan <i>Company Value</i> |
|--|------------------------|---|
| Aspek Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i> | 27,10 | 22,52 |
| Aspek Proses Tata Kelola <i>Governance Process</i> | 36,31 | 30,06 |
| Aspek Hasil Tata Kelola <i>Governance Result</i> | 36,59 | 30,40 |
| Nilai Akhir <i>Final Score</i> | 100,00 | 82,98 |

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Penilaian CGPI TAHUN 2020 *CGPI Recommendations and Follow-Up Actions in 2020*

| Hasil Rekomendasi <i>Recommendation Results</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Implemented / Follow-Up Plan</i> |
|---|---|
| Aspek Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure Aspect</i> | |
| Perseroan perlu mempertimbangkan dan merespons isu keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>The Corporation must consider and respond to the issues of gender diversity in the structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i> | Struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. <i>The structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the sole right of the Shareholders.</i> |
| Perseroan perlu mempertimbangkan keseimbangan komposisi anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Independen . <i>The Corporation must consider the balance of composition between the members of the Board of Commissioners and Independent Commissioners</i> | Komposisi anggota Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. <i>The composition of the members of the Board of Commissioners is the sole right of the Shareholders.</i> |
| Perseroan perlu menetapkan Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit. <i>The Corporation must establish an Independent Commissioner as the head of Audit Committee.</i> | Komposisi anggota Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. <i>The composition of the members of the Board of Commissioners is the sole right of the Shareholders.</i> |
| Perseroan perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis Perseroan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi. <i>The Corporation must design organisational structure in line with the Corporate business plan and fulfil the vacant formation of functional structure as a Director responsibility.</i> | Perseroan telah merancang struktur organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis Perseroan. <i>The Corporation has designed an organisational structure that is in line with the Corporation business plan.</i> |

| Hasil Rekomendasi <i>Recommendation Results</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Implemented / Follow-Up Plan</i> |
|--|---|
| Aspek Proses Tata Kelola <i>Governance Process Aspect</i> | |
| <p>Perseroan perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala terkait pelaksanaan tugas secara individu dan kolektif.</p> <p><i>The Corporation must develop a performance evaluation mechanism of the Board of Directors and the Board of Commissioners frequently concerning individual and collective implementation of duties.</i></p> | <p>Rencana Tindak Lanjut: menyusun dan menetapkan mekanisme evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><i>Follow-up Plan: Developing and establishing performance evaluation mechanism of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko sehubungan dengan peningkatan risiko dari perubahan teknologi informasi di eksternal dan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional Perseroan.</p> <p><i>The Corporation must strengthen and optimise the effectiveness of the risk management system in relation to the increasing risk and external information technology development as well as the increasing information technology utilisation in the operation of the Corporation.</i></p> | <p>Perseroan telah memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko sehubungan dengan peningkatan risiko dari perubahan teknologi informasi.</p> <p><i>The composition of the members of the Board of Commissioners is the sole right of the Shareholders.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengoptimalkan mekanisme kepatuhan di Perseroan dengan mengembangkan sistem manajemen kepatuhan yang sesuai dengan standar internasional SNI ISO 19600:2014 Sistem Manajemen Kepatuhan.</p> <p><i>The Corporation must optimise compliance mechanism of the Corporation by developing compliance management system in line with the international standards of SNI ISO 19600:2014 Compliance Management System.</i></p> | <p>Perseroan akan mengoptimalkan mekanisme kepatuhan di Perseroan dengan mengembangkan sistem manajemen kepatuhan.</p> <p><i>The Corporation has strengthened and optimized the effectiveness of risk management system in relation with the increasing risk and development of information technology.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengoptimalkan kebijakan, pedoman, sistem dan mekanisme anti fraud diantaranya terkait pencegahan, deteksi, dan investigasi terjadinya fraud, serta internalisasi dan sosialisasinya.</p> <p><i>The Corporation must optimise anti-fraud policies, guidelines, systems, and mechanisms including the prevention, detection, and investigation of fraud as well as the internalisation and dissemination.</i></p> | <p>Pengoptimalan telah dilakukan dengan pemutakhiran kebijakan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan Perseroan.</p> <p><i>Optimisation has been carried out by updating the policies and dissemination to all employees of the Corporation.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu menetapkan kaderisasi pada setiap jabatan manajerial terdiri dari 3 (tiga) penerus (<i>successor</i>) untuk mengoptimalkan kebutuhan sumber daya manusia Perseroan.</p> <p><i>The Corporation must establish regeneration of each managerial position, consisting of 3 (three) successors to optimise the needs of Corporation human capital.</i></p> | <p>Kebijakan kaderisasi pada setiap jabatan manajerial terdiri dari 3 (tiga) penerus akan disesuaikan dengan strategi dan kebutuhan Perseroan.</p> <p><i>Regeneration policy for each managerial position consisting of 3 (three) successors will be aligned with the strategy and requirements of the Corporation.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis bakat (<i>talent</i>) dengan meningkatkan kualitas kompetensi personal SDM serta meningkatkan jabatan fungsional yang sudah dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi untuk mendukung strategi bisnis Perseroan.</p> <p><i>The Corporation must optimise talent-based human capital management by improving the competency quality of human capital personnel and improving functional positions supported by competency certification to support the Corporation business strategy.</i></p> | <p>Divisi Human Capital telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia berbasis bakat (<i>talent</i>).</p> <p><i>Human Capital Division has carried out talent-based human capital management.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme operasional yang unggul (<i>operational excellence</i>) yang dapat mendukung keunggulan bersaing Perseroan agar dapat tumbuh berkelanjutan.</p> <p><i>The Corporation must develop operational excellence system and mechanisms to support the competitive advantages of the Corporation for sustainable improvement.</i></p> | <p>Perseroan senantiasa akan mengembangkan sistem dan mekanisme operasional yang unggul (<i>operational excellence</i>).</p> <p><i>The Corporation will constantly develop operational excellence system and mechanisms.</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi <i>Recommendation Results</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Implemented / Follow-Up Plan</i></p> |
|--|---|
| <p>Perseroan perlu mengembangkan dan meningkatkan penerapan tata kelola teknologi informasi serta mekanisme evaluasi dan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi Perseroan secara berkala <i>The Corporation must develop and improve the implementation of information technology governance as well as evaluation and measurement mechanism of Corporation information technology maturity frequently.</i></p> | <p>Perseroan senantiasa akan mengembangkan dan meningkatkan penerapan tata kelola teknologi informasi. <i>The Corporation will constantly develop and improve the implementation of information technology governance.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengembangkan program-program keunggulan bersaing berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala <i>The Corporation must develop competitive advantage programmes based on and integrated with GCG principles as well as the frequent monitoring and evaluation.</i></p> | <p>Perseroan senantiasa akan mengembangkan program-program keunggulan bersaing berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. <i>The Corporation will constantly develop and improve the implementation of information technology governance based on good corporate governance principles.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengembangkan pedoman dan kebijakan pengelolaan inovasi yang bernilai tambah di semua bidang (inovasi produk, inovasi proses bisnis, inovasi organisasi, dll). <i>The Corporation must develop guidelines and policies concerning value-adding innovation management in all sectors (product innovation, business process innovation, organisation innovation, etc.).</i></p> | <p>Penyusunan Pedoman dan kebijakan pengelolaan inovasi telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan bisnis Perseroan. <i>The Development of Guidelines and Policies concerning innovation has been carried out based on the requirements and business directives of the Corporation.</i></p> |
| <p>Aspek Hasil Tata Kelola <i>Governance Results Aspect</i></p> | |
| <p>Dari tren kinerja keuangan Perseroan selama beberapa tahun terakhir didapati mengalami tren yang dinamis sehingga Perseroan harus selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis. <i>Based on the financial performance trend of the Corporation during the las years, there is a dynamic trend so that the Corporation must maintain the principle of prudence and implementation of structured and systematic risk management.</i></p> | <p>Perseroan senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis. <i>The Corporation will constantly maintain the principle of prudence and structure and systematic risk management.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mempertimbangkan pengembangan pengukuran terkait penciptaan nilai tambah ekonomis perusahaan (<i>economic value added</i>) dalam evaluasi kinerja Perseroan untuk melihat nilai keuntungan ekonomis sebenarnya yang dihasilkan oleh Perseroan. <i>The Corporation must consider improvement of measurement of the generation of economic value added to the evaluation of Corporation performance to observe the true economic value generated by the Corporation.</i></p> | <p>Pengembangan pengukuran terkait penciptaan nilai tambah ekonomis perseroan (<i>economic value added</i>) akan dilakukan sesuai dengan kebijakan bisnis Perseroan. <i>Improvement of measurement of the generation of economic value added will be carried out based on the business policies of the Corporation.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pemantapan budaya Perseroan serta evaluasi pengukuran implementasi budaya perusahaan. <i>The Corporation must develop Corporation culture consolidation system and mechanism and evaluation of Corporate culture implementation assessment.</i></p> | <p>Perseroan telah menetapkan kebijakan untuk pemantapan budaya Perseroan yang diantaranya terdapat didalam Pedoman Etika dan Perilaku. <i>The Corporation has established policies for Corporate culture consolidation including the Code of Conduct.</i></p> |
| <p>Perseroan perlu meningkatkan pengembangan budaya risiko kepada semua anggota perusahaan hingga memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang memperhitungkan risiko pada setiap peluang dan ketidakpastian yang dihadapinya. <i>The Corporation must improve risk management development to everyone in the Corporation to realise the mindset, behaviour, and habits that consider risks at every opportunity and the uncertainty that is faced.</i></p> | <p>Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait Risiko. <i>The Corporation has established policies concerning Risks.</i></p> |

Perkembangan Nilai CGPI

Development of CGPI Score

Hasil Penilaian CGPI
Results of CGPI Assessment

| Tahun Year | Aspek Penilaian Assessment Aspect | | | | |
|---------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------|
| | Aspek Struktur Tata Kelola Aspect of Governance Structure | Aspek Proses Tata Kelola Aspect of Governance Process | Aspek Hasil Tata Kelola Aspect of Governance Results | Nilai Akhir Final Score | Kategori Category |
| 2020 | 22,52 / 27,10 | 30,06 / 36,31 | 30,40 / 36,59 | 82,98 / 100 | Terpercaya Trusted |
| 2019 | 28,02 / 32,72 | 26,03 / 33,64 | 26,42 / 33,64 | 80,47 / 100 | Terpercaya Trusted |

AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

Corporate Information and Data Access

Perseroan memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data Perseroan melalui situs www.jakartamrt.co.id. Informasi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs Perseroan juga merupakan salah satu upaya dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi.

Selain melalui situs web, Perseroan juga memiliki Pusat Pelayanan Informasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses melalui laman ppid.jakartamrt.co.id.

Untuk memperoleh informasi dari Perseroan, publik juga dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT MRT Jakarta (Perseroda), pada alamat berikut:

The Corporation provides ease of access for the stakeholders to Corporation information and data through the website www.jakartamrt.co.id. The information is presented in Indonesian and English. It aims to share Corporation information with the public and as an effort to implement GCG practices and transparency.

Besides the website, the Corporation operates the Information Service Centre, managed by the Information and Documentation Manager that can be accessed through the website ppid.jakartamrt.co.id.

To obtain Corporation information, the public can contact Corporate Secretary at the Headquarters of PT MRT Jakarta (Perseroda) through the address as follows:



PT MRT JAKARTA (Perseroda)
Wisma Nusantara, 21-23th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA



(62)21 3906454



jakartamrt.co.id



(62)21 3155846



1500 332 (24Jam)

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perseroan Untuk Pihak Eksternal

Corporate Information and Data Access Governance for External Parties

Pengelolaan Web

Perseroan telah memiliki web resmi yang menyediakan berbagai informasi, antara lain profil perseroan, visi dan misi, bidang usaha, informasi keuangan, berita terbaru, tanggung jawab sosial perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

Situs web resmi Perseroan juga diperuntukan bagi para pengguna jasa MRT Jakarta melalui penyediaan fitur layanan rencana perjalanan, info jadwal kereta, daftar stasiun, daftar retail stasiun, promo, hingga peta lokalitas di sekitar Stasiun MRT Jakarta.

Secara berkala Perseroan memperbarui situs web dengan informasi terbaru kepada publik. Web Perseroan juga menyediakan nomor kontak, serta alamat surat elektronik dan pos yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Jejaring Sosial Perseroan

Perseroan juga memperhatikan perkembangan teknologi dalam berkomunikasi, salah satunya melalui media sosial. Media sosial dibuat sebagai salah satu alat komunikasi secara daring yang digunakan sebagai wadah interaksi dengan pemangku kepentingan dan sebagai alat komunikasi dalam penyampaian informasi terkini tentang perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta, info karier, edukasi penggunaan MRT Jakarta, sosialisasi budaya transportasi publik hingga berita terkini lainnya.

Media sosial yang dimiliki oleh Perseroan sangat beragam, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan yang terbaru pada tahun 2020 Perseroan membuka akun Tik Tok sebagai kanal media sosial untuk menarik perhatian lebih banyak audiens. Disamping itu, karakteristik dan audiens yang berbeda-beda dari setiap media sosial juga menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk memiliki beragam media sosial.

Website Management

The Corporation has set up an official website that provides various information such as Corporation profile, vision and missions, business sector, financial information, latest news, corporate social responsibilities, information transparency, and others.

The Corporation official website is presented to the passengers of MRT Jakarta service as well, as it provides route planner, train schedule, lists of stations, list of retails at stations, promotions, and locality map around MRT Jakarta stations.

The Corporation periodically updates the website with the latest information for the public. The Corporation website also states contact number and email and postal address that can be leveraged to communicate with the stakeholders.

Corporation Social Network

The Corporation is well informed of technology development in communication including social media. Social media accounts are set up as a way to interact with stakeholders and to communicate the latest information concerning the construction progress of MRT Jakarta project, career information, education for MRT Jakarta users, dissemination of public transportation culture, and other latest news.

The Corporation owns various social media, such as Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, and in 2020, the Corporation set up its latest social media account on TikTok due to the platform's high volume of users. In addition, the diverse characteristics and audience of each social media platform are considered by the Corporation to set up various social media accounts.

Jejaring Sosial Perseroan

Corporation Social Network



@mrtjkt



@mrtjakarta



MRT Jakarta



MRTv



jakartamrt.co.id



@mrtjakarta

Siaran Pers/Rilis Media dan Hubungan Media

Perseroan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi kepada khalayak. Informasi mengenai siaran pers/rilis media pada tahun 2020, lihat <https://jakartamrt.co.id/siaran-pers>.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang didistribusikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan untuk memberikan gambaran tentang upaya keberlanjutan Perseroan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kunjungan Lapangan

Perseroan juga memberikan akses bagi kegiatan kunjungan lapangan atau *site visit* sebagai bentuk edukasi moda transportasi MRT Jakarta kepada para pemangku kepentingan. *Site visit* diharapkan dapat memberikan perspektif yang menyeluruh terkait MRT Jakarta, mulai dari pendekatan studi, pembangunan tata kota, ataupun pembentukan perilaku masyarakat terhadap layanan publik. Selama tahun 2020, Perseroan telah menerima 16 kali kunjungan publik ke fasilitas milik PT MRT Jakarta (Persero), baik dari pemerintah, organisasi, instansi, komunitas maupun akademisi.

Press Releases/Media Releases and Media Relations

The Corporation utilises the mass media to spread information to the wider public. Information concerning the press releases/media releases in 2020 is presented in <https://jakartamrt.co.id/siaran-pers>.

Annual Report and Sustainability Report

The Corporation issues the Annual Report which is distributed to the shareholders and other stakeholders. In addition, the Corporation issues its Sustainability Report to provide an overview of the sustainable efforts carried out by the Corporation in economic, social, and environmental aspects.

Site Visit

The Corporation allows access during site visits as a form of education concerning MRT Jakarta as a mode of transport to the stakeholders. Site visits are expected to provide a comprehensive perspective on MRT Jakarta, from study approach, city planning, and formation of public behaviour towards public services. In 2020, the Corporation received 16 site visits of facilities of the Corporation by the public, including the government, organisations, institutions, communities, and academicians.



Kunjungan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Stasiun Bundaran HI
Indonesian Transportation Minister, Budi Karya Sumadi's Visit to Bundaran HI Station

Kunjungan Lapangan Publik Selama Tahun 2020 ke Fasilitas Milik PT MRT Jakarta (Perseroda)
Site-Visit to Public Field in 2020 to Facilities of PT MRT Jakarta (Perseroda)

| No | Acara Event | Hari/Tanggal Date | Tempat Location |
|-----------------------------|---|---|---|
| JANUARI JANUARY | | | |
| 1 | Kunjungan dari Sekolah Politeknik Keuangan Negara STAN <i>Site visit from Indonesian State College of Accountancy (STAN)</i> | Kamis, 9 Januari 2020 <i>Thursday, January 9, 2020</i> | Depo MRT Lebak Bulus <i>MRT Depot, Lebak Bulus</i> |
| 2 | Kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang <i>Site visit from the Minister of Foreign Affairs of Japan</i> | Jumat, 10 Januari 2020 <i>Friday, January 10, 2020</i> | Stasiun Bundaran HI - Stasiun ASEAN <i>Bundaran HI Station – ASEAN Station</i> |
| 3 | Kunjungan dari DPD – UI <i>Site visit from DPD -UI</i> | Selasa, 14 Januari 2020 <i>Tuesday, January 14, 2020</i> | Depo Lebak Bulus MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Depot, Lebak Bulus</i> |
| 4 | Kunjungan dari Politeknik Perkeretaapian Madiun <i>Site visit from Polytechnic of Railways, Madiun</i> | Kamis, 16 Januari 2020 <i>Thursday, January 16, 2020</i> | Depo Lebak Bulus MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Depot, Lebak Bulus</i> |
| FEBRUARI FEBRUARY | | | |
| 5 | Kunjungan kerja Kepala BP BUMD dan Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan BP BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Site visit from the Head of BP BUMD and Head of Transportation, Property, and Finance Business of BP BUMD, Government of DKI Jakarta Province</i> | Selasa, 18 Februari 2020 <i>Tuesday, February 18, 2020</i> | Depo Lebak Bulus MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Depot, Lebak Bulus</i> |
| MARET MARCH | | | |
| 6 | Kunjungan kerja BP BUMD, Inspektorat, Bappeda, BPKD, BPAD, Dishub, Biro Perekonomian, Biro Hukum dan TGUPP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Site visit from BP BUMD, Insprecate, Bappeda, BPKD, BPAD, Dept. of Transportation, Economic Bureau, Legal Bureau, and TGUPP of the Government of DKI Jakarta Province</i> | Kamis, 5 Maret 2020 <i>Thursday, March 5, 2020</i> | Stasiun MRT Bundaran HI, Blok A Fatmawati, Lebak Bulus <i>Bundaran HI, Blok A, Fatmawati, Lebak Bulus MRT Stations</i> |
| MEI MAY | | | |
| 7 | Kunjungan Kerja Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur DKI Jakarta dalam rangka mempersiapkan fase <i>New Normal</i> di tengah pandemi COVID-19 <i>Site visit from the President, Commander of National Armed Forces, Head of National Police, and Governor of DKI Jakarta in prearing New Normal phase amidst the COVID-19 pandemic</i> | Selasa, 26 Mei 2020 <i>Tuesday, May 26, 2020</i> | Stasiun Bundaran HI <i>Bundaran HI Station</i> |
| JUNI JUNE | | | |
| 8 | Kunjungan Direksi dan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam rangka mempersiapkan acara Peresmian Stasiun Terpadu (Penataan Stasiun KAI) <i>Site visit from the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT MRT Jakarta (Perseroda) in preparing the inauguration of integrated station (Train Station Arrangement)</i> | Selasa, 9 Juni 2020 <i>Tuesday, June 9, 2020</i> | Stasiun Tanah Abang-Stasiun Sudirman <i>Tanah Abang Station – Sudirman Station</i> |
| JULI JULY | | | |
| 9 | Kunjungan Kerja Satuan Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Depo MRT Lebak Bulus <i>Site visit from Work Unit of Commission B of DPRD DKI Jakarta to MRT Jakarta Depot in Lebak Bulus</i> | Rabu, 1 Juli 2020 <i>Wednesday, July 1, 2020</i> | Stasiun Lebak Bulus - Depo MRT Lebak Bulus <i>Lebak Bulus station - MRT Depot, Lebak Bulus</i> |

| No | Acara Event | Hari/Tanggal Date | Tempat Location |
|-------------------------------|--|--|---|
| SEPTEMBER SEPTEMBER | | | |
| 10 | Kunjungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM ke Stasiun Dukuh Atas dalam rangka survei konektivitas simpul transportasi <i>Site visit from the Research and Development Agency of the Ministry of Transportation and the Center for Transportation and Logistic Studies (Pustral) UGM to Dukuh Atas Station for the survey on transportation node connectivity</i> | Rabu, 2 September 2020 <i>Wednesday, September 2, 2020</i> | Stasiun Dukuh Atas <i>Dukuh Atas Station</i> |
| 11 | Kunjungan Duta Besar Jepang ke MRT Fase 2 <i>Site visit from the Ambassador of Japan to MRT Phase 2</i> | Kamis, 3 September 2020 <i>Thursday, September 3, 2020</i> | Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Di depan kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) <i>Phase 2 of MRT Jakarta project (In front of the office of the Agency for the Assessment and Application of Technology)</i> |
| 12 | Kunjungan PT Pos Indonesia dalam rangka penyerahan Prangko Edisi MRT Jakarta <i>Site visit from PT Pos Indonesia to handover MRT Jakarta Stamps</i> | Rabu, 9 September 2020 <i>Wednesday, September 9, 2020</i> | Wisma Nusantara |
| 13 | Kunjungan Menteri Perhubungan dalam rangka pembuatan konten Hari Perhubungan Nasional <i>Site visit from the Minister of Transportation for the content for National Transportation Day</i> | Minggu, 13 September 2020 <i>Sunday, September 13, 2020</i> | Depo MRT Lebak Bulus <i>MRT Depot, Lebak Bulus</i> |
| OKTOBER OCTOBER | | | |
| 14 | Inspeksi Mendadak Wakil Gubernur DKI, Kadishub DKI dan Walikota Jakarta Selatan ke Depo MRT Lebak Bulus terkait Persiapan MRT dalam Menghadapi PSBB Fase 2. <i>Unannounced Inspection of the Vice Governor of DKI Jakarta, Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta, and Mayor of South Jakarta to MRT Jakarta Depot in Lebak Bulus concerning the Preparation of MRT for Phase 2 of PSBB.</i> | Jumat, 02 Oktober 2020 <i>Friday, October 2, 2020</i> | Depo MRT Lebak Bulus <i>MRT Jakarta Depot, Lebak Bulus</i> |
| NOVEMBER NOVEMBER | | | |
| 15 | Kunjungan Duta Besar Jepang ke Stasiun MRT Bundaran HI <i>Site visit from the Ambassador of Japan to Bundaran HI MRT Station</i> | Selasa, 17 Oktober 2020 <i>Tuesday, October 17, 2020</i> | Stasiun MRT Bundaran HI <i>Bundaran HI MRT Station</i> |
| DESEMBER DECEMBER | | | |
| 16 | Kunjungan Menteri Perhubungan RI ke Stasiun MRT Bundaran HI - Lebak Bulus dalam rangka Penyelenggaraan Podcast "Keretaku Tak Berhenti Lama" <i>Site visit from the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to Bundaran HI - Lebak Bulus Stations to Create the Podcast "Keretaku Tak Berhenti Lama"</i> | Minggu, 27 Desember 2020 <i>Sunday, December 27, 2020</i> | Stasiun MRT Bundaran HI - Lebak Bulus <i>Bundaran HI - Lebak Bulus MRT Stations</i> |

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non-keuangan dari Perseroan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersaji lengkap dan akurat, terkini, utuh serta memadai sesuai tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan.

Periodic Correspondence and Report

Financial and non-financial information of the Corporation has been arranged and reported in a transparent manner to shareholders, stakeholders, and other required agencies. The information is delivered in a timely manner that provides complete, accurate, actual, comprehensive, and adequate information in accordance with the procedures, type, and scope as regulated by the provisions on Corporate Financial Condition Transparency.

| Korespondensi Kepada <i>Correspondence to</i> | Frekuensi <i>Frequency</i> | Perihal <i>Subject</i> |
|---|--------------------------------|--|
| Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan <i>Shareholders and Other Stakeholders</i> | Bulanan <i>Monthly</i> | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Kemajuan Pembangunan, Operasi dan Pengusahaan Proyek MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI); <i>Progress Report on the Construction, Operations, and Business of Phase 1 MRT Jakarta Project (Lebak Bulus – Bundaran HI);</i> Laporan Kemajuan Persiapan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat). <i>Progress Report on the Preparation for the Construction of Phase 2 MRT Jakarta Project (Bundaran HI – Ancol Barat).</i> Laporan Perkembangan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan Quick Wins Penataan Stasiun. <i>Progress Report of PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek and Quick Wins of Station Arrangement</i> |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | Triwulanan <i>Quarterly</i> | Laporan Realisasi RKAP <i>RKAP Realisation Report</i> |

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Information and Communication Technology (ICT) Governance

Perusahaan dengan jumlah bidang usaha yang luas dan jumlah unit kerja besar, diperlukan dukungan jaringan serta sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) andal. TIK menjadi aspek penting dalam keberlanjutan bisnis Perseroan. Sistem TIK Perseroan bertugas menyediakan sistem informasi yang optimal untuk mendukung bisnis Perseroan, termasuk dalam hal pelayanan sehingga mampu meningkatkan level produktivitas dan efisiensi. Penerapan TIK dalam Perseroan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses bisnis perseroan, sehingga dapat meminimalisir risiko operasional usaha, dan meningkatkan sistem keamanan yang lebih baik.

Situasi pandemi memacu pengembangan dan pendayagunaan sistem TIK, agar kinerja karyawan selama pandemi tetap optimal. Hal ini dilakukan dengan adanya penyediaan layanan berupa, *online conference*, untuk memudahkan penyelenggaraan rapat, webinar dan diskusi tatap muka secara *online*. Adanya penyimpanan berkas online untuk memudahkan akses karyawan dalam mengelola berkas dan berbagi berkas dengan karyawan lain. Sistem kolaborasi *online*, memungkinkan adanya kelompok diskusi antar karyawan secara *online*, dan menulis dokumen secara *real-time* dan *online* bersama-sama. TIK berperan sebagai pendukung Perseroan dalam mendapatkan pemasukan NFB di masa pandemi dengan adanya pengembangan aplikasi tiket berbasis QR.

The Corporation, with the wide business sector and a large number of work units, requires support from a reliable network and information and communication technology (ICT) system. ICT is an important aspect to ensure business continuity of the Corporation. The Corporation ICT System provides an optimal information system to support Corporate business, including the service to increase the level of productivity and efficiency. ICT Implementation of the Corporation aims to reduce the usage of paper, minimise the risk of business operations, and provide a better security system.

The pandemic triggered the development and empowerment of ICT system, in order to maintain optimal performance of the employees during the pandemic. This is carried out by providing services such as online conference to ease the execution of meetings, webinars, and online discussions. The provision of online file storage eases the access of the employees in managing and sharing files with other employees. The Online Collaboration System enables online group discussion among the employees as well as real-time and online drafting of documents with other employees. ICT acts as a support for the Corporation to generate NFB revenue during the pandemic with the development of a QR-based ticket application.



Kebijakan dan Kelembagaan TIK

ICT Policies and Institution

Regulasi Tata Kelola dan Kepatuhan

Kebijakan penerapan dan pengembangan TIK Perseroan, merujuk pada regulasi yang berlaku, di antaranya:

- Surat Edaran Kementerian Informasi dan Komunikasi No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Komisaris No. 004 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan (*Code of Corporate Governance*) PT MRT Jakarta.
- Peraturan Direksi No. 05 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi.

Tujuan dari kebijakan penerapan dan pengembangan TIK, antara lain:

1. Untuk melakukan tata kelola TIK yang benar sesuai dengan standar;
2. Untuk melaksanakan Transformasi Digital pada seluruh proses bisnis menuju *Go Green*;
3. Untuk implementasi ISO 27001 (*Information Security Management*).

Regulations on Governance and Compliance

Policies concerning Corporation ICT implementation and development refers to the prevailing regulations as follows:

- *Circular Letter of the Ministry of Information and Communication No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 concerning the Implementation of Information Security Governance for Public Service Providers.*
- *Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in ROEs of the Government of DKI Jakarta Province.*
- *Commissioners' Decree No. 004 Year 2003 concerning PT MRT Jakarta's Code of Corporate Governance.*
- *Directors' Regulation No. 05 Year 2017 concerning Information Technology Management.*

ICT implementation and development aims to:

1. *Conduct proper ICT governance based on the standard;*
2. *Carry out Digital Transformation in all business processes towards 'Go Green';*
3. *Implement ISO 27001 (Information Security Management).*

Pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan TIK mencakup:

- Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi menerapkan fungsi pengelolaan manajemen risiko, yaitu perencanaan, penilaian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
- Pengembangan sistem perangkat lunak umum dan khusus;
- Pemeliharaan dan dukungan untuk operasional sistem informasi;
- Kepemilikan perangkat keras (*hardware*);
- Ketentuan dan prosedur penggunaan perangkat aset Perseroan;
- Keamanan teknologi informasi;
- Rencana Pemulihan Kebencanaan (*Disaster Recovery Plan*).

Strategi Pengembangan TIK

Pengembangan TIK dilaksanakan melalui strategi pengembangan Sistem Informasi pada Aplikasi dan Infrastruktur TIK, yang mengacu pada Perdir No. 13 Tahun 2019 tentang Perihal Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan PT MRT Jakarta, Pengembangan TIK untuk kebutuhan operasional, maupun korporasi dilaksanakan oleh Divisi *Information System & Technology* (IST). Pengembangan TIK dilingkup Perseroan disusun dalam Peta Jalan TIK (*ICT Road Map*) 2018-2021, yang telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No.13 Tahun 2018, dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya internal, dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi Perseroan diantaranya dengan telah dilakukannya *cost control* yang berdampak pada prioritas pelaksanaan peta jalan.

ICT implementation and development covers:

- *Information technology development and management implements a risk management function, i.e. planning, assessment, measurement, monitoring, and risk control;*
- *General and specific software system development;*
- *Information system operational maintenance and support;*
- *Hardware ownership;*
- *Provisions and procedures of Corporation asset utilisation;*
- *Information technology security;*
- *Disaster Recovery Plan.*

ICT Development Strategy

ICT development is carried out through the Information System development strategy for ICT Applications and Infrastructure as regulated by the Directors' Regulation no. 13 Year 2019 concerning Guidelines for Information Technology Management in PT MRT Jakarta. ICT Development for operational and corporate purposes is carried out by Information System & Technology (IST) Division. ICT Development in the Corporation is set forth in the ICT Roadmap 2018-2021, as stated in the Directors' Regulation No. 13 Year 2018 and implemented by optimising internal resources and adjusting to the Corporation condition, such as with the implementation of cost control that impacted the priority of the implementation of the roadmap.

Peta Jalan Pengembangan TIK Perseroan

ICT Development Roadmap of the Corporation

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem ERP Fase-1 eOfficer Business Travel Request (BRP) Aplikasi E-auction Vendor Management System Switch Over Aplikasi Keuangan Sistem ERP Tableau Dashboard Mobile Apps Aktivasi Single Sign On (SSO) MS-AD Implementation of Phase 1 ERP System eOfficer Business Travel Request (BRP) E-auction Application Vendor Management System Application Switch Over ERP System Finance Tableau Dashboard Mobile Apps Single Sign On (SSO) MS-AD Activation | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem ERP Fase-2 Integrasi Perangkat Non-Enterprise – SAP (AFC, Maximo) Sistem Portal Knowledge Management (KM) Enterprise Risk Management (ERM) Aplikasi miniPOS Aplikasi General Affair (GAAS) Sistem Tiket dengan kode QR Aplikasi Mobile Terintegrasi Kanal Pembayaran Implementation of Phase 2 ERP System Integration of non-Enterprise Devices – SAP (AFC, Maximo) Knowledge Management (KM) Portal System Enterprise Risk Management (ERM) miniPOS Application General Affair (GAAS) Application QR Code Ticketing System Mobile Application Integrated with Payment Channel | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem ERP Fase-3 Sistem CRM Peningkatan Fungsi Sistem Tiket dengan Kode QR Trouble Ticket System DRC Financial Projection Peningkatan Sistem Portal KM Aplikasi Driver Roaster Implementation of Phase 3 ERP System CRM System Improvement of Ticketing System Function with QR Code Trouble Ticket System DRC Financial Projection Improvement of KM Portal System Driver Roaster Application | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem ERP Fase-4 Integrasi Sistem Pembayaran dengan Kode QR antarmoda Transportasi Peningkatan Fungsi DRC MRTJ Digital Ecosystem Master data repository Implementation of Phase 4 ERP System Integration of Payment System with QR Code across modes of transport Improvement of DRC Functions MRTJ Digital Ecosystem Master data repository |

Pembiayaan TIK

ICT Financing

Penerapan dan pengembangan TIK didukung pembiayaan, baik untuk keperluan belanja modal (*capital expenditure*), maupun belanja operasional (*operational expenditure*). Belanja modal mencakup biaya lisensi, biaya *software*, dan biaya *hardware*. Belanja operasional mencakup biaya lisensi, biaya *software*, dan biaya jasa.

Realisasi pembiayaan TIK pada tahun 2020 sebesar Rp16.319.437.632, menurun Rp21.062.048.255 atau setara 56,34% dibandingkan dengan biaya tahun 2019 sebesar Rp37.381.485.887. Hal ini seiring dengan optimalisasi dan penyesuaian kondisi di tahun 2020.

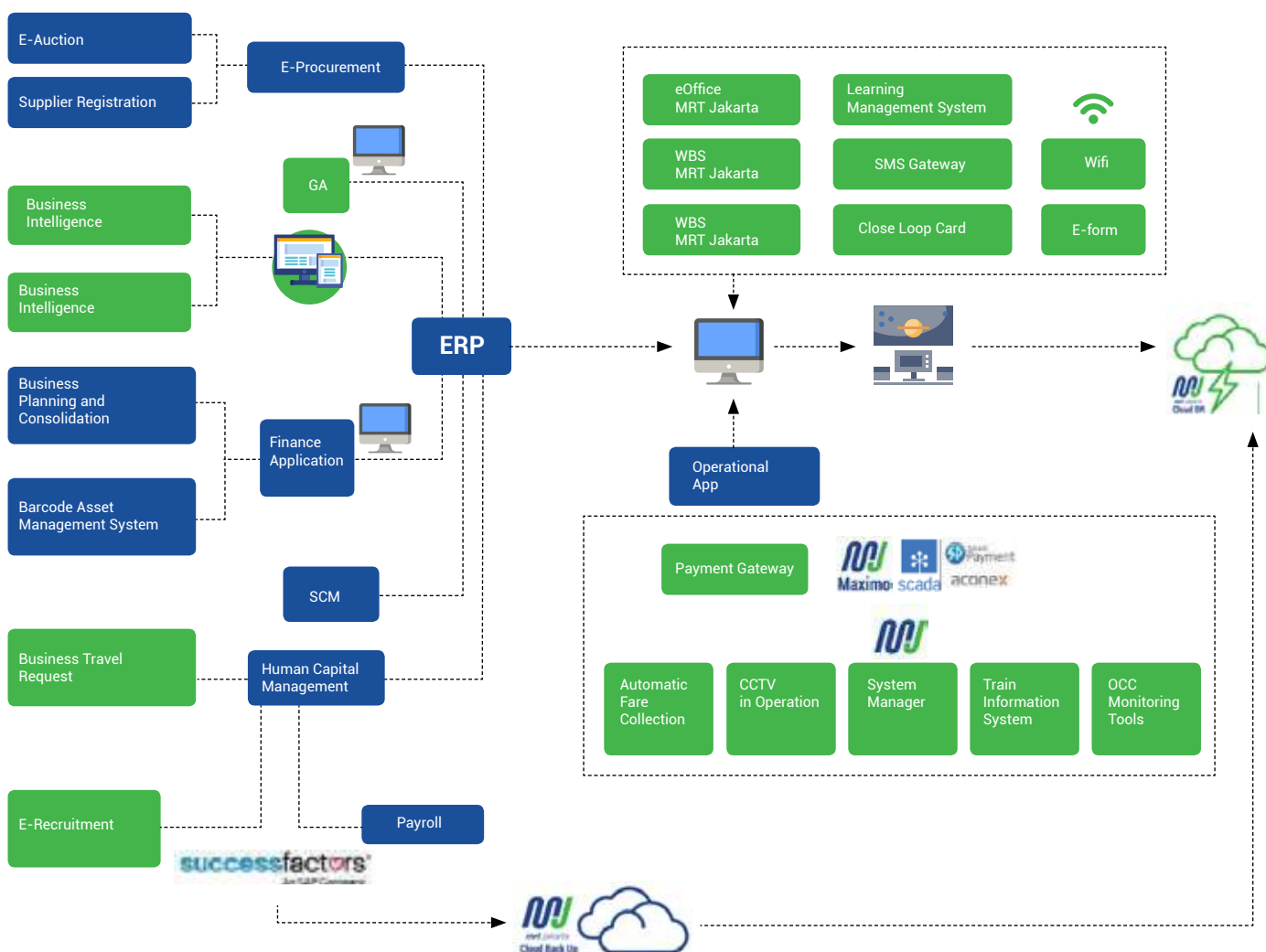
ICT implementation and development are supported by financing, both for capital expenditure and operational expenditure. Capital expenditure includes license cost, software cost, and hardware cost. Operational expenditure includes license cost, software cost, and service cost.

Realisation of ICT financing in 2020 was IDR 16,319,437,632, decreased by IDR 21,062,048,255 or 56.34% compared to the realisation in 2019 of IDR 37,381,485,887. This is due to the optimisation and adjustment to the conditions in 2020.

Realisasi Pembiayaan TIK Tahun 2020 dan Perbandingan Terhadap Tahun 2019
Realisation of ICT Financing in 2020 and Comparison with Realization in 2019

| | 2020 (Rp) | 2019 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (%) Increase (Decrease) (%) |
|---|----------------|----------------|--|
| | 1 | 2 | 1:2 |
| Capital Expenditure <i>(Information Technology Development & Support)</i> | 1.042.595.455 | 5.822.139.074 | (82,09) |
| Operational Expenditure <i>(Biaya Information Communication & Technology)</i> <i>(Information Communication & Technology Cost)</i> | 15.276.842.177 | 31.559.346.813 | (51,59) |
| Total Investasi Teknologi Informasi <i>Total Information Technology Investment</i> | 16.319.437.632 | 37.381.485.887 | (56,34) |

Penerapan TIK Di Lingkup Perseroan
ICT Implementation Across the Corporation



Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Operasional Menggunakan SAP

Perseroan secara bertahap mengembangkan Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai infrastruktur TIK untuk menunjang kinerja operasional. Pengembangan sistem portal diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh sistem terutama integrasi akses user/akun, sehingga setiap karyawan menggunakan 1 (satu) akun untuk akses semua aplikasi. Salah satunya, yaitu sistem Single Sign On (SSO) yang terintegrasi dengan Active Directory yang telah dikembangkan pada tahun 2017.

Integrasi Sistem

Untuk mendukung pengelolaan sistem Information & Communication Technology (ICT) korporasi, Perseroan mengintegrasikan sistem TIK perkeretaapian dengan sistem operasional manajemen atau sistem informasi berbasis ERP. Pengembangan ERP yang terintegrasi dengan sistem ICT perkeretaapian dilakukan dengan mendesain pembangunan TIK master plan yang melibatkan seluruh fungsi unit kerja yang terkait dalam mendukung persiapan operasional MRT.

Realisasi penerapan integrasi sistem pada tahun 2020, antara lain:

1. Peningkatan Integrasi dengan MMS Maximo
2. Peningkatan Integrasi dengan Payroll
3. Peningkatan Integrasi dengan Sistem Absensi Karyawan
4. Peningkatan Integrasi dengan Pencatatan Pendapatan Tiket
5. Peningkatan Integrasi dengan Pencatatan Pendapatan Non Tiket

Transformasi Digital

Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, memacu Perseroan untuk berupaya menjadi perusahaan yang memiliki sistem digital yang kuat. Tujuan tersebut melahirkan inisiatif kegiatan transformasi digital. Transformasi digital merupakan bentuk usaha pengembangan perusahaan dari sisi teknologi, yaitu dengan melakukan proses digitalisasi dan pemberdayaan sistem-sistem TIK yang sudah ada sebelumnya. Selain dari sisi teknologi, transformasi digital juga mencakup pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki daya saing dari sisi teknologi informasi.

Operational Enterprise Resource Planning (ERP) System Using SAP

The Corporation is gradually developing Enterprise Resource Planning (ERP) as ICT infrastructure to support operational performance. Portal system development is required to integrate all existing systems, especially user/account access so that each employee uses 1 (one) account to access all applications. One of which is Single Sign On (SSO) system integrated with an Active Directory, developed in 2017.

System Integration

To support Corporate Information & Communication Technology (ICT) system management, the Corporation integrated the Railroad ICT System with the management operational system or ERP-based information system. Development of ERP integrated with Railroad ICT system is carried out by designing ICT development master plan that engaged all related work units to support the preparation of MRT operations.

Realisation of system integration implementation in 2020 includes:

1. Integration with MMS Maximo
2. Integration with Payroll
3. Integration with the Employee Attendance System
4. Integration with Fare Box Revenue Recording
5. Integration with Non-Fare Box Revenue Recording

Digital Transformation

The brisk development of information technology triggers the Corporation to strive to become a Corporation with a strong digital system. Such an objective results in a digital transformation. Digital transformation is a form of Corporate development in terms of technology and refers to carrying out a digitisation process and empowerment of existing ICT systems. In addition, digital transformation covers competency and competitive human capital development in terms of information technology.

Tindak lanjut dari adanya inisiatif Transformasi Digital dimulai dengan pembentukan gugus tugas Transformasi Digital yang melibatkan perwakilan dari seluruh unit kerja. Rencana ke depan untuk inisiatif ini, meliputi program edukasi karyawan, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan karyawan untuk proses transformasi digital, roadmap transformasi digital dan pembaharuan, serta penyesuaian IT *master plan* dan *blueprint*.

Proses digitalisasi sudah dimulai dari sebelum Transformasi Digital berjalan. Hal ini mencakup dengan adanya ERP (*Enterprise Resource Planning*), kepemilikan Platform *Analytics* dan berperan dalam membangun platform *Knowledge Management*. Selain itu, langkah mendigitalkan proses konvensional dilakukan dengan berbagai sistem *enterprise*, seperti GAAS yang menunjang kegiatan *General Affair Office* sebagai platform korespondensi internal dan SMP2 yang membantu proses *tracking* pembayaran proyek.

Dalam hal digitalisasi pengguna layanan ticketing MRT Jakarta telah diluncurkannya *Mobile App* MRT-J sebagai sistem Aplikasi Mobile untuk mendukung kegiatan Perseroan dalam Penjualan Tiket MRT, profil Perseroan, informasi Perseroan, serta penyampaian saran dan kritik. Aplikasi ini akan memudahkan pelanggan dan masyarakat dalam pembelian tiket kereta, serta menumbuhkan budaya baru untuk bertransaksi secara digital.

Manajemen Perubahan

Seiring dengan operasional Perseroan yang semakin membutuhkan optimalisasi kinerja perangkat TIK dan sudah berubah dari layanan konvensional menjadi digital, banyak aset yang digunakan di Divisi IST yang membutuhkan perubahan dan penyesuaian. Beberapa perubahan dan penyesuaian yang telah dilakukan pada tahun 2020:

1. Dalam mendukung kegiatan operasional, unit kerja *General Affair* memberikan layanan fasilitas, seperti permohonan kendaraan operasional, kebutuhan ATK, kebutuhan ruangan dan kebutuhan operasional lainnya, saat ini telah menggunakan metode berbasis web bernama GAAS (*General Affair Application System*) yang semula masih menggunakan metode konvensional.
2. Dalam mendukung fungsi kontrol kegiatan pengadaan oleh unit kerja *Procurement*, telah digunakannya aplikasi *e-procurement*.

The follow-up of the Digital Transformation initiative began with the establishment of the Digital Transformation Task Force that involves representatives from all work units. The plan for this initiative covers an employee education programme that aims to measure the readiness rate of the employees for the digital transformation process, digital transformation roadmap and its updates, as well as alignment of IT master plan and blueprint.

The digitisation process started before the Digital Transformation was implemented. It covers the provision of ERP (Enterprise Resource Planning), ownership of the Analytics Platform, and a role in developing a Knowledge Management platform. In addition, the digitisation efforts of conventional process are carried out by various enterprise Systems, such as GAAS that supports the General Affair Offices as a platform for internal correspondences and SMP2 that supports the tracking process of project payment.

In terms of ticketing service digitisation, the Corporation has launched the MRT-J Mobile Application which supports the Corporation's activities in the sales of MRT Tickets, Corporation profile, Corporation information, and as a channel to deliver suggestions and criticisms. The application eases the process of the purchase of train tickets and to develops the culture of digital transactions.

Change Management

In line with the operations of the Corporation that increasingly requires optimal ICT tools and the transformation of conventional services to become digital, a lot of assets used by the IST Division requires changes and adjustment. Some changes and adjustment carried out in 2020 are as follows:

1. *In supporting operational activities, the General Affair work unit provided facility services, such as operational vehicle request, stationeries, room requirement, and other operational requirements, that are currently using a web-based method called GAAS (General Affair Application System) that is used to conventional method.*
2. *In supporting the procurement control function by the Procurement work unit, an e-procurement application has been used.*

3. Dalam mendukung kegiatan operasional perawatan di Direktorat Operasi dan Pemeliharaan, telah digunakan sistem ERP SAP Modul *Plant Maintenance* yang terintegrasi dengan sistem *Material Management* yang mencakup *Inventory Management* dan *Pengadaan*.
4. Percepatan proses layanan IT dengan optimalisasi *help desk* secara *remote* dan penyederhanaan prosedur perbaikan kerusakan.

Perseroan juga memiliki mekanisme manajemen perubahan pada kondisi darurat, yang mencakup langkah-langkah ketika melakukan manajemen perubahan dalam kondisi darurat. Rincian mengenai manajemen perubahan sudah dipaparkan dalam Peraturan Direktur Nomor PER/070/BOD-MRT/ XI/2019 tentang Pedoman Perubahan Infrastruktur TI dan Aplikasi (*Change Request*) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero).

Pelaksanaan manajemen perubahan ditujukan untuk tetap memastikan operasional MRT Jakarta tetap berlangsung, sekaligus menjamin keselamatan karyawan maupun pengguna jasa. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan manajemen perubahan, di antaranya:

1. Penambahan Peraturan Direktur terkait Alur Pembuangan Limbah Elektronik pada Peraturan Direktur Nomor PER/013/BOD-MRT/II/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero).
2. Menyediakan layanan berupa perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah bagi karyawan PT MRT Jakarta (Persero).
3. Mendukung proses *screening* kesehatan harian bagi para karyawan sebagai langkah implementasi Protokol Kesehatan di area lingkungan PT MRT Jakarta (Persero).

3. *In supporting operational and maintenance activities by the Directorate of Operations and Maintenance, the Plant Maintenance Module of the ERP SAP system has been used and is integrated with Material Management system which covers Inventory Management and Procurement.*
4. *Acceleration of IT service processes with the optimisation of remote help desk and simplification of repair procedures.*

The Corporation also implements a change management mechanism in emergency conditions that covers measures to carry out change management in emergency conditions. Further information concerning change management has been elaborated in Directors' Regulation Number PER/070/BOD-MRT/XI/2019 concerning Guidelines of IT Infrastructure and Application Change (Change Request) in PT MRT Jakarta (Persero).

The implementation of change management aims to ensure the continuous operations of MRT Jakarta, while ensuring the safety of employees and passengers. In 2020, the Corporation carried out change management as follows:

1. *Addendum to Directors' Regulation concerning Flow of Electronic Waste Disposal to Director's Regulation Number PER/013/BOD-MRT/II/2019 concerning Guidelines for Information Technology Management in PT MRT Jakarta (Persero).*
2. *Provision of service in the form of software and hardware to support work-from-home policy for the employees of the Corporation.*
3. *Supporting a daily health screening process for the employees as an implementation of Health Protocol in PT MRT Jakarta (Persero).*

Etika Penyebaran Informasi Non-Publik

Ethics of Non-Public Information Dissemination

Perseroan menekankan pentingnya etika penyebaran informasi non-publik oleh karyawan Perseroan. Segegap karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi non-publik mengenai Perseroan, serta yang berkaitan dengan pengguna jasa, mitra, maupun pihak lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perseroan. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan, baik pada masa bakti karyawan maupun masa purna bakti. Seiring dengan operasional Perseroan yang memerlukan pelayanan data dan informasi terkini, sampai dengan akhir tahun 2020 Divisi IST telah menyiapkan berbagai macam fasilitas pendukung terkait pelayanan data dan informasi.

The Corporation emphasises the importance of ethics for non-public information dissemination by the employees of the Corporation. All employees are required to maintain the confidentiality of non-public information of the Corporation and all information related to passengers, partners, and other parties obtained while working for the Corporation. Disclosure of such confidential information to non-relevant parties is prohibited, whether during or after the employees' tenure in the Corporation. Along with the Corporation operations that require the latest data and information, as of the end of 2020 IST Division has prepared various supporting facilities concerning data and information services.

Dukungan Pada Kebijakan Bekerja Dari Rumah

Supports for Work-from-Home Policy

Khusus dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, Divisi IST secara khusus menyiapkan fasilitas pendukung kebijakan bekerja dari rumah. Penyediaan fasilitas pendukung dilengkapi dengan mekanisme perlindungan informasi dan data Perseroan. Selain itu, untuk mempermudah penyelenggaraan rapat, webinar dan diskusi tatap muka disediakan media *online conference*.

In response to the COVID-19 pandemic, IST Division has prepared supporting facilities for the policy to work from home. The provision of such facilities is complemented by a Corporation information and data protection mechanism. In addition, it eases the execution of meetings, webinars, and discussions through online conference.



Townhall Meeting Virtual
Virtual Townhall Meeting

Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Bekerja dari Rumah

Supporting Facilities for Work-from-Home Policy

| Fasilitas Facilities | Penerapan Execution | Implementasi Implementation |
|---------------------------------|--|--|
| Laptop | Peraturan Direksi PER/013/BOD-MRT/II/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>Directors' Regulation PER/013/BOD-MRT/II/2019 concerning Guidelines for Information Technology Management in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> | Diperbolehkannya karyawan untuk membawa pulang laptop ke rumah. <i>Employees are allowed to bring their laptop home.</i> |
| VPN | Peraturan Direksi PER/068/BOD-MRT/XI/2019 tentang Pedoman Ketersediaan dan Kelangsungan Layanan TI di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>Directors' Regulation PER/068/BOD-MRT/XI/2019 concerning Guidelines for Availability and Continuity of IT Services in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> | Dengan menggunakan VPN, karyawan memiliki lingkungan kerja dan akses jaringan selanjutnya bekerja di kantor. <i>With a VPN, employees have working environment and network access as they do while working in the office.</i> |
| Microsoft Teams | Peraturan Direksi PER/084/BOD-MRT/XII/2019 tentang Standarisasi Media Komunikasi Digital dan Pertukaran Data Informasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>Directors' Regulation PER/084/BOD-MRT/XII/2019 concerning Standardisation of Digital Communication Media and Information Data Exchange in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> | Sebagai media pertemuan dan komunikasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung. <i>As a media for meetings and communication to replace direct face-to-face meetings.</i> |
| Microsoft OneDrive & SharePoint | Peraturan Direksi PER/084/BOD-MRT/XII/2019 tentang Standarisasi Media Komunikasi Digital dan Pertukaran Data Informasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>Directors' Regulation PER/084/BOD-MRT/XII/2019 concerning Standardisation of Digital Communication Media and Information Data Exchange in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> | Sebagai media penyimpanan data yang dapat diakses dari mana saja di luar lingkungan kantor. <i>As data storage media that can be accessed anywhere outside the office.</i> |

Pemantauan dan Evaluasi TIK

ICT Monitoring and Evaluation

Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengembangan TIK dilakukan dengan melibatkan Audit Internal dan Audit Eksternal.

Monitoring and evaluation of ICT implementation and development are carried out with Internal and External Audits.

Peran Audit Internal

Proses audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah suatu proses pengujian sistematis dan mandiri untuk mengetahui apakah sistem berjalan secara efektif dan apakah implementasi sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Proses audit merujuk pada beberapa ketentuan:

1. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.6 – Internal ISMS Audits
2. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.12.7.1 – Information System Audit Controls
3. Kebijakan Keamanan Informasi Departemen Information System & Technology Management PT MRT Jakarta (Perseroda).

Role of Internal Audit

The internal audit process for the Information Security Management System (SMKI) is a systematic and independent assessment process to find out whether the system runs effectively and is implemented in accordance with the initial plan. The audit process refers to several provisions as follows:

1. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.6 – Internal ISMS Audits
2. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.12.7.1 – Information System Audit Controls
3. Information Security Policy, Information System & Technology Management Department of PT MRT Jakarta (Perseroda).

Proses audit internal perlu ditinjau secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Peninjauan perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian, efektivitas dan efisiensi proses audit internal dan mengidentifikasi perbaikan dan peningkatan terhadap proses audit internal. *Lead Auditor* membuat laporan hasil audit internal beserta tindakan perbaikan yang dilakukan kepada manajemen di level atas.

Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Verifikasi Pembelian Lisensi User SAP dengan kebutuhan perseroan;
- Kesesuaian hasil pekerjaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk paket pekerjaan *MobileApps* dan *QR Code System*.

Peran Audit Eksternal

Dalam prosesnya, kegiatan audit eksternal melibatkan Auditor Eksternal yang proses penunjukan dan pengadaannya mengikuti prosedur dari Unit Kerja *Procurement*. Audit Eksternal TIK pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Ernst & Young (EY).

Berdasarkan hasil audit eksternal yang dilakukan tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Perlu perbaikan dalam pendokumentasi atas manajemen perubahan program terkait beberapa kode transaksi di SAP;
- Optimalisasi pengaturan *password* dan kontrol terhadap *user access* di lingkungan TIK;
- Perlu perbaikan dalam pendokumentasi atas manajemen akses *user* di lingkungan TIK;
- Perlu adanya pengujian terhadap restorasi data.

The internal audit process needs to be reviewed periodically, at least once a year. Such review is required to ensure the appropriateness, effectiveness, and efficiency of the internal audit process and to identify improvement and enhancement in the internal audit process. The Lead Auditor compiles the internal audit result report as well as the corrective action to be implemented for the top management.

Based on the internal audit carried out in 2020, the results are as follows:

- *Verification of Buyers for SAP User Licenses with Corporation requirements;*
- *Appropriateness of work results compared to the cost incurred for Mobile Apps and QR Code System work packages.*

Role of External Audit

The external audit process involves an External Auditor whose appointment and procurement process follows the procedures of the Procurement Work Unit. ICT External Audit for 2020 was carried out by Ernst & Young (EY).

Based on the results of the external audit carried out in 2020, the results are as follows:

- *There must be an improvement in the documentation of the change management programme concerning various transaction codes in SAP;*
- *Optimisation of password setting and control of user access within the ICT environment;*
- *There must be an improvement in the documentation of user access management within the ICT environment;*
- *There must be an assessment on data restoration.*

BUDAYA ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Culture

Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong budaya anti korupsi. Perseroan menerapkan larangan suap dan penerimaan hadiah oleh insan Perseroan dalam bentuk apapun. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material.

Perseroan melarang Pejabat Perseroan untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja, konsultan, kontraktor, dan/atau mitra kerja/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang berharga lainnya. Pejabat Perseroan juga dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan mengembangkan budaya anti korupsi melalui beberapa cara:

1. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Wajib lapor LHKPN;
4. Penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran; dan
5. Pengungkapan praktik tata kelola yang tidak baik.

Perseroan meraih Sertifikat ISO 37001:2016 untuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 2016 pada 27 Oktober 2020. Pencapaian tersebut merupakan komitmen Perseroan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap berstandar internasional, dan menegaskan tidak menoleransi segala bentuk penyuapan, baik menawarkan, menjanjikan, memberikan, hingga menerima atau meminta keuntungan dalam bentuk apapun. Perseroan juga sangat tegas menerapkan prinsip 4 No's, yaitu *no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality*.

The Corporation has a strong commitment to encouraging anti-corruption culture. The Corporation prohibits bribery and acceptance of gifts by all employees of the Corporation in any form. The Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees of the Corporation are prohibited from abusing their position for personal, family, and other parties' interests by receiving material rewards.

The Corporation prohibits Corporation Executives from accepting gifts from subordinates, co-workers, consultants, contractors, and/or work partners / entrepreneurs in any form, be it bouquets of flowers, food packages, or other valuables. Corporation Executives are also prohibited from giving or promising anything to anyone in exchange for compensation to receiving special treatment.

As of the end of 2020, the Corporation has built anti-corruption culture through various approaches as follows:

1. *Implementation of the Code of Conduct;*
2. *Gratification control;*
3. *Fulfilment of Mandatory Report of State Officials' Wealth;*
4. *Implementation of the Whistleblowing System; and*
5. *Transparency of bad governance practices.*

The Corporation received Certificate for ISO 37001:2016 for the implementation of Anti-Bribery Management system 2016 On October 27, 2020. The achievement acts as Corporation's commitment to implementing Anti-Bribery Management System with international standards and emphasised that any form of bribery is not tolerated, including offering, promising, giving, accepting, and requesting benefits in any form. The Corporation also implements the principle of 4 No's, i.e., no bribery, no kickback, no gift, and no luxurious hospitality.

Saya

No Bribery
No Kickback
No Gift
No Luxurious Hospitality



Pedoman Etika dan Perilaku *Code of Conduct*

Pedoman Etika dan Perilaku, merupakan pijakan mendasar bagi Perseroan, manajemen, pemangku kepentingan maupun pemegang saham dalam menjalin hubungan sesuai dengan tujuan Perseroan dan asas kepatutan. Pada tahun 2020, Perseroan telah memperbaharui Pedoman Etika dan Perilaku melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 011 tahun 2020 dan No.067 tahun 2020, dimana nilai-nilai etika dan perilaku merupakan inti dari pedoman. Pedoman dimaksudkan untuk mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perseroan, sehingga tercipta hubungan kerja yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku PT MRT Jakarta (Perseroda) dapat diakses sepenuhnya di laman PPID MRT Jakarta melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

Sosialisasi dan Internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan

Sosialisasi dan Internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan kepada seluruh karyawan dilakukan dengan membagikan buku Pedoman Etika dan Perilaku pada saat pertama kali menjabat dan juga setiap tahunnya melalui berbagai media sosialisasi maupun internalisasi Perseroan. Sebagai tanda telah dibaca dan dipahami, setiap karyawan menandatangani pernyataan kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan. Penandatanganan pernyataan kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan dilakukan setahun sekali oleh seluruh karyawan Perseroan.

The Code of Conduct is the most basic foundation for the Corporation, management, stakeholders, and shareholders in building relationships in accordance with the Corporation objectives and propriety principles. In 2020, the Corporation has updated the Code of Conduct as stated by the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 011 Year 2020 and No. 067 Year 2020, where the values of ethics and conducts are the core of the guidelines. The code of conducts has an important role as ethical and behavioural guidelines across elements of the Corporation, especially concerning relationships based on professionalism that are expected to remain delivering added value to the Corporation management process.

The Code of Conduct of the Corporation can be fully accessed at MRT Jakarta PPID page through the link as follows: <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

Socialisation and Internalisation of the Corporation Code of Conduct

Socialisation and Internalisation of the Corporation Code of Conduct to all employees are implemented by distributing a guidebook on Code of Conduct at the beginning of tenure and annually through various media or Corporate internalisation. As a confirmation that employees have read and understood the Code of Conduct, all employees must sign a statement of compliance with the Corporation Code of Conduct. The signing of the statement of compliance with the Corporation Code of Conduct is done once a year by all employees of the Corporation.

Selama tahun 2020, Perseroan menerima 4 (empat) laporan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku. Perseroan memberikan sanksi kepada setiap karyawan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku. Sanksi yang diberikan sesuai dengan berat/ringan, sifat dan seringnya pelanggaran dilakukan. Pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Perusahaan.

In 2020, the Corporation received 4 (four) reports of violations of the Code of Conduct. The Corporation imposes sanctions to all employees on the Corporation that are proven to have violated the Code of Conduct. The sanction depends on the major/minor, nature of, and frequency of the violations committed. The sanctioning is regulated by the Corporate Regulation.

Penanganan Laporan Penyimpangan Kode Etika dan Perilaku Perseroan Tahun 2020

Report Handling of Violations of the Corporation Code of Conduct in 2020

| Bentuk Penanganan <i>Handling Mechanism</i> | Manajemen <i>Management</i> | Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i> | Pegawai Tidak Tetap <i>Non-permanent Employees</i> |
|--|--------------------------------|--|---|
| Telah diselesaikan <i>Settled</i> | 0 | 1 | 1 |
| Tidak dapat ditindaklanjuti <i>Cannot be followed up</i> | 0 | 1 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian internal <i>In internal settlement process</i> | 0 | 1 | 0 |
| Belum diselesaikan <i>Not settled</i> | 0 | 0 | 0 |
| Ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through legal process</i> | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyimpangan <i>Number of Violations</i> | 0 | 3 | 1 |

Jumlah Sanksi Kode Etika dan Perilaku Perseroan

Total Sanctions for Violations of the Corporation Code of Conduct

| Jenis Sanksi | Types of Sanction | Jumlah Pelanggaran <i>Frequency of Violence(s)</i> | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Teguran | <i>Reprimand</i> | 1 | 0 | 0 |
| Peringatan 1 | <i>Warning 1</i> | 0 | 0 | 0 |
| Peringatan 2 | <i>Warning 2</i> | 0 | 0 | 0 |
| Peringatan 3 | <i>Warning 3</i> | 0 | 0 | 0 |
| Pengunduran Diri | <i>Resignation</i> | 1 | 0 | 0 |
| Pemecatan | <i>Dismissal</i> | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah <i>Total</i> | | 2 | 0 | 0 |

Kajian dan Evaluasi Manajemen

Manajemen secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perseroan, termasuk keterkaitan antara visi, misi dan budaya Perseroan serta kode etik dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perseroan. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perseroan.

Management Study and Evaluation

The management consistently conducts reviews in order to evaluate the performance of the Corporation, including the synergy between vision, missions, and Corporation culture as well as the Code of Conduct and long-term plan and risk profile faced by the Corporation. The implementation of the Code of Conduct is part of a managerial review to become one of the organisational evaluation tools of the Corporation.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Perseroan berkomitmen untuk menghindari praktik gratifikasi di dalam kegiatan kerja sehari-hari dengan menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini mengatur tentang pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh karyawan, serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan. Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah dipublikasikan dalam website Perseroan.

Untuk mengelola pengendalian gratifikasi, Perseroan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), yaitu Divisi *Corporate Secretary*, yang memiliki tugas dan fungsi utama melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan. Selama tahun 2020, Perseroan telah menerima 21 laporan perihal penerimaan maupun penolakan gratifikasi, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selain itu, Perseroan telah meneruskan 4 (empat) barang penerimaan gratifikasi yang dilaporkan pada tahun 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2020.

The Corporation is committed to preventing gratification practices in its daily operations by issuing Gratification Control Guidelines based on Directors' Regulation No. 005 Year 2019 concerning Guidelines of Gratification Control. The guidelines regulate the gifting, acceptance, and refusal of gratification by the employees, and gratification prevention and control measures in the Corporation. The Gratification Control Guidelines have been published on the Corporate website.

To manage gratification control, the Corporation established the Gratification Control Unit (UPG), within the Corporate Secretary Division whose duties and main functions are monitoring and controlling gratification in the Corporation. In 2020, the Corporation received 21 reports concerning the acceptance or refusal of gratification, and all reports have been followed up. In addition, the Corporation has submitted 4 (four) items of gratification reported in 2019 to the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2020.

Hasil Tindak Lanjut Laporan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2020

Results of Follow-Up on Gratification Report in 2020

| Uraian | Jumlah Amount | Description |
|---|---------------|---|
| Gratifikasi yang tidak dilarang Penerimaan honorarium sebagai narasumber atas penugasan resmi Perseroan. | 1 | Gratification that is not prohibited Reception of honorarium as a speaker for official assignment from the Corporation. |
| Gratifikasi dikembalikan kepada pemberi Penerimaan parcel Hari raya dan penerimaan bingkisan Ulang Tahun. | 20 | Gratification returned to the giver Reception of Holiday Parcel and reception of Birthday Gift. |
| Diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Penerusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK RI tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Menjadi Milik Negara dan Surat perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi kepada pelapor penerimaan Gratifikasi di PT MRT Jakarta (Perseroda). | 4 | Submitted to Corruption Eradication Commission Submission to the Corruption Eradication Commission is carried out in accordance with the Decree of KPK Head concerning Ownership Status Determination of Gratification to Belong to the State and Letter concerning Ownership Determination of Gratification to the reporter of Gratification acceptance in PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Jumlah gratifikasi | 25 | Total gratification |

Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Information on Funding for Political Activities

Perseroan memiliki kebijakan melarang setiap karyawan Perseroan untuk terlibat dalam kegiatan politik dengan mengatasnamakan Perseroan, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Perseroan tidak mengizinkan karyawan Perseroan menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan. Selama tahun 2020, tidak ada individu karyawan Perseroan yang terlibat dalam kegiatan politik dalam bentuk apapun.

The Corporation has a policy to prohibit employee involvement on behalf of the Corporation in political activities, including providing donations for political purposes. The Corporation prohibits employees of the Corporation to utilise Corporate facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or political participation purposes as regulated by the Corporation Code of Conduct. In 2020, there was no employee of the Corporation involved in political activities in any form.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Report of State Officials Wealth (LHKPN)

Perseroan telah memiliki Pedoman Pengelolaan LHKPN yang termutakhir dan disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 048 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2019. Pedoman tersebut mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang wajib menyampaikan LHKPN dan sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN.

The Corporation established Guidelines for the Management of the Report of State Officials Wealth, created through Directors' Regulation No. 048 Year 2020 concerning the Management of Report of State Officials Wealth, which is an amendment to the Directors' Regulation No. 011 Year 2019. The guidelines regulate delivery procedure and management of the Report of State Officials Wealth, managerial employees in the Corporation who are obliged to submit the report, and sanctions for those who fail to do so.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan LHKPN, pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang wajib menyampaikan LHKPN, yaitu:

Based on the Guidelines for the Management of the Report of State Officials Wealth, managerial employees in the Corporation who are obliged to submit the report are as follows:

1. Dewan Komisaris Perseroan;
2. Direksi Perseroan;
3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
4. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan atau yang setara;
5. Kepala Divisi Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan atau yang setara;
6. Kepala Departemen Perseroan atau yang setara.

1. Board of Commissioners of the Corporation;
2. Board of Directors of the Corporation;
3. Board of Commissioners of Subsidiaries and/or Joint Ventures;
4. Board of Directors of Subsidiaries and/or Joint Ventures or equivalent;
5. Head of Division of the Corporation, Subsidiaries, and/or Joint Ventures or equivalent;
6. Head of Departments of the Corporation or equivalent.

Pengelolaan LHKPN Administration of the Report of State Officials Wealth

Struktur Tim Pengelola LHKPN Structure of LHKPN Administration Team

| Koordinator LHKPN <i>LHKPN Coordinator</i> Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | Administrator Instansi <i>Agency Administrator</i> Kepala Divisi Corporate Secretary | Administrator Unit Kerja <i>Work Unit Administrator</i> GCG Specialist |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib LHKPN; • Mengoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi seluruh Wajib LHKPN; • Mengarahkan kegiatan LHKPN kepada seluruh Wajib Laporan; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi Wajib LHKPN; • Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi Wajib LHKPN kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) • <i>Conducting Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees;</i> • <i>Coordinating all Reports of State Officials Wealth (LHKPN) activities to all Obligees;</i> • <i>Directing Reports of State Officials Wealth (LHKPN) activities to all Obligees;</i> • <i>Monitoring and evaluating the implementation of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) by the Obligees;</i> • <i>Reporting the implementation of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obliges to the President Director of PT MRT Jakarta (Perseroda)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda); • Membuat akun admin unit kerja; • Melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN; • Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; • Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN; • Membuat laporan kegiatan pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi seluruh Wajib LHKPN. • <i>Managing e-Reports of State Officials Wealth (e-LHKPN) application in the Corporation</i> • <i>Creating work unit admin accounts</i> • <i>Validating the creation/ update of List of Obligee into e-LHKPN application</i> • <i>Coordinating with the Corruption Eradication Commission concerning the management and administration the Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Obligee Application</i> • <i>Socializing the obligation for other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) and technical guidelines on how to fill out and submit of the report</i> • <i>Reporting the implementation of the Reports of State Officials Wealth (LHKPN) in the Corporation to the President Director of the Corporation</i> • <i>Carrying out other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Coordinator related to Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerja; • Membuat akun wajib LHKPN; • Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN; • Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK; • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi wajib LHKPN. • <i>Managing e-Reports of State Officials Wealth (e-LHKPN) applications in the Work Unit;</i> • <i>Creating a mandatory account for Reports of State Officials Wealth (LHKPN)</i> • <i>Preparing and updating the list of Obligees for LHKPN;</i> • <i>Preparing documents of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) to be sent to the Corruption Eradication Commission</i> • <i>Carrying out other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Coordinator related to Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees</i> |

Wajib Laport dan Tingkat Kepatuhan LHKPN

Sesuai Pedoman Pengelolaan LHKPN, Wajib Laport LHKPN Perseroan pada tahun 2020 ada 91 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 orang telah memenuhi kewajiban LHKPN. Dengan demikian, tingkat kepatuhan LHKPN mencapai 100%.

Obligees and Compliance Level of the Report of State Officials Wealth

In accordance with the Corporation Guidelines for the Management the Reports of State Officials Wealth (LHKPN), in 2020 there were 91 employees who must report their wealth. From that amount, 91 employees have fulfilled their obligation to report their wealth. Therefore, the compliance level reached 100%.

Daftar Wajib Laport LHKPN Tahun 2020
List of Obligee for LHKPN in 2020

| Wajib LHKPN <i>Obligee for LHKPN</i> | Jumlah Wajib Laport <i>Number of Obligees</i> | Jumlah yang Telah Melaporkan <i>Total Reports</i> | Persentase (%) <i>Percentage (%)</i> |
|---|---|---|--|
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | 5 | 5 | 100 |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | 4 | 4 | 100 |
| Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i> | 1 | 1 | 100 |
| Kepala Divisi dan Kepala Departemen <i>Division & Department Heads</i> | 81 | 81 | 100 |
| Jumlah <i>Total</i> | 91 | 91 | 100 |

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran *Whistleblowing System*

Perseroan memiliki Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yakni sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan atau tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja. Penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The Corporation has a Whistleblowing System, a prevention and identification system of fraud, violations, or intentional omissions. The implementation of the Whistleblowing System is monitored by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Secara berkesinambungan, Perseroan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada karyawan Perseroan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman eksistensi dan mekanisme Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

The Corporation continuously carries out socialisation of the Whistleblowing System to the employees of the Corporation. IT aims to provide an understanding of the existence and mechanism of the Whistleblowing System.

Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan mengacu kepada Peraturan Direksi No. 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

Guidelines for Corporation Whistleblowing System refers to the Directors' Regulation No. 031 Year 2020 concerning the Whistleblowing System.

Ruang Lingkup Pengaduan Dugaan Pelanggaran dan Sarana Pengaduan

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan adalah:

1. Pelanggaran Etika;
2. Pelanggaran Korupsi;
3. Pelanggaran Kolusi;
4. Pelanggaran Nepotisme;
5. Kecurangan;
6. Benturan Kepentingan;
7. Penyuapan;
8. Pelanggaran Gratifikasi;
9. Pelanggaran Norma, Ketentuan dan Peraturan Perseroan;
10. Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
11. Pelanggaran lain-lain.

Pelaporan yang disampaikan oleh pelapor, memuat hal-hal sebagai berikut

- *What*: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?
- *Where*: Dimana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
- *When*: Kapan perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan?
- *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan dugaan pelanggaran tersebut?
- *How*: Bagaimana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan?

Pelapor dapat menggunakan sarana yang telah disediakan, yaitu:

1. *Website*: <https://whistleblowing.tips/wbs/@MRTJakarta>
2. *Email* ke: WBS.MRTJakarta@rsm.id

Scope of Reports of Violations and Reporting Facilities

Violations that can be reported through the Corporation's Whistleblowing System are:

1. *Ethical Violations;*
2. *Corruption Violations;*
3. *Collusion Violations;*
4. *Nepotism Violations;*
5. *Fraud;*
6. *Conflicts of Interest;*
7. *Bribery*
8. *Gratification Violation;*
9. *Violations of Corporation Norms, Regulations, and Rules;*
10. *Violations of Law and Regulations; and*
11. *Other violations.*

The report that is submitted must cover the matters as follows:

- *What*: *What is/was the alleged violation known by the Reporter?*
- *Where*: *Where does/did the alleged violation occur?*
- *When*: *When have the alleged violations happened?*
- *Who*: *Who are/were those involved in the alleged violation?*
- *How*: *How is/was the alleged violation done?*

The Reporter can utilise the provided facilities as follows:

1. *Website*: <https://whistleblowing.tips/wbs/@MRTJakarta>
2. *Email* ke: WBS.MRTJakarta@rsm.id

Organisasi Pelaksana Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Tim Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yaitu:
 - Mengelola penyelenggaraan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Memeriksa laporan yang masuk pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran setiap hari.
 - Melakukan validasi kesesuaian data/informasi pada laporan yang masuk pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Menyampaikan ringkasan dan rekomendasi tindak lanjut atas laporan kepada Kepala Divisi *Corporate Secretary*.
 - Menyampaikan seluruh laporan yang diterima pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Divisi *Corporate Secretary*.
 - Membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan, serta menyampaikannya kepada Kepala Divisi *Corporate Secretary*.
2. Divisi *Corporate Secretary*
Tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yaitu:
 - Memastikan bahwa Tim Pengelola WBS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
 - Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola WBS atas pengelolaan laporan yang diterima pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Melakukan pemeriksaan dan validasi atas kesesuaian informasi yang disampaikan di dalam ringkasan dan rekomendasi tindak lanjut oleh Tim Pengelola WBS.
 - Menerima seluruh laporan yang diterima di Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Pengelola WBS.
 - Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Menyimpan dokumen laporan yang tidak memenuhi syarat pelaporan.
 - Menyampaikan laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan kepada Direktur Utama.
 - Menyampaikan informasi mengenai adanya laporan dugaan dan tindakan penyuapan yang diterima pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran termasuk hasil Audit Investigatif kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

Organisation of Whistleblowing System Administrators

1. *Whistleblowing System Administrator Team*
Duties and responsibilities of the Whistleblowing Handling Committee are:
 - *Managing the implementation of the Whistleblowing System.*
 - *Checking the reports that are entered into the Whistleblowing System everyday.*
 - *Validating the suitability of data/information in the reports that enter the whistleblowing system.*
 - *Submitting the summary and recommendation for follow-up of the reports to the Corporate Secretary Division.*
 - *Submitting all reports received in the Whistleblowing System to the Head of the Corporate Secretary Division.*
 - *Creating reports periodically, at least once every 3 (three) months, including the number of Reports and category of Reports, and submitting the reports to the Head of the Corporate Secretary Division.*
2. *Corporate Secretary Division*
Duties and responsibilities of Whistleblowing Handling Committee are:
 - *Ensuring that WBS Administrator Team carries out their duties and responsibilities well.*
 - *Coordinating with WBS Administrator Team for the handling of the reports received in the Whistleblowing System.*
 - *Checking and validating the information presented in the summary and recommendation for follow-up from WBS Administrator Team.*
 - *Receiving all reports received by the Whistleblowing System from WBS Administrator Team.*
 - *Reporting the results of data/information validation to Whistleblowing Handling Committee.*
 - *Storing report documents that do not meet reporting requirements.*
 - *Creating reports periodically, at least once every 3 (three) months, including the number of Reports and category of Reports, and submitting the reports to the President Director.*
 - *Presenting information concerning the reports of whistleblowing for bribery received in the Whistleblowing System including the results of Investigative Audit to Anti-Bribery Compliance Function.*

3. Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yaitu:

- Menugaskan Divisi Internal Audit membentuk Tim Penelitian Awal untuk melakukan Audit Investigatif 4W+1H atas laporan WBS.
- Menilai laporan Tim Penelitian Awal, apakah telah menjelaskan pemenuhan 4W+1H atau belum untuk dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
- Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi), Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi atau Komite Dewan Komisaris), atau Pemegang Saham (jika terlapor adalah anggota Dewan Komisaris) untuk diputuskan, apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.
- Mereviu laporan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Tim Penelitian Awal, Tim Audit Investigatif dan/atau Tim Pemeriksa Eksternal.
- Membuat laporan akhir pelaporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Utama/Komisaris Utama.

4. Divisi *Internal Audit*

Tugas dan tanggung jawab Divisi *Internal Audit*, yaitu:

- Merupakan Tim Penelitian awal dan Tim Audit Investigatif.
- Mengeluarkan surat tugas kepada anggota Divisi Internal Audit yang akan menjadi Tim Penelitian Awal.
- Melakukan Audit Investigatif untuk menilai pemenuhan 4W+1H terhadap laporan WBS dan melanjutkan proses Audit Investigatif terhadap laporan WBS yang telah disetujui oleh Direktur Utama/Komisaris Utama/Pemegang Saham untuk diproses ke tahap selanjutnya.
- Membuat laporan hasil audit Investigatif dan melaporkannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
- Menyusun dan memasukkan anggaran tahunan Tim Pemeriksa Eksternal ke dalam RKAP.

5. Tim Pemeriksa Eksternal

Tugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksa Eksternal, yaitu:

- Merupakan pihak independen yang melakukan Audit Investigatif terhadap laporan WBS yang telah memenuhi validasi data atau unsur-unsur 4W+1H dan jika terlapor adalah Karyawan Divisi Internal Audit atau jika dibutuhkan oleh Tim Audit Investigatif Divisi Internal Audit.

3. *Whistleblowing Handling Committee*

Duties and responsibilities of the Whistleblowing Handling Committee are:

- *Assigning Internal Audit Division to establish Initial Investigation Team to carry out Investigative Audit 4W+1H for WBS reports.*
- *Assessing the report from Initial Investigation Team, whether it elaborates the fulfilment of 4W+1H or not, to be proceeded to the next step.*
- *Reporting the results of data/information validation from the Whistleblowing System to the President Director (if the reported is not the Board of Directors), President Commissioner (if the reported is the Board of Directors or the Board of Commissioners Committee), or Shareholders (if the reported is the Board of Commissioners), to be decided whether the report can be processed to the next step.*
- *Reviewing the report of initial investigation carried out by Initial Investigation Team, Investigative Audit Team, and/or External Auditor Team.*
- *Creating final report of whistleblowing system report and presenting the report to the President Director/President Commissioner.*

4. *Internal Audit Division*

Duties and responsibilities of the Internal Audit Division are:

- *Being the Initial Investigation Team and Investigative Audit Team.*
- *Issuing letter of assignment to the member of Internal Audit Division to be a member of Initial Investigation Team.*
- *Carrying out the Investigative Audit to assess the fulfilment of 4W+1H of the WBS report and proceeding Investigative Audit to WBS reports approved by the President Director/President Commissioner/Shareholder to be processed in the next step.*
- *Creating the report of Investigative Audit results and reporting it to Whistleblowing Handling Committee.*
- *Compiling and including the annual budget of the External Auditor Team to the RKAP.*

5. *External Auditor Team*

Duties and responsibilities of External Auditor Team are:

- *Being an independent party to carry out Investigative Audit concerning WBS report that has fulfilled data validation or 4W+1H elements and if the reported is a member of the Internal Audit Division of as required by the Investigative Audit Team of Internal Audit Division.*

- Merupakan pihak independen yang dibutuhkan keahliannya atau akses khususnya terhadap informasi yang dapat membantu memperlancar Audit Investigatif yang dilakukan Tim Internal Audit.
- Membuat laporan hasil Audit investigatif dan melaporkannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

6. Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama, yaitu:

- Mengeluarkan anggota Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang merupakan Terlapor dalam Laporan WBS, dan menunjuk seorang Kepala Divisi lainnya yang tidak berpotensi terjadi benturan kepentingan dengan terlapor.
- Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal terlapor merupakan karyawan Perseroan, berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

7. Komisaris Utama

Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, yaitu:

Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal Terlapor merupakan anggota Direksi/anggota Komite Dewan Komisaris, berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

8. Pemegang Saham

Tugas dan tanggung jawab Pemegang saham, yaitu: Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal Terlapor merupakan anggota Dewan Komisaris, berdasarkan laporan dari Komite penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

- *Being an independent party whose expertise or special access to information is required in order to help the Investigative Audit carried out by the Internal Audit Team.*
- *Creating a report of Investigative Audit results and reporting it to the Whistleblowing Handling Committee.*

6. President Director

Duties and responsibilities of the President Director are:

- *Dismissing the member of Whistleblowing Handling Committee if the relevant member is the reported in WBS Report and appointing another Division Head without potential conflict of interest with the reported.*
- *Deciding whether a report can be processed to the next step, in the event that the reported is an employee of the Corporation, based on the report from the Whistleblowing Handling Committee.*

7. President Commissioner

Duties and responsibilities of the President Commissioner are:

Deciding whether a report can be processed in the next step, in the event that the Reported is a member of the Board of Directors or a member of the Committee of the Board of Commissioners, based on the report from the Whistleblowing Handling Committee.

8. Shareholders

Duty and responsibility of the Shareholder is:

Deciding whether a report can be processed in the next step, in the event that the Reported is a member of the Board of Commissioners, based on the report from Whistleblowing Handling Committee.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang beritikad baik, patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan, serta praktik terbaik yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran.

Kebijakan perlindungan terhadap Pelapor, antara lain:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan;
- Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pemeriksaan, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap karyawan Perseroan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjadi keamanan Pelapor maupun keluarganya.

Perseroan juga memberikan perlindungan kepada Pelapor agar tidak terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Pemecatan yang tidak adil;
- Penurunan jabatan atau pangkat;
- Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya;
- Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya;
- Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karir di Perseroan;
- Pelapor mendapatkan proses *counseling/trauma healing* bila dipandang perlu berdasarkan diagnosa Ahli.

Protection for Whistleblowers

The Corporation is committed to protecting well-intentioned whistleblowers who comply with the prevailing laws and regulations and the best practices that apply in WBS implementation.

Whistleblower Protection Policy includes:

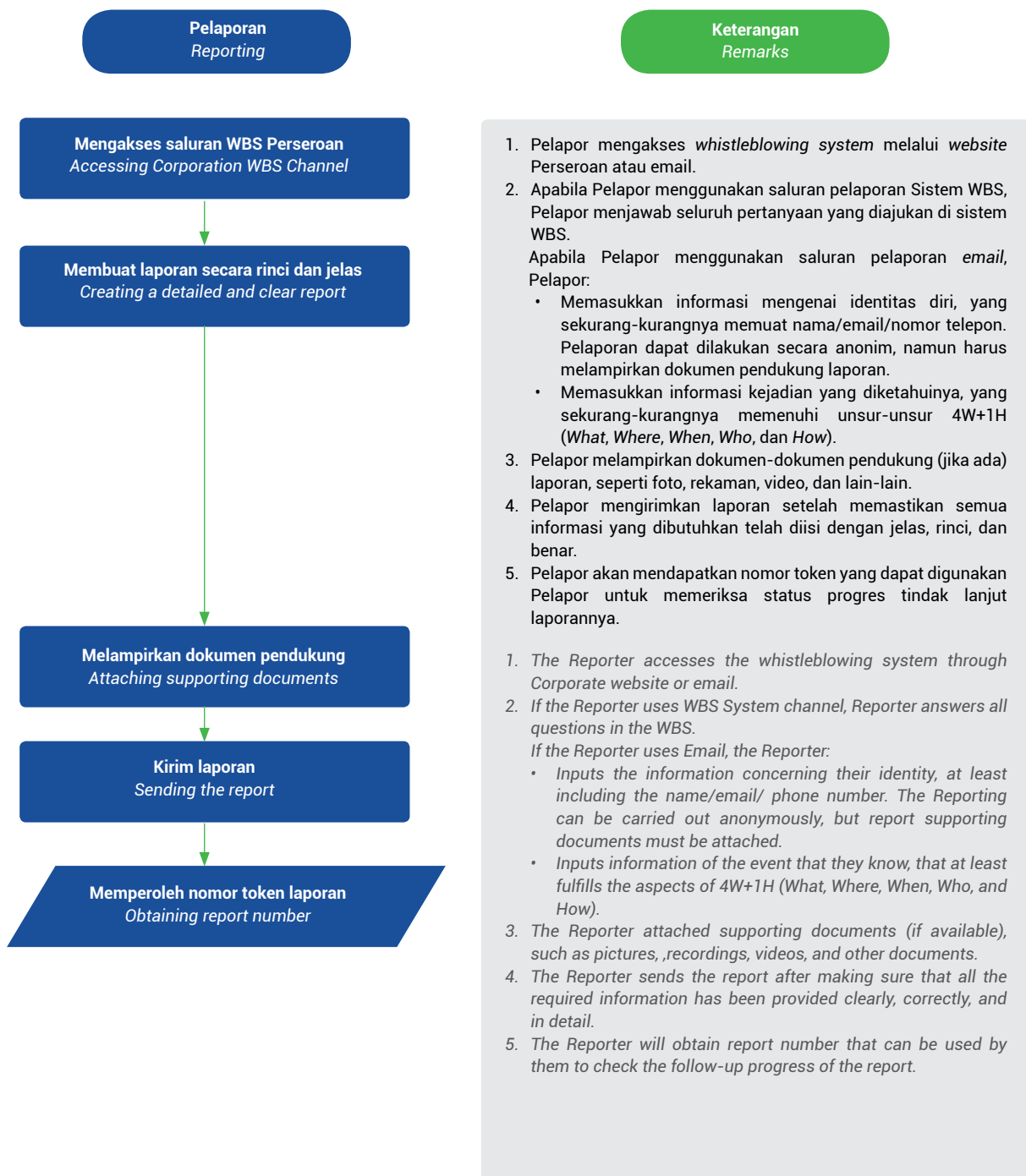
- *The Corporation guarantees the confidentiality of the Whistleblowers' identities;*
- *The Corporation guarantees protection for Whistleblowers from all forms of threats, intimidations, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblowers maintain the secrecy of the reported violations from any party;*
- *Protection for Whistleblowers also applies to parties who carry out the investigation and parties who provide information concerning the Report.*

Whistleblower protection aims to encourage all employees of the Corporation and other Whistleblowers to have the courage to report violations and to ensure the security of Whistleblowers and their families.

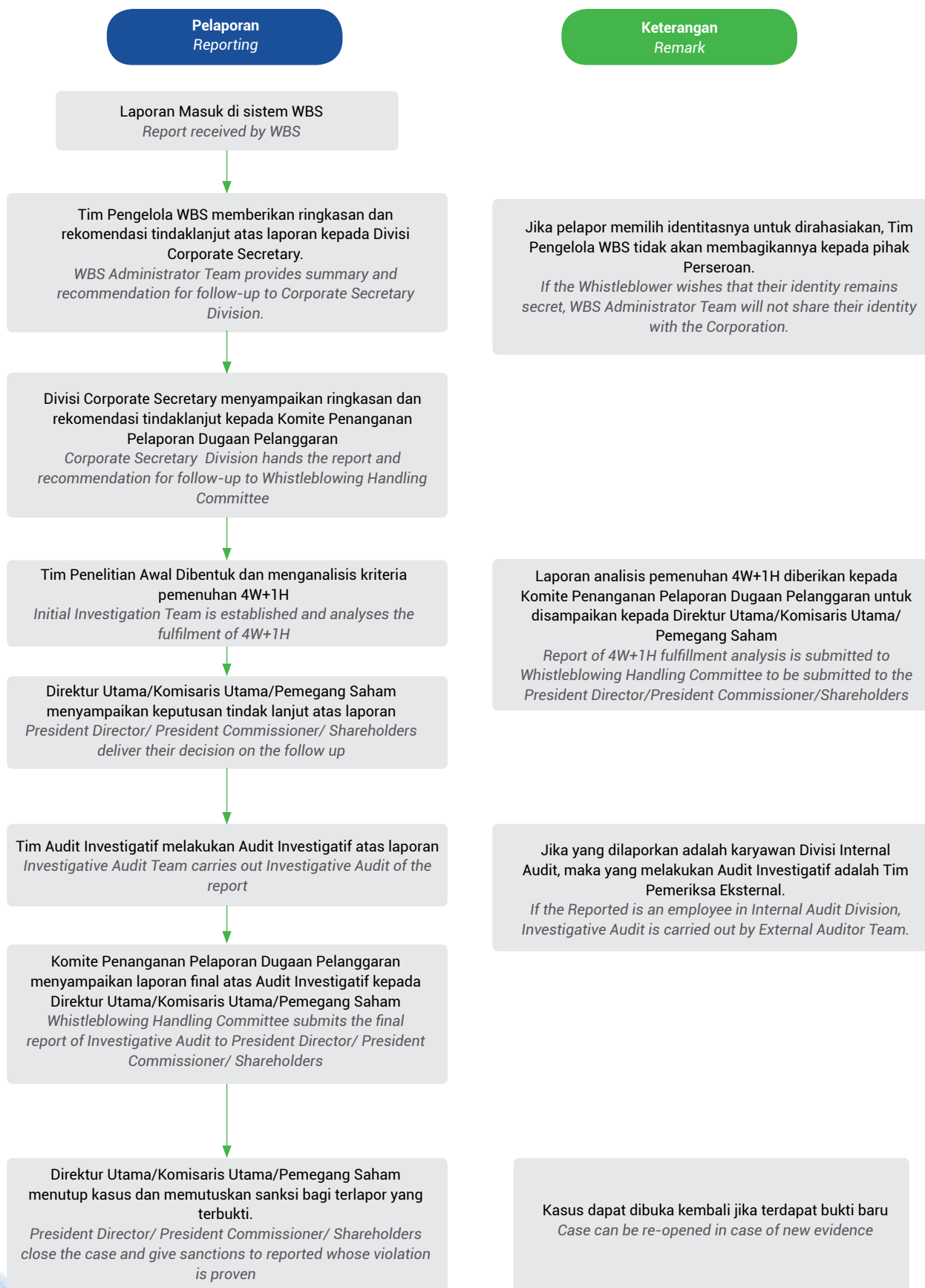
The Corporation also provides protection to the Whistleblowers to prevent the arising of issues as follows:

- *Unfair dismissal;*
- *Demotion;*
- *Harassment and/or discrimination and/or threats and/or intimidation in any form;*
- *Adverse record in the documents of personal data;*
- *Discrimination in terms of career development in the Corporation;*
- *Whistleblowers may be provided with counseling trauma healing process if deemed necessary based on the diagnosis of an Expert.*

Prosedur dan Mekanisme Penyampaian Pengaduan dan Penanganan Pengaduan *Procedure and Mechanism for Report and Handling Complaints*



Proses Penanganan dan Tindak Lanjut Atas Pelaporan
Procedures and Mechanism of Reporting and Report Handling



Pelaporan Pelanggaran Tahun 2020 dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2020 tercatat ada 9 (sembilan) pengaduan dugaan pelanggaran yang diterima Perseroan. Berdasarkan hasil laporan Penelitian Awal, 4 (empat) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat 4W+1H, sehingga terdapat 5 (lima) laporan yang masuk ke tahap Tindak Lanjut.

Sampai dengan 31 Desember 2020, status/hasil penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

Violation Reporting in 2020 and Follow-up Actions

In 2020, it was recorded that there were 9 (nine) whistleblowing reports received by the Corporation. Based on the report of Initial Investigation, 4 (four) reports could not be followed up as they did not fulfil 4W+1H requirements, therefore there were 5 (five) reports that were followed up.

As of December 31, 2020, the status/results of Whistleblowing handling are as follows:

Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tahun 2020
Whistleblowing Handling in 2020

| Jumlah Pengaduan Number of Reports | Status/Hasil Tindak Lanjut Status/Results of Follow Up | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|
| | Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot be Followed Up | Dalam Proses Tindak Lanjut In Follow Up Process | Tidak Terbukti Not Proven | Terbukti dan Sanksi Proven and Sanctions | | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | Peringatan 1 Warning 1 | 1 | |
| | | | | Peringatan 2 Warning 2 | 0 | |
| | | | | Peringatan 3 Warning 3 | 0 | |
| | | | | Pengunduran Diri Resignation | 1 | |
| | | | | Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment | 0 | |

Pemantauan dan Evaluasi

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencaangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan 31 Desember 2020, laporan yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 (5 laporan) naik dibandingkan tahun 2019 (1 laporan). Hal ini didukung dengan upaya Perseroan dalam mempercayakan pengelolaan sistem WBS kepada Pihak Independen guna meningkatkan objektivitas penanganan pelaporan yang masuk, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap proses pengelolaan WBS Perseroan.

Pada awal tahun 2021, Divisi *Corporate Secretary* akan mendistribusikan Survei Persepsi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan kepada pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada karyawan, pemasok, vendor, dan mitra kerja untuk membantu Perseroan dalam melakukan langkah perbaikan maupun penguatan efektivitas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

Monitoring and Evaluation

In order to ensure the effectiveness of Whistleblowing System implementation, monitoring and evaluation are required. It is done to achieve the objectives as set during the initial planning of the Whistleblowing System and to ensure that the achievement is in line with the business requirements of the Corporation and the prevailing laws and regulations.

As of December 31, 2020, the reports followed up in 2020 (5 reports) increased compared to the number of reports in 2019 (1 report). It is supported by the efforts of the Corporation in assigning the management of WBS System to an Independent Party to increase the objectivity of report handling and to build more trust with the stakeholders concerning WBS handling process of the Corporation.

At the beginning of 2021, the Corporate Secretary Division will distribute a Survey on the Perception of the Corporate Whistleblowing System to the stakeholders, including but not limited to the employees, suppliers, vendors, and partners to help the Corporation in carrying out corrective action and effectivity improvement of the Whistleblowing System.

TRANSPARANSI PRAKTIK TATA KELOLA YANG TIDAK BAIK

Transparency of Bad Governance Practices

Sebagai bentuk komitmen pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan bersungguh-sungguh menerapkan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik pada segala aspek kegiatan operasi dan usaha. Selama tahun 2020, Perseroan tidak pernah mendapatkan laporan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang tidak baik terkait:

- Laporan Atas Aktivitas Perseroan yang Mencemari Lingkungan;
- Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- Ketidaksihonestan Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan;
- Informasi tentang Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan;
- Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital.

As a commitment to the implementation of GCG, the Corporation implements the best practices of GCG in all aspects of operational and business activities. In 2020, the Corporation did not receive any reports concerning bad governance practices regarding:

- *Reports on Corporate Activities that Harm the Environment;*
- *Disclosure of Fulfillment of Tax Obligation;*
- *Discrepancies between the Presentation of Annual Report and Financial Statements with the Prevailing Regulations and Finance Accounting Standards (SAK);*
- *Cases concerning Labourers and Employees;*
- *Information concerning the Disclosure of Operational Segments in Financial Statements;*
- *Conformity of the Printed Annual Report and Digital Annual Report.*

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Important Cases Faced by the Corporation

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Informasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan tahun 2020, disampaikan sebagai berikut.

Information concerning legal issues faced by the Corporation in 2020 is presented as follows:

1. Penggunaan Gambar Tugu Selamat Datang pada Kartu Jelajah MRT

Utilisation of the Picture of Selamat Datang Monument on MRT Jelajah Card

| | | |
|--|--|---|
| Perkara Case | Sengketa Penggunaan Gambar "Tugu Selamat Datang" pada kartu jelajah MRT antara Perseroan dengan Para Ahli Waris Henk Ngantung. <i>Dispute concerning the Usage of the Picture of "Selamat Datang Monument" on MRT Jelajah Card against the Heirs of Henk Ngantung.</i> | |
| Uraian Singkat Pokok Perkara Brief Description of Subject Case | Bahwa untuk mendukung operasional MRT, Perseroan mengeluarkan 2 (dua) jenis kartu jelajah, yaitu <i>Single Trip</i> dan <i>Multi Trip</i> , dimana desain kartu jelajah tersebut menggunakan gambar "Tugu Selamat Datang". Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Hukum Ahli Waris Henk Ngantung menyampaikan somasi kepada Perseroan atas penggunaan Gambar "Tugu Selamat Datang" dengan menuntut nilai kompensasi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Atas somasi tersebut, Para Pihak terus melakukan upaya musyawarah demi tercapainya perdamaian, dimana pada akhirnya pada tanggal 9 April 2020, Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian No. CON/011/MRT/IV/2020 yang pada pokoknya berisi poin-poin kesepakatan sebagai berikut: 1 Perseroan memberikan dana penghargaan kepada masing-masing ahli waris Heng Ngantung dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah); 2 Dana penghargaan tersebut hanya untuk penggunaan Gambar "Tugu Selamat Datang" pada kartu jelajah yang telah terbit; 3 Perjanjian ini merupakan penyelesaian yang sifatnya final, dan terkait sengketa tersebut tidak dapat diajukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun di masa depan. | <i>That in order to support the operations of MRT, the Corporation issues 2 (two) types of Jelajah Card, i.e. Single Trip and Multi-Trip, where the design of the cards uses the picture of "Selamat Datang Monument".</i> <i>Then, on December 18, 2019, the Attorney of the Heirs of Henk Ngantung sent a legal notice to the Corporation for the usage of the Picture of "Selamat Datang Monument" and demand compensation of IDR 2,000,000,000 (two billion Indonesian Rupiah).</i> <i>Concerning the notice, The Parties carried out negotiation to reach a resolution and on April 9, 2020, The Parties signed Resolution Agreement No. CON/011/MRT/IV/2020 whose subjects concern with the resolution as follows:</i> <i>1 The Corporation pays compensation to each heir of Henk Ngantung amounting to IDR 600,000,000 (six hundred million Indonesian Rupiah) in total;</i> <i>2 The compensation cost is only paid for the usage of the Picture of "Selamat Datang Monument" on the issued Jelajah Card;</i> <i>3 The agreement is the final resolution and concerning the dispute legal charge cannot be submitted in the future.</i> |
| Status Perkara Case Status | Selesai melalui musyawarah yang disepakati oleh Para Pihak. <i>Settled amicably as agreed by the Parties.</i> | |
| Risiko yang Dihadapi Perseroan Risks Faced by the Corporation | Risiko yang dihadapi Perseroan Apabila sengketa tersebut berlanjut melalui litigasi, baik perdata maupun pidana berisiko dapat menimbulkan kerugian yang dapat saja dibebankan kepada Perseroan. Selain itu, apabila perkara ini diselesaikan melalui langkah litigasi, proses pemeriksaan dapat menimbulkan publikasi dan memungkinkan timbulnya citra buruk bagi Perseroan. | <i>Risks faced by the Corporation</i> <i>In the event that the case is carried on through litigation, be it civil action or criminal action, there is a risk arising that is potentially charged to the Corporation. In addition, if the case is settled through litigation, the investigation process may cause publication and potentially create a negative image of the Corporation.</i> |
| Tindak Lanjut Perseroan Follow-up by the Corporation | Dikarenakan Perseroan dengan Ahli Waris telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian, maka secara hukum Perseroan telah diberikan hak oleh Ahli Waris untuk menggunakan design "Tugu Selamat Datang" pada kartu Jelajah Perseroan. <i>As the Corporation and the Heirs have compiled and signed the Resolution Agreement, the Corporation has legally obtained the permission from the Heirs to use the design of "Selamat Datang Monument" on the Jelajah Card issued by the Corporation.</i> | |

2. Sengketa Tanah yang digunakan sebagai Depo Mass Rapid Transit milik Perseroan

Dispute of Land Used for the Depot of Mass Rapid Transit of the Corporation

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|--|--|--|
| Perkara Case | Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa tanah yang digunakan sebagai Depo Mass Rapid Transit ("Depo MRT") antara lain: | <i>Tort Lawsuit concerning dispute of land used for Depot of Mass Rapid Transit ("Depo MRT") as follows</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Para Penggugat: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>(1) Indartono</td> <td>(5) Murja</td> <td>(9) H. Sa'amah</td> <td>(12) Widyastuti Listiani</td> </tr> <tr> <td>(2) Saiyah</td> <td>(6) H. Hamzah</td> <td>(10) Abd. Azis</td> <td>(13) Abdullah</td> </tr> <tr> <td>(3) Agus Sugianto</td> <td>(7) Sukarti</td> <td>(11) Yurmaini</td> <td>(14) Suwarti</td> </tr> <tr> <td>(4) Kusnah</td> <td>(8) Hj. Ucu Siti Komariah</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | (1) Indartono | (5) Murja | (9) H. Sa'amah | (12) Widyastuti Listiani | (2) Saiyah | (6) H. Hamzah | (10) Abd. Azis | (13) Abdullah | (3) Agus Sugianto | (7) Sukarti | (11) Yurmaini | (14) Suwarti | (4) Kusnah | (8) Hj. Ucu Siti Komariah | | | <ul style="list-style-type: none"> <i>The Plaintiffs:</i> |
| (1) Indartono | (5) Murja | (9) H. Sa'amah | (12) Widyastuti Listiani | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Saiyah | (6) H. Hamzah | (10) Abd. Azis | (13) Abdullah | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Agus Sugianto | (7) Sukarti | (11) Yurmaini | (14) Suwarti | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) Kusnah | (8) Hj. Ucu Siti Komariah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Tergugat I: Ketua Pengadaan Tanah/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan; Tergugat II: Gubernur DKI Jakarta; Tergugat III: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Tergugat IV: Walikota Jakarta Selatan; Turut Tergugat I: PT MRT Jakarta (Perseroda); Turut Tergugat II: Kepala Kelurahan Lebak Bulus; dan Turut Tergugat III: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Defendant I: Head of Land Acquisition/Head of the Department of National Land Agency of South Jakarta City;</i> <i>Defendant II: the Governor of DKI Jakarta;</i> <i>Defendant III: Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta Province</i> <i>Defendant IV: Mayor of South Jakarta;</i> <i>Co-defendant I: PT MRT Jakarta (Perseroda);</i> <i>Co-defendant II: Head of Lebak Bulus Subdistrict; and</i> <i>Co-defendant III: Head of the Department of Youth and Sport of DKI Jakarta Province</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Singkat Pokok Perkara Brief Description of Subject Case | <ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 22 Maret 2019 Para Penggugat selaku Pemilik Hak Garap mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya mengenai permintaan ganti kerugian atas penggunaan tanah yang berlokasi di Jalan Lebak Bulus dengan luas ±500 m² (lima ratus meter persegi) yang saat ini dibangun Depo MRT; Adapun berdasarkan pemeriksaan pengadilan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tanah yang disengketakan beralakan Hak Pakai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 134/Lebak Bulus dan No. 232/Lebak Bulus; Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanahnya. Bahwa melalui Putusan Majelis Hakim tertanggal 20 April 2020 diputus bahwa pada pokoknya tanah yang digunakan sebagai Depo MRT bukanlah milik Para Penggugat, dengan lebih terperinci berbunyi sebagai berikut: <p>"Mengadili Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak tuntutan provisi para Penggugat <p>Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.786.000." | <ul style="list-style-type: none"> <i>On March 22, 2019, the Plaintiffs as Tenants filed a Tort Lawsuit whose subject case concerns the request of compensation for the usage of land at Lebak Bulus Street of +500 m² (five hundred squared meters) on which the Depo MRT is currently being constructed;</i> <i>Based on the investigation of the court, the results are as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>The status of the land in dispute is Tenancy with Tenancy Certificate No. 134/Lebak Bulus and No. 232/Lebak Bulus;</i> <i>The Plaintiffs cannot prove the ownership of the land.</i> <i>That through Decree of the Panel of Judge dated April 20, 2020, it is decided that the land used as Depo MRT is not owned by the Plaintiffs, and in details stated as follows:</i> <p><i>"To adjudicate</i> <i>In preliminary injunction:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>To reject the claim of preliminary injunction from the Plaintiffs;</i> <p><i>In exception</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>To reject the exception of Defendant I, Defendant IV, and Co-defendant II;</i> <p><i>In Subject Case:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>To reject all claims of the Plaintiffs;</i> <i>To penalise the Plaintiffs to pay the court costs of IDR 3,786,000"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Perkara Case Status | Persidangan tingkat pertama telah selesai dan tidak ada upaya hukum banding, sehingga putusan telah inkraht dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Negara Jakarta Selatan Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel pada tanggal 20 April 2020. | <i>The first trial has been completed and there is no appeal, therefore the court decision now has permanent legal force in accordance with the South Jakarta District Court Decision Number: 28/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dated April 20, 2020.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risiko yang Dihadapi Perseroan Risks Faced by the Corporation | Gugatan Pengadilan mengenai sengketa lahan dapat menimbulkan publikasi yang buruk mengenai hak atas tanah bangunan milik Perseroan yang dikhawatirkan dapat mengganggu bisnis Perseroan. | <i>Court lawsuit concerning land dispute may cause bad publication regarding the rights of and building of the Corporation that may disrupts the business of the Corporation.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut Perseroan Follow-up by the Corporation | Dikarenakan hasil putusan menyatakan bahwa lahan tersebut tidak dimiliki oleh Para Penggugat, maka tidak ada pengaruh hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh Perseroan. | <i>As the court decision states that the land does not owned by the Plaintiffs, therefore there is no legal impact to be followed up by the Corporation.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pengungkapan Perkara yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Cases Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

Pada tahun 2020, tidak terdapat perkara yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga tidak ada pengungkapan tentang jenis perkara, uraian singkat pokok perkara, status perkara, risiko yang dihadapi Perseroan, dan tindak lanjut Perseroan.

In 2020, there were not any cases faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors, therefore there is no disclosure concerning the type of cases, a brief description of the substance of the case, status of the case, risks faced by the Corporation, and follow-up by the Corporation.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Disclosure of Administrative Sanctions by Related Authorities

Pada tahun 2020, tidak terdapat sanksi administrasi oleh otoritas terkait terhadap Perseroan, sehingga tidak ada pengungkapan terkait sanksi administrasi.

In 2020, there were not any administrative sanctions by related authorities to the Corporation, therefore there is no disclosure concerning the administrative sanctions.

Perkara Penting Di Luar Aspek Hukum

Important Matters Outside Legal Aspects

Pada tahun 2020, tidak terdapat perkara penting di luar aspek hukum yang dihadapi oleh Perseroan, sehingga tidak ada pengungkapan terkait perkara penting di luar aspek hukum.

In 2020, there were not any important matters outside legal aspects faced by the Corporation, therefore there is no disclosure concerning the important matters outside legal aspects.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Goods and Service Procurement Policy

Proses pengadaan menjadi tanggung jawab Departemen Procurement, yang menjadi bagian dari Divisi *General Affairs & Procurement*. Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan atau SCMM diterbitkan sebagai salah satu syarat penting dalam tata kelola Perseroan yang baik dan menjadi rujukan bagi entitas Perseroan secara menyeluruh tanpa pengecualian dengan pemangku kepentingan, terutama untuk pihak penyedia yang memenuhi kebutuhan Perseroan.

Kebijakan SCMM menjadi panduan dalam menyusun Perencanaan Persediaan, Penganggaran, Manajemen Pemilihan Penyedia, Kemitraan Bebas Biaya, Kerja sama Operasi, Proses Pengadaan, Manajemen Persediaan dan Manajemen Kontrak, serta Audit yang berkaitan dengan kriteria Perseroan. Kebijakan SCMM

terdiri dari 10 bagian, di antaranya Penganggaran, Pasokan dan Perencanaan, Permintaan Pembelian, Strategi Pemilihan, Metode Pengadaan, Manajemen Kontrak, Manajemen Persediaan, Sistem Informasi Pengadaan, serta Evaluasi dan Pemantauan.

Perseroan secara konsisten berupaya meningkatkan proses pengadaan menuju tahapan kolaboratif dan pengadaan berbasis digital dengan menerapkan *e-procurement*, sesuai peta jalan. Penerapan *e-procurement* akan mendorong terciptanya pengadaan yang lebih efisien dan efektif melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi antar mitra strategis, serta optimalisasi penggunaan teknologi yang dapat memperkuat pengadaan untuk menjadi salah satu pendorong peningkatan daya saing Perseroan. Informasi tentang *e-procurement*, dapat lihat pada website <https://eproc.jakartamrt.co.id/>.

The Procurement process is the responsibility of the Procurement Department as a part of the General Affairs & Procurement Division. The Supply Chain Policies and Procurement Mechanism (SCMM) are issued as one of the critical requirements for Good Corporation Governance and to become a reference across the Corporate without exceptions with stakeholders, especially for suppliers that supply the Corporation's needs.



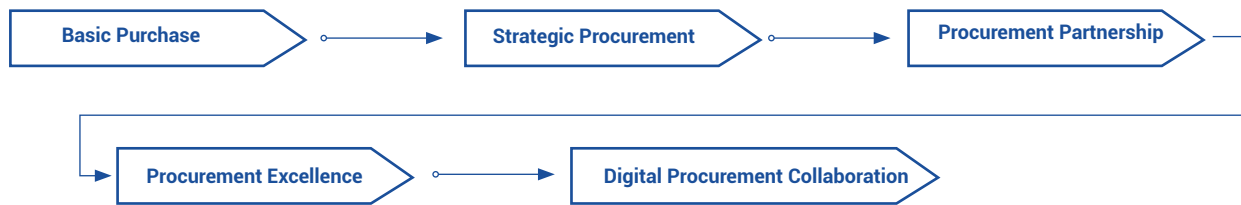
SCMM Policy serves as guidelines in preparing Inventory Planning, Budgeting, Sourcing Management, Zero Cost Partnership, Joint Operation, Procurement Process, Inventory Management and Contract Management, and Audit relating to the Corporation criteria. SCMM policy consists of 10 parts,

namely Budgeting, Supply and Planning, Purchase Requisition, Sourcing, Procurement Method, Contract Management, Inventory Management, Procurement Information system, and Review and Monitoring.

The Corporation consistently improves the procurement process to be collaborative digital-based procurement by implementing e-procurement, in line with the roadmap. The implementation of e-procurement will drive more efficient and effective procurement through improvement of synergy and collaboration among strategic partners, and optimisation of technology utilisation to strengthen procurement to become a lever that enhances the Corporation's competitiveness. Information concerning e-procurement is presented on the website <https://eproc.jakartamrt.co.id/>.

Peta Jalan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan

Roadmap of Corporate Goods and Service Procurement



Kinerja Pengadaan Tahun 2020

Procurement Performance in 2020

Sepanjang tahun 2020, Departemen Procurement melaksanakan 154 proses pengadaan. Sejalan dengan kebijakan efisiensi Perseroan, proses pengadaan telah memberikan potensi penghematan sebesar Rp18,9 miliar dari nilai penawaran dibandingkan nilai kontrak. Adapun 5 (lima) kegiatan Pengadaan dengan penghematan tertinggi, di antaranya:

1. Pengadaan *Interior Fit Out dan Meubelair Head Office* PT MRT Jakarta (Perseroda);
2. Pengadaan *Jasa Konsultasi TOD*;
3. Pengadaan *Asuransi Operasional*;
4. Pengadaan *Jasa Boga*;
5. Pengadaan *Internet Service Provider*.

Secara periodik Perseroan melaksanakan Survei Kepuasan Penyedia yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi penyedia atas proses pengadaan Perseroan, dan mendapatkan tanggapan dari penyedia guna pengembangan pengadaan ke depan. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan tahun 2020, persepsi penyedia atas pengadaan di Perseroan menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 88%, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 85%.

In 2020, the Procurement Department executed 154 procurement processes. In accordance with the efficiency policy of the Corporation, the procurement processes have given potential cost-saving of IDR 18.9 billion of the offer value compared to the contract value. The 5 Procurement activities with the greatest cost saving are:

1. *Procurement of Fit Our Interior and Furnitures for the Head Office of PT MRT Jakarta (Perseroda);*
2. *Procurement of TOD Consultancy Service;*
3. *Procurement of Operational Insurance;*
4. *Procurement of a Catering Service;*
5. *Procurement of an Internet Service Provider.*

The Corporation periodically conducts the Supplier Satisfaction Survey which aims to obtain suppliers' perception of the procurement process of the Corporation and to obtain a response from suppliers concerning procurement improvement in the future. Based on the results of the survey carried out in 2020, suppliers' perception of the procurement process at the Corporation showed a satisfaction rate of 88%, increased from that of 2019 at 85%.



06

**TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sustainability Policy And Social and Environmental Responsibility Governance



Kegiatan Menanam Pohon di Depo Lebak Bulus
Planting Trees at Lebak Bulus Depot

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam mengelola risiko bisnis, dan kontribusi pada upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kegiatan TJSL dijalankan sesuai ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, dan standar lain yang berlaku nasional maupun global, dengan mengedepankan integritas melalui pencapaian Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Melalui pelaksanaan TJSL selama periode pelaporan, Perseroan berupaya melaksanakan kegiatan operasi dan bisnis yang berkeadilan, menerapkan resiliensi perubahan iklim, serta memberdayakan masyarakat, dengan tetap memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh pemangku kepentingan di masa pandemi COVID-19. Komitmen tersebut diwujudkan dengan perolehan sertifikasi ISO 45001:2018 Manajemen K3; ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), dan ISO 14000 Sistem Manajemen Lingkungan.

The implementation of social and environmental responsibility (SER) by the Corporation is the realisation of the Corporation's commitment to manage business risks and and contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs). SER activities are carried out in accordance with ISO 26000 concerning Guidelines of Social Responsibilities and other nationally and globally applicable standards while prioritising integrity through the achievement of certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.

Through the implementation of SER during the reporting period, the Corporation strives to execute fair operational and business activities, implement resiliency against climate change, and empower the public while ensuring the health and safety of all Stakeholders amidst the COVID-19 pandemic. Such commitment is realised through the achievement of certification of ISO 45001:2018 OSH Management, ISO 9001:2015 Quality Management System (ISO 9001:2015), and ISO 14000 Environmental Management System.

Kebijakan Keberlanjutan

Sustainability Policy

Pemenuhan TJSJ mengacu pada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*) dan Kebijakan Keberlanjutan Perseroan. Pemenuhan TJSJ juga dilandasi pada kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan ISO 26000, pemenuhan TJSJ yang dilaksanakan Perseroan mencakup 7 (tujuh) subjek inti tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan terintegrasi di seluruh kegiatan Perseroan, diantaranya tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, isu lingkungan, prosedur operasi yang wajar, isu konsumen dan pelibatan dan pengembangan masyarakat. Sejalan dengan ISO 26000, Perseroan juga telah menyusun Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*) sebagai pedoman guna mendukung operasi Perseroan yang berkelanjutan.

The implementation of SER refers to ISO 26000 concerning Guidance on Social Responsibility and Sustainability Policy of the Corporation. The implementation of SER also refers to the obligation as regulated by the laws and regulations of the Republic of Indonesia as follows:

1. *Government Regulation No. 47 Year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Corporation;*
2. *Government Regulation No. 50 Year 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System;*
3. *Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 112 Year 2013 concerning Social and Environmental Responsibilities of Enterprises;*
4. *Law No. 1 Year 1970 concerning Occupational Safety;*
5. *Law No. 13 Year 2004 concerning Employment;*
6. *Law No. 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

In accordance with ISO 26000, the implementation of SER by the Corporation covers 7 (seven) core subjects of social responsibility that are integrated across the activities of the Corporation, namely organisational governance, human rights, labour practices, environmental issues, fair operational procedures, consumer issues, and public empowerment. In line with ISO 26000, the Corporation has developed Sustainability Policy as guidelines to support the sustainable operations of the Corporation.



Berdasarkan konteks keberlanjutan yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka keberlanjutan Perseroan disusun berdasar dua pilar utama, yakni *Increasing Mobility* dan *Ensuring Sustainability*. Perseroan juga saat ini sedang menyusun Peta Jalan Keberlanjutan perusahaan yang akan diadopsi ke dalam penyempurnaan RJPP 2021.

Based on the sustainability context as previously discussed, the Corporate sustainability framework is established based on two main pillars, namely Increasing Mobility and Ensuring Sustainability. The Corporation is currently establishing a Corporate Sustainability Roadmap to be adopted in the finalisation of the 2021 RJPP.

Pilar Utama Keberlanjutan Perseroan
Main Sustainability Pillars of the Corporation

Increasing Mobility

Pilar ini mencakup praktik keberlanjutan Perseroan yang fokus pada kepuasan, kesehatan dan keselamatan pengguna jasa MRT Jakarta, termasuk di dalamnya, praktik tanggung jawab sosial terhadap kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus yang juga berhak menggunakan layanan transportasi MRT Jakarta.
This pillar covers sustainability practices of the Corporation that focuses on the satisfaction, health, and safety of the passengers of MRT Jakarta, including social responsibility practices to the vulnerable groups and people with disabilities who have equal rights to use the transportation service of MRT Jakarta.

Ensuring Sustainability

Pilar ini menekankan pada praktik tanggung jawab sosial Perseroan dalam meningkatkan kualitas hidup para pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk aspek ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Melalui pilar ini, Perseroan fokus mengelola aspek ketenagakerjaan dan pemberdayaan.
This pillar highlights the Corporate social responsibility in improving the welfare of internal and external stakeholders, covering the economic, environmental, and social aspects. Through this pillar, Corporation focuses on managing labour and empowerment aspects.

Pemangku Kepentingan Terdampak dan/atau Berpengaruh pada Kegiatan Perseroan

Impacted and/or Influential Stakeholders to the Corporate Activities

Salah satu aspek penerapan TJSJL sesuai ISO 26000 dan Kebijakan Keberlanjutan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan terdampak dan/atau berpengaruh pada kegiatan Perseroan. Berdasarkan bentuk relasi yang terbangun selama ini, Perseroan mencatat ada 13 kategori pemangku kepentingan. Laporan ini hanya menyampaikan informasi masing-masing pemangku kepentingan dan hubungannya dengan Perseroan. Untuk informasi tentang bentuk pelibatan masing-masing pemangku kepentingan, dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Perseroan 2020.

One of the aspects of SER implementation based on ISO 26000 and Sustainability Policy is the identification of impacted and/or influential stakeholders to the Corporation activities. Based on the network that has been built, the Corporation recorded 13 categories of stakeholders and their relationship with the Corporation. The information concerning the involvement of each stakeholder is presented in the 2020 Sustainability Report of the Corporation.

| Pemangku Kepentingan Stakeholders | Hubungan Relationship |
|--|--|
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>The Government of DKI Jakarta Province</i> | Sebagai Pemegang Saham <i>As the Shareholder</i> |
| Pemerintah <i>The Government</i> | Sebagai Regulator <i>As the Regulator</i> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; <i>Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia; <i>Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Keuangan Republik Indonesia; <i>Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; <i>Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; <i>Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; <i>Ministry of National Development Planning/BAPPENAS;</i> • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; <i>Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia; <i>Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia; <i>Ministry of Research and Technology/National Agency for Research and Innovation of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; dan <i>Ministry of Research and Technology/National Agency for Research and Innovation of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <i>Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia;</i> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <i>Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia.</i> • Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Labour of the Republic of Indonesia.</i> |
| Penyandang Dana <i>Funder</i> | Perjanjian Peminjaman Dana dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) <i>Loan Agreement with Japan International Cooperation Agency (JICA)</i> Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) <i>Loan for National Economic Recovery (PEN) by PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)</i> |

| Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i> | Hubungan <i>Relationship</i> |
|--|--|
| Karyawan, termasuk serikat pekerja <i>Employees, including labor union</i> | Ketenagakerjaan <i>Employment</i> |
| Pemasok <i>Suppliers</i> | Penyedia barang dan jasa untuk Perseroan, termasuk kontraktor. <i>Providers of goods and services for the Corporation, including contractors.</i> |
| Pengguna Jasa <i>Passengers</i> | Konsumen MRT termasuk asosiasi pengguna MRT, sebagai pengguna jasa MRT Jakarta. <i>MRT customers, including the association of MRT customers, as passengers of MRT Jakarta.</i> |
| | Konsumen Kawasan Berorientasi Transit (KBT), sebagai pengguna. <i>Customers of Transit-Oriented Development (TOD), as users.</i> |
| Mitra Komersial <i>Commercial Partners</i> | Mitra strategis, yang bermitra melalui proses tender dengan skema <i>revenue sharing</i> atau garansi minimal. <i>Strategic partners, whose partnerships were founded through tender with the scheme of revenue sharing or minimal guarantee.</i> |
| | Mitra langsung, yaitu mitra yang membeli layanan atau hak dari Perseroan. <i>Direct partners, i.e., partners who purchase the services or rights from the Corporation.</i> |
| | Mitra retail, yaitu tenant yang bekerja sama dengan Perseroan. <i>Retail partners, i.e., tenants who are in collaboration with the Corporation.</i> |
| | Mitra layanan pembayaran, yaitu institusi perbankan dan penyedia <i>financial technology</i> (<i>fintech</i>) serta lembaga jasa keuangan lainnya, yang menjalin kerja sama komersial dengan Perseroan. <i>Payment service partners, i.e., banking institution and financial technology (fintech) service providers and other financial service institutions in commercial collaboration with the Corporation.</i> |
| Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i> | Kegiatan usaha milik masyarakat skala mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dengan Perseroan. <i>Business of the community within the micro, small, and middle scale in partnership with the Corporation.</i> |
| Mitra kerja strategis <i>Strategic partners</i> | <p>Institusi meliputi asosiasi, organisasi <i>nonprofit</i>, universitas, dan pihak ketiga yang mendukung <i>feeder system</i> dan <i>benefit-benefit</i> yang diberikan ke pengguna jasa, serta pemilik lahan dan bangunan di sekitar jalur MRT. <i>Institutions, including associations, non-profit organisations, universities, and third parties that support the feeder system and benefits provided to the passengers, as well as land and building owners around the MRT track.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ); <i>Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ);</i> • Bank Indonesia; <i>Bank Indonesia;</i> • Yayasan Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP); <i>Indonesian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP);</i> • Yayasan Institut Sumber Daya Dunia Dalam Bahasa Inggris disebut World Resources Institute Foundation (WRI); <i>World Resources Institute (WRI);</i> • Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB); <i>School of Business and Management, Bandung Institute of Technology (SBM ITB);</i> • Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ); <i>Jakarta's Board of Transportation (DTKJ);</i> • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); <i>Corruption Eradication Commission (KPK);</i> • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); dan <i>Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG); and</i> • Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta (Basarnas). <i>National Search and Rescue Agency Jakarta (Basarnas).</i> |
| Media Massa <i>Mass Media</i> | Keterbukaan informasi <i>Information transparency</i> |

| Pemangku Kepentingan Stakeholders | Hubungan Relationship |
|--|---|
| Pemangku kepentingan lain pada sektor transportasi publik <i>Other Stakeholders in the sector of public transportation</i> | Sebagai mitra penyelenggara transportasi publik. <i>As partners of public transportation providers.</i> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kereta Api Indonesia (Persero); • PT Kereta Commuter Indonesia; • PT Transportasi Jakarta; • PT LRT Jakarta; • PT Railink (Kereta Bandara); • PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek; dan • PT Jakarta Propertindo (Perseroda). |
| Kelompok swadaya masyarakat, yang bersifat kekhususan atau peminatan. <i>Non-governmental agencies of certain department or interest.</i> | Sebagai mitra bagi peningkatan layanan penggunaan jasa. <i>As partners to improve the service for service users.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Komunitas penyandang disabilitas; <i>Communities of people with disabilities;</i> • Komunitas sepeda; <i>Communities of bicycle users;</i> • Komunitas pejalan kaki; dan <i>Communities of pedestrian; and</i> • Komunitas lain. <i>Other communities.</i> |
| Masyarakat umum <i>The public</i> | Individu atau kelompok yang memiliki ketertarikan terhadap MRT Jakarta. <i>Individuals or groups with interests in MRT Jakarta.</i> |

Tata Kelola Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Governance

Tata kelola Kinerja Keberlanjutan termasuk pemenuhan TJSL menjadi tanggung jawab Direksi dan dilaksanakan secara kolektif, dengan dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu seluruh Divisi Direktorat Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya yang relevan. Berbagai penyesuaian dan tindak lanjut telah dilakukan selama periode pelaporan, guna memenuhi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dan sejalan dengan penerapan Kebijakan Keberlanjutan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Sustainability Performance Governance including the implementation of SER is the responsibility of the Board of Directors to be implemented collectively under the leadership of the President Director. In the implementation, the Board of Directors is assisted by all Divisions of the Main Directorate based on their relevant duties and functions. Various adjustment and follow-ups have been carried out during the reporting period in order to fulfil the requirements of each stakeholder and to be in line with the implementation of the Sustainability Policy. The monitoring and evaluation are carried out by the Board of Commissioners.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PEMENUHAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Concerning Human Rights Fulfillment

Perseroan berkomitmen menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan, Perseroan menerapkan kebijakan berikut:

1. Mempertimbangkan aspek HAM, termasuk potensi adanya pelanggaran HAM, dalam setiap keputusan perusahaan.
2. Melakukan berbagai upaya yang diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM di wilayah operasional Perseroan, seperti diskriminasi di tempat kerja atau pelecehan seksual pengguna jasa, serta pelanggaran HAM masyarakat setempat pada fase konstruksi.
3. Melakukan berbagai upaya guna memenuhi hak dasar karyawan di tempat kerja.

Perseroan berkomitmen melakukan uji tuntas (*due diligence*) HAM pada periode lima tahun sekali. Sesuai peta jalan, uji tuntas dilakukan dengan beberapa alternatif, misalnya seperti *social footprint assessment*, *human rights impact assessment*, tercakup dalam AMDAL dan tercakup dalam pemetaan sosial (*social mapping*).

The Corporation is committed to uphold human rights within the operations and business activities. In accordance with the Sustainability Policy, the Corporation implements the policies as follows:

1. *Considering human rights aspects, including the potential of human rights violation, in the decision-making process of the Corporation.*
2. *Taking various efforts required in order to prevent human rights violations within the operating areas of the Corporation, such as workplace discrimination or sexual harassment of passengers, as well as human rights violation among the local community during the construction phase.*
3. *Taking various efforts to fulfil the basic rights of the employees at the workplace.*

The Corporation is committed to carrying out human right due diligence once in five years. Based on the roadmap, the due diligence is carried out through various alternatives, such as social footprint assessment, human rights impact assessment, as covered by AMDAL and covered by social mapping.

Pemenuhan Hak Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus

Fulfilment of the Rights of Vulnerable Groups and People with Disabilities

Perseroan berkomitmen memenuhi hak kelompok rentan dan berkebutuhan khusus dalam menggunakan jasa MRT Jakarta. Perseroan berupaya menyediakan dan mengelola fasilitas dan layanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, yang disesuaikan dengan jumlah stasiun.

Realisasi komitmen Perseroan bagi pemenuhan hak kelompok rentan dan berkebutuhan khusus membuahkan penghargaan platinum dalam DTKJ Awards 2020 untuk kategori penyedia layanan transportasi berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Penghargaan diberikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Dalam penilaiannya, DTKJ menyebutkan MRT Jakarta telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi pengguna jasa difabel.

The Corporation is committed to fulfilling the rights of vulnerable groups and people with disabilities in using the services of MRT Jakarta. The Corporation strives to provide and manage the facilities for vulnerable groups and people with disabilities, in line with the number of stations.

The realisation of the commitment of the corporation to fulfil the rights of vulnerable groups and people disabilities was awarded with the platinum award from DTKJ Award 2020 for the category of transportation service provider with equality for disabled people. The award was granted by Jakarta's Board of Transportation (DTKJ). In the assessment, DTKJ mentioned that MRT Jakarta has provided various facilities and services for passengers with disabilities.

Fasilitas yang disediakan, antara lain *lift* prioritas yang tersedia dari lantai dasar hingga peron pengguna jasa, ketersediaan *ramp* atau bidang miring untuk pengguna kursi roda saat masuk stasiun dan kereta. Selain itu, terdapat juga toilet khusus difabel hingga ruang kursi roda di kereta nomor tiga dan empat. Bagi calon pengguna jasa kursi roda dapat melewati pintu khusus yang lebih lebar di lokasi pemeriksaan tiket. Terdapat juga layar informasi untuk tuli, hingga tanda khusus sebagai pengguna jasa prioritas.

The facilities provided include priority elevators that are available from the ground level to the passenger's platform and ramps for wheelchair users to enter the stations and the trains. In addition, there are toilets for people with disabilities and space for wheelchair users in carriage number three and four. Passengers with a wheelchair can also pass a wider gate for ticket checking. There is also an information screen for deaf passengers and special signs for priority passengers.

Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Pekerja

Fulfillment of Rights and Welfare of the Employees

Pengungkapan informasi terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja, lihat halaman 528 dalam bahasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan.

Information disclosure concerning the fulfillment of rights and welfare of the employees is presented on page 528 under the discussion of Corporate Social Responsibility concerning Employment.



*Insan PT MRT Jakarta (Perseroda) pada Ulang Tahun Perseroan ke-12
Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) on the Corporation 12th Anniversary*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility concerning Fair Operations

Sesuai ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, operasi yang adil didefinisikan sebagai praktik yang mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*), serta penghargaan atas hak kepemilikan (*property rights*). Dalam hal dukungan pada anti korupsi, Perseroan telah mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) atau WBS dan mengelola Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Komitmen Perseroan pada anti korupsi, pada tahun 2020 meraih Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam hal keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, Perseroan memberikan hak berpolitik kepada setiap karyawan. Meskipun demikian, Perseroan memiliki ketentuan internal yang melarang karyawan melakukan kegiatan politik mengatasnamakan Perseroan dan/atau menggunakan fasilitas Perseroan. Selain itu, Perseroan memastikan selama tahun 2020 tidak ada Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat perusahaan yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Dalam hal promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok, Perseroan berkomitmen mendorong perusahaan yang menjadi mitra kerja untuk menerapkan praktik-praktik ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku, terkait penerapan pengupahan sesuai upah minimum, memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta melibatkan pekerja lokal. Secara berkala Perseroan juga melakukan evaluasi kinerja pemasok, dengan tujuan mendapatkan laporan terkait kinerja vendor serta umpan balik dari para pengguna untuk pengembangan proses pengadaan di masa depan. Berdasarkan hasil survei 2020, rata-rata tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja vendor adalah 85,37 meningkat 4,16 poin dibanding tahun 2019 sebesar 81,21. Dalam hal penggunaan atas hak paten tertentu atau hak kepemilikan karya yang digunakan, Perseroan telah melakukan proses pendaftaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

In accordance with ISO 26000 concerning Social Responsibility Guidelines, fair operation is defined as practices that include anti-corruption, responsible involvement in politics, a fair competition, promotion of social responsibility within the supply chain, and awards for property rights. Concerning the anti-corruption point, the Corporation has developed a whistleblowing system (WBS) and managed Gratification Control Unit (UPG). The commitment of the Corporation for anti-corruption resulted in the achievement of the Certificate of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in 2020.

Concerning responsible involvement in politics, the Corporation grants the rights of politics to every employee. However, the Corporation implements internal provisions that forbid the employees to carry out political activities on behalf of the Corporation and/or using the facilities of the Corporation. In addition, the Corporation ensures that in 2020 there were no members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and corporate officials with concurrent position as administrators of political parties.

Concerning the promotion of social responsibility within the supply chain, the Corporation is committed to encouraging the partner corporations to implement labour practices in accordance with the prevailing regulations, concerning the implementation of minimum wage, availability of occupational safety and health (OSH) management system, and involvement of local workers. The Corporation evaluates the performance of suppliers regularly in order to obtain the performance reports of the vendors and feedbacks from users for the procurement improvement in the future. Based on the survey results in 2020, the average user satisfaction concerning the vendor performance was 85.37, which increased by 4.16 points from the score of 81.21 in 2019. In terms of utilisation of certain patent rights or ownership rights over works that are used, the Corporation has carried out the registration process in accordance with the prevailing laws and regulations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN

Corporate Social Responsibility concerning the Environment

Kebijakan lingkungan Perseroan termasuk dalam Peraturan Direksi No.PER/045/BOD-MRT/XI/2020 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Perkeretaapian, Lingkungan, dan Pengamanan). Perseroan berkomitmen menjadikan kawasan operasional dan kantor ramah lingkungan; menerapkan resiliensi perubahan iklim melalui pengelolaan energi dan pengendalian emisi; serta menerapkan dan mempertahankan sertifikat ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

Komitmen Perseroan dilaksanakan sejak dari tahapan pembangunan/konstruksi dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon di area terdampak. Upaya lain yang dilakukan Perseroan adalah secara bertahap melakukan konservasi air bersih dan daur ulang air limbah di area operasi MRT Jakarta, pengelolaan energi, pengendalian emisi dan penerapan program kantor hijau, termasuk menghindari pemakaian plastik.

Pengungkapan informasi lengkap tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan dapat dilihat dalam **Laporan Keberlanjutan 2020 PT MRT Jakarta (Perseroda)**. Pengungkapan informasi dalam Laporan ini bersifat umum sebagai bentuk pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

The Environmental Policy of the Corporation is included in the Directors' Regulation No. PER/045/BOD-MRT/XI/2019 concerning Integrated Management System (Quality, Occupational Safety and Health, Railway Safety, Environment, and Security). The Corporation is committed to realising environmentally friendly office and operational areas; implementing resiliency against climate change through energy and emission control; and certification of ISO 14001:2015 concerning Environmental Management System.

The Commitment of the Corporation is carried out since the construction phase by replanting the trees in the impacted areas. Other efforts taken by the Corporation is gradually conserving clean water and wastewater recycling within the operating areas of MRT Jakarta, energy management, emission control, and implementation the Green Office Programme, including refraining from using plastics.

The disclosure of complete information concerning the implementation of corporate social responsibility concerning the environment is presented in the Sustainability Report 2020 of PT MRT Jakarta (Perseroda). The information disclosure in this document is general in nature, as a form of compliance with the provisions as regulated by the Regulations of the Financial Service Authority.

Penanaman Kembali Pohon di Area Terdampak

Replanting Trees in Impacted Areas

Sejalan dengan dimulainya proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2, Perseroan berkomitmen meminimalkan dampak lingkungan di area proyek dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang terdampak. Sampai dengan akhir tahun 2020 Perseroan menanam kembali 1.707 pohon, sebagai bagian dari pengerjaan proyek pembangunan paket kontrak.

Ribuan pohon tersebut ditanam di beberapa tempat seperti kawasan area kandang rusa di Monumen Nasional dan beberapa lokasi lainnya. Jumlah pohon yang ditanam mengikuti hasil rekomendasi Unit Pengelola Kawasan

In line with the commencement of the Phase 2 MRT Jakarta construction process, the Corporation is committed to minimising the environmental impacts around the project areas by replanting the impacted trees. As of the end of 2020, the Corporation has replanted 1,707 trees as a part of the implementation of the construction contract package.

Thousands of trees were planted in various areas, such as in the deer cage area around the National Monument and other locations. The number of trees planted is in accordance with the recommendation of the Areal

(UPK) Monumen Nasional (Monas), serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Ukuran pohon yang akan ditanam memiliki tinggi minimal tiga meter dengan diameter batang sekitar 20 sentimeter, sebanyak 40 jenis pohon yang ditanam, di antaranya mahoni, bungur, trembesi, tabebuaya, angsana, sawo dan lain-lain.

Management Unit (UPK) of the National Museum (Monas) and the Department of Park and Urban Forest of DKI Jakarta Province. The size of the trees to be planted are at least three meters in height and 20 centimetres in diameter. There are 40 types of trees planted, including mahogany, crape myrtle, saman, golden-trumpet, rosewood, and sapodilla.

Konservasi Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah

Clean Water Conservation and Liquid Waste Management

Perseroan berupaya untuk melakukan konservasi air bersih, melakukan pengukuran air bersih di area konstruksi fase 2A, dan memastikan air limbah yang dihasilkan selalu memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Perundangan. Air limbah dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta berasal dari pemakaian air untuk kebutuhan domestik karyawan dan pengguna jasa, serta dari kegiatan pencucian kereta.

The Corporation strives to conserve clean water, test clean water in phase 2A construction area, and ensure that wastewater fulfills the quality standards as set by the Regulations. Wastewater, in terms of MRT Jakarta operational and maintenance activities, comes from the usage of water for domestic uses by the employees and passengers as well as from train washing activities.

Pengolahan air limbah dilakukan dengan membangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di setiap stasiun, Depo, dan RSS. Kualitas air limbah dipantau secara periodik, baik per hari maupun per bulan, dimana hasilnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hasil pemeriksaan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak berwenang. Dari pemeriksaan diketahui bahwa kualitas olahan air limbah di 25 Sewage Treatment Plan (STP) dan 1 Industrial Waste Water Treatment Plan (IWWTP) per Desember 2020 telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.

Wastewater management is carried out by constructing a wastewater treatment plant (IPAL) at each station and depot. Effluent quality is periodically monitored, both daily and monthly, whose results are to be reported to the authorities. Based on the monitoring results, the quality of effluent in 25 Sewage Treatment Plan (STP) and 1 Industrial Waste Water Treatment Plan (IWWTP) as of December 2020 has fulfilled the water quality standards as regulated by the Government.

| Parameter | Satuan Unit | Baku Mutu Standards | Rata-rata Average | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Tertinggi Highest | Terendah Lowest |
| pH | - | 6-9 | 7,86 | 6,50 |
| BOD5 | mg/L | 30 | 12,99 | 2,98 |
| COD | mg/L | 100 | 40,76 | 14,21 |
| TSS | mg/L | 30 | 11,8 | 2,52 |
| Minyak & Lemak | mg/L | 5 | 1,56 | 0,2 |
| Amoniak | mg/L | 10 | 6,31 | 0,11 |
| Total Koliform | MPN/ 100 ml | 3.000 | 948,4 | 33,27 |

Hasil Pemeriksaan Kualitas Olahan Air Limbah IWWTP (Industrial Wastewater Treatment Plant)
Evaluation Results of Effluent Quality at IWWTP (Industrial Wastewater Treatment Plant)

| Parameter | Satuan Unit | Baku Mutu Standards | | Hasil Pengujian Evaluation Results | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | Gol 1 Type1 | Gol 2 Type2 | Tertinggi Highest | Terendah Lowest |
| Temperatur (Insitu) Temperature (In Situ) | °C | 38 | 40 | 31 | 24,4 |
| Zat Padat Terlarut (TDS) Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 2.000 | 4.000 | 431 | 28,1 |
| Zat Padat Tersuspensi (TSS) Total Suspended Solid (TSS) | mg/L | 200 | 400 | 3 | 1 |
| pH (Insitu) pH (In Situ) | - | 6 | 9 | 7,8 | 6,5 |
| Besi Terlarut (Fe) Dissolved Metal (Fe) | mg/L | 5 | 10 | 0,33 | <0,001 |
| Mangan Terlarut (Mn) Dissolved Manganese (Mn) | mg/L | 2 | 5 | 0,2 | 0,003 |
| Barium (Ba) | mg/L | 2 | 3 | 0,07 | 0,009 |
| Tembaga (Cu) Copper (Cu) | mg/L | 2 | 3 | <0,03 | <0,001 |
| Seng (Zn) Zinc (Zn) | mg/L | 5 | 10 | 0,1 | 0,04 |
| Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Hexavalent chromium (Cr6+) | mg/L | 0,1 | 0,5 | 0,01 | <0,003 |
| Krom Total (Cr) Total Chromium (Cr) | mg/L | 0,5 | 1 | 0,1 | <0,001 |
| Kadmium (Cd) Cadmium (Cd) | mg/L | 0,05 | 0,1 | 0,1 | <0,001 |
| Air Raksa (Hg) Mercury (Hg) | mg/L | 0,002 | 0,005 | 0,0006 | <0,0002 |
| Timbal (Pb) Lead (Pb) | mg/L | 0,1 | 1 | 0,009 | <0,006 |
| Stanum (Sn) Tin (Sn) | mg/L | 2 | 3 | 0,4 | <0,4 |
| Arsen (As) Arsenic (As) | mg/L | 0,1 | 0,5 | 0,005 | <0,005 |
| Selenium (Se) | mg/L | 0,05 | 0,5 | 0,002 | <0,002 |
| Nikel (Ni) Nickel (Ni) | mg/L | 0,2 | 0,5 | 0,04 | <0,004 |
| Kobalt (Co) Cobalt (Co) | mg/L | 0,4 | 0,6 | 0,02 | <0,0007 |
| Sianida (CN) Cyanide (CN) | mg/L | 0,05 | 0,5 | 0,05 | <0,005 |
| Sulfida (H ₂ S) Sulfide (H2S) | mg/L | 0,5 | 1 | 0,106 | <0,002 |
| Florida (F) Fluoride (F) | mg/L | 2 | 3 | 0,8 | 0,3 |
| Klorin Bebas (CL ₂) Free Chlorine (CL2) | mg/L | 1 | 2 | 0,16 | <0,01 |
| Amonia Nitrogen (NH ₃ -N) Ammoniacal Nitrogen (NH3-N) | mg/L | 5 | 10 | 2 | <0,01 |

| Parameter | Satuan Unit | Baku Mutu Standarts | | Hasil Pengujian Evaluation Results | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | Gol 1 Type1 | Gol 2 Type2 | Tertinggi Highest | Terendah Lowest |
| Nitrat (NO ₃ -N) Nitrate (NO-3N) | mg/L | 20 | 30 | 4 | 0,5 |
| Nitrit (NO ₂ -N) Nitrite (NO-2N) | mg/L | 1 | 3 | 0,2 | <0,006 |
| Total Nitrogen | mg/L | 30 | 60 | 8 | 1,78 |
| BOD ₅ | mg/L | 50 | 150 | 11 | 1,58 |
| COD | mg/L | 100 | 300 | 38 | <10,0 |
| Senyawa aktif biru metilen Methylene Blue Active Substances | mg/L | 5 | 10 | 0,2 | 0,02 |
| Fenol Phenol | mg/L | 0,5 | 1 | 0,027 | <0,001 |
| Minyak & Lemak Oil & Fat | mg/L | 10 | 20 | 1,8 | <0,2 |
| Total Bakteri Koliform Total Coliform Bacteria | mg/L | 10.000 | 10.000 | 1.100 | 0 |

Pengelolaan Energi dan Pengendalian Emisi

Energy Management and Emission Control

Pengelolaan energi dan pengendalian emisi menjadi dua strategi utama Perseroan dalam resiliensi perubahan iklim. Pengelolaan energi melalui kebijakan efisiensi energi dan pengendalian emisi termasuk dari konsumsi bahan bakar kendaraan operasional berpengaruh langsung terhadap volume emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Energi yang digunakan Perseroan bersumber dari listrik yang dipasok oleh PT PLN (Persero). Listrik yang digunakan oleh Perseroan dibedakan menjadi daya traksi dan non-traksi. Daya traksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan traksi pada kereta/rolling stock, sedangkan daya non-traksi untuk memenuhi kebutuhan listrik gedung stasiun, depo, dan bengkel kerja (workshop).

Secara umum pemakaian listrik yang bersumber dari PLN pada tahun 2020 mencapai 48.686.874 kWh atau setara 175.272,75 GigaJoule (GJ). Pemakaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 44.239.161 atau setara 159.260,98 GJ. Peningkatan ini terjadi karena perhitungan pada tahun 2019 mulai dilakukan pada bulan April, karena Perseroan baru beroperasi pada 24 Maret 2019. Namun sebenarnya jika dibandingkan penggunaan listrik setiap bulannya antara tahun 2019 dan 2020, terlihat tren

Energy management and emission control are two main strategies of the Corporation for resiliency against climate change. Energy management through energy efficiency policy and emission control, including fuel consumption for operational vehicles, impacts directly on the volume of greenhouse gases (GHG).

The energy that is used by the Corporation is sourced from the electricity supplied by PT PLN (Persero). The electricity consumed by the Corporation is categorised into traction and non-traction energy. Traction energy is used to fulfil the traction need for trains/rolling stock, meanwhile, nontraction energy is used to fulfil the electricity needs for the station building, depot, and workshops.

In general, the utilisation of electricity sourced from PLN in 2020 reached 48,686,874 kWh or equal to 175,272.75 Giga Joule (GJ). The utilisation increased compared to that of 2019 that reached 44,239,161 kWh or equal to 129,260.98 GJ. Such increase was recorded as the calculation for 2019 was started in April as the Corporation started its operations on March 24, 2019. Upon the comparison of 2019 and 2020 monthly electricity usage, there is a trend of decreased utilisation due to the energy efficiency

penurunan karena terdapat beberapa kebijakan efisiensi energi Perseroan selama masa pandemi COVID-19, di antaranya mengurangi pemakaian listrik stasiun dengan menutup beberapa *entrance* stasiun dan sesuai dengan arahan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta perihal PSBB, Perseroan juga mengurangi total perjalanan kereta. Total volume GRK dalam bentuk CO₂ *equivalen* yang dihasilkan pada tahun 2020 mencapai 6.266,46 Ton CO₂ lebih banyak dibanding tahun 2019 sebesar 5.693,99 Ton CO₂ *equivalen*.

Sumber energi lain yang digunakan Perseroan adalah bahan bakar minyak (BBM) untuk sarana pendukung perkeretaapian, *Diesel Engine Generator* (DEG), dan peralatan lainnya yang menggunakan BBM dalam pengoperasiannya, serta operasional kantor. Total volume konsumsi bahan bakar pada tahun 2020 mencapai 175.541,02 GJ atau setara 6.285,04 Ton CO₂, bertambah dibanding tahun 2019 sebesar 159.409,21 GJ atau setara 5.703,26 Ton CO₂. Dalam memastikan penggunaan BBM mampu mendukung peralatan dengan kondisi yang baik, pengujian kualitas persediaan BBM rutin dilakukan dengan mengacu pada standar dan mutu (spesifikasi) *Manual Instruction* perseroan dan Keputusan Dirjen Migas nomor 28.K/10/DJM.T/2016.

policy of the Corporation during the pandemic, including reducing the utilisation of electricity at stations by closing various station entrance gates and in compliance with the direction of the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta concerning PSBB, the Corporation reduced the number of train trips. The total GHG in the form of CO₂ equivalent generated in 2020 reached 6,266.46 tonnes of CO₂, increased from that of 2019 that reached 5,639.99 tonnes of CO₂ equivalent.

Others source of energy utilised by the Corporation is fuel for railway supporting facility, Diesel Engine Generator (DEG), and other equipment that requires fuel to operate, and office operations. The total fuel consumption in 2020 reached 175,541.02 GJ or equal to 6,285.04 tonnes of CO₂, which increased compared to that of 2019 that reached 159,409.21 GJ or equal to 5,703.26 tonnes. In order to ensure that fuel usage can support the equipment in good condition, fuel stock quality tests are frequently carried out based on the standards and quality (specification) of Corporate Manual Instruction and Decree of the Director-General of Oil and Gas Number 28.K/10/DJM.T/2016.

Volume Pemakaian Energi dan Total Emisi CO₂ Ekuivalen
Volume of Energy Consumption and Total Emission of CO₂ Equivalent

| Sumber Energi <i>Energy Source</i> | Volume Pemakaian (GJ) <i>Consumption Volume (GJ)</i> | | Volume Ton CO ₂ eq <i>Volume of CO₂eq (Ton)</i> | |
|---|---|-------------------|--|-----------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Pemakaian Listrik <i>Electricity Consumption</i> | 175.272,75 | 159.260,98 | 6.266,46 | 5.693,99 |
| Pemakaian BBM <i>Fuel Consumption</i> | 268,27 | 148,23 | 18,58 | 10,26 |
| Total | 175.541,02 | 159.409,21 | 6.285,04 | 5.704,25 |

Dalam rangka Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan survei Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dimana salah satu aspeknya adalah perhitungan kualitas udara. Perhitungan kualitas udara pada tahun 2020 meliputi perhitungan kualitas udara ambien baik pada kegiatan operasi Perseroan maupun kegiatan konstruksi fase 2 CP-201,

In compliance with Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Conservation and Management, an effort taken by the Corporation is the implementation of Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) survey, one of whose aspects is air quality measurement. Air quality measurement in 2020 includes ambient air quality measurement at operating areas of the Corporation and at Phase 2 construction areas of CP-201, air quality of cooling tower (CT) emission,

kualitas udara emisi cooling tower (CT) dan kualitas udara emisi genset. Perhitungan kualitas udara ambien di Konstruksi Fase 2 dilakukan pada Triwulan 3 dan Triwulan 4, sedangkan perhitungan di area operasional (kualitas udara ambien, emisi CT, dan emisi genset) dilakukan pada semester 1 dan semester 2 di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Tabulasi penghitungan dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan 2020 PT MRT Jakarta (Perseroda).

Pengukuran dan perhitungan kualitas udara ambien untuk kegiatan operasional dilakukan pada sembilan lokasi yang meliputi SDN Blok B Taman Sungai Sambas/ SDN 01 Pagi Kramat Pela, Jl. Cendrawasih Cipete Utara, Stasiun Bundaran HI, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Senayan, Departemen Pendidikan Nasional Jl. Jend. Sudirman/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Stasiun Istora, sedangkan untuk kegiatan konstruksi dilakukan pada dua lokasi yang meliputi Area Thamrin dan Area Monas. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil kualitas udara ambien, baik untuk kegiatan operasional dan kegiatan konstruksi masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jakarta No.551 Tahun 2001 Lampiran I Baku Mutu Udara Ambien.

Pengukuran dan perhitungan emisi CT dilakukan pada 6 lokasi, yaitu CT Senayan, CT Istora, CT Bendungan Hilir, CT Setia Budi, CT Dukuh Atas, dan CT Bundaran HI. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil baku mutu emisi CT masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen LH RI No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 670/2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.

Pengukuran dan perhitungan emisi dari operasional genset dilakukan di Depo Lebak Bulus. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh baku mutu emisi untuk beberapa parameter di beberapa lokasi masih ada yang melebihi standar baku mutu berdasarkan Permen LH RI No. 15 Tahun 2019. Adapun salah satu penyebab terjadinya kualitas udara emisi genset yang melebihi baku mutu disebabkan karena tercampurnya gas buang emisi dari genset dengan udara luar saat pengambilan sampel.

Pengukuran dan perhitungan emisi dari operasional boiler dilakukan di Depo Lebak Bulus. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh baku mutu emisi masih memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 15 Tahun 2019.

and air quality of genset emission. Ambient air quality measurement at Phase 2 construction areas was carried out in the third and fourth quarters, while air quality measurement at operating areas (ambient air quality, CT emission, and genset emission) was carried out in the first and second semester at selected locations. The table of measurement is presented in the 2020 Sustainability Report of the Corporation.

Ambient air quality measurement at operating areas was carried out in nine locations, covering SDN Blok B Taman Sungai Sambas / SDN 01 Pagi Kramat Pela, Jl. Cendrawasih Cipete Utara, Bundaran HI Station, Dukuh Atas Station, Bendungan Hilir Station, Setiabudi Astra Station, Senayan Station, Department of National Education Jl. Jend. Sudirman / Ministry of Education and Culture, and Istora Station. As for the measurement at the construction area, it was carried out in two locations covering Thamrin area and Monas area based on the measurement, the ambient air quality for operating and construction areas are still below the quality standards as determined by the Governor's Decree of DKI Jakarta No. 551 Year 2001 Appendix I Ambient Air Quality Standards.

The measurement of CT emission was carried out at 6 locations, i.e., CT Senayan, CT Istora, CT Bendungan Hilir, CT Setia Budi, CT Dukuh Atas, and CT Bundaran HI. Based on the measurement, the quality of CT emission fulfils the quality standards as determined by the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2019 concerning Quality Standards of Thermal Energy Power Plant and Governor's Decree of DKI Jakarta No. 670/2000 concerning Quality Standards of Emission from Immovable Sources in DKI Jakarta Province.

The measurement of operational genset emission was carried out in Lebak Bulus Depot and 13 Stations. Based on the measurement, the emission-quality for several parameters in various locations exceed the quality standards as determined by the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2019. The genset emission air quality that exceeds the quality standards is caused by the mixing of emission gas from the genset with the outdoor air upon sampling.

The measurement of operational boiler emission was carried out in Lebak Bulus Depot. Based on the measurement, the emission-quality still fulfils the quality standards based on the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2019.

Di samping itu, secara berkala Perseroan juga melakukan pengukuran kualitas udara, dan tingkat kebisingan di sekitar area proyek MRT Jakarta Fase 2A. Pengukuran kualitas udara meliputi sejumlah parameter yakni sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), oksidan (O₃), hidrokarbon (HC), TSP dan timbal (Pb). Tujuan pengukuran untuk memastikan kualitas udara setempat dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan proyek telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan Pemerintah. Pengukuran dilakukan di sekitar proyek Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas.

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui, kualitas udara telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001. Demikian pula untuk tingkat kebisingan, telah memenuhi ketentuan standar baku mutu berdasar Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996. Pengungkapan informasi lengkap metode dan hasil pengukuran, lihat Laporan Keberlanjutan PT MRT Jakarta (Persero) 2020.

In addition, the Corporation frequently measures the air quality and noise level around the Phase 2A MRT Jakarta project areas. The air quality measurement covers various parameters such as sulphur dioxide (SO₂), carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO₂), oxidant (O₃), hydrocarbon (HC), TSP, and lead (Pb). It aims to ensure that the local air quality and noise level arising from the project activities fulfil the quality standards as established by the government. Measurement is carried out around Thamrin Station and Monas Station projects.

Based on the measurement, it was found that the air quality fulfils the quality standards as established in the Governor's Decree of DKI Jakarta Number 551 Year 2001. It also applies to the noise level that has fulfilled the quality standards based on the Governor's Decree of DKI Jakarta Number 551 Year 2001 and Regulation of the Ministry of Environment No. 48 Year 1996. Further information disclosure concerning the method and measurement results is presented in the 2020 Sustainability Report of PT MRT Jakarta (Persero).

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Complaint Mechanism Concerning Environmental Issues

Perseroan menyediakan sarana pengaduan terkait masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan ataupun operasi usaha Perseroan, semuanya dilakukan melalui *call center* MRT Jakarta 1500 332. Tindak lanjut atas laporan akan melibatkan fungsi/unit kerja terkait. Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak terdapat pengaduan terkait masalah lingkungan yang diterima oleh Perseroan.

The Corporation has provided a complaint mechanism concerning environmental issues arising from the construction or business operations of the Corporation through MRT Jakarta Call Center at 1500332. The follow-up of each complaint will involve the relevant function/work unit. As of the end of 2020, there were 1 no complaints concerning environmental issues received by the Corporation.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility Concerning Employment and Occupational Safety and Health (OSH)



Pembekalan SMK3 di Area Konstruksi Fase 2A
OSH Briefing at Phase 2A Construction Site

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan operasional usaha adalah Ketenagakerjaan, serta Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3). Bagi Perseroan, karyawan merupakan pemangku kepentingan yang strategis, sehingga mempengaruhi keberlanjutan operasi dan usaha. Keberlanjutan Perseroan juga tidak terlepas dari pengelolaan K3, sehingga Perseroan mengelola operasional MRT Jakarta Fase 1 maupun proyek MRT Jakarta Fase 2A dengan mengupayakan risiko yang rendah, terutama adanya risiko kecelakaan kerja baik terhadap pekerja maupun pengguna jasa.

An important aspect of the management of business operations is Employment and Occupational Safety and Health (OSH). The Corporation views the employees as strategic stakeholders that impact the operational and business continuity. The sustainability of the Corporation also depends on the management of OHS, hence, the Corporation manages the operations of Phase 1 MRT Jakarta and Phase 2A MRT Jakarta project by striving low-risk environment, especially concerning risks of work accidents that may impact the workers and passengers.

Kesetaraan Kesempatan Kerja, Pengembangan Karir dan Gender *Equal Job Opportunities, Career Development, and Gender Equality*

Sesuai visi dan misinya, Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja sebagai karyawan, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan.

In accordance with the vision and missions, the Corporation gives equal opportunities to all citizens of Indonesia to work as employees for the Corporation, either male or female, while disregarding the difference of ethnic, religion, race, class, gender, and physical condition to be enrolled in the Employee Recruitment Programme. The appointment of employees is carried out based on the results of selection and evaluation during the probation period and employee orientation.

Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perseroan selalu mengedepankan hasil dan produktivitas yang ditunjukkan karyawan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif kepada lingkungan kerja di sekitarnya. Pada tahun 2020 Perseroan merekrut dan mengangkat 64 karyawan baru, terdiri dari 46 laki-laki atau 72% dan 18 perempuan atau 28%. Perseroan tidak merekrut pekerja anak.

Such equal opportunity is also applied to the employees concerning promotion or awards. The Corporation constantly prioritises the results and productivity shown by the employees that would eventually contribute positively to the work environment surrounding the employees. In 2020, the Corporation recruited and appointed 64 new employees, consisting of 46 male employees or 72% of the total employees and 18 female employees or 28% of the total employees. The Corporation does not recruit child workers.

Jumlah Karyawan Baru PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2020
The Number of New Employees PT MRT Jakarta (Perseroda) Year 2020

| Laki-laki Male | | Perempuan Female | | Jumlah Total | |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) |
| 46 | 72 | 18 | 28 | 64 | 100 |

Rekrutmen dan pengangkatan karyawan baru ditujukan untuk kebutuhan baru berdasarkan perencanaan sumber daya manusia di tahun 2020 dan juga menggantikan karyawan yang keluar dari Perseroan, baik karena pensiun maupun sebab yang lain. Jumlah karyawan yang meninggalkan Perseroan pada tahun 2020 ada 50 orang, sehingga rasio perputaran karyawan pada tahun 2020 mencapai 7,33%. Penghitungan tingkat perputaran dihitung sebagai jumlah karyawan yang keluar dibandingkan dengan rata-rata dari penjumlahan karyawan di awal tahun dan di akhir tahun.

The recruitment and appointment of new employees aim to replace the employees leaving the Corporation, both due to retirement and other causes. The number of employees leaving the Corporation in 2020 were 50 employees, therefore, the ratio of employee turnover in 2020 reached 7.33%. The calculation of the turnover rate is calculated as the number of employees leaving the Corporation divided by the average from the sum of the number of employees at the beginning and the end of the year.

Perseroan juga memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karir, tanpa mempertimbangkan latar belakang keberagaman. Promosi jabatan didasarkan pada hasil penilaian kinerja setiap karyawan yang dilakukan secara adil, sesuai dengan peran, tugas, dan kinerjanya. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2020, ada 25 karyawan yang mendapatkan promosi jabatan, terdiri dari 16 laki-laki dan 9 perempuan. Selain itu, ada 55 karyawan yang dimutasi dan tidak ada karyawan yang demosi.

The Corporation also provides equal opportunities to every employee to develop their career, while disregarding the differences of the background. Promotion is carried out based on the results of the performance assessment of each employee that is carried out fairly, according to the roles, duties, and performance. Based on the assessment results in 2020, there were 25 employees promoted, consisting of 16 male employees and 9 female employees. In addition, there are 55 transferred employees and none demoted employees.

Jumlah Karyawan yang Menerima Promosi Jabatan, Rotasi dan Demosi Tahun 2020
Number of Employees Undergoing Promotion, Rotation, and Demotion in 2020

| Uraian Details | Laki-laki Male | | Perempuan Female | | Jumlah Total | |
|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) |
| Promosi Promotion | 16 | 2,32 | 9 | 1,31 | 25 | 3,63 |
| Mutasi Mutation | 35 | 5,08 | 20 | 2,90 | 55 | 7,98 |
| Demosi Demotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 51 | 7,40 | 29 | 4,21 | 80 | 11,61 |

Selama tahun 2020, Perseroan juga melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan. Program peningkatan kompetensi dilakukan Perseroan dengan Sistem Manajemen SDM Terintegrasi yang mampu menerapkan secara sistemik terkait penilaian dan kebutuhan pengembangan kompetensi dari setiap individu karyawan.

Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat ada 5.592 karyawan sebagai peserta pelatihan dan pengembangan kompetensi. Lihat halaman 110 untuk informasi terkait pengembangan kompetensi karyawan.

Pemenuhan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan berkomitmen menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai ketentuan regulasi dan memenuhi kesejahteraan karyawan. Aspek-aspek ketenagakerjaan meliputi remunerasi dan manfaat bagi karyawan, pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, pola karir bagi karyawan, survei kepuasan karyawan, pengelolaan sistem pengaduan karyawan, serta program pensiun dan pengelolaan dana pensiun karyawan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan telah merealisasikan pemenuhan hak dan kesejahteraan karyawan.

Survei Kepuasan/Keterikatan Karyawan

Setiap tahun Perseroan melakukan survei internal atas Komitmen dan Keterikatan Karyawan (*Engagement Survey*). Survei dilakukan oleh Departemen *Organization, Talent, and Training* Perseroan. Tingkat kepuasan/ keterikatan karyawan ini dipengaruhi oleh tingkat komitmen karyawan baik yang bersifat komitmen rasional maupun komitmen emosional yang sudah terwakili dalam item survei.

Komitmen rasional merupakan komitmen yang muncul karena karyawan merasa Perseroan adalah tempat kerja yang dapat memenuhi kebutuhannya (menguntungkan untuk pribadinya), sedangkan komitmen emosional merupakan komitmen yang muncul karena karyawan percaya Perseroan mampu membuat karyawan merasa nyaman, merasa dihargai, dan juga memiliki kesamaan dengan mendukung nilai-nilai dari pribadi karyawan. Sementara titik fokus komitmen karyawan yang berpengaruh kepada tingkat kepuasan/ keterikatan karyawan terhadap Perseroan adalah ukuran kepemimpinan, kerjasama tim, aktivitas pekerjaan sehari-hari, dan sistem organisasi.

In 2020, the Corporation carried out training and competency development for the employees as well. The Competency Development Programme is carried out by the Corporation through an Integrated HAC Management System that enables implementation of systemic assessment and requirement for competency development of each individual.

The Corporation offers equal opportunities for each employee to participate in the Training and Competency Development Programme. As of the end of 2020, 5,592 employees participated in The Training And Competency Development Programme. Relevant information concerning the competency development of the employees is presented on page 106 of the employees is presented on page 110.

Fulfilment of Employee Welfare

The Corporation is committed to implement labour practices in accordance with the prevailing regulations and to fulfil employee welfare. Labour aspects cover remuneration and benefits for the employees, training and competency development, employee career path, employee satisfaction survey, employee complaint system management, and Retirement Programme and pension fund management. As of the end of the reporting period, the Corporation has realised the fulfilment of rights and welfare of the employees.

Employee Satisfaction/Engagement Survey

*The Corporation annually conducts an internal survey for the Commitment and Engagement of Employees (*Engagement Survey*). The survey is carried out by the Department of Organisation, Talent, and Training of the Corporation. The employee satisfaction/engagement rate is influenced by the commitment level of the employees, both rational and emotional commitments as reflected in the survey items.*

Rational commitment is a commitment arising from the employees who feel that the Corporation has fulfilled their needs, in other words, the Corporation benefits the employees. Meanwhile, emotional commitment refers to the commitment arising as the employees believe that the Corporation is able to make the employees feel comfortable, appreciated, and equal in supporting the individual values of the employees. The focal point of employees' commitment that impact on the satisfaction index/ bond of the employees to the Corporation is leadership, teamwork, daily work activities, and organisational system.

Pada tahun 2020, survei dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dengan metode menggunakan survei dan setiap pernyataan yang ada pada lembar survei diberikan skala 1-4 (1 - < 2 = Low, 2 - < 2.5 = Low to Moderate, 2.5 - < 3 = Moderate, 3 - < 3.5 = Moderate to High, 3.5 - < 4 = High) Hasil survei menunjukkan nilai sebesar 3,19 (Moderate to High).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health

Sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan, pengungkapan informasi terkait K3, meliputi karyawan yang bekerja di wilayah operasi MRT Jakarta, baik di kantor pusat, operasional MRT, stasiun, depo, maupun kawasan berorientasi transit sejak proses perencanaan, konstruksi, maupun pengelolaan, serta pemeliharaan. Secara umum pengelolaan K3 meliputi penerapan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara nasional sesuai Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan praktik-praktik terbaik yang berlaku global sesuai ISO 45001 Sistem Manajemen K3.

Pekerjaan konstruksi MRT saat ini sudah memasuki Fase 2A yang dimulai sejak Juni 2020. Penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak baik kontraktor pelaksana, Konsultan maupun Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2020, kinerja pengelolaan K3 pada pekerjaan konstruksi telah berjalan dengan baik. Tidak ada peristiwa kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Untuk mendukung penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi, Perseroan bersama kontraktor pelaksana telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- Pemantauan kinerja K3L Kontraktor Konstruksi MRT Fase 2 melalui rapat rutin bulanan;
- Audit internal dan eksternal Sistem Manajemen Terintegrasi terhadap Kontraktor Konstruksi MRT Fase 2;
- Inspeksi area konstruksi MRT Fase 2;
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi, Kebijakan NAPZA dan Dilarang Merokok, serta Kebijakan Stop Working Authority yang berlaku di PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Melakukan reviu dan memastikan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan, dan Pengamanan telah masuk dalam dokumen kontrak Kontraktor Konstruksi Fase 2;

In 2020, the survey was carried out in December 2020 using questionnaire method, and each question of the survey is given a scale of 1 – 4 (1 - < 2 = Low; 2 - < 2.5 = Low to Moderate; 2.5 - < 3 = Moderate; 3 - < 3.5 = Moderate to High; and 3.5 – 4 = High). The survey results indicated the score of 3.19 (Moderate to High).

In accordance with the Sustainability Policy, information disclosure concerning OSH covers OSH of construction workers and employees. In general, OSH management covers the implementation of national best practices in compliance with the OSH Management System and global best practice in compliance with ISO 45001 OSH Management System.

Implementation of OSH for the employees covers OSH management in construction works that started to enter Phase 2A, which was started in June 2020. OSH implementation for the construction project is the joint responsibility of the Corporation and the contractor. As of the end of 2020, the OSH management performance for construction works has been running well. There was no major work accident. In order to support OSH implementation for construction works, the Corporation and contractors have implemented the efforts as follows:

- OSH performance monitoring of the Contractors for Phase 2 MRT Construction through monthly meeting;
- Internal and external monitoring of the Integrated Management System of the Contractors for Phase 2 MRT Construction;
- Inspection of Phase 2 MRT construction areas;
- Monitoring of compliance with the prevailing laws and regulations;
- Dissemination of Integrated Management System Policy, Narcotics and Smoking Prohibition Policy, and Stop Working Authority Policy applied at the corporation;
- Review and assurance of the requirements of Occupational Safety and Health (OSH), Environment, and Security in contract documents for Contractors of Phase 2 Construction;

- Memastikan setiap pekerjaan yang akan dilakukan Kontraktor telah memiliki prosedur kerja yang aman dengan melakukan reviu, serta memberi masukan terhadap *safety plan, method statement* yang diajukan; dan
 - Menerapkan sistem *Demerit Point* yang merupakan poin penalti yang dikenakan pada kontraktor karena insiden yang terjadi di lokasi dengan kelalaian dari Kontraktor atau temuan terkait K3L yang tidak diperbaiki lebih dari 3 kali.
- *Ensuring that each work to be carried out by the Contractor has possessed safe working procedures by carrying out review and providing inputs to the safety plans and method statements proposed; and*
 - *Implementing Demerit Point system as a penalty point for contractors due to incident at locations due to the Contractor's negligence or findings concerning OSH issues that are not improved for three times.*

Kinerja Pengelolaan K3 Pekerjaan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Tahun 2020
OSH Management Performance for Construction Works of Phase 2A MRT Jakarta in 2020

| Indikator <i>Indicator</i> | Pencapaian <i>Achievement</i> |
|--|----------------------------------|
| <i>Number of Fatalities</i> | 0 |
| <i>Lost Time Injuries</i> | 0 |
| <i>First Aid Cases</i> | 0 |
| <i>Property Damage</i> | 1 |
| <i>Near miss, Unsafe Action & Unsafe Condition</i> | 278 |
| <i>SR (days lost due to accident)</i> | 0 |
| <i>FR (total accident rate)</i> | 0 |

Komitmen pengelolaan K3 juga diwujudkan Perseroan dengan menciptakan lingkungan kerja dan operasi yang kondusif bagi karyawan baik di kantor pusat, RSS, depo, maupun stasiun. Sampai dengan akhir tahun 2020, kinerja pengelolaan K3 pada pekerjaan konstruksi telah berjalan dengan baik. Tidak ada peristiwa kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Selama tahun 2020, Perseroan melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pengelolaan K3 bagi karyawan, di antaranya:

- Membuat SOP dan IK terkait dengan SHE;
- Sosialisasi dan workshop terkait HIRADC & IADL, izin kerja, SOP dan IK terkait K3;
- Pelaksanaan pengenalan K3 melalui induksi keselamatan kerja (*safety induction*);
- Peningkatan wawasan terkait K3 melalui *safety training, safety talk, sharing monthly safety highlight*;
- Melaksanakan program *Safety dan Risk Competition* yang dilakukan kepada internal organisasi, dimana kegiatan ini dilakukan setahun sekali;
- Memastikan setiap pekerjaan yang akan dilakukan vendor telah memiliki prosedur kerja yang aman dengan melakukan review serta memberi masukan terhadap *safety plan, method statement, JSA* yang diajukan;

The commitment to managing OSH is realised by the Corporation by creating conducive work and operational environment for the employees at the head office, RSS, depot, and stations. As of the end of 2020, the performance of OSH management at construction works has been going well. There are no major occupational accidents. In 2020, the Corporation implemented various actions to support OSH management for the employees, including:

- *Developing SOPs and Work Instructions concerning SHE;*
- *Socialisation and workshop concerning HIRADC & IADL, Work Permit, SOP, and work instructions concerning OSH;*
- *Carrying out OSH introduction through safety induction;*
- *Improving insights concerning OSH through safety training, safety talk, and monthly safety highlight;*
- *Carrying out the Safety and Risk Competition Programme for the internal organisation once a year;*
- *Ensuring that safe work procedures for each work to be carried out by the vendors has been put in place by reviewing and providing inputs for the safety plan, method statements, and JSA proposed;*

- Melakukan *safety patrol/ inspection* ke area operasional, dimana hasil dari *safety patrol* akan dikirimkan ke unit kerja terkait untuk segera diperbaiki;
 - Menerapkan sistem pelaporan bahaya untuk seluruh karyawan dan diterapkan di seluruh Stasiun, Depo Lebak Bulus dan Kantor Wisma Nusantara (Lantai 21, 22, dan 23). Seluruh pelaporan bahaya akan direkap dan segera ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
 - Pengembangan kepedulian terhadap K3 (*awareness*) melalui penerapan pelaporan bahaya (*hazard reporting*), observasi dan intervensi pelanggaran K3 pada pekerjaan (*observation & intervention*);
 - Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan pekerjaan, monitoring pelaksanaan *toolbox meeting* dan housekeeping pada pekerjaan dan kebersihan;
 - Penghentian pekerjaan saat terjadinya pelanggaran K3 sampai dengan pencabutan izin kerja (*stop work authority*);
 - Memastikan penerapan K3 telah dilakukan dengan baik, selain melakukan patroli juga melaksanakan rapat bulanan bersama internal Perseroan dengan seluruh kontraktor dan vendor Perseroan untuk membahas aspek mutu, K3, dan lingkungan;
 - Melakukan konsultasi dengan semua unit kerja untuk memastikan K3 diterapkan di tempat kerja dan aktivitas kerja;
 - Kegiatan pengukuran lingkungan kerja, meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi;
 - Memberikan pelatihan terkait K3 sesuai dengan peraturan perundangan K3 dan Lingkungan serta persyaratan lainnya, seperti Ahli K3 Umum, P3K, Pemadam Kebakaran, AK3 Listrik, Audit Internal, dan BBS (*Behavior Based Safety*) dan AMDAL dan lainnya;
 - Uji kualitas air minum secara berkala yang terdapat di Depo Lebak Bulus Gedung A dan di stasiun Blok M BCA untuk menjamin kualitas dan keamanan air minum yang disediakan pada 2 (dua) titik tersebut;
 - Pelaporan kunjungan klinik dan pos kesehatan;
 - Pelaporan insiden (*incident reporting*), serta pelaksanaan investigasi insiden (*incident investigation*);
 - Meningkatkan komitmen manajemen dalam memastikan penerapan K3 telah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, Perseroan melakukan kegiatan *Management Safety Walkthrough* setiap 3 (tiga) bulan sekali. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen;
 - Melakukan audit internal SMK3-KP (Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja – Keselamatan Perkertaapian) dan ISO Terintegrasi kepada internal MRT maupun pihak ketiga;
 - Memberikan apresiasi kepada seluruh kontraktor dan
- *Carrying out safety patrol / inspection to operational areas, whose results are to be delivered to the relevant work unit for improvement;*
 - *Implementing hazard reporting system for all employees to be implemented at all Stations, Lebak Bulus Depot, and Wisma Nusantara Office (21st, 22nd, and 23rd floor). All hazard reporting will be documented and followed up by the relevant work unit;*
 - *Improving OSH awareness through the implementation of hazard reporting, observation, and intervention to OSH violation at works;*
 - *Carrying out work inspection and monitoring, monitoring of toolbox meeting and housekeeping on works and hygiene;*
 - *Terminating works at OSH violation up to stop work authority;*
 - *Ensuring good implementation of OSH, and in addition to patrol, carrying out internal Corporate monthly report with all contractors and vendors of the Corporation to discuss quality, OSH, and environmental aspects;*
 - *Consulting with all work units to ensure the implementation of OSH at all workplace and in all activities;*
 - *Measuring work environment, including physical, chemical, biological, ergonomic, and psychological factors;*
 - *Providing trainings of OSH in line with the laws and regulations concerning OSH and Environment and other requirements, such as General OSH Expert, Firefighter, Electricity OSH Expert, Internal Audit, and BBS (Behavior Based Safety) as well as AMDAL;*
 - *Carrying out periodical quality assessment of drinking water at Lebak Bulus Depot, Building A and Blok M BCA Station to guarantee the quality and safety of drinking water provided at the spots;*
 - *Reporting clinic & health post visit;*
 - *Incident reporting and incident investigation;*
 - *Improving management commitment in ensuring the implementation of OSH to be in line with the applicable standards and regulations, the Corporation carries out a Management Safety Walkthrough once in three months. The event is participated by the Board of Directors, Division Head, and Department Head.*
 - *Carrying out internal audit of SMK3-KP (Occupational Safety and Health Management System – Railway Safety) and Integrated ISO to internal MRT parties and third parties;*

vendor Perseroan yang telah melakukan penerapan K3 dengan baik, melalui kegiatan SHES (*Safety, Health, Environment, and Security*) Award. Kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali, dengan melihat hasil audit kontraktor dan vendor, serta melakukan *site visit*.

Perseroan mulai mengembangkan program digitalisasi SHE dengan tujuan efisiensi proses dan memastikan monitor yang lebih terukur dan tercatat dalam bentuk beberapa modul pendukung, di antaranya:

- Modul perizinan kerja (JSA dan PTW);
- Modul *risk assessment* (HIRADC dan IADL);
- Modul pelaporan bahaya dan gangguan, modul inspeksi dan *walkthrough*;
- Modul pelatihan mandiri dan internal sertifikasi (untuk perizinan kerja, *risk assessment*, pelaporan bahaya dan insiden, serta pekerjaan berisiko) termasuk bahan ajar dan bahan uji bagi internal dan eksternal Perseroan, serta modul pelaporan insiden dan *incident investigation*.
- Modul pelaporan dan investigasi insiden;
- Modul inspeksi;
- Modul *data external personal certification*.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, Perseroan melaksanakan pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kemampuan tim tanggap darurat yang dibentuk sebagai tindakan penanganan (*response*) dan pencegahan (*preventive*) saat keadaan darurat terjadi di area operasi dan pemeliharaan. Adapun kegiatan pelatihan dan simulasi yang berhasil dilaksanakan di tahun 2020, di antaranya:

- Pelatihan penggunaan APAR;
- Pelatihan penggunaan Hidran;
- Pelatihan penggunaan SCBA (*Self Contained Breathing Apparatus*);
- Pelatihan penggunaan AED (*Automated External Defibrillator*);
- Pelatihan penggunaan tandu;
- Pelatihan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan);
- Pelatihan penggunaan tabung oksigen;
- Pelatihan *triase emergency*;
- Pelatihan pemasangan *flood barrier*;
- Uji coba penggunaan alat pemadam LUF 60 milik Dinas Pemadam Kebakaran;
- Simulasi penanganan tumpahan dan bocoran bahan kimia berbahaya;
- Simulasi penanganan pengguna jasa pingsan;
- Simulasi tanggap darurat kebakaran bekerja sama

- *Providing appreciation to all contractors and vendors of the Corporation that implement OSH well, through SHES (Safety, Health, Environment, and Security) Award. The event is carried out once a year by reviewing contractor audit results from the vendor and carrying out a site visit.*

The Corporation has started to develop SHE digitization program that aims to create process efficiency and ensure measurable and recorded monitoring in the form of supporting modules, such as:

- *Work permit (JSA and PTW);*
- *Risk assessment modules (HIRADC and IADL);*
- *Hazard reporting modules, inspection modules, and breakthrough, incident investigation;*
- *Independent training module and internal certification (for the work permit, risk assessment, hazard and incident reporting, and risky works) including learning and testing materials for internal and external parties of the Corporation, as well as incident reporting modules and incident investigation;*
- *Incident reporting and investigation module;*
- *Inspection module;*
- *Personal certification external data module.*

In order to achieve emergency response preparedness, OMFS acts in the implementation of training and simulation to increase the skills of the emergency response team for response and preventive actions during real emergency situations within the operating and maintenance area. The training and simulation carried out in 2020 include:

- *Lightweight fire extinguishers training;*
- *Hydrant training;*
- *Training of SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) usage;*
- *AED (automated external defibrillators) training;*
- *Stretcher training;*
- *First aid training;*
- *Oxygen tank training;*
- *Emergency triage training;*
- *Flood barrier installation training;*
- *Simulation of LUF 60 extinguisher usage of the Fire Department;*
- *Simulation of treatment for spillage and leakage of hazardous chemicals;*
- *Simulation of treatment for passed out passengers;*

- dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran;
- Simulasi tanggap darurat kegagalan daya listrik;
 - Simulasi tanggap darurat gempa bumi bekerja sama dengan pihak BPBD;
 - Simulasi tanggap darurat huru-hara bekerja sama dengan pihak Kepolisian;
 - Simulasi tanggap darurat ancaman bom berkerja sama dengan pihak Kepolisian.

- *Simulation of emergency response for fire in collaboration with the Fire Department;*
- *Simulation of emergency response for electrical failure;*
- *Simulation of emergency response for earthquake in collaboration with BPBD;*
- *Simulation of emergency response for riots in collaboration with the National Police;*
- *Simulation of emergency response for bomb threats in collaboration with the National Police.*

Kinerja Pengelolaan K3 Bagi Karyawan di Kantor Pusat, Depo dan Stasiun

Kinerja Pengelolaan K3 Bagi Karyawan di Kantor Pusat, Depo dan Stasiun

| Indikator <i>Indicator</i> | Pencapaian <i>Achievements</i> | |
|--|-----------------------------------|------|
| | 2020 | 2019 |
| <i>Number of Fatalities</i> | 0 | 0 |
| <i>Lost Time Injuries</i> | 0 | 0 |
| <i>First Aid Cases</i> | 69 | 21 |
| <i>Near miss, Unsafe Action & Unsafe Condition</i> | 1.401 | 180 |
| <i>SR (days lost due to accident)</i> | 0 | 0 |
| <i>FR (total accident rate)</i> | 0 | 0 |

Pembentukan P2K3

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerja sama antara Perseroan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah perwakilan karyawan dalam kelembagaan P2K3 mencapai 37 orang. Melalui kelembagaan P2K3, karyawan berkontribusi pada pengelolaan K3 yang dijalankan Perseroan dan memastikan pelaksanaannya dengan baik.

Establishment of P2K3

As a business entity that is committed to complying with occupational safety and health norms and the prevailing laws and regulations in Indonesia, the Corporation established the Occupational Safety and Health Guiding Committee (P2K3). The establishment of this committee complies with the Regulation of the Minister of Labour No. PER.04/MEN/1987 concerning Occupational Safety and Health Guiding Committee and Procedures for the Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 is a supporting body that allows the cooperation between the Corporation and the employees in implementing occupational safety and health.

As of the end of the reporting period, the number of employee representatives in P2K3 reached 37 employees. Through P2K3, the employees contribute to the OSH management by the Corporation and ensure its excellent implementation.

Keanggotaan P2K3
P2K3 Membership

| Unsur Perwakilan Representatives | Komposisi Composition | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Jumlah Total | Persentase (%) Percentage |
| Manajemen <i>Management</i> | 31 | 83,79 |
| Karyawan <i>Employee</i> | 6 | 16,21 |
| Jumlah <i>Total</i> | 37 | 100 |

Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety Audit

Secara berkala, Perseroan melakukan audit keselamatan kerja. Proses Audit dilakukan baik berupa Audit Internal dan juga Audit oleh pihak Eksternal yang mencakup aspek Kualitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, Standard ISO 9001:2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3. Dari hasil audit internal yang dilakukan pada tahun 2020, diketahui capaian kepatuhan mencapai 94,49% dan berdasarkan audit eksternal ISO Terintegrasi yang dilakukan tahun 2020, PT MRT Jakarta (Perseroda) dinyatakan tetap layak mempertahankan Sertifikasi ISO Terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018) yang telah didapat.

The Corporation frequently carries out an occupational safety audit. the audit process is carried out through an Internal and External Audit that covers Quality, Occupational Safety, and Occupational Health aspects. Environment and Security, according to Government Regulation No. 50 Year 2012 concerning OSH Management System, Regulation of the Minister of Transportation No. 69 Year 2018 concerning Railway Safety Management System, ISO Standard 9001:2015 concerning Quality Management System, ISO 14001:2015 concerning Environmental Management System, and ISO 45001:2018 concerning OSH Management System. Based on the internal audit carried out in 2020, it was found that that the compliance rate reached 94.49% and based on the external audit for Integrated ISO in 2020, the Corporation is deemed to be eligible to maintain the obtained Integrated ISO Certification (ISO 9001:2015, ISO 144001:2015, and ISO 45001:2018).

Audit Keselamatan Kerja
Occupational Safety Audit

| Uraian tentang Audit Details on the Audit | Auditor | Waktu Pelaksanaan Date of Implementation | Hasil Audit Audit Results |
|--|---|--|--|
| Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi <i>Internal Audit for Integrated Management System</i> | Tim Auditor Internal MRT yang memiliki Kompetensi dan Surat Penunjukan <i>Internal Auditor Team with Competency and Appointment Letter</i> | Juni-Agustus 2020 <i>June – August 2020</i> | Kepatuhan 94,49% <i>94.49% of Compliance</i> |
| Audit Surveillance ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018) | TUV Rheinland | November 2020 <i>November 2020</i> | Dapat dipertahankannya Sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 <i>Maintaining Certifications of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018</i> |

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan; Serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Complaint Mechanism Concerning Employment and Occupational Safety and Health (OSH)

Mekanisme pengaduan dalam Perseroan baik untuk masalah ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja (K3), semuanya dilakukan melalui *call center* MRT Jakarta 1500 332. Tindak lanjut atas laporan akan melibatkan fungsi/unit kerja terkait. Sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat tidak ada laporan yang disampaikan kepada Perseroan terkait masalah ketenagakerjaan, serta K3.

The complaint mechanism in the Corporation for employment and occupational safety and health issues is carried out through MRT Jakarta call centre at 1500 332. The follow-up concerning the reports will involve relevant function/unit. As of the end of 2020, there were no reports delivered to the Corporation concerning employment and OSH issues.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KUALITAS PRODUK / JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA (LAYANAN BERMUTU)

Corporate Social Responsibility Concerning Provision of Quality Goods and Services to Customers and Partners (Quality Services)

Sebagai penyelenggara layanan transportasi publik, Perseroan memberikan perhatian sepenuhnya pada pengelolaan keselamatan dan kesehatan pengguna jasa. Komitmen tersebut diwujudkan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3 yang berlaku sampai dengan April 2023. Perseroan menjamin keselamatan dan kesehatan pengguna jasa selama berada di dalam MRT Jakarta, di stasiun maupun di sekitar stasiun.

As a public transportation service provider, the Corporation gives its full attention to the management of passengers' safety and health. Such commitment is reflected by obtaining certification of ISO 45001:2018 OSH Management and ISO 9001:2015 Quality Management System (ISO 9001:2015) that are valid until 2022. The Corporation guarantees the safety and health of passengers during the utilisation of MRT Jakarta, inside the stations and around the stations.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Pengguna Jasa di Dalam MRT Jakarta

Dalam hal pengelolaan keselamatan dan kesehatan pengguna jasa di dalam MRT Jakarta, Perseroan telah menyediakan beberapa fasilitas sebagai penunjang keselamatan dan kesehatan pengguna jasa di dalam kereta, di antaranya:

1. Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
2. Penyediaan Hidran;
3. Penyediaan *Emergency Button* di setiap kereta;
4. Penyediaan tombol *Emergency Break* di setiap kereta;
5. Penyediaan kotak P3K di kabin masinis.
6. Tersedianya petugas Pengawalan Kereta (Walka) yang sudah terlatih dalam hal P3K dan tanggap darurat.

Passengers' Safety and Health Management in MRT Jakarta

In terms of passengers' safety and health management in MRT Jakarta, the Corporation has provided various supporting facilities for passengers' safety and health inside the train, such as:

1. *Provision of Lightweight Fire Extinguishers;*
2. *Provision of Hydrants;*
3. *Provision of an Emergency Button in each train;*
4. *Provision of Emergency Break Button in each train;*
5. *Provision of a First Aid Box at the train driver's cabin;*
6. *Provision of Train Guard (Walka) officers trained in first aid and emergency response*

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Pengguna Jasa Di Stasiun

Dalam hal pengelolaan keselamatan dan kesehatan pengguna jasa di area stasiun, Perseroan menyediakan beberapa fasilitas sebagai penunjang keselamatan dan kesehatan pengguna jasa, di antaranya:

1. Penyediaan APAR;
2. Penyediaan Hidran;
3. Penyediaan ruang klinik kesehatan (berserta paramedis di 5 stasiun) yang di dalamnya terdapat kotak P3K, tabung oksigen, tandu, dan peralatan kesehatan lainnya.
4. Keikutsertaan para pegawai stasiun dalam berbagai macam pelatihan mengenai kondisi gawat darurat;
5. Sosialisasi dan pengarahan terhadap seluruh pegawai stasiun mengenai keselamatan pada setiap *shift* yang berlangsung.

Selama tahun 2020, Perseroan tidak pernah dihadapkan pada situasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pengguna jasa. Selama periode pelaporan, tercatat 914 kunjungan pengguna jasa ke klinik kesehatan, yang terdiri dari 173 kunjungan berasal dari pengguna jasa, 485 kunjungan berasal dari vendor, dan 256 kunjungan dari karyawan, kunjungan tersebut dikarenakan keluhan gangguan kesehatan. Seluruh kunjungan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan pertolongan pertama, sehingga pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan dan tidak ada yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di Puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang lain.

Perseroan mendukung komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi Provinsi Ramah Perempuan dan Anak, dengan membuka 13 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (PSPA) di setiap Stasiun MRT Jakarta. Keberadaan pos beroperasi sejak 10 Desember 2019, dan didukung 26 petugas stasiun bersama 8 *agent Call Center* yang telah dilatih oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. Keberadaan PSPA diharapkan membangun kesadaran bersama pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk memberikan pelayanan maupun kampanye anti kekerasan perempuan dan anak. PSPA juga mencatat dan menindaklanjuti setiap laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di area MRT Jakarta. Selama tahun 2020 tidak ada laporan mengenai kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di area MRT Jakarta.

Passengers' Safety and Health Management at the Stations

In terms of passengers safety and health management at the station areas, the Corporation provides various facilities to support the safety and health of passengers as follows:

1. *Provision of Lightweight Fire Extinguishers;*
2. *Provision of Hydrants;*
3. *Provision of health clinic rooms equipped with first aid box, oxygen tanks, stretcher, and other health equipment;*
4. *Participation of the workers at the stations in various training concerning emergencies;*
5. *Dissemination and briefing for all employees at the stations concerning safety at every shift.*

In 2020, the Corporation did not face any situations that might threaten the safety and health of passengers. During the reporting period, it was recorded that there were 914 visits to the health clinic, consisting of 173 visits from the passengers, 485 visits from the vendors, and 256 visits from the employees, due to health concern. All visits have been followed-up by providing first aid, so that passengers can carry out their trip and none of the visitors required further treatment, public health clinics or other healthcare facilities.

The Corporation supports the commitment of the Government of DKI Jakarta Province to be a Women- and Kids-Friendly Province, by opening 13 Posts for Women and Kids (PSPA) at each MRT Jakarta Station. The posts have been operating since December 10, 2019, and are supported by 26 workers at the stations with 8 agents of call centre employees that have been trained by the Department of Empowerment, Child Protection, and Population Control (PPAPP) of DKI Jakarta. The presence of PSPA is expected to increase the awareness concerning the importance of women and children protection. PSPA also recorded and followed up on each report concerning violence against women and children within MRT Jakarta premises. In 2020, there were no reports concerning violence against Women and Children within MRT Jakarta premises.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Selama Pandemi

Community Safety and Health Management During the Pandemic

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesehatan bersama di masa pandemi COVID-19 selama operasional kereta MRT Jakarta.

- Pembersihan insentif dan rutin rangkaian kereta MRT Jakarta, baik bagian dalam kereta (*interior*) maupun di bagian luar kereta (*exterior*).
- Kewajiban pemakaian masker pada seluruh pengguna jasa. Bagi pengguna jasa tanpa masker, tidak diperkenankan masuk area stasiun dan melakukan perjalanan dengan kereta MRT.
- Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pengguna jasa yang akan masuk ke stasiun. Apabila ada pengguna jasa yang sakit atau bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan menggunakan MRT Jakarta.
- Pembatasan 62-67 orang per kereta, dan penerapan *physical distancing* saat duduk, berdiri, maupun antre.
- Saat melakukan perjalanan di kereta MRT Jakarta, para pengguna jasa dihimbau tidak melakukan percakapan, baik dengan pengguna jasa lain atau melalui telepon genggam. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan menjaga *hygiene* bagi seluruh pengguna jasa MRT Jakarta.

Selain itu, Perseroan juga melengkapi setiap stasiun dengan fasilitas pendukung.

- Pengadaan *thermal scanner* di pintu masuk stasiun. Berfungsi sebagai alat pemindai jarak jauh untuk mengetahui suhu tubuh pengguna jasa.
- Penyediaan *hand sanitizer* di seluruh titik ramai pengguna jasa di seluruh stasiun.
- *Lift* nirkontak, yaitu pemasangan alat bantu untuk penggunaan *lift* yang dapat mengurangi kontak langsung dengan anggota tubuh pengguna jasa.
- Pembatasan transaksi tiket secara manual, dengan penutupan loket dan memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran digital.
- Pembersihan rutin 3 kali sehari fasilitas dan aset di stasiun, seperti mesin tiket otomatis, mesin *tapping gate*, *handrail*, lift dan lain-lain.
- Seluruh petugas MRT Jakarta menggunakan masker dan alat perlindungan diri (APD).
- Penyediaan ruang isolasi dan evakuasi yang aman untuk insiden dan tenaga medis dengan kelengkapan khusus di ruang P3K.

There are various activities carried out to maintain community safety and health during the COVID-19 pandemic in the operations of MRT Jakarta trains.

- *Intensive and regular cleaning of MRT Jakarta trains of both the interior and the exterior;*
- *Obligation to wear a mask for all employees. Passengers without a mask are not allowed to enter the station or use the MRT.*
- *Temperature checking for all passengers entering the stations. Sick passengers or passengers whose temperature is more than 37.3 degrees Celcius are not allowed to use MRT Jakarta.*
- *Limitation of passengers to 62-67 passengers per train, and implementation of physical distancing at seating, standing, and queueing.*
- *During the trip inside MRT Jakarta trains, the passengers are advised to refrain from conversing, whether with other passengers or by phone. It aims to provide comfort and maintain hygiene for all passengers of MRT Jakarta.*

In addition, the Corporation equips each station with supporting facilities as follows:

- *Provision of a thermal scanner at the entrance of the stations. It acts as a remote scanner to find out the temperature of passengers*
- *Provision of hand sanitisers at points of passenger crowd at all stations.*
- *Contactless elevator, by the installation of supporting tools for elevator usage without direct contact with passengers' body.*
- *Limitation of manual ticket transaction, by closing the counters and maximising the utilisation of digital payment system.*
- *Regular cleaning by three times a day for facilities and assets at the stations, such as the automatic ticketing machine, tapping gate machine, handrail, elevator, etc.*
- *All employees of MRT Jakarta wears masks and personal protective equipment (PPE).*
- *Provision of safe isolation and evacuation room for incidents and health workers with specialised equipment at first aid rooms.*

Pembuatan kebijakan dan peraturan, serta implementasi pelaksanaan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di area Operasi dan Pemeliharaan, di antaranya:

- Pengukuran suhu pengguna jasa dengan menggunakan CCTV *thermal camera* ataupun *thermogun*;
- *Dusting* disinfektan di area publik stasiun yang dilakukan sebanyak 3 kali sehari, khusus di *passenger gate* (PG) dilakukan *dusting* disinfektan setiap 2 jam sekali dan untuk mushola sebanyak 5 kali sehari;
- *Dusting* disinfektan di ratangga dilakukan pada pencucian kereta harian, mingguan dan bulanan;
- Penggunaan UVC untuk mensterilkan ratangga dilakukan pada pencucian kereta bulanan;
- Penempatan ruang isolasi di 7 stasiun MRT Jakarta, seperti Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati, Cipete Raya, Blok M BCA, Bendungan Hilir, Dukuh Atas BNI dan Bundaran HI;
- Penanganan Limbah B3 dari kegiatan medis;
- Edukasi pengguna jasa mengenai COVID-19 dan pencegahan penyebaran COVID-19;
- Pencucian ratangga;
- *Fogging* stasiun bekerja sama dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN);
- Penambahan APD Walka yang ditempatkan di ratangga berupa masker medis, *hand gloves* medis, dan *headcap* untuk penanganan pengguna jasa pingsan di masa pandemi;
- Penambahan paramedis di stasiun yang awalnya 5 stasiun menjadi 7 stasiun dengan penambahan di Stasiun Fatmawati dan Stasiun Senayan;
- Penerapan protokol kesehatan untuk kunjungan tamu mengacu kepada SOP kunjungan VIP/VVIP dan SOP non-VIP/VVIP.

Development of policies and regulation, and implementation of COVID-19 transmission prevention within the Operational and Maintenance areas as follows:

- *Checking passengers' temperature using thermal camera CCTV or thermo-gun;*
- *Disinfectant dusting at the public area of stations that are carried out three times a day, once in two hours at the passenger gates (PG), and five times in a day at praying rooms;*
- *Disinfectant dusting for Ratangga is carried out during daily, weekly, and monthly train washing;*
- *Utilisation of UVC to sterilise Ratangga during the monthly washing;*
- *Placement of isolation rooms at 7 MRT Jakarta stations, i.e., Lebak Bulus Grab, Fatmawati, Cipete Raya, Blok M BCA, Bendungan Hilir, Dukuh Atas BNI, and Bundaran HI;*
- *Management of Hazardous and Toxic Waste from medical activities;*
- *Education to the passengers concerning COVID-19 and its transmission prevention;*
- *Ratangga washing;*
- *Station fogging in collaboration with the State Intelligence Agency (BIN);*
- *Additional PPE for Train Security Guards that are placed in Ratangga in the form of medical masks, medical hand gloves, and headcap to handle fainted passengers during the pandemic;*
- *Additional stations with paramedics, from 5 stations to 7 stations with the addition of Fatmawati Station and Senayan Station;*
- *Implementation of health protocols for guest visit refers to VIP/VVIP visit SOP and non-VIP/VVIP visit SOP.*

Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey

Dalam memastikan layanan yang baik dan maksimal kepada pengguna jasa, Perseroan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan. Survei ini dilakukan untuk memetakan tingkat kepuasan pelayanan Perseroan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan Perseroan menuju standar internasional.

Pelaksanaan survei pada tahun 2020 melibatkan 1.430 pengguna jasa sebagai responden. Metode survei didasarkan pada survei yang dilaksanakan tahun 2020, Perseroan mendapatkan nilai *Customer Satisfaction Index* 86,64%. Pencapaian ini meningkat dibanding CSI tahun 2019 sebesar 82,78%; dan menunjukkan:

To ensure excellent and best services for the passengers, the Corporation carries out a Customer Satisfaction Survey. The survey is carried out to discover the satisfaction rate of the service offered by the Corporation in order to increase the services to be in line with the international standards.

The survey in 2020 involved 1,430 passengers as respondents. The survey method is based on the survey carried out in 2020. The Corporation obtained a Customer Satisfaction Index of 86.64%. This achievement increased from the CSI in 2019 to 82.78%. The survey shows that:

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

Results of Customer Satisfaction Survey

| No | Touch Point | Indeks Index | |
|---|--|----------------|-------|
| | | 2020 | 2019 |
| 1 | Kereta MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Train</i> | 88,20 | 84,48 |
| 2 | Petugas MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Staff</i> | 85,01 | 82,69 |
| 3 | Kebersihan Stasiun <i>Station Cleanliness</i> | 85,81 | 82,22 |
| 4 | Fasilitas Stasiun <i>Station Facilities</i> | 84,08 | 81,60 |
| 5 | Tiketing MRT Jakarta <i>MRT Ticketing</i> | 85,38 | 81,48 |
| Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index (CSI) Score</i> | | 86,64 | 82,78 |

Mekanisme Pengaduan Terkait Produk/Layanan /Jasa Perseroan dan Penanganannya

Complaint Mechanism concerning Products/Services of the Corporation and the Handling

Perseroan menyediakan sarana pengaduan terkait masalah produk/layanan/jasa Perseroan, dan penanganannya, melalui beberapa kanal. Setiap laporan akan terdata secara sistematis oleh penanggung jawab pengaduan publik di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Tindak lanjut atas laporan akan melibatkan fungsi/unit kerja terkait. Sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat 1.495 laporan yang disampaikan kepada Perseroan, dan sebanyak 1.495 atau 100% telah ditindaklanjuti.

The Corporation has provided a complaint mechanism concerning Corporation product/service issues through various channels. Each report will be recorded systematically by the person in charge of public complaints within the Corporation. Follow-up concerning the report will involve the relevant function/work unit. As of the end of 2020, there were 1,495 reports submitted to the Corporation and 1,495 of which, or 100% have been followed up.

Kanal Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Channel for Complaint concerning Corporate Product/Service Issues



PT MRT JAKARTA (Perseroda)
Wisma Nusantara, 21-23th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA



(62)21 3906454



jakartamrt.co.id



(62)21 3155846



1500 332 (24Jam)

Jumlah Pengaduan Publik dan Persentase Tindak Lanjut

Number of Public Complaints and Percentage of Follow-up

| Bentuk Pengaduan Form of Complaint | Jumlah Total | Jumlah Ditindaklanjuti Amount of Followed Up Reports | Persentase Percentage (%) |
|--|-----------------|--|------------------------------|
| <i>Process (Akses, ticketing, aplikasi MRT)</i> <i>Process (Access, ticketing, MRT application)</i> | 756 | 756 | 100 |
| <i>Product (Operasional kereta, informasi)</i> <i>Product (Train operations, information)</i> | 279 | 279 | 100 |
| <i>People (SDM, perilaku pengguna jasa)</i> <i>People (HC, passengers' behavior)</i> | 271 | 271 | 100 |
| <i>Premise (Fasilitas pengguna jasa, kebersihan)</i> <i>Premise (Passenger facilities, hygiene)</i> | 189 | 189 | 100 |

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility concerning Social and Community Development

Sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan, Perseroan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan pembangunan dan operasional MRT Jakarta, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penataan kota. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan telah merealisasikan beberapa kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

In accordance with the Sustainability Policy, the Corporation is committed to empower the community who are impacted directly by the construction and operational activities of MRT Jakarta, and to contribute to the improvement of community welfare and urban planning. As of the end of the reporting period, the Corporation has realised various activities as a form of social responsibility.

Penyerapan Pekerja Lokal dan Dukungan Pada Pemulihan Ekonomi Nasional

Absorption of Local Workers and Support for National Economic Recovery

Sampai dengan akhir periode pelaporan, keberadaan Perseroan telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 689 karyawan. Mereka merupakan pekerja lokal yang berasal dari Jakarta serta wilayah sekitarnya mencakup Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Perseroan juga membuka lapangan kerja bagi pekerja alihdaya maupun pekerja dari mitra kerja yang bekerja sama. Lihat halaman 105 untuk informasi terkait demografi karyawan.

As of the end of the reporting period, the presence of the Corporation has absorbed local workers of 689 employees. They include local workers from Jakarta and surrounding areas, such as Depok, Tangerang, Bekasi, and Bogor. The Corporation also recruits outsourced workers and workers from cooperating partners. Information concerning employee demographics is presented on page 105.

Kegiatan pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terus berlangsung, juga telah menyediakan lapangan kerja bagi 356 pekerja. Jumlah pekerja akan bertambah pada tahun 2021 menjadi 1.651 pekerja, seiring dengan peningkatan volume pekerjaan. Kegiatan pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A juga menjadi bentuk dukungan Perseroan pada kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digagas Pemerintah.

Phase 2A construction activities of MRT Jakarta also provides employment opportunity for 356 workers. The number of workers will increase to 1,651 workers in 2021, along with the increased volume of works. This construction is also a form of support from the Corporation to the national economic recovery (PEN) efforts as pioneered by the Government.

Selain membuka lapangan kerja langsung, kegiatan pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A juga mendatangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Keberadaan pekerja akan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek, melalui penyediaan kebutuhan para pekerja. Perseroan memastikan seluruh interaksi yang berlangsung, baik di lingkup pekerjaan konstruksi maupun dengan masyarakat sekitar, tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19.

Besides providing direct job opportunities, Phase 2A MRT Jakarta construction activities also bring indirect benefits for the community in surrounding areas. The presence of the workers will trigger the local economy around the project areas, through the provision of needs for the workers. The Corporation ensures that all ongoing interactions, both in the scope of construction works and the interactions with the surrounding community, adhere to the health protocol during the COVID-19 pandemic.

Pemberdayaan Masyarakat

Community Empowerment

Perseroan telah menerbitkan Peraturan Direksi yang mengatur mekanisme kerja sama dengan pelaku UMKM, yaitu melalui Peraturan Direksi No.PER/004/BOD-MRT/I/2019 tentang Pedoman Tata Laksana Seleksi Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai *Tenant Retail* di Stasiun MRT Jakarta. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi realisasi kerja sama Perseroan dengan pihak-pihak terkait, dalam upaya bersama meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama yang berada di sekitar stasiun. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan telah bekerja sama dengan 15 pelaku UMKM, terdiri dari UMKM kuliner, fesyen dan kriya. Kerja sama meliputi penyediaan tempat usaha yang terjangkau, tersebar di 3 stasiun. Lihat halaman 189 untuk informasi terkait kerja sama dengan UMKM.

Perseroan juga berkomitmen menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis digital, melalui kerja sama dengan pelaku usaha rintisan (*startup*). Realisasi pada tahun 2020 antara lain:

1. Program Kolaborasi Bisnis dengan Startup Indonesia, bernama MRTJ Accel. Tujuan program ini adalah menciptakan kerja sama menguntungkan bagi Perseroan dan perusahaan rintisan tersebut, serta berdampak bagi peningkatan pendapatan, penjenamaan (*branding*), hingga pengalaman pengguna jasa MRT Jakarta. MRTJ Accel memilih 9 Startup dari latar belakang industri yang berbeda-beda, yaitu Pasar Polis, Jakarta Bike Hub, Bobobox, Mapid, Maingame.com, Jejak.in, Sonicboom, Nodeflux, dan Rekosistem. Sampai dengan tahun 2020, MRTJ Accel telah melakukan market testing di stasiun MRT guna melihat kesiapan dan komersialisasi dari produk yang dikembangkan bersama.
2. MRT Jakarta menyelenggarakan Program MRT Jakarta *Star Track Incubation*, bagi masyarakat terdampak COVID-19 serta wirausahawan lainnya. Dalam program ini sebanyak 100 individu terpilih akan bergabung bersama 30 mentor serta juri terbaik. Dari 100 individu terpilih untuk disaring menjadi 25 ide *startup* menuju fase *Hackathon* pada bulan Desember 2020 dan akan berlanjut di fase inkubasi. Seluruh kegiatan dijalankan secara daring, hingga terpilih *startup* terbaik dari 4 (empat) tim yang akan mendapatkan pendanaan, akses ke pasar, dan jejaring dengan mitra program. Saat ini, progres program MRTJ Incubator sedang dalam tahap monitoring perkembangan startup dan pengembangan *product market fit* dari startup.

The Corporation has issued Directors' Regulation that governs the cooperation mechanism with MSME owners, i.e., Directors' Regulation No. PER/003/BOD-MRT/I/2019 concerning Guidelines for the Procedures of Selection of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) as Retail Tenants in MRT Jakarta Stations. The regulations become guidelines to realise cooperation between the Corporation and related parties, in the joint effort to empower the micro, small, and medium enterprise (MSME) owners, especially around the stations. As of the end of 2020, the Corporation has cooperated with 15 MSME owners, consisting of MSME in culinary, fashion, and crafts sectors. The cooperation covers the provision of convenient business location in 3 locations. Information concerning the cooperation with MSME is presented on page 189.

The Corporation is also committed to being a centre of digital-backed economic growth through collaboration with startup companies. The realisation in 2020 include:

1. *Business Collaboration Programme with Indonesian Startup, known as MRTJ Accel. The programme aims to develop profitable collaboration for the Corporation and start-ups, to generate impacts on revenue growth, branding, and user experience of MRT Jakarta. MRTJ Accel appointed 9 Start-ups with an industrial background, i.e., Pasar Polis, Jakarta Bike Hub, Bobobox, Mapid, Maingame.com, Jejak.in, Sonicboom, Nodeflux, and Rekosistem. As of 2020, MRTJ Accel has carried out market testing at MRT stations to discover the readiness and commercialization of the jointly developed products.*
2. *MRT Jakarta conducts MRT Jakarta Star Track Incubation Programme for the community impacted by COVID-19 and other business owners. In the programme, 100 selected individuals will join with 30 mentors and best adjudicators. Out of the 100 individuals, 25 startup ideas will be sorted into the Hackathon phase in 2020, to be continued to the incubation phase. All activities are carried out online, until the best start-up ideas from 4 teams selected to obtain funding, market access, and network with programme partners. Currently, MRTJ Incubator program is on the monitoring phase for startup development and market fit product development from startup.*

Perseroan juga akan meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional MRT Jakarta maupun Kawasan Berorientasi Transit (KBT). Perseroan berkomitmen melakukan pemberdayaan sosial ekonomi dan keahlian tenaga kerja informal pada kawasan dalam radius sekitar 750 meter dari stasiun, termasuk peningkatan fasilitas umum lingkungan setempat.

Perseroan juga akan terus melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak kegiatan pembangunan maupun operasional MRT Jakarta. Pelibatan akan dilakukan dengan kalender kegiatan Perseroan, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat peduli dan bersama-sama dapat menjaga dan merawat setiap fasilitas yang dimiliki Perseroan. Selama periode pelaporan, Perseroan telah memulai dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat terdampak kegiatan pembangunan maupun operasional MRT Jakarta.

The Corporation will improve the community empowerment activities around the operating areas of MRT Jakarta and Transit-Oriented Development (TOD) areas. The Corporation is committed to carrying out socio-economic and competency empowerment for informal workers in the area within 750 meters from the stations, including improvement of public facilities of the surrounding areas.

The Corporation will remain to involve the impacted community during the construction and operations of MRT Jakarta. Such involvement is carried out according to the Corporation activity calendar, which aims to develop a sense of ownership, so that the community care for and maintain the facilities of the Corporation. During the reporting period, the Corporation has started and conducted activities that involve impacted communities in the construction and operations of MRT Jakarta.



Retail UMKM di Stasiun Lebak Bulus Grab
MSME Retail at Lebak Bulus Grab Station

Program JalanJakarta (Stasiun MRT Haji Nawi) *JalanJakarta Programme (Haji Nawi MRT Station)*



Program JalanJakarta Mengecat Marka Jalan
Road Markings for JalanJakarta Program

Dalam mendukung peningkatan pengguna jasa sangat penting dalam perbaikan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda di luar jalan utama sebagai koneksi *first* dan *last-mile* sehingga meningkatkan kenyamanan dan antusiasme pengguna jasa dalam menggunakan MRT Jakarta.

MRT Jakarta bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP Indonesia) membuat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan nama #JalanJakarta yang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan aksesibilitas pengguna jasa dari/ke stasiun, terutama di dalam radius 500 meter dari stasiun sebagai lokasi fokus peningkatan kualitas infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda. Kegiatan peningkatan aksesibilitas dengan pengecatan jalan sebagai marka dan pemasangan tanda arah menuju stasiun MRT Jakarta.

Program ini menggunakan konsep kerja bakti antara pihak korporasi dengan warga setempat sehingga membangun semangat inklusivitas mendalam. Semakin banyaknya mitra yang dapat bekerja sama akan semakin banyak lokasi-lokasi di sekitar stasiun yang dapat ditingkatkan untuk aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda. Program peningkatan aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda menuju/dari MRT Jakarta, agar memudahkan dan aman

To support the increasing passengers, it is crucial to improve the accessibility for pedestrians and bicycle users outside the main road as the first- and last-mile connection, to improve the comfort and enthusiasm of the passengers in using MRT Jakarta.

The Corporation, with the Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP Indonesia) develops Corporate Social Responsibility Programme known as #JalanJakarta that is committed to continually improving the accessibility from/to the stations, especially within a 500-meter radius from the station as the focus area of pedestrian and bicycle infrastructure quality improvement. The Accessibility Improvement Programme is carried out by painting the roads with road surface marking and installation of direction signage to MRT Jakarta stations.

This programme employs the concept of community service from the Corporation and the surrounding community to create a sense of deep inclusiveness. The more partners collaborating for the programme, the more locations around the stations to be improved concerning its accessibility for pedestrian and bicycle users. Pedestrian and bicycle accessibility improvement programme to/from MRT Jakarta aims to provide easy

bagi mobilitas masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di area Stasiun Haji Nawi melalui kerja bakti bersama MRT Jakarta, ITDP Indonesia, Universitas Taruma Negara dan warga setempat dengan pengecatan marka jalan, pemasangan papan tanda informasi dan mural edukasi.

Program JalanJakarta kali ini merupakan tahap kedua di dalam area radius 500 meter Stasiun MRT Haji Nawi tepatnya Jalan RS Fatmawati di depan sekolah Daarul Maarif menjadi area aman bagi anak-anak dengan adanya pengerjaan marka jalan serta marka naik turunnya bagi anak yang diantar menggunakan kendaraan motor, dan pengerjaan mural edukasi tentang budaya bertransportasi umum.

Acara pelaksanaan JalanJakarta ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), dan Director of Southeast Asia ITDP pada tanggal 8 Maret 2020 dilakukan Bersama Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, 16 volunteer dari mahasiswa Universitas Taruma Negara, 47 orang dari warga setempat, dan 20 anak murid dari sekolah Daarul Maarif membuat kegiatan ini semakin menarik dan diharapkan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

and safe mobility for the surrounding community. The implementation of the programme is carried out in the area of Haji Nawi Station through community service among the Corporation, ITDP Indonesia, Tarumanagara University, and the local community by painting road surface markings, installation of information boards, and educational murals.

This JalanJakarta programme is the second phase of the 500-meter radius from Haji Nawi MRT Station, i.e., in RS Fatmawati Street in front of Daarul Maarif school to provide safe area for children through road surface marking and designated drop-off and pick-up areas for students, and educational mural concerning public transportation culture.

The execution of the JalanJakarta Programme is attended by the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta Province, President Director of the Corporation, and Director of Southeast Asia ITDP on March 8, 2020. It was carried out with the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta, 16 volunteering students from Tarumanagara University, 47 members of the local community, and 20 students from Daarul Maarif school, so that the activity became interesting and it is expected to provide positive benefits for the local community.



Program JalanJakarta Mengecat Marka Jalan
Road Markings for JalanJakarta Program

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) MRT Jakarta *Large-Scale Social Collaboration (KSBB) of MRT Jakarta*



Penyerahan Bantuan Kolaborasi Sosial Berskala Besar
Donation for Large-Scale Social Collaboration Program

Dalam mendukung Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai gerakan terbuka kepada seluruh pihak untuk bersatu dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Perseroan turut serta dengan mengajak karyawan internal, dan mitra strategis Perseroan untuk bersama menggalang donasi yang nantinya akan disumbangkan dalam bentuk paket bantuan berupa produk kebutuhan pokok dan kebutuhan kebersihan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak pandemi virus COVID-19 di sekitar area bisnis korporasi.

KSBB dilakukan secara 2 (dua) tahap, dan pada tahap pertama mendapatkan donasi dari karyawan internal perseroan sebesar Rp175.328.763 dan donasi dari mitra strategis perseroan sebesar Rp9.627.000.

Seluruh donasi yang terkumpul pada KSBB tahap pertama dikonversikan menjadi paket bantuan sebanyak 418 paket yang didistribusikan di area sekitar Depo MRT Jakarta kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak dengan detail sebagai berikut:

- 195 Keluarga di RT 009 / RW 002
- 76 Keluarga di RT 010 / RW 007
- 146 Keluarga di RT 009 / RW 007

To support the Large-Scale Social Collaboration (KSBB) of the Government of DKI Jakarta Province as an open movement for all parties to unite in the countermeasure efforts of the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta Province. The Corporation participates in this effort by encouraging the internal employees and strategic partners of the Corporation by carrying out crowdfunding to be donated in the form of care package containing basic needs and hygiene packs to provide aids for the community impacted by COVID-19 around the operating areas of the Corporation.

KSBB is carried out in 2 (two) phases. The first phase generated donation from Corporate internal employees of IDR 175,328,763 and donation from Corporation strategic partners of IDR 9,627,000.

All donation collected at the first phase was converted to 418 care packages distributed around MRT Jakarta Depot, Lebak Bulus sub-district, Cilandak district with the details as follows:

- *195 families in RT 009 / RW 002*
- *76 families in RT 010 / RW 007*
- *146 families in RT 009 / RW 007*

Pada tahap kedua pengalangan donasi karyawan internal mendapatkan sebesar senilai Rp150.998.400 dan mitra strategis Perseroan Rp229.000.000 dengan mengkonversi menjadi 1.181 paket bantuan yang didistribusikan di sekitar Stasiun Fatmawati dan Cipete Raya dengan detail sebagai berikut:

- RW 004 Kelurahan Cilandak Barat sebanyak 375 keluarga
- RW 001 Kelurahan Gandaria Selatan sebanyak 228 keluarga
- RW 007 Kelurahan Gandaria Selatan sebanyak 375 keluarga
- RW 005 Kelurahan Cipete Selatan sebanyak 203 keluarga

Dalam acara seremonial program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) MRT Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), dan Walikota Jakarta Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020.

The second phase generated donation from internal employees of IDR 150,998,400 and from Corporation strategic partners of IDR 229,000,000 that was converted to 1,181 care packages distributed around Fatmawati Station and Cipete Raya Station with the details as follows:

- *375 families in RW 004, Cilandak Barat sub-district*
- *228 families in RW 001, Gandaria Selatan sub-district*
- *375 families in RW 007, Gandaria Selatan sub-district*
- *203 families in RW 005 Cipete Selatan sub-district*

The ceremonial event of Large-Scale Social Collaboration (KSBB) of MRT Jakarta was attended by the Vice-Governor of DKI Jakarta Province, President Director of the Corporation, and Mayor of South Jakarta on June 15, 2020.

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Kurban MRT Jakarta *Large-Scale Social Collaboration (KSBB) for Qurban by MRT Jakarta*

Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha pada 31 Juli 2020, membuat program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Kurban MRT Jakarta dengan melakukan penggalangan donasi dari karyawan internal Perseroan untuk pembelian pematangan, dan pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat penerima zakat di area Depo MRT Lebak Bulus yang diberi tanggung jawab kepada Yayasan Masjid Darun Ni'Mah Lebak Bulus.

In celebrating Eid-al-Adha celebration on July 31, 2020, the Corporation carried out Large-Scale Social Collaboration (KSBB) of animal sacrifice by MRT Jakarta through crowdfunding from the internal employees of the Corporation to purchase an animal sacrifice, to slaughter, and to distribute the meat to zakat/alms receivers around Lebak Bulus MRT depot in collaboration with Darun Ni'mah Mosque Foundation of Lebak Bulus.

Penggalangan dana dilakukan mulai dari tanggal 7-20 Juli 2020, dan pelaksanaan pematangan hingga pendistribusian daging hewan kurban dilaksanakan pada 1 Agustus 2020. Hasil penggalangan terkumpul sebanyak 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang dibagikan ke lebih dari 800 keluarga penerima zakat.

The crowdfunding was carried out from July 7, 2020 to July 20, 2020, and the sacrifice of the animal and the distribution of the meat was carried out on August 1, 2020. The results from the crowdfunding are 2 cows and 5 sheep that were distributed to more than 800 families.

Sepeda Berbagi Bike Sharing



Meningkatnya penggunaan sepeda menjadi momentum untuk mengubah paradigma kota dan warga Jakarta tentang keberadaan sepeda. Penyediaan sepeda secara gratis dapat menjadi salah satu faktor untuk mendukung penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pesepeda, Perseroan turut mendukung upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui program Sepeda Berbagi.

Titik lokasi rak sepeda (*bike rack*) milik MRT Jakarta di lima titik stasiun, yaitu Stasiun Bundaran HI, Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Senayan, dan Stasiun Blok M BCA sebagai implementasi awal program ini untuk digunakan masyarakat luas dengan total sebanyak 30 unit sepeda.

Acara seremonial program Sepeda Berbagi ditandai dengan penandatanganan kerja sama sebagai awal pembuka program yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Director of Southeast Asia ITDP, dan Ketua *Bike To Work*.

The increasing bicycle usage is a momentum to shift the urban paradigm and the citizen's perspective on the presence of a bicycle. The free provision of a bicycle can be a factor to support the utilisation of bicycles as a mode of transportation. As an effort to support the programme of the Government of DKI Jakarta Province as a bicycle-friendly city, the Corporation supports the accessibility improvement through the Bike Sharing Programme.

The location of bike racks of MRT Jakarta is distributed in five stations, namely Bundaran HI Station, Dukuh Atas BNI Station, Bendungan Hilir Station, Senayan Station, and Blok M BCA Station as the initial implementation of this programme. Thirty bicycles are provided to be used by the public.

The ceremonial event of the Bike Sharing Programme is marked with the MoU signing to initiate the programme by the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta, President Director of the Corporation, Director of Southeast Asia ITDP, and Head of the Bike to Work Community.

Perayaan Hari Disabilitas Internasional *Commemorating the International Day of Persons with Disabilities*



Fasilitas Ramah Disabilitas di Stasiun MRT
Disabled-friendly Facilities at MRT Station

Tanggal 3 Desember yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional/ *International Day of Disabled Persons*, bersama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) dan juga MRT Jakarta ingin membawa warga dan pemerintah kota Jakarta melakukan napak tilas terhadap perjuangan teman-teman disabilitas untuk dapat mandiri bermobilitas di kota melalui 3 kegiatan Utama yaitu:

- Pameran “Jejak Disabilitas Jakarta” sekaligus memcanangkan pada tanggal 3 – 16 Desember 2020.
- *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan output konsensus mengenai Hak Disabilitas dalam Bermobilitas Mandiri di kota.
- Penempatan monument “Konsensus Hak Disabilitas Bermobilitas Mandiri di Kota” pada tanggal 4 Desember 2020.

Acara seremonial dilakukan di area Dukuh Atas pada tanggal 4 Desember 2020 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Director of Southeast Asia ITDP, Ketua Komunitas Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN), dan Ketua *Bike To Work*.

December 3 is annually commemorated as the International Day of Disabled Persons, with the Institute for Transportation and Development (ITDP) Indonesia and National Public Accessibility Movement (GAUN), the Corporation aims to present the citizens and Government of Jakarta to reflect the movement of people with disability for their mobility in the city through 3 main events as follows:

- *“Jakarta Disability Milestones” Exhibition and proclamation from December 3-16, 2020.*
- *Focus Group Discussion (FGD) to obtain outputs of consensus concerning the Rights of People with Disabilities in Independent Urban Mobility.*
- *Placement of “Consensus of Rights of People with Disabilities for Independent Urban Mobility” monument on December 4, 2020.*

The ceremonial event was carried out in Dukuh Atas area on December 4, 2020 that was attended by the Head of the Department of Transportation of DKI Jakarta, President Director of the Corporation, Director of Southeast Asia ITDP, Head of National Public Accessibility Movement (GAUN) Community, and Head of Bike to Work Community.

Protokol Jakarta BANGKIT Jakarta BANGKIT Protocol



Dalam mendukung kampanye Perseroan terkait protokol Kesehatan yang dijalankan dengan nama Protokol Jakarta BANGKIT yang dengan tujuan mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun kegiatan ini digabungkan dengan acara Perayaan 1 (satu) tahun operasi komersial Perseroan dengan kegiatan Utama mendistribusikan paket kesehatan berupa *hygiene pouch* yang berisikan cairan *sanitizer*, masker, dan informasi tentang protokol Kesehatan.

Kegiatan dilakukan dengan periode selama 5 (lima) hari pada bulan Maret 2020 dengan penempatan di dalam dan luar Stasiun yang ditujukan kepada pengguna jasa dan juga publik.

In supporting the campaign of the Corporation concerning Health Protocols, Jakarta BANGKIT Protocol aims to reduce the transmission of COVID-19. This activity is carried out simultaneously with 1 (one) year anniversary of the Corporation commercial operations, with the main event to distribute care package of hygiene pouch, containing hand sanitiser liquid, mask, and information on Health Protocols.

The activity was carried out in a period of 5 (five) days in March 2020 in and outside the station targeting the passengers and the public.

Dukungan Sponsorship

Sponsorship Support



Penyerahan Sumbangan
Donation Handover

Perseroan juga turut serta dalam bentuk *sponsorship* berupa dana/keuangan atau bentuk dukungan lainnya agar pihak yang menerima bantuan dapat merasakan manfaat positif. *Sponsorship* dapat menjadi sebuah bentuk kerja sama kemitraan guna mencapai berbagai sasaran program bersama dan sebagai sarana investasi dalam bentuk tunai atau barang dalam suatu kegiatan, yang akan mendapatkan imbalan sebagai akses potensi komersial yang terkait dengan kegiatan ini.

Adapun selama tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan berbagai *sponsorship* dengan detail sebagai berikut:

- *Sponsorship* sumbangan dana hewan kurban melalui BUMD Academy kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.
- *Sponsorship* sumbangan hewan kurban 1 ekor sapi kepada Yayasan El Fawaz Generasi Mandiri Rp19.000.000.
- *Sponsorship* sumbangan Bulan Dana PMI bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebesar Rp2.500.000.
- *Sponsorship* sumbangan belasungkawa untuk Bapak Saefullah sebesar Rp4.504.500.

The Corporation also provides sponsorship support in the form of fund/money or other form to deliver positive benefits to the beneficiaries. The sponsorship can be in the form of partnership collaboration to reach collaborative programme objectives and as a mean of investment in the form of cash or products for an activity, with the benefit of potential commercial access relating to the programme.

In 2020, the Corporation has carried out various sponsorship programme with the details as follows:

- *Sponsorship of animal sacrifice fund through BUMD Academy to the National Board of Zakat (BAZNAS) of DKI Jakarta Province of IDR 145,000,000.*
- *Sponsorship in the form of one cow as an animal sacrifice for El Fawaz Independent Generation Foundation valued at IDR 19,000,000.*
- *Sponsorship in the form of a grant for the Fund Month of the Indonesian Red Cross with the Department of Transportation of DKI Jakarta, amounted to IDR 2,500,000.*
- *Sponsorship in the form of bereavement donation for Saefullah of IDR 4,504,500.*

Mekanisme Pengaduan Publik

Public Complaint Mechanism

Perseroan telah menyediakan sarana pengaduan bagi para pengguna jasa, agar dapat menyampaikan keluhan, kritik dan saran melalui beberapa kanal media. Setiap keluhan, kritik dan saran akan terdata secara sistematis oleh penanggung jawab pengaduan publik di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Tindak lanjut atas setiap keluhan, kritik dan saran akan melibatkan fungsi/unit kerja terkait. Sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat 1.495 keluhan, kritik dan saran yang disampaikan kepada Perseroan, dan sebanyak 1.495 atau 100% telah ditindaklanjuti.

The Corporation has provided a facility through which passengers can submit their complaints, criticisms, and suggestions through a various media channel. Each complaint, criticism, and suggestion will be recorded systematically by the person in charge of public complaints within the Corporation. Follow-up of each complaint, criticism, and suggestion will involve the relevant function/work unit. As of the end of 2020, there were 1,495 complaints, criticisms, and suggestions submitted to the Corporation, and 1,495 of them, or 100%, have been followed up.

Kanal Pengaduan Publik

Public Complaint Channels



PT MRT JAKARTA (Perseroda)

Wisma Nusantara, 21-23th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA



(62)21 3906454



jakartamrt.co.id



(62)21 3155846



1500 332 (24Jam)

Jumlah Pengaduan Publik dan Persentase Tindak Lanjut

Number of Public Complaints and Percentage of Follow

| Bentuk Pengaduan Form of Complaint | Jumlah Total | Jumlah Ditindaklanjuti Amount of Followed Up Reports | Persentase Percentage (%) |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Instagram | 679 | 679 | 100 |
| Twitter | 541 | 541 | 100 |
| Call Center | 222 | 222 | 100 |
| Stasiun | 26 | 26 | 100 |
| Facebook | 24 | 24 | 100 |
| Email | 3 | 3 | 100 |

DAFTAR SINGKATAN

List of Abbreviations

| | |
|--------------|---|
| ADB | Asian Development Bank |
| AED | Automated External Defibrillators |
| AFC | Automatic Fare Collection |
| AK3U | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum |
| AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| APAR | Alat Pemadam Api Ringan |
| APD | Alat Perlindungan Diri |
| ATO | Automated Train Operation |
| BANGKIT | Bersih, Aman, Nyaman, Go Green, Kolaborasi, Inovasi dan Tata Kelola yang Baik |
| BAZNAS | Badan Amil Zakat Nasional |
| BBM | Bahan Bakar Minyak |
| BCM | Business Continuity Management |
| BEKRAF | Badan Ekonomi Kreatif |
| BIN | Badan Intelijen Negara |
| BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
| BP BUMD | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah |
| BPK | Badan Pengawasan Keuangan |
| BPKP | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| BPM | Business Process Mapping |
| BPTJ | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia |
| BRP | Business Travel Request |
| BRR NAD Nias | Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias |
| BRT | Bus Rapid Transit |
| BSC | Balanced Scorecard |
| BUMD | Badan Usaha Milik Daerah |
| CA | Certified Accountant |
| CBTC | Communications Based Train Control |
| CCSA | Control & Compliance Self-Assessment |
| CFE | Certified Fraud Examiner |
| CFrA | Certified Forensic Auditor |
| CGPI | Corporate Governance Perception Indeks |
| COVID-19 | Corona Virus Diseases 2019 |
| COSO | Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commission |

| | |
|---------|---|
| CP | Contract Package |
| CSI | Customer Satisfaction Index |
| CSR | Corporate Social Responsibility |
| CSW | Centrale Sticing Wederopbouw |
| DAR | Debt to Asset Rasio |
| DED | Detail Engineering Design |
| DER | Debt to Equity Ratio |
| DLP | Defect Liability Period |
| DPA | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| DRP | Disaster Respond Plan |
| DTKJ | Dewan Transportasi Kota Jakarta |
| EMDP | Executive Management Development Program |
| EmoP | Environmental Monitoring Plan |
| EMP | Environmental Management Plan |
| ERM | Enterprise Risk Management |
| ERMAP | Enterprise Risk Management Associate Professional |
| ERP | Electronic Road Pricing |
| ERP | Enterprise Resoure Planning |
| ESOP | Employee Share Ownership Program |
| EY | Ernst & Young |
| Fintech | Financial Technology |
| GAAS | General Affair Application System |
| Gapeka | Grafik Perjalanan Kereta |
| GBCI | Green Building Council Indonesia |
| GCG | Good Corporate Governance |
| GJ | GigaJoule |
| GKJ | Gereja Kristen Jawa |
| GMS | General Meeting of Shareholders |
| GO D3KN | Gaul Online Bersama D3KN |
| GRC | Governance, Risk and Compliance |
| GRK | Gas Rumah Kaca |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| HC | Human Capital |
| HKHPM | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
| HOA | Head of Agreement |
| IAI | Ikatan Akuntan Indonesia |
| IAI | Ikatan Arsitek Indonesia |
| IAPI | Institut Akuntan Publik Indonesia |
| ICT | Information and Communication Technology |
| IICG | Indonesian Institute for Corporate Governance |

| | |
|----------|--|
| ISAFIS | Indonesian Student Association for International Studies |
| ISAK | Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan |
| IST | Information System & Technology |
| ITB | Intitut Teknologi Bandung |
| ITDP | Institute for Transportation and Development Policy Indonesia |
| ITJ | PT Integrasi Transit Jakarta |
| JICA ODA | Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance |
| JIC-JV | Japan-Joint Venture |
| JV | Joint Venture |
| K3 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja |
| KAP | Kantor Akuntan Publik |
| KBT | Kawasan Berorientasi Transit |
| Kepgub | Keputusan Gubernur |
| KJPP | Konsultan Jasa Penilai Publik |
| KLB | Koefisien Luas Bangunan |
| KM | Knowledge Management |
| KMR | Komite Manajemen Risiko |
| KNKG | Komite Nasional Kebijakan Governance |
| KPI | Key Performance Indikator |
| KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KRI | Key Risk Indicators |
| KSBB | Kolaborasi Sosial Berskala Besar |
| LHKPN | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara |
| LRT | Light Rapid Transit |
| LTA | Land Transport Authority |
| MITJ | PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek |
| MoD | Minutes of Discussion |
| MoES | Memorandum on Engineering Services |
| Monas | Monumen Nasional |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MSOP | Management Share Ownership Program |
| MTT | Multitrip Ticket |
| STT | Single Trip Ticket |
| NCov | Novel Coronavirus |
| NFB | Non-Fare Box |
| OD | Origin Destination |
| OSH | Occupational Safety and Health |
| P2K3 | Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| P3K | Pertolongan Pertama pada Kecelakaan |
| PEN | Pemulihan Ekonomi Nasional |

| | |
|----------|--|
| Peseroda | Perusahaan Daerah |
| PG | Passenger Gate |
| PHK | Pemutusan Hubungan Kerja |
| PJBTL | Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik |
| PKR | Pernyataan Keputusan Rapat |
| PKS | Perjanjian Kerjasama |
| Plt | Pelaksana Tugas |
| PMD | Penanaman Modal Daerah |
| PMR | Partnership for Market Readiness |
| PMU | Project Monitoring Unit |
| PPAPP | Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai |
| PRK | Panduan Rancang Kota |
| PSAK | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan |
| PSBB | Pembatasan Sosial Berskala Besar |
| PSD | Platform Screen Door |
| PSPA | Pos Sahabat Perempuan dan Anak |
| QIA | Qualified Internal Auditor |
| RAP | Resettlement Action Plan |
| RAT | Rencana Audit Tahunan |
| RBP | Rencana Bisnis Perusahaan |
| REDD+ | Reductions of Emissions from Deforestation and Forest Degradations |
| Renstra | Rencana Strategis Bisnis |
| RJP | Rencana Jangka Panjang |
| RJPP | Rencana Jangka Panjang Perusahaan |
| RKA | Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKAP | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan |
| RM | Risk Management |
| ROE | Regionally-Owned Enterprise |
| RPBJ | Rencana Pengadaan Barang/Jasa |
| RUPS | Rapat Umum Pemegang Saham |
| SAJV | Shimizu-Adhi Karya JV |
| SAK | Standar Akuntansi Keuangan |
| SAPROF | Special Assistance for Project Formation |
| SBM | School of Business Management |
| SCBA | Self Contained Breathing Apparatus |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SDP | Supervisory Development Program |
| SHA | Shareholder Agreement |
| SHE | Safety, Health & Environment |

| | |
|-------|--|
| SMAP | Sistem Manajemen Anti Penyuapan |
| SMCC | Sumitomo Mitsui Construction Company |
| SMK3 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| SMKI | Sistem Manajemen Keamanan Informasi |
| SOD | Safety Officer Development |
| SOP | Standard Operational Procedure |
| SPKN | Standar Pemeriksaan Keuangan Negara |
| SPV | Special Purpose Vehicle |
| SSO | Single Sign On |
| STAN | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara |
| TBM | Tunnel Boring Machines |
| TIK | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| TJSL | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan |
| TNI | Tentara Nasional Indonesia |
| TOD | Transit-Oriented Development |
| TQM | Total Quality Management |
| UDGL | Urban Design Guidelines |
| UKP4 | Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan |
| UMKM | Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| UNDP | United Nations Development Programme |
| UNDRR | UN Office for Disaster Risk Reduction |
| UPG | Unit Pengendalian Gratifikasi |
| UPK | Unit Pengelola Kawasan |
| VAT | Value-Added Tax |
| VO | Variation Order |
| WBS | Whistleblowing System |
| WFH | Work From Home |
| WNI | Warga Negara Indonesia |
| WRI | World Resources Institute Foundation |

INDEKS POJK

POJK INDEX

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|--|-----------------|
| 1 | Umum <i>General</i> | | |
| 1 | Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>The annual report is presented in good and correct Indonesian and also recommended in English</i> | | ✓ |
| 2 | Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>Annual reports is printed in good quality and use easy-to-read type and letter sizes</i> | | ✓ |
| 3 | Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>The annual report clearly identifies the identity of the company</i> | | ✓ |
| 4 | Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: <i>Name of company and year of annual report shown on:</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Sampul muka; <i>Front cover;</i> b. Samping; <i>Side;</i> c. Sampul belakang; dan <i>Back cover; and</i> d. Setiap halaman. <i>Every page.</i> | ✓ |
| 5 | Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. <i>Information on the Company Website including the latest annual report and at least for the last 4 years.</i> | | |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|--|---|
| II | Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Summary of Important Financial Data</i> | | |
| | Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information on business results of the company in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</i> | Informasi memuat antara lain: <i>Information includes among others:</i> a. Penjualan/pendapatan usaha; <i>Sales/operating revenues;</i> b. Laba (rugi): <i>Profit and (loss):</i> • Dibagikan kepada pemilik entitas induk; <i>Attributed to the owner of the parent;</i> • Dibagikan kepada kepentingan nonpengendalian; <i>Attributed to non-controlling interests;</i> c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : <i>Comprehensive income for the current period:</i> • Dibagikan kepada pemilik entitas induk; <i>Attributed to the owner of the parent;</i> • Dibagikan kepada kepentingan nonpengendali. <i>Attributed to non-controlling interests;</i> d. Laba (rugi) per saham. <i>Earnings (loss) per share.</i> Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. <i>Note: If the company does not have a subsidiary, the company presents the total current profit (loss) and total income for the current year.</i> | 20 20 20 20 20 21 21 21 20-21 |
| 2 | Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Company's financial position information in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</i> | Informasi memuat antara lain: <i>Information includes among others:</i> a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; <i>Amount of investment in associate entity;</i> b. Jumlah aset; <i>Total assets;</i> c. Jumlah liabilitas; dan <i>Amount of liabilities; and</i> d. Jumlah ekuitas. <i>Total equity.</i> | 22 |
| 3 | Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Financial ratios in the form of comparisons for 3 (three) fiscal years or since the start of business business if the the Company's business activities are less than 3 (three) years</i> | Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. <i>Information contains 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.</i> | 22 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|---|--|---|-----------------|
| 4 | Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik <i>Stock price information in tables and graphs</i> | a. Jumlah saham yang beredar; <i>Number of shares outstanding;</i> | 23; 209 |
| | | b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <i>Information in tabular form which contains:</i> | 23 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; <i>Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed;</i> Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan <i>The highest, lowest, and closing prices are based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <i>Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> | |
| | | c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <i>Information in graphical form containing at least:</i> | 23 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan <i>The closing price based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <i>Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> <p>untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. <i>for each quarter for the last 2 (two) fiscal years.</i></p> | |
| 5 | Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Information on bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last 2 (two) fiscal years</i> | <p>Informasi memuat: <i>Information includes:</i></p> <p>a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); <i>Number of bonds/sukuk/bonds of conversion in circulation (outstanding);</i></p> <p>b. Tingkat bunga/imbalan; <i>Interest rate/reward;</i></p> <p>c. Tanggal jatuh tempo; dan <i>Due date; and</i></p> <p>d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018 <i>Rating for bonds/sukuk in 2017 and 2018</i></p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. <i>Note: if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, to be disclosed.</i></p> | 24 |
| III Laporan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Report</i> | | | |
| 1 | Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Report</i> | <p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Including the following:</i></p> <p>a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; <i>Assessment of the Board of Directors' performance on the management of the company and scoring basis;</i></p> <p>b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; <i>A view of the business prospects of the company drawn up by the Board of Directors and the basis for their consideration;</i></p> | 46 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|---|-----------------|
| | | <p>c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan <i>The views on the whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and</i></p> <hr/> <p>d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and reasons for the change.</i></p> | |
| 2 | Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i> | <p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Including the following:</i></p> <hr/> <p>a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <i>An analysis of the company's performance, which includes among others:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan strategis; <i>strategic policy;</i> <hr/> • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan <i>comparison between results achieved and targeted; and</i> <hr/> • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; <i>constraints faced by the company and its settlement measures;</i> <hr/> <p>b. Analisis tentang prospek usaha; <i>Analysis of business prospects;</i></p> <hr/> <p>c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan <i>The development of corporate governance in the fiscal year; and</i></p> <hr/> <p>d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Changes in the composition of the Board of Directors members (if any) and reasons for the change.</i></p> | 58 |
| 3 | Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors</i> | <p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Including the following:</i></p> <hr/> <p>a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; <i>The signatures are contained on a separate sheet;</i></p> <hr/> <p>b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; <i>A statement that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;</i></p> <hr/> <p>c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors by stating their names and positions; and</i></p> <hr/> <p>d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <i>A written explanation in a separate letter from individuals in the event that there are members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors who do not sign the annual report, or written explanation in separate letters from other members in the absence of written explanation from the concerned.</i></p> | 68-69 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|--|-----------------|
| IV | Profil Perusahaan Company Profile | | |
| 1 | Nama dan alamat lengkap perusahaan The full name and address of the company | Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web. The information includes: name and address, zip code, no. Tel, no. Fax, email, and website. | 73 |
| 2 | Riwayat singkat perusahaan Company brief history | Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Includes: date / year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name. | 74 |
| | | Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Note: if the company has never changes its name, to disclose it | 78 |
| 3 | Bidang usaha Business fields | Uraian mengenai antara lain: Description of: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; Company's business activities according to the latest articles of association; b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan Business activities carried out; and c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Products and / or services produced. | 78 |
| 4 | Struktur Organisasi Organizational structure | Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi. In the form of a chart, including the names and positions, at least up to 1 (one) level below the board of directors. | 86 |
| 5 | Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture | Mencakup: Includes: a. Visi perusahaan; Company vision; b. Misi perusahaan; Company Mission; c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors / Board of Commissioners in the fiscal year; and d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Statement about corporate culture owned by the company. | 82-84 |
| 6 | Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief biography of members of the Board of Commissioners | Informasi memuat antara lain: Information includes: a. Nama; Name; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); Position and term of office (including position in company or other institution); c. Umur; Age; d. Domisili; Domicile; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); Education (Field of Study and Educational Institution); | 88-92 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------|
| | | <p>f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan <i>Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and</i></p> <p>g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <i>The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since first appointed.</i></p> | |
| 7 | Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Identity and brief biography of members of the Board of Directors</i> | <p>Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i></p> <p>a. Nama; <i>Name;</i></p> <p>b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); <i>Position and term of office (including position in company or other institution);</i></p> <p>c. Umur; <i>Age;</i></p> <p>d. Domisili; <i>Domicile;</i></p> <p>e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); <i>Education (Field of Study and Educational Institution);</i></p> <p>f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan <i>Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and</i></p> <p>g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <i>The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company since first appointed.</i></p> | 93-96 |
| 8 | Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi <i>Number of employees (2 years comparative) and employee competency development data reflecting the opportunities at each level of organization</i> | <p>Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i></p> <p>a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; <i>Number of employees for each level of organization;</i></p> <p>b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; <i>Number of employees for each level of education;</i></p> <p>c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; <i>Number of employees by employment status;</i></p> <p>d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan <i>Data of employee competency development that has been done in the fiscal year consisting of position levels for those who participated in training, type of training, and training objectives; and</i></p> <p>e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. <i>Employee competency development costs incurred during the fiscal year</i></p> | 105-112 |
| 9 | Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholder Composition</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; <i>Details of the shareholder's name including the 20 largest shareholders and the percentage of ownership;</i></p> <p>b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <i>Shareholder details and percentage of ownership include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan <i>Name of shareholder owning 5% or more shares; and</i> | 124 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <i>Groups of public shareholders with share ownership of less than 5% each.</i> | |
| | | <p>c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <i>Name of Directors and Commissioners as well as the percentage of ownership of shares directly and indirectly.</i></p> | |
| 10 | Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of subsidiaries and/or associates</i> | <p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: <i>In the form of the table containing information, including:</i></p> <p>a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; <i>Name of subsidiary and/or associate;</i></p> <p>b. Persentase kepemilikan saham; <i>Percentage of share ownership;</i></p> <p>c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan <i>Description of the business of the subsidiary and / or associate; and</i></p> <p>d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <i>Description of the operating status of the subsidiary and/or associate entity (already in operation or not yet operating).</i></p> | 127 |
| 11 | Struktur grup perusahaan <i>Company group structure</i> | <p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). <i>The group structure of the company in the form of a chart showing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).</i></p> | 126 |
| 12 | Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Chronology of shares issuance (including private placement) and/or stock listing from initial offering up to the end of the fiscal year</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); <i>Year of issuance, number of shares, par value of shares, and stock quotation price for each corporate action;</i></p> <p>b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan <i>Number of shares registered after each corporate action; and</i></p> <p>c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatitkan. <i>The name of the stock where the company's shares are listed.</i></p> | 134 |
| 13 | Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>The chronology of the issuance and/or listing of other securities from the initial publication until the end of the fiscal year</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; <i>Other securities name, other issuance year, other securities interest rate/reward, and maturity date of the securities;</i></p> <p>b. Nilai penawaran efek lainnya; <i>The value of other securities offerings;</i></p> <p>c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatitkan; dan <i>Name of exchange where other securities are listed; and</i></p> <p>d. Peringkat efek. <i>Securities Ranking.</i></p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. <i>Note: if the company does not have a chronology for other securities listing, to be disclosed.</i></p> | 134 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------|
| 14 | Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of supporting institutions and/or professions</i> | Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; <i>Name and address of BAE/party administering shares of the company;</i> b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan <i>Name and address of Public Accounting Firm; and</i> c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <i>Name and address of the rating agency.</i> | 135-139 |
| 15 | Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>Awards received in the last fiscal year and/or certification that is still valid in the last fiscal year both nationally and internationally</i> | Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; <i>Name of award and/or certificate;</i> b. Tahun perolehan; <i>Year of acquisition;</i> c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan <i>Awarding bodies and/or certificates; and</i> d. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <i>Validity period (for certification).</i> | 140-141 |
| 16 | Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Names and addresses of subsidiaries and / or branch offices or representative offices (if any)</i> | Memuat informasi antara lain: <i>Information includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat entitas anak; dan <i>Name and address the subsidiaries; and</i> b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <i>Name and address of branch offices/representatives.</i> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan. <i>Note: if the company does not have subsidiaries/branches/representatives, to be disclosed.</i></p> | 142 |
| 17 | Informasi pada Situs Website Perusahaan <i>Information on the Company Website</i> | Meliputi paling kurang: <i>Information includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; <i>Shareholder information up to the individual end owner;</i> b. Isi Kode Etik; <i>Code of Ethics Content;</i> c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; <i>General Meeting of Shareholders (GMS at least includes the agenda items discussed in the GMS, summaries of minutes of the GMS, and important information, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS call, the GMS, the date of the minutes of the GMS;</i> d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); <i>Separate annual financial statements (last 5 years);</i> e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan <i>Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and</i> f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. <i>Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit Charter.</i> | 143 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|--|--|
| 18 | Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</i> | Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): <i>Includes at least (types and relevant parties):</i> a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; <i>Education and/or training for the Board of Commissioners;</i> b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; <i>Education and/or training for Directors;</i> c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; <i>Education and/or training for the Audit Committee;</i> d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; <i>Education and/or training for the Nomination and Remuneration Committee;</i> e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; <i>Education and/or training for Other Committees;</i> f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan <i>Education and/or training for Corporate Secretary; and</i> g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. <i>Education and/or training for the Internal Audit Unit. which is followed in the book year</i> Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan <i>Note: if there is no education and/or training in the fiscal year, to be disclosed</i> | 114-123 |
| V | Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan <i>Management Discussion and Analysis on Company Performance</i> | | |
| 1 | Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Overview of operations per business segment</i> | Memuat uraian mengenai: <i>Information includes:</i> a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. <i>Explanation of each business segment.</i> b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <i>Per business segment performance, including:</i> • Produksi; <i>Production;</i> • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; <i>Increased/decreased production capacity;</i> • Penjualan/pendapatan usaha; dan <i>Sales/operating revenues; and</i> • Profitabilitas. <i>Profitability.</i> | 150-183, 184-190 |
| 2 | Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description of the company's financial performance</i> | Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <i>Financial performance analysis which includes comparison between financial performance for the year concerned with previous year and reason for increase/decrease (in the form of narration and table), among others concerning:</i> a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i> b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; <i>Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;</i> c. Ekuitas; <i>Equity;</i> | 195-199 195; 199-202; 167-170; 199 202-203 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|--|-----------------|
| | | d. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan <i>Sales/operating revenue, expenses and profits (loss), other comprehensive income, and total profit (loss) and other comprehensive income; and</i> | 203-209 |
| | | e. Arus kas. <i>Cash flow.</i> | 209-212 |
| 3 | Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis of debt ability and collectibility level of the company, by presenting the calculation of relevant ratios according to the type of industrial company</i> | Penjelasan tentang : <i>Explanation of :</i> a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan <i>The ability to pay the debt, both short-term and long-term; and</i> b. Tingkat kolektibilitas piutang. <i>Collectibility of receivables.</i> | 181-185 |
| 4 | Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) <i>Discussion about capital structure and management policy on capital structure policy</i> | Penjelasan atas: <i>Explanation of:</i> a. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan <i>Details of capital structure consisting of interest-based/sukuk and equity debts; and</i> b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan <i>Management policy on capital structure policies; and</i> c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. <i>Basic selection of management policies on capital structure.</i> | 213-217 |
| 5 | Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir <i>Discussion of material ties to capital investment (not funding ties) in the last fiscal year</i> | Penjelasan tentang: <i>Explanation of:</i> a. Nama pihak yang melakukan ikatan; <i>Name of the party making the bond;</i> b. Tujuan dari ikatan tersebut; <i>The purpose of the bond;</i> c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; <i>Sources of funds expected to fulfill such commitments;</i> d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan <i>Denominated currency; and</i> e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <i>Measures planned by the company to protect the risk of foreign currency positions.</i> Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. <i>Note: if the company does not have capital investment related bonds in the last fiscal year to disclose.</i> | 219 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|--|-----------------|
| 6 | Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <i>Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year</i> | <p>Penjelasan tentang: <i>Explanation of:</i></p> <hr/> <p>a. Jenis investasi barang modal; <i>Type of investment of capital goods;</i></p> <hr/> <p>b. Tujuan investasi barang modal; dan <i>The purpose of investment of capital goods; and</i></p> <hr/> <p>c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <i>The investment value of capital goods issued in the last fiscal year.</i></p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. <i>Note: if there is no realization of investment in capital goods, to disclose.</i></p> | 220 |
| 7 | Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan <i>Comparative information between the targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization), and the target or projection to be achieved for the coming 1 (one) year for revenue, profits, and others deemed important to the enterprise</i> | <p>Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i></p> <hr/> <p>a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan <i>Comparison between targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization); and</i></p> <hr/> <p>b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <i>Target or projection to be achieved 1 (one) year ahead.</i></p> | 221 |
| 8 | Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Material information and facts occurring after the date of the accountant's report</i> | <p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. <i>Description of important events after the date of the accountant's report including impact on future performance and business risks.</i></p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. <i>Note: if there are no important events after the date of the accountant's report, to be disclosed.</i></p> | 245 |
| 9 | Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>A description of the business prospects of the company</i> | <p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. <i>Description of the company prospects attributed to industry and the economy in general along with quantitative support data from reliable data sources.</i></p> | 238-239 |
| 10 | Uraian tentang aspek pemasaran <i>A description of the marketing aspects</i> | <p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. <i>Description of the marketing aspects of a company's products and/or services, among others, marketing strategy and market share.</i></p> | 191 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|--|-----------------|
| 11 | <p>Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p><i>Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and the amount of dividend per annum announced or paid during the last 2 (two)</i></p> | <p>Memuat uraian mengenai: <i>Description of:</i></p> <p>a. Kebijakan pembagian dividen; <i>Dividend distribution policy;</i></p> <p>b. Total dividen yang dibagikan; <i>Total dividends distributed;</i></p> <p>c. Jumlah dividen kas per saham; <i>Amount of cash dividend per share;</i></p> <p>d. Payout ratio; dan <i>Payout ratio; and</i></p> <p>e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. <i>Date of announcement and payment of cash dividend. for each year.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. <i>Note: if there is no dividend distribution, please disclose the reason.</i></p> | 222-223 |
| 12 | <p>Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku</p> <p><i>Company's existing employee and/or management shareholding (ESOP/MSOP) program for the fiscal year</i></p> | <p>Memuat uraian mengenai: <i>Description of:</i></p> <p>a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; <i>Number of shares of ESOP/MSOP and realization;</i></p> <p>b. Jangka waktu; <i>Time period;</i></p> <p>c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan <i>Eligible employee and/or management requirements; and</i></p> <p>d. Harga exercise. <i>Exercise price.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. <i>Note: if it does not have the intended program, to be disclosed.</i></p> | 223 |
| 13 | <p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p><i>Use of proceeds from the public offering (in case the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)</i></p> | <p>Memuat uraian mengenai: <i>Description of:</i></p> <p>a. Total perolehan dana; <i>Total acquisition of funds;</i></p> <p>b. Rencana penggunaan dana; <i>Plan for the use of funds;</i></p> <p>c. Rincian penggunaan dana; <i>Details of the use of funds;</i></p> <p>d. Saldo dana; dan <i>Fund balance; and</i></p> <p>e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <i>Date of AGM/RUPO approval on changes in use of funds (if any).</i></p> <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. <i>Note: if no realization information on the use of proceeds from the public offering, to be disclosed.</i></p> | 223 |
| 14 | <p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p><i>Material transaction information containing conflict of interest and/or transaction with affiliates</i></p> | <p>Memuat uraian mengenai: <i>Description of:</i></p> <p>a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; <i>The name of the transacting party and the nature of the affiliate relationship;</i></p> <p>b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; <i>Explanation of the fairness of transactions;</i></p> <p>c. Alasan dilakukannya transaksi; <i>The reason for the transaction;</i></p> | 225-229 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------|
| | | <p>d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; <i>Actual transactions during the last fiscal year;</i></p> <p>e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan <i>Company policy related to review mechanism of transaction; and</i></p> <p>f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <i>Compliance with relevant rules and regulations.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. <i>Note: if no such transaction, to be disclosed.</i></p> | |
| 15 | <p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir <i>A description of legislation changes in the last fiscal year</i></p> | <p>Uraian memuat antara lain: <i>Description of:</i></p> <p>a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan <i>The name of the changed legislation; and</i></p> <p>b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <i>The impact (quantitative and/or qualitative) on the firm (if significant) or the statement that the impact is insignificant.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. <i>Note: if there is no change in legislation that has any significant effect, to be disclosed.</i></p> | 230 |
| 16 | <p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>A description of the accounting policy changes adopted by the company in the last fiscal year</i></p> | <p>Uraian memuat antara lain: <i>Description of:</i></p> <p>a. Perubahan kebijakan akuntansi; <i>Changes in accounting policies;</i></p> <p>b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan <i>Reasons for changes in accounting policies; and</i></p> <p>c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <i>The quantitative impact on the financial statements.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. <i>Note: if there is no change in accounting policy in the last fiscal year, to disclose.</i></p> | 230-231 |
| 17 | <p>Informasi kelangsungan usaha <i>Information on business continuity</i></p> | <p>Pengungkapan informasi mengenai: <i>disclosure of information regarding:</i></p> <p>a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Matters that have the potential to have a significant effect on the company's business continuity in the last financial year;</i></p> <p>b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan <i>Management's assessment of the items in number 1; and</i></p> <p>c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <i>The assumptions used by management in conducting the assessment.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. <i>Note: if there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year, please disclose the assumptions underlying the management in believing that there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year.</i></p> | 232-237 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------------------------|
| VI | Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance</i> | | |
| 1. | Uraian Dewan Komisaris <i>Description of the Board of Commissioners</i> | Uraian memuat antara lain: <i>Description of:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; <i>Description of the responsibilities of the Board of Commissioners;</i> b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan <i>Assessment of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis of its assessment; and</i> c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <i>Disclosure of Board Charter (Code of Conduct and Board of Commissioners).</i> | 272-289 |
| 2. | Komisaris Independen (jumlahnya minimal 20% dari total Dewan Komisaris) <i>Independent Commissioners (at least 30% of the total Board of Commissioners)</i> | Meliputi antara lain: <i>Includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan <i>Criteria for determining Independent Commissioners; and</i> b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <i>Statement on the independence of each Independent Commissioner.</i> | 288-289 |
| 3. | Uraian Direksi <i>Description of the Board of Directors</i> | Uraian memuat antara lain: <i>Description of:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; <i>The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i> b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan <i>Assessment of the performance of committees under the Board of Directors (if any); and</i> c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <i>Disclosure of Board Charter (guidelines and work discipline of the Board of Directors).</i> | 302-310 318-320 274 |
| 4. | Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment of GCG Implementation for the fiscal year 2017 covering at least the aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i> | Mencakup antara lain: <i>Includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; <i>Criteria used in the assessment;</i> b. Pihak yang melakukan penilaian; <i>The party conducting the assessment;</i> c. Skor penilaian masing-masing kriteria; <i>Scoring scores for each criterion;</i> d. Rekomendasi hasil penilaian; dan <i>Recommendation of assessment results; and</i> e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <i>Reason for not yet/not implementing recommendation.</i> <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan. <i>Note: if there is no GCG implementation assessment for the fiscal year 2016, to be disclosed.</i></p> | 460-471 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|--|-----------------|
| 5. | <p>Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Description of remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors</i></p> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <hr/> <p>a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; <i>Disclosure of procedure up to the determination of remuneration of the Board of Commissioners;</i></p> <hr/> <p>b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; <i>Disclosure of procedure up to the determination of the remuneration of the Board of Directors;</i></p> <hr/> <p>c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; <i>Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners;</i></p> <hr/> <p>d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; <i>Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors;</i></p> <hr/> <p>e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan <i>Disclosure of indicators for the Board of Directors' remuneration; and</i></p> <hr/> <p>f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <i>Disclosure of performance bonuses, non performance bonuses, and/or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors (if any).</i></p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. <i>Note: where there are no performance bonuses, non performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, to be disclosed.</i></p> | 322-326 |
| 6. | <p>Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) <i>Frequency and Attendance by members at Board of Commissioners meetings (at least 1 times in 2 months), Board of Directors Meetings (at least 1 time in 1 month), and Joint Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors (minimum 1 time in 4 months)</i></p> | <p>Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i></p> <hr/> <p>a. Tanggal Rapat; <i>Date of Meeting;</i></p> <hr/> <p>b. Peserta Rapat; dan <i>Meeting participants; and</i></p> <hr/> <p>c. Agenda Rapat. <i>Meeting agenda.</i></p> <hr/> <p>untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. <i>for each meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meetings.</i></p> | 329-346 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|--|-----------------|
| 7. | Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu <i>Information on the major and controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners</i> | Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. <i>In the form of schematics or diagrams that separate major shareholders with controlling shareholders.</i> Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. <i>Note: the major shareholder is a party, directly or indirectly, with at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares issued by a Company, but not the controlling shareholder.</i> | 126; 257 |
| 8. | Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali <i>Disclosure of affiliate relationships between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal and/or controlling Shareholders</i> | Mencakup antara lain: <i>Includes:</i> a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;</i> b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</i> c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Majority and/or Controlling Shareholders;</i> d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan <i>Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and</i> e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. <i>Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and the Majority and/or Controlling Shareholders.</i> Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. <i>Note: if it has no such affiliate relationship, it should be disclosed.</i> | 315-316 |
| 9. | Komite Audit <i>Audit Committee</i> | Mencakup antara lain: <i>Includes:</i> a. Nama dan jabatan periode jabatan anggota komite audit; <i>Name and position of audit committee members;</i> b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; <i>Education history (Study Field and Educational Institution) and work experience (Position, Institution, and Period of Work) of audit committee members;</i> c. Independensi anggota komite audit; <i>Independence of audit committee members;</i> d. Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i> e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan <i>Description of the audit committee activities in the fiscal year; and</i> f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <i>The frequency of meetings and attendance of the audit committee.</i> | 352-362 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|---|--|-----------------|
| 10. | Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi <i>Nomination and/or Remuneration Committee Functions</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; <i>Name, position, and brief biography of nomination and/or remuneration committee members;</i></p> <p>b. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; <i>Independence of nomination and/or remuneration committee members;</i></p> <p>c. Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i></p> <p>d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; <i>Description of the nomination and/or remuneration committee activities;</i></p> <p>e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; <i>The frequency of meetings and the attendance of the nomination and/or remuneration committee;</i></p> <p>f. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan <i>Statement of the nomination and/or remuneration committee members guidelines; and</i></p> <p>g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. <i>Policy on the succession of the Board of Directors.</i></p> | 364-379 |
| 11. | Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan <i>Other Committees under the Board of Commissioners</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; <i>Name, position, and brief biography of committee members;</i></p> <p>b. Independensi komite lain; <i>Independence of committees;</i></p> <p>c. Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i></p> <p>d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan <i>Description of the implementation of the activities of committees; and</i></p> <p>e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <i>The frequency of meetings and the attendance levels of committees.</i></p> | 347-391 |
| 12. | Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan <i>Job Description and Function of Corporate Secretary</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; <i>Name, and history of the corporate secretary;</i></p> <p>b. Domisili; <i>Domicile;</i></p> <p>c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan <i>Description of duties and responsibilities; and</i></p> <p>d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. <i>Description on execution of the tasks of corporate secretary in the fiscal year.</i></p> | 395-401 |
| 13. | Uraian mengenai unit audit internal <i>Description of the internal audit unit</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Name of the head of the internal audit unit;</i></p> <p>a. Nama ketua unit audit internal; <i>Name of the head of the internal audit unit;</i></p> <p>b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; <i>Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit;</i></p> | 414-421 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|--|---|-----------------|
| | | <p>c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; <i>Certification in an internal audit profession;</i></p> <p>d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; <i>The position of the internal audit unit within the company structure;</i></p> <p>e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan <i>Description of the internal audit unit activities in the fiscal year; and</i></p> <p>f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. <i>Parties who appoint and dismiss the chair of the internal audit unit.</i></p> | |
| 14. | Akuntan Publik <i>Public Accountant</i> | <p>Informasi memuat antara lain: <i>Information includes:</i></p> <p>a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; <i>Name and year the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years;</i></p> <p>b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; <i>Name and year of the Public Accounting Firm who audited the annual financial statements for the last 5 years;</i></p> <p>c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan <i>The amount of fee for each type of services provided by the public accountant in the last fiscal year; and</i></p> <p>d. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <i>Other services provided by the accountant in addition to the annual financial statement audit services in the last fiscal year.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. <i>Note: if no other services are provided, to be disclosed.</i></p> | 422-427 |
| 15. | Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description of the company's risk management</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; <i>A description of the company's risk management system;</i></p> <p>b. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; <i>A description of the evaluation of the effectiveness of the risk management system;</i></p> <p>c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan <i>A description of the risks facing the company; and</i></p> <p>d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <i>Efforts to manage those risks.</i></p> | 435-459 |
| 16. | Uraian mengenai sistem pengendalian internal <i>Description of the internal control system</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; <i>Brief explanation of the internal control system, including financial and operational controls, among others;</i></p> <p>b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan <i>Explanation of conformity of internal control system with internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and</i></p> <p>c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. <i>An explanation of the results of reviews conducted on the implementation of the internal control system in the financial year.</i></p> | 428-434 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|--|---|-----------------|
| 17. | <p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial <i>Description of corporate social responsibility related to social responsibility governance</i></p> | <p>a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial <i>Information on commitment to social responsibility</i></p> <hr/> <p>b. Informasi mengenai metode dan lingkup due diligence terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan <i>Information regarding the method and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of the company's activities</i></p> <hr/> <p>c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan <i>Information about important stakeholders who are affected or have an effect on the impact of company's activities</i></p> <hr/> <p>d. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan <i>Information on important social, economic, and environmental issues related to the impact of company activities</i></p> <hr/> <p>e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban <i>Information about the scope of corporate social responsibility, whether it is an obligation or one that exceeds the obligation</i></p> <hr/> <p>f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholder engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder <i>Information about the company's strategy and work program in dealing with social, economic and environmental issues in stakeholder engagement efforts and increasing value for stakeholders and shareholders</i></p> <hr/> <p>g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan <i>Information about various programs that exceed the minimum responsibility of the company that is relevant to the business</i></p> <hr/> <p>h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial <i>Information on social responsibility financing and budgeting</i></p> | 510-515 |
| 18. | <p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject Hak Asasi Manusia <i>Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights</i></p> | <p>a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia <i>Information on commitments and social responsibility policies on the core subject of Human Rights</i></p> <hr/> <p>b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia <i>Information about company's formulation in scope of social responsibility on the core subject of Human Rights</i></p> <hr/> <p>c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia <i>Information on planning for corporate social responsibility in the field of Human Rights</i></p> <hr/> <p>d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia <i>Information about the implementation of CSR initiatives in the field of Human Rights</i></p> <hr/> <p>e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia <i>Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of Human Rights</i></p> | 518 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|--|--|-----------------|
| 19. | Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil <i>Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair operations</i> | <p>a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil <i>Information on commitments and social responsibility policies on the core subject of fair operations</i></p> <p>b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil <i>Information about company's formulation in scope of social responsibility on the core subject of fair operations</i></p> <p>c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil <i>Information on planning for corporate social responsibility in the field of fair operations</i></p> <p>d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil <i>Information about the implementation of CSR initiatives in the field of fair operations</i></p> <p>e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil <i>Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of fair operations</i></p> | 516-517 |
| 20. | Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. <i>Description of corporate social responsibility related to the environment</i> | <p>Penyampaian informasi tentang <i>delivery of information about</i></p> <p>a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan <i>Information on environmental commitments and policies</i></p> <p>b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan <i>Information about significant environmental impacts and risks related directly or indirectly to the company;</i></p> <p>c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; <i>Information on targets/activity plans in 2018 set by management;</i></p> <p>d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan <i>Information about the activities carried out and environmental programs related to the company's operational activities</i></p> <p>e. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup <i>Information about the implementation of CSR initiatives in the field of environment</i></p> <p>f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. <i>Information on the achievement of the quantitative impact of the activity; and, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and recyclable, the company's waste management system, complaints about environmental issues mechanism, consideration of environmental aspects in providing credit to customers, and so on.</i></p> <p>g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <i>Owned-environmental certification.</i></p> | 519-525 |
| 21 | Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. <i>A description of corporate social responsibility related to employment, health, and safety</i> | Mencakup antara lain informasi tentang <i>Includes information about:</i> | 526-535 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|--|-----------------|
| | | <p>a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan <i>Commitments and social responsibility policies on the core subject of employment</i></p> <hr/> <p>b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan <i>Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment</i></p> <hr/> <p>c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan <i>Information on targets/activity plans in 2018 set by management; and</i></p> <hr/> <p>d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut <i>Activities carried out and the quantitative impact on these activities</i></p> <hr/> <p>e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. <i>Information related to employment, health, and practices work safety, such as gender equality and job opportunities, work facilities and safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, employment issues complaint mechanisms, and others.</i></p> | |
| 22 | <p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen <i>Description of corporate social responsibility related to responsibility to the consumer</i></p> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <hr/> <p>a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan <i>Information on targets/activity plans in 2018 set by management; and</i></p> <hr/> <p>b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut <i>Activities carried out and the impact on these activities</i></p> <hr/> <p>c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <i>Related to product responsibility, such as health and consumer safety, product information, facilities, number and handling of consumer complaints, and others.</i></p> | 535-538 |
| 23 | <p>Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat <i>A description of corporate social responsibility related to social and community development</i></p> | <p>Mencakup antara lain informasi tentang: <i>Includes informations about:</i></p> <hr/> <p>a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan masyarakat <i>Commitments and social responsibility policies on the core subject of social and community development</i></p> <hr/> <p>b. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan <i>Information on social issues that are relevant to the company</i></p> <hr/> <p>c. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan <i>Information about social risks managed by the company</i></p> <hr/> <p>d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat <i>Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development</i></p> <hr/> <p>e. Target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen; <i>The target/activity plan in 2019 is set management;</i></p> <hr/> <p>f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan <i>Activities carried out and the impact on these activities; and</i></p> <hr/> <p>g. Biaya yang dikeluarkan <i>Cost incurred</i></p> | 541-551 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|---|---|-----------------|
| | | <p>h. Terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. <i>Related to social and community development, such as the use of local workers, empowerment of communities around the company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.</i></p> | |
| 24 | Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan <i>Important matters currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors serving during the annual reporting period</i> | <p>Mencakup antara lain: <i>Includes:</i></p> <p>a. Pokok perkara/gugatan; <i>Principal cases/lawsuits;</i></p> <p>b. Status penyelesaian perkara/gugatan; <i>Court settlement/lawsuit status;</i></p> <p>c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan <i>Risks facing the company and the value of claims; and</i></p> <p>d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <i>Administrative sanctions imposed on corporations, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that it is not subject to administrative sanctions).</i></p> <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. <i>Note: In the case that a company, subsidiary, member of the Board of Commissioners, and member of the Board of Directors is involved in no important cases, it is disclosed.</i></p> | 503-504 |
| 25 | Akses informasi dan data perusahaan <i>Access to company information and data</i> | <p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. <i>Description of availability of access to information and corporate data for the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, meetings with analysts, and so forth.</i></p> | 471 |
| 26 | Bahasan mengenai kode etik <i>Discussion of codes of conduct</i> | <p>Memuat uraian antara lain: <i>Description of:</i></p> <p>a. Pokok-pokok kode etik; <i>Key points of ethics;</i></p> <p>b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; <i>Disclosure that the code of ethics applies to all levels of the organization;</i></p> <p>c. Penyebarluasan kode etik; <i>Dissemination of codes of ethics;</i></p> <p>d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan <i>Sanctions for each type of offense set out in the code of ethics (normative); and</i></p> <p>e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <i>Number of code violations and sanctions given in the last fiscal year.</i></p> | 488-489 |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|---|--|---|--|
| | | <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p><i>Note: if there are no violations of the code of ethics in the last fiscal year, to be disclosed</i></p> | |
| 27 | <p>Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> <i>Disclosure of the whistleblowing system</i></p> | <p>Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: <i>Description of the whistleblowing system mechanism:</i></p> <p>a. Penyampaian laporan pelanggaran; <i>Submission of violation reports;</i></p> <p>b. Perlindungan bagi whistleblower; <i>Protection for whistleblowers;</i></p> <p>c. Penanganan pengaduan; <i>The handling of complaints;</i></p> <p>d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan <i>The party managing the complaint; and</i></p> <p>e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan <i>Number of incoming and processed complaints in the last fiscal year; and</i></p> <p>f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <i>Sanctions/follow-up on complaints that have been processed in the fiscal year.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p><i>Note: if there are no incoming complaints in the last fiscal year, to be disclosed</i></p> | 493-502 |
| 28. | <p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Policy on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i></p> | <p>Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. <i>The Company's policy description on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</i></p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. <i>Note: if there is no such policy, to disclose the reasons and considerations.</i></p> | 317-318 |
| VII Informasi Keuangan <i>Financial Information</i> | | | |
| 1 | <p>Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan <i>Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Responsibility of the Financial Statement</i></p> | <p>Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. <i>Compliance with relevant regulations on Liability to Financial Statements.</i></p> | <p>Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i></p> |
| 2. | <p>Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Opinion of independent auditors for financial statements</i></p> | | <p>Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i></p> |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|----|--|---|--|
| 3. | Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Description of Independent Auditor for Opinion</i> | <p>Deskripsi memuat tentang: <i>Description of:</i></p> <p>a. Nama & tanda tangan; <i>Name & signature;</i></p> <p>b. Tanggal Laporan Audit; dan <i>Date of Audit Report; and</i></p> <p>c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <i>KAP license number and license number of a Public Accountant.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 4. | Laporan keuangan yang lengkap <i>Complete financial statements</i> | <p>Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: <i>Complete financial statements:</i></p> <p>a. Laporan posisi keuangan; <i>Statements of financial position;</i></p> <p>b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; <i>Income and other comprehensive income statement;</i></p> <p>c. Laporan perubahan ekuitas; <i>Statement of Changes in Equity;</i></p> <p>d. Laporan arus kas; <i>Cash flow statement;</i></p> <p>e. Catatan atas laporan keuangan; <i>Notes to the financial statements;</i></p> <p>f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan <i>Comparative information on previous periods; and</i></p> <p>g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <i>The statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or prepares a restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies the items in its financial statements (if relevant).</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 5. | Perbandingan tingkat profitabilitas <i>Comparison of profitability levels</i> | <p>Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. <i>Comparison of performance / profit (loss) of the current year with the previous year.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 6. | Laporan Arus Kas <i>Cash flow statement</i> | <p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>Meet the following conditions:</i></p> <p>a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; <i>Grouping into three categories of activities: operations, investments, and financing;</i></p> <p>b. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; <i>The use of direct method to report cash flows from operating activities;</i></p> <p>c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan <i>Separation of the presentations between cash receipts and/or cash disbursements during the year for operating, investing and financing activities; and</i></p> <p>d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <i>Disclosure of non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|--|--|--|
| 7. | Ikhtisar Kebijakan Akuntansi <i>Summary of Accounting Policies</i> | <p>Meliputi sekurang-kurangnya: <i>Includes:</i></p> <p>a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; <i>Statement of compliance with SAK;</i></p> <p>b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; <i>Basis of measurement and preparation of financial statements;</i></p> <p>c. Pajak penghasilan; <i>Income tax;</i></p> <p>d. Imbalan kerja; dan <i>Employee benefits; and</i></p> <p>e. Instrumen Keuangan. <i>Financial Instruments.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 8. | Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosure of related party transactions</i> | <p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <i>Matters expressed:</i></p> <p>a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; <i>The names of related parties, as well as the nature and relationship of related parties;</i></p> <p>b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan <i>The value of the transaction and its percentage of total revenues and related expenses; and</i></p> <p>c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. <i>Total balance and percentage of total related assets or liabilities.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 9. | Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosures related to taxation</i> | <p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Matters to be Disclosed:</i></p> <p>a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; <i>Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;</i></p> <p>b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; <i>Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;</i></p> <p>c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; <i>The statement that the taxable income (LKP) resulted from the reconciliation is used as the basis for filling the Annual Income Tax Return of the Company in 2016;</i></p> <p>d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan <i>The details of the deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period and the total deferred tax expense (income) recognized in the statement of income if the amount is not reflected in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position; and</i></p> <p>e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <i>Disclosure of no or no tax disputes.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 10. | Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosures related to fixed assets</i> | <p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Matters to be Disclosed:</i></p> <p>a. Metode penyusutan yang digunakan; <i>Method of depreciation used;</i></p> <p>b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; <i>A description of the selected accounting policies between the revaluation model and the cost model;</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |

| No | Kriteria Criteria | Penjelasan Explanation | Halaman Page |
|-----|--|--|--|
| | | <p>c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan <i>Significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for revaluation model) or disclosure of fair value of property, plant and equipment (for cost model); and</i></p> <p>d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <i>Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.</i></p> | |
| 11. | Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* <i>Disclosures related to operating segments*</i> | <p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Matters to be Disclosed:</i></p> <p>a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; <i>General information covering factors used to identify reported segments;</i></p> <p>b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; <i>Information on reported segment of income, assets, and liabilities;</i></p> <p>c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan <i>Reconciliation of total segment revenues, reported segment loss, segment assets, segment liabilities, and other segment material items to related amounts in the entity; and</i></p> <p>d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <i>Disclosure at the entity level, which includes information about products and/or services, geographic areas and key customers.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 12. | Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan <i>Disclosures related to Financial Instruments</i> | <p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Matters to be Disclosed:</i></p> <p>a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; <i>Details of financial instruments held by their classification;</i></p> <p>b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; <i>Fair value and hierarchy for each group of financial instruments;</i></p> <p>c. Kebijakan manajemen risiko; <i>Risk management policy;</i></p> <p>d. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan <i>Explanation of risks related to financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and</i></p> <p>e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <i>The risk analysis associated with financial instruments is quantitative.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |
| 13. | Penerbitan laporan keuangan <i>Issuance of financial statements</i> | <p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <i>Matters expressed include:</i></p> <p>a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan <i>Date of financial statements authorized for publication; and</i></p> <p>b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. <i>The party responsible for authorizing the financial statements.</i></p> | Laporan Keuangan Hal. Laporan Auditor Independen <i>Financial Report on Independent Auditor Report Page</i> |



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2020

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT 2020



**PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2020
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

| | | |
|--|------|--|
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Board of Directors' Statement</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..... | 1-2 | <i>Consolidated Statement of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | 3-4 | <i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | 5 | <i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 6 | <i>Consolidated Statement of Cash Flows</i> |
| Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian..... | 7-91 | <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i> |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA) DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR
THE YEAR THEN ENDED
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA) AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

We, the undersigned:

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|----|-------------------------------|
| 1. Nama | : | William P. Sabandar | : | 1. | Name |
| Alamat kantor | : | Wisma Nusantara 21 st Floor | : | | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta, 10350 | : | | Domicile as stated in ID Card |
| Nomor Telepon | : | (021) 3906454 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| 2. Nama | : | Roy Rahendra | : | 2. | Name |
| Alamat kantor | : | Wisma Nusantara 21 st Floor | : | | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta, 10350 | : | | Domicile as stated in ID Card |
| Nomor Telepon | : | Villa Bintaro Regency, Jl. Riau III J5/7 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Pondok Aren, Tangerang Selatan | : | | Position |
| | : | (021) 3906454 | : | | |
| | : | Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi / | : | | |
| | : | Finance & Corporate Management Director | : | | |

Menyatakan bahwa

State that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan Entitas Anaknya; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) and its Subsidiaries; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries are complete and correct; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, nor do they omit material information and facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 4. We are responsible for the Company's and its Subsidiaries' internal control system. |

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 22 Maret 2021 / March 22 2021

Atas nama dan mewakili Direksi / On behalf and representing Directors

William P Sabandar
Direktur Utama / President Director

Roy Rahendra
Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi /
Finance & Corporate Management Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00245/2.1032/AU.1/06/1609-2/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan Keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00245/2.1032/AU.1/06/1609-2/1/III/2021

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00245/2.1032/AU.1/06/1609-2/1/III/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00245/2.1032/AU.1/06/1609-2/1/III/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Damestar Hutagalung

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609/Public Accountant Registration No. AP.1609

22 Maret 2021/March 22, 2021

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

| | <u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u> | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 1.224.727.034.659 | 4 | 976.544.700.866 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Piutang usaha | 146.126.578.850 | 5 | 78.192.571.791 | <i>Account receivables</i> |
| Piutang subsidi | 83.970.106.593 | 21 | 105.707.838.783 | <i>Subsidy receivables</i> |
| Pendapatan yang akan diterima | 9.732.523.684 | 6 | 9.585.176.485 | <i>Accrued revenues</i> |
| Persediaan | 13.363.672.104 | 7 | 3.621.218.127 | <i>Inventories</i> |
| Aset lancar lainnya | 12.672.228.179 | 8 | 11.611.152.540 | <i>Other current assets</i> |
| Total aset lancar | <u>1.490.592.144.069</u> | | <u>1.185.262.658.592</u> | <i>Total current assets</i> |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Uang muka kontraktor | 765.178.061.215 | 27b | 18.999.519.135 | <i>Contractors' advances</i> |
| Aset tetap - neto | 15.944.111.454.550 | 9 | 16.023.641.838.869 | <i>Fixed assets - net</i> |
| Aset hak guna - neto | 31.881.806.972 | 10 | - | <i>Right of use assets - net</i> |
| Aset takberwujud - neto | 27.715.335.676 | 11 | 28.740.832.279 | <i>Intangible assets - net</i> |
| Investasi pada ventura bersama | 33.848.557.951 | 12 | - | <i>Investment in joint venture</i> |
| Uang jaminan | 20.489.176.536 | 13 | 13.432.176.936 | <i>Guarantee deposits</i> |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan | 10.964.477.667 | 19c | 5.003.642.683 | <i>Estimated claim for tax refund</i> |
| Aset pajak tangguhan - neto | 72.373.961.598 | 19d | 78.326.320.877 | <i>Deferred tax assets - net</i> |
| Total aset tidak lancar | <u>16.906.562.832.165</u> | | <u>16.168.144.330.779</u> | <i>Total non-current assets</i> |
| TOTAL ASET | <u>18.397.154.976.234</u> | | <u>17.353.406.989.371</u> | TOTAL ASSETS |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

| | 31 Desember 2020/ December 31, 2020 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2019/ December 31, 2019 | |
|---|--|-------------------|--|--|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | 1.509.590.291 | 14 | 2.269.509.063 | Account payables |
| Utang kontraktor | 56.945.779.020 | 15 | 146.818.938.125 | Payables to contractors |
| Beban akrual | 169.256.069.191 | 16 | 369.967.252.006 | Accrued expenses |
| Pendapatan diterima dimuka | 137.007.791.343 | 17 | 127.615.283.528 | Unearned revenues |
| Utang pajak | 13.220.633.201 | 19a | 52.606.273.985 | Taxes payable |
| Utang retensi | 431.065.205.912 | 27b | - | Retention payables |
| Liabilitas sewa | 29.285.746.004 | 10 | - | Lease liability |
| Total liabilitas jangka pendek | 838.290.814.964 | | 699.277.256.707 | Total current liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Liabilitas sewa | 1.802.342.422 | 10 | - | Lease Liability |
| Pendapatan diterima dimuka | 138.085.345.669 | 17 | 134.734.477.949 | Unearned revenue |
| Uang jaminan pelanggan | 14.307.418.565 | 18 | 13.020.934.409 | Customer's security deposit |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 44.762.604.544 | 26 | 28.854.656.099 | Liability for employee benefits |
| Utang retensi | - | 27b | 480.756.470.176 | Retention payables |
| Total liabilitas jangka panjang | 198.957.711.200 | | 657.366.538.633 | Total non-current liabilities |
| TOTAL LIABILITAS | 1.037.248.526.164 | | 1.356.643.795.340 | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar - 40.757.353 saham | | | | Share capital - par value of Rp1,000,000 per share Authorized - 40,757,353 shares |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 16.339.669 saham (2019: 12.771.972 saham) | 16.339.169.000.000 | 20 | 12.771.972.000.000 | Issued and fully paid - 16,339,669 shares (2019: 12,771,972 shares) |
| Modal disetor lainnya | 1.433.474.235.723 | 20 | 3.567.201.942.700 | Other paid-up capital |
| Defisit | (413.853.503.152) | | (342.410.748.669) | Deficit |
| | 17.358.789.732.571 | | 15.996.763.194.031 | |
| Kepentingan Non-pengendali | 1.116.717.500 | | - | Non-controlling interest |
| Total Ekuitas | 17.359.906.450.071 | | 15.996.763.194.031 | Total Equity |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 18.397.154.976.234 | | 17.353.406.989.371 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2020
(Expressed in rupiah)**

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|---|
| | 2020 | Catatan/ Notes | 2019 | |
| PENDAPATAN | 1.085.497.999.575 | 21 | 933.229.529.446 | REVENUES |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | (976.692.302.552) | 22 | (760.414.806.769) | COST OF REVENUES |
| LABA KOTOR | 108.805.697.023 | | 172.814.722.677 | GROSS PROFIT |
| Beban umum dan administrasi | (189.753.827.326) | 23 | (221.749.924.235) | General and administrative expenses |
| RUGI USAHA | (80.948.130.303) | | (48.935.201.558) | OPERATING LOSS |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | OTHER INCOME (EXPENSE) |
| Penghasilan bunga | 52.243.049.316 | 24 | 38.510.886.239 | Interest income |
| Bagian kerugian ventura bersama | (6.951.442.049) | 12 | - | Share of loss of joint venture |
| Penghasilan (beban) keuangan - neto | (11.436.104.232) | 25 | 11.979.065.591 | Finance Income (expense) - net |
| Laba (rugi) selisih kurs - neto | (19.651.482.059) | | 48.213.315.714 | Gain (loss) on foreign exchange - net |
| Penghasilan lain-lain - neto | 21.527.188.235 | | 22.150.601.809 | Other income - net |
| Penghasilan lain-lain - neto | 35.731.209.211 | | 120.853.869.353 | Other income - net |
| LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (45.216.921.092) | | 71.918.667.795 | PROFIT (LOSS) BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX EXPENSE |
| Beban pajak final | (17.492.157.263) | 19e | (7.973.152.602) | Final tax expense |
| LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (62.709.078.355) | | 63.945.515.193 | PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN | (6.385.279.149) | | 79.434.275.721 | DEFERRED INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | (69.094.357.504) | | 143.379.790.914 | PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods |
| Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto dari pajak | (1.731.679.479) | | 3.323.864.531 | Remeasurement gain (loss) on employee benefits liability - net of tax |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (70.826.036.983) | | 146.703.655.445 | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the year ended December 31, 2020
(Expressed in rupiah)**

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, | | |
|--|---|-------------------|---|
| | 2020 | Catatan/ Notes | |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO |
| Pemilik Entitas Induk | (69.711.075.004) | | Owners of the parent |
| Kepentingan Non Pengendali | 616.717.500 | | Non-Controlling Interest |
| TOTAL | (69.094.357.504) | | TOTAL |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO |
| Pemilik Entitas Induk | (71.442.754.483) | | Owners of the parent |
| Kepentingan Non Pengendali | 616.717.500 | | Non-Controlling Interest |
| TOTAL | (70.826.036.983) | | TOTAL |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2020
(Expressed in rupiah)**

**Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
Equity Attributable to the Owners of the Parent**

| | Catatan/ Notes | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital | Modal disetor lainnya/ Other paid-up capital | Defisit/ Deficit | Total/ Total | Kepentingan Non-Pengendali/ Non-controlling Interests | Total ekuitas/ Total equity | |
|---|-------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 | | 6.165.807.000.000 | 6.606.169.772.791 | (489.114.404.114) | 12.282.862.368.677 | - | 12.282.862.368.677 | Balance as of December 31, 2018 |
| Modal disetor lainnya | 20 | - | 3.567.197.169.909 | - | 3.567.197.169.909 | - | 3.567.197.169.909 | Other paid-up capital |
| Reklasifikasi atas modal disetor lainnya | 20 | 6.606.165.000.000 | (6.606.165.000.000) | - | - | - | - | Reclassification of other paid-up capital |
| Laba tahun berjalan | | - | - | 143.379.790.914 | 143.379.790.914 | - | 143.379.790.914 | Income for the year |
| Penghasilan komprehensif lain - neto | | - | - | 3.323.864.531 | 3.323.864.531 | - | 3.323.864.531 | Other comprehensive income - net |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 | | 12.771.972.000.000 | 3.567.201.942.700 | (324.410.748.669) | 15.996.763.194.031 | - | 15.996.763.194.031 | Balance as of December 31, 2019 |
| Modal disetor lainnya | 20 | - | 1.433.469.293.023 | - | 1.433.469.293.023 | - | 1.433.469.293.023 | Other paid-up capital |
| Reklasifikasi atas modal disetor lainnya | 20 | 3.567.197.000.000 | (3.567.197.000.000) | - | - | - | - | Reclassification of other paid-up capital |
| Tambahan setoran modal dari entitas Non-pengendali kepada entitas anak | | - | - | - | - | 500.000.000 | 500.000.000 | Capital Contribution from Non-Controlling Interest in subsidiaries |
| Rugi tahun berjalan | | - | - | (69.711.075.004) | (69.711.075.004) | 616.717.500 | (69.094.357.504) | Loss for the year |
| Rugi komprehensif lain - neto | | - | - | (1.731.679.479) | (1.731.679.479) | - | (1.731.679.479) | Other comprehensive loss - net |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 | | 16.339.169.000.000 | 1.433.474.235.723 | (413.853.503.152) | 17.358.789.732.571 | 1.116.717.500 | 17.359.906.450.071 | Balance as of December 31, 2020 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2020
(Expressed in rupiah)**

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31 | | |
|---|--|-------------------|--|
| | 2020 | Catatan/ Notes | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pelanggan | 419.384.326.045 | | Receipts from customers |
| Penerimaan dari subsidi | 641.761.624.523 | | Receipts from subsidy |
| Penerimaan penghasilan bunga | 39.338.120.649 | | Receipts from interest income |
| Pembayaran kepada pemasok | (564.156.282.488) | | Payment to vendors |
| Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan | (208.705.686.640) | | Payments to commissioners, directors and employees |
| Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 327.622.162.089 | | Net cash received from operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Investasi entitas anak | (40.800.000.000) | | - |
| Penambahan aset tetap | (37.351.403.272) | | (172.436.098.293) |
| Penambahan aset tak berwujud | (1.788.425.024) | | (17.725.602.885) |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (79.939.828.296) | | Net cash used in investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY |
| Penerbitan saham di anak perusahaan oleh kepentingan non-pengendali | 500.000.000 | | - |
| Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | 500.000.000 | | Net cash received from financing activity |
| KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS | 248.182.333.793 | | NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 976.544.700.866 | 4 | 604.890.512.336 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 1.224.727.034.659 | 4 | 976.544.700.866 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 ("Perda No. 3"). Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Daerah No. 9 ("Perda No. 9"), menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya dan status Perusahaan diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 16 Desember 2020 sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan. Perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No 46 tanggal 16 Desember 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0214930.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 dan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0421641 tanggal 21 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup:

- a) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
- b) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana.
- c) Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) is a Regional-Owned Company established in the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 140 dated June 17, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn. and Government Regulation No. 3 Year 2008 dated June 17, 2008 ("Perda No. 3"). Its establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008 dated June 27, 2008. On December 28, 2018, published Government Regulation No. 9 ("Perda No. 9") replaced Government Regulation beforehand and the status of the Company was changed to "Perseroan Daerah (Perseroda)".

The Company's Articles of Association ("AoA") has been amended several times, the latest of which was made on December 16, 2020, in relation to equity changes. The latest amendment was under Notarial Deed No. 46 dated December 16, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. and had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0214930.AH.01.11. Year 2020 dated December 21, 2020, and its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.01.03-0421641 dated December 21, 2020.

Based on Government Regulation of DKI Jakarta No. 9 Year 2018, the Company's scope of activities covers the following:

- a) *Infrastructure management for public train in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operation, infrastructure maintenance, and infrastructure management.*
- b) *Facilities management for public train in an urban area that includes facility development, facilities operation, maintenance and management of the facilities.*
- c) *Development and management of property or business on the station area and areas around the station, also Depo and areas around it.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 13 April 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perusahaan diberi penugasan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 140 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perusahaan ditugaskan sebagai operator utama pengelola kawasan Transit Oriented Development Koridor (Utara - Selatan) Fase I Mass Rapid Transit Jakarta.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana angkutan umum masal kereta api (Mass Rapid Transit) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian ini meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun dihitung dan dapat diperpanjang untuk setiap kali untuk jangka waktu maksimal 20 tahun berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Pada tanggal 9 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu Dan Lintas Raya Terpadu.

Perusahaan berlokasi di Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha mempunyai 634 karyawan tetap (2019: 527 karyawan tetap) (tidak diaudit).

Perusahaan dan entitas-entitas Anak secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha".

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

On April 13, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 53 Year 2017. Based on this regulation, the Company is appointed to implement infrastructure and rolling stock of Mass Rapid Transit.

On October 6, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 140 Year 2017. Based on this regulation, the Company is assigned to be the main operator of the Transit Oriented Development Corridor (North - South) Phase I Mass Rapid Transit Jakarta.

On October 13, 2017, the Company signed infrastructure operation agreement for mass railway public transport (Mass Rapid Transit) with Provincial Government of DKI Jakarta. This agreement covers development, operation, maintenance, and business. This agreement is valid for 30 years starts from operating license determination date of public railway infrastructure and may be renewed for each time for a maximum period of 20 years based on the agreement in accordance with the provisions of the law.

On March 29, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 34 Year 2019 regarding Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Tariffs.

On September 9, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 95 Year 2019 regarding Minimum Service Standards for public transportation with Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

On September 30, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 107 Year 2019 regarding Subsidy for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

The Company is located in Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. The Company started its commercial operations on April 1, 2019.

As of December 31, 2020, the Group had a total of 634 permanent employees (2019: 527 permanent employees) (unaudited).

The Company and its Subsidiaries, collectively referred to as the "Group".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, rincian Entitas Anak dan ventura bersama Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

ITJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No.18 tanggal 6 Oktober 2020, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0051263.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, penyertaan modal Perusahaan di ITJ sebesar Rp4.500.000.000 dengan kepemilikan saham sebesar 90%. Perusahaan memiliki pengendalian atas ITJ. ITJ bergerak dalam bidang industri real estate dan jasa konsultasi manajemen.

PT JakLingko Indonesia (JLI)

JLI didirikan berdasarkan Akta Notaris No.78 tanggal 30 Desember 2020, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0070252.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Perusahaan memiliki 20% (dua puluh persen) saham atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000. JLI bergerak dalam bidang industri sistem pembayaran elektronik.

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

Perusahaan Patungan MITJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No.11 tanggal 11 Februari 2020, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0008856.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, penyertaan modal Perusahaan di MITJ sebesar Rp40.800.000.000 dengan kepemilikan saham sebesar 51%. MITJ dikelola dengan kendali bersama oleh para pemegang saham. MITJ bergerak dalam bidang industri konsultasi transportasi dan manajemen lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Structure of Subsidiaries

As of December 31, 2020, the details of the Company's subsidiaries and joint venture are as follows:

PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

ITJ was established under a Notarial Deed No. 18 dated October 6, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0051263.AH.01.01 Year 2020 dated October 6, 2020

As of December 31, 2020, the Company's equity in ITJ is amounted to Rp4,500,000,000 with a share ownership of 90%. The Company has control on ITJ. ITJ activities are in real estate industry and management consultant service.

PT JakLingko Indonesia (JLI)

JLI was established under a Notarial Deed No. 78 dated December 30, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0070252.AH.01.01 Year 2020 dated December 30, 2020

The Company owns 20% (twenty percent) share or 1,000 shares, valued at Rp1,000,000,000. JLI activities are in electronic payment industry.

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

Joint Venture MITJ was established under a Notarial Deed No. 11 dated 11 February, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0008856.AH.01.01 Year 2020 dated February 12, 2020

As of December 31, 2020, the Company's equity in MITJ is amounted to Rp40,800,000,000 with a share ownership of 51%. MITJ is managed under joint control by the shareholders. MITJ activities are in transportation and management consulting.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Muhammad Syaugi
Rukijo
Adnan Pandu Praja
Mukhtasor
Zulfikri

Board of Commissioners
President Commissioners
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direktur

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Roy Rahendra

Directors
President Director
Directors

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 23 tanggal 13 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Based on the Notarial Deed No. 23 dated December 13, 2019 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 was as follows:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Muhammad Syaugi
Rukijo
Adnan Pandu Praja
Mukhtasor
Zulfikri

Board of Commissioners
President Commissioners
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direktur

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Tuhayat
Ghamal Peris

Directors
President Director
Directors

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.844.445.140 (2019: Rp16.630.160.815).

The compensation and other benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2020 amounted to Rp16,844,445,140 (2019: Rp16,630,160,815).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of presentation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of presentation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the relevant notes herein.

The consolidated statement of cash flows presents the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Group.

b. Changes in accounting principles

On 1 January 2020, the Group adopted new PSAK and ISAK that are effective for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

Adoption of PSAK 71 "Financial Instrument"

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information that are more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

The adoption of PSAK 71 has no impact on the beginning balance of the unappropriated retained earnings in the Group's consolidated financial statements

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa"

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

PSAK 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Kelompok Usaha dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa periode sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Kelompok Usaha jika suku Bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Dampak penerapan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

| | 1 Januari 2020/ January 1, 2020 |
|----------------------------------|--|
| <u>Aset</u> | |
| Hak untuk menggunakan Aset | 39.210.039.673 |
| <u>Liabilitas</u> | |
| Liabilitas sewa - jangka pendek | 12.020.439.298 |
| Liabilitas sewa - jangka panjang | 27.189.600.375 |

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in accounting principles (continued)

Adoption of PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers"

The Group has adopted PSAK 72 "Revenue from contracts with customers" effectively for the financial year beginning 1 January 2020. The adoption of PSAK 72 do not have significant impact to the Group's consolidated financial statements.

Adoption of PSAK 73 "Leases"

The Group has adopted PSAK 73 "Leases" effectively for the financial year beginning 1 January 2020, but the Group did not restate comparatives for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

PSAK 73 primarily affects the Group's accounting treatment for lease of office space, buildings and motor vehicle, which was previously classified as operating lease based on PSAK 30. The application of this accounting standard resulted to an increase of the Group's assets and liabilities and on impact the timing of expense recognition in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of lease

Right-of-use assets and lease liabilities were measured at the discounted present value using implicit interest rate (if the interest rate could be determined) or using the Group's incremental borrowing rate if the implicit interest rate could not be determined.

The impact of adoption PSAK 73 are as follows:

| | <u>Assets</u> |
|--|--|
| | <i>Right-of-use assets</i> |
| | <u>Liabilities</u> |
| | <i>Lease liabilities - current</i> |
| | <i>Lease liabilities - non-current</i> |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Kelompok Usaha menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar: - menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa; - sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek; - menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa; - untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas asset pendasar; - mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

- a) Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b) Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1e, dimana Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas tersebut.

Laporan keuangan entitas anak disiapkan untuk tahun pelaporan yang sama dengan Perusahaan dan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

In applying PSAK 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard: - the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics; - operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 are treated as short-term lease; - the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease; - not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets; - rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.

The adoption of the amendment below has no significant impact on the Group's consolidated financial statements:

- a) *Amendments to SFAS No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures: Longterm Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020;*
- b) *Amendments to SFAS No. 1 and SFAS No. 25: Definition of Material, effective January 1, 2020*

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Group as disclosed in Note 1e, in which the Company has control over those entities.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting year as that of the Company and using consistent accounting policies

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Secara spesifik, Kelompok Usaha mengendalikan investee jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee;
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain
- c. Hak suara dan hak suara potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas anak perusahaan. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation

Specifically, the Group controls an investee if and only if, the Group has:

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee;*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee*
- b. *Rights arising from other contractual arrangement*
- c. *The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non pengendali, walaupun hasil di kepentingan non pengendali (KNP) mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
- b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengalihkan secara langsung ke defisit atau saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as one business entity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, then:

- a. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- b. *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- c. *derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;*
- d. *recognizes the fair value of the consideration received;*
- e. *recognizes the fair value of any investment retained;*
- f. *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and;*
- g. *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to the statement of profit or loss and other comprehensive income or deficit or retained earnings, as appropriate.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

e. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets are classified as non-current assets.

e. Investment in Associates and Joint Ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**e. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama (lanjutan)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil usaha entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap perubahan OCI dari *investee* tersebut disajikan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif Kelompok Usaha lainnya ("OCI"). Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keseluruhan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada laba rugi di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan NCI pada entitas-entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama.

Laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menentukan apakah ada bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama terganggu. Jika ada bukti tersebut, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang dapat dipulihkan dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan nilai tercatatnya, dan kemudian mengakui kerugian tersebut dalam 'Bagian laba dari perusahaan asosiasi dan ventura bersama' dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Investment in Associates and Joint
Ventures (continued)**

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Group's share of the results of operations of the associate or joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the Group's Other comprehensive income ("OCI"). In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate or joint venture, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate or joint venture are eliminated to the extent of the interest in the associate or joint venture.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate and a joint venture is shown on the face of the profit or loss outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate or joint venture.

The financial statements of the associate or joint venture are prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investment in its associate or joint venture. At each reporting date, the Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate or joint venture is impaired. If there is such evidence, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value, and then recognizes the loss within 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Setelah kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi atau pengendalian bersama atas ventura bersama tersebut, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui investasi yang ditahan pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama dengan kehilangan pengaruh signifikan atau pengendalian bersama dan nilai wajar investasi yang ditahan dan hasil pelepasan diakui dalam laba rugi.

g. Mata uang asing

Mata uang fungsional yang digunakan Kelompok Usaha adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| 1 Dolar Amerika Serikat | 14.105 | 13.901 | 1 United States dollar |
| 100 Yen Jepang | 13.647 | 12.797 | 100 Japanese yen |

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investment in Associates and Joint Ventures

Upon loss of significant influence over the associate or joint control over the joint venture, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate or joint venture upon loss of significant influence or joint control and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

g. Foreign currencies

The functional currency of the Group is rupiah, which is also as the presentation currency used in the consolidated financial statements. Transactions in currencies other than rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date for the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current year operations.

The exchange rates used were as follows:

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan atas setiap aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan sesuai peruntukannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

| | Tahun/Year | |
|----------------------------------|------------|--|
| Sarana | 14-30 | Rolling stock |
| Prasarana | | Infrastructures |
| Fasilitas pengoperasian | 5-30 | Operating facilities |
| Jalur dan bangunan | 5-50 | Building and track |
| Fasilitas | | Facilities |
| Peralatan pemeliharaan | 10-30 | Maintenance equipment |
| Peralatan mekanikal dan elektrik | 10-30 | Mechanical and electrical equipment |
| Kendaraan | 4 | Vehicles |
| Peralatan dan perabotan kantor | 4-8 | Furniture, fixtures and office equipment |

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as they are incurred.

Depreciation of each item of fixed assets starts when it is available for its intended use and is calculated on the straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin dan peralatan dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan tersebut selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam tahun tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery and equipment and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the related construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets become ready for their intended use.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the year, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset takberwujud

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 72 sejak tanggal 1 Januari 2020.

Kelompok Usaha menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Kelompok Usaha telah menyimpulkan bahwa ini bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Intangible Assets

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.

k. Revenue and expense recognition

The Group has applied PSAK 72 since January 1, 2020.

The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangement.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**k. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

- Pendapatan tiket diakui pada saat jasa angkutan telah selesai diberikan.
- Pendapatan non-tiket diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa kontrak ditambah dengan bagi hasil, apabila ada.

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

l. Imbalan kerja

Kelompok Usaha mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Kelompok Usaha juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Revenue and expense recognition
(continued)**

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized:

- Farebox revenue is recognized when services are rendered.
- Non-farebox revenue are recognized as revenue on straight-line basis over the contract period plus revenue and/or profit sharing, if any.

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of Jakarta MRT's project which are capitalized as construction in progress.

l. Employee benefits

The Group have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Imbalan kerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada liabilitas obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laba rugi:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

m. Perpajakan

Pajak Penghasilan Lancar

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Employee benefits (continued)

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

m. Taxation

Current Income Tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilised, except:

- i. when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan transaksi dasarnya baik di penghasilan komprehensif lain maupun langsung di ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- „ PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- „ Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

n. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 28.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- „ *When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- „ *When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

n. Transaction with related parties

The Group have transactions with related parties as defined in PSAK 7: Related party disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Transactions and balances with related parties are disclosed in Note 28.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**n. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi
(lanjutan)**

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

o. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Kelompok Usaha menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

p. Instrumen keuangan

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Transaction with related parties (continued)

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

o. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is calculated using weighted-average method.

The Group provides allowance for net realisable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realisable values of the inventories.

p. Financial instruments

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each reporting date.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang subsidi, piutang lain-lain, pendapatan yang akan diterima dan uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2020.

Kelompok Usaha telah menentukan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau derivatif yang ditetapkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Initial recognition (continued)

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, account receivables, subsidy receivables, other receivables, accrued revenues and guarantee deposits as of December 31, 2020.

The Group has determined that all of these financial assets are categorized as loans and receivables. As of December 31, 2020, the Group did not have any financial assets at fair value through profit or loss, available-for-sale financial assets and held-to-maturity investments or derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk utang usaha, utang kontraktor, beban akrual, utang retensi dan uang jaminan pelanggan.

Kelompok Usaha telah menentukan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan derivatif yang ditempatkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities as of December 31, 2020 included account payables, payables to contractors, accrued expenses, retention payable and customer's security deposit.

The Group has determined that all off these financial liabilities are categorized as loans and borrowings. As of December 31, 2020, the Group have not financial liabilities at fair value through profit or loss. The Group did not have any financial liabilities derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Kelompok Usaha menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit *counterparty* antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Kelompok Usaha terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

5. Penurunan nilai dari aset keuangan

Untuk piutang usaha, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

6. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Kelompok Usaha telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through" dan baik (a) Kelompok Usaha telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

5. Impairment of financial assets

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

6. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) The Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) The Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada akhir tahun, Kelompok Usaha melakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan pada tahun dimana pemulihan tersebut terjadi.

r. Segmen operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

q. Impairment of non-financial assets

At the end of the year, the Group undertakes a review to determine whether there is any indication of asset impairment.

Fixed asset and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount which is the higher of the asset's net selling price or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are compared at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the year when the reversal occurs.

r. Operating segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments and making strategic decisions, has been identified as the Board of Directors.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

s. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Provision

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

t. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments were made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan

- Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

b. Estimasi dan asumsi

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas terdiskonto.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments

- Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Estimates and assumptions

- Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

- Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Kelompok Usaha akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- *Estimating useful lives of fixed assets (continued)*

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial yearend and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

The management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 50 years, which are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business.

- *Impairment of non-financial assets*

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating company of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Estimates and assumptions (continued)

- Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

Kelompok Usaha melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Kelompok Usaha atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Kelompok Usaha dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

- *Impairment of non-financial assets (continued)*

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

- *Realization of deferred tax assets*

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi beban imbalan kerja karyawan

Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp44.762.604.544 dan Rp28.854.656.099 (Catatan 26).

Kelompok Usaha percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Kelompok Usaha atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- Estimation of employee benefits

Employee benefits are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Group are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp44,762,604,544 and Rp28,854,656,099, respectively (Note 26).

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Groups's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kas | 1.136.102.720 | 2.705.635.609 |
| Bank | | |
| Pihak berelasi - rupiah: | | |
| PT Bank DKI | 96.250.428.648 | 294.823.431.814 |
| Pihak ketiga: | | |
| Rupiah | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 80.171.780.309 | 21.850.933.390 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 5.705.944.728 | 1.126.648.542 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.568.401.025 | 459.609.157 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.286.843.660 | 2.572.080.943 |
| Dolar Amerika Serikat | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$7.802 pada tahun 2020 dan US\$15.052 pada tahun 2019) | 112.385.396 | 209.243.412 |
| Sub-total | 88.845.355.118 | 26.218.515.444 |
| Total bank | 185.095.783.766 | 321.041.947.258 |
| Total kas dan bank | 186.231.886.486 | 323.747.582.867 |
| Deposito berjangka - rupiah | | |
| Pihak berelasi: | | |
| PT Bank DKI | 823.093.550.032 | 384.000.000.000 |
| Pihak ketiga: | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 174.053.338.327 | 174.029.494.063 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 33.397.294.767 | 57.140.669.834 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.950.965.047 | 7.626.954.102 |
| PT Bank Central Asia Tbk | - | 30.000.000.000 |
| Sub-total | 215.401.598.141 | 268.797.117.999 |
| Total deposito berjangka | 1.038.495.148.173 | 652.797.117.999 |
| Total kas dan setara kas | 1.224.727.034.659 | 976.544.700.866 |

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka berkisar antara 2,25% sampai dengan 6,50% (2019: antara 2,50% sampai dengan 8,00%)

Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

| |
|--|
| Cash on hand |
| Cash in banks |
| Related party - rupiah: |
| PT Bank DKI |
| Third parties: |
| Rupiah |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| United States Dollar |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$7,802 in 2020 and US\$15,052 in 2019) |
| Sub-total |
| Total cash in banks |
| Cash on hand and in banks |
| Time deposits - rupiah |
| Related party: |
| PT Bank DKI |
| Third parties: |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk |
| Sub-total |
| Total time deposits |
| Total cash and cash equivalents |

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. Time deposits earned interest at annual rates ranging from 2.25% to 6.50% (2019: from 2.50% to 8.00%).

The interest rates of the related-party bank are comparable to those offered by third-party banks.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Pihak berelasi: | | |
| PT Bank DKI | 1.565.000 | 3.775.000 |
| Pihak ketiga: | | |
| PT Avabanindo Perkasa | 104.705.380.414 | 33.857.861.741 |
| PT Visionet Internasional | 16.500.000.000 | 8.250.000.000 |
| PT CIMB Niaga | 9.108.000.000 | - |
| PT Grab Teknologi Indonesia | 9.075.000.000 | - |
| PT Inti Menara Jaya | 2.200.000.000 | 2.750.000.000 |
| PT Espay Debit Indonesia Koe | - | 13.750.000.000 |
| PT Fintek Karya Nusantara | - | 8.250.000.000 |
| PT Dompot Anak Bangsa | - | 8.250.000.000 |
| PT Quantumconvex International | - | 1.800.000.000 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000.000) | 4.970.093.000 | 1.280.935.050 |
| Sub-total | 146.560.038.414 | 78.188.796.791 |
| Cadangan penurunan nilai | (433.459.564) | - |
| Total | 146.126.578.850 | 78.192.571.791 |

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih.

6. PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Pendapatan bagi hasil dari kerjasama retail | 1.478.130.744 | 4.921.580.861 |
| Pendapatan jasa konsultan Bunga | 7.349.540.000 | - |
| | 609.813.358 | 1.464.600.531 |
| Pendapatan bagi hasil dari kerjasama layanan periklanan | - | 3.198.995.093 |
| Lainnya | 295.039.582 | - |
| Total | 9.732.523.684 | 9.585.176.485 |

7. PERSEDIAAN

Persediaan sebesar Rp13.363.672.104 merupakan suku cadang sarana yang digunakan untuk perawatan rutin/terjadwal kereta yang dilakukan di Depo Lebak Bulus.

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

5. TRADE RECEIVABLES

Trade receivables consists of:

| | 31 Desember/December 31, |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 2020 |
| Related party: PT Bank DKI | 3.775.000 |
| Third parties: | |
| PT Avabanindo Perkasa | 33.857.861.741 |
| PT Visionet Internasional | 8.250.000.000 |
| PT CIMB Niaga | - |
| PT Grab Teknologi Indonesia | - |
| PT Inti Menara Jaya | 2.750.000.000 |
| PT Espay Debit Indonesia Koe | 13.750.000.000 |
| PT Fintek Karya Nusantara | 8.250.000.000 |
| PT Dompot Anak Bangsa | 8.250.000.000 |
| PT Quantumconvex International | 1.800.000.000 |
| Others (each below Rp500,000,000) | 1.280.935.050 |
| Sub-total | 78.188.796.791 |
| Allowance for impairment | - |
| Total | 78.192.571.791 |

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover possible lossess on uncollectible receivable.

6. ACCRUED REVENUES

Accrued revenues consists of:

| | |
|---|----------------------|
| Revenue sharing from from retail cooperation | 4.921.580.861 |
| Revenue from consultant service Interest | - |
| Revenue sharing from advertising cooperation | 1.464.600.531 |
| Others | 3.198.995.093 |
| Total | 9.585.176.485 |

7. INVENTORIES

Inventories of Rp13,363,672,104 represents rolling stock spare parts used for routine/scheduled maintenance of rolling stock which are undertaken in the Company's Lebak Bulus Depots.

Based on the Company's management's review, there are no events or changes in circumstances which indicate that there is impairment in value of the inventories as of December 31, 2020, thus, no allowance for impairment in value of inventories is provided.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Biaya dibayar dimuka - neto | 7.625.764.346 | 9.496.465.097 |
| Kartu elektronik | 2.717.539.403 | 1.146.376.356 |
| Piutang lain-lain | 2.328.924.430 | 968.311.087 |
| Neto | 12.672.228.179 | 11.611.152.540 |

Akun biaya dibayar dimuka - neto merupakan biaya sewa kantor dan asuransi sarana dan prasarana yang dibayar dimuka.

8. OTHER CURRENT ASSETS

This account consists of:

| | 2020 | 2019 | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Biaya dibayar dimuka - neto | 7.625.764.346 | 9.496.465.097 | Prepayments – net |
| Kartu elektronik | 2.717.539.403 | 1.146.376.356 | Electronic card |
| Piutang lain-lain | 2.328.924.430 | 968.311.087 | Other receivables |
| Neto | 12.672.228.179 | 11.611.152.540 | Net |

Prepayments account represent of office rent and rolling stock and infrastructures insurance expense paid in advance.

9. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2020/December 31, 2020 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance |
| Harga perolehan | | | | |
| Sarana | 1.596.355.715.700 | 1.016.400.000 | - | 1.597.372.115.700 |
| Prasarana | | | | |
| Fasilitas pengoperasian | 2.286.922.615.671 | 2.828.490.000 | - | 2.289.751.105.671 |
| Jalur dan bangunan | 10.700.948.863.521 | - | - | 10.700.948.863.521 |
| Fasilitas | | | | |
| Peralatan pemeliharaan | 407.008.725.109 | 14.402.013.578 | - | 421.410.738.687 |
| Mekanikal dan elektrikal | 1.121.865.965.832 | 3.641.412.500 | - | 1.125.507.378.332 |
| Peralatan dan perabotan kantor | 25.876.843.869 | 27.030.840.352 | - | 52.907.684.221 |
| Kendaraan | 17.444.625.691 | - | - | 17.444.625.691 |
| Sub-total | 16.156.423.355.393 | 48.919.156.430 | - | 16.205.342.511.823 |
| Aset dalam penyelesaian | 271.096.204.323 | 402.068.999.676 | - | 673.165.203.999 |
| Total harga perolehan | 16.427.519.559.716 | 450.988.156.106 | - | 16.878.507.715.822 |
| Akumulasi penyusutan | | | | |
| Sarana | 41.451.192.707 | 55.288.020.289 | - | 96.739.212.996 |
| Prasarana | | | | |
| Fasilitas pengoperasian | 101.618.465.169 | 136.151.267.910 | - | 237.789.733.079 |
| Jalur dan bangunan | 175.596.209.593 | 234.128.279.448 | - | 409.724.489.041 |
| Fasilitas | | | | |
| Peralatan pemeliharaan | 21.754.665.395 | 31.439.508.376 | - | 53.194.173.771 |
| Mekanikal dan elektrikal | 45.293.578.835 | 60.468.882.479 | - | 105.762.461.314 |
| Peralatan dan perabotan kantor | 12.240.043.916 | 9.020.927.582 | - | 21.260.971.498 |
| Kendaraan | 5.923.565.232 | 4.021.654.341 | - | 9.945.219.573 |
| Total akumulasi penyusutan | 403.877.720.847 | 530.518.540.425 | - | 934.396.261.272 |
| Nilai tercatat | 16.023.641.838.869 | | | 15.944.111.454.550 |

The details of fixed assets are as follows:

Acquisition cost
Rolling stock
Infrastructures
Operating facilities
Building and track
Facilities
Equipment maintenance
Mechanical and electrical
Furniture, fixtures and
office equipment
Vehicles
Sub-total
Construction in progress
Total acquisition cost

Accumulated depreciation
Rolling stock
Infrastructures
Operating facilities
Building and Track
Facilities
Maintenance equipment
Mechanical and electrical
Furniture, fixtures and
office equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation
Carrying amount

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| | 31 Desember 2019/December 31, 2019 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance |
| Harga perolehan | | | | |
| Sarana | - | - | 1.596.355.715.700 | 1.596.355.715.700 |
| Prasarana | - | - | 2.286.922.615.671 | 2.286.922.615.671 |
| Fasilitas pengoperasian | - | - | 10.700.948.863.521 | 10.700.948.863.521 |
| Jalur dan bangunan | - | - | - | - |
| Fasilitas | - | 2.152.711.250 | 404.856.013.859 | 407.008.725.109 |
| Peralatan pemeliharaan | - | - | 1.121.865.965.832 | 1.121.865.965.832 |
| Mekanikal dan elektrikal | - | - | - | - |
| Peralatan dan perabotan kantor | 13.755.220.665 | 12.121.623.204 | - | 25.876.843.869 |
| Kendaraan | 4.346.800.000 | - | 13.097.825.691 | 17.444.625.691 |
| Sub-total | 18.102.020.665 | 14.274.334.454 | 16.124.047.000.274 | 16.156.423.355.393 |
| Aset dalam penyelesaian | 12.701.984.089.863 | 3.693.159.114.734 | (16.124.047.000.274) | 271.096.204.323 |
| Total harga perolehan | 12.720.086.110.528 | 3.707.433.449.188 | - | 16.427.519.559.716 |
| Akumulasi penyusutan | | | | |
| Sarana | - | 41.451.192.707 | - | 41.451.192.707 |
| Prasarana | - | 101.618.465.169 | - | 101.618.465.169 |
| Fasilitas pengoperasian | - | 175.596.209.593 | - | 175.596.209.593 |
| Jalur dan bangunan | - | - | - | - |
| Fasilitas | - | 21.754.665.395 | - | 21.754.665.395 |
| Peralatan pemeliharaan | - | 45.293.578.835 | - | 45.293.578.835 |
| Mekanikal dan elektrikal | - | - | - | - |
| Peralatan dan perabotan kantor | 8.806.187.961 | 3.433.855.955 | - | 12.240.043.916 |
| Kendaraan | 2.688.822.916 | 3.234.742.316 | - | 5.923.565.232 |
| Total akumulasi penyusutan | 11.495.010.877 | 392.382.709.970 | - | 403.877.720.847 |
| Nilai tercatat | 12.708.591.099.651 | | | 16.023.641.838.869 |

Biaya penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | | |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| Beban pokok penjualan | 520.750.414.913 | 388.169.954.015 | Costs of revenues |
| Beban umum dan administrasi | 9.768.125.512 | 4.212.755.955 | General and administrative expenses |
| Total | 530.518.540.425 | 392.382.709.970 | Total |

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian fisik atau kerusakan termasuk risiko kebakaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp15.998.061.344.905 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap Kelompok Usaha dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

9. FIXED ASSETS - NET (continued)

The details of fixed assets are as follows: (continued)

| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Acquisition cost | | | | | |
| Rolling stock | - | - | 1.596.355.715.700 | 1.596.355.715.700 | Rolling stock |
| Infrastructures | - | - | 2.286.922.615.671 | 2.286.922.615.671 | Infrastructures |
| Operating facilities | - | - | 10.700.948.863.521 | 10.700.948.863.521 | Operating facilities |
| Building and track | - | - | - | - | Building and track |
| Facilities | - | 2.152.711.250 | 404.856.013.859 | 407.008.725.109 | Facilities |
| Equipment maintenance | - | - | 1.121.865.965.832 | 1.121.865.965.832 | Equipment maintenance |
| Mechanical and electrical | - | - | - | - | Mechanical and electrical |
| Furniture, fixtures and office equipment | 13.755.220.665 | 12.121.623.204 | - | 25.876.843.869 | Furniture, fixtures and office equipment |
| Vehicles | 4.346.800.000 | - | 13.097.825.691 | 17.444.625.691 | Vehicles |
| Sub-total | 18.102.020.665 | 14.274.334.454 | 16.124.047.000.274 | 16.156.423.355.393 | Sub-total |
| Construction in progress | 12.701.984.089.863 | 3.693.159.114.734 | (16.124.047.000.274) | 271.096.204.323 | Construction in progress |
| Total acquisition cost | 12.720.086.110.528 | 3.707.433.449.188 | - | 16.427.519.559.716 | Total acquisition cost |
| Accumulated depreciation | | | | | |
| Rolling stock | - | 41.451.192.707 | - | 41.451.192.707 | Rolling stock |
| Infrastructures | - | 101.618.465.169 | - | 101.618.465.169 | Infrastructures |
| Operating facilities | - | 175.596.209.593 | - | 175.596.209.593 | Operating facilities |
| Building and Track | - | - | - | - | Building and Track |
| Facilities | - | 21.754.665.395 | - | 21.754.665.395 | Facilities |
| Maintenance equipment | - | 45.293.578.835 | - | 45.293.578.835 | Maintenance equipment |
| Mechanical and electrical | - | - | - | - | Mechanical and electrical |
| Furniture, fixtures and office equipment | 8.806.187.961 | 3.433.855.955 | - | 12.240.043.916 | Furniture, fixtures and office equipment |
| Vehicles | 2.688.822.916 | 3.234.742.316 | - | 5.923.565.232 | Vehicles |
| Total accumulated depreciation | 11.495.010.877 | 392.382.709.970 | - | 403.877.720.847 | Total accumulated depreciation |
| Carrying amount | 12.708.591.099.651 | | | 16.023.641.838.869 | Carrying amount |

Depreciation of fixed assets are allocated as follows:

As of December 31, 2020, the Group has insured its fixed assets against physical loss or damage including loss due to fire with total sum assured amounting to Rp15,998,061,344,905 which according to management's opinion, are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

The management believes that the carrying value of all property and equipment of the Group is fully recoverable, hence, no provision for impairment in value of fixed assets is provided.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

10. SEWA

a. Aset hak-guna - neto:

Rincian dari aset hak-guna - neto adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2020/December 31, 2020 | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Saldo Awal/ Beginning Balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Disposals | Saldo Akhir/ Ending Balance |
| <u>Biaya Perolehan:</u> | | | | |
| Aset hak-guna – ruang kantor | 39.210.039.673 | - | - | 39.210.039.673 |
| Aset hak-guna - kendaraan | - | 801.022.195 | - | 801.022.195 |
| Aset hak-guna - peralatan | - | 3.727.956.751 | - | 3.727.956.751 |
| Sub-total | 39.210.039.673 | 4.528.978.946 | - | 43.739.018.619 |
| <u>Akumulasi amortisasi:</u> | | | | |
| Aset hak-guna – ruang kantor | - | 11.202.868.478 | - | 11.202.868.478 |
| Aset hak-guna - kendaraan | - | 33.017.044 | - | 33.017.044 |
| Aset hak-guna - peralatan | - | 621.326.125 | - | 621.326.125 |
| Jumlah akumulasi amortisasi | - | 11.857.211.647 | - | 11.857.211.647 |
| Nilai buku neto | - | | | 31.881.806.972 |

Tabel berikut menunjukkan nilai aset hak-guna yang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

| | Beban amortisasi/ Amortization expense | Beban bunga/ Interest expense | |
|--------------|---|--|--------------|
| Ruang kantor | 11.202.868.478 | 1.547.224.211 | Office space |
| Kendaraan | 33.017.044 | 4.527.250 | Vehicle |
| Peralatan | 621.326.125 | 49.568.521 | Equipment |
| Total | 11.857.211.647 | 1.601.319.982 | Total |

a. Right of use assets - net:

The details of right of use assets - net are as follows:

| | <u>Acquisition Cost:</u> |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Right of use asset – office space | 39.210.039.673 |
| Right of use asset – vehicle | 801.022.195 |
| Right of use asset – equipment | 3.727.956.751 |
| Sub-total | 43.739.018.619 |
| | <u>Accumulated amortization:</u> |
| Right of use asset – office space | 11.202.868.478 |
| Right of use asset – vehicle | 33.017.044 |
| Right of use asset – equipment | 621.326.125 |
| Total accumulated amortization | 11.857.211.647 |
| Net book value | 31.881.806.972 |

The following table shows the right of use assets which presented in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2020:

b. Liabilitas sewa:

Mutasi liabilitas sewa berdasarkan aset pendasar adalah sebagai berikut:

| | 2020 | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Addition | Beban Bunga/ Interest Expense | Pembayaran/ Payment | Saldo akhir/ Ending balance | |
| <u>Aset Pendasar</u> | | | | | | |
| Ruang kantor | 39.210.039.673 | - | 1.547.224.211 | (13.567.663.509) | 27.189.600.375 | <u>Underlying asset</u> |
| Kendaraan | - | 801.022.195 | 4.527.251 | (35.420.000) | 770.129.446 | Office space |
| Peralatan | - | 3.727.956.751 | 49.568.521 | (649.166.667) | 3.128.358.605 | Vehicle |
| Total | 39.210.039.673 | 4.528.978.946 | 1.601.319.983 | (14.252.250.176) | 31.088.088.426 | Total |

b. Lease liabilities:

Movement of lease liabilities based on underlying assets are as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

10. SEWA (lanjutan)

Analisa jatuh tempo atas utang sewa adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2020/ December 31, 2020 | |
|----------------------|--|---------------------------|
| Kurang dari 12 bulan | 29.285.746.004 | Within the next 12 months |
| 2 Tahun | 1.802.342.422 | 2 Years |
| Total | 31.088.088.426 | Total |

10. LEASES (continued)

The analysis of the maturities of other liabilities related to leases is as follows:

11. ASET TAK BERWUJUD – NETO

Rincian aset tak berwujud terkait dengan perolehan perangkat lunak (software) adalah sebagai berikut:

11. INTANGIBLE ASSETS - NET

The details of intangible assets related to software acquisition are as follows:

| 31 Desember 2020/December 31, 2020 | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Harga perolehan | | | | | Acquisition cost |
| Aset tak berwujud | 11.346.452.237 | 6.528.089.091 | - | 17.874.541.328 | Intangible assets |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | 19.760.846.801 | - | (4.739.664.067) | 15.021.182.734 | Intangible assets in progress |
| Total harga perolehan | 31.107.299.038 | 6.528.089.091 | (4.739.664.067) | 32.895.724.062 | Total acquisition cost |
| Akumulasi amortisasi | | | | | Accumulated amortization |
| Aset tak berwujud | 2.366.466.759 | 2.813.921.627 | - | 5.180.388.386 | Intangible assets |
| Nilai tercatat | 28.740.832.279 | | | 27.715.335.676 | Carrying amount |
| 31 Desember 2019/December 31, 2019 | | | | | |
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Harga perolehan | | | | | Acquisition cost |
| Aset tak berwujud | 10.451.273.800 | 637.678.437 | 257.500.000 | 11.346.452.237 | Intangible assets |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | 2.930.422.353 | 17.087.924.448 | (257.500.000) | 19.760.846.801 | Intangible assets in progress |
| Total harga perolehan | 13.381.696.153 | 17.725.602.885 | - | 31.107.299.038 | Total acquisition cost |
| Akumulasi amortisasi | | | | | Accumulated amortization |
| Aset tak berwujud | 174.187.897 | 2.192.278.862 | - | 2.366.466.759 | Intangible assets |
| Nilai tercatat | 13.207.508.256 | | | 28.740.832.279 | Carrying amount |

Amortisasi dari aset takberwujud pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.813.921.627 dan Rp2.192.278.862 dan dibebankan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 23).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset takberwujud Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tak berwujud tersebut.

The amortization of intangible assets in 2020 and 2019 amounted to Rp2,813,921,627 and Rp2,192,278,862, respectively, and was charged as part of general and administrative expenses (Note 23).

Management believes that the carrying value of all intangible assets of the Company is fully recoverable, hence, no provision for impairment in value of intangible assets is provided.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

12. KEPENTINGAN DALAM VENTURA BERSAMA

Kelompok Usaha memiliki 51% kepemilikan di MITJ. Kepentingan Kelompok Usaha dalam MITJ dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian. MITJ tidak memiliki kewajiban atau komitmen kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020 dan MITJ tidak dapat mendistribusikan keuntungannya sendiri tanpa persetujuan dari dua mitra usaha. Informasi keuangan ringkasan dari ventura bersama, berdasarkan laporan keuangan, dan rekonsiliasi dengan nilai tercatat investasi dalam laporan keuangan konsolidasian ditetapkan di bawah ini:

Ringkasan laporan posisi keuangan MITJ:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--|--------------------------|------|--------------------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| Aset lancar | 52.511.966.722 | - | Current assets |
| Aset tidak lancar | 26.633.966.222 | - | Non-current assets |
| Liabilitas jangka pendek | (12.440.142.310) | - | Current liabilities |
| Liabilitas jangka Panjang | (336.069.161) | - | Non-current liabilities |
| Ekuitas | 66.369.721.473 | - | Equity |
| Jumlah tercatat kotor investasi | 33.848.557.951 | - | Carrying amount of investment |

Ringkasan laporan laba rugi MITJ:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------|------------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| Pendapatan | - | - | Revenue |
| Rugi bersih | (13.630.278.527) | - | Net loss |
| Bagian rugi Kelompok Usaha | (6.951.442.049) | - | Group's share of loss |

12. INTEREST IN JOINT VENTURE

The Group has a 51% interest in MITJ. The Group's interest in MITJ is accounted for using the equity method in the consolidated financial statements. MITJ had no contingent liability or commitment as of December 31, 2020 and MITJ cannot distributed its own profit without approval from the two venture partner. Summarised financial information of the joint venture, based on its financial statements, and reconciliation with the carrying amount of the investment in the consolidated financial statements are set out below:

Summarised statement of financial position of MITJ:

Summarised statement of profit and loss MITJ

13. UANG JAMINAN

Uang jaminan merupakan penempatan jaminan langganan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan jaminan sewa kantor kepada PT Wisma Nusantara International. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp20.489.176.536 (2019: Rp13.432.176.936).

14. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| PT Dutagaruda Piranti Prima | - | 742.486.595 | PT Dutagaruda Piranti Prima |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000.000) | 1.509.590.292 | 1.527.022.468 | Others (each below Rp500,000,000) |
| Total | 1.509.590.292 | 2.269.509.063 | Total |

Seluruh utang usaha berdenominasi dalam mata uang rupiah.

13. GUARANTEED DEPOSITS

Guaranteed deposits mainly consists of placement of electricity subscription guarantee to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and office space rental guarantee to PT Wisma Nusantara International. Balance as of December 31, 2020 is Rp20,489,176,536 (2019: Rp13,432,176,936).

14. ACCOUNTS PAYABLES

Account payables consists of:

All account payables denominated in rupiah.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG KONTRAKTOR

Utang kontraktor terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya - Jaya Konstruksi Joint Venture | 45.731.753.122 | 60.892.665.412 |
| Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi Joint Venture | 10.576.227.995 | 15.127.618.669 |
| Oriental Consultant Global Co, Ltd | 637.797.903 | 33.472.109.449 |
| Oriental Consultant Co, Ltd | - | 31.363.926.091 |
| Tokyu - Wika Joint Operations | - | 3.054.276.940 |
| SMCC - HK Joint Operations | - | 2.007.507.241 |
| Metro One Consortium | - | 900.834.323 |
| Total | 56.945.779.020 | 146.818.938.125 |

Utang kontraktor berdasarkan mata uang terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Rupiah | 54.941.170.117 | 92.574.647.449 |
| Yen Jepang | 2.004.608.903 | 54.244.290.676 |
| Total | 56.945.779.020 | 146.818.938.125 |

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor sehubungan dengan proyek pembangunan MRT Fase I dan II.

16. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kontraktor | 96.867.629.425 | 267.134.135.730 |
| Pemasok | 58.775.977.604 | 72.808.737.230 |
| Gaji dan tunjangan | 4.800.707.037 | 22.647.112.933 |
| Jasa profesional | 8.469.075.125 | 7.377.266.113 |
| Lain-Lain | 342.680.000 | - |
| Total | 169.256.069.191 | 369.967.252.006 |

Beban akrual jasa kontraktor merupakan kemajuan pekerjaan yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

15. PAYABLES TO CONTRACTORS

Payables to contractors consists of:

Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya
- Jaya Konstruksi Joint Venture
Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi
Joint Venture
Oriental Consultant Global Co, Ltd
Oriental Consultant Co, Ltd
Tokyu - Wika Joint Operations
SMCC - HK Joint Operations
Metro One Consortium

Payables to contractors based on currency consists of:

Rupiah
Japanese yen

This account represents payables to contractors associated with MRT's construction project for phase I and II.

16. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consists of:

Contractors
Vendors
Salaries and benefits
Professional services
Others

Accrued expense of contractors represent work in progress which has not been billed as of December 31, 2020.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Jatuh tempo dalam satu tahun | | |
| Tiket | 2.723.737.105 | 1.159.531.510 |
| Non-tiket : | | |
| Kerjasama pembayaran berbasis aplikasi seluler | 44.166.666.667 | 35.000.000.000 |
| Hak penamaan stasiun | 39.275.000.000 | 47.525.000.000 |
| Kerjasama layanan periklanan | 35.272.370.187 | 32.779.874.310 |
| Kerjasama penerimaan uang elektronik | 6.915.909.092 | 6.915.909.092 |
| Kerjasama retail | 4.116.098.088 | 1.964.968.616 |
| Kerjasama penyewaan ruang ATM | 3.262.500.000 | 1.020.000.000 |
| Kerjasama telekomunikasi | 1.275.510.204 | 1.250.000.000 |
| Total | 137.007.791.343 | 127.615.283.528 |
| Jatuh tempo lebih dari satu tahun | | |
| Non-tiket : | | |
| Hak penamaan stasiun | 97.100.000.000 | 97.100.000.000 |
| Kerjasama layanan periklanan | 36.500.000.000 | 36.500.000.000 |
| Kerjasama penyewaan ruang ATM | 3.665.000.000 | 977.500.000 |
| Kerjasama retail | 820.345.669 | 156.977.949 |
| Total | 138.085.345.669 | 134.734.477.949 |

17. UNEARNED REVENUES

Unearned revenues consists of:

| |
|--|
| Current maturities |
| Farebox |
| Non-farebox : |
| Mobile application based payment cooperation |
| Station's naming rights |
| Advertising cooperation |
| Electronic money acceptance cooperation |
| Retail cooperation |
| Cooperation in rental space for ATM |
| Telecommunication cooperation |
| Total |
| Long-term maturities |
| Non-farebox : |
| Station's naming rights |
| Advertising cooperation |
| Cooperation in rental space for ATM |
| Retail cooperation |
| Total |

18. UANG JAMINAN PELANGGAN

Uang jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh PT Astra International Tbk sehubungan dengan hak penamaan stasiun.

Pada tanggal 31 Desember 2020, uang jaminan pelanggan ini disajikan pada nilai wajarnya sebesar Rp14.307.418.565 (2019: Rp13.020.934.409).

18. CUSTOMER'S SECURITY DEPOSIT

Customer's security deposit represents deposit from by PT Astra International Tbk in relation with the station's naming rights.

As of December 31, 2020, the customer's security deposit is presented in its fair value amounted to Rp14,307,418,565 (2019: Rp13,020,934,409).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Pajak penghasilan: | | |
| Pasal 4(2) | 192.554.362 | 634.132.164 |
| Pasal 21 | 4.871.566.864 | 2.635.061.728 |
| Pasal 23 | 328.821.106 | 658.919.828 |
| Pasal 26 | - | 1.020.000 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 7.827.690.869 | 6.007.170.770 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | - | 42.669.969.495 |
| Total | 13.220.633.201 | 52.606.273.985 |

- b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31, | |
|---|---|--------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian | (45.216.921.092) | 71.918.667.795 |
| Laba entitas anak sebelum pajak Penghasilan | 6.229.709.025 | - |
| Rugi sebelum pajak penghasilan - Perusahaan | (51.446.630.117) | - |
| Beda waktu: | | |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 13.096.867.305 | 13.658.377.086 |
| Selisih nilai piutang usaha | 9.839.311.501 | - |
| Estimasi penyisihan piutang | 433.459.564 | - |
| Aset hak guna dan liabilitas sewa | (795.842.841) | - |
| Akrua (pembayaran) bonus dan insentif | (17.603.929.066) | 18.982.672.685 |
| Penyusutan dan amortisasi | (343.599.650.269) | (259.537.599.718) |
| Sub-total | (338.629.783.806) | (226.896.549.947) |
| Beda tetap: | | |
| Bagian rugi ventura bersama | 6.951.442.049 | - |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak | 19.306.191.994 | 18.531.367.829 |
| Penghasilan yang dikenakan pajak final: | | |
| Bunga | (41.784.303.353) | (30.808.708.991) |
| Sewa | (36.146.438.859) | (2.709.753.543) |
| Sub-total | (51.673.108.169) | (14.987.094.705) |
| Estimasi rugi fiskal | (441.749.522.092) | (169.964.976.857) |

19. TAXATION

a. Tax payables

This account consists of:

| | 31 Desember/December 31, | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Pajak penghasilan: | | |
| Pasal 4(2) | 192.554.362 | 634.132.164 |
| Pasal 21 | 4.871.566.864 | 2.635.061.728 |
| Pasal 23 | 328.821.106 | 658.919.828 |
| Pasal 26 | - | 1.020.000 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 7.827.690.869 | 6.007.170.770 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | - | 42.669.969.495 |
| Total | 13.220.633.201 | 52.606.273.985 |

- b. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows:

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | (45.216.921.092) | 71.918.667.795 | <i>Profit (loss) before consolidated income tax</i> |
| | 6.229.709.025 | - | <i>Profit of subsidiary before income tax</i> |
| | (51.446.630.117) | - | <i>Loss before income tax attributable to the Company</i> |
| Beda waktu: | | | Temporary differences: |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 13.096.867.305 | 13.658.377.086 | <i>Liability for employee benefits</i> |
| Selisih nilai piutang usaha | 9.839.311.501 | - | <i>Difference on receivable present value</i> |
| Estimasi penyisihan piutang | 433.459.564 | - | <i>Estimated impairment of receivable</i> |
| Aset hak guna dan liabilitas sewa | (795.842.841) | - | <i>Right on use asset and rent liabilities</i> |
| Akrua (pembayaran) bonus dan insentif | (17.603.929.066) | 18.982.672.685 | <i>Accruals (payment) for bonus and incentives</i> |
| Penyusutan dan amortisasi | (343.599.650.269) | (259.537.599.718) | <i>Depreciation and amortization</i> |
| Sub-total | (338.629.783.806) | (226.896.549.947) | <i>Sub-total</i> |
| Beda tetap: | | | Permanent differences: |
| Bagian rugi ventura bersama | 6.951.442.049 | - | <i>Share in loss of joint venture</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak | 19.306.191.994 | 18.531.367.829 | <i>Non-deductible expenses</i> |
| Penghasilan yang dikenakan pajak final: | | | <i>Income subject to final tax:</i> |
| Bunga | (41.784.303.353) | (30.808.708.991) | <i>Interest</i> |
| Sewa | (36.146.438.859) | (2.709.753.543) | <i>Rent</i> |
| Sub-total | (51.673.108.169) | (14.987.094.705) | <i>Sub-total</i> |
| Estimasi rugi fiskal | (441.749.522.092) | (169.964.976.857) | Estimated tax loss |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

- b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31, | |
|--|---|--------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal awal tahun: 2015 ^{*)} | - | (74.211.150.922) |
| 2016 | (50.044.645.329) | (50.044.645.329) |
| 2017 | (130.993.470.241) | (130.993.470.241) |
| 2018 | (162.626.264.552) | (162.626.264.552) |
| 2019 | (169.964.961.975) | (169.964.961.975) |
| 2020 | (441.749.522.092) | - |
| Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal akhir tahun | (955.378.839.072) | (587.840.493.019) |

^{*)} Kadaluarsa pada 2020

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2020 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2020.

- c. Taksiran tagihan pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih mempunyai pajak penghasilan pasal 22 dan 23 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 926.221.486 dan Rp10.038.256.181. Perusahaan berencana untuk mengajukan restitusi pajak kepada Kantor Pajak.

- d. Aset pajak tangguhan – neto

Aset pajak tangguhan - neto terdiri dari:

| | 2020 | | | |
|--|--|--|---|--|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss | Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/Credited to others comprehensive income | Saldo akhir/ Ending balance |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan | | | | |
| Rugi fiskal | 136.158.413.208 | 49.488.037.206 | - | 185.646.450.414 |
| Akrual bonus dan insentif | 4.745.668.171 | (4.745.668.171) | - | - |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 2.306.639.428 | 2.707.327.301 | 432.919.870 | 5.446.886.599 |
| Aset tetap dan aset takberwujud | (64.884.399.930) | (55.730.356.511) | - | (120.614.756.441) |
| AHG dan Liabilitas Sewa | - | (159.168.568) | - | (159.168.568) |
| Selisih nilai piutang | - | 1.967.862.300 | - | 1.967.862.300 |
| Estimasi Penyisihan Piutang | - | 86.691.913 | - | 86.691.913 |
| Aset pajak tangguhan - neto | 78.326.320.877 | ((6.385.279.149)) | 432.919.870 | 72.373.961.598 |

Deferred tax asset (liabilities)
Fiscal loss
Accruals for bonus and incentives
Liability for employee benefits
Fixed assets and intangible assets
ROU and Lease Liabilities
Difference on receivable
Estimated impairment of receivable
Deferred tax assets - net

19. TAXATION (continued)

- b. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows: (continued)

Estimated tax losses carry-forward at beginning of year:
2015*)
2016
2017
2018
2019
2020

Estimated tax losses carry-forward at end of year

^{*)} Expired in 2020

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2020 to the Tax Office based on information reported in the 2020 consolidated financial statements.

- c. Estimated claim for tax refund

As of December 31, 2020, the Company still has income taxes article 22 and 23 amounting to Rp926,221,486 and Rp10,038,256,181, respectively. The Company plans to file a tax restitution to the Tax Office.

- d. Deferred tax assets - net

Deferred tax assets - net consists of:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan - neto (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari beda waktu di atas dapat direalisasikan pada periode mendatang.

f. Pajak final

Perhitungan pajak final untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dasar pengenaan pajak: | |
| Pendapatan bunga | 53.397.836.485 |
| Pendapatan sewa | 68.125.899.660 |
| Beban pajak final: | |
| Bunga (20%) | 10.679.567.297 |
| Sewa (10%) | 6.812.589.966 |
| Total | 17.492.157.263 |

19. TAXATION (continued)

d. *Deferred tax assets - net (continued)*

Management believes that the deferred tax assets resulted from the above temporary differences are realizable in future periods.

e. *Final tax*

The computation of final tax for the year ended December 31, 2020, is as follows.

| |
|---------------------|
| Tax base: |
| Interest revenues |
| Rent revenues |
| Final tax expenses: |
| Interest (20%) |
| Rent (10%) |
| Total |

20. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

20. SHARE CAPITAL

Details of the Company's shareholders as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2020/December 31, 2020

| Pemegang saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i> | Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> | Total/ <i>Total</i> | Shareholders |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Pemerintah Daerah DKI Jakarta | 16.338.669 | 99,9969% | 16.338.669.000.000 | Government of DKI Jakarta |
| Perumda Pasar Jaya | 500 | 0,0031% | 500.000.000 | Perumda Pasar Jaya |
| Total | 16.339.169 | 100,0000% | 16.339.169.000.000 | Total |

31 Desember 2019/December 31, 2019

| Pemegang saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i> | Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> | Total/ <i>Total</i> | Shareholders |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Pemerintah Daerah DKI Jakarta | 12.771.472 | 99,99% | 12.771.472.000.000 | Government of DKI Jakarta |
| Perumda Pasar Jaya | 500 | 0,01% | 500.000.000 | Perumda Pasar Jaya |
| Total | 12.771.972 | 100% | 12.771.972.000.000 | Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2019, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 23 tanggal 13 Desember 2019, para pemegang saham telah menyetujui perubahan modal dasar dari sebelumnya Rp14.659.000.000.000 menjadi sebesar Rp40.757.353.000.000. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0105309.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019.

Para pemegang saham juga menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp9.111.248.000.000 menjadi sebesar Rp12.771.972.000.000. Perubahan tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0373409 tanggal 16 Desember 2019.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 November 2020, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 46 tanggal 16 Desember 2020, para pemegang saham telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp12.771.972.000.000 menjadi sebesar Rp16.339.169.000.000. Perubahan tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0421641 tanggal 21 Desember 2020

Selama tahun 2020, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyertaan modal disetor yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman sebesar Rp1.433.474.235.723 (Catatan 27a).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, penambahan modal sebesar Rp1.433.474.235.723 belum diaktakan dan dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

20. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders on November 29, 2019 which were on Notarial Deed No. 23 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated December 13, 2019, the shareholders has approved the change in the authorized share capital from Rp14,659,000,000,000 to become Rp40,757,353,000,000. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0105309.AH.01.02. year 2019 dated December 16, 2019.

The shareholders also approved the change in the issued and fully paid capital from Rp9,111,248,000,000 to become Rp12,771,972,000,000. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0373409 dated December 16, 2019.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders on November 30, 2020 which were on Notarial Deed No. 46 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated December 16, 2020, the shareholders has approved the change in the issued and fully paid capital from Rp12,771,972,000,000 to become Rp16,339,169,000,000. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0421641 dated December 21, 2020.

During 2020, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta, as paid-up capital sourced from the grant and loan mechanism amounting Rp1,433,474,235,723 (Note 27a).

As of December 31, 2020, the paid-up capital amounting to Rp1,433,474,235,723 has not been notarized and presented as "Other Paid-up Capital" in the Equity section of the consolidated statement of financial position.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

| | 31 Desember/December 31, | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | 2020 | 2019 | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | | | Issued and fully paid share capital |
| Saldo awal tahun | 12.771.972.000.000 | 6.165.807.000.000 | Balance at beginning of the year |
| Reklasifikasi dari modal disetor lainnya | 3.567.197.000.000 | 6.606.165.000.000 | Reclassification from other paid-up capital |
| Saldo akhir tahun | 16.339.169.000.000 | 12.771.972.000.000 | Balance at end of the year |
| Modal disetor lainnya | | | Other paid-up capital |
| Saldo awal tahun | 3.567.201.942.700 | 6.606.169.772.791 | Balance at beginning of the year |
| Penambahan yang berasal dari APBD dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman | 1.433.469.293.023 | 3.567.197.169.909 | Addition from APBD from grant and loan mechanism |
| Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh | (3.567.201.000.000) | (6.606.165.000.000) | Reclassification to issued and fully paid share capital |
| Saldo akhir tahun | 1.433.474.235.723 | 3.567.201.942.700 | Balance at end of the year |

Perusahaan membukukan penambahan modal disetor lainnya pada saat penerbitan *Notice of Disbursement* oleh JICA serta diakui sebagai modal ditempatkan yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman Pemerintah menggunakan nilai tukar yang terdapat dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Company recorded the addition of other paid-up capital at the date of the *Notice of Disbursement* from JICA, and recognized it as issued share capital sourced from the Government grant and loan using the exchange rate in *Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan* which annually published by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Pengelolaan modal

Capital management

Dalam mengelola permodalannya, Kelompok Usaha senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the shareholders and other stakeholders.

Kelompok Usaha secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan (a) efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi serta (b) pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the (a) efficiency of capital use based on operating cash flow and (b) capital expenditures and future capital needs.

Kelompok Usaha mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang neto dengan ekuitas neto. Rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by the net equity. The gearing ratio is as follow:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 2020 | 2019 | |
| Liabilitas jangka pendek | 838.290.814.962 | 699.277.256.707 | Current liabilities |
| Liabilitas jangka panjang | 198.957.711.200 | 657.366.538.633 | Non-current liabilities |
| Total | 1.037.248.526.162 | 1.356.643.795.340 | Total |
| Dikurangi kas dan setara kas | (1.224.727.034.659) | (976.544.700.866) | Less cash and cash equivalents |
| Utang (aset) neto | (187.478.508.497) | 380.099.094.474 | Net debt (asset) |
| Total ekuitas | 17.359.906.450.071 | 15.996.763.194.031 | Total equity |
| Rasio utang neto terhadap ekuitas | (0,01) | 0,02 | Net debt to equity ratio |

Kelompok Usaha memiliki porsi ekuitas lebih besar dibandingkan porsi utang dikarenakan sebagian besar sumber pendanaan berasal dari penyertaan modal atau ekuitas.

The Group has higher equity portion compared to debt because most of financing sources came from capital contributions or equity.

21. PENDAPATAN

21. REVENUES

Pendapatan terdiri dari:

Revenues consists of:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | | |
|---|---|------------------------|---|
| | 2020 | 2019 | |
| Pendapatan tiket | 82.025.101.203 | 191.552.481.872 | Farebox revenues |
| Pendapatan subsidi | 620.800.775.256 | 534.069.547.569 | Subsidy revenue |
| Pendapatan non-tiket: | | | Non-farebox revenues: |
| Kerjasama layanan periklanan | 138.596.984.874 | 97.038.617.992 | Advertising cooperation |
| Hak penamaan stasiun | 122.100.000.000 | 74.575.000.000 | Station's naming rights |
| Kerjasama penerimaan uang digital | 40.833.333.333 | - | QR code |
| Kerjasama penerimaan uang elektronik | 29.863.036.384 | 20.893.909.090 | Electronic money acceptance cooperation |
| Kerjasama media luar ruang media pilar | 25.000.000.000 | - | Outdoor media pillar |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000.000) | 26.278.768.525 | 15.099.972.923 | Others (each below Rp10,000,000,000) |
| Sub-total pendapatan non-tiket | 382.672.123.116 | 207.607.500.005 | Sub-total non-farebox revenue |
| Total | 1.085.497.999.575 | 933.229.529.446 | Total |

Pendapatan tiket

Farebox revenues

Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 34 tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ("Peraturan Gubernur No. 34"). Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 34 tersebut, tarif terjauh angkutan perkeretaapian MRT koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia adalah sebesar Rp14.000.

Farebox revenues is revenues from the sale of tickets based on passenger transportation tariff stipulated on Jakarta Governor Regulation No. 34 Year 2019 regarding Railway Transportation Tariff of Mass Rapid Transit and "Kereta Api Ringan"/Light Rail Transit ("Governor Regulation No. 34"). Based on the Governor Regulation No. 34, the farthest tariff of railway transportation for Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia line is amounted to Rp14,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sarana dan prasarana kepada Perusahaan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan sarana dan prasarana MRT serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi sarana dan prasarana menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sarana dan prasarana kepada Perusahaan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan sarana dan prasarana MRT serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi sarana dan prasarana menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 39 tahun 2020.

Subsidi sarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pelanggan.

Subsidi prasarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Berdasarkan peraturan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No. 23/-1.811.3 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Besaran pagu pemberian subsidi sarana dan prasarana tahun 2020 senilai Rp748.107.749.076 dan akan dibayarkan dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan uang muka dengan nilai 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp149.621.549.815 yang dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal perjanjian.

21. REVENUE (continued)

Subsidy revenue

The Government of DKI Jakarta provides facilities and infrastructure subsidies to the Company to ensure the sustainability of the operation of MRT facilities and infrastructure and the affordability of tariffs for society. The procedure of calculation and payment for facilities and infrastructure subsidies is stipulated in Governor Regulation No. 107 of 2019 regarding subsidies for "Moda Raya Terpadu" and "Lintas Raya Terpadu".

The Government of DKI Jakarta provides facilities and infrastructure subsidies to the Company to ensure the sustainability of the operation of MRT facilities and infrastructure and the affordability of tariffs for society. The procedure of calculation and payment for facilities and infrastructure subsidies is stipulated in Governor Regulation No. 107 of 2019 regarding subsidies for "Moda Raya Terpadu" and "Lintas Raya Terpadu" as amended by Governor Regulation No. 39 of 2020.

The facilities subsidy is the budget allocation from the Government of DKI Jakarta to operate the railways facilities in the context of public service obligations in order that the tariffs are affordable for customers.

The infrastructure subsidy is the budget allocation from the Government DKI Jakarta to cover the operational and maintenance cost of railway infrastructure and capital costs of operational facilities.

Based on the regulation above, the Company has signed the agreement with Government of DKI Jakarta No. 4343/-1.811.32 dated September 30, 2019 about "Moda Raya Terpadu" Subsidies sourced from Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2019.

The maximum amount of facilities and infrastructure subsidy in 2020 is Rp748,107,749,076 and will be paid in several payment phase, which are:

- a. *Advances amounting to 20% of the contract value or Rp149,621,549,815 which will be paid within 7 calendar days from the date of the agreement.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi (lanjutan)

- b. Pencairan subsidi periode 1 Januari - 31 Mei 2020 dilakukan secara sekaligus selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2020.
- c. Pencairan subsidi periode 1 Juni – 30 November 2020 dilakukan secara tiap bulan berdasarkan permohonan pencairan subsidi selambat lambatnnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Dinas Perhubungan.
- d. Pencairan subsidi periode 1 - 31 Desember 2020 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2020.
- e. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, nilai subsidi untuk penyelenggaraan pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu di wilayah DKI Jakarta No. 117/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020 mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam perubahan DPA-PPKD 2020 No. 117/DPPA/2020 pada tanggal 14 Desember 2020, maka pagu subsidi yang dapat ditagihkan dan dicairkan selama periode subsidi tahun 2020 adalah sebatas nilai DPA-PPKD 2020.

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No. 62/-1.811.3 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang akan dibayarkan dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan subsidi periode 1 Januari - 31 Mei 2020 dilakukan secara sekaligus berdasarkan satu permohonan pencairan subsidi dan dibayarkan pada bulan September 2020.
- b. Pencairan subsidi periode 1 Juni - 31 Oktober 2020 berdasarkan permohonan pencairan subsidi bulanan dan dibayarkan pada bulan Desember 2020
- c. Pencairan subsidi periode 1 November – 31 Desember 2020 ditagihkan bersamaan di bulan Desember 2020. Nilai subsidi untuk periode Desember 2020 menggunakan proyeksi atas nilai subsidi dibayarkan secara bulanan yang akan dicairkan untuk periode November 2020.

21. REVENUE (continued)

Subsidy revenue (continued)

- b. Subsidies for the period of January 1 - May 30, 2020 will be paid at the latest by the end of June 2020.
- c. Subsidies for the period of June 1 - November 30, 2020 conducted on a monthly basis based on the request for subsidies disbursement no later than 30 calendar days from the date of receipt of the request for subsidies disbursement and the documents are declared complete by the Department of Transportation.
- d. Subsidies for the period 1 – 31 December 2020, will be paid maximum on December 20, 2020
- e. In connection with the COVID-19 pandemic, the amount of subsidy for the implementation of public service obligation in the form of transportation services with “Moda Raya Terpadu” in DKI Jakarta No. 117/DPA/2020 dated January 2, 2020 has changed as outlined in the amendment to DPA-PPKD 2020 No. 117/ DPPA/2020 on December 14, 2020, the subsidy ceiling that can be collected and disbursed during the 2020 subsidy period is limited to the value of the 2020 DPA-PPKD.

The Company has signed an agreement of addendum with Pemprov DKI Jakarta No. 62/-1.811.3 dated December 16, 2020 about the Provision of Subsidy for “Moda Raya Terpadu” sourced from the 2020 Regional Budget for Fiscal Year, which will be paid in several stages of payment, namely:

- a. Subsidies for the period of January 1 - May 30, 2020 will be paid on one request for subsidy disbursement and paid in September 2020.
- b. Subsidies for the period of June 1 - October 30, 2020 based on monthly request of subsidy disbursement and will be paid in December 2020.
- c. Subsidies for the period of November 1 - December 30, 2020 will be simultaneously requested in December 2020. The amount of December 2020 subsidy will be projected by amount of subsidy paid in monthly basis that will be disbursed for November 2020. Payment will be done in December 2020.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi (lanjutan)

Selama tahun 2020, Perusahaan telah menerima pencairan uang muka subsidi, subsidi bulan Januari – November 2020, 90% subsidi bulan Desember 2020 dan 25% piutang subsidi tahun 2019 dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp641.761.624.523 setelah dikurangi denda atas ketidaktercapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar Rp2.111.167.243.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang subsidi Perusahaan adalah sebesar Rp83.970.106.593 (2019: Rp105.707.838.783)

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh saldo piutang subsidi dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang ini.

Pendapatan non-tiket

Rincian pendapatan non-tiket berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | |
|--|--|-------------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Pihak ketiga: | | |
| PT Avabanindo Perkasa | 138.596.984.874 | 97.038.617.992 |
| PT Astra International Tbk | 25.000.000.000 | 18.750.000.000 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 36.410.909.096 | 18.318.181.818 |
| PT Solusi Transportasi Indonesia | 33.000.000.000 | 16.500.000.000 |
| PT Jakarta Infrastruktur Propertindo | 25.000.000.000 | - |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 24.090.909.096 | 18.068.181.818 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 22.190.909.096 | 16.789.363.636 |
| PT.Espay Debitkoe | 14.583.333.333 | - |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000.000) | 58.299.677.621 | 19.668.154.741 |
| Sub-total | <u>377.172.723.116</u> | <u>205.132.500.005</u> |
| Pihak berelasi: | | |
| PT Bank DKI | 5.499.400.000 | 2.475.000.000 |
| Total | <u>382.672.123.116</u> | <u>207.607.500.005</u> |

21. REVENUE (continued)

Subsidy revenue (continued)

During 2020, the Company has received the payment of advance and subsidy for the period of January-November 2020, 90% of subsidy December 2020 and 25% subsidy receivable 2019 from Government of DKI Jakarta with the total amount of Rp641,761,624,523 after deducting a penalty for not achieving the Minimum Service Standards (MSS) amounted to Rp2,111,167,243.

As of December 31, 2020, the balance of the Company's subsidy receivables amounting to Rp83,970,106,593 (2019: Rp105.707.838.783).

Management believes that there is no objective evidence which may indicate impairment in value of the subsidy receivables; hence, no provision for impairment was made.

Non-farebox revenues

The details of the above amounts of non-farebox revenues by customers are as follows:

| | |
|--|---|
| | <i>Third parties:</i> |
| | <i>PT Avabanindo Perkasa</i> |
| | <i>PT Astra International Tbk</i> |
| | <i>PT Bank Central Asia Tbk</i> |
| | <i>PT Solusi Transportasi Indonesia</i> |
| | <i>PT Jakarta Infrastruktur Propertindo</i> |
| | <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i> |
| | <i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i> |
| | <i>PT Espay Debitkoe</i> |
| | <i>Others (each below Rp10,000,000,000)</i> |
| | <i>Sub-total</i> |
| | <i>Related party:</i> |
| | <i>PT Bank DKI</i> |
| | Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Penyusutan | 520.750.414.913 | 388.169.954.015 |
| Keamanan dan kebersihan | 132.270.683.600 | 102.875.645.261 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 120.859.969.243 | 94.627.577.127 |
| Energi dan utilitas | 81.576.240.229 | 92.528.279.252 |
| Pajak bumi dan bangunan | 42.669.969.495 | 32.002.477.121 |
| Pemeliharaan | 34.011.629.841 | 12.524.605.853 |
| Asuransi | 25.791.766.957 | 20.675.300.850 |
| Keperluan rumah tangga | 17.956.978.307 | 15.676.682.971 |
| Lain-lain | 804.649.967 | 1.334.284.319 |
| Total | 976.692.302.552 | 760.414.806.769 |

22. COST OF REVENUES

Cost of revenues consisted of the following:

| |
|---------------------------------|
| Depreciation |
| Security and hygiene |
| Salaries and employee's welfare |
| Energy and utility |
| Land and property tax |
| Maintenance |
| Insurance |
| Household appliances |
| Others |
| Total |

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | |
|---|--|------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 86.424.756.677 | 106.968.694.868 |
| Jasa profesional | 32.913.612.523 | 17.081.969.711 |
| Perlengkapan kantor | 18.448.483.846 | 30.050.902.449 |
| Penyusutan aset sewa | 11.824.194.603 | - |
| Sewa kantor dan kendaraan | 2.246.521.054 | 17.330.254.548 |
| Penyusutan | 9.768.125.512 | 4.212.755.955 |
| Promosi dan pameran | 6.581.797.083 | 8.989.284.942 |
| Pelatihan dan keanggotaan | 4.901.259.901 | 18.851.849.431 |
| Keperluan rumah tangga | 8.319.371.564 | 6.585.321.754 |
| Amortisasi | 2.813.921.627 | 2.192.278.862 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2.500.000.000) | 5.511.782.936 | 9.486.611.715 |
| Total | 189.753.827.326 | 221.749.924.235 |

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consisted of the following:

| |
|-------------------------------------|
| Salaries and employee's welfare |
| Professional fee |
| Office supplies |
| Depreciation on right of use assets |
| Office and vehicle rent expenses |
| Depreciation |
| Promotion and exhibition |
| Training and membership |
| Household appliances |
| Amortization |
| Other (each below Rp2,500,000,000) |
| Total |

24. PENGHASILAN BUNGA

Penghasilan bunga terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Penghasilan bunga deposito | 48.952.767.915 | 35.387.488.961 |
| Penghasilan jasa giro | 3.290.281.401 | 3.123.397.278 |
| Total | 52.243.049.316 | 38.510.886.239 |

24. INTEREST INCOME

Interest income consisted of the following:

| |
|-------------------------|
| Deposit interest income |
| Current accounts income |
| Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

25. PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | |
|----------------------|---|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Penghasilan keuangan | 1.808.542.067 | 11.979.065.591 |
| Beban keuangan | (13.244.646.299) | - |
| Neto | (11.436.104.232) | 11.979.065.591 |

25. FINANCE INCOME (EXPENSE)

This account consisted of the following:

Finance income
Finance expense
Net

26. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 dan 28 Februari 2020.

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31 | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Program purna karya | 25.181.187.978 | 16.601.166.133 |
| Program cuti besar | 11.129.583.922 | 7.219.541.838 |
| Program masa persiapan pensiun | 4.614.481.165 | 3.056.110.448 |
| Program penghargaan masa kerja | 3.837.351.479 | 1.977.837.680 |
| Total | 44.762.604.544 | 28.854.656.099 |

26. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS

Liability for employee benefits as of December 31, 2020 and 2019 was determined based on the actuarial valuation performed by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, based on their reports dated March 9, 2021 and February 28, 2020, respectively.

The details of long-term employee benefits liability are as follows:

Post-retirement benefits program
Long leave program
Pension preparation program
Jubilee program
Total

Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

The actuarial valuation was performed using the *Projected-Unit-Credit* method which considered the following assumptions:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Tingkat diskonto | 3,64% - 7,83% | 5,42% - 8,19% |
| Kenaikan gaji dan upah | 3% | 3,13% |
| Usia pensiun normal | 58 tahun/58 years | 58 tahun/58 years |
| Tabel mortalitas | TMI I (2019) | 2TMI III (2011) |
| Tingkat cacat | 10% dari TMI 2019/ 10% of TMI 2019 | 10% dari TMI 2011/ 10% of TMI 2011 |
| Tingkat pengunduran diri untuk usia: | | |
| 15-29 | 6% | 6% |
| 30-34 | 3% | 3% |
| 35-39 | 1,8% | 1,8% |
| 40-49 | 1,2% | 1,2% |
| 50-53 | 0% | 0,0% |
| lebih dari 53 | 0% | 0,0% |

Discount rate
Wage and salary increase
Retirement age
Mortality table
Disability rate
Voluntary resignation for ages:
15-29
30-34
35-39
40-49
50-53
more than 53

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

a. Program purna karya

Perusahaan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Perjanjian dengan DPLK berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama, kecuali diputuskan lain oleh salah satu pihak.

Iuran dana pensiun yang ditanggung Perusahaan adalah sebesar sebesar 3,7% dari penghasilan dasar pensiun karyawan tetap.

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat, Perusahaan juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 636 karyawan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| | 2020 | 2019 | |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 16.601.166.133 | 11.767.950.404 | <i>Present value of liability - beginning of the year</i> |
| Biaya bunga | 1.228.039.592 | 1.009.690.144 | <i>Interest cost</i> |
| Biaya jasa kini | 5.749.562.090 | 4.269.387.884 | <i>Current service cost</i> |
| Biaya jasa lalu | | 4.062.267.099 | <i>Past service cost</i> |
| Pembayaran manfaat | (180.011.021) | (54.661.050) | <i>Benefits paid</i> |
| Pengukuran kembali: | | | <i>Remeasurement:</i> |
| - Perubahan asumsi demografi | 19.266.178 | (1.619.303.038) | <i>- Changes in demographic assumptions</i> |
| - Perubahan asumsi keuangan | 1.262.473.135 | (3.903.259.836) | <i>- Changes in financial assumptions</i> |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 500.691.871 | 1.069.094.526 | <i>- Experience adjustments</i> |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 25.181.187.978 | 16.601.166.133 | <i>Present value of liability - end of the year</i> |

26. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Post-retirement benefits program

The Company have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees. The pension plan assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, of which the establishment has been approved by the Minister of Finance. The agreement with DPLK was effective from October 1, 2017 to October 1, 2019 and shall always be automatically extended for the same period, unless otherwise decided by either party.

Fund contribution paid by the Company is 3.7% of the basic pension income of permanent employees.

Other than the benefits provided under the above-mentioned defined contributions retirement plans, the Company has also made additional provisions for employee benefits to meet the minimum benefits to employees as stipulated in the Labor Law.

Management believes that the balance of employee benefits liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the Labor Law.

The number of employees as of December 31, 2020 entitled to this benefits are 636 employees.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

b. Program Masa Persiapan Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Perusahaan memberikan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan selama 12 bulan sebelum masa usia pensiun normal. Selama Masa Persiapan Pensiun, karyawan masih mendapatkan penghasilan, namun dibebaskan dari tugas dan kewajibannya di Perusahaan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 3.056.110.448 | - |
| Biaya bunga | 229.368.469 | - |
| Biaya jasa kini | 952.036.657 | 695.548.380 |
| Biaya jasa lalu | - | 2.360.562.068 |
| Pembayaran manfaat | - | - |
| Pengukuran kembali: | | |
| - Perubahan asumsi demografi | 27.330.283 | - |
| - Perubahan asumsi keuangan | 247.214.760 | - |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 102.420.548 | - |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 4.614.481.165 | 3.056.110.448 |

c. Program penghargaan masa kerja

Perusahaan memberikan penghargaan kesetiaan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja tertentu berupa emas.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 1.977.837.680 | 788.331.351 |
| Biaya bunga | 143.553.264 | 67.638.830 |
| Biaya jasa kini | 1.209.163.666 | 754.000.964 |
| Biaya jasa lalu | - | - |
| Pembayaran manfaat | (42.645.000) | (46.645.000) |
| Pengukuran kembali: | | |
| - Perubahan asumsi demografi | (92.837) | (27.117.631) |
| - Perubahan asumsi keuangan | 187.355.602 | 83.925.813 |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 362.179.104 | 357.703.353 |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 3.837.351.479 | 1.977.837.680 |

26. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Retirement Preparation Program

Based on the Company's Regulation, the Company provides Retirement Preparation Program to employees for 12 months prior to the normal retirement age. During Retirement Preparation Program, the employee is still receiving salaries but released from task and responsibility in the Company.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities are as follows:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Present value of liability - beginning of the year | - | - |
| Interest cost | - | - |
| Current service cost | 695.548.380 | - |
| Past service cost | 2.360.562.068 | - |
| Benefits paid | - | - |
| Remeasurement: | | |
| - Changes in demographic assumptions | - | - |
| - Changes in financial assumptions | - | - |
| - Experience adjustments | - | - |
| Present value of liability - end of the year | 3.056.110.448 | 3.056.110.448 |

c. Jubilee program

The Company rewards employees with certain working period in form of gold.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities are as follows:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Present value of liability - beginning of the year | 788.331.351 | 788.331.351 |
| Interest cost | 67.638.830 | 67.638.830 |
| Current service cost | 754.000.964 | 754.000.964 |
| Past service cost | - | - |
| Benefits paid | (46.645.000) | (46.645.000) |
| Remeasurement: | | |
| - Changes in demographic assumptions | (27.117.631) | (27.117.631) |
| - Changes in financial assumptions | 83.925.813 | 83.925.813 |
| - Experience adjustments | 357.703.353 | 357.703.353 |
| Present value of liability - end of the year | 1.977.837.680 | 1.977.837.680 |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

d. Program cuti besar

Perusahaan memberikan program cuti besar kepada karyawan sebesar gaji pokok bulanan dan tunjangan tetap bulanan untuk setiap 3 tahun masa kerja.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

| 31 Desember/December 31, | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 7.219.541.838 | 4.325.408.004 |
| Biaya bunga | 479.435.476 | 371.120.007 |
| Biaya jasa kini | 3.475.336.435 | 2.658.759.046 |
| Pembayaran manfaat | (1.670.008.447) | (683.265.000) |
| Pengukuran kembali: | | |
| - Perubahan asumsi demografi | (132.304) | (61.563.827) |
| - Dari perubahan asumsi keuangan | 316.133.880 | (442.342.591) |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 1.309.277.044 | 1.051.426.199 |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 11.129.583.922 | 7.219.541.838 |

Selama tahun 2020, Perusahaan mengkapitalisasi beban imbalan kerja pada tahun berjalan ke dalam aset dalam penyelesaian sebesar Rp646.481.791.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2020:

| | Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit obligations | Beban jasa kini/ Current service cost |
|---|---|--|
| Kenaikan 1% tingkat diskonto | 40.784.118.537 | 10.301.889.787 |
| Penurunan 1% tingkat diskonto | 49.499.370.319 | 12.686.048.458 |
| Kenaikan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan | 49.426.571.657 | 12.646.399.453 |
| Penurunan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan | 40.815.676.291 | 10.328.987.091 |

26. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long leave program

The Company rewards employees with a long leave program amounting to basic monthly salary and fixed monthly allowance every 3-year of work.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

| 31 Desember/December 31, | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 4.325.408.004 | 4.325.408.004 |
| Biaya bunga | 371.120.007 | 371.120.007 |
| Biaya jasa kini | 2.658.759.046 | 2.658.759.046 |
| Pembayaran manfaat | (683.265.000) | (683.265.000) |
| Pengukuran kembali: | | |
| - Perubahan asumsi demografi | (61.563.827) | (61.563.827) |
| - Dari perubahan asumsi keuangan | (442.342.591) | (442.342.591) |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 1.051.426.199 | 1.051.426.199 |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 7.219.541.838 | 7.219.541.838 |

During 2020, the Company capitalized expense for employee benefits for the current year to construction in progress amounting to Rp646,481,791.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the present value of the obligations and current service cost as of December 31, 2020:

1% increase of discount rate
1% decrease of discount rate
1% increase of future salary incremental rate
1% decrease of future salary incremental rate

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode deterministik atas pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari liabilitas imbalan kerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

| | 2020 |
|--------------------------|------------------------|
| 1 tahun | 2.656.442.869 |
| Antara 1 sampai 2 tahun | 6.962.611.354 |
| Antara 2 sampai 5 tahun | 14.409.987.702 |
| Antara 5 sampai 10 tahun | 39.395.895.033 |
| Diatas 10 tahun | 658.807.941.439 |
| Total | 722.232.878.397 |

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 17,61 tahun (2019: 17,21 tahun).

26. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The sensitivity analysis above are calculated based on a deterministic method on the impact to the employee on benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

The expected contribution payments of the employee benefit liability in the future years are as follows:

| |
|------------------------|
| 1 year |
| Between 1 and 2 years |
| Between 2 and 5 years |
| Between 5 and 10 years |
| Beyond 10 years |
| Total |

The average duration of the employee benefit liability on December 31, 2020 was 17.61 years (2019: 17.21 years).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman

- 1) Pada tanggal 28 November 2006, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-536 dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") terkait dengan jasa teknik untuk Proyek Mass Rapid Transit Jakarta ("Proyek").

JBIC setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY1.869.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan jasa teknik untuk Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk pengadaan jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2012, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *closing date* Perjanjian Utang No. IP-536 yang semula tanggal 22 Maret 2012 diubah sehingga menjadi tanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari Japan International Cooperation Agency ("JICA"), Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perusahaan dimana para pihak telah menyepakati nilai keseluruhan pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta adalah sebesar JPY137.695.000.000.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans*

- 1) *On November 28, 2006, Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-536 with the Japanese Government through the Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") in relation to the Jakarta Mass Rapid Transit Project (the "Project").*

JBIC agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY1,869,000,000 for the engineering services of the Project. The loan would be used for the purchase of eligible services from consultants that is necessary for the Project implementation.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at five years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JBIC and the Government of the Republic of Indonesia.

On June 19, 2012, based on a letter from the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Closing Date of Loan Agreement No. IP-536 which was originally on March 22, 2012 had been extended to become December 22, 2014.

On February 27, 2013, based on the Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission which were signed by representatives of Japan International Cooperation Agency ("JICA"), the Government of the Republic of Indonesia as represented by the National Development Planning Agency, the Directorate General of Railways, DKI Jakarta Provincial Government and the Company agreed that the total project cost for the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project amounted to JPY137,695,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

- 2) Pada tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY758.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi pengadaan.

Dana hibah yang tidak melebihi dari JPY191.000.000 akan diteruskan seluruhnya kepada Perusahaan sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan oleh Perusahaan.

Tata cara penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012.

- 2) Pada tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-554 dengan JICA terkait dengan Proyek.

JICA setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY48.150.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

- 2) On March 25, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.

Under the Grant Agreement, Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting JPY758,000,000, which was to be obtained from a loan from another country, to the Government of DKI Jakarta in order to implement management consultancy services and tender assistance consultancy.

Grant fund not exceeding JPY191,000,000 would be granted to the Company as equity of the Government of DKI Jakarta for the implementation of the Company's consulting services.

The procedures to distribute the grant are covered by Regulations No. 188/PMK.07/2012 dated November 26, 2012, of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

- 3) On March 31, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-554 with JICA in relation to the Project.

JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY48,150,000,000 will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at ten years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JICA and the Government of the Republic of Indonesia.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)
- 4) Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY48.150.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan peralatan, jasa konsultasi dan alokasi cadangan kontijensi oleh Perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan Proyek.

Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-001/PK/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY11.347.000.000.

- 5) Pada tanggal 27 Oktober 2011, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1517/2011, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.179.480.000 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp30.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.179.480.000, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 27a2).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

- 4) *On July 24, 2009, Government of the Republic of Indonesia signed the Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.*

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting to JPY48,150,000,000, which would be obtained from a loan from another country, to the Government of DKI Jakarta in order to implement equipment and civil works, consultation services and allocation for contingency reserves by the Company for implementation of development activities of the Project.

On March 23, 2016, the Government of Republic Indonesia signed grant agreement No.PHD-001/PK/2016 with the government of DKI Jakarta related to subsidiary loan JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 as grant to the Government of DKI Jakarta amounted to JPY11,347,000,000.

- 5) *On October 27, 2011, the Company received Governor Decree No. 1517/2011, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounted to Rp44,179,480,000, which would be funded from the APBD amounting to Rp30,000,000,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,179,480,000 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 27a2).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1525/2012, yang menyetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp968.509.699.990 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp65.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.041.116.650 sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 27a2) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp889.468.583.340, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 27a4).

Pada bulan November dan Desember 2013, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp111.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 704 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp31.000.000.000 dan Keputusan Gubernur No. 1923 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp80.000.000.000 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1924/2013, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.720.529.427.822 yang alokasinya bersumber dari hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp12.088.062.892, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 27a2) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.708.441.364.930, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 27a4).

Pada bulan Juli 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1123 tanggal 8 Juli 2014 yang alokasinya bersumber dari APBD.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

On October 2, 2012, the Company received Governor Decree No. 1525/2012, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounting to Rp968,509,699,990, which would be funded from the APBD amounting to Rp65,000,000,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,041,116,650 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 27a2) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp889,468,583,340 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 27a4).

In November and December 2013, the Company received the additional Contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp111,000,000,000 based on Governor Decree No. 704 dated May 1, 2013 amounting to Rp31,000,000,000 and Governor Decree No. 1923 dated December 11, 2013 amounting to Rp80,000,000,000 which were funded from the APBD.

On December 11, 2013, the Company received Governor Decree No. 1924/2013, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounting to Rp1,720,529,427,822, which would be funded from a grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp12,088,062,892 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 27a2) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,708,441,364,930 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 27a4).

In July 2014, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp125,000,000,000 based on Governor Decree No. 1123 dated July 8, 2014 which were funded from the APBD.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 4 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-571 dengan JICA terkait dengan Proyek. JICA setuju untuk memberikan pinjaman sebesar JPY75.218.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta.

Pada tanggal 4 Februari 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman No.SLA-1263/DSMI/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan pinjaman dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebesar JPY63.871.000.000 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2092 tanggal 16 September 2016 dan Rp100.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2730 tanggal 20 Desember 2016.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp444.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2308 tanggal 20 Desember 2017 yang alokasinya bersumber dari APBD.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

In December 2015, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp145,000,000,000 based on Governor Decree No. 2700 dated December 8, 2015 which were funded from the APBD.

On December 4, 2015, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-571 with JICA in relation to the Project. JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount JPY75,218,000,000 for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project.

On February 4, 2016, the Government of Republic of Indonesia signed Grant Agreement No.SLA-1263/DSMI/2016 with the Government of DKI Jakarta related to subsidiary loan from JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 amounted to JPY63,871,000,000 to Government of DKI Jakarta.

In December 2016, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta amounting to Rp49,000,000,000 based on Governor Decree No. 2092 dated September 16, 2016 and amounting to Rp100,000,000,000 based on Governor Decree No. 2730 dated December 20, 2016.

In December 2017, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp444,000,000,000 based on Governor Decree No. 2308 dated December 20, 2017 which were funded from the APBD.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan sebesar Rp40.757.353.000.000, setara dengan 99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perusahaan. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 mencabut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 beserta perubahannya.

- 6) Pada tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019 dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah atas Loan Agreement IP-578 untuk kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta Fase 2 (II). Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman IP-578 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY70.021.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menerima pencairan modal yang berasal dari APBD, setoran modal dari PD Pasar Jaya dan penerusan hibah serta penerusan pinjaman masing-masing sebesar Rp1.193.500.000.000, Rp500.000.000 dan Rp16.601.676.508.052.

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT

- 1) Pada tanggal 10 Juni 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Construction Management Consulting Services* dengan Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., dan Pacific Consultants, Co. Ltd. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 4 February 2020. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Total nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY2.027.173.674 dan Rp154.939.168.557.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

On December 28, 2018 Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 9 Year 2018 regarding the capital investment in the Company amounting to Rp40,757,353,000,000 which was equivalent to 99% of the issued and fully paid share capital of the Company. Government Regulation No. 9 Year 2018 revoked Government Regulation No. 4 Year 2008 and its amendment.

- 6) *On February 13, 2019, Government of Republic Indonesia signed grant No.PHD-001/MK.7/2019 with government of DKI Jakarta related to subsidiary loan agreement on IP-578 for Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2 (II) activities. The parties agreed to continue the loan IP-578 as grant to the Government of DKI Jakarta amounted to JPY70,021,000,000.*

As of December 31, 2020, the Company has received additional paid-up capital that was funded from the APBD, capital investment from PD Pasar Jaya, grant and loan mechanism amounting to Rp1,193,500,000,000, Rp500,000,000 and Rp16,601,676,508,052, respectively.

- b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project*

- 1) *On June 10, 2013, the Company entered into a Construction Management Consulting Services agreement with Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., and Pacific Consultants, Co. Ltd. The agreement was last amended on tenth Amendment dated February 4, 2020. The agreement is valid until March 31, 2020. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY2,027,173,674 and Rp154,939,168,557.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY238.050.633 (setara dengan Rp33.297.153.190) dan Rp31.335.343.997.

- 2) Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-104). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tujuh tanggal 5 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY1.769.802.845 dan Rp1.429.712.923.647. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
- (ii) Perjanjian *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-105). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh delapan tanggal 5 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY1.345.610.067 dan Rp1.528.404.548.340. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
- (iii) Perjanjian *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123* dengan SMCC and HK JO (CP-106). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketiga belas tanggal 4 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY5.558.748.360 dan Rp1.436.306.476.717. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)*

During 2020, total consultants' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY238.050.633 (equivalent to Rp33.297.153.190) and Rp31.335.343.997.

- 2) *On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows:*

- (i) *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043 agreement with Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Jaya Konstruksi JV (CP-104). The agreement was last amended on twenty seventh Amendment dated November 5, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY1,769,802,845 and Rp1,429,712,923,647. The contract is valid until March 20, 2021.*
- (ii) *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102 agreement with Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & Jaya Konstruksi JV (CP-105). The agreement was last amended on twenty eighth Amendment dated November 5, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY1,345,610,067 and Rp1,528,404,548,340. The contract is valid until March 20, 2021.*
- (iii) *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123 agreement with SMCC and HK JO (CP-106). The agreement was last amended on thirteenth Amendment dated November 4, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY5,558,748,360 and Rp1,436,306,476,717. The contract is valid until March 20, 2021.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran Kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY13.839.844 (setara dengan Rp1.903.023.033) dan Rp15.294.671.974.

- 3) Pada tanggal 4 Juli 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* dengan Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB dan PT Inti Daya Kreasicitra. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 8 Juli 2015 dengan jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY91.284.484 dan Rp5.045.016.623.

Seluruh tagihan sesuai perjanjian diatas telah dibayarkan.

- 4) Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:
- (i) Perjanjian *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630* dengan Tokyu-Wika JO (CP-101). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tanggal 1 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY6.533.334.118 dan Rp1.511.376.503.181. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)*

During 2020, total Contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY13,839,844 (equivalent to Rp1,903,023,033) and Rp15,294,671,974.

- 3) *On July 4, 2013, the Company entered into a Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project agreement with Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB and PT Inti Daya Kreasicitra. The agreement was last amended on fourth amendment dated July 8, 2015 with total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY91,284,484 and Rp5,045,016,623.*

All invoices according to the agreement above have been paid.

- 4) *In October 2013, the Company entered into several agreements as follows:*
- (i) *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630 agreement with Tokyu-Wika JO (CP-101). The agreement was last amended on twentieth Amendment dated November 1, 2019, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY6,533,334,118 and Rp1,511,376,503,181. The contract is valid until March 19, 2021.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

4) Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)

(ii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations* dengan Tokyu-Wika JO (CP 102). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tanggal 1 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY2.540.345.561 dan Rp1.423.547.731.621. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.

(iii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211* dengan Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan belas tanggal 7 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar JPY4.175.950.529 dan Rp1.768.546.576.914. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY173.392.065 (setara dengan Rp24.560.370.202) dan Rp39.039.458.781.

5) Pada tanggal 3 Maret 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 – Rolling Stock* dengan Sumitomo Corporation. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kelima tanggal 20 Desember 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 2 April 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY11.179.106.055 dan Rp157.381.566.858.

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY374.048.572 (setara dengan Rp49.232.596.749) dan Rp6.823.007.895.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)*

4) *In October 2013, the Company entered into several agreements as follows: (continued)*

(ii) *Elevated Structures and Stations agreement with Tokyu-Wika JO (CP 102). The agreement was last amended on twentieth Amendment dated November 1, 2019, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY2,540,345,561 and Rp1,423,547,731,621. The contract is valid until March 19, 2021.*

(iii) *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211 agreement with Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). The agreement was last amended on eighteenth Amendment dated September 9, 2019, with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY4,175,950,529 and Rp1,768,546,576,914. The contract is valid until March 20, 2021.*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY173,392,065 (equivalent to Rp24,560,370,202) and Rp39,039,458,781.

5) *On March 3, 2015, the Company entered into a Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 – Rolling Stock with Sumitomo Corporation. The agreement was last amended on fifth Amendment dated March 27, 2019. The agreement is valid until April 2, 2021. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY11,179,106,055 and Rp157,381,566,858.*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY374,048,572 (equivalent to Rp49,232,596,749) and Rp6,823,007,895.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 6) Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* dengan Mitsui & Co, Ltd., Toyo Engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 17 Januari 2020. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY16.216.169.825 dan Rp1.445.890.405.882.

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY353.922.726 (setara dengan Rp49.307.359.789) dan Rp75.519.661.437.

- 7) Pada tanggal 13 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian *Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia* dengan Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan tanggal 15 November 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah (tidak termasuk PPN) sebesar JPY858.730.793 dan Rp51.483.265.054.

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY64.946.200 (setara dengan Rp9.011.794.896) dan Rp3.128.448.636.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)*

- 6) *On April 30, 2015, the Company entered into a Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107 with Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation and PT Inti Karya Persada Teknik. The agreement was last amended on tenth Amendment dated January 17, 2020. The agreement is valid until March 19, 2021. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY16,216,169,825 and Rp1,445,890,405,882.*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY353,922,726 (equivalent to Rp49,307,359,789) and Rp75,519,661,437.

- 7) *On April 13, 2016, the Company entered into a Contract for Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia with Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (Joint Venture and Association). The agreement was last amended on eighth Amendment dated November 15, 2019. The Agreement is valid until July 31, 2020. Total cost of the Contract (exclude VAT) amounted to JPY858,730,793 and Rp51,483,265,054.*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY64,946,200 (equivalent to Rp9,011,794,896) and Rp3,128,448,636.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 8) Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian *Engineering Design and Tender Assistanes Consulting Services for Phase II Section MRT System* dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 27 April 2020. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY1.483.420.571 dan Rp87.736.559.955.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY579.936.726 (setara dengan Rp80.395.622.864) dan Rp33.244.615.012.

- 9) Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 200: Jasa Konstruksi Dinding Diafragma untuk Gardu Induk Monas Proyek MRT Jakarta Fase 2 dengan PT Trocon Indah Perkasa. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar Rp21.767.900.000 (termasuk pajak).

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar Rp743.047.500.

- 10) Pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 201: Jasa Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 1- Berlokasi di Sepanjang Kp. 15K+123 hingga Kp.17+800, pada proyek Mass Rapid Transit Jakarta (Fase 2) (I) dengan Shimizu – Adhi Karya Joint Venture. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar JPY3.746.033.751 dan Rp4.038.472.467.522 (termasuk pajak).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

b. *Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)*

- 8) *On December 4, 2017, the Company entered into a Contract for Engineering Design and Tender Assistanes Consulting Services for Phase II Section MRT System with Oriental Consultants Global Co., Ltd (Joint Venture and Association). The agreement was last amended on fourth Amendment dated April 27, 2020. The Agreement is valid until May 4, 2021. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY1,483,420,571 and Rp87,736,559,955.*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY579,936,726 (equivalent to Rp80,395,622,864) and Rp33,244,615,012.

- 9) *On December 31, 2018, the Company entered into a Contract for Contract Package CP200: Diaphragm Wall Construction Services for Jakarta Monas Substation MRT Phase 2 Project. Total cost of the Contract amounted to Rp21,767,900,000 (include taxes).*

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted Rp743,047,500.

- 10) *On February 14, 2020, the Company entered into a Contract for Contract Package CP201: Design and Build of underground section – civil 1- from Kp. 15K+123 to Kp.17+800 of Mass Rapid Transit Jakarta Project (phase 2) (I). Total cost of the Contract amounted to JPY3,746,033,751 and Rp4,038,472,467,522 (include taxes)*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY775.319.374 (setara dengan Rp106.446.341.710) dan Rp737.614.263.526.

- 11) Pada tanggal 29 April 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa konsultansi: Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase 2 (I) dengan Joint Venture Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co.,Ltd., Pacific Consultants Co., Ltd., Chodai co., Ltd., Nippon Koei co., Ltd berasosiasi dengan PT Dardela Yasa Guna, PT Rayakonsult, PT Jaya Cm, PT Oriental Consultants Indonesia, PT Parentjana Djaja, PT Amythas. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah tidak melebihi sebesar JPY4.253.702.500 dan Rp322.001.873.000.

Selama tahun 2020, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY654.526.745 (setara dengan Rp88.757.262.615) dan Rp51.696.764.843.

- 12) Pada tanggal 27 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian untuk *Operation & Maintenance Consulting Services (OMCS) 2nd Stage* untuk Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project dengan Joint Venture antara Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd.; dan Nippon Koei Co., Ltd., beserta Asosiasinya. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah tidak lebih dari sebesar JPY806.941.103 dan Rp16.994.890.000

Selama tahun 2020, tidak terdapat sertifikat pembayaran yang dibayarkan ke konsultan.

Perusahaan memiliki hutang retensi sebesar 10% yang akan dibayarkan masing-masing sebesar 5% pada masa tahun pertama dan kedua *defect liability period*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo hutang retensi adalah sebesar Rp431.064.708.988 (2019: Rp480.756.470.176).

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants agreement related to MRT's project (continued)

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY775,319,374 (equivalent to Rp106,446,341,710) and Rp737,614,263,526.

- 11) On April 29, 2020, the Company entered into a Consultations Contract: Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase 2 (I) dengan Joint Venture Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co.,Ltd., Pacific Consultants Co., Ltd., Chodai co., Ltd., Nippon Koei co., Ltd berasosiasi dengan PT Dardela Yasa Guna, PT Rayakonsult, PT Jaya Cm, PT Oriental Consultants Indonesia, PT Parentjana Djaja, PT Amythas.. Total cost of the Contract amounted to JPY4.253.702.500 dan Rp322.001.873.000.

During 2020, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY654,526,745 (equivalent to Rp88,757,262,615) and Rp51,696,764,843.

- 12) On October 27, 2020, the Company entered a Contract *Operation & Maintenance Consulting Services (OMCS) 2nd Stage* untuk Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project with Joint Venture between Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd.; and Nippon Koei Co., Ltd., and its Association. Total cost of the Contract shall not exceed amounted to JPY806.941.103 dan Rp16.994.890.000

During 2020, there is no payment certificate which has been paid to the Consultant

The Company has 10% of retention payables that will be paid by 5% in the first and second year of defect liability period. As of December 31, 2020, the balance of retention payables are Rp431,064,708,988 (2019: Rp480,756,470,176).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- c. Denda keterlambatan pembayaran kepada kontraktor proyek MRT

Berdasarkan *General Conditions of Contract, FIDIC Yellow Book* edisi tahun 1999, pada klausul 20.1 *Contractor's Claim*, kontraktor dapat mengajukan notifikasi melalui *Engineer* dalam waktu tidak lebih dari 28 hari setelah kontraktor mengetahui atau, seharusnya mengetahui, terhadap keadaan atau kejadian yang mengakibatkan notifikasi tersebut.

- d. Re-ekspor atas peralatan dan mesin yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi MRT

Untuk memenuhi kebutuhan proyek, Perusahaan melakukan impor atas material, peralatan dan mesin tertentu yang terkait dengan proyek pembangunan MRT Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia. Terdapat kewajiban Perusahaan untuk melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor. Terkait atas kewajiban tersebut, Perusahaan telah mengeluarkan surat jaminan atas bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai, yang akan menjadi kewajiban sesungguhnya, apabila Perusahaan tidak melakukan re-ekspor. Selama tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- c. *Delayed payment charge to contractors of MRT's project*

Based on the contract clause 20.1 on the FIDIC General Conditions of Contract, Yellow Book Year 1999, the contractor entitled of claim, as soon as practicable, and not later than 28 days to Engineer after the contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

- d. *Re-export of the equipments and machines that have been used for MRT's project*

In order to fulfill the project needs, the Company imported certain materials, equipments and machines with MRT project phase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia. There is a liability for the Company to re-export the equipments and machines which has been imported. Related to its liability, the Company has issued its guarantee letter to cover the custom import duty to "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai", in which, the liability will be recognized if the Company failed to re-export. As of December 31, 2020, the Company has not re-exported all the equipments and machines which has been imported.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket

- 1) Pada tanggal 13 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Avabanindo Perkasa ("AP") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan operasional MRT Jakarta - Fase I. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AP wajib memberikan komisi penandatanganan perjanjian kepada Perusahaan sebesar Rp40.000.000.000. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diamortisasi sejak Perusahaan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian.

Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan dan AP sepakat untuk menyelesaikan denda ketidakpatuhan sebesar Rp23.027.897.652 dan denda tersebut telah dibayarkan oleh AP.

Pada tahun 2020, AP menyampaikan usulan relaksasi pembayaran pendapatan minimum yang dijamin tahun kerja sama ke-2. Atas usulan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah waktu pembayaran pendapatan minimum yang dijamin tahun Kerjasama ke-2 pada kuartal 1 tahun 2023 atau 1 April 2023. Kesepakatan tersebut akan dituang dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements related to non-farebox revenues*

- 1) *On December 13, 2017, the Company signed an Advertising Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa ("AP") for provide advertising services in the operational area of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 20 years from the revenue operation date.*

Based on the agreement, AP shall have an obligation to pay the Agreement signing commission to the Company amounting to Rp40,000,000,000. The fee recognized as unearned revenue and will amortize since the Company operated and during the term of the agreement.

On November 28, 2019, the Company and AP have agreed to settle the non-compliance penalty amounted to Rp23,027,897,652 and the said penalty has been paid by AP.

In 2020, AP submitted a proposal for relaxing the payment of minimum income guaranteed for the 2nd year of agreement. Based on the proposal, both parties agreed to change the guaranteed minimum income payment period in the 2nd Cooperation year in the 1st quarter of 2023 or 1 April 2023. The agreement will be stated in the Minutes of Agreement (MOA).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)
- 2) Selama tahun 2018 dan 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak ketiga dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun dengan beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

| Tanggal/ Date | Pihak Ketiga/Third Parties | Stasiun/ Station | Jangka Waktu/ Period |
|--|---|------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Dukuh Atas | 10 tahun/ 10 years |
| 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | PT Astra International Tbk | Setiabudi | 10 tahun/ 10 years |
| 11 Februari 2019/ February 11, 2019 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Istora | 10 tahun/ 10 years |
| 1 April 2019/ April 1, 2019 | PT Solusi Transportasi Indonesia | Lebak Bulus | 5 tahun/ 5 years |
| 17 Mei 2019/ May 17, 2019 | PT Bank Central Asia Tbk | Blok M | 5 tahun/ 5 years |

Nilai kontrak atas perjanjian-perjanjian diatas berkisar antara Rp16.100.000.000 sampai dengan Rp33.000.000.000 per tahun.

- 3) Selama tahun 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Retail dengan pihak ketiga dalam rangka sewa ruang dan bagi hasil usaha retail. Perjanjian tersebut berlaku untuk 2 tahun yang dimulai dari tanggal berusaha gerai. Atas perjanjian ini, pihak ketiga berkewajiban atas biaya sewa dan bagi hasil dari penjualan harian berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian, yakni antara 10% - 20%.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- e. Agreements related to non-farebox revenues (continued)
- 2) During 2018 and 2019, the Company signed the Station Naming Rights Agreement with third parties in the context of the exclusive naming rights of MRT Jakarta stations phase 1 with several parties with details as follow:

Contract value of the agreements above ranging from Rp16,100,000,000 to Rp33,000,000,000 per year.

- 3) During 2018, the Company signed the Retail Business Agreement with third parties in the context of retail business space rent and revenue sharing. The agreement is valid for 2 years after the store opening date. For these agreements, third parties obliged of rent fee and revenue sharing on daily sales based on the agreements, between 10%-20%.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 4) Selama tahun 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemesanan dan Pembayaran Digital Tiket Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga untuk kebutuhan penyediaan layanan pembayaran digital tiket berbasis *mobile application*. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak ketiga wajib membayar biaya pelaksanaan kerjasama selama jangka waktu perjanjian. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diamortisasi sejak Perusahaan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian. Detail Perjanjian Kerjasama Pemesanan dan Pembayaran Digital Tiket Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tanggal/Date

7 Oktober 2019/ *October 7, 2019*
3 Oktober 2019/ *October 3, 2019*
6 November 2019/ *November 6, 2019*
31 Oktober 2019/ *October 31, 2019*

Komisi atas pelaksanaan kerjasama atas perjanjian tersebut berkisar antara Rp15.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000 per tahun.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements related to non-farebox revenues (continued)*

- 4) *During 2019, the Company has signed the Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with third parties for provide digital ticketing payment services with mobile application. This agreement is valid for 3 years from the revenue operation date.*

Based on the agreements, third parties shall have an obligation to pay the agreement signing commission to the Company during the term of the agreement. The fee recognized as unearned revenue and will be amortized since the Company being operated and during the term of the agreement. The details of Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with third parties are as follows:

Pihak Ketiga/Third Parties

PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
PT Visionet Internasional (OVO)
PT Dompot Anak Bangsa (Gopay)

Agreement signing commission of the agreements above ranging from Rp15,000,000,000 to Rp25,000,000,000 per year.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 5) Pada tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("Jakpro") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan pada media luar ruang media pilar MRT Jakarta - Fase I. Perjanjian tersebut berlaku selama 5 tahun dimulai dari tanggal 14 Februari 2020 atau tanggal Berita Acara Pemasangan, tergantung yang tercapai terlebih dahulu.

Pada tanggal 4 Februari 2021, Perusahaan dan Jakpro menandatangani amandemen Perjanjian Kerja Sama layanan periklanan pada media luar ruang media pilar MRT Jakarta Fase 1. Dalam amandemen perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat mengubah jangka waktu kerja sama menjadi tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025.

Berdasarkan amandemen perjanjian tersebut, Jakpro wajib memberikan fee komitmen kepada Perusahaan sebesar Rp25.000.000.000.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements related to non-farebox revenues (continued)*

- 5) *On December 26, 2019, the Company signed an Advertising Services Cooperation Agreement with Jakarta Infrastruktur Propertindo ("Jakpro") for provide advertising services in the outdoor pillar media of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 5 years from February 14, 2020 or the installation report date, whichever is shorter.*

On Februari 4, 2021, the Company and Jakpro sign the Cooperation Agreement amendments of MRT Jakarta Phase 1 advertising services on outdoor pillar media. In the agreement amendments, both parties agreed to change the period of agreement from October 14, 2020 to October 13, 2025.

Based on the amendment of the agreement, Jakpro shall have an obligation to pay the commitment fee to the Company amounting to Rp25,000,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

f. Perjanjian jual beli tenaga listrik

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya untuk kebutuhan sistem operasi MRT Jakarta dengan Biaya Penyambungan (BP) listrik menurut kontrak sebesar Rp32.100.000.000. Perjanjian tersebut berlaku selama Perusahaan masih menjadi pelanggan listrik. Kewajiban bulanan pembayaran listrik dimulai pada saat Perusahaan memulai kegiatan operasional MRT Jakarta.

g. Perjanjian sewa kantor

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 23. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama dan kedua sebesar Rp250.000 per meter persegi per bulan, lalu tahun ketiga sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran dimuka setiap enam bulan.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 22. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan, lalu sewa tahun kedua dan ketiga sebesar Rp350.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran dimuka setiap enam bulan.

Pada tanggal 2 Januari 2019, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait perpanjangan masa sewa ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 21. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai kontrak sewa tahun sebesar Rp350.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran dimuka setiap enam bulan.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

f. Agreement of electricity power

On December 21, 2016, the Company signed a Purchase Agreement of Electricity Power with PT PLN (Persero) Distribution Area of Jakarta Raya to supply electricity for operational system of MRT Jakarta with the cost of installation electricity for Rp32,100,000,000. This agreement is valid as long as the Company is a customer of PT PLN (Persero). The monthly payment of the electricity begins when the Company starts MRT Jakarta operational.

g. Agreement of Office rental

On February 29, 2016, the Company signed a Lease Agreement of Office Area with PT Wisma Nusantara International related to the additional of office area for PT MRT Jakarta in Wisma Nusantara building. This agreement valid for 36 months, since March 1, 2016 until February 28, 2019, with the value of contract for first and second year of Rp250,000 per square metre per month and for the third year of Rp300,000 per square metre per month. The payment of office rent will be paid in advance every six months.

On August 28, 2017, the Company signed a Lease Agreement of Office Area with PT Wisma Nusantara International related to the additional of office area for PT MRT Jakarta in Wisma Nusantara building 22 floor. This lease agreement is valid from September 18, 2017 until December 31, 2019 with the value of contract or first year of Rp300,000 per square metre per month and for the second and third year of Rp350,000 per square metre per month. The payment of office rent will be paid in advance every six months.

On January 2, 2019, the Company signed a Lease Agreement Amendment of Office Area with PT Wisma Nusantara International related to the extension of office area for PT MRT Jakarta in Wisma Nusantara building 21 floor. This lease agreement Amendment is valid from August 17, 2019 until December 31, 2020 with the value of contract is Rp350,000 per square metre per month. The payment of office rent will be paid in advance every six months.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

g. Perjanjian sewa kantor

Pada ada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait ruang kantor PT MRT Jakarta (Perseroda) dan ruang storage di Gedung Wisma Nusantara Lantai 21, 22 dan 23. Perjanjian ini berlaku selama 30 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dengan nilai kontrak sewa ruang kantor sebesar Rp190.000 (tidak termasuk PPN) per meter persegi per bulan dan nilai kontrak sewa storage sebesar Rp170.000 (tidak termasuk PPN) per meter persegi per bulan. Pembayaran sewa ruang kantor dan sewa ruang storage seluruhnya dilakukan dimuka.

h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa

- 1) Pada tanggal 2 September 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan pihak PT Evic Mora Sugih dalam rangka Pembangunan Skybridge Interkoneksi Stasiun Asean dan CSW. Perjanjian tersebut berlaku selama 27 minggu sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp20.321.876.834 (termasuk pajak).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

g. Agreement of Office rental

On December 18, 2020, the Company signed a Lease Agreement with PT Wisma Nusantara International related to the office area for PT MRT Jakarta (Perseroda) and storage area in Wisma Nusantara building. This agreement valid for 30 months, since January 1, 2020 until June 30, 2023, with the value of contract for office rent amounted to Rp190,000 (exclude VAT) per square metre per month and the value of contract for storage rent amounted to Rp170,000 (exclude VAT) per square metre per month. The payment of office rent and storage rent will be paid in advance.

h. Agreements on procurement of goods and services

- 1) On September 2, 2019, the Company entered into an agreement for Interconnection Skybridge Construction between Asean Station and CSW with PT Evic Mora Sugih. The agreement is valid for 27 weeks from the beginning date September 16, 2019 until March 16, 2020. Total cost of the contract amounted to Rp20,321,876,834 (include tax).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa (lanjutan)
- 2) Pada tanggal 14 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan, *Pest Control*, dan Pengelolaan Limbah dengan pihak PT ISS Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp66.000.000.000 (tidak termasuk pajak).
 - 3) Pada tanggal 25 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 1 (*Elevated*) dengan pihak PT Nawakara Perkasa Nusantara. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp86.055.197.000 (tidak termasuk pajak).
 - 4) Pada tanggal 14 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 2 (*Underground*) dengan pihak PT Dutagaruda Piranti Prima. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp74.997.282.608 (tidak termasuk pajak).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- h. *Agreements on procurement of goods and services (continued)*
- 2) *On February 14, 2019, the Company signed an agreement of Cleaning, Pest Control, and Waste Management Service with PT ISS Indonesia. The agreement is valid for 3 years from the beginning date February 14, 2019 until February 13, 2022. Total cost of the contract amounted to Rp66,000,000,000 (exclude tax).*
 - 3) *On February 25, 2019, the Company signed an agreement of Security Service Package 1 (Elevated) with PT Nawakara Perkasa Nusantara. The agreement is valid for 3 years from the beginning date February 25, 2019 until February 24, 2022. Total cost of the contract amounted to Rp86,055,197,000 (exclude tax).*
 - 4) *On February 14, 2019, the Company signed an agreement of Security Service Package 2 (Underground) with PT Dutagaruda Piranti Prima. The agreement is valid for 3 years from the beginning date February 14, 2019 until February 13, 2022. Total cost of the contract amounted to Rp74,997,282,608 (exclude tax).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa (lanjutan)
- 5) Pada tanggal 25 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 3 (Depo, RSS, Kereta, dan Area Transisi) dengan pihak PT Sumber Gunadinamis. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp30.773.000.000 (tidak termasuk pajak).
- 6) Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Pengadaan Lisensi dan Jasa Implementasi Sistem SAP Tahap II dengan pihak PT Astra Graphia Information Technology. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp26.895.000.000 (termasuk pajak).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- h. *Agreements on procurement of goods and services (continued)*
- 5) *On February 25, 2019, the Company signed an agreement of Security Service Package 3 (Depo, RSS, Train, and Transition Area) with PT Sumber Gunadinamis. The agreement is valid for 3 years from February 25, 2019 until February 24, 2022. Total cost of the contract amounted to Rp30,773,000,000 (exclude tax).*
- 6) *On April 30, 2019, the Company signed a procurement agreement of SAP System Phase 2 License and Implementation Service with PT Astra Graphia Information Technology. The agreement is valid for 1 year from May 2, 2019 until May 2, 2020. Total cost of the contract amounted to Rp26,895,000,000 (include tax).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa (lanjutan)
- 7) Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan MRT *East-West Corridor Study* dengan pihak PT Egis International Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 8 bulan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp6.967.929.650 (termasuk pajak).
- 8) Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Integrated CCTV Command Centre* dengan pihak PT Belant Persada. Perjanjian tersebut berlaku selama 180 hari kerja sejak tanggal 14 Oktober 2019 atau setelah *Kick Off Meeting*, tergantung mana yang tercapai dahulu. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp17.300.000.000 (termasuk pajak).

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- h. *Agreements on procurement of goods and services (continued)*
- 7) *On December 9, 2019, the Company signed an agreement of Preparation MRT East-West Corridor Study Consultation Service with PT Egis International Indonesia. The agreement is valid for 8 months from December 9, 2019 until August 8, 2020. Total cost of the contract amounted to Rp6,967,929,650 (include tax).*
- 8) *On October 18, 2019, the Company signed a procurement agreement of Integrated CCTV Command Centre Hardware with PT Belant Persada. The agreement is valid for 180 working days from October 14, 2019 or after Kick Off Meeting, whichever is shorter. Total cost of the contract amounted to Rp17,300,000,000 (include tax).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

28. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|--------------------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Bank (Catatan 4) PT Bank DKI | 96.250.428.648 | 294.823.431.814 |
| Persentase terhadap total aset | 0,52% | 1,70% |
| Deposito berjangka (Catatan 4) PT Bank DKI | 823.093.550.032 | 384.000.000.000 |
| Persentase terhadap total aset | 4,47% | 2,21% |
| Piutang usaha (Catatan 5) PT Bank DKI | 1.565.000 | 3.775.000 |
| Persentase terhadap total aset | 0,00% | 0,01% |
| Piutang subsidi (Catatan 21) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 83.970.106.593 | 105.707.838.783 |
| Persentase terhadap total aset | 0,46% | 0,61% |
| Piutang bunga PT Bank DKI | - | 422.208.219 |
| Persentase terhadap total aset | - | 0,01% |
| Utang pajak bumi dan bangunan (Catatan 19a) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | - | 42.669.969.495 |
| Persentase terhadap total liabilitas | - | 3,15% |
| Pendapatan diterima dimuka (Catatan 17) PT Bank DKI | 825.000.000 | 825.000.000 |
| Persentase terhadap total liabilitas | 0,08% | 0,06% |

28. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Balances with related parties are as follows:

| | |
|--|--|
| Bank (Note 4) PT Bank DKI | |
| Percentage to total assets | |
| Time deposits (Note 4) PT Bank DKI | |
| Percentage to total assets | |
| Trade receivables (Note 5) PT Bank DKI | |
| Percentage to total assets | |
| Subsidy receivables (Note 21) Government of DKI Jakarta | |
| Percentage to total assets to total assets | |
| Interest receivables PT Bank DKI | |
| Percentage to total assets | |
| Land and property tax payable (Note 19a) Government of DKI Jakarta | |
| Percentage to total liabilities | |
| Unearned revenues (Note 17) PT Bank DKI | |
| Percentage to total liabilities | |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

28. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

28. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Transactions with related parties are as follows:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | | |
|--|--|-----------------|---|
| | 2020 | 2019 | |
| Pendapatan subsidi (Catatan 21) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 620.800.775.256 | 534.069.547.569 | Subsidy revenue (Note 21) Government of DKI Jakarta |
| Persentase terhadap pendapatan | 57,19% | 57,23% | Percentage to revenues |
| Pendapatan non-tiket (Catatan 21) PT Bank DKI | 5.499.400.000 | 2.475.000.000 | Non-farebox revenue (Note 21) PT Bank DKI |
| Perumda Pembangunan Sarana Jaya | 8.349.540.000 | - | Perumda Pembangunan Sarana Jaya |
| Persentase terhadap pendapatan | 01,28% | 0,27% | Percentage to revenues |
| Beban pajak bumi dan bangunan (Catatan 22) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 42.669.969.495 | 32.002.477.121 | Land and property tax expense (Note 22) Government of DKI Jakarta |
| Persentase terhadap total beban pokok pendapatan | 4,37% | 4,21% | Percentage to total cost of revenues |
| Penghasilan bunga (Catatan 24) PT Bank DKI | 28.944.780.407 | 20.834.418.818 | Interest revenue (Note 24) PT Bank DKI |
| Persentase terhadap total Pendapatan lain-lain (neto) | 92,45% | 17,24% | Percentage to other revenues (net) |

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, The Group engages in transactions with related parties. The nature of transactions and relationship with related parties are as follows:

| Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties | Hubungan/ Nature of relationship | Sifat transaksi/ Nature of transactions |
|---|---|---|
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Government of DKI Jakarta | Pemegang saham utama/Major shareholder | Subsidi dan pajak bumi dan bangunan/Subsidy and land and Property tax |
| PT Bank DKI Jakarta | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Controlled by Government of DKI Jakarta | Penempatan giro, deposito berjangka, bank untuk pengumpulan pendapatan tiket, pendapatan bunga, pendapatan diterima dimuka dan pendapatan non-tiket/Placement of current accounts, time deposits, bank for ticket collection, interest income, unearned revenues and non-farebox revenues |
| PT Jakarta Infrastruktur Propertindo | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Controlled by Government of DKI Jakarta | Kerjasama layanan periklanan/Advertising services cooperation |
| Perumda Pembangunan Sarana Jaya | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Controlled by Government Of DKI Jakarta | Jasa konsultasi konstruksi/Construction consultant service |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Kebijakan manajemen risiko keuangan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Kelompok Usaha membentuk Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Kelompok Usaha. Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko likuiditas dan risiko mata uang asing dan risiko kredit. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

a. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang usaha yang akan dibayarkan melalui penerusan pinjaman JICA.

Kelompok Usaha menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang di denominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Yen Jepang.

Kelompok Usaha memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Kelompok Usaha pada waktu yang tepat.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The financial risk management policies of the Group is made to ensure that the adequate financial resources are available for operation and business development and managing exposure to market risks (including foreign currency risk), credit risk and liquidity risk. The Group operate within defined policies approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Group established a Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division reports to the President Director.

The main risks arising from the Group's financial instruments are liquidity risk foreign currency risk and credit risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

a. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from trade payables that will be settle by JICA grant.

The Group incurs foreign currency risk on the transactions dan balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is primarily Japanese Yen.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank-bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah. Kelompok Usaha tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko dimana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Kelompok Usaha untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Kelompok Usaha kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan yang penyelesaiannya tidak menggunakan dana JICA.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati sebagai berikut:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Credit risk

Credit risk refers to the risk that the Group will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

All the cash in banks and time deposits are placed in banks with good credit rating.

Management is confident in its ability to continue to control and to maintain minimal exposure of credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts. The Group has no concentration of credit risk.

c. Liquidity risk

Liquidity risk (also known as funding risk) is a risk where the Group would be having a difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may rise from the incapability of the Group to sell assets immediately at prices close to its fair value.

Liquidity risk arises in situations where the Group struggles to obtain financing. Risk management policy on liquidity was conducted carefully to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities that not settle by JICA fund.

The following table details the Group remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

31 Desember 2020-/December 31, 2020

| | Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year | 1-5 tahun/ 1-5 years | Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years | Total/ Total | |
|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Utang usaha | 1.509.590.291 | - | - | 1.509.590.291 | Trade payables |
| Utang kontraktor | 56.945.779.020 | - | - | 56.945.779.020 | Payables to contractors |
| Beban akrual | 169.256.069.191 | - | - | 169.256.069.191 | Accrued expenses |
| Utang retensi | 431.065.205.912 | - | - | 431.065.205.912 | Retention payables |
| Uang jaminan pelanggan | - | - | 14.307.418.565 | 14.307.418.565 | Customer's security deposit |
| Total | 658.776.644.414 | - | 14.307.418.565 | 673.084.062.979 | Total |

31 Desember 2019/December 31, 2019

| | Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year | 1-5 tahun/ 1-5 years | Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years | Total/ Total | |
|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Utang usaha | 2.269.509.063 | - | - | 2.269.509.063 | Trade payables |
| Utang kontraktor | 146.818.938.125 | - | - | 146.818.938.125 | Payables to contractors |
| Beban akrual | 369.967.252.006 | - | - | 369.967.252.006 | Accrued expenses |
| Utang retensi | - | 480.756.470.176 | - | 480.756.470.176 | Retention payables |
| Uang jaminan pelanggan | - | - | 13.020.934.409 | 13.020.934.409 | Customer's security deposit |
| Total | 519.055.699.194 | 480.756.470.176 | 13.020.934.409 | 1.012.833.103.779 | Total |

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, piutang subsidi, piutang lain-lain, pendapatan yang akan diterima, utang usaha, utang kontraktor dan konsultan dan beban akrual kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

30. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying values of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position approximate their fair values.

Management has determined that the carrying values (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, subsidy receivables, other receivables, accrued revenues, trade payables, payables to contractors and consultants and accrued expenses reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22 – Definisi Bisnis. berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amandemen PSAK ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantive, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama amandemen.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

Effective beginning on or after January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22: Definition of Business, effective January 1, 2020.

This amendments PSAK were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments

Effective beginning on or after January 1, 2022

PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2022, and earlier application is permitted, but not before the entity applies PSAK 71 and PSAK 72.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGUNGKAPAN (lanjutan)**

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kakek kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan Keuangan konsolidasian Kelompok Usaha masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

**31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND
DISCLOSURES (continued)**

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, PSAK 74 will replace PSAK 62 Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.

A few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contrast to the requirement in PSAK 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:

- *A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable direct participation features (the variable fee approach).*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.*

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

32. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Kelompok Usaha, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa sampai saat ini wabah Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi Kelompok Usaha.

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler tanggal 5 Februari 2021, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Sdr. Farchad Mahfud sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

Keputusan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 47 tanggal 27 Februari 2021.

- b. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

32. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

This Covid-19 pandemic in 2020 has caused global and domestic economic slowdown. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to eradicate Covid-19 threat. The management is closely monitoring the Group's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

Nevertheless, after the consolidated financial statements date, management of the Group is of the opinion that the outbreak of the Covid-19 has no significant impact to the operational activities of the Group.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. *Based on Shareholders Circular Resolution dated February 25, 2021, the shareholders approved the appointment of Mr. Farchad Mahfud as Business Development Director.*

This decision has been notarized based on the Notary Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 47 dated February 27, 2021.

- b. *Government Regulation No. 35 Year 2021 – Job Creation Law*

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Kelompok Usaha masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode pelaporan berikutnya.

**33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Group are still evaluating the potential impacts of PP 35/2021, including the impacts on the Group consolidated financial statements for the next reporting period.

**34. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN
ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Transaksi non-kas:

**34. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF
CONSOLIDATED CASH FLOW INFORMATION**

Non-cash transactions:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, | | |
|--|--|---------------------|---|
| | 2020 | 2019 | |
| a. Penambahan aset tetap dikreditkan ke: | | | a. Addition to fixed assets credited to: |
| 1) Modal ditempatkan dan disetor penuh | 3.567.197.000.000 | 6.606.165.000.000 | 1) Issued and fully paid capital |
| 2) Modal disetor lainnya | (2.133.727.706.977) | (3.038.967.830.091) | 2) Other paid-up capital |
| 3) Uang muka kontraktor dan konsultan | (746.178.542.080) | 49.571.366.149 | 3) Contractors' and consultant advances |
| 4) Utang retensi | (49.691.264.264) | (210.516.585.140) | 4) Retentions payable |
| 5) Utang kontraktor dan konsultan | (89.873.159.105) | 132.169.546.116 | 5) Payables to contractors and consultants |
| 6) Beban akrual | (178.889.646.902) | (53.290.394.833) | 6) Accrued expenses |
| 7) Rugi selisih kurs | (19.651.482.059) | 49.866.248.693 | 7) Gain on foreign exchange |
| b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dikreditkan ke modal disetor lainnya | (3.567.197.000.000) | (6.606.165.000.000) | b. Addition to issued and fully paid capital credited to other paid-up capital |
| c. Beban keuangan dari pengukuran nilai wajar uang jaminan pelanggan | 11.125.795.657 | 11.979.065.591 | c. Finance income from measurement of fair value on the customer's security deposit |

**35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selesai disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2021.

**35. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that were completed and authorized for issued on March 22, 2021.

2020

Laporan Tahunan
Annual Report



PT MRT JAKARTA
Wisma Nusantara, 21th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA



(62)21 3906454



(62)21 3155846



info@jakartamrt.co.id



www.jakartamrt.co.id